

LKPP TAHUN 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2019



LKPP TAHUN 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

LKPP Tahun 2018 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2018 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2018 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi LKPP Terintegrasi G2 dan Sistem Aplikasi Pendukung Lainnya.
5. Mengimplementasikan *single database* dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).
6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2019
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

Ringkasan

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.943,67 triliun atau 102,58 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757,79 triliun atau 98,91 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp269,44 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,25 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (*Audited*)			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2017
Pendapatan Negara dan Hibah	**1.894,72**	**1.943,67**	**102,58**	**1.666,37**
Belanja Negara:	**2.220,65**	**2.213,11**	**99,66**	**2.007,35**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.455,32	100,06	1.265,35
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	757,79	98,91	741,99
Surplus (Defisit) Anggaran	**(325,93)**	**(269,44)**	**82,67**	**(340,97)**
Pembiayaan Neto	**325,93**	**305,69**	**93,79**	**366,62**
SiLPA (SiKPA)		**36,25**		**25,64**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138,35 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36,25 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp639,04 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2018 (*Audited*)	Tahun 2017 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**138.35**	**113,19**
B	**Penggunaan SAL**	-	-
C	**SiLPA/SiKPA**	**36.25**	**25,64**
D	**Penyesuaian SAL**	**0,64**	**(0,48)**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**175.24**	**138,35**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.325,28 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp437,87 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.877,28 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.931,05 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp57,18 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.021,88 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.917,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp750,50 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.166,97 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.407,80 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	437,87	336,81
Investasi Jangka Panjang	2.877,28	2.604,04
Aset Tetap	1.931,05	2.034,80
Piutang Jangka Panjang	57,18	47,81
Aset Lainnya	1.021,88	924,36
Total Aset	**6.325,28**	**5.947,83**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	750,50	593,44
Kewajiban Jangka Panjang	4.166,97	3.813,60
Total Kewajiban	**4.917,47**	**4.407,05**
Ekuitas	**1.407,80**	**1.540,78**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**6.325,28**	**5.947,83**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.169,15 triliun, Beban sebesar Rp2.249,59 triliun, sedangkan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145,29 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 225,73 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1	Pendapatan-LO	2.169,15	1.806,52
2	Beban	(2.249,59)	(1.991,67)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(80,43)	(185,15)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(145,29)	72,16
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**(225,73)**	**(112,98)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp208,50 triliun. Selama TA 2018 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp85,60 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp245,13 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp366,98 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp5,37 triliun dan kenaikan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,77 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi Rp240,15 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp285,15 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp92,28 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,91 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp6,21 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58,60 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp465 sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp178,62 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)

Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Saldo Awal Kas	**208,50**	**174,07**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85,60)	(132,51)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245,13)	(268,12)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366,98	426,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5,37)	9,37
Pengunaan SAL	-	-
Penyesuaian Pembukuan	0,77	(0,58)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	**31,64**	**34,42**
Saldo Akhir Kas	**240,15**	**208,50**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,28	0,21
Kas di Bendahara Penerimaan	0,09	0,10
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,91	2,84
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(6,21)	(12,20)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	-	(0,007)
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(58,60)	(65,21)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	0,33
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**178,62**	**134,57**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2018.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.540,78 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp225,73 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp91,24 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,51 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.407,80 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut

(Rp triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1	**Ekuitas Awal**	**1.540,78**	**1.566,93**
2	Surplus/Defisit LO	(225,73)	(112,98)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	91,24	84,97
4	Transaksi Antar Entitas	0,51	0,18
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	1,67
6	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**(132,97)**	**(26,14)**
7	**Ekuitas Akhir**	**1.407,80**	**1.540,78**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Pernyataan Tanggung Jawab

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2018 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

LKPP Tahun 2018 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, Mei 2019

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Halaman Opini

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi

bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 dan Nomor 71c/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota

DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 72

Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB x
HALAMAN OPINI xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GRAFIK xv
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4
III. NERACA 5
IV. LAPORAN OPERASIONAL 8
V. LAPORAN ARUS KAS 11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 13
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 14
A. PENJELASAN UMUM 14
A.1. DASAR HUKUM 14
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 14
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 50
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 55
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 77
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 77
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 78
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 107
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 112
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 119
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 119
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA 120
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA 203
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 247
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 247
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 247
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 279
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 279
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 282
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 304
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 317
INDEKS SINGKATAN 323

DAFTAR TABEL

1	Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018	18
2	Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018	19
3	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018	22
4	Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018	28
5	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017	33
6	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017	34
7	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017	34
8	Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017	36
9	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017	37
10	Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017	37
11	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017	43
12	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017	43
13	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017	47
14	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017	48
15	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2018 dan TA 2017	87
16	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017	115
17	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016	207

DAFTAR GRAFIK

1 Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 16

2 Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 17

3 Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018 21

4 Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018 22

5 Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018 23

6 Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018 24

7 Tren Laju IHSG *(End of Period)* Bulanan Januari 2017 – Desember 2018 27

8 Realisasi Rata-rata *Lifting* Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018 28

9 Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018 29

10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018 30

11 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 – September 2018 31

12 Hubungan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2018 32

13 Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia Tahun 2010 – September 2018 32

14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 – 2018 33

15 Hubungan antara Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018 33

16 Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017 39

17 Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 – 2018 48

18 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2013 – 2018 77

19 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018 78

20 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018 79

21 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 86

22 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018..... 87

23 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018..... 88

24 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018..... 95

25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018..... 119

26 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018..... 247

27 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017..... 248

28 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018..... 249

29 Komposisi Beban Operasional Tahun 2018..... 259

30 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018..... 268

31 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas..... 279

Laporan Realisasi APBN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)			TA 2017 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.618.095.493.162.000**	**1.518.789.777.151.030**	**93,86%**	**1.343.529.843.798.510**
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.579.395.493.162.000	1.472.907.964.370.352	93,26%	1.304.316.269.228.039
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	38.700.000.000.000	45.881.812.780.678	118,56%	39.213.574.570.471
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**275.427.969.415.000**	**409.320.239.488.446**	**148,61%**	**311.216.253.857.085**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	103.674.868.751.000	180.592.649.823.641	174,19%	111.132.042.413.912
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	44.695.387.920.000	45.060.521.375.969	100,82%	43.904.217.111.673
3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	B.2.1.2.3	83.753.115.091.000	128.574.010.038.218	153,52%	108.834.561.775.552
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.4	43.304.597.653.000	55.093.058.250.618	127,22%	47.345.432.555.948
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**1.196.865.400.000**	**15.564.860.239.320**	**1.300,47%**	**11.629.815.002.490**
Jumlah Pendapatan Negara (A.I + A.II + A.III+A.IV)		**1.894.720.327.977.000**	**1.943.674.876.878.796**	**102,58%**	**1.666.375.912.658.085**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.454.494.390.020.000**	**1.455.324.879.227.617**	**100,06%**	**1.265.359.428.745.519**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	365.691.526.092.000	346.890.764.906.966	94,86%	312.728.756.432.452
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	340.130.197.863.000	347.468.335.110.569	102,16%	291.459.133.344.592
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	203.879.406.594.000	184.127.627.500.274	90,31%	208.656.670.235.846
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	238.607.121.370.000	257.952.028.141.279	108,11%	216.568.022.521.345
5. Subsidi	B.2.2.1.5	156.228.125.107.000	216.883.304.115.301	138,82%	166.401.103.129.178
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.460.845.703.000	1.520.560.988.285	104,09%	5.445.667.259.156
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	81.259.761.570.000	84.318.412.919.513	103,76%	55.297.216.841.355
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	67.237.405.721.000	16.163.845.545.430	24,04%	8.802.858.981.595
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**B.2.2.2**	**766.162.576.557.000**	**757.792.938.057.379**	**98,91%**	**741.992.381.461.367**
Transfer ke Daerah	**B.2.2.2.1**	**706.162.576.557.000**	**697.933.529.448.104**	**98,83%**	**682.225.803.933.964**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1.1**	**676.602.993.371.000**	**668.643.196.262.104**	**98,82%**	**654.482.511.343.964**
Dana Transfer Umum	**B.2.2.2.1.1.1**	**490.714.921.663.000**	**495.193.618.043.420**	**100,91%**	**486.814.511.890.637**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	89.225.342.014.000	93.704.038.394.420	105,02%	88.232.197.142.637
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%	398.582.314.748.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)			TA 2017 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus	**B.2.2.2.1.1.2**	**185.888.071.708.000**	**173.449.578.218.684**	**93,31%**	**167.667.999.453.327**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	93,13%	62.104.230.254.352
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%	105.563.769.198.975
2. Dana Insentif Daerah	**B.2.2.2.1.2**	**8.500.000.000.000**	**8.230.750.000.000**	**96,83%**	**7.500.000.000.000**
3. Dana Keistimewaan DIY	**B.2.2.2.1.3**	**1.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100,00%**	**800.000.000.000**
4. Dana Otonomi Khusus	**B.2.2.2.1.4**	**20.059.583.186.000**	**20.059.583.186.000**	**100,00%**	**19.443.292.590.000**
Dana Desa	**B.2.2.2.2**	**60.000.000.000.000**	**59.859.408.609.275**	**99,77%**	**59.766.577.527.403**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**2.220.656.966.577.000**	**2.213.117.817.284.996**	**99,66%**	**2.007.351.810.206.886**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(325.936.638.600.000)**	**(269.442.940.406.200)**	**82,67%**	**(340.975.897.548.801)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**354.950.980.138.000**	**302.515.788.492.391**	**85,23%**	**386.890.801.363.738**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	-			-
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177	124,32%	4.816.530.007.277
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	183.000.000.000	163.619.880.616	89,41%	359.085.434.905
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783	86,46%	441.826.322.911.086
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara			782.313.242.271.401		726.270.982.344.698
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara			(423.914.750.726.618)		(284.444.659.433.612)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215	43,14%	648.291.571.852
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri		4.500.000.000.000	2.429.387.504.746	53,99%	1.305.055.202.247
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		(1.362.070.000.000)	(1.075.568.713.531)	78,97%	(656.763.630.395)
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(50.654.313.274.000)	(46.113.826.461.400)	91,04%	(49.254.054.561.382)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)	100,00%	(1.005.374.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%	(10.500.000.000.000)
9. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.9		5.000.000.000		

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)			TA 2017 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(29.014.341.538.000)**	**3.176.809.376.629**	**(10,95%)**	**(20.266.979.216.895)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.345.917.282.000	88.609.746.474.180	172,57%	51.726.855.339.157
a. Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	13.400.000.000.000	50.625.053.600.000	377,80%	20.947.967.337.503
b. Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.945.917.282.000	37.984.692.874.180	100,10%	30.778.888.001.654
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)	86,05%	(6.868.916.465.167)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.785.172.000.000)	(76.333.197.362.316)	109,38%	(65.124.918.090.885)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**325.936.638.600.000**	**305.692.597.869.020**	**93,79%**	**366.623.822.146.843**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	**B.2.5**		**36.249.657.462.820**		**25.647.924.598.042**



Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	**138.353.015.853.598**	**113.193.835.264.285**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	-	-
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**174.602.673.316.418**	**138.841.759.862.327**
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	819.451.289.822	(526.298.971.307)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(180.408.921.594)	37.554.962.578
Total Penyesuaian SAL		**639.042.368.228**	**(488.744.008.729)**
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**



NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	D.2.1.1.1.1	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	5.851.939.714.224	3.905.763.616.747
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	465	330.588.755.619
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	3.638.728.687.898	7.680.332.290.094
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Jumlah Kas dan Setara Kas		178.625.211.629.388	134.575.579.715.425
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	106.939.618.970	38.165.547.963
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	31.026.237.178.411	17.261.771.032.885
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	637.147.289.481	576.867.095.851
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	81.477.055.227.031	58.621.958.896.480
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	176.243.261.284.193	158.620.573.008.549
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	10.541.206.650	9.689.533.832
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	132.923.950.960	134.439.614.178
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	7.520.013.178.234	6.429.911.707.728
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	230.659.224	4.001.304
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.1.6.9	775.312.000.000	776.236.492.092
Jumlah Piutang (Bruto)		296.064.083.586.362	248.271.065.502.237
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.10	(187.387.119.210.777)	(160.417.250.319.840)
Jumlah Piutang (Bersih)		108.676.964.375.585	87.853.815.182.397
Persediaan	D.2.1.1.7	112.590.656.928.185	84.301.758.170.225
Jumlah Aset Lancar		**437.878.646.078.602**	**336.812.365.233.132**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.015.195.857.543)	(823.745.637.784)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		37.735.956.183.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	46.347.382.486.948	4.132.872.181
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.4	(303.374.618.948)	(4.132.872.181)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		46.044.007.868.000	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		83.779.964.051.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen PMN	D.2.1.2.2.1	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.427
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.743.190.882	8.325.008.679
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	507.109.135.609.757	436.354.324.393.637
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.793.502.868.015.601	2.570.112.989.389.743
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**2.877.282.832.067.532**	**2.604.046.312.794.693**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**2.675.327.726.143.973**	**2.687.012.386.941.310**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Aset Tetap		**1.931.051.040.187.638**	**2.034.803.553.929.061**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.4**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	95.661.712.269	104.817.554.622
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	163.209.394.539	261.894.714.759
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	D.2.1.4.3	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	D.2.1.4.4	-	775.312.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.5	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**60.603.046.072.955**	**50.906.493.098.191**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.6	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**57.188.754.504.406**	**47.810.448.151.143**
Aset Lainnya	**D.2.1.5**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.2	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.305.834.522.883.581**	**1.155.861.083.987.356**
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.8	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**1.021.884.513.023.392**	**924.364.674.425.620**
JUMLAH ASET		**6.325.285.785.861.570**	**5.947.837.354.533.649**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	99.881.440.679.615	44.438.234.758.803
Utang Bunga	D.2.2.1.3	63.568.707.486.877	57.638.432.861.401
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833
Utang Transfer	D.2.2.1.5	42.508.894.037.204	26.096.171.127.047
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	368.352.663.805.325	272.701.715.607.467
Unamortized Discount		(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
Unamortized Premium		78.266.476.000	34.999.374.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Unamortized Discount		(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
Unamortized Premium		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	24.856.986.958.911	17.452.254.907.564
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	280.090.169.168	33.564.572.441
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	32.878.446.202	16.494.539.212
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**750.502.434.401.484**	**593.449.429.457.947**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.2.2.1.1	5.724.587.516.213	4.414.348.818.183
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
Unamortized Discount		(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
Unamortized Premium		35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	5.326.890.009.308	9.657.081.539.263
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	154.619.584.439.818	160.704.149.324.311
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	11.627.039.378.875	28.415.009.897.486
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.452.614.959.247.770	3.145.432.769.907.560
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.2.2.2.1	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.374.379.633	24.229.125.827
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		714.360.167.566.575	668.171.498.239.202
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**4.166.975.126.814.345**	**3.813.604.268.146.762**
JUMLAH KEWAJIBAN		**4.917.477.561.215.829**	**4.407.053.697.604.709**
EKUITAS	**D.2.3**	**1.407.808.224.645.741**	**1.540.783.656.928.940**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.325.285.785.861.570**	**5.947.837.354.533.649**



Laporan Operasional

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (*Audited*)	2017 (*Audited*)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**E.2.1**				
PENDAPATAN OPERASIONAL	**E.2.1.1**				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**E.2.1.1.1**				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162	69.420.917.561.201	10,48%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1.1.2	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748	47.265.529.530.637	9,86%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834	3.006.860.045.924	17,55%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261	15.125.411.998.256	9,87%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893	(4.268.576.318.947)	(38,58%)
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200	4.410.372.767.477	12,58%
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042	2.120.869.384.863	46,67%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(27.142.816.314)	33.846.372.448	(60.989.188.762)	(180,19%
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.500.143.017.244.237**	**1.363.122.621.463.588**	**137.020.395.780.649**	**10,05%**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	**E.2.1.1.2**				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	211.849.605.126.532	135.324.531.870.897	76.525.073.255.635	56,55%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	239.499.611.090.293	137.711.638.621.387	101.787.972.468.906	73,91%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	136.947.279.857.210	100.052.858.157.571	36.894.421.699.640	36,87%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	56.528.281.085.047	48.206.459.097.560	8.321.821.987.487	17,26%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**644.824.777.159.082**	**421.295.487.747.415**	**223.529.289.411.668**	**53,06%**
PENDAPATAN HIBAH	**E.2.1.1.3**				
Pendapatan Hibah		24.183.418.585.460	22.102.029.338.827	2.081.389.246.633	9,42%
Jumlah Pendapatan Hibah		**24.183.418.585.460**	**22.102.029.338.827**	**2.081.389.246.633**	**9,42%**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**2.169.151.212.988.779**	**1.806.520.138.549.830**	**362.631.074.438.950**	**20,07%**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (*Audited*)	2017 (*Audited*)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330	37.598.245.751.915	11,99%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281	3.426.419.421.845	12,93%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489	32.078.733.437.200	22,39%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571	(4.188.593.869.242)	(10,06%)
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254	8.907.313.140.230	25,53%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621	(3.089.381.796.822)	(7,11%)
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203	27.764.651.714.419	12,79%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126	28.885.147.475.970	17,21%
Beban Hibah	E.2.1.2.9	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156	(3.925.106.270.871)	(72,08%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202	26.606.732.270.040	47,63%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265	34.545.156.333.795	4,70%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266	42.052.727.924.266	111,32%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886	27.203.950.009.246	18,78%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641	53.360.788.907	0,22%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**2.249.590.079.933.188**	**1.991.670.723.602.291**	**257.919.356.330.898**	**12,95%**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(80.438.866.944.409)**	**(185.150.585.052.461)**	**104.711.718.108.052**	**(56,55%)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	392.274.523.533	234.320.099.124	157.954.424.409	67,41%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	4.922.299.920.406	51.823.998.544.606	(46.901.698.624.200)	(90,50%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(4.530.025.396.873)**	**(51.589.678.445.482)**	**47.059.653.048.609**	**(91,22%)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (*Audited*)	2017 (*Audited*)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**E.2.2.2**				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.1**	-	5.631.521.326	(5.631.521.326)	(100,00%)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**E.2.2.2.2**	2.787.500.000	126.428.843.569	(123.641.343.569)	(97,79%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		**(2.787.500.000)**	**(120.797.322.243)**	**118.009.822.243**	**(97,69%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**E.2.2.3**				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.1**	59.843.747.196.323	192.808.566.996.268	(132.964.819.799.945)	(68,96%)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**E.2.2.3.2**	200.602.170.591.376	68.930.322.334.684	131.671.848.256.692	191,02%
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(140.758.423.395.053)**	**123.878.244.661.584**	**(264.636.668.056.637)**	**(213,63%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(145.291.236.291.926)**	**72.167.768.893.859**	**(217.459.005.185.785)**	**(301,32%)**
POS LUAR BIASA	**E.2.3**				
Pendapatan Luar Biasa	**E.2.3.1**	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	**E.2.3.2**	-		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**-**	**-**	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(225.730.103.236.335)**	**(112.982.816.158.602)**	**(112.747.287.077.733)**	**99,79%**

Laporan Arus Kas

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	32.748.454	1.216.911.547
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Total Penerimaan Perpajakan		1.518.789.777.151.030	1.343.529.843.798.510
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Total PNBP		409.028.715.779.709	311.016.765.272.576
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.943.383.353.170.059**	**1.666.176.424.073.576**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452
2. Belanja Barang Dan Jasa	F.2.1.2.2	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	59.859.408.609.275	59.766.577.527.403
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**2.028.990.189.784.722**	**1.798.695.139.971.040**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(85.606.836.614.663)**	**(132.518.715.897.464)**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	291.523.708.737	199.488.584.509
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	163.619.880.616	359.085.434.905
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	-	-
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	775.312.000.001	735.156.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**1.230.455.589.354**	**1.293.730.019.414**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	15.000.000.000.000	10.500.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	5.530.000.000.000	5.600.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**246.362.768.961.674**	**269.416.098.797.228**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(245.132.313.372.320)**	**(268.122.368.777.814)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.054.687.737.176	4.081.374.007.277
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	5.000.000.000	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**877.412.063.987.503**	**783.384.266.893.379**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885
3. Pengembalian Pinjaman	F.2.3.2.3	9.099.739.735.235	6.868.916.465.167
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**510.423.256.537.700**	**357.095.257.620.059**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**366.988.807.449.803**	**426.289.009.273.320**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(5.378.953.624.562)**	**9.371.459.675.688**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**30.870.703.838.258**	**35.019.384.273.730**
Koreksi Pembukuan		775.775.692.984	(589.976.797.589)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	**31.646.479.531.242**	**34.429.407.476.141**
SALDO AWAL KAS	F.1.1	**208.506.122.640.283**	**174.076.715.164.142**
SALDO AKHIR KAS		**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**
Kas di Bendahara Pengeluaran		**285.150.273.469**	**210.828.164.140**
Kas di Bendahara Penerimaan		**92.280.796.378**	**105.738.412.756**
Kas Lainnya Dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan		**2.911.840.057.154**	**2.845.838.264.767**
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		**(6.215.489.058.582)**	**(12.204.408.488.386)**
Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan		**-**	**(7.391.778.396)**
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		**(58.601.172.611.021)**	**(65.211.736.255.835)**
Kas Transito (Kiriman Uang)		**465**	**330.588.756.091**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	**178.625.211.629.388**	**134.575.579.715.420**



Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
EKUITAS AWAL	G.1	**1.540.783.656.928.940**	**1.566.931.752.006.649**
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	**(225.730.103.236.335)**	**(112.982.816.158.602)**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	273.314.147.911	11.292.013.385
Penggunaan SAL	G.3.2	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.3	1.501.069.710.656	473.817.522.854
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.4	6.005.920.659.013	5.823.271.175.506
Revaluasi Aset Tetap	G.3.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.6	(6.758.324.262.623)	76.515.960.269.354
Revaluasi Aset BUMN	G.3.7	-	(2.171.167.258.138)
Koreksi Lainnya	G.3.8	91.219.517.945.695	4.317.975.497.496
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**92.241.498.200.652**	**84.971.149.220.457**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	**513.172.752.484**	**184.315.553.360**
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	**-**	**1.679.256.307.076**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (G.2+G.3+G.4+G.5)	G.6	**(132.975.432.283.199)**	**(26.148.095.077.709)**
EKUITAS AKHIR (G.1 +G.6)	G.7	**1.407.808.224.645.741**	**1.540.783.656.928.940**

Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global Tahun 2018 diperkirakan tumbuh 3,7 persen

Krisis keuangan global (*Global Financial Crisis*/GFC) di tahun 2008-2009 memberikan dampak yang cukup mendalam pada perekonomian dunia. Sejak saat itu, secara umum tingkat pertumbuhan berada dalam tren pelemahan, yang diikuti oleh perlambatan perdagangan internasional serta investasi yang menjadi faktor rendahnya produktivitas. Dalam rangka mengatasi dampak GFC, dalam kurun waktu 2008-2016, perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Zona Euro mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi longgar seperti stimulus fiskal, penurunan suku bunga acuan, hingga penerapan program pembelian aset oleh bank sentral. Meskipun berbagai langkah kebijakan ekspansif telah ditempuh, namun proses pemulihan relatif berjalan lambat karena dampak GFC yang dalam pada investasi dan perdagangan, serta hadirnya berbagai tantangan lain seperti krisis utang di kawasan Eropa, perubahan struktur ekonomi Tiongkok (*economic rebalancing*), berakhirnya era *boom* komoditas, dan ketegangan geopolitik.

Tahun 2017 merupakan momentum positif pemulihan ekonomi global yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan di lebih dari separuh ekonomi dunia, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas. Meski demikian, akeselerasi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berlanjut pada tahun 2018 tertahan oleh berbagai tantangan seperti pengetatan likuiditas akibat normalisasi kebijakan moneter AS serta tekanan perang dagang. Hal tersebut membuat IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan

ekonomi global dalam *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada Januari 2019. Berdasarkan WEO *update* bulan Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 diperkirakan sebesar 3,7 persen lebih rendah 0,2 persen dibandingkan dengan proyeksi WEO *update* Juli 2018 dan tetap pada level yang sama pada WEO *update* Oktober 2018. Penurunan proyeksi pertumbuhan global tersebut karena meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global sebagai konsekuensi perang dagang setelah langkah pemerintah AS mengumumkan tarif impor sebesar 200 miliar dolar AS dari Tiongkok. Risiko perang dagang yang semakin meningkat juga berkontribusi pada penurunan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2018 dari 4,2 persen pada WEO *Update* Oktober 2018 menjadi 4,0 persen pada WEO *update* bulan Januari 2019. Dengan demikian, pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi global tahun ini didukung oleh akselerasi pertumbuhan baik pada kelompok negara maju maupun berkembang, dengan AS yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan negara maju. Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,9 persen (WEO *update* bulan Januari 2018), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang cukup signifikan tahun ini antara lain didukung oleh kebijakan penurunan tarif pajak secara signifikan (dari 35 persen menjadi 21 persen). Kinerja ekonomi AS yang baik juga ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang berada pada level terendah dalam 50 tahun terakhir. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi kelompok Zona Euro diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 2017 menjadi 1,8 persen di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian di Jerman dan Perancis, serta ketegangan politik di Italia sehingga membebani permintaan domestik. Di wilayah Asia, pertumbuhan ekonomi Jepang melambat dari 1,9 persen di tahun 2017 menjadi 0,9 persen di tahun 2018 akibat melemahnya investasi dan konsumsi swasta serta bencana alam di tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dari 6,9 persen di tahun 2017 menjadi 6,6 persen di tahun 2018 karena pengetatan sektor keuangan dan efek negatif dari perang dagang dengan AS. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan meningkat dari 6,7 persen pada tahun 2017 menjadi 7,3 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai karena meningkatkannya risiko ketidakpastian global. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain: (i) kebijakan proteksionisme dan perpajakan AS; (ii) perang dagang AS dengan Tiongkok; (iii) keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global; dan (iv) situasi geopolitik yang makin memanas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 sebesar 5,17 persen (yoy): Momentum Pertumbuhan

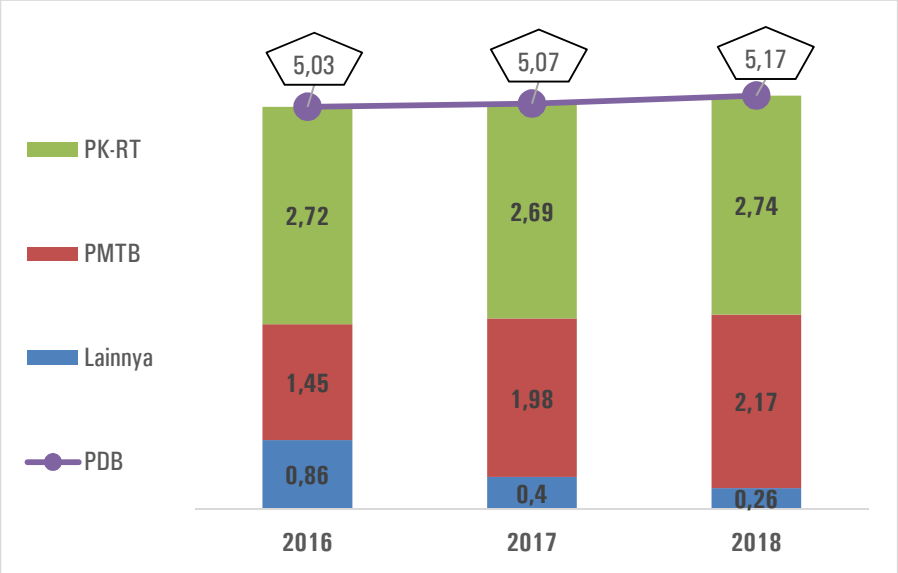
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Hal tersebut mengindikasikan perekonomian domestik masih relatif meningkat stabil di tengah kondisi ketidakpastian global yang bersumber dari isu perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), serta kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Berdasarkan *Asian Development Outlook* (ADO) 2018 *Supplement* bulan

Ekonomi Domestik Berlanjut di Tengah Dinamika Perekonomian Global

Desember 2018, di antara negara ASEAN-5, Indonesia bersama Thailand mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, Singapura, Malaysia, dan Filipina mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Kinerja pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stabil, serta investasi dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Dari sisi produksi, capaian pertumbuhan positif sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan juga mencerminkan perekonomian domestik yang kokoh.

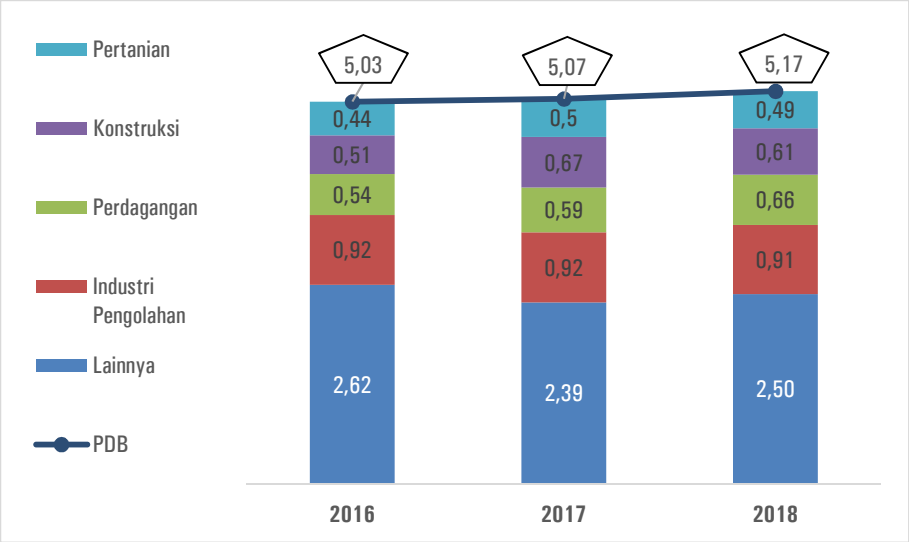
Sepanjang tahun 2018, perekonomian Indonesia juga mendapat pengakuan yang positif dari dunia internasional. Pengakuan tersebut berasal dari setidaknya lima Lembaga rating dunia yang memberikan rating *investment grade* bagi Indonesia. Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Indeks*) Indonesia juga mengalami perbaikan dari posisi 47 pada tahun 2017 menjadi 45 pada tahun 2018 dari 140 negara didunia.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 menurut Pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26 persen. Sumber pertumbuhan menurut pengeluaran sebagaimana pada grafik 1 berikut.



Grafik 1. Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Lapangan Usaha berasal dari Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,66 persen; Konstruksi sebesar 0,61 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,49 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,50 persen. Grafik sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut.



Grafik 2. Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sebagai komponen terbesar pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05 persen ditopang oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman yang mampu tumbuh 5,13 persen, sejalan dengan tingkat harga yang stabil, terutama harga kebutuhan pokok. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini ditandai oleh peningkatan beberapa indikator konsumsi seperti penjualan eceran, mobil penumpang dan motor, serta konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kinerja konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh tinggi sebesar 9,08 persen. Hal ini didorong dengan telah dimulainya rangkaian pemilihan umum legislatif dan Presiden 2019 serta tingginya aktivitas sosial terutama terkait bencana alam yang menjadi pendorong pertumbuhan komponen LNPRT.

Konsumsi Pemerintah juga tumbuh cukup tinggi sebesar 4,80 persen, sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 yang meningkat dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2017. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja lain-lain terkait dengan komponen dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam serta kenaikan dana cadangan subsidi. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan hingga 10,92 persen terutama didorong oleh adanya perluasan pemberian gaji ke-13. Belanja barang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 19,22 persen antara lain didorong oleh adanya beberapa *event* internasional yang diselenggarakan pada tahun 2018 misalnya pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta dan Palembang, *Asian Para Games* di Jakarta, serta *Annual Meetings* World Bank – IMF di Bali.

Dari sisi investasi, PMTB tumbuh 6,67 persen, lebih tinggi dari tahun 2017. Seluruh komponen investasi tumbuh positif, dimana komponen mesin perlengkapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,54 persen, sejalan dengan peningkatan impor barang modal seperti impor mesin dan alat angkutan. Kinerja investasi bangunan juga memberikan dorongan bagi pertumbuhan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur. Hal ini terkonfirmasi oleh adanya kenaikan konsumsi semen dalam negeri serta pertumbuhan sektor konstruksi yang turut meningkat.

Dari sisi perdagangan internasional, defisit neraca perdagangan relatif dapat dikendalikan, dengan pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,48 persen dan 12,04 persen. Ekspor tumbuh terbatas, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih lemahnya permintaan dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Jepang. Hal ini karena produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang mempunyai tingkat elastisitas permintaan yang rendah terhadap harga.

Di sisi lain, komponen impor relatif tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen impor barang, baik barang konsumsi, barang modal, maupun bahan baku. Impor jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan jasa angkutan untuk kegiatan ekspor dan impor, serta peningkatan minat wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	4,94	5,05
Konsumsi LNRT	6,64	6,93	9,08
Konsumsi Pemerintah	(0,14)	2,13	4,80
PMTB	4,47	6,15	6,67
Ekspor	(1,66)	8,91	6,48
Impor	(2,41)	8,06	12,04
PDB	5,03	5,07	5,17

-perubahan inventori dan diskrepansi statistik tidak disajikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi produksi, secara umum kinerja sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan tumbuh relatif stabil. Sektor Industri Pengolahan masih bergerak di bawah ekpektasi dengan hanya tumbuh 4,27 persen. Kinerja tersebut sedikit melambat dibandingkan kinerja tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan beberapa kelompok industri seperti industri pengilangan migas, kimia, dan farmasi, serta barang logam dan elektronik. Sementara itu beberapa kelompok industri nonmigas seperti tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan mampu tumbuh meningkat didukung tingginya permintaan baik di dalam maupun luar negeri (ekspor).

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih relatif stabil dengan tumbuh 3,91 persen. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan (hortikultura) terutama pada jenis buah musiman yang mengalami puncak panen. Selain itu, kelompok peternakan juga berkontribusi positif sejalan dengan peningkatan permintaan hewan kurban pada masa Hari Raya Idul Adha. Di sisi lain, kelompok perkebunan kembali tumbuh melambat, terutama diakibatkan oleh kinerja ekspor minyak kelapa sawit yang melambat. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada kelompok perikanan tangkap akibat aktivitas produksi nelayan yang terhambat oleh cuaca yang buruk dan gelombang laut yang tinggi.

Sektor Perdagangan mencatat peningkatan pertumbuhan, yakni sebesar 4,97 persen. Kinerja pertumbuhan sektor ini didukung oleh peningkatan pada perdagangan eceran dan perdagangan kendaraan bermotor, serta sejalan dengan tingginya aktivitas ekspor – impor.

Sektor lainnya yang mencatat kinerja positif adalah Sektor Pertambangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kinerja Sektor Pertambangan mampu tumbuh positif ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi dan ekspor batubara dan mineral logam (khususnya komoditas mineral tembaga dan emas). Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 7,02 persen relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,06 persen seiring dengan peningkatan kinerja layanan pemerintah.

Tabel 2. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018(persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,66	2,16
Industri Pengolahan	4,26	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	1,54	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	4,60	5,46
Konstruksi	5,22	6,80	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,46	4,97
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,49	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,39	5,66
Informasi dan Komunikasi	8,88	9,63	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,47	4,17
Real Estate	4,69	3,66	3,58
Jasa Perusahaan	7,36	8,44	8,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	2,06	7,02
Jasa Pendidikan	3,84	3,70	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	6,84	7,13
Jasa lainnya	8,01	8,73	8,99
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	19,06	13,33	10,58
PDB	5,03	5,07	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi kewilayahan, seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif. Aktivitas manufaktur dan perdagangan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan di wilayah Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan wilayah Maluku Papua masih relatif tinggi sebesar 6,99 persen terkait dengan ekspor mineral logam yang masih tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, wilayah Bali Nusa Tenggara berangsur membaik pasca gempa sehingga pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,68 persen. Secara struktur ekonomi, komposisi dan kontribusi masing-masing wilayah tidak banyak mengalami perubahan, dimana wilayah Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi pertumbuhan PDB terbesar yakni masing-masing sebesar 58,48 persen dan 21,58 persen.

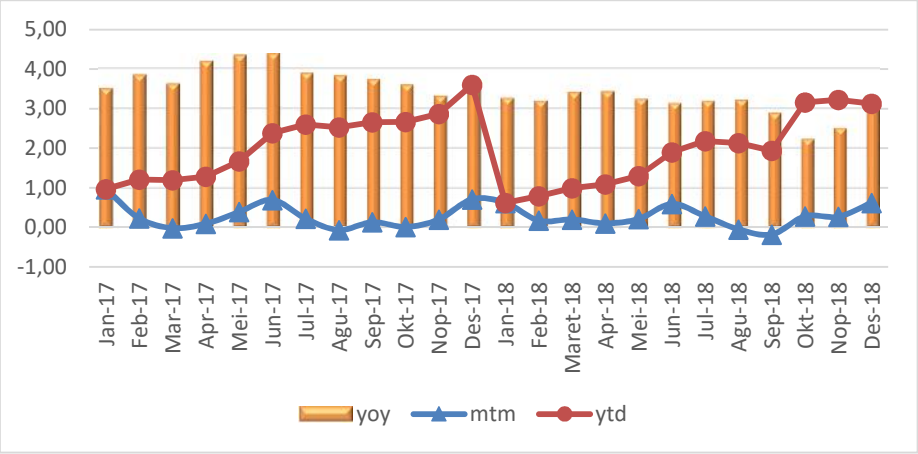
Tingkat Laju Inflasi Desember tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Sepanjang tahun 2018, laju inflasi mencapai 3,13 persen. Nilai tersebut relatif masih berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi APBN tahun 2018 sebesar 3,5 persen dan di bawah tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen. Inflasi sepanjang tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food)* sedangkan inflasi komponen inti (*core inflation*) dan harga diatur Pemerintah (*administered prices*) relatif terjaga selama tahun 2018.

Secara kumulatif, inflasi komponen harga bergejolak hingga Desember mencapai 3,39 persen. Tekanan pada komponen harga bergolak terutama terjadi pada awal tahun 2018 akibat tingginya harga beras yang disebabkan tingginya permintaan. Namun demikian, seiring dengan perbaikan faktor cuaca pada bulan-bulan berikutnya, masuknya musim panen, serta kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pasokan bahan pangan, laju inflasi pada komponen harga bergejolak berangsur-angsur berkurang, bahkan mengalami deflasi secara bulanan pada bulan April tahun 2018 sebesar 0,29 persen. Memasuki bulan Mei, komponen harga bergejolak kembali mengalami tekanan terutama akibat peningkatan harga telur dan daging ayam ras. Tekanan inflasi komponen ini terus berlanjut hingga bulan Juni sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Tekanan inflasi pangan juga sedikit meningkat di bulan Juli akibat kenaikan harga daging dan telur ayam ras, kemudian mereda (normalisasi harga) hingga terjadi deflasi pada bulan Agustus – September. Deflasi yang terjadi secara bulanan tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya panen komoditas hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang.

Sementara itu, laju inflasi komponen harga diatur pemerintah masih dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2018, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,36 persen lebih rendah dibandingkan Desember 2017 tahun sebelumnya yang mengalami inflasi mencapai 8,70 persen. Rendahnya laju inflasi komponen harga diatur pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan tarif listrik. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 2018, komponen inti relatif stabil pada kisaran 3 persen meskipun di tengah terjadinya pelemahan Rupiah. Hingga Desember tahun 2018, inflasi yang berasal dari komponen inti mencapai 3,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Tren inflasi bulanan dan tahunan selama Januari tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2018 sebagaimana pada grafik 3 berikut.



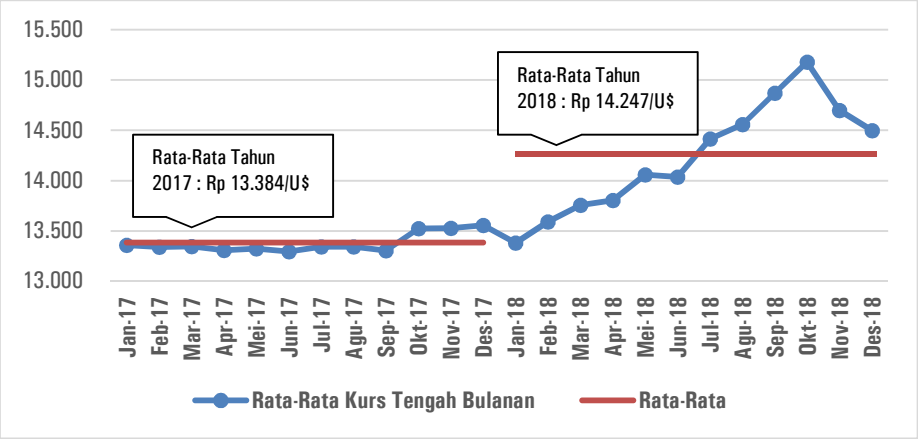
Grafik 3. Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2018 sebesar Rp14.247 per dolar AS

Selama tahun 2018, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.247 per dolar AS, mengalami depresiasi jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami depresiasi yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (*a new normal*) yang dipengaruhi oleh dampak arah kebijakan di AS yang disebabkan oleh kecenderungan peningkatan laju inflasi serta penurunan tingkat pengangguran di AS. Dengan membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut, Bank Sentral AS (Federal Reserve) melanjutkan normalisasi kebijakan moneter, yaitu rencana meningkatkan tingkat suku bunga acuan atau *Fed Fund Rate* (FFR) sebanyak 3 sampai 4 kali pada tahun 2018 dan telah dimulai pada bulan Maret 2018 yang naik menjadi 1,5-1,7 persen. Membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut juga menyebabkan meningkatnya *yield US Treasury Bonds* yang telah melewati 3 persen pada bulan April 2018 atau merupakan *yield* tertinggi sejak tahun 2013, sehingga mempengaruhi persepsi para investor untuk menarik dananya di luar untuk kembali ke pasar AS. Selain itu, kekhawatiran pasar juga terjadi akibat kebijakan perdagangan Presiden Trump terkait pengenaan tarif impor atas beberapa barang yang masuk AS yang berdampak pada terjadinya perang dagang dengan Tiongkok.

Nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan pada level terendahnya di bulan Oktober 2018 mencapai Rp15.253 per dolar AS. Rupiah terkoreksi 6,89 persen secara *point to point* dari Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp14.481 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2018. Penguatan nilai dolar AS tidak hanya terjadi terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga terjadi secara meluas *(broad based)* terhadap hampir semua nilai tukar mata uang negara lain di dunia. Pelemahan rupiah yang terjadi di tahun 2018 relatif moderat dibandingkan dengan nilai depresiasi yang terjadi pada hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang AS dengan Tiongkok. Nilai tukar rupiah masih jauh lebih baik dari negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan.



Grafik 4. Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018

Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2018 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2018 secara keseluruhan menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali. Defisit neraca transaksi berjalan mampu dijaga nilainya dalam batas yang aman. Defisit transaksi berjalan sebesar 31,1 miliar dolar AS atau 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto. Terjaganya neraca transaksi berjalan tidak terlepas dari upaya pemerintah menjalankan sejumlah bauran kebijakan antara lain (1) melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategis nasional; (2) implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar; serta (3) melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Sementara itu, Neraca Transaksi Modal dan Finansial cukup menggembirakan dengan mencatat surplus secara kumulatif sebesar 26,04 miliar dolar AS meskipun pada saat yang sama menghadapi ketidakpastian global yang tinggi. Hal tersebut karena masih terjaganya persepsi positif investor terhadap iklim investasi di Indonesia sehingga mampu mendorong aliran dana masuk ke Indonesia, di tengah terbatasnya likuiditas di pasar keuangan *emerging market*. Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2018 dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial menghasilkan nilai akumulasi sebesar defisit 7,1 miliar dolar AS.

Tabel 3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018 (miliar dolar AS)

Uraian	2016	2017	2018
Transaksi Berjalan	(16,95)	(16,20)	(31,06)
Transaksi Modal	0,41	0,46	0,93
Transaksi Finansial	29,31	28,69	25,11
Selisih Perhitungan Bersih	(0,31)	(0,95)	(1,27)
Neraca Keseluruhan	12,09	11,59	(7,13)
Transaksi Berjalan (% thd PDB)	(1,82)	(1,60)	(2,98)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Akumulasi nilai ekspor sebesar 180,22 miliar dolar AS dan impor sebesar 188,71

Nilai total ekspor Indonesia secara kumulatif pada periode Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 180,22 miliar dolar AS atau meningkat 6,74 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu senilai 168,83 miliar dolar AS. Peningkatan nilai total ekspor ini dipengaruhi oleh kenaikan ekspor migas menjadi 17,40 miliar dolar AS atau meningkat 10,55

miliar dolar AS sepanjang Januari-Desember 2018

persen dari senilai 15,74 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor nonmigas menjadi sejumlah 162,81 miliar dolar AS atau meningkat 6,36 persen dari senilai 153,08 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.

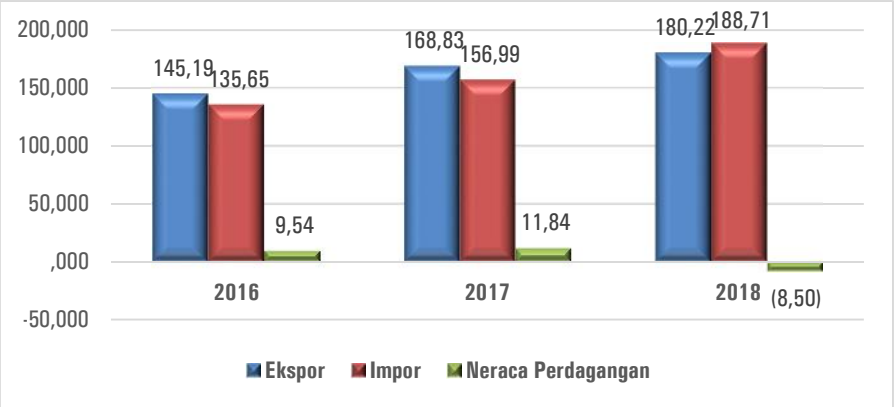
Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, volume ekspor Indonesia secara kumulatif pada rentang Januari – Desember tahun 2018 mengalami peningkatan. Total volume ekspor Indonesia selama Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 609,73 juta ton atau meningkat sebesar 11,70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 545,85 juta ton. Dari sisi ekspor nonmigas, volume ekspor tercatat sebesar 571,86 juta ton atau meningkat sebesar 13,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 503,34 juta ton. Sedangkan dari sisi migas, volume ekspor mengalami penurunan sebesar 10,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Selanjutnya, nilai impor Indonesia pada Januari – Desember 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 20,21 persen dari 156,99 miliar dolar AS pada periode Januari – Desember tahun 2017 menjadi 188,71 miliar dolar AS. Peningkatan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing 22,83 persen dan 19,73 persen.

Lebih lanjut, kenaikan nilai impor secara kumulatif juga selaras dengan peningkatan volume impor Indonesia selama rentang waktu Januari – Desember 2018. Volume impor Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2018 tercatat sebesar 171,72 juta ton atau lebih tinggi 6,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 160,75 juta ton. Peningkatan volume impor sebagian besar disumbang oleh sektor nonmigas sebesar 10,98 persen. Sedangkan, sektor migas mengalami penurunan sebesar 2,29 persen.

Defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi antara lain karena dipicu oleh peningkatan impor karena adanya peningkatan permintaan domestik terhadap barang modal dan bahan baku, khususnya untuk menopang kinerja pertumbuhan sektor sekunder. Lebih lanjut, kinerja pertumbuhan impor tersebut ditopang oleh kenaikan impor barang modal yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.

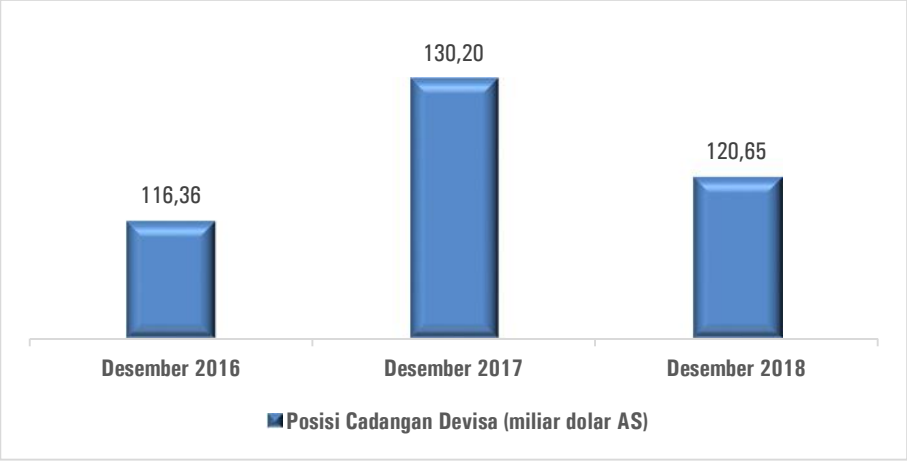
Grafik 5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018 (miliar dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan Devisa diatas standar kecukupan internasional menjadi 120,65 miliar dolar AS pada Desember 2018

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2018 sebesar 120,65 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.



Grafik 6. Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018 (miliar dolar AS)
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Cadangan devisa pada tahun 2018 antara lain digunakan sebagai alat intervensi pemerintah dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi fluktiasi pasar keuangan global. Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap tumbuh, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

BI 7-day RR Rate Desember tahun 2018 naik menjadi 6,00 persen

Selama kurun waktu Januari – Desember 2018, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI *7-day* RR *Rate*) dari 4,25 persen menjadi 6,00 persen. Langkah tersebut ditempuh Bank Indonesia untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan konsisten dengan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman sehingga dapat memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Perkembangan Peringkat Utang (*Soverign Rating*) Indonesia

Konsistensi peningkatan peringkat *sovereign rating* Indonesia

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mendapatkan kategori layak investasi *(investment Grade)* dari 5 lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch, Standard & Poor's, Japan Credit Rating Agency, dan Rating and Investment). Pencapaian ini merupakan pencapaian yang besar karena merupakan gambaran pengakuan perbaikan perekonomian. Selain itu, peringkat *Investment Grade* Indonesia diberikan oleh Standard & Poor's (S&P) terakhir pada tahun 1997, atau sekitar 21 tahun yang lalu.

Tren positif perbaikan peringkat utang Indonesia ini pun berlanjut ke tahun 2018. Beberapa lembaga pemeringkat internasional melanjutkan optimisme mereka terhadap Indonesia melalui peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi satu tingkat di atas batas bawah *Investment Grade*. Diawali dengan Fitch pada 20 Desember 2017, lalu Japan Credit

Rating Agency (JCR) pada 12 Februari 2018, Rating and Investment (R&I) pada 7 Maret 2018, dan Moody's pada 13 April 2018. Dalam kondisi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian global, peningkatan peringkat utang ini memberikan dorongan positif atas perekonomian Indonesia. Sementara itu, pada 31 Mei 2018 S&P telah mengafirmasi posisi rating Indonesia pada BBB- dengan *outlook stable.*

Perbaikan dalam struktur ekonomi maupun sisi penyusunan kebijakan Indonesia menjadi salah satu dasar perbaikan penilaian lembaga pemeringkat terhadap Indonesia. Fitch mengapresiasi ekonomi Indonesia yang menunjukan stabilitas meskipun dihadapkan dengan tekanan eksternal. R&I menyatakan bahwa perbaikan daya tahan perekonomian Indonesia terlihat dari terus meningkatnya cadangan devisa dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Menurut Moody's, pencapaian perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari komitmen dan koordinasi yang produktif antar institusi domestik dalam menjaga sinergi, kredibilitas, dan efektifitas kebijakan. Lebih jauh, JCR mengapresiasi upaya pemerintah dalam menstimulus investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong pembangunan infrastruktur.

Dari sisi penyusunan kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan terus menjaga kredibilitas dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara faktual, apabila dibandingkan dengan negara berperingkat utang sebanding *(peer countries)*, kondisi fiskal Indonesia relatif lebih baik dengan defisit dan tingkat utang terus dijaga pada tingkat moderat. Persentase utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB (2017: 28.98 persen) merupakan salah satu yang terendah diantara *peer countries*[*] (2017: India 45,46 persen; Filipina: 42.09 persen; Italia: 131,86 persen). Pemerintah telah berhasil mengelola pengaruh gejolak kondisi global untuk tidak menyebabkan pelebaran defisit yang berlebihan. Pencapaian sisi fiskal Indonesia, khususnya mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, telah diapresiasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Fitch secara khusus menyebutkan bahwa disiplin pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen telah teruji.

Dampak Peningkatan Peringkat Utang terhadap Perekonomian Indonesia

Peningkatan peringkat utang memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan investor. Semakin baik peringkat dari penerbit (*issuer*) suatu instrumen, maka semakin tinggi juga tingkat keyakinan dari investor untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Penilaian dari lembaga pemeringkat yang terstandarisasi menjadi indikator yang *comparable* dari *issuer* instrumen keuangan, termasuk dari sektor publik (*sovereign issuer*). Hal ini terlebih berlaku kepada investor yang memiliki keterbatasan data, informasi, dan sumber daya yang cukup untuk menganalisa suatu instrumen pasar keuangan (*less-informed investors*). Bagi *less-informed investors*, peringkat penerbit instrumen menjadi indikator dini atas risiko gagal bayar dari instrumen yang diterbitkan. Keberhasilan Indonesia, sebagai *sovereign issuer*, masuk dalam kategori *Invesment Grade*, memberikan potensi peningkatan kepercayaan *less-informed investor* untuk berinvestasi pada instrumen investasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan potensi masuknya investor-investor baru kepada pasar keuangan Indonesia.

Perbaikan peringkat utang Indonesia memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesehatan APBN. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia, sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan peringkat utang, maka imbal hasil *(yield)* yang ditawarkan oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik untuk pembiayaan APBN maupun *refinancing*, dapat ditekan seefisien mungkin. Dengan beban bunga pemerintah yang semakin ringan, maka ruang fiskal yang semakin lebar dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif (pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta upaya pengentasan kemiskinan). Upaya peningkatan produktivitas APBN juga tercermin dari menurunnya tingkat

keseimbangan primer pada empat tahun terakhir (**Keseimbangan primer: 2015: -1,24; 2016: -1,01; 2017: -0,92 persen; 2018: -0,08 persen**).

Tantangan Perekonomian Indonesia

Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang besar dalam hal peningkatan peringkat utang. Dalam pandangan beberapa lembaga pemeringkat, penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia yang masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara sebanding *(peer countries)* merupakan salah satu faktor yang harus terus diperbaiki. Struktur perekonomian Indonesia yang mempunyai keterkaitan besar kepada komoditas juga memiliki ruang untuk perbaikan mengingat adanya kekhawatiran adanya kerentanan apabila terjadi goncangan pada harga atau permintaan komoditas dunia. Walaupun lembaga pemeringkat telah memberikan apresiasi positif terhadap upaya reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, konsistensi pelaksanaan reformasi ini juga menjadi faktor yang menjadi perhatian para lembaga pemeringkat.

* India, Filipina, dan Italia merupakan *peer countries* Indonesia menurut Moody's dan Fitch.

Sumber: Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan Januari-Desember tahun 2018 berhasil dijaga pada level di bawah target APBN menjadi sebesar 5,0 persen

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Selama Januari – Desember tahun 2018, realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan lebih rendah dari target APBN 2018. Hingga akhir Desember 2018, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,00 persen, atau lebih baik di bawah target APBN 2018 yang sebesar 5,20 persen.

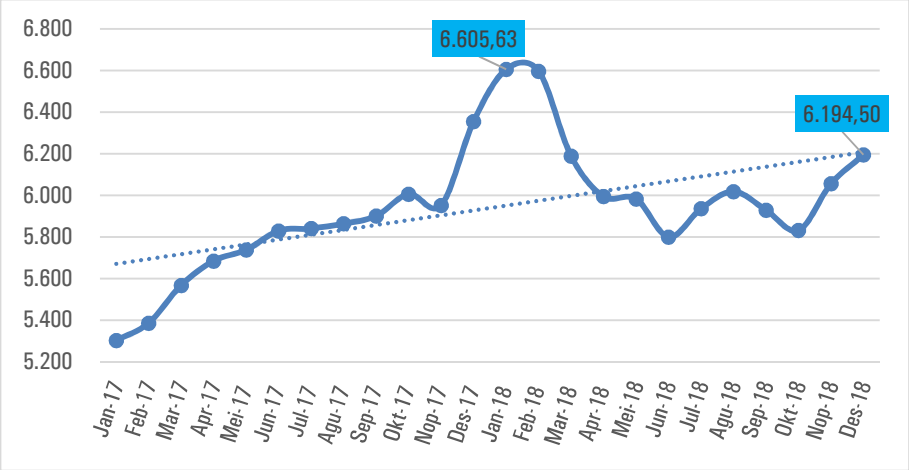
Lelang SPN 3 bulan sepanjang Januari – Desember tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor meski diikuti oleh maraknya aksi jual investor asing. Maraknya aksi jual investor asing tersebut terutama disebabkan oleh pernyataan Gubernur baru The Fed, Jerome Powell, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan lebih agresif pada tahun 2018 seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS yang didorong solidnya pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi AS yang lebih cepat sehingga memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor asing di Indonesia. Sejak triwulan II tahun 2018, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali menunjukkan tren peningkatan yang disebabkan kenaikan imbal hasil surat utang AS (US *Treasury*) terutama tenor 10 tahun yang mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir dan lonjakan harga minyak mentah dunia.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun mengalami kenaikan 168 bps

Selaras dengan kondisi pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Pada rentang Januari – Desember tahun 2018, *yield* SBN 10 tahun tercatat naik sebesar 168 bps dari 6,32 persen pada akhir tahun 2017 menjadi 8,00 persen pada akhir bulan Desember 2018. Fluktuasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed yang mendorong kenaikan *yield United State Treasury* (UST) serta tren kenaikan *yield* secara global.

Sampai dengan akhir Desember 2018 IHSG mengalami koreksi 161 poin (2,54 persen) menjadi 6.194,50

Sampai dengan akhir tahun 2018, aksi jual investor asing masih membayangi pasar bursa saham Indonesia. Aksi jual tersebut disebabkan oleh kenaikan imbal hasil surat utang AS (*US Treasury*) dan ketidakpastian perekonomian global. Akibatnya IHSG mengalami koreksi sebesar 161 poin dari posisi akhir Desember 2017 sebesar 6.355,65 dan ditutup diatas level 6000 pada akhir perdagangan Desember 2018 menjadi sebesar 6.194,50. Perkembangan laju IHSG *(end of period)* dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 7. Tren Laju IHSG *(End of Period)* Bulanan Januari 2017 – Desember 2018
Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Fungsi Intermediasi Perbankan yang baik dan risiko kredit yang terkendali

Sampai dengan bulan Desember 2018, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga disertai intermediasi perbankan yang membaik dan pembiayaan nonbank yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*|CAR) perbankan yang tinggi mencapai 22,9 persen. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum sebesar 8,0 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas (AL/DPK) tercatat pada level yang masih aman sebesar 19,3 persen pada bulan Desember 2018. Selain itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* |NPL) tetap rendah sebesar 2,4 persen *(gross)*. Dari sisi fungsi intermediasi, Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tumbuh stabil sebesar 6,5 persen . Sedangkan, pertumbuhan kredit pada Desember 2018 sebesar 11,75 persen . Dari pembiayaan nonbank, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti IPO, obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) selama tahun 2018 sebesar Rp207,8 triliun. Peningkatan intermediasi perbankan didukung pula oleh relaksasi kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pelonggaran *Loan to Value* (LTV) serta implementasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata.

Tabel 4. Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018

Ket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov.	Des.
NPL *Gross* (%)	2,90	2,90	2,75	2,79	2,79	2,70	2,70	2,70	2,70	2,60	2,70	2.40
CAR (%)	23,2	23,1	22,5	22,4	22,1	22,0	22,5	22,8	22,9	22,9	23,3	22,9

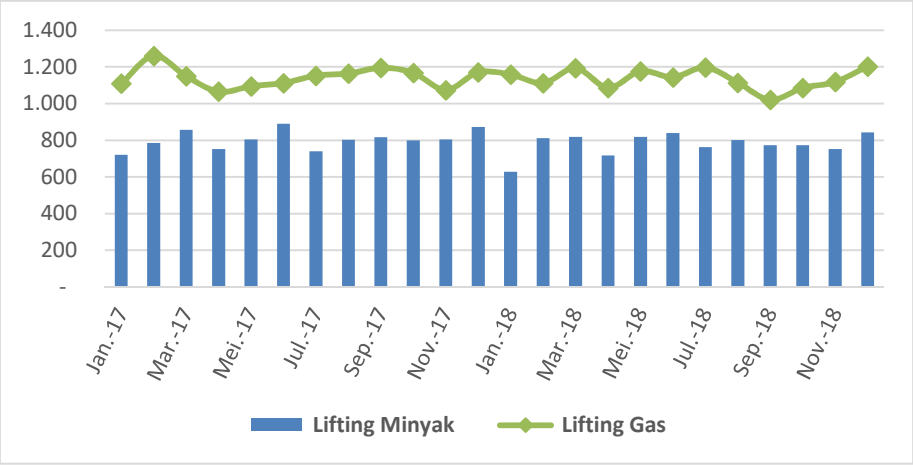
Sumber : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan-BKF

Rata-rata Lifting minyak dan lifting gas bumi Januari – Desember 2018 masing-masing sebesar 778 ribu barel per hari dan 1.145 ribu barel setara minyak per hari.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari – Desember tahun 2018 mencapai 778 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 797 rbph. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* minyak di Januari – Desember tahun 2018.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Januari – Desember tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 1.142 ribu barel setara minyak per hari.



Grafik 8. Realisasi Rata-rata *Lifting* Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018 (ribu barel per hari)

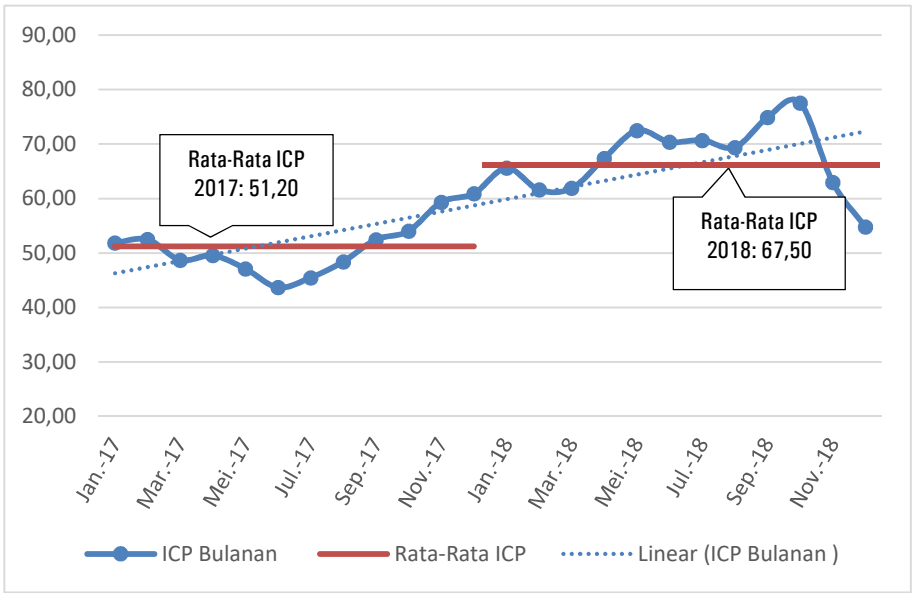
Sumber: SKK Migas (diolah), Kementerian Keuangan cq DJA

Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari-Desember tahun 2018 tercatat sebesar 67,50 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price* /ICP) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah, karena adanya peningkatan harga energi domestik seperti BBM dan tarif listrik.

Rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 mencapai 67,50 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 yang sebesar 51,20 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,00 dolar AS per barel. Tren peningkatan minyak mentah dunia maupun ICP sudah tampak sejak awal tahun dan terus mencatatkan peningkatan mulai di pertengahan tahun 2017 setelah adanya kesepakatan untuk melanjutkan pemangkasan produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018 oleh OPEC dan 11 negara Non-OPEC termasuk Rusia.

Sepanjang tahun 2018 harga minyak dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan secara harian sempat menyentuh level 80,00 dolar AS per barel. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gangguan produksi di beberapa negara OPEC seperti Venezuela, Libya, Nigeria, dan Angola serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah, Iran dan Suriah. Peningkatan harga sedikit mereda di kuartal III 2018 dengan adanya peningkatan produksi di negara-negara Non-OPEC dan meredanya gangguan produksi di Libya dan Nigeria. Harga kembali meningkat di bulan September karena adanya ketidakpastian kesanggupan Arab Saudi dan Rusia mengisi kekurangan suplai dengan kembali berlakunya sanksi terhadap Iran.



Grafik 9. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018 (dolar AS per barel)

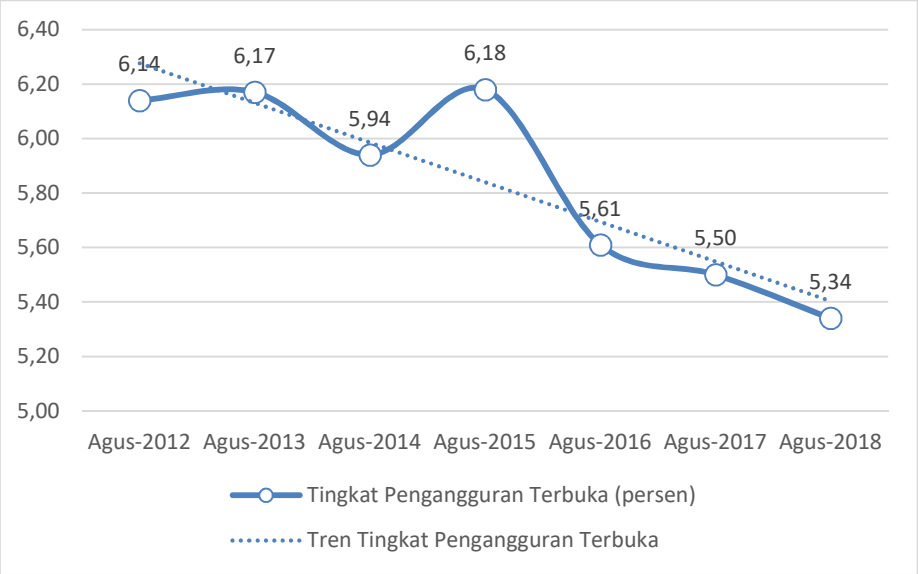
Sumber: Kementerian Keuangan cq DJA, Kementerian ESDM (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,34 persen (Agustus 2018)

Dalam APBN 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan turun pada kisaran 5,0-5,3 persen. Dalam jangka pendek, penurunan TPT diantaranya didorong oleh kinerja pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,34 persen lebih rendah dari pada Agustus 2017 sebesar 5,50 persen. TPT Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik 10.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26 persen, meningkat 0,59 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.



Grafik 10. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018

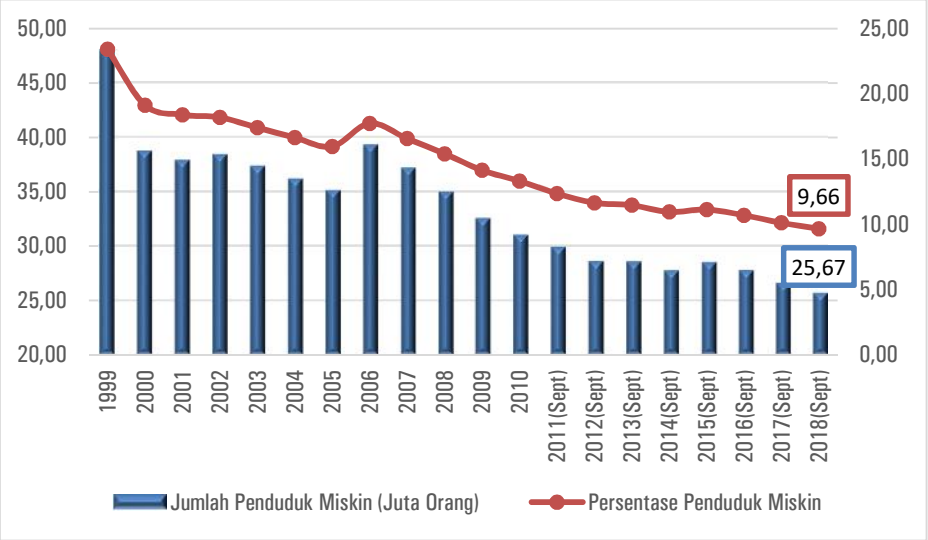
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 9,66 persen dan Rasio Gini sebesar 0,384 (September 2018)

Pada RKP tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan tema, "**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**". Sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2018 berada pada kisaran 9,5-10,0 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan pemanfaatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk mensasar kebutuhan dasar 40 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan. *Ketiga*, perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang (9,66 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 908,4 ribu orang dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017–September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 141,27 ribu orang dengan persentase penurunan dari 7,26 persen menjadi 6,89 persen. Sedangkan, penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 767 ribu orang, dengan persentase penurunan dari 13,47 persen menjadi 13,10 persen.

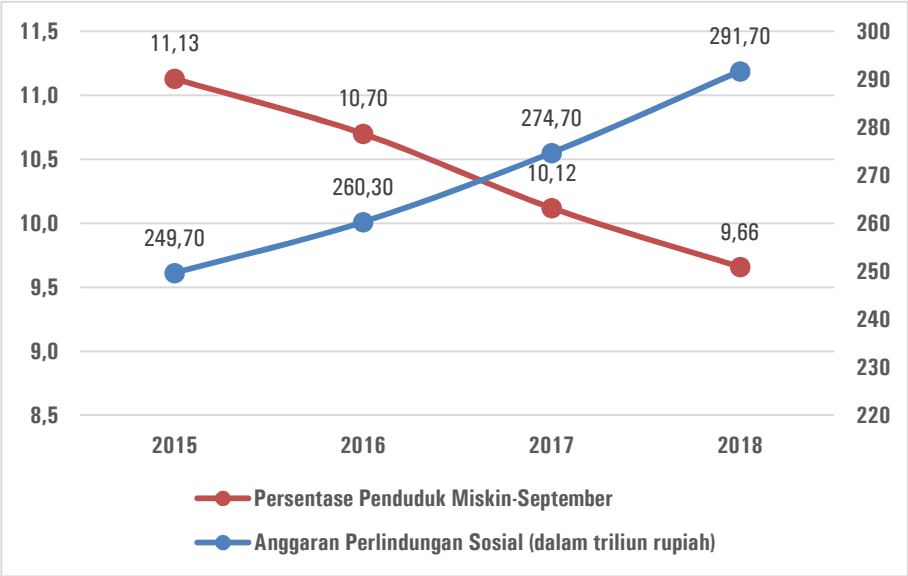
Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 11. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 – 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

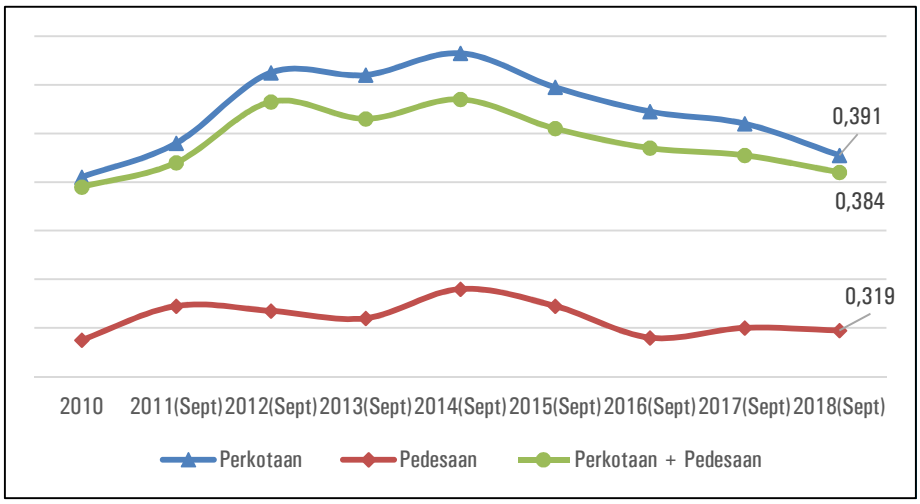
Penurunan Persentase Penduduk Miskin sejalan dengan peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial. Semakin besar penambahan untuk anggaran perlindungan sosial semakin besar penurunan persentase penduduk miskin. Hubungan tersebut tersaji dalam grafik berikut.



Grafik 12. Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010 – September 2014 terus mengalami fluktuasi dan mulai September 2015 hingga September 2018 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015 – September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,384 (ketimpangan rendah). Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2017 yang sebesar 0,391.



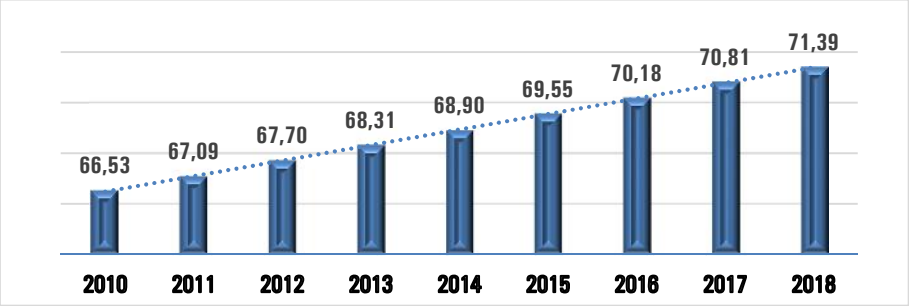
Grafik 13. Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia Tahun 2010 – 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM Indonesia saat ini berstatus "tinggi",

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia

meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018

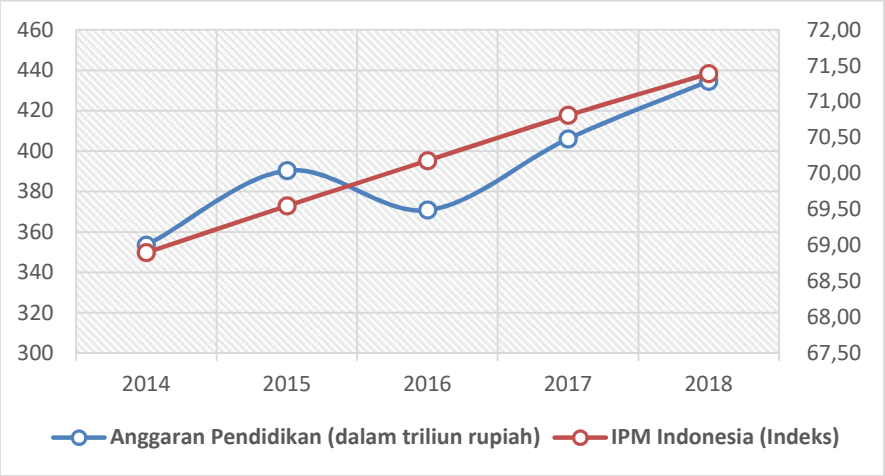
dalam jangka panjang. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Indonesia menunjukkan kemajuan yang besar. Status pembangunan Indonesia mengalami peningkatan dari "sedang" menjadi "tinggi". Selama periode 2010 hingga 2015, IPM Indonesia berstatus "sedang". Sementara itu, sejak 2016 IPM Indonesia berubah status menjadi "tinggi". Perkembangan IPM Indonesia dari 2010 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik 14.



Grafik 14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 – 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tren Peningkatan IPM Indonesia tahun 2010 – 2018 disebabkan oleh terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan.Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. Selama tahun 2014 hingga 2018, Anggaran pendidikan meningkat dari Rp353,4 triliun menjadi Rp434,6 triliun. Sementara itu, komponen kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2014 sebesar Rp61 triliun meningkat menjadi Rp111 triliun pada tahun 2018. Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Indonesia tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik 15.



Grafik 15. Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator kesejahteraan masyarakat. Ikhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 2018, serta realisasi tahun 2017 sebagai pembanding.

Tabel 5. Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	2018		2017
	APBN	Realisasi *Audited*	Realisasi *Audited*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,17	5,07
PDB Nominal (Rp triliun)	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Inflasi (%)	3,50	3,13	3,61
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,200	5,00	5,00
Nilai tukar (Rp/US$)	13.400	14.247	13.384
Harga Minyak Mentah Indonesia(US$/barel)	48,00	67,50	51,20
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	800	778	804
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.200	1.145	1.142

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 6. Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 *Audited*	Realisasi Tahun 2017 *Audited*
Ekspor (miliar dolar AS)	180,22	168,83
Impor (miliar dolar AS)	188,71	156,99
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	120,70	130,20
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) surplus/(defisit)	(7,13)	11,59
BI 7-day RR Rate (BI Rate) (%)	6,00	4,25
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	8,00	6,32
IHSG *(end of period)*	6.194,50	6.355,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 7. Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 *Audited*	Realisasi Tahun 2017 *Audited*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) -Agustus	5,34	5,50
Persentase Penduduk Miskin (%) -September	9,66	10,12
Rasio Gini- September	0,384	0,391
Indeks Pembangunan Manusia	71,39	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Tema RKP tahun 2018 adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 disusun dalam rangka menguraikan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan periode ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. RKP tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka kerja penyelenggaraan pemerintahan secara tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan tema RKP tahun 2018 yaitu "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Sejalan dengan tema tersebut, RKP tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional sehingga dapat tetap bertumbuh di tengah-tengah perlambatan ekonomi dunia serta pemerataan ekonomi yang akan memperkuat fundamental perekonomian nasional sekaligus mengurangi ketimpangan antarindividu maupun antarwilayah.

Untuk dapat mewujudkan sasarannya, RKP tahun 2018 disusun melalui pendekatan prinsip *money follows program* dengan penerjemahan ke dalam 4 (empat) hal yaitu (1) penguatan perencanaan dan penganggaran, (2) pengendalian perencanaan melalui penyusunan proyek pembangunan prioritas untuk memastikan perencanaan dapat dijalankan dengan baik, (3) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan, serta (4) penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan"

Untuk menyelaraskan dengan RKP tahun 2018, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2018 yaitu "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan".Tema kebijakan fiskal tahun 2018 tersebut diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan antara lain (1) mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, (2) menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas, (3) meningkatkan kapasitas fiskal, serta (4) menjaga stabilitas makro ekonomi. Pemerintah secara konsisten menjaga pengelolaan kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang ditempuh melalui beberapa strategi utama antara lain memperkuat kualitas belanja, memperlebar ruang fiskal, serta menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal. Strategi memperkuat kualitas belanja diwujudkan melalui pemberian penekanan (*big push policy*) terhadap dukungan pembangunan infrastruktur, efektifitas perlindungan sosial, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Strategi dalam memperlebar ruang fiskal diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan efisiensi belanja. Sedangkan, strategi menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal diwujudkan melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang yang mendorong keseimbangan primer secara positif, serta memperkuat bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2018 diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017

Dalam rangka pengejawantahan kebijakan fiskal tahun 2018, pemerintah telah menetapkan APBN tahun 2018 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diarahkan menjadi lebih produktif, efisien, dan berdaya tahan. Untuk menjalankan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa strategi yaitu (1) melakukan optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (2) melakukan penguatan kualitas

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, serta sinergi program perlindungan sosial, serta (3) menjaga kesinambungan dan efisiensi pembiayaan, yang diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang dalam batas yang aman. Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara mencapai Rp1.894,72 triliun, yang berarti naik 9,14 persen dari APBNP tahun 2017. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.618,09 triliun atau naik 9,87 persen dari APBNP tahun 2017. Sementara itu, PNBP ditetapkan sebesar Rp275,42 triliun, atau naik 5,84 persen dari APBNP tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,39 persen dari total pendapatan negara. Sedangkan, untuk penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp1,19 triliun rupiah.

Di sisi lain, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.220,65 triliun, naik 4,10 persen dari APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun, dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,16 triliun.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit APBNP tahun 2017 sebesar 2,92 persen. Defisit APBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.

Tabel 8. Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017 (triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2018	APBNP 2017	% Kenaikan/ (Penurunan)
A. Pendapatan Negara	**1.894,72**	**1.736,06**	**9,14**
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.893,51	1.732,95	9,27
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,09	1.472,71	9,87
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,42	260,24	5,84
II. Penerimaan Hibah	1,19	3,12	(61,49)
B. Belanja Negara	**2.220,65**	**2.133,30**	**4,10**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.366,96	6,40
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	766,34	(0,02)
C. Keseimbangan Primer	**(87,33)**	**(178,04)**	**(50,95)**
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	**(325,93)**	**(397,24)**	**(17,95)**
% Surplus/Defisit Terhadap PDB	(2,19)	(2,92)	(0,73) **
E. Pembiayaan Anggaran	**325,93**	**397,24**	**(17,95)**
I. Pembiayaan Utang	399,22	461,34	(13,47)
II. Pembiayaan Investasi	(65,65)	(59,73)	9,91
III. Pemberian Pinjaman	(6,69)	(3,67)	82,35
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,00)	11,53
V. Pembiayaan Lainnya	0,18	0,30	(39,00)

**) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan*

***) Perhitungan berdasarkan selisih rasio*

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,00 persen dan 23,10 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,90 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Tabel 9. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

No.	Fungsi	APBN 2018	APBNP 2017
1	Pelayanan Umum	435,87	362,64
2	Pertahanan	107,82	115,03
3	Ketertiban dan Keamanan	135,99	145,46
4	Ekonomi	335,48	327,07
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	15,68	12,56
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	31,50	30,07
7	Kesehatan	65,06	58,72
8	Pariwisata	7,45	6,45
9	Agama	9,47	9,78
10	Pendidikan	147,57	143,99
11	Perlindungan Sosial	162,55	155,12
	Total	**1.454,49**	**1.366,95**

Sumber: Kementerian Keuangan

PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 sebesar Rp1.943,67 triliun atau mencapai 102,58 persen dari target tahun 2018

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1.943,67 triliun, atau 102,58 persen dari target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Realisasi tersebut berada di atas realisasi periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp1.666,37 triliun atau sebesar 95,99 persen dari target APBN tahun 2017. Realisasi pendapatan negara dan hibah berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,14 persen dari total realiasi pendapatan negara dan hibah. Untuk PNBP, kontribusi terhadap pendapatan negara dan hibah tahun 2018 adalah sebesar 21,06 persen. Sedangkan, kontribusi yang berasal dari hibah adalah sebesar 0,80 persen.

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018 *Audited*	Realisasi 2017 *Audited*	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.518,78	1.343,52	13,04
1. Pajak Dalam Negeri	1.472,90	1.304,31	12,93
2.Pajak Perdagangan Internasional	45,88	39,21	17,00
II. PNBP	409,32	311,21	31,52
1. Penerimaan SDA	180,59	111,13	62,50
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	45,06	43,90	2,63
3. PNBP lainnya	128,57	108,83	18,14
4. Pendapatan BLU	55,09	47,34	16,36
III. Penerimaan Hibah	15,56	11,62	33,84
Jumlah Pendapatan Negara	1.943,67	1.666,37	16,64

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 mencapai Rp1.518,78 triliun

Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan secara konsisten setiap tahunnya demi mewujudkan stabilitas Keuangan Negara. Hasil positif yang diraih pemerintah tidak lepas dari pelaksanaan reformasi kebijakan dan transformasi organisasi perpajakan dalam rangka membangun *awareness* masyarakat terhadap pelaksanaan perpajakan secara berkesinambungan yang diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan. Pemerintah juga serius untuk melakukan terobosan dalam kebijakan perpajakan, antara lain melalui pemberian insentif perpajakan secara selektif dalam rangka mendorong daya saing industri nasional serta tetap mendorong hilirisasi industri. Selain itu, untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan yang lebih baik, pada tahun 2018 juga dilakukan sinergi perpajakan serta kepabeanan dan cukai yang diwujudkan antara lain melalui penggabungan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi *single identity* berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengembangan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) melalui PLB generasi kedua (PLB G2). Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemudahan prosedural dan efisiensi pelayanan kepabeanan untuk mengakomodasi perkembangan industri dan perdagangan internasional, serta meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai Rp1.518,78 triliun atau sebesar 93,86 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp1.618.09 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp1.343,52 triliun. Kinerja positif perpajakan tahun 2018 tersebut mampu mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 13,04 persen dari tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang berhasil dicapai Pemerintah sebesar 13,04 persen tersebut merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut didorong antara lain melalui keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara positif sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik yang baik dan peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, keberhasilan dalam pertumbuhan penerimaan perpajakan juga merupakan dampak dari peningkatan kemampuan dalam memungut pajak sebagai hasil dari peningkatan basis pajak setelah pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kemudian, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga turut dikontribusikan dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan intensifikasi pajak yang berjalan secara efektif, yang didorong dengan telah dimulainya reformasi administrasi perpajakan seperti kemudahan melaporkan kewajiban perpajakan melalui *e-filing*.

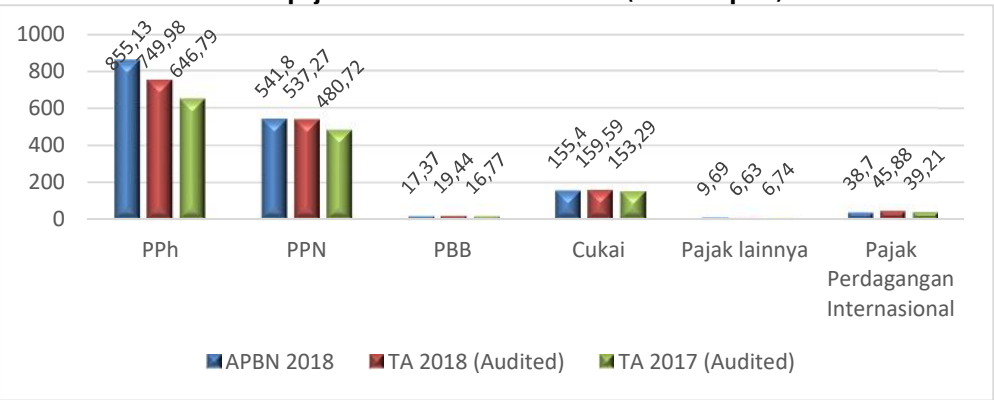
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penyempurnaan kebijakan seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi serta kebijakan tarif secara efektif telah mendorong perbaikan aktivitas perdagangan internasional sehingga mampu meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan secara positif di tahun 2018. Selain itu, keberhasilan dalam melakukan penertiban cukai berisiko tinggi serta reformasi di bidang kepabeanan dan cukai yang terus digulirkan juga turut mendukung pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2018.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPh adalah sebesar Rp749,97 triliun atau 87,70 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut berhasil menyumbang sebesar 49,38 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh tersebut di tahun 2018 adalah sebesar 15,95 persen. Faktor-faktor yang mendorong capaian tersebut antara lain adanya peningkatan harga ICP, perbaikan basis pajak, dan peningkatan jumlah wajib pajak yang merupakan dampak program pengampunan pajak (*tax*

amnesty) tahun 2016-2017, serta membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya, realisasi penerimaan PPN (termasuk PPnBM) tahun 2018 adalah sebesar Rp537,26 triliun atau 99,16 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN tersebut berhasil menyumbang 35,37 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN pada tahun 2018 berhasil tumbuh sebesar 11,76 persen. Pertumbuhan yang positif tersebut mengindikasikan terjaganya daya beli dan konsumsi masyarakat serta perekonomian nasional yang tetap positif ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp205,47 triliun atau mencapai 105,86 persen dari target APBN tahun 2018 serta tumbuh sebesar 6,74 persen dari realisasi tahun 2017. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut merupakan akumulasi dari realiasi penerimaan cukai serta realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 tersebut berhasil menyumbang 13,53 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 5,90 persen. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditopang oleh pendapatan bea masuk dan bea keluar, serta pendapatan cukai yang seluruhnya dapat direalisasikan di atas target APBN tahun 2018. Penerapan kebijakan impor pemerintah mampu mengendalikan pasokan kebutuhan dalam negeri dan mengendalikan harga komoditas tertentu yang mendorong pertumbuhan devisa impor sejak awal tahun. Selain itu, pemerintah juga mampu menerapkan kebijakan program penertiban impor beresiko tinggi (PIBT), sehingga dapat meminimalisir masuknya barang-barang ilegal untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dan mendorong perbaikan perekonomian dalam negeri. Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut mampu mendorong pendapatan bea masuk di atas target APBN tahun 2018. Kemudian, pendapatan bea keluar juga mampu direalisasikan jauh di atas target. Hal tersebut didorong oleh perbaikan dan stabilitas harga komoditas internasional, serta peningkatan permintaan komoditas dari beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia, khususnya permintaan atas komoditas mineral tambang. Selanjutnya, pendapatan cukai memberikan kontribusi terbesar atas penerimaan dari kepabeanan dan cukai dengan realisasi sebesar Rp159,58 triliun, dan mencapai 102,70 persen dari target tahun 2018. Pencapaian target tersebut didorong melalui implementasi kebijakan pengendalian cukai berupa kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang mendominasi penerimaan cukai hingga 95 persen. Selain itu, program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga mampu mendorong peningkatan kinerja pendapatan cukai, dengan semakin turunnya volume peredaran rokok ilegal untuk menciptakan persaingan industri hasil tembakau yang semakin sehat.

Grafik 16. Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Realisasi PNBP Tahun 2018 sebesar Rp409,32 triliun

Realisasi pendapatan PNBP tahun 2018 adalah sebesar Rp409,32 triliun atau mencapai 148,61 persen dari target APBN sebesar Rp275,42 triliun atau tumbuh sebesar 31,52 persen dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNBP tahun 2018 tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009. Kenaikan pendapatan PNBP terutama dipengaruhi tingginya penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang tumbuh 62,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan SDA tahun 2018 adalah sebesar Rp180,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp111,13 triliun. Tingginya penerimaan SDA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena adanya peningkatan harga komoditas dunia terutama minyak bumi dan batu bara, serta peningkatan kinerja BUMN dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Secara khusus, tren kenaikan harga minyak Indonesia (ICP) sebagaimana kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh faktor fundamental seperti tingginya permintaan minyak mentah global, pembatasan produksi oleh negara-negara OPEC dan negara non-OPEC menjadi faktor pendorong tingginya capaian realisasi PNBP SDA migas sepanjang tahun 2018. Selain itu, tren kenaikan harga komoditas berupa batubara juga turut mendorong peningkatan realisasi PNBP SDA Nonmigas.

Realisasi pendapatan bagian laba BUMN/kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp45,06 triliun atau 100,82 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 2,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih pendapatan sebesar Rp43,90 triliun. Realisasi pendapatan laba BUMN tersebut merupakan akumulasi dari realisasi pendapatan bagian laba BUMN perbankan yang mencapai Rp16,26 triliun atau berkontribusi sebesar 36,10 persen, serta pendapatan bagian laba BUMN non perbankan yang mencapai Rp28,79 triliun atau berkontribusi sebesar 63,90 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penambahan penyetoran dividen tahun buku 2017 bagian pemerintah serta piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN berdasarkan hasil pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang tahun 2018.

Realisasi pendapatan PNBP Lainnya tahun 2018 sebesar Rp128,57 triliun atau 153,52 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut naik sebesar 18,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp108,83 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi penjualan hasil tambang, adanya pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, adanya peningkatan volume layanan atas pada Kementerian Negara/Lembaga antara lain jasa kepolisian (penertiban BPKB dan STNK), jasa kepelabuhan serta jasa pertanahan (*access reform*).

Pendapatan BLU pada tahun 2018 sebesar Rp55,09 triliun atau 127,22 persen dari target dalam APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,36 persen dengan nilai sebesar Rp47,34 triliun. Capaian positif tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU dan peningkatan pengelolaan aset BLU, serta adanya peralihan status 25 satuan kerja menjadi satker BLU pada Kepolisian RI, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian perhubungan sepanjang tahun 2018.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2018 Rp15,51 triliun

Selama tahun 2018 realisasi penerimaan hibah mencapai Rp15,56 triliun atau 1.300,47 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1,19 triliun. Realisasi penerimaan hibah tersebut naik dari tahun 2017 sebesar 33,84 persen dengan nilai sebesar Rp11,62 triliun. Tingginya realisasi penerimaan hibah tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penerimaan hibah langsung oleh beberapa K/L yang tidak direncanakan dalam APBN 2018, serta penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemilukada secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Kontribusi hibah dari pemerintah daerah tersebut mencapai 78,40 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2018.

Selain itu, penerimaan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pencairan beberapa program hibah yang berasal dari luar negeri di awal tahun. Beberapa pencairan program hibah di awal tahun antara lain program hibah yang disalurkan melalui Kementerian Negara/Lembaga seperti Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi, termasuk air minum serta hibah dalam rangka pelestarian ekosistem di beberapa wilayah di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara Tahun 2018 Rp2.213,11 triliun yang merupakan realisasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintan dalam mengelola APBN mengedepankan tata kelola yang baik (goog governace) agar bauran kebijakan dari sisi pendapatan maupun alokasi belanja dapat berdampak positif dan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui bauran/output yang dihasilkannya dari program-program yang dituangkan dalam belanja negara pada APBN. Dari tahun ke tahun, volume APBN semakin meningkat. Pertumbuhan alokasi belanja negara semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga Rp2.220,65 triliun pada APBN tahun anggaran 2018. Peningkatan alokasi belanja tersebut tentunya perlu disertai dengan rangkaian perbaikan kebijakan pada setiap tahapan siklus APBN, agar kinerja pelaksanaan APBN meningkat secara kesinambungan.

Secara umum kebijakan belanja negara 2018 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif dan prioritas yang disertai dengan efisiensi belanja negara non prioritas, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja.Di tahun 2018 yang penuh tantangan bagi perekonomian nasional, pelaksanaan APBN telah ditutup dengan capaian yang sangat gemilang, termasuk realisasi belanja negara telah menunjukkan kinerja yang terkendali bahkan melampaui batas ekspektasi yang ditargetkan. APBN 2018 telah mampu membuktikan bahwa realisasinya memiliki daya tahan dan daya dorong terhadap pertumbuhan di tengah berbagai macam tantangan perekonoian global sepanjang tahun 2018.

Realisasi belanja negara tahun 2018 sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari pagu APBN tahun 2018. Realisasi tersebut naik 10,25 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.007,35 triliun. Realisasi belanja negara tersebut merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 adalah Rp1.455,32 triliun atau mencapai 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi sebesar Rp757,79 triliun atau sebesar 98,91 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun. Meningkatnya belanja negara pada tahun 2018 mencerminkan akselerasi kinerja pemerintah dalam mengeksekusi anggaran untuk ketercapaian keluaran yang optimal. Selain itu, melalui kebijakan pemerintah yang tidak menetapkan APBN perubahan pada tahun 2018, yang merupakan pertama kalinya dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang secara fokus mampu menjalankan perencanaan dengan konsisten sehingga berhasil mengoptimalkan penyerapan anggaran. Konsistensi pelaksanaan APBN hingga akhir tahun 2018 tanpa melalui adanya UU APBN perubahan, juga telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari sisi perencanaan penganggaran.

Selanjutnya, keberhasilan dalam implementasi realisasi belanja tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif di tengah kondisi perlambatan perekonomian global yang antara lain ditandai dengan fluktuasi

nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah, serta penanganan bencana alam di beberapa daerah untuk mengatasi kondisi kahar yang dialami oleh negara Indonesia sepanjang tahun 2018. Secara umum, ketercapaian keluaran tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui program-program pemerintah yang berbasis infrasfruktur, penyaluran berbagai program bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, dan penyaluran dana transfer serta Dana Desa. Selain itu, pada tahun 2018, terdapat beberapa pos pengeluaran untuk program prioritas nasional khusus yang berskala internasional, yakni penyelenggaraan *Annual Meeting* International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) tahun 2018 di Bali, penyelenggaraan *Asian Games* XVIII di Jakarta dan Palembang, serta penyelenggaraan *Asian Para Games* ke-3 di Jakarta.

Capaian kinerja pelaksanaan APBN yang positif di tahun 2018 berdampak optimal bagi tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan. Dari sisi makro ekonomi, terlihat bahwa APBN tahun 2018 telah berkontribusi dalam menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suatu capaian yang membanggakan dimana hal tersebut dicapai di tengah kondisi ketidakpastian global. Selain itu, pencapaian kinerja APBN 2018 yang semakin baik tersebut tentunya merupakan suatu momentum yang sangat berartu sebagai wujud dan hasil dari kerja keras pemerintah dan masyarakat, kemantapan sinergi yang dibangun, dengan semakin baiknya tata kelola dalam melaksanakan anggaran, yang dimulai sejak perencanaan yang semakin baik, pelaksanaan anggaran yang taat asas, sampai dengan pelaporan keuangan yang akuntabel. Maka dari itu, momentum kinerja APBN yang semakin baik di tahun 2018 tersebut, tentunya harus dijaga dan ditingkatkan untuk pelaksanaan anggaran di masa-masa mendatang agar lebih baik dan lebih berkualitas.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018 Rp1.455,32 triliun

Belanja Pemerintah Pusat yang direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Realisasi tersebut naik 15,01 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.265,35 triliun. Perbaikan kinerja realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L serta percepatan pelaksanaannya. Perbaikan kinerja tersebut juga didorong melalui penyempurnaan kebijakan-kebijakan tata kelola keuangan negara yang dituangkan pada sejumlah regulasi dalam kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Realisasi BPP tahun 2018 juga dipengaruhi oleh beberapa agenda strategis seperti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, penyelenggaraan *Asian Games* dan Asian Para Games, penanganan bencana alam, serta kegiatan strategis lainnya seperti IMF-WB *Annual Meeting*.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif. Upaya yang bersifat substantif seperti: (1) penajaman prioritas belanja termasuk *refocusing* anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, (2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta (3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas. Sementara itu, upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup: (1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, (2) melanjutkan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran dimulai, percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik, serta pemanfaatan *e-procurement*, (3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi, (4)

simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan realisasi belanja menurut organisasi, realisasi belanja K/L tahun 2018 sebesar Rp846,56 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L (belanja BA 999 Bendahara Umum Negara) adalah sebesar Rp608,76 triliun. Pada belanja K/L, realisasi tahun 2018 mencapai Rp846,56 triliun atau 98,68 persen terhadap pagu APBN sebesar Rp847,43 triliun. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp765,13 triliun (95,81persen). Diterbitkannya kebijakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran serta Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018 memberikan pengaruh positif pada kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018. Disamping itu, tidak adanya perubahan atas APBN 2018 juga berdampak positif terhadap kinerja belanja pemerintah pusat yang optimal karena Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Selain dilihat dari aspek makro fiskal pelaksanaan APBN, pemerintah juga senantiasa mengawal pelaksanaan APBN melalui serangkaian monitoring dan evaluasi kinerja anggaran melalui indikator-indikator yang terukur mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pada belanja non K/L, realisasi tahun 2018 adalah Rp608,76 triliun atau mencapai 100,19 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018 sebesar Rp607,06 triliun. Realisasi belanja non-K/L tersebut antara lain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp257,95 triliun atau 108,11 persen dari target tahun 2018, serta belanja subsidi sebesar Rp216,88 triliun atau 138,82 persen dari target tahun 2018. Realisasi pembayaran bunga utang tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan *outstanding* utang sebagai dampak terjadinya depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar sepanjang tahun 2018. Sedangkan, meningkatnya realisasi belanja subsidi antara lain dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan harga minya mentah Indonesia (ICP), penyelesaian kurang bayar tahun sebelumnya, serta kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar dari Rp500/liter menjadi Rp2.000/liter sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi. Namun demikian, terjadinya depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS tersebut telah memberikan *net impact* yang positif terhadap APBN. Hal tersebut antara lain ditunjukkan melalui adanya tambahan penerimaan negara dari migas akibat kenaikan harga minyak.

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran belanja non K/L pada tahun 2018 telah menunjukkan capaian realisasi anggaran yang baik dalam kisaran target APBN 2018. Lebih lanjut, memperhatikan tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2018 terlihat bahwa tren penyerapan anggaran belanja non K/L dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola yang dapat diproyeksikan karena tidak mengalami fluktuasi yang signifikan karena kebutuhan belanja yang cukup proposional. Kecenderungan pola penyerapan anggaran belanja non K/L tersebut hampir merata sepanjang tahun dikarenakan bentuk komitmen pada alokasi anggaranbelanja non K/L berdasarkan penjadwalan pembayaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam hal kondisi yang dapat menyebabkan fluktuasi penyerapan anggaran pada belanja non K/L, maka hal tersebut bisa terjadi dan dapat disesuaikan apabila terdapat kebijakan pemerintah yang cukup signifikan yang mempengaruhi penyaluran belanja non K/L, seperti adanya kenaikan belanja untuk kebutuhan pembayaran subsidi dan bunga utang. Dengan mengetahui karakteristik pola penyerapan anggaran yang ideal untuk belanja non K/L tersebut, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan likuiditas yang memadai guna melakukan pembayaran dan penyaluran belanja non K/L yang bersifat rutin sepanjang tahun anggaran.

Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32	1.265,35	15,01
Belanja K/L	846,56	765,13	10,64
Belanja Non K/L	608,76	500,22	21,70

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, berdasarkan realisasi belanja menurut fungsi, nilai realisasi terbesar tahun 2018 berada pada belanja fungsi ekonomi sebesar Rp382,42 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp307,14 triliun atau naik sebesar 24,25 persen. Realisasi tersebut diikuti oleh realisasi belanja fungsi pelayanan umum sebesar Rp435,87 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp 307,78 triliun atau naik sebesar 22,16 persen. Realisasi belanja fungsi ekonomi tersebut berkontribusi sebesar 26,28 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Sedangkan, realisasi belanja fungsi pelayanan umum berkontribusi sebesar 25,78 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Rincian realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 menurut fungsi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
01	Pelayanan Umum	375,19	307,14	22,16
02	Pertahanan	106,83	117,50	(9,08)
03	Ketertiban dan Keamanan	143,30	135,74	5,57
04	Ekonomi	382,42	307,78	24,25
05	Lingkungan Hidup	13,70	10,61	29,12
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	32,19	27,27	18,04
07	Kesehatan	61,86	57,22	8,11
08	Pariwisata dan Budaya	10,69	5,77	85,27
09	Agama	9,37	8,87	5,64
10	Pendidikan	145,94	138,50	5,37
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	173,77	148,90	16,70
	Total	1.455,32	1.265,35	15,01

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan realisasi belanja menurut jenis belanja (ekonomi), nilai realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai yang mencapai Rp346,89 triliun atau 94,86 persen dari pagu dalam APBN 2018, diikuti Belanja Barang yang mencapai Rp347,46 triliun atau 102,16 persen dari pagu APBN 2018. Kinerja realisasi belanja pegawai selama tahun 2018 antara lain dipengaruhi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemantapan reformasi birokrasi serta adanya pemberian gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan) untuk mempertahankan kesejahteraan aparatur negara.

Untuk belanja barang dan modal, realisasi anggaran didorong oleh akselerasi kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, termasuk penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah berbasis infrastruktur kepada masyarakat, keperluan operasional Pemilihan Umum (Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan Pemilu tahun 2019), serta operasional penyelenggaraan *Asian Games* XVIII, Asian Para Games, dan sidang tahunan IMF – World Bank. Khusus pada belanja modal, realisasi anggaran didorong oleh pembayaran atas prestasi *progress* pada berbagai proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) untuk program keamanan dan ketertiban pada Kepolisian RI.

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Berskala Internasional Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan sejumlah kegiatan berskala internasional. Perhelatan internasional pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah penyelenggaraan pesta olahraga tingkat Asia yang ke-18 yaitu *Asian Games* 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2018, atau tepat 1 (satu) hari setelah perayaan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, hingga tanggal 2 September 2018 yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu Jakarta dan Palembang. Perhelatan kedua adalah penyelenggaraan pesta olahraga difabel tingkat Asia yang ke-3, yaitu *Asian Para Games* 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 13 Oktober 2018 di Jakarta. Sedangkan, perhelatan ketiga adalah penyelenggaraan pertemuan tahunan Dewan Gubernur IMF dan World Bank yaitu IMF-WB *Annual Meetings* pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Indonesia Menorehkan Prestasi Membanggakan di Asian Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Games* 2018 dikelola oleh Indonesia *Asian Games* 2018 Organizing Committee (INASGOC) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Penyelenggaraan *Asian Games* 2018 di Jakarta dan Palembang tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga menorehkan kesuksesan atas prestasi seluruh kontingen Indonesia di ajang tingkat Asia ke-18. Berdasarkan hasil akhir penyelenggaraan *Asian Games* 2018, Indonesia menduduki posisi tertinggi ke-4 dalam raihan medali dari total 45 (empat puluh lima) negara yang berpartisipasi. Raihan tersebut menjadi sebuah sejarah baru pencapaian tertinggi prestasi olahraga Indonesia selama keikutsertaannya di *Asian Games*. Indonesia berhasil meraih total 98 medali yang terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Catatan prestasi terbaik Indonesia sebelumnya diraih saat penyelenggaraan *Asian Games* 1962 di Jakarta dengan raihan 51 medali yang terdiri dari 11 medali emas, 12 medali perak, dan 28 medali perunggu. Raihan tersebut juga melebihi target awal yaitu berada di peringkat 10 besar dengan target minimal 16 medali emas.

Dalam penyelenggaraan *Asian Games* 2018, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan beberapa pencapaian penting. Catatan penting tersebut antara lain berhasil menciptakan *All Indonesian Final* pada nomor pertandingan panjat tebing nomor *speed relay* Putri dan *speed relay* Putra, serta bulutangkis nomor ganda putra. Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh medali emas untuk pertama kalinya pada sejumlah cabang *olympic sports* seperti pada cabang tenis, karate, dan angkat besi. Untuk cabang olahraga *non-olympic sports*, Indonesia juga berhasil meraih medali emas melalui cabang olahraga sepak takraw.

Melalui raihan medali emas sebanyak 31 medali, Indonesia berhasil mengukirkan diri sebagai yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sepanjang sejarah *Asian Games*. Sebelumnya, tidak pernah ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas sejumlah 31 medali di ajang *Asian Games*.

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertama Kali di Ajang Asian Para Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Para Games* 2018 di Jakarta pada tanggal 6 – 13 Oktober 2018 menjadi kali pertama Indonesia sebagai tuan rumah, setelah penyelenggaraan *Asian Para Games* pertama pada tahun 2010 di Guangzhou, Tiongkok, serta penyelenggaraan kedua di Incheon, Korea Selatan pada tahun 2014. Dalam perhelatan kegiatan tersebut di Indonesia, pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia *Asian Para Games* 2018 Organizing Committee (INAPGOC) bersama Kemenpora.

Pada ajang yang ketiga kali ini, Indonesia berhasil meraih prestasi di posisi kelima dari 43 (empat pulih tiga) negara peserta, dengan raihan 135 medali yang terdiri dari 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu. Raihan medali tersebut juga berhasil mencatatkan Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sejak penyelenggaraan pertama kali di Tiongkok. Pada perhelatan pertama tahun 2010, Indonesia berada pada peringkat 14 dari 30 negara peserta dengan raihan 11 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sedangkan, pada perhelatan kedua di tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 32 negara peserta dengan raihan sebanyak 38 medali yang terdiri dari 9 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Prestasi Indonesia di Ajang *Asian Para Games* 2018 tersebut berada di atas target penyelenggaraan yaitu berada pada delapan besar dengan capaian medali emas minimal 16 medali.

IMF-WB Annual Meeting 2018 Menjadi Showcase Indonesia

IMF-WB *Annual Meetings* (IMF-WB AMs) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu aktual antara lain penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, serta isu-isu global lainnya.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs 2018 setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang cukup panjang, sebelum akhirnya diputuskan oleh para Gubernur IMF dan WB. Indonesia merupakan negara ASEAN ke-4 yang terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs. Tiga negara ASEAN yang telah terpilihnya sebelumnya adalah Philipina pada tahun 1976, Thailand pada tahun 1991 dan Singapura pada tahun 2006. Kesempatan menjadi tuan rumah IMF-WBG AMs 2018 merupakan momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan *leadership* Indonesia di kawasan ASEAN sekaligus sebagai satu-satunya negara ASEAN di Forum G20.

Pelaksanaan IMF-WB AMs pada tahun 2018 diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018. Kegiatan tersebut dinilai berhasil dan memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Delegasi Resmi yang datang pada Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 merupakan jumlah delegasi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di luar Washington DC. Kesuksesan juga ditunjukkan oleh penilaian peserta yang menyatakan puas atau sangat puas pada semua aspek. Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berupa Dampak *Tangible* (berwujud) serta Dampak *Intangible* (tidak berwujud). Selama Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Indonesia berhasil membuat kesepakatan investasi dengan berbagai investor dari luar negeri. Sebanyak 14 BUMN berhasil menandatangani perjanjian kerjasama investasi. PINA *Center* Bappenas juga berhasil memfasilitasi kerjasama investasi pada saat Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berlangsung. Dampak yang juga sangat penting adalah kemampuan Indonesia untuk berperan di dalam Forum Internasional. Di sisi lain, perekonomian regional maupun nasional mendapatkan *benefit* dari kegiatan tersebut, baik dari sektor pariwisata, infrastruktur maupun investasi.

IMF-WB AMs 2018 juga menjadi agenda yang sangat penting bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama dalam membebaskan dunia dari kelaparan dan kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs, diperlukan pembiayaan yang sangat besar, sekitar USD 6 trilyun per tahun. Untuk itu, kemitraan dan kerja sama yang erat melibatkan semua pihak, termasuk pelaku swasta dan *philantropies*, sangat diperlukan untuk

memobilisasi sumber daya dan sumber dana. Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam IMF-WB AMs 2018, yang dikenal dengan *Bali Initiative* dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penanganan ketidakstabilan ekonomi global dengan merilis WEO Oktober 2018.
2. Penanganan urbanisasi yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh bangsa agar dapat berjalan efektif.
3. Investasi pada *Human Capital* yang ditandai dengan *launching Human Capital Indeks* (HCI) yang diinisiasi oleh World Bank.
4. Prakarsa *Bali Fintech agenda* dengan inisiasi 12 prinsip Fintech oleh IMF, WB, BI dan Kemenkeu untuk mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan.
5. Peluncuran Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance* – DRFI) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dan terjaminnya keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.
6. Penanganan perubahan iklim dengan penciptaan peluang bisnis dan pertumbuhan yang memprioritaskan pendanaan program *climate-smart development*.
7. Prakarsa pembiayaan infrastruktur dengan prakarsa SDG *Indonesia One* (SIO) yang telah menghasilkan komitmen sebesar USD 2,34 miliar untuk penyiapan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan dan investasi.
8. Kesepakatan *capital package,* dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, dengan menyepakati kenaikan modal negara anggota IBRD dan IFC.

Sumber: Kemenkeu, Kemenpora, Bappenas, Kemenkominfo, Bank Indonesia

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 Rp757,8 triliun

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk memperkuat implementasi desentralisasi fiskal serta mendorong percepatan program-program pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peran strategis TKDD dalam mendukung pembangunan nasional antara lain terkait perbaikan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar publik (*public service delivery*), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Alokasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan, Dana Desa dialokasikan bagi desa. Pada APBN tahun 2018, pemerintah telah menetapkan alokasi TKDD sebesar Rp766,16 triliun. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan *progress* pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, sebagaimana pelaksanaan Nawa Cita ke-3 Pemerintah. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut diikuti dengan adanya perbaikan mekanisme penyaluran TKDD antara lain melalui perbaikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang berbasis *output* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, penerapan sistem terintegrasi dalam rangka sinkronisasi pengalokasikan DAK dan belanja K/L, serta percepatan penyelesaian pembayaran kurang bayar DBH.

Pada tahun 2018, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun atau 98,91 persen terhadap pagu dalam APBN 2018. Realisasi tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,13 persen. Peningkatan realisasi TKDD tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memacu pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan realisasi TKDD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa karena alokasi anggaran TKDD dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian *output*. Penyaluran TKDD selain penyaluran transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), disempurnakan dengan kebijakan alokasi dana berbasis kebutuhan sektoral/bidang, khususnya untuk dukungan program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini dimaksudkan guna mendukung tingkat kesejahteraan dasar, seperti layanan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan

profesi guru PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana, layanan administrasi kependudukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler, afirmasi, dan penugasan. Selain itu, penyaluran Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi persoalan kesenjangan pada level pemerintahan terendah, yakni desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang prioritas dimana alokasi terbesar untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp29,6 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik, dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RLDes untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang. Penggunaan Dana Desa terbesar terdapat pada Bidang Pembangunan Desa, yaitu sebesar Rp29,60 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2018.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran tahun 2018 sebesar Rp269,44 triliun merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir

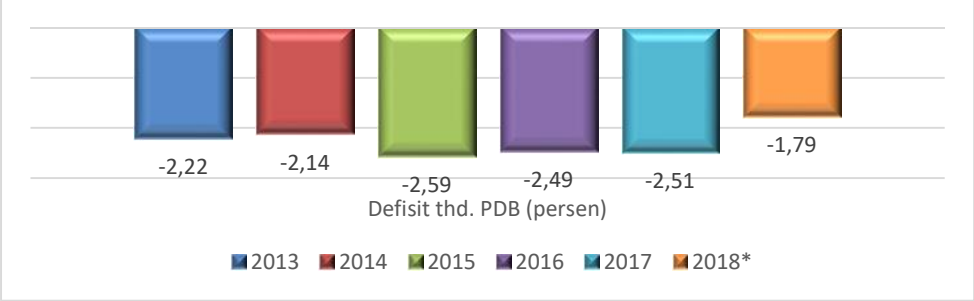
Defisit anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp269,44 triliun atau 1,81 persen terhadap realisasi PDB tahun 2018 yang mencapai Rp14.837,4 triliun. Realisasi tersebut berada di bawah target defisit yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325,93 triliun dengan besaran persentase defisit terhadap PDB sebesar 2,19 persen. Persentase defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,51 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi defisit keseimbangan primer sebesar Rp11,49 triliun, yang menurun tajam jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer di tahun 2018 merupakan yang terkecil sejak tahun 2012.

Tabel 13. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Indikator	APBN 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Surplus/(Defisit) Anggaran	(325,93)	(269,44)	(340,97)
PDB Nominal	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Surplus/(Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19%)	(1,81%)	(2,51%)
Keseimbangan Primer	(87,33)	(11,49)	(124,40)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Realisasi defisit anggaran tahun 2018 sebesar 1,81 persen terhadap PDB tersebut, menjadi yang paling rendah sejak tahun 2012. Terjaganya defisit anggaran tersebut mencerminkan besarnya komitmen Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat antara lain dengan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara terutama dari penerimaan perpajakan dan PNBP serta senantiasa mendorong penguatan kualitas belanja produktif yang didukung dengan efisiensi belanja non prioritas serta perbaikan kinerja penyerapan belanja.



Grafik 17. Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 - 2018
Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 mencapai Rp305,69 triliun

Pada tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp325,93 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar Rp366,62 triliun. Kebijakan pembiayaan tersebut ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah kondisi perekonomian global yang ditandai dengan suku bunga The Fed yang mengalami tren peningkatan, serta depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar AS, sebagaimana tren penurunan mayoritas mata uang negara-negara di dunia. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp367,46 triliun atau 92,05 persen dari targetnya, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp61,11 triliun setara dengan 93,08 persen dari targetnya, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp4,03 triliun atau 60,27 persen dari target, realisasi kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,12 triliun atau 100 persen dari target, serta realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,17 triliun atau 92,14 persen dari targetnya dalam APBN 2018. Secara khusus, realisasi pembiayaan yang menurun tersebut diikuti dengan realisasi pembiayaan utang neto yang menurun yaitu Rp367,46 triliun dari tahun 2017 sebesar Rp429,07 triliun.

Realisasi pembiayaan utang juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pasar SBN (*financial deepening*), pengembangan jumlah investor ritel domestik, serta peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade*. Peningkatan peran SBN sebagai instrumen utama pembiayaan defisit APBN ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu strategi pembiayaan APBN dengam mempertimbangkan perlunya pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat terhadap investasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional melalui pertisipasi masyarakat sebagai investor SBN. Hal tersebut telah menjadi salah satu komitmen Pemerintah untuk senantiasa menjaga APBN yang sehat dan kredibel antara lain dengan melakukan pengelolaan APBN dengan mendorong peningkatan kemandirian fiskal.

Tabel 14. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017(triliun rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi *Audited* 2018	Realisasi *Audited* 2017	% thd APBN
Pembiayaan Utang	399,21	372,02	429,07	93,18
Pembiayaan Investasi	(65,65)	(61,11)	(59,75)	93,08
Pemberian Pinjaman	(6,69)	(4,03)	(2,05)	60,27
Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,12)	(1,00)	100,00
Pembiayaan Lainnya	0,18	0,16	0,35	92,14
Total Pembiayaan Anggaran	**325,93**	**305,69**	**366,62**	**93,79**

Sumber: Kementerian Keuangan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp36,24 triliun

Berdasarkan realisasi pembiayaan tahun 2018, maka terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,24 triliun. Nilai SiLPA tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2017 yang bernilai sebesar Rp25,64 triliun, atau terdapat pertumbuhan positif sebesar 41,34 persen. SiLPA tersebut menjadi bagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat difungsikan menjadi penyangga fiskal (*fiscal buffer*). Penyangga fiskal tersebut menjadi salah satu alternatif mitigasi terhadap dampak kondisi ketidakpastian ekonomi global terhadap perekonomian nasional di masa yang akan datang.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2018 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	3	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	74
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.657	1.656
5	BA 006	Kejaksaan Agung	533	524
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.253	1.114
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	146	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	500	496
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1181	1.388
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1104	1.101
12	BA 018	Kementerian Pertanian	823	1.177
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	106	99
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	46	51
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	610	667
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	420	365
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.681	1.586
18	BA 025	Kementerian Agama	6208	6.682
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	475	354
20	BA 027	Kementerian Sosial	276	291
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	333	400
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	510	639
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1177	1.177
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	57	101
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	241	236
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	281	298
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	2	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	2	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	515	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	38	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	502	520
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	38	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	65	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1291	1.282
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	44	42
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	2	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	41	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	224	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	393	479
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	43	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	192	194
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	550	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	2	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	47	46
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	22	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	2	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	9	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	38	38
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	17	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	41	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	502	544
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	43	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	2	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	3	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	2	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	0	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	41	36
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2	1
76	BA 110	Ombudsman RI	2	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	32	58
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	71
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	31	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2	1
85	BA 119	Badan Keamanan Laut	2	1
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	183
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	14
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	177	183
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	18
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	56
	BA 999.99	Transaksi Khusus	72	23
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	19	1
Jumlah Entitas Akuntansi			**25.211**	**26.271**

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

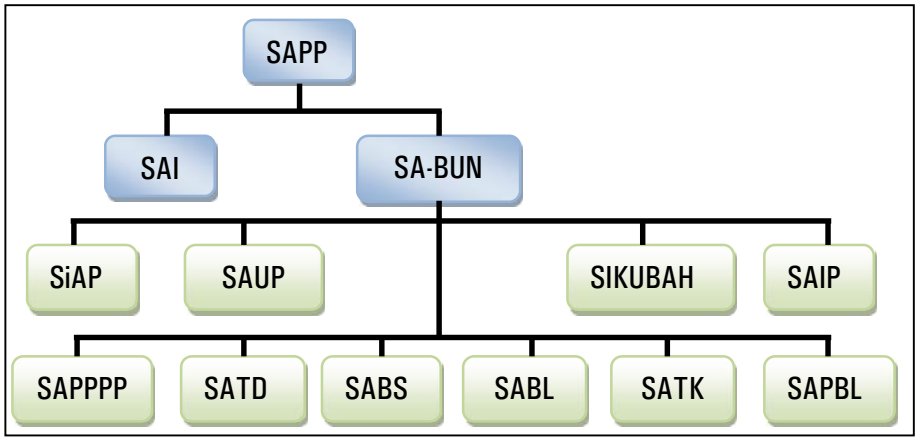
Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan

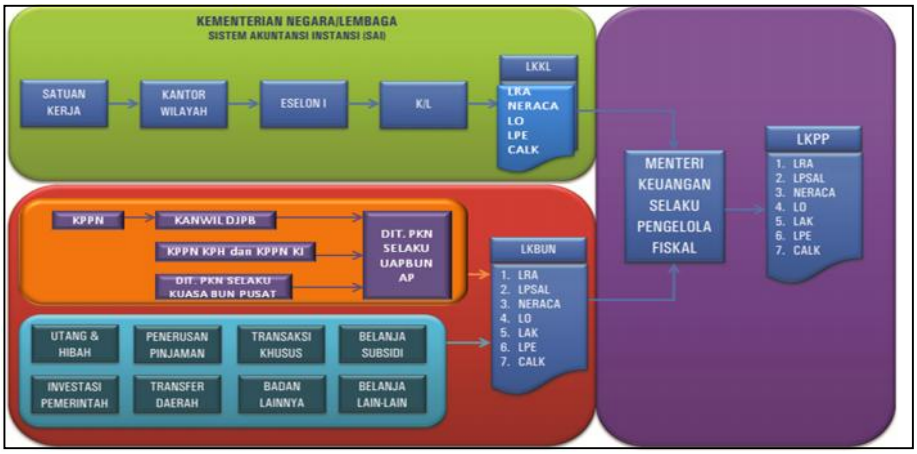
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.

- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

- **Pendapatan**

  Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

  a) Pendapatan-LO

     Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

     Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

- **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui

pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah(SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

- **Pembiayaan**

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

- **Aset**

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan jangka pendek, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas lainya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

- **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal

bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

- **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
    1. peralatan dan mesin; atau
    2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
    1. gedung dan bangunan; atau
    2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Penyajian aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali pada Laporan Keuangan dilakukan setelah hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud

dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

- **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

  Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

  Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

  Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

  Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

  Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

  SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

  Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

  Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

  - ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
  - **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
  - ***Saving Bond Ritel*** **(SBR)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (monthly). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
  - **Sukuk Tabungan (ST)** adalah adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 2 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap setiap bulan (fixed coupon), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bond*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- ***International Bonds*** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

- **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.481,00	13.548,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.211,29	10.557,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.624,37	10.778,92
Franc Swiss [CHF]	1	14.709,75	13.842,15
Yuan China [CNY]	1	2.109,95	2.073,40
Kroner Denmark [DKK]	1	2.217,87	2.172,34
Euro [EUR]	1	16.559,75	16.173,62
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.372,78	18.218,01
Yen Jepang [JPY]	100	13.111,51	12.021,84
Korean Won [KRW]	1	13,03	12,70

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
   Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:

   a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
   b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Oustanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – *Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah*

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

- **Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

- **Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan**

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

- **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP barbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

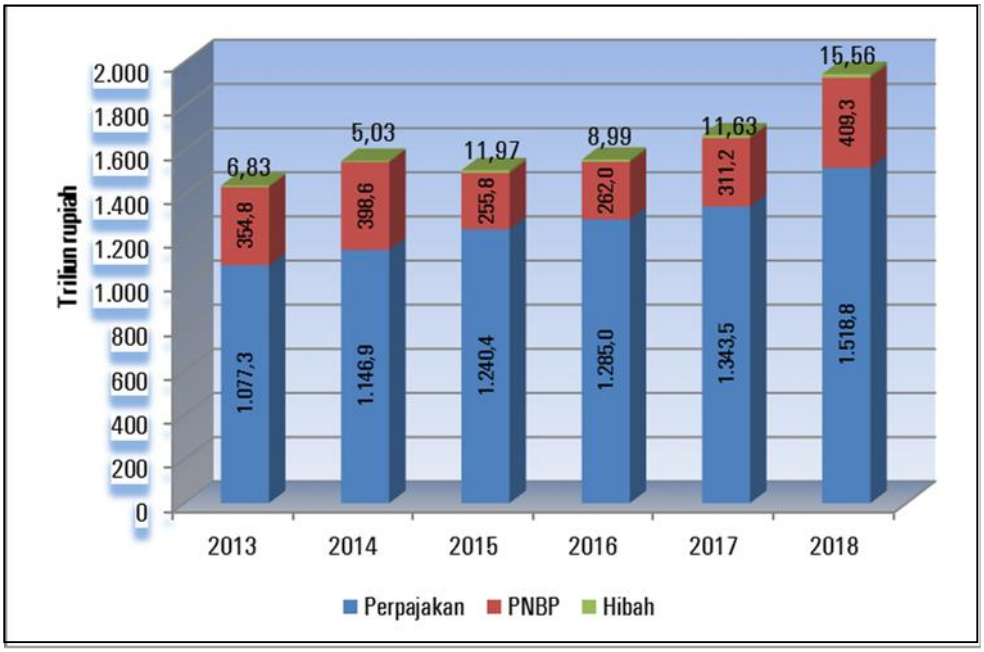
1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasls Akrual pada Lamplran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

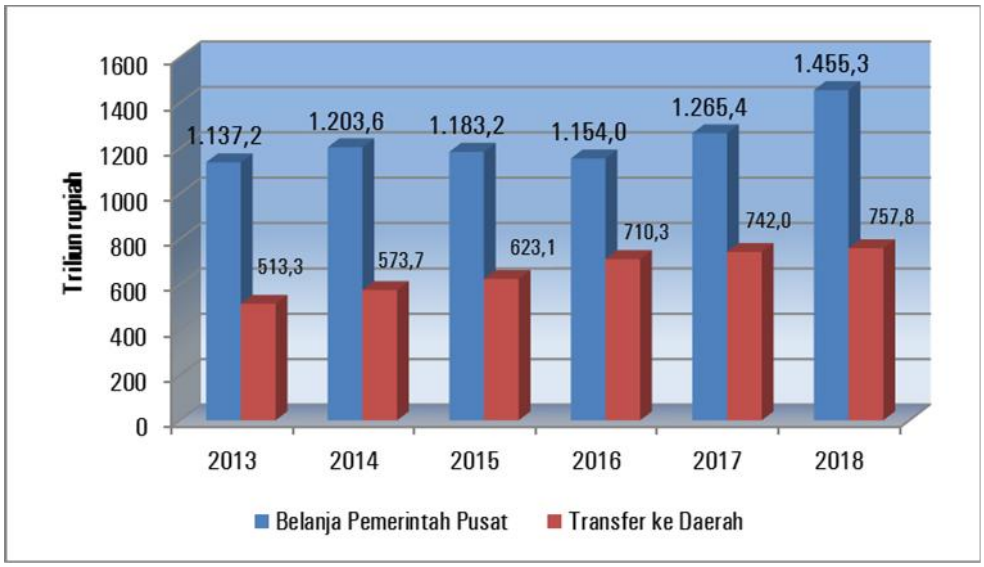
Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau mencapai 102,58 persen dari target APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.518.789.777.151.030, PNBP sebesar Rp409.320.239.488.446, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp370.614.635.480.

Pendapatan Negara TA 2018 mengalami kenaikan Rp277.298.964.220.711 atau lebih besar 16,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2017. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2013 - 2018

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455.324.879.227.617, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943.674.876.878.796 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.213.117.817.284.996, maka Defisit Anggaran pada TA 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp302.515.788.492.391 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629. Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.

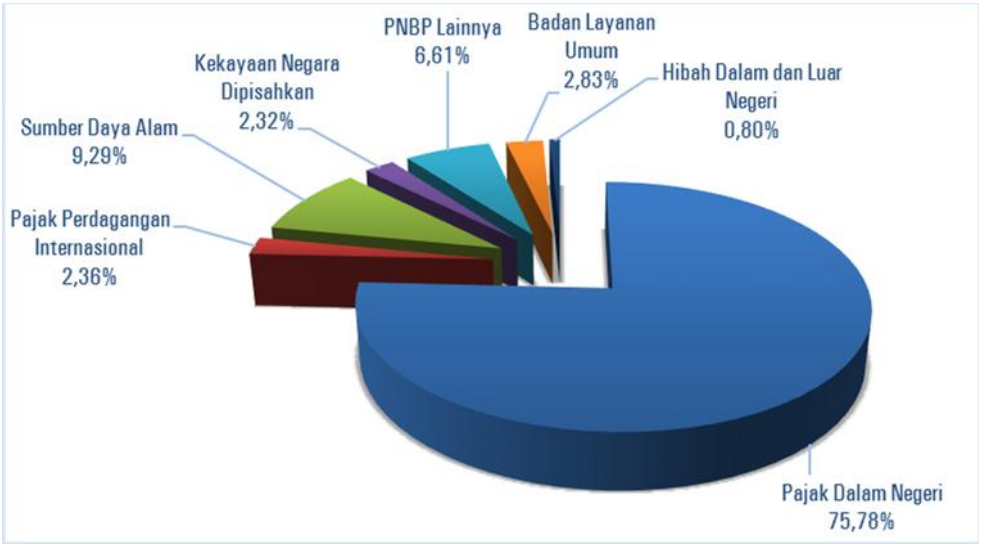
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara Rp1.943,67 triliun

Realisasi Pendapatan Negara TA 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau 102,58 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.A.

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.518,78 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2018 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 atau 93,86 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.618.095.493.162.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2018 lebih besar Rp175.259.933.352.520 atau naik 13,04 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebesar Rp370.614.635.480.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Penerimaan Perpajakan antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar Rp2.171.714.481.

B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp1.472,90 triliun

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.472.907.964.370.352 atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.579.395.493.162.000. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 lebih besar Rp168.591.695.142.313 atau naik 12,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas)	64.699.145.451.922	50.315.750.744.783
Pendapatan Pajak Pengahasilan Nonmigas	675.165.778.735.455	587.543.573.276.305
Pendapatan Pajak Pengahasilan Fiskal	349.905.982	349.728.807
Pendapatan Pajak Pengahasilan Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah	**1.472.907.964.370.352**	**1.304.316.269.228.039**

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 terutama pada PPh Migas sebesar Rp14.383.394.707.139, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp45.580.610.630.856, PPN dan PPnBM sebesar Rp56.543.301.775.508, dan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104. Kenaikan PPh Migas yang cukup signifikan disebabkan harga ICP yang meningkat, dan meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) karena meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP.

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 12,93 persen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian (terutama meningkatnya konsumsi dan impor), serta positifnya kondisi sektoral utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri juga didorong oleh meningkatnya kemampuan memungut pajak sebagai hasil dari meningkatnya basis pajak (dampak kebijakan *Tax Amnesty*) dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif, serta keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp45,88 triliun

B.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 atau 118,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp38.700.000.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 lebih besar Rp6.668.238.210.207 atau naik 17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 *(Audited)*
Pendapatan Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Pendapatan Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah	**45.881.812.780.678**	**39.213.574.570.471**

Kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional pada Tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh komoditi utama yang terkena Bea Keluar (ekspor minerba), dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai seperti penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional juga didukung oleh meningkatnya volume aktivitas perdagangan internasional (ekspor-impor), peningkatan devisa impor dan peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA).

B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp409,32 triliun

Realisasi PNBP TA 2018 adalah sebesar Rp409.320.239.488.446 atau 148,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp275.427.969.415.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2018 lebih besar Rp98.103.985.631.361 atau naik 31,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp311.216.253.857.085. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp180,59 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 atau 174,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp103.674.868.751.000. Penerimaan SDA TA 2018 lebih besar Rp69.460.607.409.729 atau naik 62,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017(*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah	**180.592.649.823.641**	**111.132.042.413.912**

Kenaikan realisasi penerimaan SDA terjadi pada seluruh jenis pendapatan, kecuali Pendapatan Perikanan. Kenaikan signifikan terutama pada pendapatan minyak bumi dan gas bumi yang dipengaruhi oleh rata-rata ICP tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel. ICP tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017, sebesar 51,2 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,0 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan Pendapatan Pertambangan Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi komoditas pertambangan umum.

B.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp45,06 triliun

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 2018 berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 sebesar Rp45.060.521.375.969 atau 100,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp44.695.387.920.000. Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 ini lebih besar Rp1.156.304.264.296 atau naik 2,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Rincian Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	16.267.751.186.649	12.460.928.189.608
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	28.792.770.189.320	31.443.288.922.065
Jumlah	**45.060.521.375.969**	**43.904.217.111.673**

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp16.267.751.186.649 seluruhnya merupakan Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN. Sedangkan, Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp28.792.770.189.320 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN sebesar Rp28.335.119.189.320 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp457.651.000.000.

Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan yang mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik khususnya BUMN Perbankan maupun kondisi perekonomian yang mendukung kinerja BUMN.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 tersebut, sebesar 85,98 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah
1	PT Telkom	8.651.640.277.399
2	PT Pertamina	8.569.790.000.000
3	PT Bank Rakyat Indonesia	7.472.280.892.834
4	PT Bank Mandiri	5.572.714.448.000
5	PT Bank Negara Indonesia	2.859.459.907.905
6	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.919.750.000.000
7	PT Jasa Raharja	1.269.902.963.670
8	PT Pegadaian	1.005.367.000.000
9	PT Pupuk Indonesia	768.850.000.000
10	PT Pelabuhan Indonesia II	653.968.051.800
Total 10 BUMN		**38.743.723.541.608**

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1.B.

B.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya Rp128,57 triliun

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2018 adalah sebesar Rp128.574.010.038.218 atau 153,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp83.753.115.091.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2018 lebih besar Rp19.739.448.262.666 atau naik 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	22.768.752.720.908	17.395.210.236.393
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250.827.244.737	196.631.066.809
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1.575.471.215.636	503.190.153.764
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	573.611.868.078	615.775.120.447
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	62.256.481.499	
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	20.655.579.279.504	6.979.420.198.806
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.351.576.937.661	1.157.518.727.502
Sub Total	**47.238.075.748.023**	**26.847.745.503.721**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.508.128.693.239	1.891.930.718.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	801.858.988.566	743.766.318.732
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	710.472.768.619	829.074.665.967
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	1.253.573.712.907	458.346.658.250
Pendapatan Perizinan	1.566.453.310.352	2.603.827.263.108
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.491.555.385.000	9.080.142.986.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	876.003.488.818	1.521.505.527.406
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	560.109.228.431	
Sub Total	**17.768.155.575.932**	**17.128.594.138.373**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.849.996.353.287	3.692.049.439.026
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	179.606.380.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.312.823.136	-

Pendapatan Jasa Agraria	2.177.144.211.554	2.318.870.035.242
Pendapatan Jasa Keagamaan	869.992.567.168	796.259.570.822
Sub Total	**7.421.052.335.146**	**6.807.179.045.090**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.091.137.740.960	4.484.816.582.419
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	283.378.471.210	
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	383.125.471.424	102.755.561.086
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.252.526.140	15.889.100.893
Sub Total	**4.763.894.209.734**	**4.603.461.244.398**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.319.589.621.391	
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	17.446.455.866.510	17.578.783.121.175
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	184.441.567.495	60.897.960.246
Sub Total	**23.950.487.055.396**	**17.639.681.081.421**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	204.088.090.073	158.901.986.453
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	21.799.455.591	4.173.205.256.034
Pendapatan Jasa Lainnya	684.168.810.068	2.521.751.745.094
Sub Total	**910.056.355.732**	**6.853.858.987.581**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.656.180.667.138	1.535.360.256.560
Pendapatan Gain On Bond Redemption		6.497.500.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	2.282.759.533.200	6.110.092.446.400
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan Fee Lainnya Atas Transaksi SBN	94.901.097.815	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	242.930.299.187	23.239.529.318
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	287.720.782.980	264.409.379.457
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	6.054.091.902.483	5.041.464.684.573
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.447.093.712	412.785.656.940
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	53.238.480.276	40.120.604.821
Sub Total	**11.153.269.856.791**	**13.503.079.012.415**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	540.373.238.968	565.766.276.076
Pendapatan Denda II	65.693.449.290	169.770.738.744
Pendapatan Denda III	5.657.999.395	1.730.891.600
Sub Total	**611.724.687.653**	**737.267.906.420**
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	6.467.615.893.218	12.363.242.225.359
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	261.161.535.102	221.236.016.033
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	33.306.961.074	14.368.455.221
Pendapatan Lain-Lain I	7.704.637.733.401	
Pendapatan Lain-Lain II	234.908.790.827	414.745.107.318
Pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	
Pendapatan dari surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Sub Total	**14.757.294.213.811**	**14.713.694.856.133**
Jumlah PNBP Lainnya	**128.574.010.038.218**	**108.834.561.775.552**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2018 meningkat dibandingkan TA 2017 terutama karena peningkatan dari Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas. Peningkatan PNBP Lainnya juga terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang khususnya penjualan hasil tambang batu bara, adanya peningkatan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum.

B.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Rp55,09 triliun

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 atau 127,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp43.304.597.653.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2018 lebih besar Rp7.747.625.694.670 atau naik 16,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	28.739.609.164.736	25.499.135.736.497
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.507.220.557.604	1.173.415.343.107
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.622.794.124.394	17.327.970.928.406
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	944.213.288.248	250.097.458.163
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**48.813.837.134.982**	**44.250.619.466.173**
Pendapatan Hibah BLU	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah	**55.093.058.250.618**	**47.345.432.555.948**

Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2018 dan meningkat dibanding tahun 2017 terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

B.2.1.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp15,56 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 atau 1.300,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.196.865.400.000. Penerimaan Hibah TA 2018 lebih besar Rp 3.935.045.236.830 atau naik 33,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**13.178.185.591.822**	**7.410.435.627.384**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	**2.386.674.647.498**	**4.219.379.375.106**
Jumlah Penerimaan Hibah	**15.564.860.239.320**	**11.629.815.002.490**

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.300,47 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2018. Hibah Langsung Dalam Negeri terutama dipengaruhi oleh adanya hibah langsung dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik.

Untuk realisasi Hibah Luar Negeri Terencana sebesar Rp418.374.595.589 yang berarti tidak mencapai target APBN sebesar Rp1.196.865.400.000 antara lain karena terdapat beberapa Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah belum merealisasikan kegiatan yang dibiayai dari hibah di tahun 2018.

Belanja Negara Rp2.213,11 triliun

B.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Belanja Negara TA 2018 lebih besar Rp205.766.007.078.110 atau naik 10,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.455,32 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 adalah sebesar Rp1.455.324.879.227.617 atau 100,06 persen dari APBN TA 2018 sebesar Rp1.454.494.390.020.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 lebih besar Rp189.965.450.482.098 atau naik 15,01 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp1.265.359.428.745.519.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melampaui dari Pagu APBN TA 2018 dikarenakan terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2018 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2018 yaitu dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 35. Ketentuan lebih mengenai Revisi DIPA di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Revisi DIPA sepanjang tahun 2018, total pagu DIPA untuk Belanja Pemerintah Pusat bertambah dari Pagu APBN yang semula Rp1.454.494.390.020.000 menjadi sebesar Rp1.575.193.377.332.000. Penambahan/Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2018 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan Saldo BLU dari tahun sebelumnya;
2. Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN;
3. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;
4. Penambahan Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2018 ditetapkan;
5. Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan /proyek pada K/L
6. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran dari BA BUN 999.08 juga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik Belanja);
7. Penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018 dalam rangka pembayaran bunga utang, serta untuk pembayaran discount SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi *yield* SUN di pasar keuangan; dan
8. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar Rupiah.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

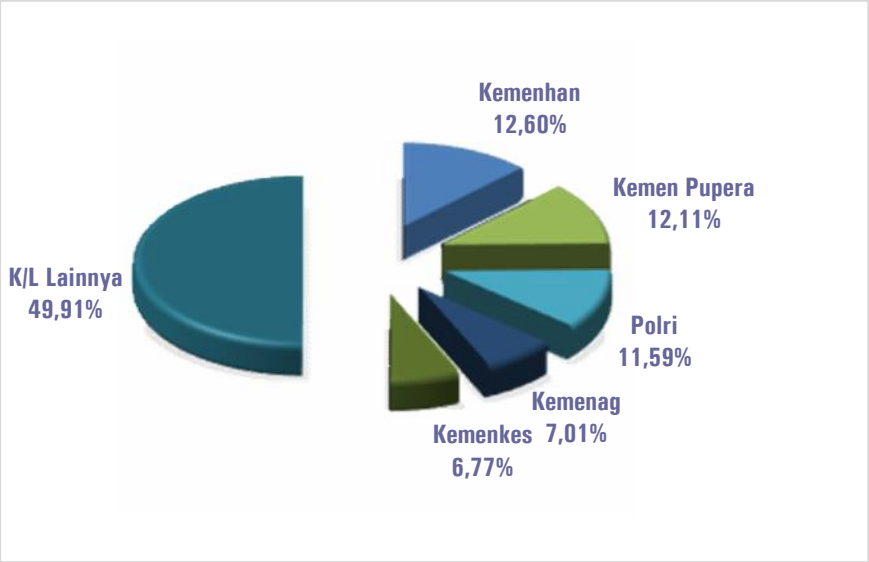
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp846.561.639.143.821 dan Belanja pada pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp608.763.240.084.018.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp222.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2018 dan 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

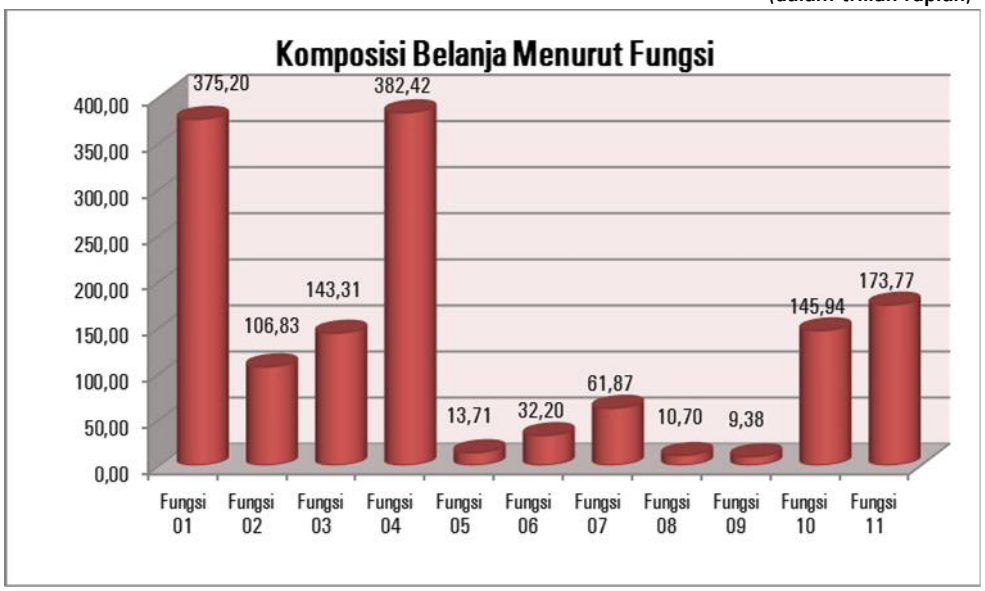
Tabel 15. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2018 dan TA 2017

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	435.870.738.404.000	375.196.058.527.405	307.147.187.148.915
02	Pertahanan	107.829.073.062.000	106.832.343.039.117	117.506.617.827.295
03	Ketertiban dan Keamanan	135.992.740.817.000	143.305.834.551.443	135.748.091.293.879
04	Ekonomi	335.488.556.325.000	382.420.938.264.524	307.787.488.810.661
05	Lingkungan Hidup	15.680.368.482.000	13.709.647.546.748	10.613.749.846.516
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.508.367.660.000	32.198.021.305.359	27.277.374.331.722
07	Kesehatan	65.066.241.944.000	61.869.740.305.698	57.225.069.767.633
08	Pariwisata dan Budaya	7.456.033.221.000	10.699.961.811.579	5.770.640.693.430
09	Agama	9.473.281.586.000	9.379.001.902.213	8.870.392.959.219
10	Pendidikan*	147.571.689.561.000	145.941.716.362.457	138.507.296.388.955
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	162.557.298.958.000	173.771.615.611.074	148.905.519.677.588
00	Tidak ada fungsi**			(294)
	Total	**1.454.494.390.020.000**	**1.455.324.879.227.617**	**1.265.359.428.745.519**

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp441.131.393.403.000.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018 terlihat pada Grafik 22.

(dalam triliun rupiah)



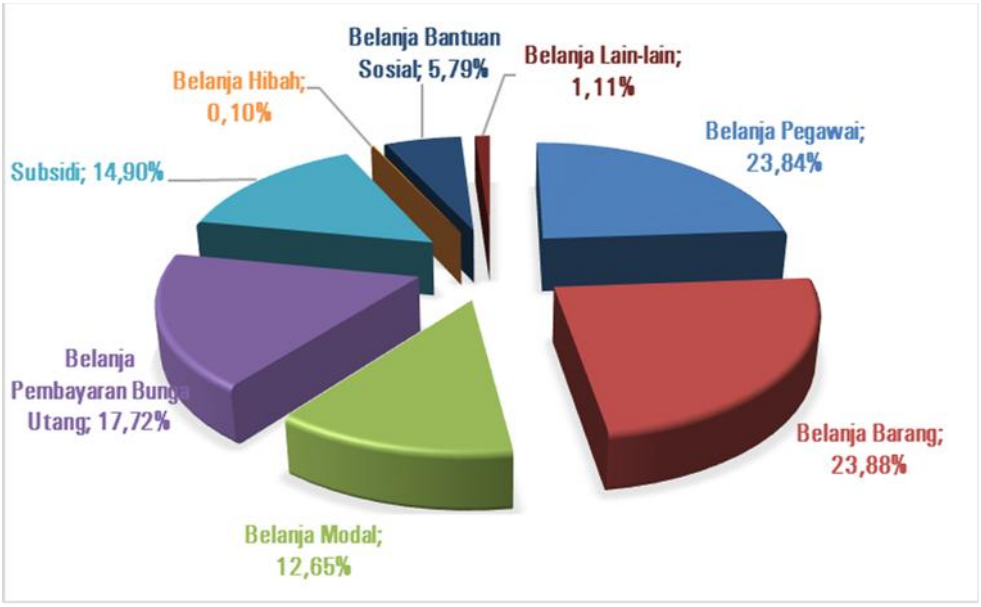
Grafik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp346,89 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 atau 94,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp365.691.526.092.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2018 lebih besar Rp34.162.008.474.514 atau naik 10,92 persen dari realisasi TA 2017. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.761.414.586.452	86.930.689.954.783
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.965.936.719	55.598.387.820.021
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.815.199.731.645	9.921.891.320.235
Belanja Honorarium	1.715.499.887.178	1.424.831.461.810
Belanja Lembur	736.752.950.627	726.231.100.431
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.843.429.192.342	54.327.231.140.342
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	49.297.918	(104.106.732)
Jumlah	**346.890.764.906.966**	**312.728.756.432.452**

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara. Pada tahun 2018, THR juga diberikan kepada pensiunan.

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang Rp347,46 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 atau 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp340.130.197.863.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2018 lebih besar Rp56.009.201.765.977 atau naik 19,22 persen dari Realisasi TA 2017. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	43.230.122.239.028	35.348.784.715.218
Belanja Barang Non Operasional	76.260.723.012.604	54.833.055.287.147
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	11.639.419.655	7.170.705.049
Belanja Kontribusi	317.058.748.451	191.859.442.958
Belanja Barang Persediaan	18.280.492.782.315	14.956.683.394.699
Belanja Jasa	35.723.270.208.473	29.604.088.264.675
Belanja Pemeliharaan	38.181.109.225.774	43.501.069.034.235
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.487.592.947.242	31.288.719.510.943
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.196.165.038.161	2.839.153.746.638
Belanja Barang BLU	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	30.103.540.060.344	23.035.723.226.413
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.260.615.823.049	28.864.014.676
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.697.784.830.577	19.251.191.596.011
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(69.398.142)	217.141.464
Jumlah	**347.468.335.110.569**	**291.459.133.344.592**

Belanja Barang BLU sebesar Rp36.718.290.173.038 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.130.261.968.504	8.834.131.141.188
Belanja Barang	4.525.771.817.413	7.012.276.581.189
Belanja Jasa	4.925.312.401.378	3.242.509.237.465
Belanja Pemeliharaan	1.047.849.457.396	1.001.316.285.880
Belanja Perjalanan	1.101.344.741.454	779.580.000.133
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	2.154.624.925.372	2.525.371.133.860
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6.276.885.963.449	10.620.361.661.301
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	251.835.550.050	-
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.046.747.996.648	2.517.932.755.999
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.137.863.721.756	14.193.974.995
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	10.452.851.992	2.481.628.744
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	277.911.800	5.400.000
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	35.549.375.037	
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	14.238.476.161	
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.137.606.250	
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.055.288.080.965	20.700.253.712
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain	2.847.327.413	
Jumlah	**36.718.290.173.038**	**36.570.860.054.466**

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kinerja penyerapan Belanja Barang tahun 2018 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik di Satuan Kerja Pemerintah, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja, dan meningkatnya Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Kenaikan realisasi Belanja Barang terbesar ada pada belanja barang non operasional terutama digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 yang mencapai 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018, terutama disebabkan adanya penambahan pagu Belanja BLU/Revisi DIPA karena adanya hibah langsung berupa uang yang diterima K/L, dan terkait penambahan pagu DIPA Satuan Kerja BLU untuk Belanja Barang BLU, serta penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN.

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp184,12 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 atau 90,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp203.879.406.594.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2018 lebih kecil Rp24.529.042.735.572 atau turun 11,76 persen dari Realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	3.504.541.754.056	3.420.693.140.383
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.078.527.781	89.603.303.025.072
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.165.890.294.249	27.821.932.251.082
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.370.254.579.143	80.442.482.866.724
Belanja Modal Lainnya	3.074.437.667.301	3.420.971.446.117
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	20.100.002	(124.510.026)
Jumlah	**184.127.627.500.274**	**208.656.670.235.846**

Belanja Modal BLU Rp4.633.404.577.742 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah - BLU	162.541.496.729	79.980.955.957
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.057.924.330.154	1.810.482.376.417
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.123.179.713.015	1.817.990.201.300
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	164.805.262.970	108.698.438.139
Belanja Modal Lainnya - BLU	124.953.774.874	130.260.044.681
Jumlah	**4.633.404.577.742**	**3.947.412.016.494**

Kinerja penyerapan belanja modal tahun 2018 yang mencapai 90,31 persen dari pagu APBN TA 2018 terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada tiga Kementerian/Lembaga dengan alokasi Belanja Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (realisasi sebesar Rp70.232.936.293.010 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp75.825.196.666.000), Kementerian Pertahanan (realisasi sebesar Rp19.141.896.795.971 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp30.063.812.410.000), dan Kepolisian RI (realisasi sebesar Rp27.959.844.574.652 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp28.913.241.668.000). Realisasi belanja modal pada tiga kementerian tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum terbitnya SP3 belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri, dan terdapat kegiatan pengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan yang tidak direalisasikan pada tahun 2018.

B.2.2.1.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp257,95 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 atau 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp238.607.121.370.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 lebih besar Rp41.384.005.619.934 atau naik 19,11 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp216.568.022.521.345.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri – Jangka Panjang	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	390.855.637.193	425.469.471.321
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri	178.387.166.750.674	160.182.860.414.728
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah	**257.952.028.141.279**	**216.568.022.521.345**

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 yang mencapai 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 antara lain disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018. Selain faktor nilai tukar rupiah, pembayaran bunga utang khususnya *discount* SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi *yield* SUN di pasar keuangan. Pelampauan realisasi belanja untuk pembayaran bunga ini sesuai dengan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, karena pemerintah dapat melakukan pembayaran Bunga Utang melebihi pagu UU APBN TA 2018.

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN–Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri, dan Belanja Pembayaran *Discount* SUN Dalam Negeri.

B.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Subsidi Rp216,88 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 atau 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp156.228.125.107.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 lebih besar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178. Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501
Belanja Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674
Belanja Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141
Belanja Subsidi Pangan	-	19.500.250.069.873
Belanja Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000
Belanja Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Belanja Subsidi Pupuk	33.612.732.444.040	28.840.416.670.054
Belanja Subsidi PPh – DTP	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147
Belanja Subsidi BM – DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Belanja Subsidi PT KAI	2.145.056.042.843	2.066.701.261.556
Belanja Subsidi PT PELNI	1.932.549.353.375	2.106.212.269.638
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	155.927.797.800	136.812.799.346
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.285.851.639.491	1.472.174.173.954
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	30.840.009.278	77.345.682.020
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	52.374.490.735	126.295.726.866
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.588.571.574.697	3.172.581.081.357
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	116.443.541.536	414.349.387.000
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	5.206.072.509	6.324.279.981
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	185.015.802	145.227.180
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	125.898.351	33.811.309.551
Jumlah	**216.883.304.115.301**	**166.401.103.129.178**

Kenaikan Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama kenaikan pada Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya. Peningkatan Belanja Subsidi Elpiji dikarenakan kenaikan harga LPG dan kenaikan volume penyalurannya. Peningkatan Belanja Subsidi Minyak Solar dikarenakan Pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi, serta adanya pembayaran utang subsidi tahun 2016.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 mencapai 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama dikarenakan adanya penambahan Pagu DIPA TA 2018 untuk Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni yang merupakan pergeseran pagu dari BA 999.08 ke BA 999.07 untuk penyelesaian kurang bayar Subsidi/PSO Tahun Anggaran sebelumnya. Terdapat penyesuaian pagu subsidi energi (penambahan pada bulan Oktober sebesar Rp45.330.165.941.000, dan pengurangan sebesar Rp3.278.141.677.000) untuk menyesuaikan adanya perubahan parameter, nilai tukar rupiah, perubahan subsidi tetap minyak solar dari Rp500 menjadi Rp2.000, dan perubahan harga minyak mentah Indonesia.

Hal ini sesuai dengan UU APBN 2018 yaitu Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi bahwa belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak Indonesia (ICP), dan atau nilai tukar rupiah.

B.2.2.1.6 Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp1,52 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 atau berarti 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.460.845.703.000.

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 lebih kecil Rp3.925.106.270.871 atau turun 72,08 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.465.989.051.764 dan belanja hibah kepada luar negeri sebesar Rp54.481.623.000 serta belanja hibah lainnya sebesar Rp90.313.521. Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Luar Negeri antara lain digunakan untuk Pembangunan Indonesia Islamic Center di Afganistan sebesar Rp16.176.873.000, restorasi pasca bencana alam gempa bumi di Papua Nugini sebesar Rp7.163.000.000, dan Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji (pembelian alat pertanian) sebesar Rp5.800.000.000, dan kepada Pemerintah Guinea Bissau sebesar Rp25.341.750.000 untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, serta Bank Commission sebesar Rp90.313.521.

Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan MRT	41.283.071.898
Proyek Air Minum	18.974.000.000
Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP-2)	26.378.604.831
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	5.949.000.000
Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB)	1.263.700.590
Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem*	1.386.323.600
Hibah *City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pelambang*	6.933.888.740
Provincial Road Improvement andMaintenance (PRIM)	35.196.147.102
Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project*	29.526.539.891
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	602.333.076.000
Nationwide Water Hibah Program	643.675.520.612
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	53.089.178.500
Jumlah	**1.465.989.051.764**

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 yang mencapai 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 disebabkan adanya penambahan pagu yang merupakan pergeseran anggaran dari BA 999.08 dalam rangka pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar negeri untuk negara Afganistan, Fiji, Guinea Bissau, dan Papua Nugini.

Belanja Bantuan Sosial Rp84,31 triliun

B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 lebih besar Rp29.021.196.078.158 atau naik 52,48 persen dari realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.212.856.984
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.131.609.642
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	-	11.475.000
Jumlah	**84.318.412.919.513**	**55.297.216.841.355**

Kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun 2018 terutama disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 Juta KPM meningkat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. Pemerintah juga konsisten dalam upaya simplifikasi pertanggungjawaban terutama pada penyaluran bantuan sosial sehingga dapat meningkatkan kinerja Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000 disebabkan adanya pergeseran belanja dari BA 999.08 Belanja Lain-Lain menjadi Belanja Bantuan Sosial di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B.2.2.1.8 Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-lain Rp16,16 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 atau 24,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp67.237.405.721.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 lebih besar Rp7.360.986.563.835 atau naik 83,62 persen dari realisasi TA 2017.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	528.513.624.711	28.578.926.000
Belanja Lain-lain BUN	10.852.819.577.533	3.975.569.242.950
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah	**16.163.845.545.430**	**8.802.858.981.595**

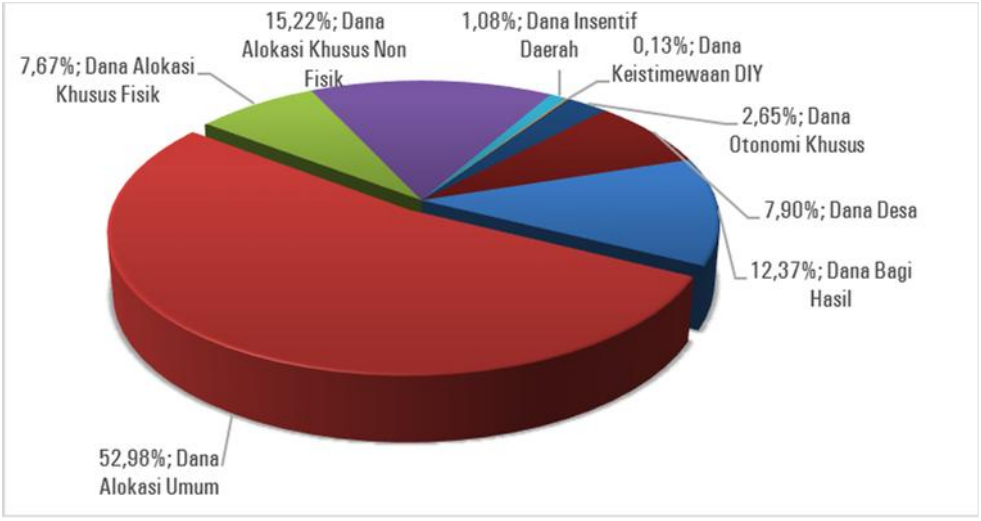
Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 2018 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik belanjanya, dan pagu pada APBN 2018 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2018.

B.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp757,79triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp757.792.938.057.379 atau 98,91 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp766.162.576.557.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 disajikan pada Grafik 24.



Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018

Rincian penyaluran neto DBH, DAU, dan Dana Penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 3A.

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp697,93 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp697.933.529.448.104 atau 98,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp706.162.576.557.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 ini lebih besar Rp15.707.725.514.140 atau naik 2,30 persen dari Realisasi TA 2017. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp668,64 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 adalah sebesar Rp668.643.196.262.104 atau 98,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp676.602.993.371.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2018 ini lebih besar Rp14.160.684.918.140 atau naik 2,16 persen dari realisasi TA 2017. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum Rp495,19 triliun

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 adalah sebesar Rp495.193.618.043.420 atau 100,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp490.714.921.663.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 lebih besar Rp8.379.106.152.783 atau naik sebesar 1,72 persen dibandingkan TA 2017.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH Rp93,70 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2018 adalah sebesar Rp93.704.038.394.420 atau 105,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp89.225.342.014.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 ini lebih besar Rp5.471.841.251.783 atau naik 6,2 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp88.232.197.142.637.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**45.695.178.904.793**	**53.668.650.342.060**
Dana Bagi Hasil Cukai	**2.922.191.165.245**	**2.921.873.779.440**
Dana Bagi Hasil SDA		
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**45.086.668.324.382**	**31.641.673.021.137**
Total Dana Bagi Hasil	**93.704.038.394.420**	**88.232.197.142.637**

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih besar dari anggarannya terutama disebabkan oleh pembayaran atas kurang bayar DBH tahun anggaran sebelumnya, yang belum dianggarkan dalam APBN TA 2018. Penambahan pagu anggaran DBH berasal dari pergeseran BA 999.08 ke BA 999.05. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH sebesar Rp5.471.841.251.783 terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.074.093.618.352 dan DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp7.972.820.107.807.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

B.2.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum

DAU Rp401,48 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2018 ini lebih besar Rp2.907.264.901.000 atau naik 0,73 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2018 meningkat sebesar Rp2.907.264.901.000 karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2018.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus Rp173,44 triliun

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp173.449.578.218.684 atau 93,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp185.888.071.708.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp5.781.578.765.357 atau naik 3,45 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp167.667.999.453.327.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik Rp58,14 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp62.436.262.908.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 ini lebih kecil Rp3.954.931.985.107 atau menurun 6,37 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp62.104.230.254.352.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2018 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dan Tambahan DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017(*Audited*)
DAK Reguler	29.411.961.830.062	17.631.735.799.036
DAK Infrastruktur Publik Daerah	22.482.775.199.874	30.593.209.199.748
DAK Affirmasi	6.254.561.239.309	2.859.365.226.598
Tambahan DAK Fisik	-	11.019.920.028.970
Jumlah DAK Fisik	**58.149.298.269.245**	**62.104.230.254.352**

Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13% dari APBN 2018 dikarenakan adanya penyesuaian penyaluran DAK Fisik Tahap III dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan berdasarkan daftar kontrak yg telah disampaikan pada penyaluran Tahap I dan terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pada tahun 2018 tidak dialokasikan Tambahan DAK Fisik.

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik Rp115,3 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,4 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp123.451.808.800.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 ini lebih besar Rp9.736.510.750.464 atau naik 9,22 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp105.563.769.198.975. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.332	49.929.771.976.077
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	**115.300.279.949.439**	**105.563.769.198.975**

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,40% dari APBN 2018 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG (pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima BOS, khususnya pada jenjang SD.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2018 mengalami peningkatan Rp9.736.510.750.464 atau 9,22%, terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp5.086.948.236.255, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp2.047.134.505.087, dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp1.508.311.439.198.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp8,23triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp8.230.750.000.000 atau 96,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp8.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp730.750.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp7.500.000.000.000 atau naik 9,74 persen dikarenakan terdapat penambahan daerah yang memenuhi kriteria mendapat Dana Insentif Daerah.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Keistimewaan DIY Rp1triliun

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2018 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2018 lebih besar Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp800.000.000.000 atau naik 25 persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp20,05 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	**20.059.583.186.000**	**19.443.292.590.000**

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2018 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan insfrastruktur untuk Papua Barat.

B.2.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa Rp59,85 triliun

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 59.859.408.609.275 atau 99,77 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2018 ini lebih besar Rp92.831.081.872 atau naik 0,16 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp59.766.577.527.403. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa. Dana Desa TA 2018 tersebut dialokasikan kepada 74.958 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

Persentase realisasi Dana Desa tahun 2018 tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pada Tahun 2018 Pemerintah melakukan upaya percepatan penyaluran Dana Desa dan penambahan tahapan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

B.2.3 Defisit Anggaran

Defisit Anggaran minus Rp269,44 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2018, maka Defisit Anggaran TA 2018 adalah sebesar Rp269.442.940.406.200 atau 82,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Defisit Anggaran	**(269.442.940.406.200)**	**(340.975.897.548.801)**

B.2.4 Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp305,69 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau 93,79 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2018 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200 dan Produk Domestik Bruto tahun 2018 sebesar Rp14.837,40 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,79 persen.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2018

Pada APBN 2018 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp325.936.638.600.000, sedangkan realisasi sebesar Rp305.692.597.869.020 yang terdiri atas Pembiayaan Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	APBN 2018	Realisasi
Pembiayaan Utang		
Surat Berharga Negara (Neto)	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18.439.254.718.000)	12.276.549.111.864
Total	**399.219.360.282.000**	**372.028.859.447.862**
Pembiayaan Investasi		
Investasi Kepada BUMN	(3.600.000.000.000)	(3.600.000.000.000)
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya (BP Tapera)	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(57.433.160.000.000)	(52.682.730.000.000)
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.121.153.274.000)	(2.331.096.461.400)
Total	**(65.654.313.274.000)**	**(61.113.826.461.400)**
Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177
Total	**(6.690.093.408.000)**	**(4.269.733.337.998)**
Kewajian Penjaminan		
Kewajiban Penjaminan	**(1.121.315.000.000)**	**(1.121.315.000.000)**
Total	**(1.121.315.000.000)**	**(1.121.315.000.000)**
Pembiayaan Lainnya		
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	183.000.000.000	163.619.880.618
Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		5.000.000.000
Total	**183.000.000.000**	**168.613.220.556**
Total Pembiayaan	**325.936.638.600.000**	**305.692.597.869.020**

B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp302,51 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp302.515.788.492.391 atau 85,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp354.950.980.138.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (i) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iil) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1 Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Rekening Pemerintah/ Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2018, Penggunaan SAL tidak dianggarkan dalam APBN TA 2018.

B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,82 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar Rp4.829.999.737.177 atau 124,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp3.884.993.412.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	8.124.198.926	9.105.652.119
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	150.000.004	-
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	326.830.783.945	332.670.226.562
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.296.966.836	11.923.640.707
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	62.227.742.264	41.250.464.518
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	1.300.199.480	27.690.698.149
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.598.669.439.670	3.591.468.563.170
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	46.088.406.051	67.264.762.052
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.312.000.001	735.156.000.000
Total	**4.829.999.737.177**	**4.816.530.007.277**

B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp163,61 miliar

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 adalah sebesar Rp163.619.880.616 atau 89,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp183.000.000.000. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp124.649.183.550 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp38.970.697.066.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	124.649.183.550	233.478.439.644
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	38.970.697.066	125.606.995.261
Jumlah	**163.619.880.616**	**359.085.434.905**

B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp358,39 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 sebesar Rp414.520.685.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan stabilisasi pasar serta pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan:		
Penerbitan/Penjualan SPN	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	320.274.306.000.000	233.576.660.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	5.446.859.375.000	4.307.352.996.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	96.869.377.647.000	90.917.094.052.727
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.734.060.896.401	1.663.933.848.698
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Total Penerimaan	**782.313.242.271.401**	**726.270.982.344.698**
Pengeluaran:		
Pelunasan SPN	(170.257.290.000.000)	(128.390.000.000.000)
Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara	(83.438.091.186.177)	(66.282.433.592.954)
Pembelian Kembali Obligasi	(515.000.000.000)	(1.255.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(5.546.137.909.040)	(4.324.143.651.960)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(73.588.948.000.000)	(22.555.554.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(1.640.239.131.401)	(1.640.928.188.698)
Pelunasan SPN Syariah	(46.070.000.000.000)	(32.750.000.000.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(28.241.044.500.000)	(27.246.600.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(14.618.000.000.000)	
Total Pengeluaran	**(423.914.750.726.618)**	**(284.444.659.433.612)**
Jumlah SBN (Neto)	**358.398.491.544.783**	**441.826.322.911.086**

Pada tahun 2018, pembiayaan dari SBN Neto dipengaruhi adanya perubahan strategi pembiayaaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai (Pinjaman Tunai bertambah sebesar Rp36.617.421.600.000 sebagaimana dijelaskan pada B.2.4.2.1.1).

Di dalam realisasi penerimaan pembiayaan SBN tidak termasuk nilai *prefunding* 2019 sebesar Rp43.314.553.530.000. Atas realisasi pembiayaan dari SBN Tahun 2018 sebesar Rp358.398.491.544.783 termasuk di dalamnya penerimaan Penerbitan Penjualan Obligasi Negara sebesar Rp515.000.000.000 dan penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp18.344.995.000 dalam rangka *debt switch*.

Penerimaan utang bunga obligasi sebesar Rp5.446.859.375.000 merupakan penerimaan yang berasal dari perbedaan antara tanggal penerbitan SBN dengan tanggal penerbitan kupon dan pembayarannya menggunakan akun Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara.

Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara dan Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang terdapat pembayaran atas utang bunga 2017 senilai Rp189.935.384.040.

B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp1,35 triliun

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.353.818.791.215 atau 43,14 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar Rp3.137.930.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.075.568.713.531)	(656.763.630.395)
Jumlah	**1.353.818.791.215**	**648.291.571.852**

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 naik sebesar Rp705.527.219.363 atau 108,83% dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 sebesar Rp648.291.571.852.

Realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp943.529.183.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp46,11 triliun

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2018 adalah sebesar minus Rp46.113.826.461.400 atau 91,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp50.654.313.274.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2018 adalah:

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya		-
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(3.600.000.000.000)	(6.379.318.092.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(2.331.096.461.400)	(2.024.176.469.382)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara		(32.050.560.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.530.000.000.000)	(5.600.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(2.500.000.000.000)	(3.200.000.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi		
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(31.152.730.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional	(1.000.000.000.000)	
Jumlah	**(46.113.826.461.400)**	**(49.254.054.561.382)**

PMN untuk BUMN sebesar Rp3.600.000.000.000 merupakan PMN kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) sebesar Rp42.984.459.135, *International Development Bank* (IDB)sebesar Rp77.923.202.265, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp57.924.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp1.994.792.800.000, dan *International Development Association* sebesar Rp157.472.000.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp5.530.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp2.180.000.000.000, BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp2.500.000.000.000, dan BLU Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp850.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp2.500.000.000.000 merupakan PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000) untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan minusRp1,12 triliun

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.121.315.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN TA 2018 sebesar minus Rp1.121.315.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp1.121.315.000.000 yang dianggarkan pada APBN TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	(297.400.000.000)	(427.965.000.000)
Proyek percepatan penyediaan air minum	(1.102.000.000)	(1.157.000.000)
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(389.500.000.000)	(296.023.000.000)
Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(284.700.000.000)	(35.300.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN	(148.613.000.000)	(41.929.000.000)
Penugasan Kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	-	(203.000.000.000)
Jumlah	**(1.121.315.000.000)**	**(1.005.374.000.000)**

B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional minus Rp15 triliun

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 adalah minus Rp15.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp15.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp10.500.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9 Pembiayaan lain-lain

Pembiayaan lain-lain Rp5 miliar

Terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain berupa penerimaan sebesar Rp5.000.000.000. Penerimaan pembiayaan lain-lain ini merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) Rp3,17 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629 karena nilai penarikan pinjaman lebih besar dari pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018. APBN tahun 2018 menargetkan penarikan pinjaman lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan sebesar minus Rp29.014.341.538.000.
Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinjaman, dan (iii) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp88,60 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 atau 172,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp51.345.917.282.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Tunai dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek.

B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Tunai

Penarikan Pinjaman Tunai Rp50,62 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2018 adalah sebesar Rp50.625.053.600.000 atau 377,8 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp13.400.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.677.086.262.497 dari sebelumnya sebesar Rp20.947.967.337.503. Realisasi yang mencapai 377,8 disebabkan adanya perubahan strategi pembiayaaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai/Program. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU APBN TA 2018 yaitu dalam hal terdapat instrument pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Pinjaman Tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan Pinjaman Proyek Rp37,98 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 adalah sebesar Rp37.984.692.874.180 atau 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp37.945.917.282.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.205.804.872.526 dari sebelumnya sebesar Rp30.778.888.001.654. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek yang mencapai 100,10 persen dari Pagu APBN 2018 sudah cukup tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu, namun demikian, masih terdapat Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Pertahanan yang belum melakukan pengesahan belanja yang dibiayai dari Pinjaman Proyek.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Penerusan Pinjaman minus Rp9,09 triliun

B.2.4.2.2 Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar minus Rp9.099.739.735.235 atau 86,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp10.575.086.820.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	(3.618.555.506.556)	(1.003.985.193.194)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD	(5.481.184.228.679)	(5.864.931.271.973)
Total	**(9.099.739.735.235)**	**(6.868.916.465.167)**

B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp76,33triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2018. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2018 adalah sebesar minus Rp76.333.197.362.316 atau 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp69.785.172.000.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(22.356.849.857.109)	(16.320.383.114.913)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(53.968.748.159.161)	(48.799.093.676.802)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	(7.599.346.046)	(5.441.299.170)
Jumlah	**(76.333.197.362.316)**	**(65.124.918.090.885)**

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri yang mencapai 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018.

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp36,24 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp36.249.657.462.820 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA (SiKPA)	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersamaTA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2018 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	23.156.584.727	18.391.457.191	
018	Kementerian Pertanian	1.230.351.130.156	8.283.739.065.556	
019	Kementerian Perindustrian	71.435.554.595		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	332.255.408.981		
024	Kementerian Kesehatan	972.872.928.116		
026	KementerianKetenagakerjaan	133.191.099.591	115.690.929.044	
027	Kementerian Sosial	606.876.574.168	98.143.769.223	
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.881.406.241	228.188.186.203	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	105.379.369.020	75.788.241.072	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.273.676.933	1.575.210.110.497	
040	Kementerian Pariwisata	79.541.167.747		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	101.282.960.729	65.744.835.534	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.183.643.146		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	27.070.426.596		
057	Perpustakaan Nasional	33.244.107.399		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	16.746.194.414		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.304.548.633.169	514.797.690.875	28.600.777.904
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	23.652.645.744		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	6.813.882.034		
090	Kementerian Perdagangan	58.548.911.714	1.280.360.653.619	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	138.045.311.792		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	245.660.000		
	Total	**6.419.597.277.012**	**12.256.054.938.814**	**28.600.777.904**

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 217 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	17
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	39
9	Kementerian Perhubungan	33
10	Kementerian ESDM	8
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
12	Sekretariat Negara	2
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
14	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
17	Kementerian Ristek Dikti	34
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
19	Kementerian Pertahanan	8
20	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Jumlah BLU	**217**

Ditinjau dari jenis layanan, dari 217 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

203 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

10 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai Lampiran 4.

4. *Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2018

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3,yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman,dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2018 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Terdapat 4 (empat) kementerian lembaga dengan total nilai sebesar Rp691.439.453.411 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp230.197.773.003, Kepolisian RI sebesar Rp444.997.297.498, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.357.980.669, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp4.886.402.242.

5. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp278.483.793.854 yang dilakukan pemerintah selama TA 2018. *Refund* tersebut ada karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp154.238.882.527 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp124.244.911.327.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).
Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.
Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapkan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 121 kegiatan (65 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 56 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014.000, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120,000 dengan pembiayaan KSA dan 12 kegiatan senilai USD 1,985,894,000 dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan tahun 2016-2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan PSP atas 56 kegiatan (39 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD7,613,300,000 yang terdiri dari 26 kegiatan senilai USD1,734,000,000 dengan pembiayaan KSA dan 30 kegiatan senilai USD5,879,300,000 dengan pembiayaan LPKE.

7. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Permenhan Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan peraturan diatas, terdapat 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada Kemhan yaitu:

1. DIPA Unit Organisasi (UO) Kemhan
2. DIPA Unit Organisasi (UO) Mabes TNI
3. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AD
4. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AL, dan
5. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AU

Masing-masing UO diperlakukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), sehingga pada Kemhan terdapat 5 UAPPA-E1, yaitu UAPPA-E1 Kemhan, UAPPA-E1 Mabes TNI, UAPPA-E1 TNI AD, UAPPA-E1 TNI AL dan UAPPA-E1 TNI AU.

Kemudian dari masing-masing DIPA Induk terbagi menjadi:

1. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri dari:

a. DIPA Satker Kemhan
b. DIPA Satker Mabes TNI
c. DIPA Satker TNI AD
d. DIPA Satker TNI AL, dan
e. DIPA Satker TNI AU

2. DIPA Petikan untuk Satker Daerah

Untuk Satker Daerah mekanisme pelaksanaan anggarannya sama dengan satker pada Kementerian Negara lainnya.

Khusus untuk Satker Pusat, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan diseluruh unit pada masing-masing UO. Mekanisme pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran Satker DIPA Pusat menarik Dana Uang Persediaan yang kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Pada peraturan ini, khusus Satker DIPA Pusat, dari Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000, dan saldo UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melebihi Rp50.000.000.

Untuk Kebijakan pencatatat aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemhan sehubungan dengan Satker DIPA Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang pada unit-unit dicatat terlebih dahulu sebagai Aset pada Satker DIPA Pusat;
2. Untuk memudahkan pencatatan, maka unit-unit pengadaan barang menjadi Subsatker dari Satker DIPA Pusat.
3. Setelah pengadaan barang dicatat pada Subsatker DIPA Pusat, kemudian atas aset tersebut dilakukan Transfer Keluar ke Satker DIPA Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah untuk menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan, pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 telah diundangkan pada tanggal 2 November 2018, dan pemerintah telah melakukan persiapan dan langkah-langkah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga masa peralihan penerapan peraturan dimaksud berjalan dengan baik.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2018.

Berikut adalah rekapitulasi belanja KL yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	010	Kementerian Dalam Negeri	53.489.795.000	49.188.842.894
2	012	Kementerian Pertahanan	11.736.928.000.000	9.243.741.054.923
3	018	Kementerian Pertanian	348.416.297.000	293.492.821.054
4	022	Kementerian Perhubungan	5.723.499.613.000	3.595.242.706.049
5	024	Kementerian Kesehatan	500.000.000	0
6	025	Kementerian Agama	500.000.000.000	87.615.614.861
7	026	Kementerian Ketenagakerjaan	14.669.000.000	9.226.273.000
8	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	13.409.613.040.000	9.940.264.996.672
9	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	3.456.033.017.000	2.934.509.538.311
10	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	163.388.985.000	146.849.145.803
11	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	852.670.000	0
12	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.278.982.517.000	1.856.167.288.949
13	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.065.767.478.000	965.171.182.386
14	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	94.835.000.000	81.179.275.868
15	083	Badan Informasi Geospasial	100.000.000	0
16	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	143.638.472.000	120.540.393.076
17	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	334.551.432.000	102.459.355.109
		Grand Total	**40.325.265.316.000**	**29.425.648.488.955**

Dan berikut merupakan realisasi Belanja KL yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	015	Kementerian Keuangan	30.619.653.000	24.048.750.455
2	018	Kementerian Pertanian	3.000.000.000	2.983.919.382
3	022	Kementerian Perhubungan	12.000.000.000	10.552.212.268
4	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	251.548.893.000	218.324.686.815
5	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	3.686.342.000	3.445.298.718
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	60.648.709.000	41.829.794.720
7	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	27.107.417.000	21.578.353.151
8	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	5.450.000.000	4.073.605.289
9	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	66.761.673.000	64.083.253.118
		Grand Total	**460.822.687.000**	**390.919.873.916**

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi belanja KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran 2.C dan 2.D.

9. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2018, dianggarkan dan direalisasikan pengeluaran pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU. Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tanah untuk PSN tersebut telah disajikan sebagai aset tetap Tanah pada Neraca.

Terkait Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada LMAN tersebut, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemerintah akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakuan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemerintah akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi dalam UU APBN TA 2019 sebagai *land bank*, dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK, dan peraturan terkait.

Kedua langkah di atas, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL per 1 Januari 2018 sebesar Rp 138,35 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138.353.015.853.598 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 *(Audited)*. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo awal Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang Sudah Disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang Sudah Disahkan, beserta penyesuaian dalam perhitungan fisik SAL yang dilakukan di Tahun 2017. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2018	1 Januari 2017
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Saldo Awal Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
	139.599.450.932.318	**119.023.029.667.415**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Saldo di Rek. *Escrow* yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang PFK	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang PFK dalam Bentuk *Invoice*	4.001.304	-
Utang kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Transaksi Persekot Gaji	-	(122.392.649)
Pengembalian *Escrow* PNBP	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(1.246.435.078.720)**	**(5.829.194.403.130)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**138.353.015.853.598**	**113.193.835.264.285**

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp36,25 triliun

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.249.657.462.820 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA/(SiKPA)	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,81 triliun

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp819.451.289.822 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PFK	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**819.451.289.822**	**(526.298.971.307)**

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.683 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp4 merupakan koreksi pembulatan.
5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan penyesuaian akuntansi /pembukuan atas saldo kas hibah yang sudah disahkan di KPPN, antara lain reklasifikasi saldo Kas Hibah menjadi Kas BLU maupun koreksi pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU baru pada tahun 2018, penyesuaian saldo Kas BLU tahun berjalan, dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.

7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.468.719.871 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.
8. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp18.524.998 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.
9. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp2.774.598.030 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp0,18 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp180.408.921.594 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**(180.408.921.594)**	**37.554.962.578**

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2018 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	210.828.164.140	210.828.164.140	-
Saldo Akhir	285.150.273.469	285.150.273.469	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian

Transaksi RPL sebesar minus Rp575.403.332.739, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp417.021.528.777, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar minus Rp472 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.

3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp22.027.117.160 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(298.353.410.242)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	276.326.293.082
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**(22.027.117.160)**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 *(Audited)*
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**138.353.015.853.598**	**113.193.835.264.285**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**138.353.015.853.598**	**113.193.835.264.285**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	**36.249.657.462.820**	**25.647.924.598.042**
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**174.602.673.316.418**	**138.841.759.862.327**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs (*unrealized*)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1)]	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PFK [2)]	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3)]	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	**819.451.289.822**	**(526.298.971.307)**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP [1)]	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL [4)]	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5)]	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris [6)]	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**(180.408.921.594)**	**37.554.962.578**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	285.150.273.469	210.828.164.140
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(74.322.109.329)	52.118.205.345
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(27.853.389.458)	64.182.153.365
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	**46.468.719.871**	**12.063.948.020**
Keterangan: **Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN**	**46.468.719.871**	**3.504.402.474**
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = **Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP**	**-**	**8.559.545.546**

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal Utang PFK (I)	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Saldo Akhir Utang PFK (II)	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(513.714.225.993)	(796.118.363.902)
Mutasi Transaksi PFK (III)	(513.959.408.911)	(763.256.756.069)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	**(245.182.918)**	**32.861.607.833**
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	226.657.920	4.001.304
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice* = **Koreksi Utang PFK pada BUN**	**(18.524.998)**	**32.865.609.137**
Keterangan: Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.	(18.524.998)	-

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	239.936.781.997	614.356.802.242
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	197.868.217.285	239.936.781.997
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(42.068.564.712)	(374.420.020.245)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(44.843.162.742)	(303.256.862.170)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)**	**(2.774.598.030)**	**71.163.158.075**
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(2.774.598.030)	-

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal RPL	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Awal Tahun	(200.259.869.276)	(358.154.958.334)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	3.705.503.747.466	1.180.226.263.735
Koreksi Saldo RPL	5	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	3.705.503.747.471	1.180.226.263.735
Saldo Akhir RPL	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Akhir Tahun	(197.383.044.970)	(200.259.869.276)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	5.654.556.669.254	3.705.503.747.466
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	1.949.052.921.783	2.525.277.483.731
Mutasi Transaksi RPL (III)	1.373.649.589.044	2.459.099.750.222
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = **Penyesuaian Transaksi RPL**	**(575.403.332.739)**	**(66.177.733.509)**
Keterangan: Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal Rek. *Escrow*	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	(3.276.851.117.024)	-
Saldo Awal Rek. *Escrow* untuk perhitungan SAL	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Koreksi Saldo Rek. *Escrow*	-	-
Saldo Awal Rek. *Escrow* untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Saldo Akhir Rek. *Escrow*	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Dikurangi: Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (yang mengandung Unsur Kas SAL pada tanggal pelaporan 2017)	(3.714.379.337.474)	(3.276.851.117.024)
Saldo Akhir Rek. *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(7.048.091.865.264)	8.112.779.152.676
Mutasi Transaksi Rek. *Escrow* (III)	(6.631.070.336.487)	7.936.718.507.500
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow***	**417.021.528.777**	**(176.060.645.176)**
Keterangan: Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening *Escrow* lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	417.021.528.777	(176.060.645.176)

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2018 *(Audited)*	TA 2017 *(Audited)*
Saldo Awal Kas Transitoris	(472)	(43.855.341.992)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	43.855.343.512
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	(472)	1.520
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	(472)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	472	(1.992)
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris**	**(472)**	**1.992**
Keterangan: Merupakan pembulatan Kas Transitoris pada transaksi *cross currency* yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL .	**(472)**	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Saldo Akhir Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Akhir Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
	175.984.640.119.749	**139.599.450.932.318**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. *Escrow* yang Memiliki Unsur SAL	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
Utang PFK	(3.991.926.175.494)	(4.505.640.401.487)
Utang PFK dalam Bentuk *Invoice*	230.659.224	4.001.304
Utang kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Selisih Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(742.924.435.103)**	**(1.246.435.078.720)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**175.241.715.684.646**	**138.353.015.853.598**

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2018 sebesar Rp36.888.699.831.048 dari Saldo SAL Tahun 2017.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

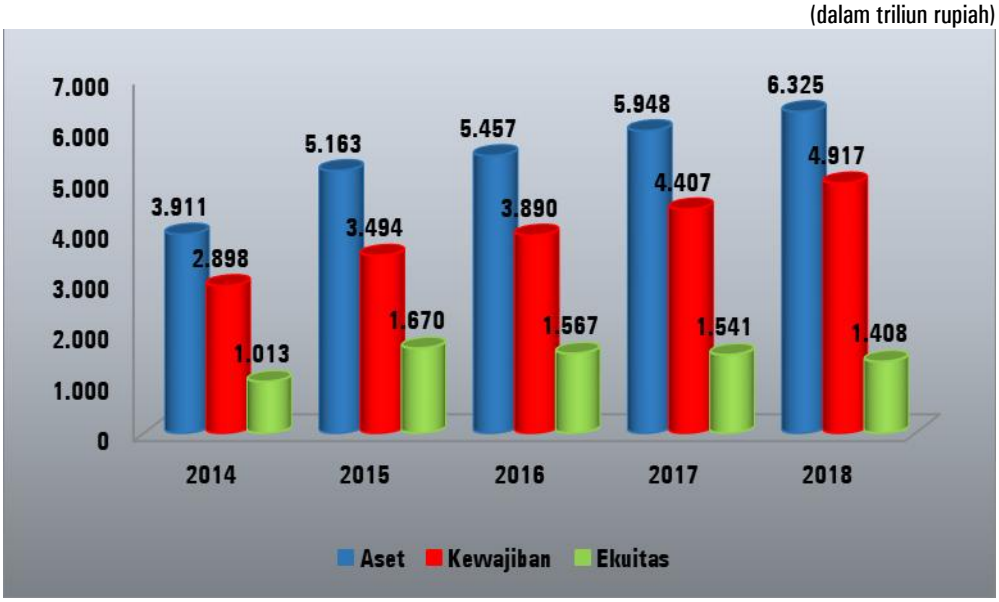
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Aset Lancar	437.878.646.078.602	336.812.365.233.132
Investasi Jangka Panjang	2.877.282.832.067.532	2.604.046.312.794.693
Aset Tetap	1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061
Piutang Jangka Panjang	57.188.754.504.406	47.810.448.151.143
Aset Lainnya	1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620
Jumlah Aset	**6.325.285.785.861.570**	**5.947.837.354.533.649**
Kewajiban Jangka Pendek	750.502.434.401.484	593.449.429.457.947
Kewajiban Jangka Panjang	4.166.975.126.814.345	3.813.604.268.146.762
Jumlah Kewajiban	**4.917.477.561.215.829**	**4.407.053.697.604.709**
Ekuitas	**1.407.808.224.645.741**	**1.540.783.656.928.940**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**6.325.285.785.861.570**	**5.947.837.354.533.649**

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25.**

(dalam triliun rupiah)



Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset Lancar

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia

Kas di Rekening Pemerintah di BI Rp114,83 triliun

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp114.834.181.946.110 dan Rp91.287.531.283.185. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.457.631.451.020	2.251.960.416.588
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	63.948.250.367	41.095.824.987
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	798.232.662	98.275.892.483
Rekening KUN dalam Valuta EUR	117.908.359.024	250.343.675.250
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	15.859.223.125.982	10.242.036.867.562
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.460.730.353.125	2.965.512.966.366
Rekening SAL Nomor 500.000002980	78.075.064.058.877	66.383.586.349.132
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	10.392.731.099.473	9.054.719.290.821
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	-	(4)
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	3.406.147.015.577	-
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah	3	-
Jumlah	**114.834.181.946.110**	**91.287.531.283.185**

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya Rp5,85 triliun

Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.851.939.714.224 dan Rp3.905.763.616.747. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	194.057.444.660	195.453.950.729
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	49.530.800	1.984.038.711
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	4.279.644.422.002	1.995.770.488.537
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	(4)	253.706.468
Kas lainnya	3.276.069.510	2.821.879.836
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	4	10

Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	20	15
RPL BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH	1.179.020	-
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	5.000	-
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	1	1
RPL BUN Perusahaan Inti Rakyat Non SPH	(1)	(1)
Jumlah*)	**5.851.939.714.224**	**3.905.763.616.742**

**) selisih antara data neraca dengan rincian per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp5 karena pembulatan*

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.374.911.063.212 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp4.279.644.422.002 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN Rp5,12 triliun

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.127.777.217.073 dan Rp2.282.077.569.283. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito Rp465

Kas dalam Transito per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp465 dan Rp330.588.755.619. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Kas Dalam Transito	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Kas Dalam Transito – BUN	330.588.756.176	(472)
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(330.588.756.169)	330.588.756.176
3. Pembulatan	458	(85)
Jumlah	**465**	**330.588.755.619**

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp285,15 miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp285.150.273.469 dan Rp210.828.164.140. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp92,28 miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp92.280.796.378 dan Rp105.738.412.756. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3,63 triliun

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.638.728.687.898 dan Rp7.680.332.290.094. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
K/L	3.631.533.687.032	7.680.309.646.436
BUN	7.195.000.867	22.643.658
Jumlah*	**3.638.728.687.899**	**7.680.332.290.094**

**) selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Setara kas lainnya	2.368.973.287	3.421.865.343
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.503.277.817.929,	1.292.872.842.163,
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	-	4.022.885.752
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	16.827.906.795	782.400.419
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	407.179.162.727	571.809.033.280
Kas Lainnya di BLU	671.962.767.202	664.498.295.217
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	303.028.428.348	308.408.298.935
Jumlah	**3.631.533.687.032**	**7.680.309.646.436**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.281.396.850.338 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp391.775.845.227 merupakan hibah dan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disalurkan.
3. Kementerian Keuangan sebesar Rp363.024.058.349 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran, Kas Lainnya di BLU, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp265.088.934.982 sebagian besar merupakan hibah.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp222.407.919.463 sebagian besar merupakan hibah, titipan/hak pihak ketiga, jasa giro, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp173.145.297.853 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, pengembalian belanja dan pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
7. POLRI sebesar Rp126.473.628.235 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, Kas Lainnya di BLU, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp105.945.287.155 merupakan titipan pihak ketiga yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp7.195.000.867 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp11.446.470 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp7.183.554.397 merupakan saldo yang terdapat pada:
   a. Istana Kepresidenan berupa bantuan kemasyarakatan yang belum disetor sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp5.329.951.870 dan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.633.166.347.
   b. SKK utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp166.158.880 dan saldo lain-lain yang berasal dari retur pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp54.277.300.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp48,79 triliun

Kas pada BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp48.795.152.993.771 dan Rp28.772.719.623.601. Kas pada BLU merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L dengan rincian sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	904.957.640.969	950.428.607.625
2. BLU di Kementerian Pertahanan	58.096.202.573	16.868.661.797
3. BLU di Kementerian Keuangan	22.717.545.215.069	5.098.913.847.342
4. BLU di Kementerian Pertanian	90.650.947.758	98.303.035.727
5. BLU di Kementerian Perindustrian	71.478.397.756	73.566.795.784
6. BLU di Kementerian ESDM	120.726.309.982	52.287.038.958
7. BLU di Kementerian Perhubungan	868.613.894.298	737.030.441.915
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759
9. BLU di Kementerian Agama	884.621.264.398	858.430.167.529
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan	922.303.158.596	839.952.533.771

Kehutanan		
11. BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	27.095.500.565	-
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.269.856.342.589	1.723.562.568.513
13. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.176.916.338.139	2.591.818.310.642
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	883.834.264.321	765.165.735.606
15. BLU di Kementerian Kominfo	12.858.068.421.709	11.931.874.968.079
16. BLU di Kepolisian RI	256.232.999.313	305.177.129.823
17. BLU di BPPT	38.455.953.365	38.097.086.146
18. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	203.999.501.633	1.636.519.866
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	586.726.344.967	442.619.085.919
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.968.742.580	3.540.646.800
Jumlah	**48.795.152.993.771**	**28.772.719.623.601**

Kas pada BLU sebesar Rp48.795.152.993.771 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp6.215.489.058.582, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp55.010.642.052.353 (Rp48.795.152.993.771 ditambah Rp6.215.489.058.582) dan telah sesuai dengan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN Rp106,93 miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.939.618.970 dan Rp38.165.547.963. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. IBRD	4.770.340.651	3.391.853.007
2. ADB	1.337.462.511	122.123.356
3. OECF/JBIC	-	19.459.000
4. IFAD	871.774.698	457.092.600
5. IDB	340.547.160	-
6. Australia	-	34.167.000.000
7. SBSN	98.985.926.350	8.020.000
8. KFW	633.567.600	-
Jumlah	**106.939.618.970**	**38.165.547.963**

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp6,21 triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.215.489.058.582 dan Rp12.204.408.488.386. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018

merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU pada Kementerian Keuangan	2.592.473.339.265	8.730.956.109.060
2. BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	3.100.019.151.495	2.953.985.171.122
3. BLU pada Kementerian Kesehatan	450.246.567.822	371.467.208.204
4. BLU pada Kementerian Perhubungan	9.000.000.000	79.000.000.000
5. BLU pada Kementerian Agama	58.250.000.000	59.000.000.000
6. BLU pada Kementerian ESDM	5.500.000.000	10.000.000.000
Jumlah	**6.215.489.058.582**	**12.204.408.488.386**

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp31,02 triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp31.026.237.178.411 dan Rp17.261.771.032.885. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Di Muka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja sebagai berikut.

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Belanja Dibayar di Muka	23.669.417.801.342	6.048.710.078.004
Uang Muka Belanja	7.356.819.377.069	11.213.060.954.881
Jumlah	**31.026.237.178.411**	**17.261.771.032.885**

Belanja Dibayar di Muka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.281.967.652.641 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp7.199.940.494.192.

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.825.359.174.425 dan POLRI sebesar Rp1.494.519.431.842. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp637,14 miliar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp637.147.289.481 dan Rp576.867.095.851. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp547.460.256.932. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp81,47 triliun

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp81.477.055.227.031 dan Rp58.621.958.896.480. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp36.989.612.359.677 berasal dari nilai bruto sebesar Rp81.477.055.227.031 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp44.487.442.867.354.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2018. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	68.090.740.726	54.160.090.238
Penyisihan	(41.098.667.934)	(27.725.482.667)
Nilai Neto	26.992.072.792	26.434.607.571
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	13.386.314.501	4.461.868.658
Penyisihan	(3.388.774.933)	(3.324.042.373)
Nilai Neto	9.997.539.568	1.137.826.285
Jumlah Bruto	**81.477.055.227**	**58.621.958.896**
Penyisihan Piutang Perpajakan	**(44.487.442.867)**	**(31.049.525.040)**
Jumlah Neto	**36.989.612.360**	**27.572.433.856**

Saldo piutang pajak bruto mengalami kenaikan sebesar Rp22.855.096.330.551 atau sebesar 38,98% antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp8.823.309.015.104, Piutang Pajak Lainnya sebesar Rp8.611.289.193.763, dan Piutang Pajak PPh Non Migas sebesar Rp4.041.520.001.772.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	24.226.282.819	20.184.762.817	4.041.520.002	20,02
2. Piutang Pajak PPN	24.061.126.456	24.241.668.611	(180.542.155)	(0,74)
3. Piutang Pajak PPnBM	506.938.435	355.413.375	151.525.060	42,63
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.968.671.988	6.819.833.386	1.148.838.602	16,85
5. Piutang Cukai dan Bea Materai	8.913.391.928	90.082.913	8.823.309.015	9.794,65
6. Piutang Pajak Lainnya	11.704.776.608	3.093.487.414	8.611.289.194	278,37
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.030.766.089	3.812.291.758	218.474.331	5,73
8. Piutang Bea Masuk Tindakan	65.100.905	24.418.623	40.682.282	166,60
Jumlah	**81.477.055.228**	**58.621.958.897**	**22.855.096.331**	**38,987**

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	(15.608.454.940)	(12.327.832.755)	(3.280.622.185)	26,61
2. Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974)	(11.863.974.673)	(1.046.677.301)	8,82
3. Piutang Pajak PPnBM	(452.316.382)	(299.430.166)	(152.886.216)	51,06
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.812)	(2.126.318.365)	(566.099.447)	26,62
5. Piutang Cukai dan Bea Materai	(157.090.888)	(81.011.399)	(76.079.489)	93,91
6. Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.376)	(1.235.170.751)	(8.325.851.625)	674,06
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495)	(3.115.786.931)	10.298.436	(0,33)
Jumlah	**(44.487.442.867)**	**(31.049.525.040)**	**(13.437.917.827)**	**43,279**

**) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan*

Pada tahun 2018 saldo piutang yang dihapusbukukan sebesar Rp23.545.731.800.089 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.465.044.843 dari saldo 2017 sebesar Rp32.754.196.844.932. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak.

Dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan kriteria daluwarsanya, atas Piutang tersebut dicatat kembali di dalam Neraca. Demikian pula dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang dikeluarkan dari neraca tersebut di kemudian hari ternyata diterima pembayarannya, maka Piutang Pajak tersebut akan dicatat kembali sebesar nilai yang diterima. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2018, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 248.503 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp83.514.611.978.805 dan USD953,466,142.00.
Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak setuju
PPh Final	IDR	70.290	6.059.092.433.684	1.237.839.170.756	4.821.253.262.928
	USD	13	25,574,777	10,733,841	14,840,936
PPh Pasal 21	IDR	16.531	2.119.367.528.952	1.089.014.659.370	1.030.352.869.582
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	2.600	1.967.832.136.875	494.271.760.096	1.473.560.376.779
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	34.591	6.395.152.601.047	1.677.038.792.802	4.718.113.808.245
	USD	2	181,998	4,625	177,373
PPh Pasal 25 Badan	IDR	7.007	26.192.419.076.089	5.277.029.225.364	20.915.389.850.725
	USD	329	927,709,368	125,624,843	802,084,525
PPh Pasal 25	IDR	2.957	623.050.170.156	329.538.654.607	293.511.515.549

OP	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	3.773	4.536.487.011.007	1.100.179.416.165	3.436.307.594.842
	USD	-	-	-	-
PPN	IDR	110.286	35.514.020.301.861	8.113.984.733.539	27.400.035.568.322
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	44	81.336.050.783	48.570.482.071	32.765.568.712
	USD	-	-	-	-
Bea Materai	IDR	80	25.854.668.351	6.503.024.351	19.351.644.000
	USD	-	-	-	-
Jumlah	IDR	**248.159**	**83.514.611.978.805**	**19.373.969.919.121**	**64.140.642.059.684**
	USD	**344**	**953,466,143**	**136,363,309**	**817,102,834**

**) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan*

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp176,24 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp176.243.261.284.193 dan Rp158.620.573.008.549. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp50.037.611.353.960, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp176.243.261.284.193 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp126.205.649.930.233.

Rincian Piutang Bukan Pajak sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	42.436.309.628.220	37.946.995.596.919
Penyisihan	(32.208.264.178.309)	(27.798.207.844.367)
Nilai Neto	10.228.045.449.911	10.148.787.752.552
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630
Penyisihan	(93.997.385.751.924)	(99.456.395.011.878)
Nilai Neto	39.809.565.904.049	21.217.182.399.752
Jumlah Bruto	**176.243.261.284.193**	**158.620.573.008.549**
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(126.205.649.930.233)	(127.254.602.856.245)
Jumlah Neto	**50.037.611.353.960**	**31.365.970.152.304**

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp42,43 triliun

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.436.309.628.220 mengalami kenaikan sebesar Rp4.489.314.031.301 atau 11,83% dibandingkan tahun 2017. Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

a. Kejaksaan Agung sebesar Rp17.658.347.583.931 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
b. Kementerian ESDM sebesar Rp14.659.967.368.426 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment.*
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.999.519.410.852 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.323.688.942.817 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 dapat dilihat di **Lampiran 9.**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp133,80 triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp133.806.951.655.973 dan Rp120.673.577.411.630, terdiri dari:

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017(*Audited*)
Piutang Deviden pada BA 999.03	125.924.962.205	130.507.641.516
Piutang PNBP pada BA 999.05	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549
Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056
Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	1.168.517.287.943	298.954.011.484
Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025
Jumlah	**133.806.951.655.973**	**120.673.577.411.630**

a. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp125.924.962.205 dan Rp130.507.641.516. dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Deviden pada BA 999.03	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)
Pokok Dividen	90.426.389.353	90.350.726.664
Denda	35.498.572.852	40.156.914.852
Jumlah	**125.924.962.205**	**130.507.641.516**

Rincian Piutang Deviden (Bagian laba BUMN) pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut.

BUMN	Tahun Buku Terjadinya Piutang	Nilai Piutang
PT Balai Pustaka	2004	231.749.799
Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648
PT Perkebunan Nusantara II	1999	14.167.527.690
PT Inhutani I	2000	812.468.076
PT Inhutani V	1999	2.421.919.265
PT Bina Karya	2001	178.308.462
PT Istaka Karya	2003	8.391.154.934
PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444
PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799
PT Indah Karya	2017	2.193.562.087
Jumlah		**125.924.962.205**

**selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

b. Piutang PNBP pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.361.357.610.243 dan Rp12.587.181.424.549. Piutang pada BA 999.05 merupakan merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 sebesar Rp14.361.357.610.243 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Piutang TKD	13.029.228.490.793	10.799.485.615.144
Piutang TKD Diestimasi	1.332.129.119.450	1.787.695.809.405
Jumlah	**14.361.357.610.243**	**12.587.181.424.549**

1) Piutang TKD

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2018 sebesar Rp13.029.228.490.793, terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2018 (*Audited*)
Satker Dana Bagi Hasil	12.494.317.546.569
Satker DAU dan DAK Non Fisik	497.683.632.667
Satker Dana Keistimewaan DIY	37.227.311.557
Jumlah	**13.029.228.490.793**

- Piutang TKD Satker DBH TA 2018 sebesar Rp12.494.317.546.569 per tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Uraian	Sumber	31 Desember 2018 (*Audited*)
Lebih Bayar Tahun 2013, 2014, 2015	PMK 259/2015	3.909.250.837.716
	PMK 162/2015	-
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2016	PMK 187/2017	6.784.940.728.900
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2017	PMK 103/2018	1.800.125.979.953
TOTAL		**12.494.317.546.569**

- Piutang PNBP pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2018 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2018 sebesar Rp497.683.632.667.
  Rincian Piutang TKD sebagai berikut.

Piutang PNBP pada Satker DAU-DAK	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)
Lebih Salur Dana DAK Fisik TA 2016	-	48.931.543.176
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2017	-	175.641.395.881
Lebih Salur Dana BOS TA 2018	497.683.632.667	-
Jumlah	**497.683.632.667**	**224.572.939.057**

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.332.129.119.450. Saldo ini merupakan nilai hasil estimasi lebih bayar DBH. Dibandingkan dengan 31 Desember 2017, Piutang TKD Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp455.566.689.955 di mana saldo piutang TKD Diestimasi per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp1.787.695.809.405 (telah direklasifikasi menjadi Piutang TKD dengan ditetapkannya PMK No. 103/PMK.07/2018).

Rincian Piutang TKD Diestimasi TA 2018 sebagai berikut.

Piutang TKD Diestimasi	Nilai Piutang
Estimasi LB PPh pasal 21 2018	472.528.697.334
Estimasi LB PPh pasal 25 2018	652.019.744.442
Estimasi LB Kehutanan IIUPH 2018	84.591.325.503
Estimasi LB Pertambangan Umum-Iuran Tetap	122.989.352.171
Jumlah	**1.332.129.119.450**

c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.142.839.475.600 dan Rp2.418.199.044.056. Piutang sebesar Rp1.142.839.475.600 terdiri dari:

Piutang pada BA 999.07	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)
Kementerian Sosial	-	834.824.264.978
Kementerian Perhubungan	143.196.727.531	385.229.458.233
Kementerian Keuangan	816.849.136.778	-
Kementerian PUPR	203.000.000	-
Kementerian Pertanian	182.590.611.291	1.198.145.320.845
Jumlah	**1.142.839.475.600**	**2.418.199.044.056**

1) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp143.196.727.531 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi/PSO oleh PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI.

2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp816.849.136.778,00. Nilai piutang tersebut timbul dari pembayaran kepada golongan tarif 900 VA RTM (R-1/TR) yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018 sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang telah diperhitungkan untuk menyelesaikan utang subsidi listrik sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp4.548.858.800.974,00.

1) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp203.000.000 yang merupakan koreksi atas pencatatan piutang lebih bayar penyaluran SBUM tahun 2018 karena duplikasi pembayaran pada BTN senilai Rp27.000.000 dan kelebihan pembayaran pada BTN senilai Rp176.000.000.

2) Piutang Bukan Pajak Kementerian Pertanian sebesar Rp182.590.611.291 yang terdiri atas piutang bukan pajak pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp12.453.015.134 yang merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2014 dan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp170.137.596.157 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan hasil audit BPK RI.

d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.168.517.287.943 dan Rp298.954.011.484. Rincian Piutang pada BA 999.08 sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Kementerian Keuangan	888.686.999.287	19.694.995.500
Kementerian Pertanian	277.566.811.272	279.109.577.585
Otoritas Jasa Keuangan	2.263.477.384	149.438.400
Jumlah*	**1.168.517.287.943**	**298.954.011.485**

**) Selisih data neraca tahun 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan*

a. Piutang sebesar Rp888.686.999.287 pada Kementerian Keuangan merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.

b. Piutang sebesar Rp277.566.811.272 pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	71.870.618	98.702.334
Benih CBN di penangkar	7.551.590.160	47.614.294.265
Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	249.920.932.558	196.957.839.678
Biaya Distribusi Benih CBN	14.388.461.647	14.810.489.747
Calon Benih	633.246.080	2.128.255.052
Benih Rusak/Kadaluwarsa	189.102.252	12.688.388.552
Jumlah	**277.566.811.272**	**279.109.577.585**

c. Piutang sebesar Rp2.263.477.384 pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp117.008.312.319.982 dan Rp105.238.735.290.025 .

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang PNBP pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Piutang pada UAPBUN TK DJPBN	162.094.275.907	132.742.498.288
Piutang pada UAPBUN TK DJA	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963
Piutang pada UAPBUN TK DJKN	93.965.915.561.762	88.974.559.546.774
Jumlah	**117.008.312.319.982**	**105.238.735.290.025**

1) Piutang pada UAPBUN TK DJPBN sebesar Rp162.094.275.907, terdiri dari:

- Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.395.393.371 dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah
Saldo Uang Pensiun (SUP) dan Retur bulan Desember 2018 (PT Asabri)	14.461.399.900
SUP > 3 bulan (tunai) dan > 6 bulan (rekening) (PT Asabri)	18.977.722.700
Jasa Giro bulan Desember 2018 (PT Asabri)	183.777.190
Kelebihan pencairan dana bulan Desember 2018 (PT Asabri)	8.881.694.668
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2018) (PT Asabri)	103.648.276
Keterlanjuran bayar hasil uji petik (PT Asabri)	1.024.701.600
Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 30 November 2018	1.075.000
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	14.447.669.640
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Gaji 13 Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	6.691.932
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun bulan Desember 2018 (PT Taspen)	32.281.565.294
SUP 2018 (PT Taspen)	26.949.798.166
SUP Retur Desember 2018 (PT Taspen)	6.938.155.997
Keterlanjuran pembayaran pensiun (PT Taspen)	3.634.644.040
Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2018 (PT Taspen)	3.350.199.158
Piutang Kelebihan pencairan dana iuran jaminan kesehatan Tahun 2018 Rampung	2.152.649.810
Jumlah	**133.395.393.371**

- Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas negara sebesar Rp28.698.882.536 berasal dari piutang atas kekurangan setor pendapatan pelaksanaan *Treasury National Pooling* bulan November dan Desember 2018 yang akan diterima pada bulan Januari 2019.

2) Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.880.302.482.313 dan Rp16.131.433.244.963, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Hasil Penjualan Minyak	10.163.287.329.467	9.918.983.786.794
Hasil Penjualan Gas	7.395.990.110.500	4.210.019.459.533
Overlifting KKKS	4.859.318.092.586	1.548.862.123.895
PNBP Migas Lainnya	461.706.949760	453.567.874.741
Jumlah	**22.880.302.482.313**	**16.131.433.244.963**

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 lebih tinggi Rp6.748.869.237.350 dari posisi per 31 Desember 2017. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

a. Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya *dispute* disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu:
   1) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* minyak KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar USD887,672 dan *overlifting* KKKS Tahun 2016 sebesar USD12,197,508. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausul yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas *Domestic Market Obligation (DMO)*. Dimana, hal tersebut berdampak terhadap perbedaan perhitungan bagi hasil atas *over/under lifting* tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas *underlifting* KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. *overlifting*-nya hanya sebesar USD1,518,247.

   2) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18,238,353. Terjadi *dispute* atas *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas *overlifting* minyak dan dan gas bumi KKKS Conoco Phillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132 hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26,783,779.

b. Selain itu, dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD289,892,976.22 atau setara dengan Rp4.197.940.188.610,58 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang *overlifting* KKKS tahun 2018 yang disampaikan oleh SKK Migas. Nilai estimasi piutang *overlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan *cut off* pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS

per 1 Februari 2018 dan belum melalui proses evaluasi dan pembahasan bersama antara SKK Migas dan KKKS. Keseluruhan nilai final *over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.

c. Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah terkurangi oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 s.d. Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.

3) Piutang bukan pajak pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp93.965.915.561.762 dan Rp88.974.559.546.774 yang merupakan piutang yang berasal dari:

Uraian	**31 Desember 2018 (*Audited*)**	**31 Desember 2017 (*Audited*)**
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	25.000	18.759.829
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	92.768.450.185.730	87.778.562.323.202
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	20.749.998.113	19.263.110.823
Jumlah*	**93.965.915.561.762**	**88.974.559.546.773**

**) selisih data neraca tahun 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan*

a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919.

Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.
Perhitungan Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2018 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNBP	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2018	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2018	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2018	**1.176.715.352.919**

b) Piutang Bukan Pajak Aset Lain-Lain. Terdapat piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hasil lelang yang belum disetor di triwulan II 2018 sebesar Rp25.000.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp92.768.450.185.730 dan 87.778.562.323.202. Rincian Piutang Aset BLBI sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Aset Kredit Eks BPPN	73.449.774.111.948	68.570.198.091.260
Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	9.224.824.677.306	8.188.857.769.779
Aset Kredit Yang Diserahkelolakan Kepada PT PPA	-	873.811.488.440
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.093.368.778.479	10.132.339.475.545
Piutang Pada PT PPA	-	12.721.729.178
Piutang Bukan Pajak yang timbul dari Pemberian BLBI	-	633.769.000
Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	482.618.000	-
Jumlah*	**92.768.450.185.733**	**87.778.562.323.202**

**)selisih sebesar Rp3 karena pembulatan*

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp73.449.744.111.948 dan Rp68.570.198.091.260. Perubahan nilai Aset Kredit Eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.224.824.677.306 dan Rp8.188.857.769.778. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN	4.021.040.786.202	3.919.833.561.326
Aset Kredit yang masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	5.203.783.891.104	4.269.024.208.453
Jumlah*	**9.224.824.677.306**	**8.188.857.769.779**

**) selisih antara data neraca Tahun 2017 dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

Dari Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang masih dikelola oleh DJKN sebesar Rp5.203.783.891.104, terdapat aset kredit sebesar Rp3.610.641.294.586 yang masih dalam tahap restrukturisasi utang.

3) Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 sebesar Rp0, sedangkan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440. Penurunan saldo Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) ini disebabkan aset kredit yang selama ini diserahkelolakan kepada PT PPA (persero) tidak lagi dilakukan perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (persero).

4) Saldo Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.093.368.778.479 dan Rp10.132.339.475.545. Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.

   15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:

   - 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
   - 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
   - 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

   Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.

   - 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
   - 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

   Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.093.368.778.479, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

5) Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara.

   Pada tanggal 12 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran oleh PT PPA atas piutang tersebut, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.

6) PNBP yang timbul dari pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp633.769.000.

7) Piutang kegiatan sewa kepada Indosat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp482.618.000 dan Rp0.

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Piutang KKKS sebesar Rp20.749.998.113 terdiri dari (1) Piutang Job Pertamina Petrochina East Java PT Pertamina (Persero) sebesar USD1,422,858.65 atau sebesar Rp20.604.416.111, dan (2) Piutang Conoco Philips Indonesia Inc, Ltd Perusda Anambas Sejahtera sebesar Rp145.582.002.

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp10,54 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.541.206.650 dan Rp9.689.533.832. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp8.755.511.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.541.206.650 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.785.695.280. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPR sebesar Rp8.791.243.398, Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp529.410.964.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp132,92 miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp132.923.950.960 dan Rp134.439.614.178. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp45.413.990.611 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp132.923.950.960 dikurangi penyisihan sebesar Rp87.509.960.349. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Rp23,60 triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp23.609.406.852.881 dan Rp22.591.650.468.443.
Rincian Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	**31 Desember 2018 (*Audited*)**	**31 Desember 2017 (*Audited*)**
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.076.833.905.203	12.712.303.683.642
Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian	4.002.513.667.578	4.387.248.377.574
Piutang Denda Pemberian Pinjaman	1.216.332.449.136	796.105.289.184
Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman	894.292.896.365	957.372.476.610
Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	3.900.355.300.304	3.365.746.890.439
Piutang Bunga Akrual Pemberian Pinjaman	519.078.634.295	372.873.750.994
Jumlah	**23.609.406.852.881**	**22.591.650.468.443**

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp9.275.810.791.356 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.609.406.852.881 dikurangi penyisihan sebesar Rp14.333.596.061.525.

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp6,29 triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.295.339.227.189 dan Rp1.086.601.779.631. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun 2015 - 2018	773.382.049.559	573.849.480.773
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*	(5.000.000.000)	-
Bunga tahun 2015 - 2018	126.834.656.128	37.122.338.378
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	699.137.372.801	282.284.448.089
Piutang yang Jatuh Tempo	-	193.345.512.391
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701	
Jumlah	**6.295.339.227.189**	**1.086.601.779.631**

*) *Penerimaan pembiayaan tahun 2018 mengurangi total piutang PT Minarak Lapindo namun kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut sebagai komponen pengurang saldo pokok atau bunga akan ditentukan kemudian.*

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp7,52 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.520.013.178.234 dan Rp6.429.911.707.728. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.248.877.959.199 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.520.013.178.234 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.271.135.219.035. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp6.750.572.387.799 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp769.440.790.435.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	686.550.385.603	686.877.856.732
2. BLU di Kementerian Pertahanan	312.826.229.609	110.768.287.162
3. BLU di Kementerian Keuangan	93.149.342.874	49.824.275.493
4. BLU di Kementerian Pertanian	508.804.231	2.355.596.525
5. BLU di Kementerian Perindustrian	2.661.270.884	2.761.119.950
6. BLU di Kementerian ESDM	34.578.089.926	23.787.415.450
7. BLU di Kementerian Perhubungan	41.093.863.711	48.815.532.767
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023
9. BLU di Kementerian Agama	28.718.269.464	35.446.573.467
10. BLU di Kementerian PUPR	1.571.906.365.165	1.160.652.888.495
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	205.372.142.586	290.849.520.158
12. BLU di Kementerian KUKM	8.114.895.954	4.312.144.444
13. BLU di Kementerian Kominfo	133.923.623.053	228.029.375.073
14. BLU di Kepolisian RI	276.844.130.422	204.687.487.913
15. BLU di BPPT	11.393.839.638	10.074.801.800
16. BLU di BPKPBPB Batam	471.366.114.135	368.498.898.367
Jumlah Bruto	**6.750.572.387.799**	**5.594.480.950.819**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2.246.986.060.087)	(1.998.515.231.060)
Jumlah Neto	**4.503.586.327.712**	**3.595.965.719.759**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	563.190.095	612.892.012
2. BLU di Kementerian Keuangan	547.339.240	467.335.113
3. BLU di Kementerian ESDM	-	22.916.667
4. BLU di Kementerian Perhubungan	2.218.441.992	1.348.210.637
5. BLU di Kementerian Kesehatan	12.766.764.474	13.165.815.819
6. BLU di Kementerian Agama	4.226.996.513	4.809.756.024
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	39.390.382.929	39.433.675.371
8. BLU di Kementerian Kominfo	588.244.764.265	768.068.505.266
9. BLU di Kepolisian RI	20.250.000	1.650.000
10. BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	121.462.660.927	7.500.000.000
Jumlah Bruto	**769.440.790.435**	**835.430.756.909**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(24.149.158.948)	(24.120.501.419)
Jumlah Neto	**745.291.631.487**	**811.310.255.490**

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK Rp230,65 juta

Piutang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp230.659.224 dan Rp4.001.304 yang berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara, yang disebabkan adanya:

a. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
b. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Rp775,31 miliar

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp776.236.492.092. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp187,38 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp187.387.119.210.777 dan Rp160.417.250.319.840. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Piutang Pajak	44.487.442.867.354	31.049.525.040.498
2. Piutang Bukan Pajak	126.205.649.930.233	112.447.317.486.670
3. Bagian Lancar TPA	1.785.695.280	1.874.157.626
4. Bagian Lancar TP/TGR	87.509.960.349	88.612.532.992
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575
6. Piutang dari Kegiatan BLU	2.271.134.696.035	2.022.635.732.479
Jumlah	**187.387.119.210.777**	**160.417.250.319.840**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.487.442.867.354 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp126.205.649.930.233, merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp32.208.264.178.309 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp93.997.385.751.924. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.785.695.280 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 sebesar Rp87.509.960.349 dapat dilihat pada **Lampiran 12.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.333.596.061.526. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 dirincikan sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman BA 999.04	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	8.368.810.959.312	8.890.349.008.465
2. Penyisihan Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	5.958.703.439.968	5.912.955.834.664
3. Penyisihan Piutang Denda Pemberian Pinjaman	6.081.662.246	3.980.526.446
Jumlah	**14.333.596.061.526**	**14.807.285.369.575**

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.271.134.696.035. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dirincikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	64.012.286.114	67.153.462.624
2. BLU di Kementerian Pertahanan	16.567.283.293	11.909.016.278
3. BLU di Kementerian Keuangan	1.765.643.200	1.403.937.845
4. BLU Kementerian Pertanian	2.544.021	11.777.983
5. BLU di Kementerian Perindustrian	199.115.966	254.660.746
6. BLU di Kementerian ESDM	14.646.654.148	13.374.883.794
7. BLU di Kementerian Perhubungan	3.591.972.257	2.644.268.267
8. BLU di Kementerian Kesehatan	440.324.448.386	406.228.132.538
9. BLU di Kementerian Agama	11.595.695.779	8.504.979.603
10. BLU di Kementerian PUPR	1.319.436.302.466	1.023.971.470.822
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	137.143.224.175	166.097.728.693
12. BLU di Kementerian KUKM	4.182.635.273	3.635.415.465
13. BLU di Kementerian Kominfo	142.512.030.691	234.658.847.884
14. BLU di Kepolisian RI	1.734.783.412	1.641.141.509
15. BLU di BPPT	98.531.698	91.936.509
16. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	607.313.305	37.500.000
17. BLU di BPKPBPB Batam	112.714.231.851	81.016.571.919
Jumlah	**2.271.134.696.035**	**2.022.635.732.479**

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan Rp112,59 triliun

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp112.590.656.928.185 dan Rp84.301.758.170.225 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Persediaan di K/L	112.585.262.923.923	82.262.262.310.961
2. Persediaan di BUN	5.394.004.262	2.039.495.859.264
Jumlah	**112.590.656.928.185**	**84.301.758.170.225**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp112.585.262.923.923. Persediaan dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp57.801.718.824.526, Kementerian PUPR sebesar Rp10.117.302.555.177, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.848.474.789.132, Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.189.041.789.589, POLRI sebesar Rp5.823.228.307.786, Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.881.570.620.917, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.809.327.268.968, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp2.027.676.296.737, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.232.210.766.192, Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp1.098.833.089.639, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.050.272.584.033, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS sebesar Rp1.003.556.532.748. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.394.004.262 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan di BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 *(Audited)*
a. Kementerian Keuangan	-	2.030.473.182.609
b. Kementerian Pertanian	1.319.754.895	4.578.322.340
c. Otoritas Jasa Keuangan	1.484.615.490	1.534.803.820
d. SKK Migas	2.589.633.877	2.909.550.495
Jumlah	**5.394.004.262**	**2.039.495.859.264**

a. Persediaan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp0 merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Laporan mutasi CBP sebagai berikut.

(dalam kilogram)

Persediaan pada Kementerian Keuangan	Mutasi Persediaan		Saldo
	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Saldo Awal	-	-	232.825.729
Penambahan Stok 2015	250.979.000	-	483.804.729
Penggunaan Operasi Pasar	-	476.886.212	6.918.517
Penggunaan Bencana Alam	-	6.918.517	-

Stok Cadangan Beras Pemerintah telah habis sejak pertengahan bulan Desember 2018. Berdasarkan Laporan Penyaluran CBP tahun 2018 dari Perum Bulog, penggunaan Operasi Pasar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 544.722.893 Kg, selanjutnya penyaluran CBP menggunakan stok bulog dan diakui sebagai utang penyaluran.

b. Persediaan pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp1.319.754.895 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Tahun	31 Desember 2018 (*Audited*)		31 Desember 2017 (*Audited*)	
	Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1. Padi Non Hibrida	193.939	1.319.754.895	672.788	4.578.322.340
2. Padi Hibrida	-	-	-	-
3. Jagung Komposit	-	-	-	-
4. Jagung Hibrida	-	-	-	-
5. Kedelai	-	-	-	-
Jumlah	**193.939**	**1.319.754.895**	**672.788**	**4.578.322.340**

c. Persediaan pada OJK sebesar Rp1.484.615.490 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada OJK	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Barang Konsumsi	1.482.053.865	1.532.242.195
Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.561.625
Jumlah	**1.484.615.490**	**1.534.803.820**

d. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.589.633.877 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Barang Konsumsi	2.571.084.787	2.883.214.405
Barang untuk Pemeliharaan	18.549.090	26.336.090
Jumlah	**2.589.633.877**	**2.909.550.495**

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp38,75 triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp38.751.152.041.474 dan Rp34.757.069.042.734. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	758.264.173.716	473.887.356.891
2. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
3. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	2.629.660.562.998	3.445.531.671.700
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	29.463.190.892.831	25.625.590.772.984
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.315.637.580.927	4.616.134.219.577
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	1.352.498.396.761	565.500.000.000
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	213.754.355.211	11.125.000.000
Jumlah	**38.751.152.041.474**	**34.757.069.042.734**

1. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp758.264.173.716 dan Rp473.887.356.891. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/ Dana Bergulir disebabkan oleh penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat selama tahun 2018.

2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).
3. Dana Bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.629.660.562.998 dan Rp3.445.531.671.700. Dana Bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan Dana Bergulir. Perubahan Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:
   a. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
   b. Pengalihan Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Dana Bergulir BUN Investasi Pemerintah.
4. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.463.190.892.831 dan Rp25.625.590.772.984 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.
5. Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.315.637.580.927 dan Rp4.616.134.219.577 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan Dana Bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang perjanjiannya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.352.498.396.761 dan Rp565.500.000.000.
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp213.754.355.211 dan Rp11.125.000.000.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,01 triliun

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.015.195.857.543 dan Rp823.745.637.784. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	952.848.817.952	793.779.058.004
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	22.622.772.656	10.666.558.198
3. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
4. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	21.578.187.905	-
Jumlah	**1.015.195.857.543**	**823.745.637.784**

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp46,34 triliun

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.347.382.486.948 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.132.872.181
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	46.343.293.254.767	-
Jumlah	**46.347.382.486.948**	**4.132.872.181**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.343.293.254.767 dan Rp0. Penyajian portofolio LPDP sebagai Investasi Jangka Panjang mengacu pada ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang mengklasifikasikan investasi berdasarkan asal sumber dana. Dengan demikian, penyajian portofolio LPDP yang merupakan BLU pengelola dana berdasarkan amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP (terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016) sebagai Investasi Jangka Panjang berdasarkan sumber dana investasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

   Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP	Nilai Investasi
Deposito	26.385.921.170.836
Obligasi Korporasi	2.687.000.000.000
Surat Perbendaharaan Negara	-
Surat Utang Negara	17.270.372.083.931
Jumlah	**46.343.293.254.767**

   Pada LKPP Tahun 2017 Investasi pada Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

D.2.1.2.1.4 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Rp303,37 miliar

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp303.374.618.948 dan Rp4.132.872.181. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen Skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI–BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp299.285.386.767.

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi Permanen PMN Rp2.286,38 triliun

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.286.384.989.214.962 dan Rp2.133.750.339.987.427. Investasi Permanen PMN meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.
Rincian Investasi Permanen PMN sebagai berikut.

Investasi PMN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Persero	2.189.877.537.413.492	2.053.384.644.525.322
2. Perum	47.038.715.000.000	36.931.206.575.871
3. Lembaga Keuangan Internasional	21.293.200.765.776	17.951.256.260.707
4. Badan Usaha Lainnya	28.175.536.035.694	25.483.232.625.529
Jumlah*	**2.286.384.989.214.962**	**2.133.750.339.987.429**

**) Selisih data neraca sebesar Rp2 karena pembulatan*

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.189.877.537.413.492 dan Rp2.053.384.644.525.322. PMN pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:
   a. PMN Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN
      Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.133.010.292.264.217 dan Rp1.998.472.944.288.818. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

   b. PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan
      PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp56.867.245.149.275 dan Rp54.911.700.236.504.
      Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

      PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

2. PMN pada Perum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.038.715.000.000 dan Rp36.931.206.575.871. PMN Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMN pada Perum dihitung menggunakan

metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2018, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN. Rincian PMN pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.293.200.765.776 dan Rp17.951.256.260.707. Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI. Rincian PMN pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp28.175.536.035.694 dan Rp25.483.232.625.529.
   Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebagai berikut.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	21.189.412.000.000	21.268.011.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	544.249.193	525.265.031
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri **(Lampiran 17)**	2.689.935.786.501	2.534.744.360.498
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (**Lampiran 16**)	1.795.644.000.000	1.679.952.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.500.000.000.000	-
Jumlah	**28.175.536.035.694**	**25.483.232.625.529**

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,74 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.743.190.882 dan Rp8.325.008.679. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.743.190.882 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10%; dan

2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.105.996.382 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp507,10 triliun

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp507.109.135.609.757 dan Rp436.354.324.393.637. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Rincian Investasi Permanen Lainnya sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. PMN Lain-lain	45.167.707.654.757	44.806.336.620.637
2. Bank Indonesia	359.822.197.000.000	304.083.468.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	102.119.230.955.000	87.464.519.773.000
Jumlah	**507.109.135.609.757**	**436.354.324.393.637**

1. Investasi Permanen Lainnya pada PMN Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp45.167.707.654.757 dan Rp44.806.336.620.637.
   Rincian PMN Lain-lain sebagai berikut.

PMN Lain-lain	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. PMN Lain-lain pada PT Eks BHMN:		
Institut Pertanian Bogor	1.603.071.923.643	1.510.825.849.228
Universitas Airlangga	2.277.484.798.858	2.057.508.228.351
Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763
Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142
Universitas Gajah Mada	3.889.767.136.555	3.656.484.520.737
Universitas Pendidikan Indonesia	835.687.198.323	779.700.402.216
Universitas Sumatera Utara	1.926.351.353.085	1.981.325.939.928
Universitas Padjajaran	1.192.757.043.174	1.213.663.368.482
Universitas Diponegoro	2.110.921.913.156	1.901.765.280.198
Universitas Hasanuddin	2.067.472.666.539	1.954.643.450.248
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	998.767.982.046	968.809.319.343
b. PMN Lain-lain pada BP Migas:		
BP Migas	-	352.405.757.084
c. PMN Lain-lain pada BPJS:		
BPJS Kesehatan	10.124.002.619.904	10.161.365.113.684
BPJS Ketenagakerjaan	12.230.971.917.800	11.921.123.968.233
Jumlah	45.548.198.599.368	44.806.336.620.637
Eliminasi LKPP	**(380.490.944.611)**	-
Jumlah	**45.167.707.654.757**	**44.806.336.620.637**

   a. PMN Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
      Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

      Pada Investasi Permanen PMN Universitas Indonesia, telah dilakukan eliminasi pada LKPP atas 11 (sebelas) aset hibah pada Universitas Indonesia yang berasal dari Kemenristek Dikti dan Kementerian PUPR yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR sebagai aset persediaan sejumlah Rp380.490.944.611. Rincian aset hibah tersebut disajikan pada **Catatan Penting Lainnya.**

   b. PMN Lain-lain pada Badan Pengelola Migas
      Pada Tahun 2018, Aset eks BP Migas disajikan oleh SKK Migas sebagai Badan Lainnya (BA 999.09).

c. PMN Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp359.822.197.000.000 dan Rp304.083.468.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.119.230.955.000 dan Rp87.464.519.773.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

D.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Rp2.675,32 triliun

Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.675.327.726.143.973 dan Rp2.687.012.386.941.310. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.931.051.040.187.638, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.675.327.726.143.973 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp744.276.685.956.335.
Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Tanah	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
2. Peralatan dan Mesin	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
3. Gedung dan Bangunan	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
5. Aset Tetap Lainnya	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Bruto	**2.675.327.726.143.973**	**2.687.012.386.941.310**
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Neto	**1.931.051.040.187.638**	**2.034.803.553.929.061**

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp11.684.660.797.337 atau 0,43 persen dari nilai per 31 Desember 2017. Sedangkan nilai buku Aset Tetap, mengalami penurunan sebesar Rp103.752.513.741.423 atau 5,09 persen. Penurunan nilai aset tetap ini sebagian besar karena adanya reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga) dan reklasifikasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya (Aset lain-lain).

D.2.1.3.1 Tanah

Tanah Rp1.018,64 triliun

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.018.648.023.083.736 dan Rp1.037.757.720.329.050. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp19.109.697.245.314 terutama disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-Lain) pada Kementerian PUPR akibat penghentian penggunaan. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp294.345.486.868.825, Kementerian PUPR sebesar Rp269.138.602.834.438, Sekretariat Negara sebesar Rp87.070.470.339.603, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp76.039.000.565.104, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp74.178.424.408.286. Pada tahun 2018 terjadi pencatatan ganda atas Aset Tetap Tanah pada Kementerian Sekretariat Negara dan LPP TVRI sebesar Rp857.211.200.000 sehingga dilakukan eliminasi pencatatan pada LKPP. Selain itu terdapat reklasifikasi dari Aset Lain-Lain BA 999.03 menjadi aset Tanah sebesar Rp40.749.988.341.567 yaitu pada Kementerian PUPR sebesar Rp40.159.894.062.134 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp590.094.279.433.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp590,28 triliun

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp590.286.694.016.479dan Rp519.896.090.337.204. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp70.390.603.679.275. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp227.303.639.687.598, POLRI sebesar Rp110.053.992.531.197, Kementerian Perhubungan sebesar Rp49.051.998.331.321, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp23.585.360.888.712, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp19.931.915.819.977.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp287,02 triliun

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp287.028.466.749.583 dan Rp275.152.781.045.431. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp11.875.685.704.152. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.899.893.893.872.846, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp29.801.781.695.588, Kementerian Agama sebesar Rp26.802.836.201.742, Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.586.841.177.815, dan POLRI sebesar Rp21.137.675.588.196.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp593,24 triliun

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp593.241.196.851.828 dan Rp681.081.175.258.573. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp87.839.978.406.745, antara lain disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Kementerian PUPR. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp448.629.109.542.751, Kementerian Perhubungan sebesar Rp109.896.131.855.771, Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.739.190.777.222, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp7.427.274.269.254, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.867.557.664.078.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp55,53 triliun

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp55.538.219.173.610 dan Rp51.165.291.629.744. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4.372.927.543.866. Nilai aset tetap lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp35.911.136.545.120, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.624.453.663.962, Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.303.454.098.620, Sekretariat Negara sebesar Rp3.214.731.558.617, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.478.019.156.338.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP Rp130,58 triliun

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp130.585.126.268.737 dan Rp121.959.328.341.308. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp8.625.797.927.429. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp59.955.196.610.516, Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.859.398.535.213, Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.991.717.524.943, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.242.058.075.615, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.148.494.656.000.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 19.**

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp744,27 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp744.276.685.956.335 dan Rp652.208.833.012.249. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.022.790.879.612	287.580.018.262.056
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.566.244.373.632	56.276.139.037.825
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	345.009.781.777.629	303.091.656.042.603
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.677.868.925.462	5.261.019.669.765
Jumlah	**744.276.685.956.335**	**652.208.833.012.249**

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp60,60 triliun

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp60.603.046.072.955 dan Rp50.906.493.098.191. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.188.754.504.406 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.603.046.072.955 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.414.291.568.549.

Rincian Piutang Jangka Panjang sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	95.661.712.269	104.817.554.622
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	163.209.394.539	261.894.714.759
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	-	775.312.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Bruto	**60.603.046.072.955**	**50.906.493.098.191**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Neto	**57.188.754.504.406**	**47.810.448.151.143**

D.2.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Tagihan Penjualan Angsuran Rp95,66 miliar

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp95.661.712.269 dan Rp104.817.554.622. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp95.183.403.707 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp95.661.712.269 dikurangi penyisihan sebesar Rp478.308.562 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

D.2.1.4.2 Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan TGR Rp163,20 miliar

Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp163.209.394.539 dan Rp261.894.714.759. Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp57.745.504.482 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp163.209.394.539 dikurangi penyisihan sebesar Rp105.463.890.057.
Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 20.**

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

Piutang Jangka Penerusan Pinjaman Rp57,77 triliun

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.777.575.276.481 dan Rp47.184.454.676.040. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.851.418.797.559 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.777.575.276.481 dikurangi penyisihan sebesar Rp926.156.478.922.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah Rp0

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 direklasifikasi menjadi Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam 12 bulan.

D.2.1.4.5 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2,56 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.566.599.689.666 dan Rp2.580.014.152.770. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp184.406.798.659 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.566.599.689.666 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.382.192.891.007. Piutang Jangka Panjang Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	63.000.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	9.449.000.000	11.151.900.000
3. Kementerian ESDM	37.463.820.845	252.729.574.320
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	276.560.972	101.560.972
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.951.195.000	37.499.960.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	111.069.351.155	114.162.631.206
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	11.542.061	8.314.680
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	2.108.926.346.907
Nilai Bruto	**2.566.599.689.666**	**2.580.014.152.770**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.382.192.891.007)	(1.989.369.163.630)
Nilai Neto	**184.406.798.659**	**590.644.989.140**

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp63.000.000 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp9.449.000.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp37.463.820.845 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp276.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp29.951.195.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp111.069.351.155 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp304.132.717.193 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT.Bakrie Telecom.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.238.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.

11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp11.542.061 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.562.141.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.047.499.709.524 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang tergolong dalam kategori piutang macet.

D.2.1.4.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp3,41 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.414.291.568.549 dan Rp3.096.044.947.048.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	478.308.562	524.087.773
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	105.463.890.057	221.870.658.811
3. Piutang Penerusan Pinjaman	926.156.478.922	884.281.036.834
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.382.192.891.007	1.989.369.163.630
Jumlah*	**3.414.291.568.548**	**3.096.044.947.048**

**) Selisih rincian dengan data neraca sebesar Rp1 karena pembulatan*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp478.308.562 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp105.463.890.057 dapat dilihat pada **Lampiran 20.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp926.156.478.922 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang Kredit Program.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.382.192.891.007 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

   Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	315.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	47.245.000	55.759.500
3. Kementerian ESDM	187.319.104	10.100.786.394
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	93.132.805	507.805

7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.994.255.000	3.749.996.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	555.346.755	570.813.156
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	57.710	41.573
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	1.919.457.394.517
Jumlah	**2.382.192.891.007**	**1.989.369.163.630**

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp1.305,83 triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dan Rp1.155.861.083.987.356. Aset Lainnya adalah aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.021.884.513.023.392 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp271.738.387.743.944 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp12.211.622.116.245.

Aset Lainnya terdiri dari:

Aset Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
2. Aset Tidak Berwujud	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
4. Dana Penjaminan	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
5. Dana Kelolaan BLU	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
6. Aset Lain-lain	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Bruto	**1.305.834.522.883.581**	**1.155.861.083.987.356**
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Neto	**1.021.884.513.023.392**	**924.364.674.425.620**

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp142,69 triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp142.696.848.159.921 dan Rp140.933.161.376.717. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp141.903.018.734.346 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp142.696.848.159.921 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Kementerian Luar Negeri	54.013.969.907	-
2. Kementerian Perhubungan	360.209.541.000	347.594.837.654
3. Kementerian Kesehatan	305.364.000	-
4. Kementerian KLH	72.431.682.000	-
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	-
6. Kementerian PUPR	141.561.963.335.546	140.151.873.669.767
7. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
8. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
9. BP Batam	167.065.369.296	167.065.369.296
Jumlah	**142.696.848.159.921**	**140.933.161.376.717**

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp54.013.969.907 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan hasil koreksi dari BPK berupa reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp360.209.541.000 dan Rp347.594.837.654 merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui kerja sama pemanfaatan aset oleh Satker KSOP Probolinggo.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp305.364.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.121.420.000 dan Satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar minus Rp1.816.056.000
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp72.431.682.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berupa tanah yang di-KSP-kan yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon, Jawa Barat seluas 1.950.000 m^2.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp214.231.398.172 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp214.231.398.172 merupakan aset kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu 30 tahun berupa tanah seluas 24 hektar.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp141.561.963.335.546 dan Rp140.151.873.669.767. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp465.687.736.000, Ditjen Bina Marga sebesar Rp290.659.679.656.676, dan Satker Konsolidasi Kementerian PUPR sebesar minus Rp149.563.404.057.130.
7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp182.980.000.000 dan Rp182.980.000.000 berupa tanah seluas 9.419 m^2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan *(Build, Operate, and Transfer)* Tanah dan Gedung Sapta Pesona B antara Kementerian Pariwisata dengan PT Sisindosat Lintas Buana.

8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp83.647.500.000 berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, dan Transfer* (*BOT*) bersama PT. Bakrie Swasakti Utama dengan No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.

9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp167.065.369.296 dan Rp167.065.369.296. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan aset pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Synergy Tharada dan PT Tuah Selimangkarang dan aset pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam.

D.2.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Rp35,77 triliun

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp35.776.524.869.463 dan Rp31.293.091.131.831. Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa goodwill, hak cipta, paten, *software,* lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tidak berwujud lainnya.

Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23.564.902.753.218 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp35.776.524.869.463 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.211.622.116.245. Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai
1. Goodwill	-
2. Hak Cipta	154.206.399.087
3. Paten	200.935.790.651
4. Software	15.902.423.231.301
5. Lisensi	3.891.264.529.385
6. Hasil Kajian/Penelitian	6.833.324.409.079
7. Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.516.061.249.377
8. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	278.309.260.583
Jumlah Bruto	**35.776.524.869.463**
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)
Jumlah Neto	**23.564.902.753.218**

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. K/L	35.627.617.637.982	31.146.316.888.464
2. BUN	148.907.231.481	146.774.243.367
Jumlah Bruto	**35.776.524.869.463**	**31.293.091.131.831**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:		
3. K/L	(12.141.426.494.645)	(10.015.012.414.379)
4. BUN	(70.195.621.600)	(57.616.621.604)
Jumlah Neto	**23.564.902.753.218**	**21.220.462.095.848**

1. Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.627.617.637.982 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.484.744.654.096 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.186.915.327.574;
   b. Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.625.879.247.072 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.238.006.430.312;
   c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.298.265.237.160 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.139.365.212.051.
2. Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp148.907.231.481 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
   a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
   b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
   c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp64.078.238.619 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 21.**

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp212,15 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp212.155.787.167.225 dan Rp259.379.354.966.485. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Nilai
1. Cadangan Dana Reboisasi	57.747.109.112
2. Cadangan Dana Subsidi/PSO	379.937.975.000
3. Dana untuk Penyertaan Modal Negara	-
4. Dana Lainnya	207.402.492.132.157
5. Dana Perhitungan Fihak Ketiga	3.714.379.337.474
6. Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	601.230.613.482
Jumlah	**212.155.787.167.225**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	**7.613.043.103.590**	**16.003.558.774.228**
a. Kementerian Luar Negeri	622.038.911.501	586.016.904.919
b. Kementerian Pertahanan	4.019.707.414.506	9.410.583.279.561
c. Kementerian Hukum dan HAM	14.478.828.000	-
d. Kementerian Dikbud	1.952.635.775.000	4.739.962.225.000
e. Kementerian Kesehatan	6.609.639.586	6.680.396.861
f. Kementerian Agama	548.118.300.000	745.810.975.324
g. Kementerian Sosial	2.655.138.145	118.977.765.758
h. Polri	446.799.096.852	391.631.329.360
i. LPP RRI	-	3.895.897.445

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	**205.947.589.966.648**	**243.375.796.192.257**
a. Kuasa BUN	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835
b. BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	57.747.109.112	31.174.122.123.664
c. BUN Pengelolaan Belanja Subsidi	379.937.975.000	237.204.000.000
d. BUN Pengelolaan Transaksi Khusus	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	**(1.404.845.903.013)**	-
Jumlah	**212.155.787.167.225**	**259.379.354.966.485**

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.613.043.103.590 dan Rp16.003.558.774.228. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dijelaskan sebagai berikut.
   a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp622.038.911.501 dan Rp586.016.904.919 merupakan dana kas besi yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana ini juga digunakan untuk menutupi BPJ Minus dan BPPR Minus. Dana yang dibatasi penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 sebesar Rp622.038.911.501 adalah: (1) sebesar Rp601.230.613.482 merupakan dana Kas Besi Perwakilan RI yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam kondisi darurat di negara setempat; dan (2) sebesar Rp20.808.298.019 merupakan dana atas biaya renovasi atas pembelian gedung KJRI Chicago yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
   b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.019.707.414.506 dan Rp9.410.583.279.561 berupa dana *outstanding devisa*, dana pada rekening *non-LC*, dan cadangan alutsista.
   c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.478.828.000 dan Rp0 merupakan dana yang ditempatkan di *Department Of Justice* Hongkong terkait kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.856,26 sesuai KMK No. 53 Tahun 2018.
   d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.952.635.775.000 dan Rp4.739.962.225.000 merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan sampai dengan tahun 2018 pada Ditjen Dikdasmen.
   e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.609.639.586 dan Rp6.680.396.861 merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2018.
   f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp548.118.300.000 dan 745.810.975.324 merupakan aset neto (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
   g. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.655.138.145 dan Rp118.977.765.758 merupakan Dana Bantuan Sosial PKH yang belum tersalurkan pada rekening BNI dan akan disalurkan pada tahun 2018.

h. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp446.799.096.852 dan 391.631.329.360 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA, seperti untuk keperluan pada samsat, Jasa Raharja, DPK, kapitasi BPJS, rumkit non-BLU, parkir, FPU, dan lain-lain.

i. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp3.895.897.445.

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp205.947.589.966.648 dan Rp243.375.796.192.257. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp54.152.706.611.021 dan Rp61.884.585.255.835. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	129.468.876.553	-
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.216.643.079.980	-
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	13.255.000.000	-
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	45.478.946.480	-
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	167.860.809.595
6) Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	1.770.000.000.000	3.579.017.301.000
7) Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	925.626.036.865	
8) Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	925.626.036.865	
9) Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	757.765.227.270	800.000.000.000
10) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000	-
11) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
12) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
13) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
14) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	89.942.361.389	88.259.399.674
15) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000	3.124.151.000.000
16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000	203.000.000.000
17) Reksus Menkeu karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (510000239980)	-	(8)
18) Penyesuaian Dana Penjaminan	**(4.448.466.000.000)**	**(3.327.151.000.000)**
Jumlah	**54.152.706.611.021**	**61.884.585.255.835**

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.747.109.112 dan

Rp31.174.122.123.664. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 berasal dari Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan Dana Bergulir atas DNS (UAIP) sebesar Rp57.747.109.112.

c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp379.937.975.000 dan Rp237.204.000.000. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp151.357.198.271.515 dan Rp150.079.884.812.758. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Taspen sebesar Rp126.167.048.361.579 dan PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936.

3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.404.845.903.013 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp4,44 triliun

Dana Penjaminan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.449.043.145.097 dan Rp3.327.794.435.749. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan disajikan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Dana Penjaminan pada K/L	577.145.097	643.435.749
2. Dana Penjaminan pada BUN	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000
Jumlah	**4.449.043.145.097**	**3.327.794.435.749**

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp577.145.097 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.448.466.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana Penjaminan merupakan dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.
   Dana Penjaminan pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	4.054.924.000.000	3.082.222.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	393.542.000.000	244.929.000.000
Jumlah	**4.448.466.000.000**	**3.327.151.000.000**

a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp4.054.924.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
   1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
   2) Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
   3) Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
   4) Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp393.542.000.000 terdiri dari penjaminan atas pembiayaan infrastruktur atas pinjaman langsung (*direct lending*) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN Rp190.542.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU Rp57,17 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.173.480.419.942 dan Rp45.821.116.060.256. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan pengganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.
Rincian Dana Kelolaan BLU sebagai berikut.

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423
2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	391.923.107.169	2.049.523.227.017
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.256.318.525.284	1.540.695.342.109
4. BLU LPDB KUKM	2.773.100.141.070	2.028.750.985.012
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	2.647.501.603.239	934.500.000.000
7. BLU LPMUKP	1.136.245.644.789	488.875.000.000
Jumlah	**57.173.480.419.942**	**45.821.116.060.256**

1. Dana Kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.332.452.419.073 dan Rp1.031.955.780.423.

Rekening	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. Bank Mandiri Acc No 126-00-0 481 9396	-	18.742.013.776
b. Bank BRI Acc No. 0193-01-000751-30-3	-	9.953.816.178
c. Bank BNI Acc No. 5522522235	165.414.019.073	67.259.950.469
d. Deposito Berjangka	1.167.038.400.000	936.000.000.000
Jumlah	**1.332.452.419.073**	**1.031.955.780.423**

2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp391.923.107.169 dan Rp2.049.523.227.017.
   Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 28**.

3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.256.318.525.284 dan Rp1.540.695.342.109. Dana Kelolaan BLU P3H terdiri dari:
   a. Rekening Dana Kelolaan BRI Rp6.983.721.547,94;
   b. Deposito BRI sebesar Rp1.050.000.000.000;
   c. Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.

   Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.256.983.721.547,94, sedangkan yang seharusnya sebesar Rp1.256.318.525.284 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp665.196.263,94. Hal ini antara lain disebabkan hal sebagai berikut.
   a. Bunga jasa giro bulan September sebesar Rp35.920.515 yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan dan telah dipindahbukukan pada tanggal 02 Januari 2019.
   b. Bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp626.314.641 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan telah dipindahbukukan pada tanggal 04 Januari 2019.
   c. Kelebihan pelunasan yang akan dikembalikan ke debitur sebesar Rp2.961.106.
   d. Selisih Rp1,94 karena pembulatan.

4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.773.100.141.070 dan Rp2.028.750.985.012. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
   a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp261.500.000.000.
   b. Disetujui komite sebesar Rp1.009.300.000.000.
   c. Sisa sebesar Rp1.502.300.141.070 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2019.

5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.635.938.979.318 dan Rp37.746.815.725.695. Tujuan penempatan Dana Kelolaan BLU LMAN, yaitu:

Dana Investasi	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	46.229.359.535.205	36.328.328.003.821
b. Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.406.579.444.113	1.418.487.721.874
Jumlah	**47.635.938.979.318**	**37.746.815.725.695**

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	**37.746.815.725.695**
Penggunaan dana kelolaan untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) aset kelolaan	(11.908.277.761)
Penggunaan dana kelolaan untuk pendanaan tanah PSN	(21.251.698.468.616)
Penambahan dana kelolaan dari APBNP TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	31.152.730.000.000
Saldo per 31 Desember 2018	**47.635.938.979.318**

6. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.647.501.603.239 dan Rp934.500.000.000.

Rekening	Nomor Rekening	Nominal
PT BNI (Persero) Tbk	0754228723	637.500.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	0790913598	650.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 035788 40 5	446.250.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329. 01 036892 40 1	455.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0019500024145840	195.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 003827 30 6	72.663.103.253
PT BNI (Persero) Tbk	2018220615	191.088.500.000
Jumlah*		**2.647.501.603.253**

**) Selisih rincian dengan data neraca sebesar Rp14 karena pembulatan*

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.136.245.644.789 dan Rp488.875.000.000. Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2018 sudah termasuk pengembalian pokok dari debitur (LKM-KP, UMKM-KP, dan KUKP) sebesar Rp13.103.424.789.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp843,1 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp843.100.479.849.556 dan 659.515.052.235.595. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp572.155.921.531.187 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp843.100.479.849.556 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp270.944.558.318.369.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. K/L	264.349.885.641.992	61.455.378.467.188
2. BUN	578.750.594.207.564	598.059.673.768.407
Jumlah Bruto	**843.100.479.849.556**	**659.515.052.235.595**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
1. K/L	(49.958.850.254.012)	(19.829.198.690.520)
2. BUN	(220.985.708.064.357)	(201.034.632.686.026)
Jumlah Neto	**572.155.921.531.187**	**438.651.220.859.049**

1. Aset Lain-lain pada K/L

   Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp264.349.885.641.992 dan Rp61.455.378.467.188. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp214.391.035.387.980 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp264.349.885.641.992 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L Rp49.958.850.254.012.

   Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp264.349.885.641.992 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp233.130.907.196.903 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp232.501.430.332.362;

b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.305.613.513.814 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp6.302.709.503.230;

c. Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.896.652.429.657 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp5.882.901.795.573.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp578.750.594.207.564 dan Rp598.059.673.768.407. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp357.764.886.143.207 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp578.750.594.207.564 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp220.985.708.064.357. Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari :

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.186.005.790.698 dan Rp54.182.632.231.984.

Rincian Aset Lain-Lain BA 999.03 disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
2) BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	113.776.576.669	96.259.270.000
b) Aset Eks Pertamina	28.510.627.218.923	28.361.658.924.923
c) Aset Lain-lain BUN	548.367.392.125	25.711.479.434.081
Jumlah	**29.186.005.790.698**	**54.182.632.231.985***

**) selisih jumlah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp113.776.576.669. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp96.259.270.000 berupa 106 unit apartemen di Puri Casablanca;
- Pekerjaan *upgrading/furnishing* tahap I (11 unit) dan 1 unit apartemen untuk kantor lapangan sebesar Rp4.671.091.269;
- Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan *upgrade/furnishing* tahap II (20 unit) sebesar Rp93.999.400;
- Penyerahkelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA berupa 10 unit apartemen dan 2 unit ruko sebesar Rp12.752.216.000.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.510.627.218.923. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

c) Aset Lain-lain BUN

Aset Lain-lain BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Mutasi nilai Aset Lain-lain BUN dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018
Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017	25.711.479.434.080
Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode tahun 2018	7.331.901.000
Unrealized Capital Gain atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7	348.847.715.000
Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1	(7.785.000.000)
Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
Transfer keluar aset lainnya terkait Aset Tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
Transfer masuk (kapitalisasi) atas Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan (BOPP) Tanah dari K/L teknis	585.106.523.594
Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018	**548.367.392.125**

Adapun rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN sebagai berikut.

Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional	0
Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	548.367.392.125
Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN	548.367.392.125

1. Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

   Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

   Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema dana talangan dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan kebijakan pada surat Menteri Keuangan nomor S-282/MK.06/2018 tanggal 16 April 2018 hal Kebijakan Penyajian Aset dan Kewajiban terkait Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Kebijakan penyajian aset dan kewajiban tersebut didasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Aset Lain-lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		Nominal
	Posisi per 31 Desember 2017	25.511.506.657.955
(+)	Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
(+)	Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
(-)	Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
(-)	Transfer keluar aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
(+)	Transfer masuk (Kapitalisasi) atas Biaya operasional dan Pendukung Pengadaan tanah (BOPP) dari K/L teknis terkait	585.106.523.594
(-)	Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018		0

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Aset Eks HTBI berupa Tanah senilai Rp461.633.373.000 dan Bangunan senilai Rp86.734.019.126. Rincian mutasi Aset Eks HTBI pada tahun 2018 sebagai berikut.

Uraian		Nominal
	Posisi per 31 Desember 2017	199.972.776.125
(+)	Serah terima pekerjaan *upgrade* aset eks HTBI periode 2018	7.331.901.000
(+)	*Unrealized capital gain* atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7 dan Jalan Rasuna Said	348.847.715.000
(-)	Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur	(7.785.000.000)
Posisi per 31 Desember 2018		**548.367.392.125**

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp549.564.588.416.866 dan Rp543.877.041.536.423. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) Aset KKKS	491.602.418.832.866	489.508.659.091.683
2) Aset Eks BPPN	7.644.734.809.907	2.574.749.283.103
3) Aset Lain-lain BLBI	-	4.467.365.349.620
4) Aset Eks Pertamina	12.570.408.826.220	12.944.737.727.945
5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	40.518.095.500	72.019.011.500
6) Aset BMN *Idle*	79.383.729.148	54.663.708.402
7) Aset PKP2B	37.612.241.040.994	34.238.755.875.568
8) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	14.883.082.231	16.091.488.602
Jumlah	**549.564.588.416.866**	**543.877.041.536.423**

1) Aset KKKS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp491.602.418.832.866 dan Rp489.508.659.091.684. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2018 sebesar Rp313.973.013.141.158 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp491.602.418.832.866 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp177.629.405.691.706 dengan rincian sebagai berikut.

Aset KKKS	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a) Aset Tanah	**22.365.774.965.994**	**22.028.148.948.127**
b) Aset NonTanah	**469.236.643.866.872**	**467.480.510.143.557**
1. HBM	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218
2. HBI	97.017.511.748	70.785.280.181
3. Material Persediaan	25.952.463.476.307	24.677.942.835.158
Jumlah Bruto	**491.602.418.832.866**	**489.508.659.091.684**
Akumulasi Penyusutan	(177.629.405.691.706)	(162.493.375.705.530)
Jumlah Neto	**313.973.013.141.158**	**327.015.283.386.154**

a) Aset KKKS berupa Tanah

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.365.774.965.994 dan Rp22.028.148.948.127.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Saldo Awal	**22.028.148.948.127**	**20.819.996.739.758**
Penambahan	468.583.011.487	1.980.111.487.259
Pengurangan	(130.956.993.619)	(771.959.278.890)
Saldo Akhir*	**22.365.774.965.995**	**22.028.148.948.127**

**) Selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS. Terkait pengukuran, berdasarkan Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah;
- menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.

b) Aset KKKS Non Tanah berupa:

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp443.187.162.878.817 dan Rp442.731.782.028.218. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBM	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Saldo Awal	**442.731.782.028.218**	**370.928.185.846.133**
Penambahan	108.786.421.213.186	88.831.565.216.596
Pengurangan	(108.331.040.362.587)	(17.027.969.034.511)
Saldo Akhir	**443.187.162.878.817**	**442.731.782.028.218**

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Iinto Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp97.017.511.748 dan Rp70.785.280.181.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Saldo Awal	**70.785.280.181**	**58.622.414.607**
Penambahan	33.131.455.226	13.224.628.049
Pengurangan	(6.899.223.661)	(1.061.762.475)
Saldo Akhir*	**97.017.511.746**	**70.785.280.181**

**) Selisih Rp2 Tahun 2018 merupakan pembulatan*

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.952.463.476.307 dan Rp24.677.942.835.158. Mutasi Aset KKKS berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Saldo Awal (USD)	1,821,519,253.00	1,874,726,450
Penambahan (USD)	961,236,541.08	2,849,125,996
Pengurangan	(990,582,361.11)	(2,902,333,193)
Saldo Akhir		
USD	**1,792,173,432.97**	**1,821,519,253**
Rp*	**25.952.463.476.307**	**24.677.942.835.158**

**) Selisih konversi kurs Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.532 dan Rp4.486*

Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar USD1,821,519,253.00 atau setara Rp24.677.942.835.158 (kurs per 31 Desember 2017 adalah Rp13.548/USD).

Mutasi tambah sebesar USD961,236,541.08 berasal dari:

a. Pembelian material persediaan sebesar USD531,488,513.27.
b. Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD2,698,612.31 dan koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD36,705,428.41.
c. Pengembalian material persediaan perolehan 2018 sebesar USD31,421,616.13.
d. *Transfer In* sebesar USD13,979,173.30.
e. Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD344,943,197.66.

Mutasi kurang sebesar USD990,582,361.11 berasal dari:

a. Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD42,682,794.57 dan *non-capital* sebesar USD4,437,535.74 akibat pembenahan pencatatan aset.
b. Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD239,718,448.04.
c. *Transfer Out* sebesar USD15,764,852.95.
d. Penghapusan sebesar USD22,166,295.39.
e. Alih Kelola Serah pada Eks KKKS Total E&P Indonesia sebesar USD344,943,198.00.
f. Penggunaan Material Persediaan *non-capital* sebesar USD320,869,236.75.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2018 senilai USD1,792,173,432.97 atau ekuivalen Rp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

2) Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.644.734.809.908 dan Rp7.042.114.632.723. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2016 (*Audited*)
a) Aset Properti Eks BPPN	2.338.126.115.203	1.709.554.940.253
b) Aset Inventaris	8.504.708.157	11.009.466.267
c) Aset Nostro	9.584.244.334	14.092.050.712
d) Surat Berharga Eks BPPN	485.257.220.136	454.405.774.008
e) Saham Eks BPPN	400.118.594.856	385.687.051.863
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	4.403.143.927.222	4.467.365.349.620
Jumlah	**7.644.734.809.908**	**7.042.114.632.723**

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp2.338.126.115.203. Sedangkan per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp1.418.550.000 terletak di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat ditetapkan status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Terjadi perubahan nilai aset dikarenakan penilaian aset pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 aset nilainya bertambah sebesar Rp629.989.724.950.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen *copy*	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	**706**

b) Aset Inventaris

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.504.708.157 untuk 18.653 unit dan Rp11.009.466.267 untuk 32.408 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Inventaris yang terletak di Gudang Semanan Blok A-10 sebanyak 2.488 unit dengan nilai sebesar Rp294.766.520 telah laku lelang sebesar Rp81.000.000 dan Gudang Semanan Blok B-9 sebanyak 1.000 unit dengan nilai sebesar Rp295.806.590 telah laku lelang sebesar Rp61.750.000, lelang tanggal 26 Oktober 2018 di KPKNL Jakarta V.
- Inventaris yang terletak di Gudang Aspac Batu Ceper sejumlah 10.267 unit dengan nilai sebesar Rp1.914.185.000 telah laku lelang sebesar Rp105.000.000 pada tanggal 5 November 2018 di KPKNL Tangerang II.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.584.244.334 dan Rp14.092.050.712. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350,526.24 dan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh Ditjen Kekayaan Negara.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp485.257.220.136 dan Rp454.405.774.008. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank tanggal 30 November 2018.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp400.118.594.856 dan Rp385.687.051.863. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama Tahun 2018.

Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp101.776.804.670. Untuk Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp298.341.790.186.

Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-lain Eks BPPN

Aset Lain-lain Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.403.143.927.222 dan Rp4.467.365.349.620. Aset Lain-lain Eks BPPN merupakan aset yang timbul dari pemberian BLBI yang terdiri dari:

- Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp4.340.193.715.666;
- Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp16.657.242.209. Nilai aset tersebut masih menggunakan nilai saat penyerahan tahun 2009 dikarenakan keterbatasan dokumen kepemilikan sebagai dasar konfirmasi. Kebijakan atas aset Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang memadai akan ditetapkan kemudian.
- Aset Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp46.292.969.347.

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 22.**

3) Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp4.467.365.349.620. Aset Lain-lain BLBI merupakan aset non lancar lainnya yang terdiri dari Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA, Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA, Aset Saham (nonBank) Eks Kelolaan PT PPA, dan Saham yang Diserahkelolakan kepada PT PPA. Nilai Aset Lain-lain BLBI telah digabung dengan Aset Lain-lain Eks BPPN.

4) Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.570.408.826.220 dan Rp12.944.737.727.945. Aset Eks Pertamina dirincikan sebagai berikut.
   - 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000;
   - BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.522.828.826.220.

   Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Rp4.465.038.871.836.

5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp40.518.095.500 dan Rp72.019.011.500. ABMA/T sebesar Rp40.518.095.500 merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp72.019.011.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp38.626.071.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp70.126.987.000.

6) Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp79.383.729.148 dan Rp54.663.708.402. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2018, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp28.603.709.586 terdiri dari:
   - mutasi tambah tanah sebesar Rp25.103.886.550;
   - mutasi tambah bangunan sebesar Rp3.499.823.036.

   Mutasi kurang Aset BMN *Idle* pada tahun 2018 sebesar Rp3.883.688.840 yang terdiri dari:
   - hibah satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp145.755.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp60.425.000 kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
   - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Rawa dengan nilai perolehan sebesar Rp1.567.177.840 kepada Badan Pusat Statistik RI;
   - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp60.500.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp82.300.000 kepada Kementerian Keuangan RI;
   - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.611.131.000 kepada Komisi Yudisial;
   - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp356.400.000 kepada Kementerian Keuangan RI.

   Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 24.**

7) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp37.612.241.040.994 dan Rp34.238.755.875.568. Penambahan Aset PKP2B terdiri dari:
   - Penambahan aset baru berupa Tanah sebesar Rp2.841.740.379.224;
   - Tanah PT Kendilo Coal Indonesia yang baru dicatat sebesar Rp780.000.000;
   - Penambahan aset baru berupa non tanah sebesar Rp411.763.344.950;
   - Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp189.800.402.912;
   - Koreksi nilai perolehan sebesar Rp2.584.451.865; dan
   - Penghapusan aset melalui lelang penjualan Rp73.183.413.526.

   Akumulasi Penyusutan sebesar Rp26.155.417.554.234.

   Aset PKP2B yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum.

8) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.883.082.231 dan Rp16.091.488.602. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara dirincikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)
a) Barang Gratifikasi KPK	14.201.806.017	14.435.139.309
b) Aset Eks USAID	56.276.214	95.189.293
c) Aset Eks GIZ-APCC	-	180.260.000
d) Aset Eks GIZ-SREGIP	-	755.900.000
e) Saham PT Aldevelco	625.000.000	625.000.000
Jumlah	**14.883.082.231**	**16.091.488.602**

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp10,48 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.482.359.272.377 dan Rp15.591.513.780.723. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Yayasan TMII	90.793.868.244	89.955.509.968
2. Otorita Asahan	7.892.847.825	13.616.233.168
3. Yayasan Gedung Veteran	6.891.253.320	8.101.230.962
4. BAZNAS	103.225.219.734	140.005.041.457
5. Badan Wakaf Indonesia	1.293.221.652	1.303.893.178
6. BP Dana Abadi Umat	-	3.327.847.280.828
7. SKK Migas	(15.136.819.621)	(368.357.330.572)
8. Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
9. OJK	5.652.154.041.966	4.359.502.328.963
10. Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	**10.482.359.272.377**	**15.591.513.780.723**

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

   Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp90.793.868.244 dan Rp89.955.509.968. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.

Nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.955.509.968 merupakan nilai ekuitas akhir TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2017 *Audited*, hal tersebut dikarenakan sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited* proses audit di Yayasan TMII belum selesai. Nilai Ekuitas Bersih Yayasan TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII tahun 2017 *Audited* sebesar Rp88.231.021.649. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

   Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.892.847.825 dan Rp13.616.233.168. Aset Lainnya sebesar per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.239.478.731.134 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBP ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.231.585.883.309. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBP Lainnya.
3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

   Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.891.253.320 dan Rp8.101.230.962. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018.

   Nilai Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.101.230.962 berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Hal tersebut disebabkan sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, Yayasan Gedung Veteran belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Nilai ekuitas bersih menurut Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran 2017 *Audited* sebesar Rp8.037.340.463.
4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

   Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp103.225.219.734 dan Rp140.005.041.457. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.

   Nilai sebesar Rp140.005.041.457 merupakan nilai ekuitas bersih laporan keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited*, Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, BAZNAS belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Nilai Ekuitas Bersih menurut Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited* sebesar Rp109.498.450.853.
5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)

   Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.293.221.652 dan Rp1.303.893.178. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2018 *Audited*.

6. Aset Lainnya dari Badan Pengelolan Dana Abadi Umat (BP DAU)

   Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp3.327.847.280.828. Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih setelah pelimpahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Abadi Umat dari Kementerian Agama RI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor: B-11001/Dj.II/KU.00/01/2019 yang merupakan nilai ekuitas bersih yang dilimpahkan kepada BPKH sesuai neraca penutup per tanggal 31 Desember 2017.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 20, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH Merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH dan dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. Pada saat laporan keuangan ini disusun, BPKH telah terbentuk. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya akan diserahkan kepada BPKH.

7. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

   Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp15.136.819.621 dan minus Rp368.357.330.572. Aset Lainnya sebesar minus Rp15.136.819.621 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2018 *Audited* sebesar minus Rp896.205.647.175 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp990.287.587.479 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp109.218.759.925. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2018 *Audited*	**(896.205.647.175)**
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	990.287.587.479
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(109.218.759.925)
Ekuitas bersih BP Migas per tanggal 13 November 2012	-
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2018	**(15.136.819.621)**

   Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018. Nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara.

8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)

   Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp484.186.960.628 dan Rp8.019.539.592.771. Aset Lainnya sebesar Rp484.186.960.628 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember

2018. Penurunan Aset lainnya yang berasal dari ekuitas bersih dari laporan keuangan Bapertarum disebabkan pada Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* Bapertarum mencatat kewajiban utang kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti sebesar Rp9.442.958.696.105 yang merupakan bagian dari proses likuidasi Bapertarum PNS, berdasarkan Laporan keuangan Bapertarum PNS total aset sebesar Rp10.199.919.866.895, total kewajiban sebesar Rp9.715.732.906.267, dan ekuitas bersih sebesar Rp484.186.960.628. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS akfif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.652.154.041.966 dan Rp4.359.502.328.963. Aset Lainnya dari OJK per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

10. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

    Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.151.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih tidak terikat sebesar Rp117.901.177.105, nilai ekuitas bersih terikat temporer sebesar Rp1.944.416.114.769, dan nilai ekuitas bersih terikat permanen sebesar Rp2.088.741.386.755 berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 *Audited*.

D.2.1.5.8 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp12,21 triliun

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.211.622.116.245 dan Rp10.072.629.035.983. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Des 2018 (*Audited*)	31 Des 2017 (*Audited*)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L	12.141.426.494.645	10.015.012.414.379
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN	70.195.621.600	57.616.621.604
Jumlah	**12.211.622.116.245**	**10.072.629.035.983**

1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L

   Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.141.426.494.645 dan Rp10.015.012.414.379.

   Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L terdiri dari:

   a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.756.152.803;
   b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp75.862.174.145;
   c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp9.454.936.200.910;
   d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp806.605.150.567;
   e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.404.896.771.775;
   f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp381.370.044.445.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN

   Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp70.195.621.600 dan Rp57.616.621.604. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

   a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp47.237.987.378;
   b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp22.957.634.222.

D.2.1.5.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp271.738.387.743.944 dan Rp221.423.780.525.753. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp271,73 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	Desember 2017 (*Audited*)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	50.752.679.679.587	20.389.147.839.727
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	220.985.708.064.357	201.034.632.686.026
Jumlah	**271.738.387.743.944**	**221.423.780.525.753**

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.752.679.679.587 dan Rp20.389.147.839.727. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp50.752.679.679.587 terdiri dari:

   a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp15.029.961.892.
   c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp49.943.820.292.120.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp220.985.708.064.357 dan Rp201.034.632.686.026. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

   a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp177.629.405.691.706;
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp20.551.087.855.
   c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp17.172.741.763.346.
   d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp26.155.417.554.234.
   e. Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.005.586.867.
   f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp3.586.380.347.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp3,99 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.991.926.175.494 dan Rp4.505.640.401.487. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Utang PFK DJPK	3.604.283.936.351	4.364.577.414.806
2. Utang PFK DJPB	387.453.556.900	141.062.986.681
3. Utang PFK DJKN	188.682.243	-
Jumlah	**3.991.926.175.494**	4.505.640.401.487

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

   Utang PFK DJPK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.604.283.936.351 dan Rp4.364.577.414.806. Utang PFK DJPK sebesar Rp3.604.283.936.351 berasal dari:

   a. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2018 sebesar Rp46.560.384.465, yaitu untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp15.888.138.522 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp30.672.245.943;
   b. Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok bulan Desember 2018 sebesar Rp3.557.723.551.886.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPb)

   Utang PFK DJPb per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp387.453.556.900 dan Rp141.062.986.681.

   Rincian Utang PFK DJPb menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. BPJS Kesehatan	97.974.338.980	113.516.533.532
b. Perum Bulog	-	157.972.645
c. PT. Taspen (Persero)	12.892.263.340	26.770.522.176
d. PT. Asabri (Persero)	583.281.959	412.725.731
e. Bapertarum PNS	276.003.672.621	205.232.597
Jumlah	**387.453.556.900**	**141.062.986.681**

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
   Utang PFK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp188.682.243 dan Rp0. Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp99,88 triliun

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp99.881.440.679.615 dan Rp44.438.234.758.803. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. K/L	17.548.296.494.980	14.934.504.654.454
2. BUN	82.333.144.184.635	29.503.730.104.349
Jumlah	**99.881.440.679.615**	**44.438.234.758.803**

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L
   Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.548.296.494.980 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.
   Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:
   a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.488.408.342.644 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
   b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.247.499.237.957 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
   c. Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp1.466.618.127.260 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga
   Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 25.**

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN
   Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp82.333.144.184.635 dan Rp29.503.730.104.349.
   Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN sebagai berikut.

BA BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. BA 999.03 (BUN PIP)	7.776.103.924.407	13.789.274.661.776
b. BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)	58.711.068.590.701	4.514.126.912
c. BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)	15.813.940.969.921	15.470.004.948.054
d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	197.868.217.285	239.936.781.997
Eliminasi di LKBUN	(165.837.517.678)	(414.390)
Jumlah*	**82.333.144.184.636**	**29.503.730.104.349**

**) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan*

   a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 (BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.776.103.924.407 dan Rp13.789.274.661.776.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	Nilai
Posisi per 31 Desember 2017	13.789.274.661.776
Koreksi atas kelebihan saldo kewajiban per 31 Desember 2017	13.785.655.916.257
Hasil verifikasi BPKP *eligible* di tahun 2018	(19.778.765.251.779)
Penggantian dana talangan yang lolos verifikasi di tahun 2018	3.047.056.332
Pengakuan kewajiban atas BAST *upgrade*/renovasi aset kelolaan pada periode dilaporkan	(3.001.008.702)
Pembayaran atas kewajiban terkait BAST *upgrade*/renovasi aset kelolaan pada periode dilaporkan	(20.107.449.477)
Jumlah	**7.776.103.924.407**

Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp7.776.057.876.777.
2. Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp46.047.630.

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp58.711.068.590.701 dan Rp4.514.126.912. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) Kementerian Keuangan	58.699.506.425.657	3.221.008.220
2) SKK Migas	11.562.165.044	1.293.118.692
Jumlah	**58.711.068.590.701**	**4.514.126.912**

1) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain Kementerian Keuangan sebesar Rp58.699.506.425.657 terdiri dari:

a) Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.186.544.050 yang merupakan utang biaya pengacara termin ketiga untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200,000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2018. Rincian biaya atas Utang kepada Pihak Ketiga tersebut disajikan sebagai berikut.

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kemenkeu		31 Desember 2018 (*Audited*)
Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000 x Rp 14.481 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2018)	2.896.200.000
PPN	10% x USD200,000	289.620.000
Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp 14.481	724.050
Jumlah		**3.186.544.050**

b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp649.429.761.603 yang merupakan Utang Satker Cadangan Beras Pemerintah kepada pihak ketiga (Perum Bulog) atas selisih lebih antara jumlah penyaluran beras yang dilaksanakan operator dibandingkan dengan jumlah persediaan cadangan beras pemerintah, yaitu sebesar 67.768.941kg dikalikan dengan HPB. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor

S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 hal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2018 ditetapkan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2018 sebesar Rp9.583/Kg.

c) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp3.752.236.170. Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 tersebut dapat dirinci sebagi berikut.

1) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.578.068.170 yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP 2017 Nomor : LLWAS-356/PW27/2/2018 tanggal 12 November 2018;

2) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.

d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp10.267.581.435. Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga didasarkan pada tagihan dari pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) yang belum dibayar atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Bulan Januari s.d. Agustus 2017 (sebelum kontrak ditandatangani). Atas nilai tagihan tersebut telah direviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Tagihan Pembayaran Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Periode Januari Sampai Dengan Juli Tahun 2017 nomor LR-632/PW26/2/2018 tanggal 14 Desember 2018

e) Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp58.032.870.302.399 merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950 dan 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266, utang pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif dibawah biaya pokok penyediaan listrik non subsidi sebesar Rp7.456.451.880.403 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tindak lanjut temuan BPK atas subsidi listrik PT PLN (Persero) 2018, dan kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Utang Selisih Harga kepada Pertamina	47.605.783.140.136
Nilai PPN	1.807.731.903.387
Nilai PBBKB	903.865.951.693
Total PT Pertamina	**50.317.380.995.216**
Total PT PLN	**7.456.451.880.403**
Total PT AKR Corporation	**259.037.426.780**
Jumlah	**58.032.870.302.399**

2) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN SKK Migas sebesar Rp11.562.165.044. Utang kepada pihak ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp9.392.191.481 berupa saldo tunggakan Tahun 2018 yang dibelum dibayarkan kepada pihak ketiga, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp54.277.300 berupa BP-LS Bendahara dan BP Lain-Lain, dan koreksi tambah sebesar Rp2.115.696.263 sesuai hasil rekomendasi BPK pada Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/112/DJA/PB.6/2019.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.813.940.969.921 dan Rp15.470.004.533.664. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018 *(Audited)*	31 Desember 2017 *(Audited)*
1) Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb	5.133.133.592.527	6.062.601.535.454
2) Utang Kepada Pihak Ketiga DJA	10.679.007.714.996	9.405.611.924.212
3) Utang Kepada Pihak Ketiga BKF	1.799.662.398	1.791.073.998
Jumlah	15.813.940.969.921	15.470.004.533.664
Eliminasi	(165.837.517.678)	-
Jumlah	**15.648.103.452.243**	**15.470.004.533.664**

1) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.133.133.592.527 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. Utang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 31 Desember 2018	67.833.555.000
2. Utang PPN RTGS/Swift Bank Indonesia	695.884.838
3. Utang PPN RTGS BO	36.747.100
4. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2012-2013	1.500.000.000.000
5. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2014-2015	3.500.000.000.000
6. Kekurangan Iuran Jamkes Triwulan IV Tahun 2018	60.411.384.023
7. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKK s.d. Triwulan IV TA 2018	380.810.360
8. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKm s.d. Triwulan IV TA 2018	1.142.158.092
9. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran s .d. JKK Triwulan IV TA 2017	215.819.398
10. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKm s.d. Triwulan IV TA 2017	352.680.485
11. Utang Pembayaran Bunga negatif	3.677.970
12. Kekurangan pembayaran dana belanja pensiun bulan Desember 2018	2.060.875.261
Jumlah	**5.133.133.592.527**

2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.679.007.714.996 yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Migas dan Panas Bumi, Utang Jangka Pendek Lainnya, Pendapatan Diterima di Muka, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

j Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.769.169.664.657 Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut.

Utang kepada pihak ketiga Migas	31 Desember 2018 *(Audited)*
1. PBB Migas	-
2. *Reimbursement* PPN	1.648.403.042.888
3. Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.384.817.537
4. DMO *Fee* KKKS	1.751.906.489.898
5. *Underlifting* KKKS	5.367.475.314.334
6. *Fee* penjualan	-
Jumlah	**8.769.169.664.657**

a) PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2018 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2018 adalah Nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak sebesar Rp12.283.733.396.337. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama melalui proses reklasifikasi akun pendapatan, yaitu dari Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan PBB Migas sebesar Rp6.119.980.217.581 dan tahap kedua melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas sebesar Rp6.163.753.178.756.

b) *Reimbursement* PPN

Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali *(Reimbursement)* Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran). Rincian Utang *Reimbursement* PPN per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

No	KKKS	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1.	BP BERAU	236.991.590.885	144.854.431.985
2.	JOB.PERT-TALISMAN JAMBI MERANG	2.813.371.666	-
3.	PERTAMINA EP	492.960.640.265	-
4.	BUT PETROGAS (BASIN) LTD	7.045.424.233	-
5.	PETROCHINA INT'S JABUNG LTD	14.572.985.142	-
6.	PT MEDCO E&P INDONESIA/SOUTH SUMATERA	8.823.106.689	-

7.	PT MEDCO E&P RIMAU	8.513.218.518	-
8.	PT MEDCO E&P TARAKAN	694.894.329	-
	PT SPR LANGGAK (LANGGAK RIAU)	1.474.830.950	
9.	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY LTD	9.288.380.583	19.796.791.785
10.	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	9.681.875.917	34.712.215.408
11.	ENI MUARA BAKAU B.V	278.008.997.516	-
12.	PT Chevron Pacific Indonesia	-	79.010.088.148
13.	Medco E&P Natuna Ltd	-	48.861.527.055
14.	PT Pertamina Hulu Energi NSO	-	33.230.211.515
15.	Totalfinaelf E&P Indonesie	-	4.093.809.416
16.	Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) Ltd	-	1.074.799.484
17.	PT Tropik Energi Pandan	-	1.315.948.533
18.	CNOOC Southeast Sumatera B.V	299.066.160.233	
19.	Conocophilips Grissik	278.467.565.962	
	Jumlah	**1.648.403.042.888**	**366.949.823.329**

c) Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015. Tidak terdapat saldo utang Pajak Air Tanah dan Air Permukaan per 31 Desember 2018.

d) Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC. Rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut.

Pemda	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1. Kab. Indragiri Hulu	144.821.930	119.316.429
2. Kab. Tanjung Jabung Barat	856.184.282	-
3. Kab. Tanjung Jabung Timur	298.996.884	-
4. Kab. Batang Hari	66.126.132	-
5. Kab. Musi Rawas	18.688.309	-
6. Kab. Teluk Bintuni	-	6.983.736.850
7. Kab. Rokan Hilir	-	2.757.315.475
8. Kab. Kutai Kertanegara	-	(131.252.484)
Jumlah*	**1.384.817.537**	**9.729.116.270**

*selisih TA 2017 Rp1 antara tabel dengan angka audited karena pembulatan.

e) DMO *Fee* KKKS

Mekanisme pembayaran DMO *Fee* kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran DMO *Fee* dan *Over/Under Lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan DMO *Fee* kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO *Fee* per 31 Desember 2018 sebesar USD120,979,646.60 atau setara dengan Rp1.751.906.489.898 dan per 31 Desember 2017 sebesar USD158,399,724 atau setara dengan Rp2.145.999.443.684.

f) Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar USD370,656,399 atau setara dengan Rp5.367.475.314.334, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD380,735,937 atau setara dengan Rp5.158.210.477.794.

Total saldo utang *underlifting* sebesar USD370,656,399 tersebut terdiri dari:

1. Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2018 masing-masing sebesar USD340,581,975 atau setara dengan Rp4.931.967.574.093 dan USD18,595,030 atau setara dengan Rp269.274.629.864.
2. Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2017 masing-masing sebesar USD9,430,557 atau setara dengan Rp136.563.895.917 dan USD2,048,837 atau setara dengan Rp29.669.214.390. Utang sebesar USD2,048,837 tersebut merupakan utang *underlifting* KKKS PHE Tuban tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas pada Tahun 2018. Utang tersebut masih di-pending penyelesaiannya terkait dengan permasalahan penyesuaian harga gas suar kepada PT Gassuma Corporindo.

Nilai estimasi utang *underlifting* tersebut merupakan nilai estimasi tagihan *underlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas berdasarkan cut off hasil pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS per 1 Februari 2019 yang hingga saat cut off penyusunan laporan keuangan audited ini belum disampaikan tagihan aktualnya oleh SKK Migas. Keseluruhan nilai final *over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.

g) Utang *Fee* Penjualan Migas

Utang *fee* penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan *fee* atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan belum diselesaikan hingga 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo utang *fee* penjualan migas untuk tahun ini. Pada tahun 2017 terdapat beberapa tagihan atas *fee* penjualan migas yang dikembalikan kepada SKK Migas, yaitu atas penjualan gas pipa tahun 2016 sebesar USD1,376,957.06, atas penjualan LNG tahun 2016 sebesar USD29,645,479.02, penjualan LNG periode *lifting* bulan Januari – September 2017 sebesar USD20,872,577.79. Pengembalian tagihan *fee* penjualan gas pipa tahun 2016 karena belum ditandatanganinya amandemen Perjanjian Penunjukkan Penjual Gas Bumi *Existing* yang menjadi

landasan dalam melakukan pembayaran *fee* penjualan gas pipa. Pengembalian tagihan *fee* penjualan LNG karena belum lengkapnya dokumen serta masih memerlukannya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme perhitungan volume LNG bagian negara.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2018, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp1.893.544.333.250. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	Nilai
1 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi-*reimbursement* PPN *	756.580.888.144
2 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi -PBB Panas bumi	-
3 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi -penggantian bonus produksi	137.235.181.441
4 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi-*reimbursement* PPN *	606.858.800.737
5 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi -PBB	227.031.945.250
6 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi - penggantian bonus produksi **	-
7 Bagian Pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	165.837.517.678
Jumlah	**1.893.544.333.250**

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp16.293.717.099 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan terakhir dan korespondensi antara KKKS, Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak, atas dana salah setor tersebut telah diproses pengembaliannya pada bulan Maret 2019 melalui melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor 149/AG/2019 tanggal 12 Maret 2019 Hal Proses Pengembalian Dana Salah setor KKKS PT Mandiri Madura Barat Ke Rekening Migas atas kurang bayar PPh Migas tahun 2013.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.799.662.398. Utang Kepada Pihak Ketiga BKF per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.799.662.398. Penambahan saldo utang kepada pihak ketiga dikarenakan adanya pembayaran kekurangan bayar iuran kepada Lembaga internasional tahun 2017 pada tahun 2018.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp197.868.217.285 dan Rp239.936.781.997 atau mengalami penurunan sebesar Rp42.068.564.712 (17,53%). Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 merupakan Utang kepada Pihak Ketiga dari BUN kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang Retur KPPN	197.842.160.917	Utang retur di KPPN
Utang Lebih Limpah KPPN Khusus Penerimaan	26.056.365	Merupakan kewajiban KPPN Khusus Penerimaan yang berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi yang belum selesai dikompensasi
Pembulatan	3	
Jumlah	**197.868.217.285**	

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga Rp63,56 triliun

Utang Bunga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp63.568.707.486.877 dan Rp57.638.432.861.401. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Utang Bunga dirincikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Pada BUN:		
Utang Bunga SBN	58.360.927.183.310	53.851.009.055.387
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	102.827.439.148	54.839.859.751
Utang Bunga Luar Negeri	5.104.952.864.420	3.732.502.361.236
Subtotal	**63.568.707.486.878**	**57.638.351.276.374**
Pada KL:		
Utang Bunga pada Kemenlu	-	81.585.027
Jumlah	**63.568.707.486.878**	**57.638.432.861.401**

**Selisih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan*

Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp58.360.927.183.310 didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp184.478.615.000.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp30,13 triliun

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp30.130.298.770.683 dan Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi tersebut Rp2.062.615.820.150 lebih rendah dari jumlah subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019.

Selain reklasifikasi tersebut di atas, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Kementerian Keuangan	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630
2. Kementerian Pertanian	9.773.249.000.000	7.950.489.339.000
3. Kementerian Perhubungan	108.285.000.000	189.217.346.222
4. Kementerian Sosial	-	140.372.114.951
5. Kementerian PUPR	617.792.089.221	418.645.594.869
6. Kementerian Koperasi dan UKM	3.329.280.541.077	5.878.284.396.161
Jumlah	**30.130.298.770.683**	**32.192.914.590.833**

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

   Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp16.301.692.140.385 dan Rp17.615.905.799.630. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp1.314.213.659.245 lebih rendah dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Rincian utang jangka pendek disajikan sebagai berikut.

Eselon I	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	15.907.204.095.503	17.600.000.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	386.123.000.000	-
c. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	8.365.044.882	15.905.799.630
Jumlah	**16.301.692.140.385**	**17.615.905.799.630**

   a. Utang Subsidi pada DJA

      - Utang sebesar Rp15.907.204.095.503 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:
        - Utang sebesar Rp10.028.907.351.448 merupakan utang kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016
        - Utang sebesar Rp5.868.200.382.336 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
          - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579;
          - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550;
          - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207.

- Utang sebesar Rp10.096.361.719 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019. Jumlah reklasifikasi yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek adalah subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15.907.204.095.503.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak.
Beban subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp386.123.000.000.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan
Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.365.044.882.
Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 terdiri dari:
1) Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKPE) sebesar Rp1.600.244.996.
2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) sebesar Rp580.453.812.
3) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sebesar Rp6.068.257.667.
4) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) sebesar Rp116.088.407.

Rincian Utang Subsidi Kredit Program sebagai berikut.

Skema	Nilai BAV 2018	Tagihan 2015	Tagihan 2016	Tagihan 2017	Tagihan 2018
KKPE	1.600.244.996	0	0	0	1.600.244.996
KPENRP	580.453.812	0	0	0	580.453.812
KUPS	6.068.257.667	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	1.611.492.589
SSRG	116.088.407	0	0	0	116.088.407
	8.365.044.882	**665.566.882**	**3.006.357.142**	**784.841.054**	**3.908.279.804**

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.773.249.000.000 dan Rp7.950.489.339.000. Jumlah Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp1.822.759.661.000 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Kenaikan Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 karena adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK yang telah dianggarkan di APBN TA 2019 sebesar Rp9.773.249.000.000.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan
Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.285.000.000 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp189.217.346.222. Jumlah Utang Subsidi tersebut menurun sebesar Rp80.932.346.222 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017. Jumlah Utang Subsidi sebesar Rp108.285.000.000 merupakan jumlah Utang Subsidi TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan Utang Subsidi TA 2016 sebesar Rp8.018.559 yang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan di APBN TA 2019.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial

   Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951. Tidak terdapat lagi Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dikarenakan terdapat setoran yang merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Subsidi Rastra yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

   Utang Subsidi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp617.792.089.221 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp418.645.594.869. Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp199.146.494.352 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Utang Subsidi sebesar Rp617.792.089.221 terdiri dari:

   a. Dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp379.937.975.000
   b. Utang subsidi estimasi BUM sebesar Rp111.748.000.000
   c. Utang subsidi estimasi Bunga KPR sebesar Rp124.002.613.877
   d. Utang subsidi estimasi bunga air bersih sebesar Rp2.103.500.344

6. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

   Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.329.280.541.077 dan Rp5.878.284.396.161. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.329.280.541.077 dapat dirinci sebagai berikut.

   - Tagihan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp47.420.400.629
   - Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp1.365.216.211.938
   - Tagihan Subsidi IJP KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp1.134.226.908.855
   - Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp782.417.019.655.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang Transfer Rp42,50 triliun

Utang Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp42.508.894.037.204 dan Rp26.096.171.127.047. Utang Transfer tersebut terdiri dari Kewajiban TKD sebesar Rp24.143.153.891.576 dan Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp18.365.740.145.628.

1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil)

   Kewajiban Transfer ke Daerah untuk satker (Dana Bagi Hasil) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.143.153.891.576**.** Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD dirincikan sebagai berikut.

Kewajiban TKD	31 Desember 2018 (*Audited*)
Kurang Bayar DBH TA 2017	23.679.501.426.987
Kurang Bayar DBH TA 2016	132.314.461.127
Kurang Bayar DBH TA 2015	265.404.954.516
Kurang Bayar DBH TA 2014	62.714.209.703
Kurang Bayar DBH TA 2013	4.593.392
Kurang Bayar DBH TA 2012	3.214.245.851
Jumlah	**24.143.153.891.576**

   Pada tahun 2018, telah ditetapkan PMK No.103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018.

2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)
   Kewajiban TKD Diestimasi per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan perkiraan (estimasi) dan akan menjadi definitif (direklasifikasi menjadi Kewajiban TKD) setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp368,35 triliun

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp368.352.663.805.325 dan Rp272.701.715.607.467. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp368.329.678.487.325 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp368.352.663.805.325 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp101.251.794.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp78.266.476.000.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
BUN:		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	88.732.967.798.966	72.242.010.438.961
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.410.104.071.397	1.367.467.507.395
Bagian Lancar SBN	278.132.014.827.761	199.021.153.186.177
Subtotal Bagian Lancar BUN	**368.275.086.698.124**	**272.630.631.132.533**
KL:		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	77.577.107.201	71.084.474.934
Jumlah Bruto	**368.352.663.805.325**	**272.701.715.607.467**
Unamortized Discount	(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
Unamortized Premium	78.266.476.000	34.999.374.000
Jumlah Neto	**368.329.678.487.325**	**272.684.344.284.467**

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp102,90 triliun

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.900.000.000.000 dan Rp124.497.290.000.000. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp101.235.959.806.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp102.900.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.664.040.194.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0.
Rincian Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Utang SBN Jangka Pendek	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Jumlah Bruto	**102.900.000.000.000**	**124.497.290.000.000**
Unamortized Discount	(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
Unamortized Premium	0	0
Jumlah Neto	**101.235.959.806.000**	**122.842.328.897.000**

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp24,85 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp24.856.986.958.911 dan Rp17.452.254.907.564. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dirincikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	24.681.785.707.564	17.295.682.218.033
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	174.546.010.077	156.409.158.398
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada LIPI	-	17.100.000
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	51.000.000	50.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	604.241.270	96.431.133
Jumlah	**24.856.986.958.911**	**17.452.254.907.564**

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp14,68 triliun

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.685.573.384.005 dan Rp15.549.048.517.692. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
K/L	15.584.991.431.064	15.422.121.457.965
BUN	100.581.952.941	126.927.059.727
Jumlah	**15.685.573.384.005**	**15.549.048.517.692**

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp15.584.991.431.064, terutama berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.466.888.019.588 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi dan BP Batam sebesar Rp1.671.119.438.755. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Lampiran 25.**
2. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp100.581.952.941 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp280,09 miliar

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp280.090.169.168 dan Rp33.564.572.441 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar Rp280.090.169.168 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2018 yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Pendapatan yang Ditangguhkan yang berasal dari BA 999.02 direklasifikasi menjadi Pendapatan Hibah di LO LKPP. Pada tahun 2018, terdapat Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp865.152.763.986 pada BA 999.02. Pendapatan ini merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus dan digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan pengakuan akun Pendapatan Hibah.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp32,87 miliar

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp32.878.446.202 dan Rp16.494.539.212. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
K/L	58.508.784.553	71.046.171.406
BUN	1.799.325.227	20.847.698
Penyesuaian/reklasifikasi menjadi pendapatan-LO	(27.429.663.578)	(54.572.479.892)
Jumlah	**32.878.446.202**	**16.494.539.212**

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp58.508.784.553 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp1.799.325.227 merupakan pajak tahun 2018 yang belum disetor ke rekening kas negara.
3. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp27.429.663.578.

D.2.2.2 Utang Jangka Panjang

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp5,72 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.724.587.516.213 dan Rp4.414.348.818.183. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
BJB	332.145.446.203	664.290.892.406
Bank Mandiri	2.062.398.778.243	712.234.857.729
PT BNI (Persero)	2.732.334.773.459	2.202.502.235.666
PT BRI (Persero)	124.195.303.801	165.593.738.400
Bank Jateng	92.967.743.533	130.154.840.943
Bank DKI	380.545.470.973	539.572.253.039
Jumlah*	**5.724.587.516.212**	**4.414.348.818.183**

**Selisih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan*

Terkait klasifikasi akun utang jangka panjang pada Neraca, pada tahun 2019 akan dilakukan kajian terkait penyajian dan klasifikasi utang jangka panjang perbankan dan non perbankan sesuai dengan substansi transaksi.

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp3.231,65 triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dan Rp2.871.222.232.762.317. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.232.002.304.373.556 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp34.929.436.432.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp35.276.299.121.000.

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	**31 Desember 2018 (*Audited*)**	**31 Desember 2017 (*Audited*)**
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
Unamortized Discount	(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
Unamortized Premiun	35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Jumlah	**3.232.002.304.373.556**	**2.888.351.691.068.317**

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp43,31 triliun

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp43.314.553.530.000 dan Rp53.890.489.260.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Valas seri RI0224, RI0229 dan RI0249 diterbitkan dalam rangka *Prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pasal 28 Undang undang nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp5,32 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.326.890.009.308 dan Rp9.657.081.539.263. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT sebesar Rp5.326.890.009.308 terdiri dari UPSL tahun 2012-2013 sebesar Rp1.557.126.930.000, UPSL tahun 2014-2015 sebesar Rp 3.099.954.609.263, dan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan. Perubahan UPSL tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Terdapat penambahan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
2. Reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut akan dibayarkan pada tahun 2019, yaitu untuk UPSL 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 dan UPSL 2014-2015 sebesar Rp3.500.000.000.000.

Pengaturan mengenai *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service* Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, dan
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut adalah sebagai berikut:

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	**Jumlah**	**Tanggal/Keterangan**	**Jumlah**
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000	-	6.000.000.000.000

   Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 – 2015

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	**Jumlah**	**Tanggal/Keterangan**	**Jumlah**
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 – 2016

   Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp154.619.584.439.818 dan Rp160.704.149.324.311, yang terdiri dari:

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp154,61 triliun

Jenis Utang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	126.167.048.361.579	126.013.566.421.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri	25.190.149.909.936	24.066.318.391.599
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	866.271.480.516	692.797.191.623
Jumlah	**154.619.584.439.818**	**160.704.149.324.311**

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

  Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

  Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

  Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25%xRp3.659.191.822.315).

  Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program.Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

  Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp126.167.048.391.579 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Taspen (Persero). Untuk Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada PT Taspen (Persero), terdapat perubahan sumber pencatatan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada tahun 2018 digunakan nilai AIP sesuai Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited*, sedangkan pada tahun 2017 digunakan nilai AIP sesuai Laporan keuangan Konsolidasian *Audited*. Jika menggunakan dasar Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited,* nilai AIP per 31 Desember 2017 adalah Rp126.633.857.473.128,00. Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited* adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri

  Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/Polri sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Asabri. Nilai tersebut merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri Tahun 2018 (*Unaudited*) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2018 (*Unaudited*). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian *Unaudited*.

- Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS

  Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS sebesar Rp484.186.960.628 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas ekuitas bersih Bapertarum PNS.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

  Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp866.271.480.516, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp803.656.913.796 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp62.614.566.720.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp11,62 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp11.627.039.378.875 dan Rp28.415.009.897.486. Utang tersebut terdiri dari:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2018	31 Desember 2017		
1	Keuangan	5.698.022.525.534	18.587.563.958.211	(12.889.541.432.677)	(69,34)
2	Pertanian	5.757.944.602.218	9.818.329.939.276	(4.060.385.337.058)	(41,36)
3	Perhubungan	25.552.071.501	0	25.552.071.501	
4	Sosial	0	0	0	-
5	PUPR	145.520.179.622	9.116.000.000	136.404.179.622	1.496,32
	Jumlah*	**11.627.039.378.875**	**28.415.009.897.487**	**(16.787.970.518.612)**	**(59,08)**

1. Kementerian Keuangan

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.698.022.525.534 dan Rp18.587.563.958.211.

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp5.698.022.525.534 terdiri dari:

   a. Direktorat Jenderal Anggaran

      Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

      Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Dapat diinformasikan bahwa utang jangka panjang subsidi energi per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

      1) Utang sebesar Rp4.453.601.479.909 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018, yang terdiri atas:
         - Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp1.788.737.445.352;
         - Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp190.670.411.505;
         - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp2.474.193.623.051,50.
      2) Utang sebesar Rp21.661.045.834 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo TBK berdasarkan hasil audit BPK RI.

   b. Direktorat Jenderal Pajak

      Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.222.759.999.792 dan Rp386.136.772.923. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 ditambah dengan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp386.136.772.923 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp386.123.000.000. Utang Subsidi tahun 2018 merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2018 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi.

2. Kementerian Pertanian

   Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang merupakan Kurang Bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA. 2017 (*Audited*). Dapat diinformasikan Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

   a. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.276 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp9.773.249.000.000.
   b. Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp5.712.863.662.942,00 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

3. Kementerian Perhubungan

   Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

   Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 sebagai berikut.

   a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan hasil verifikasi KPA atas tagihan PSO PT KAI, yaitu Utang Subsidi di TA 2016 sebesar Rp2.216.878.520.

No	Uraian Utang	Nilai (Rp)	Reklas ke Jangka Pendek	Utang Jangka Panjang
1	Utang Subsidi TA 2015	108.276.981.441	108.276.981.441	-
2	Utang Subsidi TA 2016	2.224.897.079	8.018.559	2.216.878.520
Total		**110.501.878.520**	**108.285.000.000**	**2.216.878.520**

   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT Pelni sebesar Rp23.335.192.981 yang merupakan hasil audit BPK RI Tahun 2018.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000.

   Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Selisih Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM). Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2017 dan 2018.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp714,33 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp.714.334.793.186.942 dan Rp668.147.269.113.375 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Uraian	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Outstanding Utang Program	367.807.804.985.617	325.464.854.248.659
Outstanding Utang Proyek	346.526.988.201.325	342.682.414.864.716
Total	**714.334.793.186.942**	**668.147.269.113.375**

Berikut Daftar *Policy Matrix* untuk Utang Program yang ditarik pada TA 2018 sebagai berikut.

No	*Lender*	Program	*Policy Matrix*|*Output*|Pilar	
1	ADB, KfW	FPEMP-2	1	*Medium Term Expenditure Aligned with RPJMN and SDG Targets*
			2	*National public expenditure system enhanced*
			3	*Fiscal transfers and subnational governments' spending for service delivery improved*
2	ADB, KfW	SIEP	1	*Fiscal sustainability and sector governance improved*
			2	*Private participation in power and gas markets enabled*
3	ADB, KfW	SIGAP-3	1	*More predictable and open business environment*
			2	*Creating an Efficient Market for Infrastructure through PPPs*
			3	*Faster and More transparent public procurement*

4	World Bank, KfW, AFD	FISCAL DPL-2	1	*Improving Quality of Spending*
			2	*Strengthening Revenue Administration*
			3	*Enhancing Tax Policy*
5	World Bank, AFD	LOGISTICS DPL-2	1	*Improving Port Efficiency and Governance*
			2	*Enabling a Competitive Business Environment for Logistics Service Providers*
			3	*Making Trade Processing More Efficient and Transparent*
6	World Bank	SOCIAL ASSISTANCE REFORM / PKH	1	*Disbursment Linked Indicators-Outcome Program PKH*

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,37 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.374.379.633 dan Rp24.229.125.827. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp25.374.379.633 merupakan utang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA, dan CFC berupa *promissory notes* yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Tidak terdapat tagihan pencairan utang pada per 31 Desember 2018.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal pelaporan. *Promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency dan Common Fund for Commodities*. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

Lembaga Keuangan Internasional	Mata Uang Asal		31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1,135,018	16.436.195.658	15.377.223.864
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223,450	3.700.282.430	3.614.000.418
Jumlah*			**25.374.379.633**	**24.229.125.827**

(kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD, Rp16.559,75/EUR)

* *Selisih Rp6.293 Tahun 2018 karena pembulatan kurs mata uang asing*

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA sebagai berikut.

No	Rincian	Tanggal	Nilai
1	2 *(two) promissory note*	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 *(one) promissory note*	21 Juni 1973	355.340.803,50
3	1 *(one) promissory note*	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 *(one) promissory note*	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 *(one) promissory note*	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 *(one) promissory note*	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah			**5.237.901.544,95**

Pembiayaan Utang

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah berhasil memenuhi target pembiayaan utang terutama untuk membiayai defisit dan pembiayaan investasi di tengah berbagai tantangan dan gejolak pasar keuangan baik domestik maupun global. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp372,02 triliun atau 95 persen target APBN. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang khususnya SBN neto menurun signifikan dimana tren pertumbuhan realisasi SBN neto menurun dari 36,9 persen tahun 2015 menjadi negatif 18,9 persen tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemandirian pembiayaan yang semakin baik dan APBN yang semakin sehat.

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah dalam mengelola utang. Hal ini tidak lepas dari ketidakpastian dan gejolak pasar global yang didominasi oleh beberapa isu utama diantaranya kenaikan suku bunga acuan *Federal Reserve*, perang dagang US dan China, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Di pasar keuangan domestik, kenaikan 7-Day *Repo Rate* sampai 175 bps selama tahun 2018 juga turut berdampak mengerek *yield* SBN domestik.

Dampak dari dinamika tersebut akhirnya mulai dirasakan pada lelang SBN domestik di kuartal II dimana pasar SBN mengalami tekanan yang ditandai dengan besarnya *outflow* investor asing, naiknya *yield* SBN 10 tahun hingga menyentuh level 8,78%, serta turunnya *incoming bids* pada saat lelang. Pada lelang bulan April dan Mei 2018, Pemerintah tidak memenangkan beberapa seri SBN yang dilelang karena *yield* yang diminta investor terlampau tinggi, bahkan pada lelang tanggal 8 Mei 2018, dari keseluruhan seri SBN yang dilelang tidak ada seri yang dimenangkan sama sekali.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari pasar keuangan tersebut, Pemerintah berhasil melakukan upaya antisipatif dengan mengalihkan sebagian penerbitan SBN menjadi pinjaman tunai (pinjaman program) dari lembaga multilateral dan bilateral. Fleksibilitas penggunaan instrumen utang seperti ini memungkinkan Pemerintah untuk membiayai APBN dengan biaya yang terkendali. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan tawaran *private placement* dari beberapa institusi keuangan untuk mengantisipasi tekanan pada lelang SBN domestik. Pada akhirnya, dengan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang baik serta ditunjang oleh kondisi fundamental perekonomian yang relatif kuat, Pemerintah mampu melewati kondisi tersebut dengan baik.

Pemerintah dapat memenuhi pembiayaan APBN sekaligus memberikan keyakinan kepada pelaku pasar keuangan domestik sehingga tingkat *yield* SUN seri *benchmark* 10 tahun kembali membaik dan menyentuh level 7,93% di akhir Desember 2018. Selain itu, seiring berkurangnya tekanan di pasar global, investor asing yang kembali masuk ke pasar domestik berimplikasi pada pulihnya *incoming bids*. Sepanjang tahun 2018, investor asing masih mencatat *net buy* sebesar Rp57,1 triliun, menurun dibanding *net buy* tahun 2017 yang sebesar Rp170,3 triliun. Di sisi fiskal keseluruhan, perbaikan pada sisi penerimaan negara sebagai akibat kenaikan harga komoditas dan perbaikan nilai tukar Rupiah juga berdampak pada realisasi defisit yang lebih rendah dari target semula. Sebagai akibatnya, pengadaan utang Pemerintah ikut berkurang dan Pemerintah membatalkan 4 kali lelang terakhir di tahun 2018. Hal ini menghantarkan Pemerintah mampu memenuhi target pembiayaan utang dengan optimal serta mampu menjaga *cost of borrowing* dalam level yang *manageable*.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam alternatif pilihan pembiayaan dan terus menyempurnakan tata kelola serta proses perencanaan pengelolaan utang, sehingga setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang

nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2018 adalah penerbitan *Green Global Sukuk* di bulan Februari 2018. *Green Global Sukuk* merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. *Green Global Sukuk* dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di 4 (empat) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sejak bulan April 2018, Pemerintah mulai memperkenalkan mekanisme *US SEC Shelf Registration* yang memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar.

Sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan domestik, Pemerintah juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk SBN ritel. Pemanfaatan kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dilakukan pemerintah melalui penerbitan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR-003 dan SBR-004 serta Sukuk Tabungan (ST) seri ST-002 yang dipasarkan secara *online*. Hasil yang diperoleh sangat menggembirakan dimana masing-masing SBR dan ST mengalami *oversubscribe*. Selain itu, sebagian besar investor ST-002 adalah kaum milenial yang sudah mulai paham mengenai produk keuangan dan investasi, serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pengelolaan utang di tahun 2018 senantiasa terjaga, hati-hati (*prudent*) dan akuntabel, terlihat pada rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,81 persen (*excl. prefunding)*. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan tertinggi untuk pembiayaan baik SBSN bermata uang Rupiah yang kenaikannya sebesar 13,45 persen dibandingkan tahun 2017 maupun SBSN bermata uang asing yang kenaikannya sebesar 24,84 persen dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan porsi SBSN terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek disebabkan fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, SBSN merupakan salah satu instrumen inovasi pembiayaan (*creative financing*) yang menjadi "*hot issue*" pembangunan infrastruktur tahun 2018.

Secara keseluruhan alokasi atau nilai pagu anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui SBSN tahun 2018 naik menjadi Rp 22,53 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun. Pembiayaan sebesar Rp22,53 triliun digunakan untuk membiayai 587 proyek di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Standardisasi Nasional.

Pada 2018, Pinjaman Luar Negeri (PLN) kegiatan/proyek masih didominasi oleh pinjaman bilateral seperti JICA, sementara pinjaman dari lembaga multilateral diantaranya World Bank, ADB dan IDB merupakan urutan kedua dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nilai Pinjaman Proyek Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, Pemerintah tetap melanjutkan PLN kegiatan/proyek mengingat peranannya dalam hal transfer of knowledge dari negara pemberi pinjaman serta dukungan teknis dari masing-masing lembaga pemberi pinjaman, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas Rp1.407,80 triliun

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2018, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program **(mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor**

046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling* (*TNP*).

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi **(saat ini oleh KPPN Khusus Investasi)** dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi **(saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi)** akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	65.636.224.322
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	8.024.000
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	59.340.155.736
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	14.273.800
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	49.215.047.437
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	12.595.200
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	19.866.017.165
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	4.279.644.422.002
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.374.911.063.212
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-

T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	20
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	4
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(4)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran *fee* konversi dan collecting *fee* proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1.179.020
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	5.000
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9001	RR RPKBUNP GAJI BRI SYARIAH (1032474183)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	6.931.500
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	3.526.000
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.180.300
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	810.638.511
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.465.430.999
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				**5.851.939.714.224**

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.279.644.422.002. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2018.

Tabel 17. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	31 Desember 2018 (*Audited*)		31 Desember 2017 (*Audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**147,311,078.56**	**1.995.770,49**	**1,187,266.53**	**15,952.11**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya [a)]	3,851,928,508.73	55.176.556,27	3,155,440,189.20	42.283.813,96
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
3. Penerimaan lain-lain [b)]	19,252,126.97	280.813,85	2,420,359.24	32.623,96
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening [c)]	4,523,238.05	65.435,72	3,184,791.72	42.270,15
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit [d)]	-	3.700.077,44	-	1.014.491,36
Total Penerimaan	***3,875,992,111.92***	***59.226.904,20***	***3,161,045,340.16***	***43,373,199.42***
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	834,667,784.93	12.283.733,40	118,633,924.26	1,604,167.92
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	5,953,901.49	84.399,21	8,648,243.23	115,432.20

c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 [e]				
) Pendapatan dari PNBP SDA Migas	346,634,340.24	5.040.756,57	625,955,470.35	8,479,672.87
) Pendapatan dari PNBP Migas lainnya	426,934.57	6.024,33	6,752,396.82	91,756.82
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	*1,187,682,961.23*	*17.414.913,51*	*759,990,034.66*	*10,291,029.81*
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. *Reimbursement* PPN ke Kontraktor	640,388,765.78	9.156.490,04	1,120,069,435.54	14,959,651.41
b. Pembayaran DMO *Fee* KKKS	964,633,949.37	13.855.279,36	663,389,208.76	8,879,949.24
c. Pembayaran *Underlifting* KKKS	930,226,604.81	13.322.469,03	439,793,314.71	5,890,206.21
d. Pembayaran *Fee* penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	28,519,031.41	381,974.64
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	*2,535,249,319.96*	*36.334.238,43*	*2,251,770,990.42*	*30,111,781.51*
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit [f]	-	3.122.777,07	-	948,299.58
5. Retur/Pengembalian karena salah rekening	4,547,526.72	67.080,24	3,160,503.05	42,270.15
Total Pengeluaran	***3,727,768,046.08***	***56.943.030,17***	***3,014,921,528.13***	***41,393,381.04***
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**148,224,065.84**	**2.283.874,03**	**146,123,812.03**	**1,979,818.38**
V. Saldo Akhir (I + IV) l) [i]	**295,535,144.40**	**4.279.644,52**	**147,311,078.56**	**1,995,770.49**

Penjelasan:

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
   - PNBP SDA Migas
     Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3,851,830,031.47 atau setara Rp55.175.187.704.494
   - PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas
     Meliputi setoran atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO *Fee* sebesar USD98,477.26 atau setara Rp1.368.563.817

b) Penerimaan Lain-Lain
   Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD19,252,126.97 atau setara Rp279.531.018.653 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening
   Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Underlifting* KKKS sebesar USD4,120,698.99, penyelesaian DMO *Fee* sebesar USD177,564.06, dan *Reimbursement* PPN sebesar Rp3.272.646.116.

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit
   Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp3.700.077.448.336 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN
   Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.
   - Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 setelah memperhitungkan/mencadangkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara sebesar USD346,634,340.24 atau setara Rp5.040.756.575.770.
   - Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO *Fee* yang disetorkan ke rekening migas Nomor 600.000411980 sebesar USD426,934.57 atau setara Rp6.024.331.562.

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit
Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.122.777.066.187 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

g) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening
Merupakan dana retur di Rekening Migas yang diproses kembali pemindahbukuannya, yang terdiri dari proses pemindahbukuan dana retur atas penyelesaian kewajiban Pemerintah sebesar USD4,523,238.05 dan pemindahbukuan atas keuntungan transaksi retur tahun 2017 sebesar USD24,288.67 yang diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN *Reimbursement*.

h) Saldo Akhir
Dari total saldo akhir sebesar USD295,535,144.40 atau setara dengan Rp4.279.644.426.056 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD.

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.374.911.063.212 dan Rp1.709.479.552.436. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
I.	**Saldo Awal**	**1.709.479.552.436**	**1.164.006.404.427**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.558.331.571.462	1.919.581.767.637
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	1	4
	Total Penerimaan	**2.558.331.571.463**	**1.919.581.767.641**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi [a)]	308.404.779.734	250.060.927.241
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [b)]	213.668.402.122	214.884.703.962
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum [c)]	118.179.994.471	-
	4. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN [d)]	2.252.646.884.360	909.162.988.429
	Total Pengeluaran	**2.892.900.060.687**	**1.374.108.619.632**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**(334.568.489.224)**	**545.473.148.009**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)** [d)]	**1.374.911.063.212**	**1.709.479.552.436**

Penjelasan:

a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2018 sebesar Rp308.404.779.734 dibayarkan dalam dua kali pembayaran yaitu:
   1) tahap pertama dibayarkan sebesar Rp300.097.524.500
   2) tahap kedua dibayarkan sebesar Rp8.307.255.234,00.

b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp213.668.402.122 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2017 dan 2018 dengan perincian sebagai berikut.
   1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2017 sebesar Rp114.023.035.560
   2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp99.645.366.562

c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar 118.179.994.471 dengan rincian sebagai berikut:
   1) penggantian bonus produksi tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp106.583.568.103
   2) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp11.596.426.368

d. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.252.646.884.360 terdiri dari:
   1) PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp195.696.723.757

2) PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp439.578.240.710
3) PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp481.924.393.346
4) PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp503.565.793.649
5) PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan *reimbursement* PPN dan setoran kekurangan SBP hasil audit BPKP pada PT PGE sebesar Rp631.881.732.898

e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2018 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	*Reimbursement* PPN	Bonus Produksi	Total
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	245.449.137.943	22.479.094.408	267.928.232.351
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	408.280.899.600	47.618.787.786	455.899.687.386
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	302.810.699.363	27.863.491.627	330.674.190.990
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	299.804.244.246	20.604.708.232	320.408.952.478
	Total	**1.256.344.981.152**	**118.566.082.053**	**1.374.911.063.205**

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, sebagai pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah:
a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
c. Membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
d. Mengidentifikasi BMN *idle*;
e. Meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:
a. Penyediaan data awal oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB);
b. Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, yang dilakukan oleh KPB;
c. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatan;
d. Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang dan KPB;
e. Koreksi data BMN pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;
f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;
g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;
h. Monitoring dan evaluasi;
i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Laporan tersebut jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga. Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 menunjukkan sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Kesimpulan BPK tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.
2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai.
3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan daftar biaya yang akurat.
4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP.
6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non Tanah.
7. Pengklasifikasian Gedung dan Bangunan sebagai dasar penilaian kembali tidak tertib.
8. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada seluruh K/L Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019, disampaikan kebijakan penyajian hasil penilaian kembali BMN antara lain sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan perhitungan koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi).
2. Hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan dalam LKKL dan LKPP setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.
3. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I Tahun 2018 masih menyajikan angka hasil penilaian kembali BMN.
4. Penjelasan atas perbedaan data BMN pada LKKL dan Laporan Barang Pengguna (LBP) perlu diungkapkan secara memadai pada CaLK.
5. Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN dilakukan oleh KL pada satuan kerja konsolidasi (Satkon).

Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi) dilakukan terhadap akun-akun yang terdampak atas transaksi Koreksi Revaluasi Aset dan transaksi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Barang Berlebih), serta transaksi lanjutan setelah dilakukan penilaian kembali antara lain seperti transaki penghapusan, hibah keluar, penghentian penggunaan, dan transfer keluar.

Berikut adalah rekapitulasi koreksi revaluasi dan koreksi aset tetap non revaluasi berdasarkan aplikasi E-Rekon dan database SIMAK BMN per 26 April 2019 :

BA	NAMA K/L	KOREKSI REVALUASI (BERDASARKAN E-REKON)	KOREKSI NONREVALUASI (BARANG BERLEBIH) BERDASARKAN E REKON	TOTAL (BERDASARKAN SIMAK BMN)
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	624.977.904.902		624.977.904.902
002	Dewan Perwakilan Rakyat	988.884.712.188	-	988.884.712.188
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	3.992.187.484.073	39.536.459.000	4.031.723.943.073
005	Mahkamah Agung	15.339.940.205.407	115.671.031.000	15.455.611.236.407
006	Kejaksaan	11.344.524.477.832	311.050.984.000	11.655.575.461.832
007	Sekretariat Negara	475.403.656.269.211	18.974.000	475.403.675.243.211
010	Kementerian Dalam Negeri	9.592.818.121.035	8.956.824.000	9.601.774.945.035
011	Kementerian Luar Negeri	32.103.275.718.100	395.288.841.000	32.498.564.559.100
012	Kementerian Pertahanan	1.207.383.029.737.830	10.061.171.620.333	1.217.444.201.358.160
013	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	35.142.780.978.034	1.180.221.799.000	36.323.002.777.034
015	Kementerian Keuangan RI	76.031.323.700.396	135.085.714.000	76.166.409.414.396
018	Kementerian Pertanian	71.316.993.820.167	156.516.527.000	71.473.510.347.167
019	Kementerian Perindustrian	6.348.149.716.075	12.029.655.000	6.360.179.371.075
020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	14.776.948.813.060	14.303.523.000	14.791.252.336.060
022	Kementerian Perhubungan	283.798.849.373.431	6.187.746.072.920	289.986.595.446.351
023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	15.926.393.311.599	399.816.920.000	16.326.210.231.599
024	Kementerian Kesehatan	51.837.890.480.972	154.506.756.552	51.992.397.237.524
025	Kementerian Agama	50.252.951.637.700	1.412.137.779.251	51.665.089.416.951
026	Kementerian Ketenagakerjaan	6.595.264.252.837	62.546.381.550	6.657.810.634.387
027	Kementerian Sosial Ri	15.260.552.679.442	30.781.091.000	15.291.333.770.442
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.373.484.768.463	388.432.444.050	9.761.917.212.513
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	12.827.827.266.707	597.572.285.243	13.425.399.551.950
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.101.452.029.683.090	12.039.363.185.684	1.113.491.392.868.770
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan	3.925.194.930		3.925.194.930
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.113.676.653		10.113.676.653
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	4.015.748.497		4.015.748.497
040	Kementerian Pariwisata	5.667.347.469.776		5.667.347.469.776
041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1.160.300.520.883		1.160.300.520.883
042	Kementerian Negara Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	286.162.345.658.291	1.813.813.486.476	287.976.159.144.767
044	Kementerian Negara Koperasi Dan UKM	2.148.147.757.953	324.554.077.000	2.472.701.834.953
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	17.768.486.506		17.768.486.506
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	29.163.448.394		29.163.448.394
050	Badan Intelijen Negara	3.118.189.211.029	38.271.454.000	3.156.460.665.029
051	Lembaga Sandi Negara	427.967.461.006	721.492.000	428.688.953.006
054	Badan Pusat Statistik	2.311.634.973.853	21.402.649.000	2.333.037.622.853
055	Kementerian Negara Ppn/Bappenas	1.219.620.544.166	490.209.375.000	1.709.829.919.166
056	Badan Pertanahan Nasional	7.339.110.725.495	36.140.672.000	7.375.251.397.495
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.617.639.077.017	88.757.000	1.617.727.834.017
059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	4.228.286.153.414	34.582.270.000	4.262.868.423.414
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	144.170.369.890.587	29.751.261.186.529	173.921.631.077.116
063	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	941.731.014.673	5.263.838.000	946.994.852.673
064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.413.481.362.919		1.413.481.362.919
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.740.850.077.799		1.740.850.077.799
066	Badan Narkotika Nasional	(18.024.099.815)	18.067.973.000	43.873.185
067	Kementerian Desa. Pembangunan Daerah	750.566.985.350	2.351.877.000	752.918.862.350

	Tertinggal. Dan Transmigrasi			
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	1.932.920.309.775	18.815.888.000	1.951.736.197.775
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.372.746.739		3.372.746.739
075	Badan Meteorologi. Klimatologi. Dan Geofisika	2.765.048.060.564	11.636.953.000	2.776.685.013.564
076	Komisi Pemilihan Umum	536.840.289.938	48.663.554.000	585.503.843.938
077	Mahkamah Konstitusi RI	330.026.072.893	484.187.000	330.510.259.893
078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	324.855.497.524		324.855.497.524
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	22.883.990.921.784	669.411.511.000	23.553.402.432.784
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12.275.673.877.482	225.488.966.000	12.501.162.843.482
081	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	3.950.829.934.184	973.017.000	3.951.802.951.184
082	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	1.633.560.908.259	1.075.204.000	1.634.636.112.259
083	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional	164.334.306.637		164.334.306.637
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	104.358.579.244		104.358.579.244
086	Lembaga Administrasi Negara	3.601.088.568.028	2.332.428.000	3.603.420.996.028
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	716.819.995.387	1.462.439.000	718.282.434.387
088	Badan Kepegawaian Negara	2.331.606.200.557	9.188.397.000	2.340.794.597.557
089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	3.317.786.902.270	7.515.060.000	3.325.301.962.270
090	Kementerian Perdagangan	1.710.226.791.125	1.198.651.000	1.711.425.442.125
092	Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga	556.968.958.083	187.693.000	557.156.651.083
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.282.403.975.291		1.282.403.975.291
095	Dewan Perwakilan Daerah	85.889.933.660	1.764.353.000	87.654.286.660
100	Komisi Yudisial	211.749.326.321		211.749.326.321
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	56.400.219.741		56.400.219.741
104	BNP2TKI	211.022.642.495	584.468.000	211.607.110.495
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bpls)	216.465.276.929		216.465.276.929
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	225.955.997.823		225.955.997.823
107	Badan SAR	703.191.696.257	33.542.372.951	736.734.069.208
109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	146.848.939.999	591.387.000	147.440.326.999
110	Ombudsman Republik Indonesia	18.532.116.000		18.532.116.000
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	39.570.802.091	890.545.000	40.461.347.091
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	27.053.532.234.208	24.231.162.000	27.077.763.396.208
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	(47.599.972.648)		(47.599.972.648)
115	Badan Pengawas Pemilu RI	2.346.592.238		2.346.592.238
116	Lembaga Penyiaran Publik RRI	10.069.126.721.436	13.413.898.000	10.082.540.619.436
117	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	9.106.320.643.054	176.395.836.000	9.282.716.479.054
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	949.345.669.243	516.417.149.000	1.465.762.818.243
119	Badan Keamanan Laut	164.843.029	299.475.000	464.318.029
999	Bendahara Umum Negara	48.980.689.496		48.980.689.496
	Total	**4.081.699.843.719.060**	**68.006.048.568.539**	**4.149.705.892.287.600**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi yang berasal dari BMN Berlebih atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tersebut terdiri terdiri dari 30.598 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp68.006.048.568.539 yang terbagi atas koreksi BMN berlebih tahun 2017 sebanyak 13.559 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp45.915.121.664.961 dan atas koreksi BMN berlebih tahun 2018 sebanyak 17.039 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp22.090.926.903.578.

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN akibat pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2018 pada 82 K/L dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5. Pembelian Saham PT Freeport Indonesia Oleh PT Indonesia Asahan Alumunium Indonesia (Persero)

Berdasarkan Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) tanggal 27 Agustus 2017, antara lain disepakati bahwa divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh Tim dari Pemerintah dan PTFI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud serta memperhatikan perkembangan pembahasan bersama antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, maka Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum (Persero)) untuk melakukan pengambilalihan saham divestasi PTFI sampai saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51%. Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) diberikan wewenang untuk melakukan pembahasan, perundingan dengan pihak-pihak terkait, mempersiapkan dan membuat surat, perjanjian, dokumen, menandatangani perjanjian-perjanjian, termasuk menandatangani Perjanjian Induk tentang Pengambilalihan Saham Divestasi PTFI dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PTFI dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) menunjuk konsultan untuk melakukan *due diligence* antara lain dari sisi hukum, *financial model*, teknis, serta melakukan perundingan dengan Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Pada saat dilakukan *due diligence*, didapatkan informasi bahwa PTFI tidak memiliki 100% *Economic Interest* dari Tambang Grasberg tetapi sebesar 60% sampai dengan tahun 2022 (yang tertuang lebih rinci pada perjanjian *Participation Agreement*) dengan sisa Economic Interest dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia. Untuk menjalankan kesepakatan terkait divestasi saham PTFI, PT Inalum (Persero) menerbitkan *global bond* yang seluruhnya bernilai USD4 juta. Pada tanggal 21 Desember 2018, transaksi tersebut menghasilkan struktur kepemilikan yang baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham *(Shareholder Agreement)* antara PTFI, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (PT IPMM), Freeport McMoran Inc, dan PT Inalum (Persero) , yang disebutkan bahwa persentase kepemilikan awal (setelah divestasi) dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut, Freeport McMoran Inc sebesar 48,764%; PT Inalum (Persero) sebesar 26,236%, dan PT IPMM sebesar 25%. Struktur kepemilikan baru ini menjadikan kepemilikan nasional Indonesia menjadi sebesar 51,236% yang dimiliki melalui kepemilikan langsung PT Inalum (Persero) sebesar 26,236% dan kepemilikan tidak langsung PT Inalum (Persero) melalui PT IPMM sebesar 25%.

PT IPMM merupakan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Indocopper Investama, pemilik 9,36% saham PTFI, yang pada pelaksanaan divestasi ini dibeli 100% kepemilikannya oleh PT Inalum (Persero) sebagai *special purpose vehicle* (SPV) untuk mengakomodasi rencana kepemilikan Pemerintah Daerah secara tidak langsung atas 10% saham PTFI. Skema yang direncanakan terkait kepemilikan tidak langsung Pemerintah Daerah atas PTFI ini dijalankan sesuai dengan Perjanjian Induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan akan dieksekusi oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga kepemilikan nasional Indonesia akan diwakili oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN sebesar 41% dan oleh Pemerintah Daerah sebesar 10%. Namun, sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah belum masuk pada struktur kepemilikan PT IPMM, sehingga PT Inalum (Persero) masih memiliki PT IPMM secara penuh. Kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan PT Inalum (Persero) terhadap PTFI per 31 Desember 2018, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236%.

Atas pembelian tersebut, dalam Laporan Keuangan PT Inalum (Persero) Tahun 2018 *(audited),* PT Inalum (Persero) mencatat Investasi pada PTFI sebesar Rp65.596.356 juta rupiah. Terkait dengan pengendalian yang meliputi kekuasaan investor atas *investee*, eksposur, atau hak-haknya, terhadap imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut, Grup mempertimbangkan pengaturan yang ada di dalam *Shareholder Agreement* antara PT Inalum.

Berdasarkan *Shareholder Agreement*, PT Inalum (Persero) dan PT IPMM ("Grup Inalum") mempunyai hak suara yang penting dalam tata kelola perusahaan PTFI melalui keterwakilan Grup Inalum di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi, Komite Operasional dan Komite Keuangan. Grup Inalum memiliki jumlah perwakilan yang sama dengan Freeport McMoran Inc di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Komite Keuangan. Direksi pada periode pertama ditunjuk dan disetujui bersama-sama oleh Pemegang Saham PTFI. Sementara Freeport McMoran Inc memiliki perwakilan yang lebih banyak pada Komite Operasi, suatu komite yang mengatur aktivitas yang berhubungan dengan operasi pertambangan PTFI. Sistem pengawasan dan keseimbangan diberlakukan untuk

memastikan bahwa Komite Operasi tersebut bertanggung jawab terhadap Direksi dan pemegang saham.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 65 menyebutkan bahwa investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal sebagai berikut.

1. kekuasaan atas *investee*;
2. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
3. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Berdasarkan *Shareholder Agreement* dan perjanjian-perjanjian lain antara Inalum (selaku investor) dengan Freeport McMoran/FCX (selaku *investee*) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI walaupun kepemilikan saham Inalum secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236% saham.
2. Inalum sampai dengan tahun 2022 mendapatkan imbal hasil berupa dividen berdasarkan porsi kepemilikan saham yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Indonesia dan PT Indocopper Investama sebesar 18,72% ditambah dengan *economic interest* yang sebelumnya dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) yaitu sebesar 40% dari produksi yang melampaui *metal strip*.
3. Inalum tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan *investee*.

Pengaturan dalam ERA ini dilakukan akibat adanya *Participation Agreement* (PA) yang dibuat pada tahun 1996 antara PTFI dan PTRTI. Sebagian kewajiban PA ini direplikasi guna mendapatkan hasil optimal pasca Periode Awal, yaitu sebesar 51% atas *economic interest* sesuai dengan 51% kepemilikan *equity interest* PTFI. Tanpa dilakukannya replikasi selama periode awal, kepemilikan PT Inalum akan hanya mendapatkan 30,6% *economic interest* PTFI, bukan 51% sesuai dengan *equity interest*, karena keberadaan PA antara PTFI dan PTRTI akan terus berlaku.

PT Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI dikarenakan PT Inalum masih dalam proses untuk memahami *business process* PTFI, sementara operasional PTFI tetap harus berjalan dan selama proses *transfer of knowledge* dari Freeport McMoran, pengambilan keputusan tetap melibatkan Freeport McMoran.

Pemerintah menugaskan PT Inalum (Persero) untuk melakukan pengambilalihan saham PTFI dengan pertimbangan antara lain:

1. Tujuan dibentuknya holding BUMN pertambangan salah satunya dalam rangka menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, oleh sebab itu, pengambilalihan saham PTFI yang menguasai cadangan dan sumber daya mineral lebih tepat apabila dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding BUMN sektor pertambangan.
2. BUMN Holding pertambangan memiliki kemampuan finasial yang memadai untuk mengakuisisi saham PTFI, khususnya PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan yang sebelum pengambilalihan saham PTFI tidak memiliki hutang sehingga masih memiliki ruang untuk *leverage* yang cukup besar.
3. Dengan penugasan PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan untuk mengambil alih saham PTFI maka;
   a. Pemerintah tidak menggunakan dana APBN dalam rangka proses pengambilalihan saham divestasi PTFI, sehingga dana APBN dapat dialokasikan kepada program yang lebih prioritas seperti pembangunan infrastruktur;
   b. Pengambilalihan saham divestasi PTFI dilakukan menggunakan aksi korporasi.

6. Aset KKKS

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Aset Tanah

Saldo Awal 2018	Luas	Nilai (Rp)
	3.918.516.749	**1.015.852.969.355**
Mutasi Tambah :		
Aset belum IP reklasifikasi dari neraca	361.502	9.665.173.937
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	11.475.015	15.217.538.603
Mutasi Kurang :		

Koreksi Kurang Pencatatan	45.913.598	70.663.313.793
Reklas ke neraca atas tanah yang sudah di IP	4.502.506	82.424.838.885
Saldo Akhir 31 Desember 2018	**3.879.937.162**	**887.647.529.217**

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2017 (*Audited*).
2) Koreksi tambah reklasifikasi dari neraca ke CaLK akibat kesalahan pencatatan aset tanah pada 2 KKKS (PT Medco E&P Indonesia Kampar dan Bunga Mas International Company) dengan perolehan dibawah Tahun 2010 seluas 361.502 m2 dengan nilai sebesar Rp9.665.173.937 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
3) Mutasi tambah sebesar Rp15.217.538.603,00 berasal dari aset tanah pada 7 KKKS (JOB Pertamina Tomori Sulawesi, Seleraya Belida, Seleraya Energi Blora, ConocoPhillips Ltd., ConocoPhillips South Jambi Ltd., Kangean Energy Indonesia Limited, Pertamina Hulu Mahakam) dengan perolehan tahun sampai dengan 2010 seluas 415.852 m2 yang baru dilaporkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
4) Koreksi kurang seluas 45.913.598 m2 dengan nilai sebesar Rp70.663.313.793 terdiri dari :
   - aset pinjam pakai dengan PTPN pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako tanah seluas 21.000m2 senilai Rp1.140.529.749,00
   - koreksi pembenahan pencatatan aset tanah oleh SKK Migas pada KKKS ConocoPhillips South Jambi seluas 5.000m2 senilai Rp29.061.999,50.
   - Kawasan hutan pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam seluas 45.887.598m2 senilai Rp69.493.722.044.
5) Reklasifikasi ke neraca aset tanah pada 8 KKKS (PHE NSO. Petrogas LTD. PT Medco E&P Malaka. Petronas Carigali Ltd. PT Pandawa Prima Lestari. PT Rizki Bukit Barisan E&P. Stockbridge Budong-Budong B.V. JOB Pertamina Golden Spike IL) dengan luas 4.502.506 m2 senilai Rp82.424.838.885 yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2017 dan 2018.
6) Terdapat BMN yang berasal dari 7 (tujuh) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahterimakan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut.
   - JOB Pertamina Jadestone Energy LTD
   - PHE NSO
   - PT Medco E&P Kampar
   - Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LLC.
   - South Madura Exploration Company, PTE. LTD
   - Petroselat, LTD
   - Japex Buton LTD

b) Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2018 dengan total nilai USD152,279,075.85. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Penambahan	Pengurangan	Nilai Sumur 2018 (USD)
18 KKKS	**146,535,167.24**	**5,971,202.61**	**227,294.00**	**152,279,075.85**

Mutasi Tambah aset sebesar USD5,971,202.61 dan mutasi kurang USD227,294.04 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

2) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2018
Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada semester II tahun 2018 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,108,202,753.49	**464,523,017.95**	**789,448,488.04**	**5,783,277,283.40**

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD464,523,017.95 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
b) Mutasi Kurang aset sebesar USD789,448,488.04 berasal dari:
   i. Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD672,329,454.83.
   ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD117,119,033.21.

3) Aset *Subsequent Expenditure*

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
2,612,476,992.16	203,144,324.61	1,191,570,321.10	1,624,050,995.67

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD203,144,324.61 berasal dari penambahan SE, selisih pembulatan, transfer in, dan koreksi pembenahan, KKKS oleh SKK Migas.
b) Mutasi Kurang aset sebesar USD1,191,570,321.10 berasal dari:
   i. Penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD1,175,584,022.70.
   ii. Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD15,986,298.40.
c) *Subsequence expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
95,238,539.77	1.340.090,32	4.139.397,66	92.439.232,43

Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya:
1) Mutasi tambah sebesar USD1,340,090.32 berasal dari pembenahan aset sebesar USD1,340,090.32.
2) Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD4,139,397.66.

5) Aset dalam proses penghapusan
Terdapat aset yang sudah laku terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
222,789,033.69	**31,668,925.61**	**135,404,886.51**	**119,053,072.79**

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD31,668,925.61 merupakan aset yang sudah laku lelang namun belum terbit SK Penghapusan dan/atau Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD135,404,886.51 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca

Selama periode tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 16 KKKS yang semula tercatat pada neraca kemudian direklasifikasi ke daftar aset BMN KKKS terminasi dikarenakan masa kontrak telah berakhir sebagaimana berikut.

	Jumlah KKKS	Nilai Perolehan *Audited* 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
31 Des 2017 (*Audited*)	123 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65
Penambahan	16 KKKS	0	0	0
31 Des 2018	139 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65

7) Aset Harta Benda Inventaris

	Nilai Perolehan *Audited* 2017 (USD)	**Mutasi Tambah/Kurang (USD)**	**Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)**
KKKS Aktif	4,808,522.72	(9,666.84)	4,798,855.88
KKKS Tidak Aktif (Terminasi)	27,633.50	(8,947.98)	18,685.52
Jumlah	4,836,156.22	(18,614.81)	4,817,541.4

a) Terdapat aset perolehan dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian pada KKKS aktif senilai USD54,884.06.

b) Terdapat Koreksi Tambah pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD92.23.

c) Terdapat penghapusan asset pada KKKS Aktif senilai USD62,274.87.

d) Terdapat Koreksi Kurang pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD2,368.26.

e) Terdapat reklasifikasi asset yang semula tercatat pada neraca KKKS Tidak Aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD 921,96 yang telah laku dijual lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-886/31/2017 16 Agustus 2017.

f) Terdapat penghapusan aset pada KKKS tidak aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD9,869.94 berdasarkan SK Penghapusan No. 1685 K/95/SJN/2018 tgl 20 Maret 2018

8) Perbedaan Line Item HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya.

DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS

Perbedaan jumlah unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN Tahun berikutnya:

a. Pembenahan pencatatan aset Contract of Work Aset CoW tercatat pada SKK Migas sebanyak 22.516 unit. Atas aset CoW dimaksud, sebanyak 10.345 telah tercatat pada neraca Aset lain-lain KKKS sedangkan sisanya sebanyak 12.171 unit selanjutnya diverifikasi lebih lanjut untuk dilakukan pencatatan pada Neraca Aset lain-lain KKKS.

b. Selisih Aset KKKS sebanyak 1.929 Unit

Terdapat selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384,00 antara catatan UAKPA BUN TK BMN KKKS dan SKK Migas/KKKS. Selanjutnya telah dilakukan penelusuran terhadap perbedaan pencatatan unit aset dimaksud. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perbedaan unit aset dikarenakan adanya pembenahan pencatatan oleh KKKS/SKK Migas terhadap item-item aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN.

Selanjutnya, DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran di lapangan lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS. Adapun rincian atas aset KKKS yang dikeluarkan dari Neraca sebagai berikut.

No	NAMA KKKS	KODE KKKS	PPBMN/DJKN			SKK Migas		Selisih Aset	
			Jumlah Unit	Nilai Aset (USD)	Nilai Aset (Rp)	Jumlah Aset	Nilai Aset (USD)	Unit	Rupiah
1	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	A13	2.256	1,903,362,339	17.347.493.179.851	2.242	1,903,362,339	14	399.287.229.999
2	Medco E&P	A15	5.919	4,586,881,303	38.399.400.460.309	5.780	4,586,881,303	139	1.846.223.420.421
3	MOBIL CEPU LTD.	A39	5.358	3,337,719,618	41.687.248.541.435	5.356	3,337,719,618	2	65.058.050.820
4	ENI MUARA BAKAU B.V.	A21	27	2,966,965,734	39.528.823.588.457	27	2,966,965,734	-	-
5	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	A52	138.576	6,881,531,508	42.613.180.604.764	138.553	6,881,531,508	23	752.039.033
6	PT PHE WMO	A63	1.485	1,364,007,885	14.675.139.737.394	1.472	1,364,007,885	13	1.502.441.252.314
7	BP TANGGUH LNG	A82	2.257	2,908,869,101	26.656.154.589.644	2.261	2,908,869,101	(4)	4.841.650.674.580
8	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	A84	9.511	3,689,833,247	22.085.076.584.647	9.510	3,689,833,247	1	2.216.731.050
9	Pertamina Hulu Mahakam (PHM)	A85	12.223	9,136,038,527	58.324.696.849.093	10.735	9,136,038,527	1.488	13.014.416.365.457
10	Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS)	A86	10.831	1,713,740,022	11.661.317.800.179	10.578	1,713,740,022	253	29.024.639.709
Total			**188.443**	**38,488,949,285**	**312,978,531,935,773**	**186.514**	**38,488,949,285**	**1.929**	**21.701.070.403.384**

7. Penyajian Nilai *Net Equity* pada LK Tahun 2018 *Audited* PT PLN dan PT Pertamina

Penyajian nilai investasi permanen dan Pendapatan-LO dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan didasarkan atas bagian pemerintah pada nilai *net equity* dan Laba Bagian Pemerintah yang disajikan oleh laporan keuangan masing-masing perusahaan/lembaga. LKPP Tahun 2018 *Audited* menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp903,69 triliun dan Rp380,73 triliun. Nilai tersebut berbeda dengan nilai *Net Equity* pada LK Tahun 2018 *Audited* PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp926,87 triliun dan Rp399,65 triliun. Lebih lanjut, kenaikan Investasi Permanen PMN LKPP Tahun 2018 *Audited* tersebut diantaranya merupakan dampak laba bagian Pemerintah Tahun 2018 yang disajikan sebagai Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp(6,62) triliun dan Rp27,19 triliun. Nilai pendapatan tersebut berbeda dengan laba bagian Pemerintah pada LK Tahun 2018 *Audited* PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp11,56 triliun dan Rp35,99 triliun. Perbedaan-perbedaan tersebut karena PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mengakui Piutang dan Pendapatan kompensasi yang belum ditetapkan Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero) dan selisih HJE BBM Non Subsidi pada PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp23,17 triliun dan Rp9,46 triliun yang merupakan nilai wajar piutang Pemerintah sebesar Rp15,53 triliun. Pemerintah belum mengakui utang atas selisih Tarif Tenaga

Listrik dan HJE tersebut. LK Tahun 2018 PT PLN (Persero) telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 tanggal 18 Mei 2019. Sedangkan LK Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) diperiksa oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pengakuan piutang/pendapatan selisih HJE sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 01241/2/1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

8. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2018

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Pokok kegiatan percepatan sertipikasi dilaksanakan dengan mengkoordinasikan K/L untuk melakukan:

a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2018.
b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per 31 Desember 2018 sebanyak 92.206 bidang yang terdiri dari 44.055 bidang tanah belum bersertipikat dan 48.151 bidang tanah sudah bersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum bersertipikat per 31 Desember 2018 sebesar 47,78% dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP.
2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2018 sebanyak 4.915 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan data tanah sebanyak 6.787 bidang dan menyampaikannya kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN Tahun 2019.

9. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.065 meter linier.

- Poster sebanyak 336 lembar
- Arsip Kartografi/Peta sebanyak 128.594 lembar.
- Arsip foto sebanyak 3.460.868 lembar
- Arsip Film sebanyak 59.002 reel.
- Arsip Mikrofilm sebanyak 14.463 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
- Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.
- Arsip Rekaman Suara sebanyak 45.445 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
- Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.152 keping.
- Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
- Arsip *Flashdisk* sebanyak 1 keping.
- Arsip elektronik sebanyak 350 *terrabyte*.

f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.

g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
   - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
   - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.

j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.

k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.

l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
   - tugu peringatan sebanyak 14 unit;
   - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
   - monografi sebanyak 2 buah; dan
   - Laporan sebanyak 7 buah.

10. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme

pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 77 Unit Badan Lainnya, dimana selain 72 Unit Badan Lainnya pada Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*, terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Otoritas Nasional Senjata Kimia
3. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Selain 77 UBL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018, terdapat SKK MIGAS dan OJK yang merupakan UBL Satker sekaligus UBL Bukan Satker.

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini terdapat 79 UBL, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.
3. UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker sebanyak 2 UBL.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

   Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3. Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)
   Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

   Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH.

   Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
6. Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

   Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
8. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

   Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.
9. Otorita Asahan

   Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2019
10. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

    Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana
11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

    Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker diatas disajikan dalam **Lampiran 27.**

11. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan

Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan

d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;

b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;

c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;

d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau

e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2018

1. Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2018 sebanyak 62 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 7 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.
2. Sampai dengan akhir Tahun 2018, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, sebanyak 470 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 545 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 55 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 490 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.
3. Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 21 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.
4. ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2018.

12. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset propeti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*)	**626**	**400.289.684.384**

**) Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp1*

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.289.684.383 menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014. Sampai dengan tahun 2018 belum dilaksanakan kegiatan penelusuran atas Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri, sehingga saldo Aset Properti eks BPPN yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 253 aset senilai Rp75.706.848.310.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**358**	**122.069.231.521**
Hasil Penelusuran TA 2016:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-

▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	79	39.050.123.023
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2018)	**253**	**75.706.848.310**

Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

13. **Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut :

Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 836/KMK.08/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah Tahun Anggaran 2018, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan : percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1)), percepatan Penyediaan Air Minum, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Sedangkan terkait anggaran kewajiban penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Diretur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor KEP-59/PR/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, selain itu Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2018 diperhitungkan atas jumlah eksposur penjaminan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT Hutama Karya (Persero)) yang dijamin kepada kreditur/badan usaha, serta probabilitas gagal bayar (*probability of default*) dari eksposur penjaminan tersebut.

Sampai dengan semester II tahun 2018 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut.

a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan nilai penjaminan sebesar IDR40,89 triliun dan USD3,96 miliar. PT. PLN (Persero) telah melunasi beberapa pinjaman pada PLTU Indramayu (porsi IDR), PLTU Rembang (porsi IDR), PLTU Labuan (porsi IDR dan ekuivalen USD), PLTU Suralaya (porsi IDR), PLTU Paiton (porsi IDR), PLTU Pelabuhan Ratu (porsi IDR), PLTU Lampung dan Sumut (porsi IDR) dan pinjaman untuk 7 PLTU luar Jawa (Porsi IDR);
b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Palopo, dan Kabupaten

Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar IDR328,16 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum, dan PDAM Kabupaten Lombok Timur telah melunasi keseluruhan pinjaman kredit yang telah ditarik;

c. Penerbitan 7 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Eleveted dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun, Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan dengan nilai penjaminan sebesar IDR12,56 triliun, dan Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan nilai penjaminan sebesar IDR21,1 triliun;

d. Penerbitan 9 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 6 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar, ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar senilai IDR15,59 triliun, ruas Pekanbaru-Dumai IDR12,26 triliun dan IDR4,5 triliun serta ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung senilai IDR14,37 triliun sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi IV senilai IDR3,53 triliun.

e. Penerbitan 5 Perjanjian Penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,28 miliar dengan rincian sebagai berikut.

   i. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktoring dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan*.

   ii. Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema *Program for Result* (PforR).

   iii. Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai *Power Grid Enhancement Project* (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 Juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema *Intallment Sale Agreement.*

   iv. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank keada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan.*

   v. Pinjaman Langsung dari Asian Investment Infrastructure Bank kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC dalam mendanai proyek pembangunan Fasilitas Infrastruktur Kawasan Ekonomi Eksklusif di Mandalika, Lombok senilai USD248.6 juta tau setara dengan Rp3.3 triliun

f. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas pinjaman kredit sebesar Rp19,25 triliun dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi.

g. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dengan nilai jaminan sebesar Rp4,35 triliun. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan penyediaan prasarana dan/atau sarana untuk

pelayanan publik. Dengan adanya penugasan dimaksud, diharapkan adanya kemudahan akses pembiayaan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mendukung penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero). Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana talangan dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga PT SMI (Persero) dapat melaksanakan fungsi *leveraging* aset. Mekanisme *intercept* akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

h. Penerbitan 12 Surat Jaminan Kelayakan Usaha atas skema jual beli tenaga listrik 12 pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) kepada PT PLN (Persero) dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energy terbarukan, barubara dan gas (Proyek 10.000 MW tahap II) sebesar USD11,9 miliar. 1 surat jaminan pada PLTU Kaltim senilai USD314,5 juta telah berakhir. Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam membayar kewajibannya sesuai Perjanjian Jual Beli Listrik dengan IPP antara lain menggunakan skema subsidi listrik.

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Jumlah Dokumen Penjaminan	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
			Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	11	USD 3,96	IDR 98.218,13	USD 1,66	IDR 31.024,97
		25	IDR 40.891,93		IDR 6.970,00	
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	11	IDR 328,16	IDR 328,16	IDR 128,83	IDR 128,83
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	5	USD 2,28	IDR 32.993,51	USD 1,16	IDR 16.737,57
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	9	IDR 54.943,75	IDR 54.943,75	IDR 14.158,05	IDR 14.158,05
5.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	12	USD 11,91	IDR 172.417,56	USD 5,11	IDR 74.005,07
6.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	1	USD 3,20	IDR 114.875,34	USD 2,39	IDR 37.416,79
		6	IDR 68.536,14		IDR 2.821,06	
7.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	1	IDR 4.355,79	IDR 4.355,79	IDR 2.423,67	IDR 2.423,67
8.	Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	1	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 374,36	IDR 374,36
Total		**82**	**USD 20,37**	**IDR 497.382,24**	**USD 10,32**	**IDR 176.269,30**
			IDR 175.227,34		**IDR 26.875,97**	
Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2018 (IDR/USD1)				14.481		14.481

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN TA 2018 diperhitungkan sebagai berikut:

Program Penjaminan	Exposure	x Probability Default	x (100% - Recovery) Rate	= Expected Loss
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp37,65 triliun	x 0,79%	x (100% - 0%)	= Rp297,42 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp127,53	x 0,84%	x (100% - 0%)	= Rp1,07

	miliar			miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)	Rp32,18 triliun	x 1,21%	x (100% - 0%)	= Rp389,46 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp18,49 triliun	x 1,54%	x (100% - 0%)	= Rp284,75 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN	Rp7,43 triliun	x 2%	x (100% - 0%)	= Rp148,61 miliar
Total				Rp1.121,31 miliar

Sebagai tambahan informasi bahwa pemberian surat jaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2018 tidak menjadi bagian dari alokasi anggaran penjaminan dalam APBN TA 2018, karena proyek yang mendapat jaminan baru tersebut belum menimbulkan beban eksposure risiko bagi Pemerintah.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
b. Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).
d. Berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir semester II tahun 2018, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (PT PLN, PDAM, PT Hutama Karya maupun PJPK) yang mendapat jaminan Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha.

a. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebesar Rp297.423.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

b. Penjaminan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum sebesar Rp1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar 70% pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan penyediaan air minum, dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Atas pengeluaran dimaksud, sebesar 40% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemotongan DAU/DBH tidak dapat dilaksanakan. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PDAM dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

c. Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) sebesar Rp389.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PJPK kepada badan usaha. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat Badan Usaha sampai dengan akhir semester II tahun 2018 masih dalam tahap konstruksi dan belum ada risiko penjaminan yang timbul, maka sampai dengan akhir semester II tahun 2018, belum ada kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.

d. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebesar Rp284.748.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT Hutama Karya (Persero) kepada kreditur/pemegang obligasi yang membiayai program percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dalam hal PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama

karya (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT Hutama Karya (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur/pemegang obligasi.

e. Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp148.613.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program penyediaan infrastruktur kelistrikan, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 dan Pasal 9 PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan dating. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2018 telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.121,31 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar 4.245,49 miliar.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Dalam upaya mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat), Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/keberlangsungan program DJS Kesehatan. Laporan Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2018 *(Audited)* menyajikan nilai defisit aset (aset netto negatif) sebesar Rp34.712.814.128.213 diantaranya menyajikan Utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp10.625.232.952.215 dan Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses sebesar Rp4.418.919.083.946. Utang Jaminan Kesehatan timbul dari klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dan telah ditetapkan nilai gantinya namun belum dilakukan pembayaran. Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses berupa klaim dari fasilitas kesehatan yang telah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan namun masih dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

14. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke

Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Bank & Deposito *Abandonment & Site Restoration*	1,256,703,350.41	1,110,716,611.47
Jasa Giro & Bunga Deposito *Abandonment & Site Restoration*	(36,403,800.17)	(26,189,996.51)
Saldo Bank & Deposito *Abandonment & Site Restoration* – Neto	1,220,299,550.24	1,084,526,614.96
Tagihan *Abandonment & Site Restoration* Yang Belum Dibayarkan	25,314,096.77	14,995,680.95
Kewajiban *Abandonment & Site Restoration*	1,245,613,647.01	1,099,522,295.91

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD136,277,819.28. Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2018 sebesar USD1,256,703,350.41. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,220,299,550.24 dan akumulasi penghasilan jasa giro dan bunga deposito (setelah pajak) sebesar USD36,403,800.17. Per 31 Desember 2018 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD25,314,096.77. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per 31 Desember 2018 sebesar USD1,245,613,647.01.

15. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

a) Pemanfaatan BMN oleh Pertamina C.Q PT Pertamina EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *"fixed payment and fixed term"*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan *(operating and maintenance)* menjadi unsur *cost recovery.*

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

b) Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
2) membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut.

1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-S0.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;

   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

   a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
   b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15% (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57% jika dihitung dari nilai aset.
   c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
   d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.

2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

   Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

   a) Telah ditandatangani perjanjia sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
   b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-S0 tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.
   c) Piutang sewa BMN eks Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina cq PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919 masih berbeda dengan pencatatan dari PT Pertamina. Pemerintah akan melakukan koreksi atas nilai piutang tersebut setelah proses pemetaan aset selesai dan dilakukan addendum perjanjian sewa.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKTK tahun 2018 terkait BMN eks Pertamina, yaitu Atas Aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan Nilainya, akan dilakukan upaya penyelesaian atas BMN tersebut dengan penelusuran dan menetapkan status sesuai Keputusan Menteri Kuangan nomor 324/KMK.06/2017 j.o 471/KMK.06/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun hasil IP atas seluruh aset Rp16.242.092.564.001,00 telah selesai dilakukan oleh 13 Kanwil DJKN, dgn hasil sebagai berikut.

- Hasil IP (BA-01) : Rp13.692.173.347.220

- Aset Tidak Ditemukan, Proses FUPP, dll (BA-02, BA-03 & BA-04) : Rp2.549.919.216.781 sebanyak 15.747 unit aset
- Nilai Wajar IP DJKN per Desember 2012 : Rp12.824.018.245.034 sebanyak 26.702 unit aset

c) Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina Oleh LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Aset	
Piutang PNBP	4.282.164.770
Liabilitas	
Pendapatan Diterima Di Muka	(164.088.839.505)

Adapun Transfer keluar pada Laporan Keuangan 2017 yang diakibatkan adanya transaksi penyerahkelolaan berdasarkan kebijakan Direktur APK tersebut adalah sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Serah kelola ke LMAN - 2016	
Aset Lainnya	28.356.189.388.923
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(8.130.193.127.487)
Serah kelola ke LMAN - 2017	
Aset Lainnya	5.469.536.000
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(110.929.500)

16. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan aset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2018 Unaudited termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia., untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKPP, perlu dilakukan eliminasi di level LKPP karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan . Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Terdapat 11 item pekerjaan berupa Gedung dan Peralatan yang belum ada berita acara serah terima (BAST) barang milik negara dari Pemerintah RI kepada Universitas Indonesia dan masih dicatat di SIMAK BMN.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Akum. Penyusutan dari Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2018)	Dokumen Pendukung
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	3.531.571.732	*Acceptance Certificate* No. 10696.1/UN2.PPK/LOG.01/2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai kontrak 104.836.048.971
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	-	21.598.007.200	8.999.169.667	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	-	49.830.000.000	10.381.250.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	-	3.837.744.000	1.279.248.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	-	24.368.312.958	8.122.770.986	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
6	Peralatan Medical Research Laboratory *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	-	38.228.343.871	7.964.238.306	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	-	16.830.777.445	3.506.411.968	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	7.314.712.193	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

		KDIKTI					KEMENRISTEKDIKTI
9	Gedung Asrama Blok H1	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.545.400.000	-	16.545.400.000	661.816.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No.0311/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
10	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	-	37.480.500.000	1.499.220.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0312/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	-	289.060.000	11.562.400	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0321/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
		Total	**566.548.360.244**	**132.785.444.381**	**433.762.915.863**	**53.271.971.252**	

Untuk poin 2 sampai 8, Kementerian Ristek Dikti telah menyampaikan Surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Persetujuan Hibah BMN Proyek MERC UI ke Universitas Indonesia Nomor: 317/B1/PL/2018 tanggal 20 Februari 2018. Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat PKNSI masih dalam proses meneliti dokumen permohonan persetujuan Hibah dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk poin 1 sudah dilakukan rekonsiliasi nilai aset BMN RSUI antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti dengan Universitas Indonesia pada tanggal 7-9 Februari 2019 termasuk nilai retensi peralatan dan furniture Rumpun Ilmu Kesehatan untuk selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Penetapan Nilai Aset.

17. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 22.922.087.565.782 dan 23.537.921.422.554. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2017 ()	Pengurangan selama Tahun 2018 ()	Penambahan selama Tahun 2018 ()	BPYBDS per 31 Desember 2018 ()	Selisih ()
Perum DAMRI	310.794.912.055,00	0	0	0	0
PT Perusahaan Listrik Negara	20.037.970.643.771,00	5.354.474.962.197,00	0	19.905.003.303.204,00	0
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	0	0	881.022.753.453,34	0
PT Pelindo I	525.884.662.252,50	0	0	527.133.217.252,50	1.248.555.000,00
PT ASDP	794.289.473.182,00	173.320.159.150,00	0	620.969.314.032,00	0
PT Pertamina	12.452.878.178,53	0	0	12.452.878.178,53	0
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	375.512.760.000,00	0	975.506.099.661,70	0
Jumlah	**23.537.921.422.554,07**	**5.903.307.881.347,00**	**0**	**22.922.087.565.782,07**	1.248.555.000,00

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 5.903.307.881.347. Pada tahun 2017, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai

BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

1) Perum Damri
   BPYBDS sebesar 310.794.912.055 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 45 Tahun 2018
2) PT Perusahaan Listrik Negara
   BPYBDS senilai 132.967.340.567 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP nomor 15 tahun 2018; BPYBDS sebesar 5.221.507.621.630,00 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2018 (namun PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu Surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor PT PLN)
3) PT Angkasa Pura II
   Dalam proses penetapan PP
4) PT Pelindo I
   Pada BAR kesepakatan Semester I Tahun 2018 baik Pelindo I dan K/L menyetujui nilai BPYBDS Rekon Semester I Tahun 2018 sebesar 527.133.217.252,50. Pada LK Triwulan I, Pelindo I mengakui nilai BPYBDS sebesar 525.884.662.252,50 sehingga terdapat selisih sebesar 1.248.555.000. Selisih tersebut disebabkan dengan adanya hasil reviu kembali oleh BPKP berupa pembangunan Dermaga Gunung Sitoli senilai 1.248.555.000 sehingga nilai *outstanding* nilai per semester I tahun 2018 menjadi 527.133.217.252,50
5) PT ASDP
   BPYBDS sebesar 173.320.159.150 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 55 Tahun 2018
6) PT Pertamina
   Belum dapat diproses
7) Perum LPPNPI
   Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian.

18. *Inkracht*

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntuan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan

c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

Tuntutan hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) tuntutan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu gugatan terkait Gedung Keuangan Negara Manado yang berdiri di atas tanah seluas 6.831 M2 yang status kepemillikannya didasarkan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Manado, dengan penggugat Frans J. Tamuju, dkk dan tergugat Menteri Keuangan dan KPPN Manado. Status perkara tersebut telah memiliki putusan pengadilan *inkracht* dan telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah sebesar 512.325.000. Atas perkara tersebut, belum dianggarkan dalam DIPA.
2. Putusan *inkracht* BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa pekerjaan USO melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar

1.330.797.947.627,00 dan USD1,129,208. Untuk pembayaran tuntutan tersebut dan administrasi proses BANI, telah dianggarkan dalam DIPA TA 2018 sebesar 101.627.750.000 namun dalam posisi tidak dapat dicairkan karena (blokir). Pada 31 Desember 2018, sisa anggaran penyelesaian sengketa BANI yang masih dalam posisi blokir adalah sebesar 89.054.889.000, Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2018 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, berupa :
   - Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Jl. KL.Yos Sudarso Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat,Kota Medan seluas 2.102m2 senilai 5.420.007.000,00 merupakan bagian dari 16.481m2 bekas HGB No.26/Pulo Brayan Kota an. Herman Iskandar yang telah berakhir 23 September 1980. Tanah tersebut menjadi obyek perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai register perkara Nomor: 614PK/Pdt/2009 jo Nomor: 62/PDT/2002/PT.Mdn jo Nomor: 359/Pdt.G/2001/PN.Mdn. Putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan antara lain bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara segera mengosongkan tanahnya dan menyerahkan kepada penggugat (Herman Iskandar).
   - Terdapat aset tanah dan bangunan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang terletak di Jalan Tunjungan No. 80 dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Genteng dengan luasan 6.968 M2. Terdapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bernama Tjipto Chandra selaku Likuidatur dari Perkumpulan Loka Pamitran, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2100K/Pdt/2008, jo Nomor: 517/Pdt/2006/PT.Sby, jo Nomor: 636/Pdt.G/2005/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara seluas 2.003 M2. Terdapat gugatan lainnya yang telah keluar putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2014, jo Nomor: 55/Pdt/2013/PT.Sby, jo Nomor: 268/Pdt.G/2011/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara 4.429 M2.

   - Tanah seluas 7000 m2 Status Sertipikat Hak Pakai Nomor: 148/Panaikang atas nama Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Karangpuan (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakukkang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan sedang menjadi obyek perkara dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar sampai pada tingkat Mahkamah Agung RI, BPN dinyatakan kalah, sesuai dengan putusan MA Nomor: 713/K/Pdt/2005 dikuasai oleh H.M. Rais SUMANG sebagai pihak yang menang di Mahkamah Agung.
     Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN TA 2018.

4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :
   Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Satker Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan putusan hukum *(inkracht)*, dimana Kementerian Luar Negeri berkewajiban untuk membayar sejumlah nominal. Satker perwakilan yang memiliki tuntutan hukum yang telah mendapatkan putusan hukum yang telah *inkracht* adalah sebagai berikut.
   1. KBRI Amman
      Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar JOD 30.444,00 (Inkracht keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 Oktober 2016).
   2. KBRI Mexico
      Gugatan 7 (tujuh) mantan pegawai setempat KBRI Ankara atas nama Ingris Gutierrez Pabst dan raul Arturo, tyang telah berstatus inkracht dimana pihak KBRI sebagai tergugat diwajibkan membayar upah sebesar USD70,812.50 dan hak lainnya sebesar USD80,765.39.
      Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Luar Negeri TA 2018.

5. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pariwisata berupa:
   Kasus sengketa sebidang tanah di desa Medan Estate, Kec. Percat Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang antara Kementerian Pariwisata dengan Yayasan Yayasan Anugerah Putera (YAPI), yang telah mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2002/PN.LP tanggal 27 Februari 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 365/PDT/2003/PTMDN Tanggal 2 Maret 2004, Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 122K/pdt/2006 Tanggal 24 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 67PK/Pdt/2009 Tanggal 27 Juli 2010.

Perihal penghapusan aset Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena pelaksanaan putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut akan diproses setelah adanya kejelasan proses ganti rugi.

6. Tuntutan Hukum pada Kementerian Dalam Negeri :
   Terdapat gugatan atas perkara sengketa lahan yang telah *inkracht* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 PK/Pdt/2014 tanggal 10 Juli 2014 (Sengketa Perumahan DDN Karang Tengah Cileduk). Mengingat masih perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut terkait kondisi fisik dan kepemilikan sertifikat bidang tanah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk sementara putusan Mahkamah Agung RI belum dapat disajikan sebagai kewajiban Kemendagri pada Neraca.
7. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :
   Terdapat gugatan atas perkara Aset Tetap berupa Tanah di Jl. Sriwijaya IV No. 1, RT 003 RW 03, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 4.357 M2, yang di atasnya berdiri gedung yang dikenal dengan Mess Departemen Pendidikan Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, dengan penggugat Ny. Hadi Susanti Idris, dkk dan tergugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan telah berketatapan hukum tetap (inkracht) dimana Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 456PK/Pdt/2012 tanggal 23 April 2013 menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai upaya pengamanan aset Mess Sriwijaya, selanjutnya Kemendikbud melakukan langkah-langkah untuk meminta pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion) atas penanganan perkara Tanah Jl. Sriwijaya IV No. 1, dimaksud kepada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini masih dalam proses hukum.

19. <u>Aset Barang Milik Negara *Idle*</u>

Terdapat 2 (dua) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu:

1) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah.

2) Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya yang terletak di Jl. Tongkol No.28 Metro. Bangunan tersebut diterima oleh KPKNL metro sesuai BAST Nomor BA-30/SJ.7/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dari KPP Pratama Metro dan tidak tercatat dalam SIMAK BMN KPP Pratama Metro.

Atas BMN yang telah hancur/rusak berat akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas BMN yang belum diketahui nilai perolehannya telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Metro sesuai laporan penilaian Nomor LAP-0014/1/1/WKN.05/KNL.04/01.00/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan nilai atas BMN tersebut telah disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* yang Sudah Diserahkan ke Pengelola Barang Periode Tahunan Tahun 2018.
Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN i*dle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.

2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.

Terdapat BMN eks BMN *Idle* yang telah ditetapkan statusnya pada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima, yaitu BMN eks BMN *Idle* berupa 2 (dua) unit Bangunan gedung Kantor Permanen, satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen dan Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo telah ditetapkan status penggunaanya pada

Kementerian Pertahanan Nomor 274/KM.6/2017, atas BMN eks *idle* tersebut sedang dalam proses serah terima kepada Kementerian Pertahanan.

Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut.

1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

20. Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018). Bahwa atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 242.404.759.586, (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong. Nilai aset-aset tersebut belum dapat ditentukan sehingga belum dimasukan sebagai pengurang dari nilai piutang untuk disisihkan. Koreksi atas besaran penyisihan piutang tak tertagih akan dilakukan kemudian dengan memperhitungkan kembali nilai barang sitaan yang telah dilakukan penilaian dan/atau eksekusi.

Nilai piutang kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2018 dalam rupiah dihitung sebagai berikut.

1.	Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701,56
2.	Nilai Agunan atau Barang Sitaan	242.404.759.586,00
3.	Nilai Piutang untuk Disisihkan (1-2)	4.458.580.389.115,56
4.	Penyisihan Piutang Tak tertagih (100% X 3)	4.458.580.389.115,58

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar. Pada tahun 2017, piutang kepada Yayasan Supersemar tidak dilaporkan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tidak mencantumkan adanya jatuh tempo pelunasan piutang

oleh tergugat. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan ini kami mengasumsikan bahwa jatuh tempo pelunasan tersebut ialah sesuai dengan tanggal putusan yaitu tanggal 8 Juni 2015.

21. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

1) Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai

Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

2) Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun

a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

b. Dalam tahun 2018, terdapat serah terima utang dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-043/WPB./KP.09/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Serah terima utang/piutang dilakukan antara Kepala KPPN Khusus Penerimaan dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361). Serah terima utang dan piutang dilakukan untuk transaksi imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017.

2. Untuk transaksi s.d. November 2017, KPPN Khusus Penerimaan telah melakukan pencatatan atas utang pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi. Dalam hal ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah membayarkan beban imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017 sebesar 31.831.700.000. Oleh karena itu, sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-9498/PB.6/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Petunjuk Perlakuan Akuntansi Terhadap Utang dan Piutang Terkait Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi (IJP) Tahun 2018, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengkoreksi beban pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi senilai tersebut dari Laporan Operasional.

3. Dalam serah terima utang/piutang tersebut, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima utang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 387.035.000 dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 3.255.000.

4. Termasuk dalam piutang yang diserahterimakan adalah piutang kepada Bank Antar Daerah senilai 1.075.000 untuk transaksi tahun 2015. Saat ini, Bank Antar Daerah sudah diambil alih oleh China Construction Bank pada tahun 2016.

c. Terdapat IDP yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan sebelum dikelola oleh PT Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut:

1. Periode 1974/1975 s.d 1983/1984 hasil pengumpulan IDP yang dilaksanakan oleh Dephankam cq Asku Hankam sebesar 132.869.358.206. Hasil tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada YKPP/BPKPR.
2. Periode 1984 s.d 1998 YKPP/BPKPR menerima dana pensiun sebesar 688.027.050.998,62.

Nilai IDP/AIP sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan ke dalam nilai IDP/AIP pada akun Aset

Lainnya dan Utang Jangka Panjang di Neraca LK BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

d. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut.

   1. Nilai IDP PNS (PT KAI) adalah senilai 1.204.364.786.171 sesuai lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Pensiun, Perhitungan Realisasi, Utang, Piutang dan Pengembalian Belanja Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 antara KPA BUN dan PT Taspen (Persero) Nomor: 1/BA/LK/DJPb-TSP/2019.

   2. Pada saat ini, IDP PNS (PT KAI) dikelola teisah dari Akumulasi Iuran Pensiun PNS. IDP PNS (PT KAI) akan disetorkan ke dalam Akumulasi Iuran PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."

   3. Sehubungan dengan poin b, maka nilai IDP PNS (PT KAI) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN 987361.

e. Pada tahun 2018, terdapat penerimaan PNBP dari penyetoran Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar total 7.704.637.733.401 yang masuk ke dalam LRA dan LO tahun 2018. Penyetoran ini berasal dari dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan terhadap penyetoran adalah sebagai berikut.

   1. Penyetoran terhadap AIP dilakukan karena Pemerintah hendak menggunakan dana AIP untuk membayar manfaat pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 6B, AIP dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

   2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018, AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Penggunaan AIP dapat dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah. Mekanismenya adalah dengan penyetoran AIP oleh Badan Penyelenggara (PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero) ke kas negara sebagai PNBP.

f. Pembayaran Utang Jangka Pendek berupa Bagian Lancar UPSL Tahun 2012-2013 sebesar 1.500.000.000.000 dan Bagian Lancar UPSL 2014-2015 sebesar 3.500.000.000.000 telah dilakukan pada Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut.

   1. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap keempat tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012 s.d 2013 dengan SPM Nomor 00019T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000242 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 1.500.000.000.000.

   2. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap kedua tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran *Unfunded Past Service Liability* tahun 2014 s.d 2015 dengan SPM Nomor 00020T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000243 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 3.500.000.000.000.

22. <u>Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun</u>

Saat ini Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa

pensiun. Selama ini terkait penyelenggaraan program pensiun dan program THT, pegawai membayar masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Sebagai bagian dari reformasi program pensiun di Indonesia, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS (JP JHT PNS). RPP JP JHT ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok-pokok pengaturan daiam RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS daiam kerangka reformasi program pensiun yang disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain adalah:

1) Untuk PNS lama (PNS yang masuk sebelum tanggal *cut off* 1 Januari 2020) tetap menggunakan skema Manfaat Pasti (*defined benefit*), dimana perhitungan manfaatnya merupakan gabungan antara manfaat yang dihitung menggunakan dasar pensiun lama dan menggunakan dasar pensiun yang baru. Sedangkan untuk PNS baru (PNS yang masuk mulai tanggal *cut off* 1 Januari 2020) menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).
2) Sumber pembiayaan untuk skema manfaat pasti (*defined benefit*) bagi PNS lama menggunakan mekanisme *Pay As You Go* yang bersumber dari APBN. Sedangkan iuran yang berasal dari peserta (PNS lama) akan diakumulasikan untuk diinvestasikan. Akumulasi iuran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS apabila pemerintah mengalami kesulitan pendanaan program pensiun PNS. Sedangkan sumber pembiayaan untuk skema iuran pasti (*defined contribution*) bagi PNS baru berasal dari iuran peserta (PNS baru) dan iuran dari pemerintah selaku pemberi kerja, ditambah akumulasi hasil atas pengembangan iuran tersebut.
3) Dalam jangka waktu titik tertentu, beban *Pay As You Go* yang berasal dari APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS lama akan habis seiring dengan tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berasal dari PNS lama dan digantikan seluruhnya oleh PNS baru yang menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).

23. <u>Subsidi Energi</u>

a. Subsidi energi (BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik) dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM (Minyak Tanah dan Minyak Solar), LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
b. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
c. Penyaluran BBM dalam Tahun 2018 melalui PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Coorindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT. Pertamina (Persero).
d. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
e. Kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM tidak terkait dengan pelaksanaan penyelesaian pembayaran subsidi JBT.
f. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2017, disepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut.
    - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. sementara itu, untuk kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).
    - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Coorindo, Tbk dari hasil penjualan JBT

Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

Kebijakan tersebut di atas telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor: S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.

g. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 36/AUDITAMA VII/PDTT/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Coorindo, Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, yaitu kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sebesar 20.788.916.888.950, sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

h. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.

i. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).
Pembayaran subsidi Listrik tahun 2018 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp51.207.587.695.000, termasuk pembayaran untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah (900 VA-RTM (R-1/TR)) sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) tersebut dialokasikan untuk pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00 (Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan pembayaran sisa utang subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN kepada Pemerintah sebagaimana CALK tentang Piutang Bukan Pajak

Pada Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan peraturan berupa Kepmen ESDM Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 1410/K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Hal- hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya penetapan Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel atau dibawah Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Manfaat ekonomi yang diterima pemerintah dari kebijakan penetapan harga jual batu bara yang dibawah Harga Batu Bara Acuan berupa penghematan subsidi listrik sebesar Rp6.819.143.342.516,00 dan penurunan PNBP SDA Batu Bara yang dicatat pada Kementerian ESDM sebesar Rp1.833.793.727.503,00.

j. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN pada tanggal 30 Mei 2018, atas beban BPP sebesar 7.456.451.880.403 tersebut disepakati bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara melalui Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017.

k. Kewajiban diestimasi merupakan tagihan dari Bank Penyalur yang sudah diajukan kepada KPPN Khusus

Investasi tetapi belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV). Nilai tagihan yang belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV) sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah sebesar 5.363.344.078,00. Nilai tersebut telah dikurangi dengan tagihan yang selesai diverifikasi pada subsequent event sebesar 1.394.016.700,00.

l. Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi PPh DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2018 karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi adalah sebesar 1.608.882.999.792, yang terdiri dari Kurang Bayar 2017 sebesar 386.136.772.923 dan Kurang Bayar 2018 sebesar 1.222.746.226.869.

24. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut.

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	958.964	893.251	1.852.215
	b. Pinjaman luar negeri	803.067	-	803.067
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.762.031	893.251	2.655.282
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	95.404	1.708.383	1.803.787
	b. Pinjaman dalam negeri	-	7.135	7.135
	Jumlah Utang Dalam Negeri	95.404	1.715.518	1.810.922
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah		**1.857.435**	**2.608.769**	**4.466.204**

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas, yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu Negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada Negara domisili tersebut. Yang tidak termasuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk *(Part IV Balance of Payment Manual (BOPM) IMF*, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014)

Penyajian *discount* dan *premium* pada Neraca pada tahun 2018 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada **Lampiran 26**.

Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan Premium yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (audited) menjadi saldo awal *Discount* dan Premium yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

25. Likuidasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 fahun 2007, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan misinya yaitu:

a. Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial.

b. Menjaga keandalan ruang tampungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berkomitmen sesuai dengan visinya yaitu "Terselesaikannya masalah sosial kemasyarakatan dan terwujudnya sistem pengendali dampak dinamika gunung lumpur yang andal"; akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

- Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial; dan
- Menjaga keandalan ruang tapungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Sidoarjo, BPLS dibubarkan pada tanggal 2 Maret 2017 dimana untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pada Satker Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Dengan adanya pembubaran BPLS, maka dilakukan proses likuidasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 705/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Dalam Rangka Pengalihan Penatausahaan Barang Milik Negara Eks. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoardjo Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tanggal 27 November 2018 telah dilakukan serah terima aset dan kewajiban dari BPLS ke Kementerian PUPR, yaitu Satker PPLS berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 27 .2/BA/SJ/2018. Atas likuidasi tersebut, BPLS sudah membuat Laporan Keuangan Likuidasi per tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Likuidasi (CaLK).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

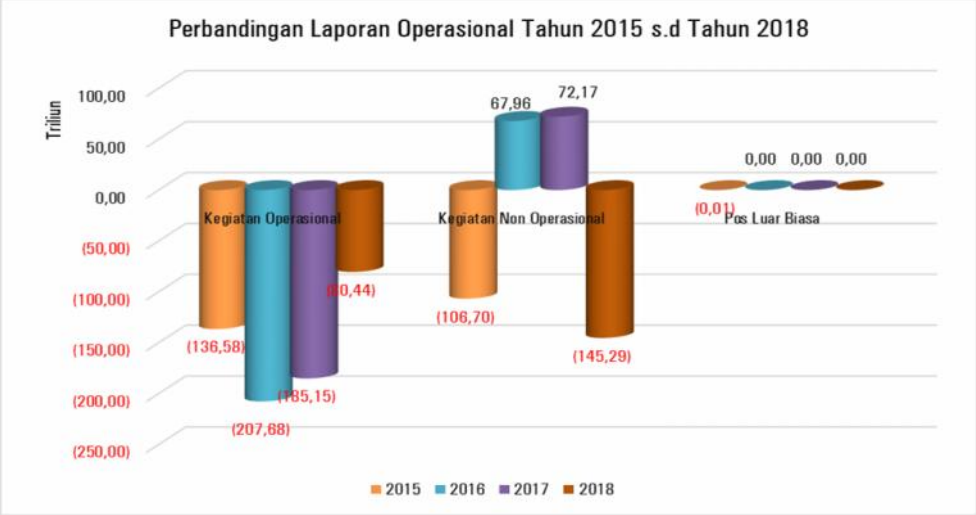
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Suplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp225.730.103.236.335. Dibandingkan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp112.982.816.158.602 nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp112.747.287.077.733 atau 99,79 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2018 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp80.438.866.944.409 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp80.438.866.944.409, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.169.151.212.988.779 dan Beban Operasional sebesar Rp2.249.590.079.933.188.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.530.025.396.873, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.787.500.000 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp140.758.423.395.053.

Laporan Operasional Tahun 2018 menyajikan angka Tahun 2017 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 (dalam triliun) dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

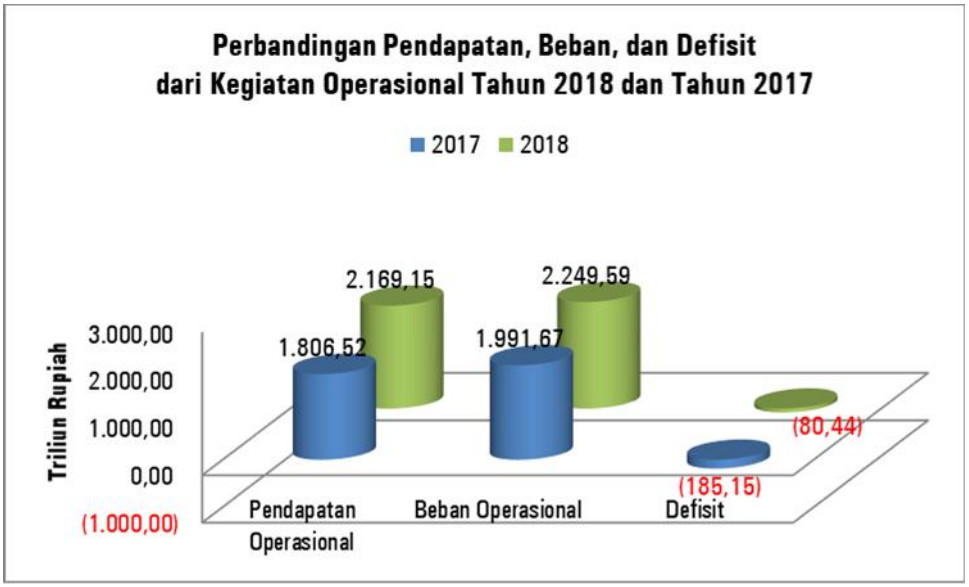
E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2018 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp80.438.866.944.409. Dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp185.150.585.052.461 nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.711.718.108.052 atau minus 56,55 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan operasional tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp2.169,15 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp2.169.151.212.988.779 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.500.143.017.244.237, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp644.824.777.159.082, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2018 lebih tinggi sebesar Rp362.631.074.438.949 atau 20,07 persen dibanding Tahun 2017 yang nilainya adalah sebesar Rp1.806.520.138.549.830. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp1.500,14 triliun

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2018, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.500.143.017.244.237. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp137.020.395.780.649 atau 10,05 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp1.363.122.621.463.588. Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Pajak Penghasilan	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834
Pendapatan Cukai	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261
Pendapatan Pajak Lainnya	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893
Pendapatan Bea Masuk	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200
Pendapatan Bea Keluar	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042
Pendapatan Pajak Lain-lain	(27.142.816.314)	33.846.372.448
Total	**1.500.143.017.244.237**	**1.363.122.621.463.588**

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Rp731,83 triliun

Pajak Penghasilan Tahun 2018 adalah sebesar Rp731.838.117.941.363. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp69.420.917.561.201 atau 10,48 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp662.417.200.380.162. Pajak Penghasilan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.557.094.272.269	16.607.135.959.156
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.118.280.365.523	33.711.719.503.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.800.919.649	4.604.623.804
Pendapatan PPh Pasal 21	134.918.491.786.219	118.232.109.781.647
Pendapatan PPh Pasal 22	18.036.931.666.751	16.193.970.914.029
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.702.019.166.469	43.189.095.956.050
Pendapatan PPh Pasal 23	36.885.174.569.421	35.528.626.703.126
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.511.668.574.521	7.321.389.939.374
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	240.638.465.110.601	218.520.440.033.635
Pendapatan PPh Pasal 26	49.134.847.249.977	46.195.666.837.559
Pendapatan PPh Final	113.047.874.567.462	105.893.884.322.644
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.479.051.817	12.084.406.869.029
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	235.050.235	349.728.807
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	12.987.522	132.161.316
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	167.200	219.978
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	(2.462.000)	-
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	503.900.818	614.833.045
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	1.892.891.197.764	1.702.566.558.147
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8.218.348.183.000	7.230.485.435.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	1.616.145	-
Jumlah	**731.838.117.941.363**	**662.417.200.380.162**

Besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018 paling signifikan berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kinerja positif sektoral secara umum terutama pada sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan positif pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan ini juga disebabkan karena penurunan nilai restitusi di tahun anggaran 2018. Nilai Pendapatan PPh Pasal 21 juga mengalami peningkatan antara lain disebabkan adanya peningkatan pemberian gaji dan tunjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor usaha. Pendapatan PPh Migas juga meningkat cukup signifikan yang dipengaruhi oleh kenaikan ICP. Adapun penurunan nilai terdapat pada PPh Non Migas lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Rp526,85 triliun

E.2.1.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 adalah sebesar Rp526.856.640.020.385. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.265.529.530.637 atau 9,86 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp479.591.110.489.748. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan PPN Dalam Negeri	323.715.962.911.317	312.942.569.311.304
Pendapatan PPN Impor	186.273.239.836.218	149.224.820.121.550
Pendapatan PPN Lainnya	68.355.639.470	150.814.235.849
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.718.712.605.741	13.367.715.729.437
Pendapatan PPnBM Impor	4.105.334.910.489	3.797.914.102.090
Pendapatan PPnBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah	**526.856.640.020.385**	**479.591.110.489.748**

Peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018 dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada Sektor Jasa Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar. Adapun peningkatan pada PPN Impor disumbang oleh pertumbuhan pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan. Penurunan pada PPnBM disebabkan karena masih tingginya konsumsi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori *Low Cost Green Car*/LCGC (fasilitas PPnBM) serta menurunnya penjualan hunian mewah di tahun 2018.

E.2.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Rp20,13 triliun

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 20.136.546.791.758. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.006.860.045.924 atau 17,55 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan PBB Perkebunan	2.390.974.894.103	2.258.996.189.377
Pendapatan PBB Kehutanan	694.128.495.659	693.240.372.820
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.125.365.813.228	1.798.108.620.064
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.540.480.330.129	12.071.509.430.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	72.321.877.435	54.369.264.889
Jumlah	**20.136.546.791.758**	**17.129.686.745.834**

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834 termasuk di dalamnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.216.911.547.

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi seiring dengan peningkatan produksi dan kenaikan harga minyak bumi dan gas bumi.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Rp168,41 triliun

Pendapatan Cukai Tahun 2018 adalah sebesar Rp168.411.747.414.517. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.125.411.998.256 atau 9,87 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp153.286.335.416.261. Pendapatan Cukai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	161.771.554.305.988	147.718.195.604.756
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.247.517.580	147.025.706.280
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	70.790.248.740	(159.167.177.380)
Pendapatan Cukai Lainnya	11.380.172.449	12.812.725.105
Jumlah	**168.411.747.414.517**	**153.286.335.416.261**

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Hal ini seiring dengan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dimulai pada tahun 2017 yang masih digalakkan hingga saat ini. PCBT bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan barang kena cukai ilegal dan tidak sehat, dan dalam rangka pengamanan hak keuangan negara khususnya terkait dengan produksi, peredaran, dan perdagangan barang kena cukai.

E.2.1.1.1.5 Pajak Lainnya

Pajak Lainnya Rp6,79 triliun

Pajak Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.796.688.674.946. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.268.576.318.947 atau minus 38,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp11.065.264.993.893. Pajak Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Bea Materai	1.470.393.848.442	1.367.164.381.348
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.985.405.294.453	3.785.684.479.195
Pendapatan PPn Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	28.230.225.569	33.820.989.027
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	166.418.719.567	2.391.952.222.219
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	460.284.397.839	2.457.001.906.848
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	26.406.406.436	46.863.187.478
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah	**6.796.688.674.946**	**11.065.264.993.893**

Penurunan Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2018 antara lain disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2017 dengan nilai yang cukup signifikan.

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

Bea Masuk Rp39,46 triliun

Bea Masuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp39.464.702.540.677. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.410.372.767.477 atau 12,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp35.054.329.773.200. Bea Masuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Bea Masuk	37.565.836.910.406	33.492.227.346.535
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	437.983.381.694	589.834.024.710
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	590.382.001.633	440.871.610.209
Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Pendapatan BM-DTP	370.614.637.000	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	32.636.375.103	4.671.058.018
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	285.949.034.841	182.032.920.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	181.236.291.000	63.744.495.000
Jumlah	**39.464.702.540.677**	**35.054.329.773.200**

Peningkatan Bea Masuk Tahun 2018 berasal dari peningkatan devisa impor dan peningkatan utilitasi *Free Trade Agreement* (FTA), kenaikan kurs, dan program penertiban importasi berisiko tinggi yang menghasilkan kenaikan *taxbase* atas importasi berisiko tinggi.

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar

Bea Keluar Rp6,66 triliun

Bea Keluar Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.665.716.676.905. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.120.869.384.863 atau 46,67 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp4.544.847.292.042. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga. Bea Keluar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Bea Keluar	6.664.583.965.922	4.535.319.521.260
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.108.158.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	240.537.204
Jumlah	**6.665.716.676.905**	**4.544.847.292.042**

Kenaikan pendapatan Bea Keluar Tahun 2018 terutama disebabkan naiknya penerimaan ekspor mineral dan batubara.

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain

Pajak Lain-lain minus Rp27,14 miliar

Pajak Lain-lain Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp27.142.816.314. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.989.188.762 atau minus 180,19 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp33.846.372.448.

Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pajak Lain-lain Tahun 2018 bernilai minus menunjukkan peningkatan kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak yang telah dipungut. Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018 lebih rendah dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp644,82 triliun

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp644.824.777.159.082 yang merupakan pendapatan dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp211.849.605.126.532, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp239.499.611.090.293, PNBP Lainnya sebesar Rp136.947.279.857.210, dan Pendapatan BLU sebesar Rp56.528.281.085.047. Secara keseluruhan, nilai PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp223.529.289.411.667 atau 53,06 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp421.295.487.747.415.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Rp211,84 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2018 adalah sebesar Rp211.849.605.126.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.525.073.255.635 atau 56,55 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu Pendapatan SDA sebesar Rp135.324.531.870.897. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi	173.169.188.168.326	106.391.959.607.594
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	897.013.139.014	585.724.704.360
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	29.793.097.476.683	22.164.409.725.679
Pendapatan Dana Reboisasi	1.949.707.502.589	1.586.709.274.019
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.131.630.995.767	862.625.212.833
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	57.999.849.716	36.192.609.370
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.603.935.082.478	1.508.940.299.429
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	25.630.000	635.002.996
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan	-	94.892.000
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	-	78.805.810
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.074.184.369
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi/Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	2.768.651.348.961	1.669.520.840.396
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	28.111.645.960	25.081.291.549
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	1.492.401.435	1.485.420.493
Jumlah	**211.849.605.126.532**	**135.324.531.870.897**

Kenaikan Pendapatan SDA Tahun 2018 terjadi pada seluruh jenis pendapatan. Secara siginifikan, kenaikan terjadi pada Pendapatan Minyak Bumi yang dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 sebesar 51,2 dolar AS per barel. Kenaikan pada Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral.

Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2018.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp239,49 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp239.499.611.090.293. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp101.787.972.468.906 atau 73,91 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp137.711.638.621.387. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2018 sebesar Rp45.056.688.696.658.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp194.442.922.393.635. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari Penyesuaian pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp127.473.069.877.401, BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.769.383.427.578, pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp18.984.162 (pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2018 dari Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin), dan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp64.200.450.104.494 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada Tahun 2017, Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dari LPS, Bank Indonesia, PTN-BH, dan BPJS Ketenagakerjaan disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Rp136,94 triliun

PNBP Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp136.947.279.857.210. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.894.421.699.639 atau 36,87 persen dari tahun 2017 sebesar Rp100.052.858.157.571. PNBP Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	23.907.157.330.607	16.882.736.366.225
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	458.734.854.512	434.871.371.242
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	478.380.886.895	521.031.874.232
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	62.339.195.189	-
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	34.028.803.590.788	15.151.790.443.323
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.415.665.588.389	1.217.867.656.416
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**60.351.081.446.380**	**34.208.297.711.438**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.503.202.732.697	1.909.936.003.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	738.668.412.347	689.618.070.787
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	839.274.977.108	787.827.990.507

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.142.477.014.496	1.448.184.499.780
Pendapatan Perizinan	1.508.010.868.552	2.449.295.921.927
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.517.324.476.741	9.073.759.827.085
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	874.985.688.834	466.801.592.989
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	555.352.078.123	-
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**18.679.296.248.898**	**16.825.423.906.985**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.837.243.080.383	4.111.592.253.260
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	178.064.580.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.100.255.227	673.987.928.888
Pendapatan Jasa Agraria	2.197.166.078.286	2.177.763.542.085
Pendapatan Jasa Keagamaan	870.085.779.188	791.932.903.454
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	**7.426.659.773.085**	**7.755.276.627.687**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.050.987.762.767	4.462.234.079.337
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	286.728.370.651	-
Pendapatan Penelitian/Riset, *Survey*, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	401.549.823.964	-
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	6.485.752.865	15.727.683.018
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	**4.745.751.710.247**	**4.477.961.762.355**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.398.009.015.712	4.340.588.381.947
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	18.798.087.224.921	16.623.777.141.187
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	192.895.695.221	60.543.889.545
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	**25.388.991.935.854**	**21.024.909.412.679**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	197.658.840.104	160.083.518.171
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	35.824.212.787	-
Pendapatan Jasa Lainnya	671.885.799.338	3.027.843.009.797
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	**905.368.852.229**	**3.187.926.527.968**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.899.839.262.224	572.709.196.587
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan *Fee* Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	52.088.810.552	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	506.350.147.007	23.214.731.478
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	294.971.681.310	2.393.165.189.470
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	6.053.304.476.813	5.012.412.454.044

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.813.432.813	413.689.915.950
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	890.371.662
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**9.288.367.810.719**	**8.485.190.813.537**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	638.613.682.993	526.159.906.696
Pendapatan Denda II	352.672.917.998	225.520.432.820
Pendapatan Denda III	308.741.808.895	284.591.942.893
Subtotal Pendapatan Denda	**1.300.028.409.886**	**1.036.272.282.409**
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	-	119.678.881.905
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	-	2.948.681.700
Pendapatan Lain-Lain I	7.704.637.733.401	-
Pendapatan Lain-Lain II	246.396.187.644	491.222.803.065
Total Pendapatan Lain-lain	**7.951.033.921.045**	**613.850.366.670**
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	**55.663.300.189**	**1.700.103.052.202**
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	855.036.448.678	737.645.693.641
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual	**855.036.448.678**	**737.645.693.641**
Jumlah PNBP Lainnya	**136.947.279.857.210**	**100.052.858.157.571**

Besarnya Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018 paling signifikan terdapat pada Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun, dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika. Kementerian/Lembaga yang menyumbang PNBP Lainnya terbesar antara lain adalah Bendahara Umum Negara terutama pada BA 999.99, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyajian uraian PNBP Lainnya pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan perubahan kodefikasi PNBP Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp56,52 triliun

Pendapatan BLU Tahun 2018 adalah sebesar Rp56.528.281.085.047. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.321.821.987.487 atau 17,26 persen dari tahun 2017 sebesar Rp48.206.459.097.560. Pendapatan BLU Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	29.207.035.124.112	25.801.151.973.538
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.104.430.435.632	1.136.550.154.351
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	18.549.624.166.808	17.634.171.781.976
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	1.061.407.297.957	340.511.688.488
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	**49.922.497.024.509**	**44.912.385.598.353**
Pendapatan Hibah BLU	371.494.767.316	317.681.155.334
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.670.308.372.743	594.401.221.874
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	129.978.260.933	9.673.878.071
Pendapatan BLU Lainnya	4.223.579.871.856	2.360.973.399.149
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	209.776.381.890	11.338.544.779
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	646.405.800	5.300.000
Jumlah	**56.528.281.085.047**	**48.206.459.097.560**

Kementerian/Lembaga penyumbang nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2018 paling besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kenaikan Pendapatan BLU terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat 14 BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Rp24,18 triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.081.389.246.633 atau 9,42 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp22.102.029.338.827. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	6.845.900.809.329	2.960.516.973.884
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	2.069.086.533	148.800.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**20.026.155.487.684**	**10.371.101.401.268**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	750.246.244.476	1.016.604.071.107
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.062.037.983.142	4.557.855.044.216
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	**6.198.958.875.116**	**9.793.838.490.429**
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(2.041.695.777.340)	1.937.089.447.130
Jumlah Pendapatan Hibah	**24.183.418.585.460**	**22.102.029.338.827**

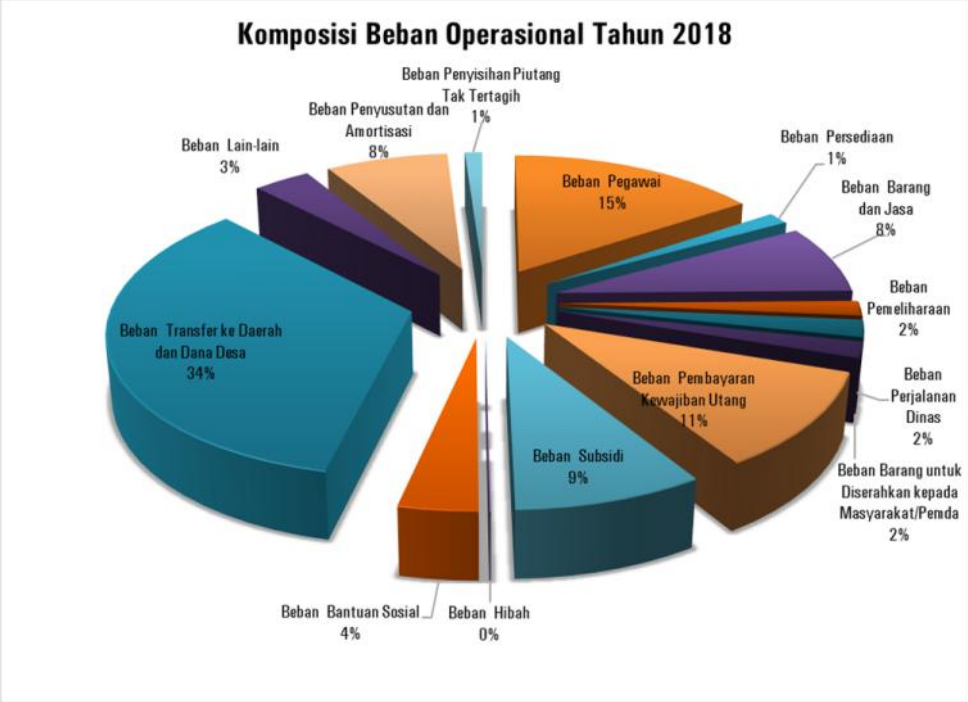
Penurunan Pendapatan Hibah berasal dari Pendapatan Hibah Luar Negeri, sedangkan Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami peningkatan. Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp2.041.695.777.340 menunjukkan pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara di tahun 2018 nilainya lebih kecil dibandingkan jumlah pendapatan hibah yang belum disahkan pada tahun 2017.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp2.242,59 triliun

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp257.919.356.330.897 atau 12,95 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.991.670.723.602.291. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2018

Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Pegawai	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330
Beban Persediaan	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281
Beban Barang dan Jasa	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489
Beban Pemeliharaan	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571
Beban Perjalanan Dinas	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621

Beban Pembayaran Kewajiban Utang	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203
Beban Subsidi	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126
Beban Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
Beban Bantuan Sosial	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265
Beban Lain-lain	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641
Jumlah	**2.249.590.079.933.188**	**1.991.670.723.602.291**

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp351,16 triliun

Beban Pegawai untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp351.169.184.831.245. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.598.245.751.915 atau 11,99 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp313.570.939.079.330. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	88.563.658.473.682	85.533.468.836.009
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.416.151.054	55.598.861.012.954
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.001.379.214	633.585.187.202
Beban Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.048.423.545
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.937.957.259.194	8.847.289.629.256
Beban Honorarium	1.715.801.833.161	1.436.541.593.948
Beban Lembur	736.296.210.306	726.465.940.735
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	72.174.671.173.005	54.432.772.543.919
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	104.131.084.968.049	91.879.440.770.106
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	5.672.979.906.636	5.398.801.176.104
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	10.146.875.608.784	8.734.663.965.552
Jumlah	**351.169.184.831.245**	**313.570.939.079.330**

Persentase kenaikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2018 terbesar terdapat pada Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Honorarium, Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan, dan Beban Pensiun dan Uang Tunggu. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian THR sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara. Adapun persentase penurunan beban pegawai terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS dan Beban Gaji Dokter PTT.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp29,93 triliun

Beban Persediaan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp29.932.790.690.126. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.426.419.421.845 atau 12,93 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp26.506.371.268.281. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Persediaan Konsumsi	10.081.393.034.417	8.960.009.757.490
Beban Persediaan Amunisi	1.830.768.691.065	2.642.815.847.024
Beban Persediaan Pita Cukai. Materai, dan Leges	4.422.606.537	6.353.373.570
Beban Persediaan Bahan Baku	6.325.326.611.464	7.693.477.915.628
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.117.260.083.422	683.903.388.079
Beban Persediaan Lainnya	6.573.619.663.221	6.519.810.986.490
Jumlah	**29.932.790.690.126**	**26.506.371.268.281**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2018 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (BA 999) berupa beban untuk mencatat cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2018 serta penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida Tahun 2018. Adapun Beban Persediaan Tahun 2018 yang mengalami penurunan terdapat pada Beban Persediaan Amunisi dan Beban Persediaan Bahan Baku.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp175,35 triliun

Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp175.351.118.265.689. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.078.733.437.200 atau 22,39 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp143.272.384.828.489. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Barang Operasional	42.440.563.325.087	34.198.511.297.295
Beban Barang Non Operasional	74.546.230.599.301	53.196.825.930.617
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	5.632.424.060	11.935.532.901
Beban Kontribusi	317.088.416.644	191.543.039.201
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.647.564.485.554	5.884.563.934.738
Beban Jasa Pos dan Giro	11.890.770.411	23.441.961.207
Beban Jasa Konsultan	7.060.533.356.141	9.048.231.664.457
Beban Sewa	6.024.492.993.884	3.820.164.353.004
Beban Jasa Profesi	4.429.562.928.448	4.135.452.364.447
Beban Jasa kepada BLU	63.616.000	-
Beban Jasa Lainnya	14.150.598.174.034	10.193.624.065.864
Beban Barang dan Jasa BLU	19.434.715.588.583	22.430.503.575.452
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	1.418.081.613	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	280.763.505.929	137.587.109.306
Jumlah	**175.351.118.265.689**	**143.272.384.828.489**

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional terutama pada Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun kenaikan signifikan pada Beban Kontribusi berasal dari BA BUN berupa Kontribusi kepada Organisasi Internasional dan *Trust Fund*, Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*), dan Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*). Kenaikan signifikan juga terdapat pada Beban Sewa terutama pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, penurunan Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 terdapat pada Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC, Beban Jasa Pos dan Giro, dan pada Beban Jasa Konsultan.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp37,43 triliun

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.434.658.112.329. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.188.593.869.242 atau minus 10,06 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp41.623.251.981.571. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.779.343.603.707	6.257.018.273.116
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	274.352.833.278	272.388.818.828
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.105.765.465.842	12.819.980.166.644
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	7.422.846.065.125	5.758.299.250.582
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	71.529.599	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.825.011.642	237.184.279.134
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.802.530.266.621	5.055.736.692.978
Beban Pemeliharaan Irigasi	902.274.127.125	848.411.865.919
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.575.935.041.281	1.469.618.768.322
Beban Pemeliharaan Lainnya	418.839.033.028	351.993.090.934
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.192.251.332.322	1.005.732.416.743
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	371.224.143.632	312.766.216.914
Beban Persediaan Suku Cadang	4.370.708.860.159	7.234.122.141.457
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	8.690.798.968	-
Jumlah	**37.434.658.112.329**	**41.623.251.981.571**

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 mengalami penurunan signifikan pada Beban Persediaan Suku Cadang dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp43,79 triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 adalah sebesar Rp43.791.723.031.484. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.907.313.140.230 atau 25,53 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp34.884.409.891.254. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.833.110.878.840	16.747.144.795.003
Beban Perjalanan Dinas Tetap	80.592.786.539	73.054.664.231
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.671.908.131.049	1.645.789.146.429
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	6.394.737.205.622	4.855.706.875.572
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	9.525.162.333.752	7.945.015.527.711
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.749.509.630.662	1.393.783.671.513
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	8.932.751.868	4.361.213.393
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.428.394.538.224	1.436.308.590.633
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.099.374.774.928	783.245.406.769
Jumlah	**43.791.723.031.484**	**34.884.409.891.254**

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.
Beban Perjalanan Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Perjalanan Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting*. Beban Perjalanan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Rp40,36 triliun

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 adalah sebesar Rp40.361.271.228.799. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.089.381.796.822 atau minus 7,11 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp43.450.653.025.621. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.285.122.978.607	18.764.527.056.029
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	18.206.747.221	49.027.000
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.027.851.008.336	24.493.640.754.204
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	30.090.494.635	190.742.978.388
Jumlah	**40.361.271.228.799**	**43.450.653.025.621**

Pada tahun 2018, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami penurunan terutama pada Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beban Pembayaran Kewajiban Utang Rp244,80 triliun

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2018 sebesar Rp244.805.005.384.622 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.764.651.714.419 atau 12,79 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp217.040.353.670.203. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	**21.331.207.774.570**	**17.409.612.471.278**
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	438.843.216.594	424.038.347.391
Beban Bunga Pinjaman Program	10.521.675.025.835	7.421.003.656.483
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.919.929.226	47.783.462.225
Beban Bunga Pinjaman Proyek	9.533.690.543.730	8.576.771.751.776
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	735.515.050.817	939.498.647.770
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	564.008.368	516.605.633
Beban Bunga SBN	**218.803.917.557.671**	**199.630.741.198.925**
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	144.427.987.921.696	133.949.026.514.603
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.862.689.592	33.845.310.000
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	37.254.812.556.426	32.720.775.638.334
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	89.529.197.775	70.545.022.922
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	27.597.567.223.452	25.825.121.654.965
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	31.602.995.000	50.555.585.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.295.028.481.230	6.947.447.169.801
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	24.526.492.500	33.424.303.300
Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang Menambah dan Mengurangi Beban Bunga	**4.669.880.052.381**	-
Jumlah	**244.805.005.384.622**	**217.040.353.670.203**

Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah, Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, dan Beban Bunga Pinjaman Program.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2018 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).
Beban diskonto dan pendapatan premium pada Tahun 2017 masih menggunakan akun beban pembayaran bunga sebagai berikut.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Valas	278.335.300.500	-
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang	1.291.855.261.574	371.541.298.100
Jumlah		**10.666.978.573.124**	**6.477.116.098.471**

Pada Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2018 (*Audited*)
542111	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	4.549.720.436.000
541121	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	(1.212.217.927.400)
542141	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	330.538.952.200
545111	Beban Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	(200.408.799.919)
545131	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.202.247.391.500
Jumlah		**4.669.880.052.381**

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi Rp196,71 triliun

Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.885.147.475.970 atau 17,21 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp167.834.411.964.126. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Subsidi Minyak Solar	31.170.578.161.186	7.256.427.398.770
Beban Subsidi Minyak Tanah	3.151.544.787.072	1.904.842.122.253
Beban Subsidi Elpiji	54.867.972.112.102	43.763.759.684.348
Beban Subsidi Pangan	-	18.665.425.804.895
Beban Subsidi Listrik	48.101.754.165.145	45.738.215.039.563
Beban Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Beban Subsidi Pupuk	31.204.983.758.555	27.488.258.355.598
Beban Subsidi PPh-DTP	10.714.023.989.644	8.861.035.862.196
Beban Subsidi BM-DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Beban Subsidi PT KAI	2.001.859.315.312	1.682.982.370.548
Beban Subsidi PT PELNI	1.877.169.078.654	1.906.905.507.413
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya (LKBN Antara)	155.927.797.800	136.812.799.346
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.440.000.000	826.480.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.413.742.864.095	1.190.908.323.782
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	9.198.526.756	39.434.492.233
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	29.348.058.401	30.136.759.180
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	7.710.610.390.234	2.750.753.157.508
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	13.422.500	-
Beban Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	74.782.015	295.873.402
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	3.320.662.330	6.176.062.252
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	227.503.961	94.078.416
Beban Subsidi Estimasi	1.984.155.428.854	4.539.836.062.084
Jumlah	**196.719.559.440.096**	**167.834.411.964.126**

Nilai Beban Subsidi tahun 2018 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, dan Subsidi Minyak Solar. Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya juga mengalami persentase kenaikan yang cukup besar. Adapun penurunan yang signifikan atas Beban Subsidi tahun 2018 terdapat pada Subsidi Pangan dan Subsidi Benih.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2018 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2018 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2018. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.984.155.428.854 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

Beban Hibah Rp1.520,56 triliun

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.925.106.270.871 atau minus 72,08 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 (*Audited*)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Beban Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah	**1.520.560.988.285**	**5.445.667.259.156**

Beban Hibah tahun 2018 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa Beban Hibah untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, restorasi bencana gempa bumi di Papua Nugini, pemberian bantuan traktor tangan ke Pemerintah Fiji, dan pembangunan Indonesia *Islamic Center* kepada Pemerintah Afghanistan.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada 15 Pemda, Hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2* (WISMP-2) kepada 52 Pemda, Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG) kepada 6 Pemda, Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB) kepada Pemda Kab. Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang, Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in* Gunung Leuser *Ecosystem* kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Hibah *City Sewerage Project* kepada Pemerintah Kota Palembang, Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Kab. Lombok Barat, Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* kepada 46 Pemda, Hibah Sanitasi kepada 55 Pemda, Hibah Air Minum kepada 198 Pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 13 Pemda.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp82,46 triliun

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.606.732.270.040 atau 47,63 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp55.858.510.175.202. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	240.242.618.650	312.083.934.625
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	37.585.756.187.799	36.253.246.488.171
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	3.164.141.449.000	2.397.123.317.502
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	12.475.279.931.942	242.622.399.898
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	18.616.939.314.479	12.952.704.236.842
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	7.031.833.349.000	1.988.992.887.695
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	848.128.786.039	759.913.568.528
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.502.920.808.333	951.823.341.941
Jumlah	**82.465.242.445.242**	**55.858.510.175.202**

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang, sedangkan penurunan nilai terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Agama.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Beban Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 Juta KPM meningkat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Beban Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah serta bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat.

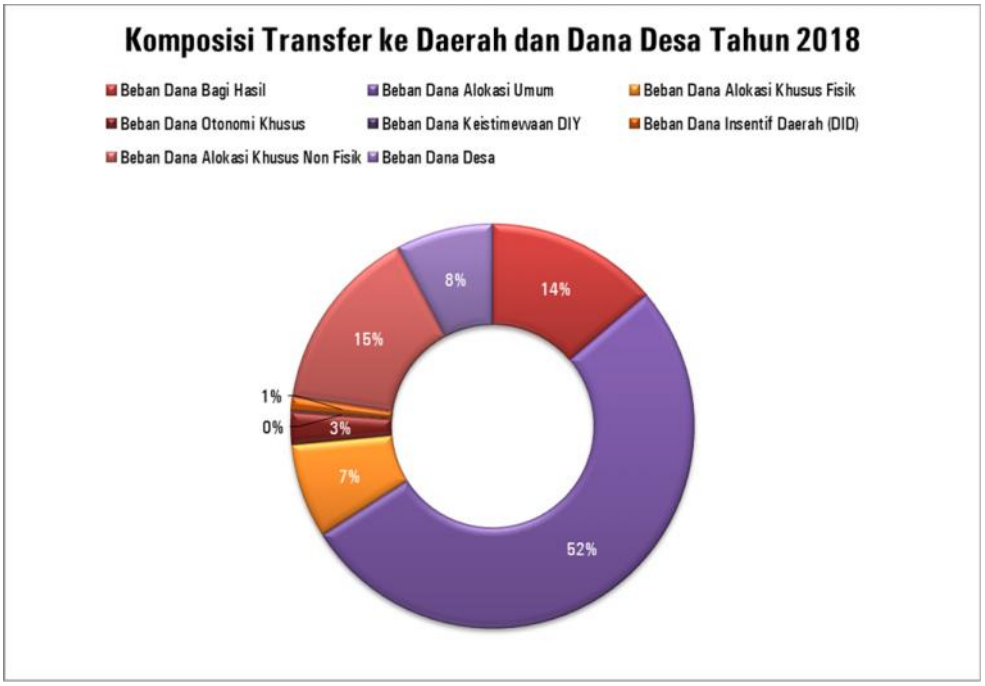
E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp769,69 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp769.694.450.184.060 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.545.156.333.795 atau 4,70 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp735.149.293.850.265. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil	106.140.461.465.325	81.648.610.327.750
Beban Dana Alokasi Umum	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	58.149.298.269.245	62.055.298.711.176
Beban Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	962.772.688.443	773.435.532.429
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	114.802.596.316.772	105.383.354.003.094
Beban Dana Desa	59.859.408.609.275	59.762.987.937.816
Jumlah	**769.694.450.184.060**	**735.149.293.850.265**

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018

Beban Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2018 adalah sebesar Rp106.140.461.465.325. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.491.851.137.575 atau 30,00 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp81.648.610.327.750. Dana Bagi Hasil Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	26.982.923.728.366	23.569.954.663.020
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.881.345.263.440	1.571.540.526.139
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.181.650.100.692	2.798.264.913.061
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	12.616.952.097.642	10.998.013.719.294
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	94.539.271.512	52.744.051.400
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	428.607.668.790	429.523.455.012
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	1.920.863.967.650	1.703.244.275.599
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	15.065.174.948.231	9.026.906.109.066
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	495.733.751.842	299.269.621.906
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	763.755.981.148	182.330.166.900
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	10.079.889.654.768	6.251.178.559.669
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	142.508.695.650	103.468.628.284
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.205.967.383.357	98.124.808.600
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - IuranTetap	436.500.001.253	375.281.426.095

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	23.814.433.296.091	18.635.249.847.283
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.802.117.507.488	727.330.390.743
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	21.149.789.282	18.072.611.932
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	1.193.921.148	1.200.044.733
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	81.385.756.405	33.009.962.856
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	913.131.399.094	734.619.089.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	792.807.965.746	691.941.729.488
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	359.001.100.482	392.940.307.926
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.058.828.215.248	2.954.401.419.266
Jumlah	**106.140.461.465.325**	**81.648.610.327.750**

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.906.000.441.931 atau minus 6,29 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp62.055.298.711.176.

Beban DAK Fisik Tahun 2018 terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp29.411.961.830.062, DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp22.482.775.199.874, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6.254.561.239.309.

Beban Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	**20.059.583.186.000**	**19.443.292.590.000**

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 adalah sebesar Rp962.772.688.443 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp189.337.156.014 atau 24,48 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp773.435.532.429. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2018.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2018 sebesar Rp8.230.750.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2018. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp730.750.000.000 atau 9,74 persen dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000.000. Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2018. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 adalah sebesar Rp114.802.596.316.772. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.419.242.313.678 atau 8,94 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp105.383.354.003.094. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.332	49.929.771.976.077
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.869.668.298.339	43.370.249.664.344
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	-	(4.773.800.000)
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	**114.802.596.316.772.**	**105.383.354.003.094**

Beban DAK Non Fisik memperhitungkan lebih salur Dana BOS TA 2018 yang diakui sebagai pengurang beban Dana BOS. Persentase peningkatan DAK Non Fisik terbesar terdapat pada Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp96.420.671.459 atau 0,16 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp59.762.987.937.816. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2018 disebabkan karena Dana Desa TA 2018 dialokasikan kepada 74.958 desa atau bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Rp79,82 triliun

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2018 sebesar Rp79.829.317.279.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.052.727.924.266 atau 111,32 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp37.776.589.355.266. Beban Lain-lain Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	-	29.061.724.858
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	476.925.386.855	-
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	60.642.204.092	38.700.170.872
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	1.032.465.610	2.808.777.900
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898

Beban Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Beban Lain-lain	2.085.292.769.784	2.189.006.307.261
Beban Pihak Ketiga Migas	39.433.405.824.736	30.817.021.745.678
Beban Pembayaran *Reimbursement* PPN	424.290.825.638	228.205.097.449
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	255.415.175.912	-
Beban Diestimasi *Reimbursement* PPN dan Penggantian Bonus Produksi	439.095.791.317	534.676.688.350
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	227.031.945.250	-
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	25.632.669.219.547	-
Jumlah	**79.829.317.279.532**	**37.776.589.355.266**

Nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas, Beban Penyesuaian Nilai Investasi, dan Beban Lain-lain BUN Lainnya. Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp39.433.405.824.736 terdiri dari *Underlifting* KKKS, DMO *fee* KKKS, *Reimbursement* PPN KKKS, dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN ke Pemda.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp25.632.669.219.547 merupakan penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari defisit PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Padjajaran, dan BPJS Kesehatan; bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN Persero dan BUMN Perum, serta penurunan nilai aset keuangan berdasarkan hasil penilaian nilai wajar di pasar aktif pada tanggal 31 Desember 2018 pada aset keuangan yang memenuhi karateristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*).

Adapun Beban Lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp10.256.466.000.000 merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS pada Tahun 2018.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp172,04 triliun

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp172.046.636.562.132. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.203.950.009.246 atau 18,78 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp144.842.686.552.886. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.063.855.416.809	47.253.139.476.514
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.775.829.859.799	7.123.990.674.523
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	-	67.304.325
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41.079.673.570.825	40.202.160.771.151
Beban Penyusutan Irigasi	8.769.015.107.863	7.787.180.703.026
Beban Penyusutan Jaringan	1.811.637.508.046	1.769.276.236.124
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.240.398.161.993	2.368.972.409.329
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	14.823.248
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.970.621.901	2.279.069.483
Beban Amortisasi Paten	11.365.450.298	10.801.350.135
Beban Amortisasi *Software*	1.586.121.075.234	1.518.495.770.976
Beban Amortisasi Lisensi	274.026.136.330	187.149.358.179

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	297.121.407.251	251.925.571.662
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.683.119.444	18.511.597.488
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	124.289.345.137	110.698.638.439
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	(88.383.368)	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	23.348.452.533.888	4.498.446.630.908
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	24.831.323.877.527	25.655.750.596.426
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	3.170.941.883	2.673.868.611
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.134.114.441.323	2.141.552.385.925
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	2.684.647.299.307	3.938.570.033.052
Beban Penyusutan Aset *Idle* yang Sudah Diserahkan ke DJKN	437.351.106	365.048.513
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	2.591.719.536	664.234.849
Jumlah	**172.046.636.562.132**	**144.842.686.552.886**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan terutama pada Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN, Beban Amortisasi Lisensi, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bendahara Umum Negara (BA 999.99), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih minus Rp24,46 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.468.561.489.547. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.360.788.906 atau 0,22 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp24.415.200.700.641. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2018. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	4.523.829.453.402	14.720.933.154.760
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.158.796.390.646	(321.455.391.552)
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	179.269.781.943	63.523.241.361
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	961.719.364.713	(330.770.978.196)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	76.050.814.202	(2.956.425.989)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	573.898.365.022	6.493.746.394.384
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	7.009.810.653	631.330.037.665
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	5.408.785.349.422	1.544.128.801.208

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	9.403.592.670.154	(251.982.115.300)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(321.624.478.370)	1.088.382.766.626
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	(1.395.591.788)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(41.075.382)	(59.635.416)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	22.518.884.888	7.011.291.155
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(143.407)	99.423.323
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	133.543.204.403	195.748.450.269
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	295.061.131.922	392.105.543.132
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	557.381.177	971.528.862
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	129.375.581	4.235.069.394
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	192.604.162.311	163.368.263.955
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(95.984.813)	(392.355.518)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	(82.110.074.750)	5.857.888.807
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	(56.209.583)	1.472.745.486
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(63.481.092.799)	9.903.002.225
Jumlah	**24.468.561.489.547**	**24.415.200.700.641**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2018 terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999.99), Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Defisit Rp145,29 triliun

Defisit Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2018 sebesar Rp145.291.236.291.926 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 yaitu sebesar Rp72.167.768.893.859, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp217.459.005.185.785 atau minus 301,32 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp4,53 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 sebesar Rp4.530.025.396.873. Defisit ini turun sebesar Rp47.059.653.048.609 atau minus 91,22 persen dari Tahun 2017 yaitu sebesar Rp51.589.678.445.482. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp392.274.523.533 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.922.299.920.406.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp392,27 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp392.274.523.533. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp157.954.424.409 atau 67,41 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp234.320.099.124.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	5.711.186.853	817.437.691
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	76.064.406.719	22.374.742.651
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	9.327.477.116	3.660.651.656
Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa	-	1.416.464.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	135.365.000	114.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	7.130.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	226.000.424.634	158.481.872.062
Pendapatan Pelepasan Aset	75.028.533.211	47.568.816.064
Jumlah	**392.274.523.533**	**234.320.099.124**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Pelepasan Aset. Pendapatan tersebut terutama berasal dari Bendahara Umum Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp4,92 triliun

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.922.299.920.406. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp46.901.698.624.200 atau minus 90,50 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp51.823.998.544.606.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Kerugian Pelepasan Aset	4.922.299.920.406	51.334.328.106.767
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	-	489.670.437.839
Jumlah	**4.922.299.920.406**	**51.823.998.544.606**

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp4.697.211.517.662 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp225.088.402.744. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.213.821.494.641, Kementerian Desa dan PDT sebesar Rp708.860.995.690, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp555.029.268.160.

Pada Tahun 2018 untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar berupa beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas sesuai karakteristiknya disajikan pada beban kegiatan non operasional lainnya.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang minus Rp2,78 miliar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Defisit ini turun sebesar Rp118.009.822.243 atau minus 97,69 persen dibandingkan defisit Tahun 2017 sebesar Rp120.797.322.243. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption*/*Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0.

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini turun sebesar Rp5.631.521.326 atau minus 100 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp5.631.521.326. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp2,78 miliar

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Beban ini turun sebesar Rp123.641.343.569 atau minus 97,8 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp126.428.843.569. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya minus Rp140,75 triliun

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp140.758.423.395.053. Nilai tersebut turun sebesar Rp264.636.668.056.637 atau minus 213,63 persen dibanding Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 yaitu sebesar Rp123.878.244.661.584. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.843.747.196.323 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp200.602.170.591.376.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp59,84 triliun

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.843.747.196.323. Nilai tersebut turun sebesar Rp132.964.819.799.945 atau minus 68,96 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp192.808.566.996.268. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Pendapatan BLU Lainnya	41.441.438.303	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.333.080.777.546	46.457.400
Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	-	59.898.701.956
Pendapatan dari Selisih Kurs	-	62.796.449
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	134.428.329.188	2.096.996.797.693
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	-	86.711.899
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	206.060.348	-
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	33.331.717.804	11.298.199.899
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.221.964.532.595	1.829.592.945.242
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi – BLU	6.098.982.711	938.347.918
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	78.326.034.166	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu	-	545.258.313
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	672.266	78.770.454.797.959
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	17.673.419.787.369	87.159.715.730.708
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	28.664.240.214.347	22.831.321.364.280
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	656.894.080.880	1.651.871.552
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	314.568.800	-
Pendapatan Pelepasan Aset	-	45.957.015.000
Jumlah	**59.843.747.196.323**	**192.808.566.996.268**

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (terutama Bantuan Sosial). Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp200,60 triliun

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp200.602.170.591.376. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp131.671.848.256.692 atau 191,02 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp68.930.322.334.684. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 *(Audited)*	Tahun 2017 *(Audited)*
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	2.813.451.079	371.925.930
Beban Selisih Harga SBN	-	1.628
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	25.981.938.354.598	25.711.249.619.654
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	168.777.433.477	383.619.668.517
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	1.897.445.254	195.564.500
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	111.584.564.231.171	42.802.551.367.682
Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.677.279.036	4.013.455.630
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	63.754.326.447	2.443.197.655

Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	-	25.537.272.827
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	108.940.331.089	340.260.661
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	6.430.019.496	-
Pembulatan	(3)	-
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.646.507.417.333	-
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.032.870.302.399	-
Jumlah	**200.602.170.591.376**	**68.930.322.334.684**

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi, Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, dan Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terutama berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertahanan.

Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399 adalah beban atas adanya kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp50.317.380.995.216 (termasuk PPN sebesar Rp1.807.731.903.387 dan PBBKP sebesar Rp903.865.951.693), PT PLN (Persero) sebesar Rp7.456.451.880.403, dan kepada PT AKR Corporation sebesar Rp259.037.426.780. Kewajiban terhadap PT Pertamina (Persero) akibat kekurangan pendapatan karena penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar Tahun 2017 dan 2018. Kewajiban Pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif di bawah Biaya Pokok Penyediaan Listrik Non Subsidi.

Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas.

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa minus Rp0

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2018.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2018.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2018.
Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 sebesar Rp208,50 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp208.506.122.640.283, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2017 sebesar Rp174.076.715.164.142, Saldo Awal Kas TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp34.429.407.476.141.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Kas *Escrow*	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Kas pada BLU yang telah disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Awal Kas	**208.506.122.640.283**	**174.076.715.164.050**

Ket: Saldo Awal Kas pada Tahun 2017 menurut SPAN adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, terdapat selisih Rp92 karena pembulatan pada saat migrasi data ke sistem aplikasi terintegrasi LKPP.

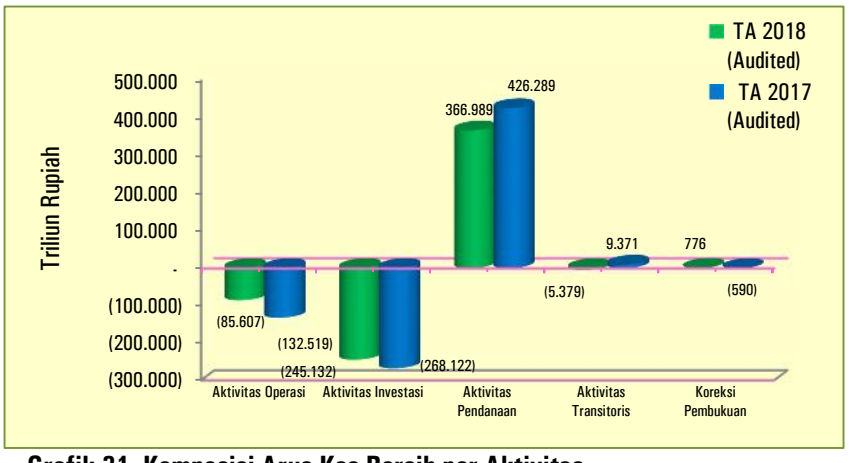
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan Kas sebesar Rp31,64 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
Koreksi Pembukuan*)	775.775.692.984	(589.976.797.589)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi	**31.646.479.531.242**	**34.429.407.476.141**

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

*) Koreksi Pembukuan sebesar Rp775.775.692.984, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	1.079.553.470.113
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(312.233.301.456)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	8.455.524.327
Total Koreksi Pembukuan		**775.775.692.984**

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp8.455.524.327, terdiri dari:
   a. Koreksi Kas BLU terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	35.769.409.000
2	KPPN Pekanbaru (008)	(11.817.783)
3	KPPN Padang (010)	2.720.256.087
4	KPPN Jambi (012)	64.763.677.813
5	KPPN Jakarta II (019)	774.905.031
6	KPPN Bandung I (022)	4.702.983.427
7	KPPN Yogyakarta (030)	1.803.659.244
8	KPPN Malang(032)	11.139.666.297
9	KPPN Denpasar (037)	(2.126.212.692)
10	KPPN Mataram (038)	(9.264.248.000)
11	KPPN Kupang (039)	230.821.103
12	KPPN Pontianak (042)	145.401.272.779
13	KPPN Samarinda (046)	(15.648.410.693)
14	KPPN Makassar I (054)	59.649.287
15	KPPN Ambon (061)	38.130.289.218
16	KPPN Jakarta III (088)	2.673.895.358
17	KPPN Jakarta VI (175)	3.613.621.950
18	KPPN Medan II (123)	25.244.706
		284.758.662.132

   b. Koreksi Kas Hibah terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Tanjung Pinang (009)	(214.302.698)
2	KPPN Kupang (039)	(3.485.645.844)
3	KPPN Tarakan (048)	(227.827.000)
4	KPPN Palu (051)	(1.003.383.795)
5	KPPN Bojonegoro (073)	(622.903.197)
6	KPPN Tanjung Selor (185)	227.827.000
7	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(92.073.597)
		(5.418.309.131)

c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.691 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
d. Koreksi kas SUBRKUN Kuasa BUN Pusat dan Koreksi Kas Escrow sebesar minus Rp12 disebabkan oleh penyesuaian saldo akun kas karena penutupan rekening di Tahun Anggaran 2018
e. Koreksi pembulatan Kas RPL sebesar minus Rp5 disebabkan oleh penyesuaian saldo kas RPL dan utang kepada pihak ketiga oleh UAPBUN AP Tahun Anggaran 2018.
f. Koreksi pembulatan sebesar Rp34.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178,62 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178.625.211.629.388 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Saldo Akhir Kas[1])	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**
Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Telah Disahkan [2])	2.911.840.057.154	2.845.838.264.767
Kas pada BLU yang Belum Disahkan [3])	-	(7.391.778.396)
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(6.215.489.058.582)	(12.204.408.488.386)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) [4])	(58.601.172.611.021)	(65.211.736.255.835)
Kas Transito (Kiriman Uang) [5])	465	330.588.756.091
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**178.625.211.629.388**	**134.575.579.715.420**

[1]) Saldo Akhir Kas sebesar Rp240.152.602.171.525 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Rekening Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	(472)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening *Escrow*)	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Jumlah	**240.152.602.171.525**	**208.506.122.640.283**

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2018 sebesar Rp55.010.642.052.353 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp6.215.489.058.582 oleh Satker BLU.

[2]) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.911.840.057.154 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp3.638.728.687.898 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp726.888.630.744.

[3]) Kas pada BLU Yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Total Kas pada BLU menurut K/L	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
	55.010.642.052.353	40.977.128.111.987
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	**(7.391.778.396)**

[4]) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58.601.172.611.021 merupakan Saldo Kas Rekening *Escrow* yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

[5]) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)
Kas Dalam Transito (Neraca)	465
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	**465**

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85,60 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan minus Rp132.518.715.897.464, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**(85.606.836.614.663)**	**(132.518.715.897.464)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp46.911.879.282.801 atau 35,40 persen dari TA 2017.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 sebesar minus Rp85.606.836.614.663 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengindikasikan terjadinya peningkatan realisasi penerimaan negara baik dari perpajakan, PNBP maupun hibah. Namun demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja Pemerintah.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.518,78 triliun

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2018 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 dan Rp1.343.529.843.798.510, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.472.907.964.370.352**	**1.304.316.269.228.039**
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**45.881.812.780.678**	**39.213.574.570.471**
Penerimaan Perpajakan	**1.518.789.777.151.030**	**1.343.529.843.798.510**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp175.259.933.352.520 atau 13,04 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp749,97 triliun

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp749.977.029.683.808 dan Rp646.793.472.957.381, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.549.508.906.106	16.599.430.743.163
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.115.852.120.909	33.711.719.453.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.784.424.907	4.600.547.804
Jumlah Pendapatan PPh Migas	**64.699.145.451.922**	**50.315.750.744.783**
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	134.914.657.190.069	117.764.553.599.746
Pendapatan PPh Pasal 22	18.008.015.831.134	16.172.671.971.729
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.723.505.867.454	43.156.722.093.470
Pendapatan PPh Pasal 23	39.739.217.510.968	34.005.879.655.650
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.406.726.317.202	7.806.580.852.307
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	252.131.439.879.614	206.550.829.248.758
Pendapatan PPh Pasal 26	50.638.032.804.063	43.691.062.125.980
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	115.462.608.241.234	106.311.286.059.450
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.924.999.699	12.084.337.398.022
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	**685.277.884.231.886**	**596.477.722.212.598**
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	**749.977.029.683.808**	**646.793.472.957.381**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp103.183.556.726.427 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp537,26 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp537.267.909.259.264 dan Rp480.724.607.483.756, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	333.921.320.457.564	314.342.826.531.220
Pendapatan PPN Impor	186.400.182.247.898	149.034.796.849.454
Pendapatan PPN Lainnya	68.708.364.877	150.814.235.849
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.794.658.786.886	13.292.538.563.625
Pendapatan PPnBM Impor	4.108.005.284.889	3.796.354.314.090
Pendapatan PPnBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah PPN dan PPnBM	**537.267.909.259.264**	**480.724.607.483.756**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp56.543.301.775.508 atau 11,76 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB sebesar Rp19,44 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.444.913.884.758 dan Rp16.770.346.937.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan PBB Pedesaan	396.446.920	-
Pendapatan PBB Perkebunan	2.188.577.469.904	2.175.377.454.058
Pendapatan PBB Kehutanan	756.237.733.965	595.957.370.926
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.718.416.162.627	1.480.177.403.749
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.381.978.062.129	12.230.011.698.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	86.032.628.009	35.360.141.739
Jumlah Pendapatan PBB	**19.444.913.884.758**	**16.770.346.937.156**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.674.566.947.602 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB sebesar Rp32,74 juta

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.748.454 dan Rp1.216.911.547. Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BPTHB sebesar Rp1.184.163.093 atau 97,31 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai sebesar Rp159,58 triliun

Pendapatan Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp159.588.552.586.225 dan Rp153.288.149.392.121, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	152.941.410.762.377	147.719.216.343.096
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.235.597.580	147.122.735.280
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	76.696.556.557	(158.239.602.120)
Pendapatan Cukai Lainnya	12.434.499.951	12.581.358.365
Jumlah Penerimaan Cukai	**159.588.552.586.225**	**153.288.149.392.121**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104 atau 4,11 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp6,62 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp6.629.526.207.843 dan Rp6.738.475.546.078, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.455.839.042.895	5.082.167.687.070
Pendapatan PPn Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	27.615.845.263	33.451.910.552
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak:		
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	(14.087.087.862)	406.970.758.069
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	499.442.551.458	232.614.159.194
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.166.073.449	493.203.415
- Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**6.629.526.207.843**	**6.738.475.546.078**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp108.949.338.235 atau 1,62 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp45,88 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 dan Rp39.213.574.570.471, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	37.407.985.838.439	33.495.272.858.547
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	743.750	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	274.134.580.810	582.649.947.955
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	625.126.712.146	457.334.656.735
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Perdapatan BM - DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	11.675.815.285	5.181.494.887
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	247.390.857.841	182.509.916.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	179.753.894.000	62.284.247.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	**39.116.746.986.751**	**35.066.181.439.852**
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	6.763.961.349.944	4.137.811.636.557
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.079.891.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	294.260.484
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	**6.765.065.793.927**	**4.147.393.130.619**
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**45.881.812.780.678**	**39.213.574.570.471**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp6.668.238.210.207 atau 17,00 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP sebesar Rp409,02 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp409.028.715.779.709 dan Rp311.016.765.272.576, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
Pendapatan PNBP Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Jumlah PNBP	**409.028.715.779.709**	**311.016.765.272.576**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp98.011.950.507.133 atau 31,51 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA sebesar Rp180,59 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 dan Rp111.132.042.413.912, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Umum	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	**180.592.649.823.641**	**111.132.042.413.912**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp69.460.607.409.729 atau 62,50 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan KND sebesar Rp45,06 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.060.521.375.969 dan Rp43.904.217.111.673, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	12.460.928.189.608
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	-	31.443.288.922.065
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	44.602.870.375.969	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	457.651.000.000	-
Jumlah Pendapatan KND	**45.060.521.375.969**	**43.904.217.111.673**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp1.156.304.264.296 atau 2,63 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp128,28 triliun

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp128.282.486.329.481 dan Rp108.635.073.191.043, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	46.946.552.039.286	26.902.392.301.814
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	17.768.170.773.554	15.894.440.259.215
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	7.421.052.335.146	7.483.690.118.211
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.763.894.209.734	4.484.816.582.419
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	23.950.487.055.396	21.812.886.337.455
Pendapatan Jasa Lainnya	910.056.355.732	3.543.315.006.384
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	11.153.269.856.791	12.841.264.758.952
Pendapatan Denda	611.724.687.653	918.450.161.639
Pendapatan Lain-lain	14.701.615.716.000	14.753.817.664.954
Jumlah PNBP Lainnya	**128.282.486.329.481**	**108.635.073.191.043**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp19.647.413.138.438 atau 18,09 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sebesar Rp55,09 triliun

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 dan Rp47.345.432.555.948, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan Dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah Pendapatan BLU	**55.093.058.250.618**	**47.345.432.555.948**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp7.747.625.694.670 atau 16,36 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp15,56 triliun

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, pendapatan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 dan Rp11.629.815.002.490, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	9.076.264.000	228.975.340.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	339.156.572.926	137.817.215.944
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	12.814.628.074.896	7.043.656.235.321
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	15.324.680.000	(13.163.881)
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**13.178.185.591.822**	**7.410.435.627.384**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	202.952.271.644	234.472.316.950
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	215.422.323.945	295.603.707.659
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	-
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Bilateral	1.527.744.362.454	2.994.461.088.630
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Multilateral	347.385.546.650	652.784.794.782
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya	93.170.142.805	42.057.467.085
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	**2.386.674.647.498**	**4.219.379.375.106**
Jumlah Pendapatan Hibah	**15.564.860.239.320**	**11.629.815.002.490**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp3.935.045.236.830 atau 33,84 persen dari TA 2017.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp346,89 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 dan Rp312.728.756.432.452, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.759.526.678.607	86.928.589.744.958
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	59.261.582.322.441	55.599.900.348.167
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.816.083.083.145	9.922.083.655.765
Belanja Honorarium	1.715.507.347.718	1.424.790.271.010
Belanja Lembur	736.748.654.327	726.253.425.631
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.842.863.496.643	54.327.541.245.359
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Total Belanja Pegawai	**346.890.764.906.966**	**312.728.756.432.452**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp34.162.008.474.514 atau 10,92 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp347,46 triliun

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 dan Rp291.459.133.344.592, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Barang	138.091.081.423.936	105.340.094.252.818
Belanja Jasa	35.722.999.519.182	29.605.458.267.170
Belanja Pemeliharaan	38.180.996.840.773	43.501.200.802.930
Belanja Perjalanan	42.692.124.890.095	34.126.165.284.538
Belanja Badan Layanan Umum	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	56.062.842.263.545	42.313.661.472.670
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	-	1.693.210.000
Jumlah Belanja Barang	**347.468.335.110.569**	**291.459.133.344.592**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp56.009.201.765.977 atau 19,22 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp257,95 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.568.022.521.345. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp41.384.005.619.934 atau 19,11 persen dari TA 2017.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp19.519.914.054.797 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp199.977.329.282.085, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	178.778.022.387.867	160.608.329.886.049
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**238.432.114.086.482**	**199.977.329.282.085**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp38.454.784.804.397 atau 19,23 persen dari TA 2017.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.519.914.054.797 dan Rp16.590.693.239.260, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	9.593.734.945.579	7.077.108.709.167
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.925.615.100.850	9.513.067.924.460
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	564.008.368	516.605.633
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**19.519.914.054.797**	**16.590.693.239.260**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp2.929.220.815.537 atau 17,66 persen dari TA 2017.

Belanja Subsidi sebesar Rp216,88 triliun

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 dan Rp166.401.103.129.178, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	97.014.832.533.586	47.046.732.461.316
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM		
Belanja Subsidi Non BBM – Harga Biaya	90.120.320.139.040	99.700.700.476.538
Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak	10.482.377.006.258	9.214.612.992.875
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	4.233.533.194.018	4.309.726.330.540
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**201.851.062.872.902**	**160.271.772.261.269**
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi – Bunga Kredit	13.957.637.714.201	4.848.396.664.197
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan *Risk Sharing*	116.569.439.887	448.160.696.551
Belanja Subsidi Kredit Program II	5.391.088.311	6.469.507.161
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**15.032.241.242.399**	**6.129.330.867.909**
Jumlah Belanja Subsidi	**216.883.304.115.301**	**166.401.103.129.178**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari TA 2017.

Belanja Hibah sebesar Rp1,52 triliun

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 dan Rp5.445.667.259.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Belanja Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah Belanja Hibah	**1.520.560.988.285**	**5.445.667.259.156**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp3.925.106.270.871 atau 72,08 persen dari TA 2017.

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84,31 triliun

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 dan Rp55.297.216.841.355, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.227.856.984
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.128.084.642
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**84.318.412.919.513**	**55.297.216.841.355**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp29.021.196.078.158 atau 52,48 persen dari TA 2017.

Belanja Lain-lain sebesar Rp16,16 triliun

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 dan Rp8.802.858.981.595, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	502.666.350.000	-
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.292.847.925	-
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	24.554.426.786	28.578.926.000
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	59.303.906.742	38.460.400.052
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah Belanja Lain-lain	**16.163.845.545.430**	**8.802.858.981.595**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari TA 2017.

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp45,69 triliun

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.695.178.904.793 dan Rp53.668.650.342.060, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil PBB	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**45.695.178.904.793**	**53.668.650.342.060**

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp45,08 triliun

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.673.021.137, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**45.086.668.324.382**	**31.641.673.021.137**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp13.444.995.303.245 atau 42,49 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp2,92 triliun

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp317.385.805 atau 0,01 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebesar Rp401,48 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 dan Rp398.582.314.748.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp58,14 triliun

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp29,29 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp29.290.333.186.000 dan Rp27.743.292.590.000. Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	800.000.000.000
Dana Insentif Daerah	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Jumlah	**29.290.333.186.000**	**27.743.292.590.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.547.040.596.000 atau 5,58 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp115,30 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 dan Rp105.563.769.198.975, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	56.743.822.617.193	51.333.461.790.177
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi/P2D2	-	-
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.207.778.308.894	5.652.332.364.609
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	837.415.359.881	840.237.480.533
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	**115.300.279.949.439**	**105.563.769.198.975**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp9.736.510.750.464 atau 9,22 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp59,85 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp92.831.081.872 atau 0,16 persen dari TA 2017.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245,13 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp245.132.313.372.320 dan minus Rp268.122.368.777.814, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.230.455.589.354	1.293.730.019.414
Dikurangi Arus Kas Keluar	246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(245.132.313.372.320)**	**(268.122.368.777.814)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Aktivitas Investasi sebesar Rp22.990.055.405.494 atau 8,57 persen dari TA 2017.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp291,52 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp291.523.708.737 dan Rp199.488.584.509, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain	-	199.488.584.509
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250.827.244.737	-
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	40.696.464.000	-
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	**291.523.708.737**	**199.488.584.509**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp92.035.124.228 atau 46,14 persen dari TA 2017.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp163,61 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp163.619.880.616 dan Rp359.085.434.905, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	124.649.183.550	233.411.243.099
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	38.970.697.066	125.674.191.806
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	**163.619.880.616**	**359.085.434.905**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen dari TA 2017.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp775,31 miliar

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp775.312.000.001 dan Rp735.156.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp40.156.000.001 atau 5,46 persen dari TA 2017.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp184,12 triliun

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 dan Rp208.656.670.235.846, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	3.504.554.254.056	3.421.319.416.306
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.656.852.202	89.605.672.819.037
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.166.053.878.250	27.819.212.471.582
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.370.358.869.043	80.441.877.902.717
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.073.599.068.981	3.421.175.609.710
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Jumlah Belanja Modal	**184.127.627.500.274**	**208.656.670.235.846**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp24.529.042.735.572 atau 11,76 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15,00 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp10.500.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5,53 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp5.530.000.000.000 dan Rp5.600.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp70.000.000.000 atau 1,25 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp9,43 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.431.096.461.400 dan Rp11.603.494.561.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	3.600.000.000.000	6.379.318.092.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	2.331.096.461.400	2.024.176.469.382
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.500.000.000.000	3.200.000.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**9.431.096.461.400**	**11.603.494.561.382**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2.172.398.099.982 atau 18,72 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp32,27 triliun

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.274.045.000.000 dan Rp33.055.934.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	31.152.730.000.000	32.050.560.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000	1.005.374.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**32.274.045.000.000**	**33.055.934.000.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp781.889.000.000 atau 2,37 persen dari TA 2017.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245.132.313.372.320 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp366,98 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp366.988.807.449.803 dan Rp426.289.009.273.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
Dikurangi Arus Kas Keluar	510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**366.988.807.449.803**	**426.289.009.273.320**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp59.300.201.823.517 atau 13,91 persen dari TA 2017.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp784,74 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp784.742.629.776.147 dan Rp727.576.037.546.945, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**784.742.629.776.147**	**727.576.037.546.945**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp57.166.592.229.202 atau 7,86 persen dari TA 2017.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2018 dan TA 2017.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Rp1.305.055.202.247, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	**2.429.387.504.746**	**1.305.055.202.247**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan sebesar Rp1.124.332.302.499 atau 86,15 persen dari TA 2017.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp641.581.192.271.401dan Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	325.721.165.375.000	237.884.012.996.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	98.603.438.543.401	92.581.027.901.425
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	**641.581.192.271.401**	**584.280.503.844.698**

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara sebesar Rp57.300.688.426.703 atau 9,81 persen dari TA 2017.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp140.732.050.000.000 dan Rp141.990.478.500.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	**140.732.050.000.000**	**141.990.478.500.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp1.258.428.500.000 atau 0,89 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp88,60 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 dan Rp51.726.855.339.157, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Program	50.625.053.600.000	20.947.967.337.503
Penarikan Pinjaman Kegiatan	37.984.692.874.180	30.778.888.001.654
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**88.609.746.474.180**	**51.726.855.339.157**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp4,05 triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp4.054.687.737.176 dan Rp4.081.374.007.277, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	346.401.949.711	353.699.519.388
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.708.285.787.465	3.727.674.487.889
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**4.054.687.737.176**	**4.081.374.007.277**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp26.686.270.101 atau 0,65 persen dari TA 2017.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain sebesar Rp5 miliar

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sedangkan pada TA 2017 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp424,99 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp424.990.319.440.149 dan Rp285.101.423.064.007, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	1.075.568.713.531	656.763.630.395
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	381.055.706.226.618	257.198.059.433.612
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	42.859.044.500.000	27.246.600.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**424.990.319.440.149**	**285.101.423.064.007**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp139.888.896.376.142 atau 49,07 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp76,33 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp76.333.197.362.316 dan Rp65.124.918.090.885, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Kegiatan	76.325.598.016.270	65.119.476.791.715
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	7.599.346.046	5.441.299.170
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	**76.333.197.362.316**	**65.124.918.090.885**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.3 Pengembalian Pinjaman

Pengembalian Pinjaman sebesar Rp9,09 triliun

Pengembalian Pinjaman merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Pengembalian Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.099.739.735.235 dan Rp6.868.916.465.167. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengembalian Pinjaman sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48 persen dari TA 2017.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp36,24 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp366.988.807.449.803 dan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp5,37 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp5.378.953.624.562 dan Rp9.371.459.675.688, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
Transito (Neto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	**(5.378.953.624.562)**	**9.371.459.675.688**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp14.750.413.300.250 atau 157,40 persen dari TA 2017.

F.2.4.1 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar minus Rp513,95 miliar

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp513.959.408.911 dan minus Rp763.254.906.069, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.075.116.293.031	24.069.529.360.516
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	1.610.035.356	4.215.180.920
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.471.917.850	285.699.694.065
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	4.695.381.176.214	4.557.674.919.056
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	48.314.897	101.799.639
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.200.295	-
Penerimaan PFK Lain-lain	410.831.723.812	372.703.882.449
Jumlah Penerimaan PFK	**29.465.464.661.455**	**29.289.924.836.645**
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	15.238.490.910.891	14.799.182.410.730
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	27.083.035.000	9.500.000.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	170.157.244	1.850.000
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.581.206.158.711	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**16.846.950.261.846**	**14.808.684.260.730**
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji	(22.088.882.658.771)	(22.319.792.812.634)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.597.145.688.955)	(1.565.564.682.564)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(282.639.079.083)	(285.541.721.420)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Pemda	(5.117.174.430.880)	(4.894.531.869.489)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	(48.632.484)	(98.493.287)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(133.410.258.982)	(374.497.159.361)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(29.219.300.749.155)**	**(29.440.026.738.755)**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.998.784.389.346)	(15.412.337.264.689)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(27.083.035.000)	(9.500.000.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(1.581.206.158.711)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**(17.607.073.583.057)**	**(15.421.837.264.689)**
Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	**(513.959.408.911)**	**(763.254.906.069)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) sebesar Rp249.295.497.158 atau 32,66 persen dari TA 2017.

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) sebesar Rp3,49 triliun

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *Escrow* dana subsidi dan reboisasi, Transito (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp3.498.307.513.555 dan Rp1.069.556.153.365, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.227.327.907.489	9.566.708.865.307
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	-	2.503.323.901.989
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	5.097.490.669	13.211.533.263
Penerimaan Persekot/Uang Muka	-	-
Penerimaan Transito Uang Persediaan	18.075.703.312.008	14.961.779.659.349
Penerimaan Escrow	8.073.039.013.608	5.552.252.110.595
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	-
Jumlah Penerimaan Transito	**40.381.167.723.774**	**32.597.276.070.503**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(14.205.270.777.282)	(9.531.270.619.075)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	-	(2.503.323.901.989)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(5.097.490.669)	(13.211.533.263)
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(18.125.613.831.673)	(14.933.035.752.216)
Pengeluaran Escrow	(4.546.878.110.595)	(4.546.878.110.595)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(36.882.860.210.219)**	**(31.527.719.917.138)**
Jumlah Transito (Neto)	**3.498.307.513.555**	**1.069.556.153.365**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp2.428.751.360.190 atau 227,08 persen dari TA 2017.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar minus Rp8,69 triliun

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp8.693.890.485.382 dan Rp9.363.511.838.634, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (*Audited*)	TA 2017 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	53.295.000.063.027	26.448.911.183.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	835.624.944.478.326	783.516.087.380.724
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	53.744.151.269.687	40.402.811.314.026
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	544.069.346.552.982	414.190.403.263.438
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.123.553.023.046	6.481.687.890.981
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	69.118.894.560.000	50.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**1.561.975.889.947.068**	**1.321.039.901.032.196**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga	(53.305.566.836.926)	(26.789.564.814.910)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(844.068.965.823.547)	(774.127.099.972.136)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(53.749.151.946.195)	(40.402.811.314.892)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(544.403.906.181.709)	(414.188.948.263.438)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(5.989.018.695.230)	(6.205.361.597.899)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(69.118.894.560.000)	(50.000.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**(1.570.635.504.043.607)**	**(1.311.713.785.963.275)**
Neto	**(8.659.614.096.539)**	**9.326.115.068.921**
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	30.108.166.079.323	22.198.068.982.679
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(30.108.454.135.910)	(22.193.398.493.197)
	(288.056.587)	**4.670.489.482**
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	122.635.141.076	613.692.610.196
Koreksi PenerimaanPemindahbukuan	(156.623.473.332)	(580.966.329.965)
	(33.988.332.256)	**32.726.280.231**
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	**(8.693.890.485.382)**	**9.363.511.838.634**

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp18.057.402.324.016 atau 192,85 persen dari TA 2017.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp330,58 miliar

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp330.588.756.176 dan minus Rp298.353.410.242, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**TA 2018 (*Audited*)**	**TA 2017 (*Audited*)**
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	14.571.295.116.506.261	12.585.894.182.296.760
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(14.570.964.527.750.085)	(12.586.192.535.707.002)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	**330.588.756.176**	**(298.353.410.242)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp628.942.166.418 atau 210,80 persen dari TA 2017.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp1.540,78 triliun

Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Nilai Ekuitas Awal tahun 2018 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2017 pada LKPP Tahun 2017 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit *LO Rp225,73 triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp225.730.103.236.335 dan Rp112.982.816.158.602. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp273,31 miliar

Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp273.314.147.911 dan Rp11.292.013.385. Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 terdiri dari penyesuaian atas SAL BLU pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp109.649.287, Kementerian Energi dan SDM sebesar Rp774.905.031, Kementerian Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp269.122.086.797, dan Kepolisian RI sebesar Rp3.307.506.796.

G.3.2. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Rp0

Tidak terdapat Penggunaan SAL pada TA 2018 dan TA 2017.

G.3.3. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA Rp1,50 triliun

Penyesuaian SiLPA TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.501.069.710.656 dan Rp473.817.522.854. Penyesuaian SiLPA TA 2018 sebesar Rp1.501.069.710.656 terdiri dari:

- Mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 sebesar Rp1.804.589.421.833 karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (null) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN.
- Penyesuaian karena pengembalian atas pendapatan TAYL yang menggunakan akun 311212 sebesar minus Rp303.519.711.177.

G.3.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp6,00 triliun

Koreksi Nilai Persediaan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp6.005.920.659.013 dan Rp5.823.271.175.506. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan TA 2018 yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.315.979.622.961 yang merupakan koreksi atas nilai persediaan akibat kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Kementerian Perdagangan sebesar Rp311.917.232.782 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp378.023.803.270.

G.3.5. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Tidak terdapat nilai Revaluasi Aset Tetap pada TA 2018 dan TA 2017.

G.3.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi minus Rp6,75 triliun

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp6.758.324.262.623 dan Rp76.515.960.269.354. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2018 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 dan koreksi atas nilai Aset Tetap yang baru ditemukan (barang berlebih) selama proses Penilaian Kembali BMN pada tahun 2018. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	(10.819.023.195.467)	49.905.188.759.638
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(3.426.376.338)	2.722.315.377.302
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	4.583.167.648.166	24.068.677.065.565
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	338.168.861.016	(14.706.277.361)
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(857.211.200.000)	(165.514.655.790)
Jumlah	**(6.758.324.262.623)**	**76.515.960.269.354**

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp10.819.023.195.467. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1) Kementerian PUPR	(11.812.370.199.101)
2) Kementerian Ristek dan Dikti	17.169.608.198.023
3) Kementerian Perhubungan	(4.526.865.415.541)
4) Kementerian Pertahanan	5.467.166.038.211
5) Kementerian ESDM	(4.976.383.107.428)
6) Kepolisian RI	(4.692.874.989.508)
7) Kementerian Perdagangan	(2.256.105.780.353)
8) Kementerian Sekretariat Negara	1.930.539.415.651
9) Kementerian Agama	(1.382.884.266.978)
10) Badan Intelijen Negara	(1.263.147.332.416)
11) Kementerian Hukum dan HAM	(1.021.258.742.015)
12) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(3.454.447.014.012)
Jumlah	**(10.819.023.195.467)**

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp3.426.376.338. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1. Kementerian Kesehatan	(1.398.127.874.925)
2. Badan Intelijen Negara	1.219.504.651.676
3. Kepolisian RI	561.880.213.885
4. Kementerian PUPR	(520.646.562.882)
5. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	133.963.195.908
Jumlah	**(3.426.376.338)**

3. Koreksi Aset Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp4.921.336.509.182, terdiri dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp4.583.167.648.166 dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp338.168.861.016. Koreksi tersebut berasal dari:
   a. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 sebesar Rp349.224.376.656. koreksi tersebut merupakan koreksi nilai pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut.
      1) Pengakuan perolehan aset tanpa pengeluaran dana dari denda keterlambatan penyelesaian *upgrade* Puri Casablanca sebesar Rp376.200.000.
      2) Pengakuan *capital gain* (selisih antara hasil penilaian wajar Aset Eks HTBI batch II dengan nilai penebusan) sebesar Rp348.847.715.000.
      3) Koreksi akumulasi penyusutan Aset Eks HTBI periode tahun sebelumnya sebesar Rp461.656.
   b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp14.839.762.070 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Tambah:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Batam	3.282.037.332
2. Aset Tetap Renovasi SKK Migas	640.853.913
3. Peralatan dan Mesin SKK Migas	140.449.828
4. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin SKK Migas	1.846.740.350
Koreksi Kurang:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Karimun	(12.352.343.619)
2. Peralatan dan Mesin	(8.345.252.314)
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.885.763)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.361.797)
Jumlah	**(14.839.762.070)**

Koreksi tersebut terdapat pada BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 dan SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 dengan rincian sebagai berikut.

- BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 terdiri dari:
  1) Koreksi tambah sebesar Rp3.282.037.332 merupakan koreksi tambah atas kurang catat Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan di Subsatker Karimun.
  2) Koreksi kurang sebesar minus Rp12.352.343.619 merupakan koreksi kurang atas KDP yang lebih disajikan pada subsatker BP Karimun.
- SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 terdiri dari:
  1) Koreksi tambah sebesar Rp2.628.044.091
     a) ATR sebesar Rp640.853.913 merupakan koreksi tambah saldo awal atas pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara yang dilaksanakan pada tahun 2017.
     b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.449.828 merupakan:
        - Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp20.824.000 atas alat kantor dan rumah tangga di Kantor Perwakilan Sumbagsel;
        - Koreksi tambah pencatatan nilai sebesar Rp119.625.828 atas aset peralatan dan mesin berupa pesawat tak berawak, CCTV, dan rak server di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Sumbagsel;
     c) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.846.740.350
  2) Koreksi kurang sebesar minus Rp8.397.499.874
     a) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp21.361.797
     b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp30.885.763
     c) Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp8.345.252.314 merupakan koreksi pencatatan dan reklasifikasi BMN/aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat dan lima Kantor Perwakilan.

c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp4.586.951.894.596 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp4.604.901.898.730. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai yang terdiri dari:
      - Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Tambah	Jumlah
1. Tanah	63.220.129.245
2. Harta benda Modal (HBM)	105.057.703.562.416
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	7.241.753.079
4. Material Persediaan (MP)	7.297.816.306.623
Jumlah	112.425.981.751.363

      - Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Kurang	Jumlah
1. Tanah	(130.956.993.619)
2. Harta Benda Modal (HBM)	(108.242.228.385.608)
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	(6.878.165.809)
4. Material Persediaan (MP)	(9.073.273.408.865)
Jumlah	(117.453.336.953.901)

) Koreksi Akumulasi penyusutan HBM dan HBI, yaitu:

Koreksi	Jumlah
1. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBM	(48.466.495.875.983)
2. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBI	(8.084.953.608)
3. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBM	58.104.505.660.183
4. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBI	2.332.270.677
Jumlah	9.632.257.101.268

2) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi aset BMN Idle merupakan Koreksi nilai Aset Lainnya Non Revaluasi terjadi karena terdapat BMN idle berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya pada KPKNL Metro yang tidak diketahui nilai perolehannya dan dilakukan penilaian pada Tahun 2018. Adapun nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp3.813.000;
3) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai Aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar minus Rp17.953.817.134.

4. Penyesuaian koreksi nilai Aset Non Revaluasi pada konsolidasian LKPP sebesar minus Rp857.211.200.000 yang merupakan koreksi pencatatan ganda Tanah antara Sekretariat Negara dengan TVRI sebesar Rp857.211.200.000.

G.3.7. Revaluasi Aset BUMN

Revaluasi Aset BUMN Rp0

Revaluasi Aset BUMN TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp2.171.167.258.138.

G.3.8. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya Rp91,21 triliun

Koreksi Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp91.219.517.945.695 dan Rp4.317.975.497.496. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2018 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	28.927.660.594.840	9.224.749.807.565
2. Koreksi Lainnya pada BUN	72.605.784.273.115	6.802.942.018.571
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(10.313.926.922.260)	(11.709.716.328.641)
Jumlah*	**91.219.517.945.695**	**4.317.975.497.495**

**selisih TA 2017 disebabkan pembulatan sebesar Rp1*

1. Koreksi Lainnya pada K/L

   Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp28.927.660.594.840 dan Rp9.224.749.807.565. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

a. Kementerian Keuangan sebesar Rp29.907.120.106.114, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Pajak sebesar Rp29.994.138.191.495, terutama dari koreksi tambah piutang perpajakan atas ketetapan pajak yang terbit periode sebelumnya yang baru dicatat pada periode berjalan.
b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar minus Rp561.253.997.976, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Minerba yang disebabkan koreksi piutang PNBP atas transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya.
c. Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp405.022.861.328, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Mabes TNI sebesar minus Rp692.782.088.026 terutama dari penyajian nilai pendapatan.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp72.605.784.273.115 dan Rp6.802.942.018.571. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a. 999.00 Kuasa BUN	11.059.805.369.942	11.056.774.037.490
b. 999.01 Pengelolaan Utang	(581.996.523.912)	(1.128.291.748.037)
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	3.259.483.730.332	-
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	44.292.061.973.245	7.677.326.743.059
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(37.540.106.239)	(19.692.179.601)
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(2.482.307.601.567)	(499.016.564.819)
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	(449.954.500)	(277.255.821)
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(288.200.235.546)	(816.393.850.063)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(12.441.749.435)	0
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	2.426.198.123.797	680.779.393.840
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	14.971.171.246.998	(9.143.224.596.255)
Jumlah	**72.605.784.273.115**	**6.802.942.019.571**

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp11.059.805.369.942 dan Rp11.056.774.037.490. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (*Audited*)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	74.501.106.222
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	(4.107.605.394.583)
Mutasi Kas BLU	14.026.122.161.970
Koreksi saldo Uang Muka Reksus	69.186.143.007
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Bantuan Internasional	1.000.000.000.000
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga dari Retur pada KPPN KPH	(1.986.575.236)
Koreksi dari pembulatan penutupan rekening	12
Koreksi Lainnya	550
Koreksi saldo Uang Muka dari rekening Khusus yang berasal dari backlog SP2D	(412.072.000)
Jumlah*	**12.181.120.369.942**
Penyesuaian Saldo Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang telah disajikan BA 999.03	**(1.121.315.000.000)**
Saldo Akhir Setelah Penyesuaian	**11.059.805.369.942**

**selisih disebabkan pembulatan sebesar Rp2*

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.501.106.222 terdiri dari Rp74.322.109.329 dikurang minus Rp178.996.893 yang merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disajikan di BA 999.06 dan 999.08. Eliminasi dilakukan tingkat konsolidasi LKBUN.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp581.996.523.912 dan minus Rp1.128.291.748.037. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Koreksi nilai pembayaran bunga pinjaman	-	22.575.157.665
Koreksi nilai posisi pinjaman per 31 Desember	-	(1.569.714.345.692)
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri	943.529.183	(943.529.181)
Koreksi nilai Utang Program	(39.766.798.366)	26.940.244.479
Koreksi nilai Utang Proyek	(530.777.632.700)	392.850.724.692
Koreksi Lainnya	(12.395.622.029)	-
Jumlah	**(581.996.523.912)**	**(1.128.291.748.037)**

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp3.259.483.730.332 dan Rp0. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp44.292.061.973.251 dan Rp7.677.326.743.059. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
KPA Dit PNBP DJA	(750.000.000)	42.303.675.087.650
BLU LPDB KUMKM	(71.521.952.645)	8.167.243.255
KPA Kemen BUMN	38.937.359.256.755	(39.604.449.323.202)
KPA DJKN	(892.437.514.807)	(261.338.851.460)
UAIP	7.285.019.959.916	6.886.135.618.475
BLU LMAN	609.278	(1.657.552.815.679)
KPA BKF	(1.000.000.000.000)	2.689.784.020
KPA PPKIM	34.391.614.748	
Jumlah	**44.292.061.973.245**	**7.677.326.743.059**

*selisih TA 2018 sebesar 6 rupiah karena pembulatan

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp37.540.106.239 dan minus Rp19.692.179.601. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 merupakan pencatatan NoD yang telah diakui sebagai piutang pada tahun 2015-2016, namun baru diterbitkan SP3 pada TA 2018. Pada tahun 2015-2016, NoD tersebut dicatat dengan menggunakan akun ekuitas sebagai kontra akun pencatatan akibat penerbitan SP3 pada TA 2018.

f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengeloaan TKDD pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp2.482.307.601.567 dan minus Rp499.016.564.819. Koreksi Lainnya pada BUN Pengeloaan TKDD sebesar minus Rp2.482.307.601.567 terdiri dari:

1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar minus Rp525.000.898.171;
2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKDD Lainnya menjadi Utang TKD sebesar minus Rp1.132.751.524.393;
3) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar minus Rp1.511.419.195.409;
4) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar Rp686.864.016.406.

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan BSBL pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp449.954.500 dan minus Rp277.255.821. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi sebesar Rp449.954.500 berasal dari koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BUN Pengelolaan BSBL yang telah dilikuidasi, yaitu Panwaslu Lampung tengah dan Panwaslu Tapanuli Utara.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp288.200.235.546 dan minus Rp816.393.850.063. Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL dengan rincian sebagai berikut.

KL	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Kementerian PUPR	(192.951)	(281.226.722.331)
Kementerian Perhubungan	-	45.048.930.697
Kementerian Pertanian	(107.775.632.886)	(25.004.513.540)
Kementerian Keuangan	(654.267.108.728)	(544.666.328.206)
Kementerian Koperasi dan UKM	473.842.699.020	(10.545.216.684)
Kementerian Sosial	(1)	-
Jumlah Koreksi Lainnya*	**(288.200.235.546)**	**(816.393.850.064)**

**selisih Rp1 TA 2017 karena pembulatan*

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp12.441.749.435 dan Rp0. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar minus Rp2.174.168.000 merupakan koreksi pencatatan utang terhadap tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar minus Rp10.267.581.435 merupakan koreksi pencatatan utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak Tahun 2017 setelah mendapat reviu dari BPKP senilai Rp10.267.581.435.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.426.198.123.797 dan Rp680.779.393.840. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

UBL	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) Otorita Asahan	(5.723.385.343)	(295.805.669)
2) Yayasan TMII	838.358.276	1.999.190.591
3) Yayasan Gedung Veteran	(1.209.977.642)	(2.476.808.735)
4) Baznas	(36.779.821.723)	46.468.140.771
5) Badan Wakaf Indonesia	(10.671.526)	(99.923.519)
6) BP Dana Abadi Umat	(3.327.847.280.828)	333.529.292.730
7) SKK Migas	353.220.510.951	(19.893.300.598)
8) OJK	1.292.651.713.003	321.548.608.269
9) Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	**2.426.198.123.797**	**680.779.393.840**

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp14.971.171.246.998 dan minus Rp9.143.224.596.255. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK sebesar Rp14.971.171.661.388 dikurangi penyesuaian saldo ekuitas awal LKBUN Tahun 2018 sebesar Rp414.390, yang merupakan eliminasi LK BUN Tahun 2017 *Audited* atas transaksi utang dan beban bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

UAPBUN TK	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(760.210.994.707)	(34.175.033.855)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	10.512.511.652.063	(8.761.423.371.207)
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	5.218.871.004.032	(347.626.191.192)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	**14.971.171.661.388**	**(9.143.224.596.254)***

**selisih Rp1 karena pembulatan*

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp1.121.136.417.497 dan minus Rp1.005.041.960.222. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 berasal dari penyesuaian Saldo Awal Ekuitas LKBUN Tahun 2018 dan penyesuaian mutasi Dana Cadangan Penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar sebesar minus Rp10.313.926.922.260 dan minus Rp11.709.716.328.641. Rincian penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Mutasi Kas Lainnya di KL dari Hibah pada BUN	4.107.605.394.583	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas dan Bank BLU pada LKBUN	(14.026.122.161.970)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP KL	(74.322.109.329)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP LKBUN	74.322.109.329	Pencatatan mutasi Kas BP KL pada BUN
Investasi ekuitas bersih PTNBH pada BUN 999 03	(380.490.944.611)	Eliminasi karena masih tercatat sebagai BMN di Kemristek Dikti
Reklasifikasi antara Pengesahan Hibah langsung dengan akun koreksi lainnya	(14.919.210.262)	Reklasifikasi akun
Jumlah	**(10.313.926.922.260)**	

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp513,17 miliar

Transaksi Antar Entitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp513.172.752.484 dan Rp184.315.553.360. Transaksi Antar Entitas TA 2018 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	9.024.058.360.711.860	7.667.629.414.023.180
Diterima Dari Entitas Lain	(9.053.140.743.836.210)	(7.689.683.255.327.710)
Pengesahan Hibah Langsung	27.997.866.283.268	19.920.061.337.943
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.192.390.439.978)	(325.761.880.913)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.246.918.430.584	-
Setoran Surplus BLU	-	2.496.676.098.011
Transfer Keluar	(297.074.388.438.771)	(204.411.874.523.524)
Transfer Masuk	297.617.550.041.741	204.559.055.826.370
Jumlah*	**513.172.752.494**	**184.315.553.357**

**selisih TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp10 dan Rp 3 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Atas pembentukan dana tersebut, BUN mencatat akun DKEL, sedangkan Kementerian Pertahanan mengakui aset berupa Dana lainnya. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* juga dicatat pada BUN. Pada konsolidasi LKPP, Dana lainnya yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dieliminasi dengan akun DDEL.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.024.058.360.711.860, DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210, pengesahan hibah langsung sebesar Rp27.997.866.283.268, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp2.192.390.439.978, dan Pengesahan Hibah Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp3.246.918.430.584.
   Nilai DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210 sudah termasuk jurnal penyesuaian eliminasi Dana lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.404.845.903.013. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar minus Rp29.988.850.484 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

   Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (*Audited*)	31 Desember 2017 (*Audited*)
a) Perbedaan pencatatan DDEL antara catatan KL dengan SiAP (UAPBUN AP)	(2.285.186.350)	132.492.464
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(27.582.431.851)	77.540.752.671
c) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	222	(294)
d) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(121.233.000)	(40.564.410.058)
e) Transaksi antar Entitas lainnya	495	25.415.727
Jumlah	**(29.988.850.484)**	**37.134.250.510**

   Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp29.988.850.484 di antaranya sebagai berikut.

   a) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp2.285.186.350. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih besar dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL).
   b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan posting rule ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp27.582.431.851.
   c) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp222.
   d) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp121.233.000. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.

e) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp495.

2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp297.074.388.438.771 dan Transfer Masuk sebesar Rp297.617.550.041.741. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp543.161.602.970. Selisih Transfer masuk antara lain disebabkan adanya jurnal *take out* revaluasi atas penilaian kembali BMN baik tahun 2017 maupun tahun 2018 pada satker konsolidasi KL, pencatatan aset TK dari BUN yang secara sistem belum bisa dicatat pada menu Transfer Masuk karena tidak ada ADK sehingga dicatat pada menu saldo awal, transfer keluar Aset Tetap Renovasi dimana pada satker penerima secara aplikasi SIMAK BMN tercatat sebagai aset definitif, dan transfer keluar Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah dimana pada satker penerima secara aplikasi tercatat sebagai aset tetap. Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(255.921.624.935.324)	297.420.632.160.350	41.499.007.225.026
BA BUN	(41.152.763.503.447)	196.917.881.391	(40.955.845.622.056)
Penyesuaian	-	-	-
Total LKPP	(297.074.388.438.771)	297.617.550.041.741	543.161.602.970

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada **Lampiran 30**.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas Rp0

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.679.256.307.076. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP, pada tahun 2018 reklasifikasi kewajiban ke Ekuitas disajikan di pos Koreksi lainnya.

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas Rp132,97 triliun

Penurunan Ekuitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp132.975.432.283.199 dan Rp26.148.095.077.709. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.7. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp1.407,80 triliun

Ekuitas Akhir pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp132.975.432.283.199.

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	**B.2.1**	**Pendapatan Negara**	**78**
Catatan	**B.2.1.1**	**Penerimaan Perpajakan**	**79**
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	78
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	80
Catatan	**B.2.1.2**	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**80**
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	81
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	81
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	82
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	84
Catatan	**B.2.1.3**	**Penerimaan Hibah**	**84**
Catatan	**B.2.2**	**Belanja Negara**	**85**
Catatan	**B.2.2.1**	**Belanja Pemerintah Pusat**	**85**
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	88
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	89
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	90
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	91
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	91
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	92
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	93
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	94
Catatan	**B.2.2.2**	**Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	**94**
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	95
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	97
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	98
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	98
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	98
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	99
Catatan	**B.2.3**	**Defisit Anggaran**	**99**
Catatan	**B.2.4**	**Pembiayaan**	**99**
Catatan	**B.2.4.1**	**Pembiayaan Dalam Negeri**	**99**
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	100
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	100
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	100
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	101
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	101
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	102
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	103
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	103
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	103
Catatan	**B.2.4.2**	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	**103**
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	103
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai	104

Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	104
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	104
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	104
Catatan	**B.2.5**	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	**106**
Catatan	**B.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**107**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	**C.1**	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**112**
Catatan	**C.2**	**Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**112**
Catatan	**C.3**	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**	**112**
Catatan	**C.4**	**Penyesuaian Pembukuan**	**113**
Catatan	**C.5**	**Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)**	**114**
Catatan	**C.6**	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**118**

NERACA

Catatan	**D.2.1**	**ASET**	**120**
Catatan	**D.2.1.1**	**Aset Lancar**	**120**
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	120
Catatan	D.2.1.1.1.1	Rekening Kas BUN di BI	120
Catatan	D.2.1.1.1.2	Rekening Pemerintah Lainnya	120
Catatan	D.2.1.1.1.3	Rekening Kas di KPPN	121
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	121
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	122
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	122
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	122
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas Pada BLU	123
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka dari Rekening BUN	124
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	125
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	125
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	126
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	126
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	126
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	128
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	137
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian LancarTagihan Tuntutan Ganti Rugi	137
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	137
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	138
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	138
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	139
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	139
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang TidakTertagih – Piutang Jangka Pendek	139
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	140
Catatan	**D.2.1.2**	**Investasi Jangka Panjang**	142
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	142
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	142
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	143
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	144
Catatan	D.2.1.2.1.4	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	144
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	145
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen PMN	145
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	146
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	147

Catatan	**D.2.1.3**	**Aset Tetap**	**148**
Catatan	D.2.1.3.1	Aset Tetap Tanah	149
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	149
Catatan	D.2.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	149
Catatan	D.2.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	150
Catatan	D.2.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	150
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	150
Catatan	**D.2.1.4**	**Piutang Jangka Panjang**	**150**
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	151
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	151
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	151
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	151
Catatan	D.2.1.4.5	Piutang Jangka Panjang Lainnya	151
Catatan	D.2.1.4.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	153
Catatan	**D.2.1.5**	**Aset Lainnya**	**154**
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	154
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	156
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	157
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	160
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	161
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	163
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	174
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	177
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	177
Catatan	**D.2.2**	**KEWAJIBAN**	**178**
Catatan	**D.2.2.1**	**Kewajiban Jangka Pendek**	**178**
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	179
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Biaya Pinjaman	187
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	188
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	190
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	191
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	192
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	192
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	192
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	193
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	193
Catatan	**D.2.2.2**	**Utang Jangka Panjang**	**194**
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	194
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	194
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	194
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	194
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	194
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	196
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	197
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	199
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	199
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	200
Catatan	**D.2.3**	**EKUITAS**	**202**
Catatan	**D.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**203**

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	**E.2.1**	**Kegiatan Operasional**	**247**
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	249
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	249
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	249
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	250
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	251
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	251
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	252
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	252
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	253
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	253
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	253
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	253
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	254
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	255
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	257
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	258
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	259
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	260
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	261
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	261
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	262
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	263
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	263
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	264
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	265
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	266
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	266
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	267
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	271
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	272
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	273
Catatan	**E.2.2**	**Kegiatan Non Operasional**	**274**
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	274
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	275
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	275
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	277
Catatan	**E.2.3**	**Pos Luar Biasa**	**278**
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	278
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	278

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	279
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	279
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	281

Catatan	F.2.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	282
Catatan	**F.2.1.1**	**Arus Kas Masuk**	**283**
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	283
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	283
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	284
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	284
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	284
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	284
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	285
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	285
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	286
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	286
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	286
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	287
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	287
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	287
Catatan	**F.2.1.2**	**Arus Kas Keluar**	**288**
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	288
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang	289
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	289
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	290
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	290
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	291
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	291
Catatan	F.2.1.2.8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	292
Catatan	F.2.1.2.9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	292
Catatan	F.2.1.2.10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	292
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	292
Catatan	F.2.1.2.12	Transfer Dana Alokasi Khusus	293
Catatan	F.2.1.2.13	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	293
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	293
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	294
Catatan	F.2.2	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	294
Catatan	**F.2.2.1**	**Arus Kas Masuk**	**294**
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	294
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	294
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	295
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Investasi Pemerintah	295
Catatan	**F.2.2.2**	**Arus Kas Keluar**	**295**
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	295
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	295
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	295
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	296
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	296
Catatan	F.2.3	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	296
Catatan	**F.2.3.1**	**Arus Kas Masuk**	**297**
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	297
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	298
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	298
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	298

Catatan	**F.2.3.2**	**Arus Kas Keluar**	**299**
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	299
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	299
Catatan	F.2.3.2.3	Pengembalian Pinjaman	299
Catatan	**F.2.4**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**299**
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	300
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	301
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	302
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	303

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	**G.1**	**Ekuitas Awal**	**304**
Catatan	**G.2**	**Surplus/Defisit LO**	**304**
Catatan	**G.3**	**Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas**	**304**
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	304
Catatan	G.3.2	Penggunaan SAL	304
Catatan	G.3.3	Penyesuaian SiLPA	304
Catatan	G.3.4	Koreksi Nilai Persediaan	305
Catatan	G.3.5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	305
Catatan	G.3.6	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	305
Catatan	G.3.7	Revaluasi Aset BUMN	308
Catatan	G.3.8	Koreksi Lain-lain	308
Catatan	**G.4**	**Transaksi Antar Entitas**	**314**
Catatan	**G.5**	**Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas**	**316**
Catatan	**G.6**	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**316**
Catatan	**G.7**	**Ekuitas Akhir**	**316**

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	BantuanPemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea danCukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor *Production Sharing*
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam

NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*

SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan HariTua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dollar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat



LAMPIRAN

LKPP TAHUN 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2019

DAFTAR ISI

1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2018 ..... L.1

2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 ..... L.14

3 Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 ..... L.29

4 Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Per 31 Desember 2018 ..... L.83

5 Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.84

6 Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.91

7 Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.93

8 Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2018 ..... L.96

9 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.100

10 Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2018 ..... L.103

11 Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2018 ..... L.104

12 Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.111

13 Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.113

14 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2018 ..... L.116

15 Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2018 ..... L.122

16 Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2018 ..... L.124

17 Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2018 ..... L.125

18 Laporan Penghasilan Komprehensif LPS Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.127

19 Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.128

20 TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.145

21 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.148

22 Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2018 ..... L.151

23 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018 ..... L.164

DAFTAR ISI

24 Daftar BMN Eks BMN *Idle* yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2018 ..... L.168

25 Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ..... L.170

26 Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2018 ..... L.173

27 Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2018 ..... L.179

28 Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2018 ..... L.184

29 Laporan Penilaian Kembali BMN untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 ..... L.186

30 Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2018 ..... L.198

31 Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2018

Lampiran 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2018

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat TA 2018
2. Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN

1 Januari-31 Desember 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4	**PENDAPATAN NEGARA**	**1.894.720.327.977.000**	**1.943.674.876.878.800**	**102,58%**	**1.666.375.912.658.080**	**277.298.964.220.711**	**16,64%**
41	**PENDAPATAN PERPAJAKAN**	**1.618.095.493.162.000**	**1.518.789.777.151.030**	**93,86%**	**1.343.529.843.798.510**	**175.259.933.352.520**	**13,04%**
411	**PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI**	**1.579.395.493.162.000**	**1.472.907.964.370.350**	**93,26%**	**1.304.316.269.228.040**	**168.591.695.142.313**	**12,93%**
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**855.133.462.162.000**	**749.977.029.683.808**	**87,70%**	**646.793.472.957.381**	**103.183.556.726.427**	**15,95%**
41111	**Pendapatan PPh Migas**	**38.134.050.000.000**	**64.699.145.451.922**	**169,66%**	**50.315.750.744.783**	**14.383.394.707.139**	**28,59%**
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	15.402.410.000.000	26.549.508.906.106	172,37%	16.599.430.743.163	9.950.078.162.943	59,94%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	22.731.640.000.000	38.115.852.120.909	167,68%	33.711.719.453.816	4.404.132.667.093	13,06%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	33.784.424.907	-	4.600.547.804	29.183.877.103	634,36%
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**816.999.412.162.000**	**675.165.778.735.455**	**82,64%**	**587.543.573.276.305**	**87.622.205.459.150**	**14,91%**
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	164.932.930.000.000	134.914.657.190.069	81,80%	117.764.553.599.746	17.150.103.590.323	14,56%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	12.281.980.257.000	18.008.015.831.134	146,62%	16.172.671.971.729	1.835.343.859.405	11,35%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	58.323.576.427.000	54.723.505.867.454	93,83%	43.156.722.093.470	11.566.783.773.984	26,80%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	40.392.710.597.000	39.739.217.510.968	98,38%	34.005.879.655.650	5.733.337.855.318	16,86%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.209.410.000.000	9.406.726.317.202	42,35%	7.806.580.852.307	1.600.145.464.895	20,50%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	269.356.583.712.000	252.131.439.879.614	93,61%	206.550.829.248.758	45.580.610.630.856	22,07%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	61.181.086.370.000	50.638.032.804.063	82,77%	43.691.062.125.980	6.946.970.678.083	15,90%
411128	Pendapatan PPh Final	173.363.863.788.000	115.462.258.335.252	66,60%	106.310.936.330.643	9.151.322.004.609	8,61%
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	14.957.271.011.000	141.924.999.699	0,95%	12.084.337.398.022	-11.942.412.398.323	-98,83%
41113	**Pendapatan PPh Fiskal**	**0**	**349.905.982**	-	**349.728.807**	**177.175**	**0,05%**
411131	Pendapatan PPh Fiskal	0	349.905.982	-	349.728.807	177.175	0,05%
41114	**Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah**	**0**	**10.111.755.590.449**	-	**8.933.799.207.486**	**1.177.956.382.963**	**13,19%**
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	12.987.522	-	132.161.316	-119.173.794	-90,17%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167.200	-	219.978	-52.778	-23,99%
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	0	-2.462.000	-	0	-2.462.000	
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	503.900.818	-	614.833.045	-110.932.227	-18,04%
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	1.892.891.197.764	-	1.702.566.558.147	190.324.639.617	11,18%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0	8.218.348.183.000	-	7.230.485.435.000	987.862.748.000	13,66%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1.616.145	-	0	1.616.145	
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai**	**541.801.130.000.000**	**537.267.909.259.264**	**99,16%**	**480.724.607.483.756**	**56.543.301.775.508**	**11,76%**
41121	**Pendapatan PPN**	**524.843.980.000.000**	**520.390.211.070.339**	**99,15%**	**463.528.437.616.523**	**56.861.773.453.816**	**12,27%**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	361.296.910.000.000	333.921.320.457.564	92,42%	314.342.826.531.220	19.578.493.926.344	6,23%
411212	Pendapatan PPN Impor	163.395.980.000.000	186.400.182.247.898	114,08%	149.034.796.849.454	37.365.385.398.444	25,07%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	151.090.000.000	68.708.364.877	45,48%	150.814.235.849	-82.105.870.972	-54,44%
41122	**Pendapatan PPnBM**	**16.957.150.000.000**	**16.877.698.188.925**	**99,53%**	**17.196.169.867.233**	**-318.471.678.308**	**-1,85%**
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.212.000.000.000	12.794.658.786.886	104,77%	13.292.538.563.625	-497.879.776.739	-3,75%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4.700.100.000.000	4.108.005.284.889	87,40%	3.796.354.314.090	311.650.970.799	8,21%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	45.050.000.000	-24.965.882.850	-55,42%	107.276.989.518	-132.242.872.368	-123,27%
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**17.369.101.000.000**	**19.444.913.884.758**	**111,95%**	**16.770.346.937.156**	**2.674.566.947.602**	**15,95%**
41131	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**17.369.101.000.000**	**19.444.913.884.758**	**111,95%**	**16.770.346.937.156**	**2.674.566.947.602**	**15,95%**
411311	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	396.446.920	-	0	396.446.920	
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.615.454.905.000	2.188.577.469.904	135,48%	2.175.377.454.058	13.200.015.846	0,61%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	335.880.731.000	756.237.733.965	225,15%	595.957.370.926	160.280.363.039	26,89%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.917.414.364.000	1.718.416.162.627	89,62%	1.480.177.403.749	238.238.758.878	16,10%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	13.500.351.000.000	14.381.978.062.129	106,53%	12.230.011.698.753	2.151.966.363.376	17,60%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	313.275.381.204	-	253.462.867.931	59.812.513.273	23,60%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	86.032.628.009	-	35.360.141.739	50.672.486.270	143,30%
4114	**Pendapatan BPHTB**	**0**	**32.748.454**	-	**1.216.911.547**	**-1.184.163.093**	**-97,31%**
41141	**Pendapatan BPHTB**	**0**	**32.748.454**	-	**1.216.911.547**	**-1.184.163.093**	**-97,31%**
411411	Pendapatan BPHTB	0	32.748.454	-	1.216.911.547	-1.184.163.093	-97,31%
4115	**Pendapatan Cukai**	**155.400.000.000.000**	**159.588.552.586.225**	**102,70%**	**153.288.149.392.121**	**6.300.403.194.104**	**4,11%**
41151	**Pendapatan Cukai**	**155.400.000.000.000**	**159.588.552.586.225**	**102,70%**	**153.288.149.392.121**	**6.300.403.194.104**	**4,11%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	148.230.000.000.000	152.941.410.762.377	103,18%	147.719.216.343.096	5.222.194.419.281	3,54%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	170.000.000.000	139.235.597.580	81,90%	147.122.735.280	-7.887.137.700	-5,36%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.500.000.000.000	6.418.775.169.760	98,75%	5.567.468.557.500	851.306.612.260	15,29%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	76.696.556.557	-	-158.239.602.120	234.936.158.677	
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	500.000.000.000	12.434.499.951	2,49%	12.581.358.365	-146.858.414	-1,17%
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**9.691.800.000.000**	**6.629.526.207.843**	**68,40%**	**6.738.475.546.078**	**-108.949.338.235**	**-1,62%**
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**9.691.800.000.000**	**6.139.864.676.421**	**63,35%**	**6.098.195.197.160**	**41.669.479.261**	**0,68%**
411611	Pendapatan Bea Meterai	0	1.470.393.848.442	-	1.367.164.381.348	103.229.467.094	7,55%
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	9.691.800.000.000	3.985.445.194.453	41,12%	3.715.003.305.722	270.441.888.731	7,28%
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	656.409.788.263	-	982.575.599.538	-326.165.811.275	-33,19%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	27.615.845.263	-	33.451.910.552	-5.836.065.289	-17,45%
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	**0**	**489.661.531.422**	-	**640.280.348.918**	**-150.618.817.496**	**-23,52%**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	-14.087.087.862	-	406.970.758.069	-421.057.845.931	-103,46%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	499.442.551.458	-	232.614.159.194	266.828.392.264	114,71%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	1.166.073.449	-	493.203.415	672.870.034	136,43%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	3.139.994.377	-	202.228.240	2.937.766.137	1452,70%
412	**PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**	**38.700.000.000.000**	**45.881.812.780.678**	**118,56%**	**39.213.574.570.471**	**6.668.238.210.207**	**17,00%**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**35.700.000.000.000**	**39.116.746.986.751**	**109,57%**	**35.066.181.439.852**	**4.050.565.546.899**	**11,55%**
41211	**Pendapatan Bea Masuk**	**35.700.000.000.000**	**38.689.558.007.910**	**108,37%**	**34.821.385.171.852**	**3.868.172.836.058**	**11,11%**
412111	Pendapatan Bea Masuk	35.700.000.000.000	37.407.985.838.439	104,78%	33.495.272.858.547	3.912.712.979.892	11,68%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	0	743.750	-	0	743.750	
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	274.134.580.810	-	582.649.947.955	-308.515.367.145	-52,95%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	625.126.712.146	-	457.334.656.735	167.792.055.411	36,69%
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	0	19.682.000	-	0	19.682.000	
412116	Pendapatan BM-DTP	0	370.614.635.480	-	280.946.213.728	89.668.421.752	31,92%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	11.675.815.285	-	5.181.494.887	6.494.320.398	125,34%
41212	**Pendapatan Bea Masuk Tindakan**	**0**	**427.188.978.841**	-	**244.796.268.000**	**182.392.710.841**	**74,51%**
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	247.390.857.841	-	182.509.916.000	64.880.941.841	35,55%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan	0	44.227.000	-	2.105.000	42.122.000	2001,05%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	179.753.894.000	-	62.284.247.000	117.469.647.000	188,60%
4122	**Pendapatan Bea Keluar**	**3.000.000.000.000**	**6.765.065.793.927**	**225,50%**	**4.147.393.130.619**	**2.617.672.663.308**	**63,12%**
41221	**Pendapatan Bea Keluar**	**3.000.000.000.000**	**6.765.065.793.927**	**225,50%**	**4.147.393.130.619**	**2.617.672.663.308**	**63,12%**
412211	Pendapatan Bea Keluar	3.000.000.000.000	6.763.961.349.944	225,47%	4.137.811.636.557	2.626.149.713.387	63,47%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	1.079.891.983	-	9.287.233.578	-8.207.341.595	-88,37%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	24.552.000	-	294.260.484	-269.708.484	-91,66%
42	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	**275.427.969.415.000**	**409.320.239.488.446**	**148,61%**	**311.216.253.857.085**	**98.103.985.631.361**	**31,52%**
421	**PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM**	**103.674.868.751.000**	**180.592.649.823.641**	**174,19%**	**111.132.042.413.912**	**69.460.607.409.729**	**62,50%**
4211	**PENDAPATAN MINYAK BUMI**	**59.582.710.000.000**	**101.486.695.315.900**	**170,33%**	**58.203.042.976.236**	**43.283.652.339.664**	**74,37%**
42111	**Pendapatan Minyak Bumi**	**59.582.710.000.000**	**101.486.695.315.900**	**170,33%**	**58.203.042.976.236**	**43.283.652.339.664**	**74,37%**
421111	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664	74,37%
4212	**PENDAPATAN GAS BUMI**	**20.766.330.000.000**	**41.302.551.779.459**	**198,89%**	**23.639.900.993.613**	**17.662.650.785.846**	**74,72%**
42121	**Pendapatan Gas Bumi**	**20.766.330.000.000**	**41.302.551.779.459**	**198,89%**	**23.639.900.993.613**	**17.662.650.785.846**	**74,72%**
421211	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846	74,72%
4213	**PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**	**17.858.522.076.000**	**30.313.666.621.680**	**169,74%**	**23.763.165.037.383**	**6.550.501.584.297**	**27,57%**
42132	**Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara**	**769.823.433.000**	**545.625.001.566**	**70,88%**	**515.832.971.394**	**29.792.030.172**	**5,78%**
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi	393.795.083.000	103.356.976.462	26,25%	515.832.971.394	-412.475.994.932	-79,96%
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	376.028.350.000	442.247.155.183	117,61%	0	442.247.155.183	
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat	0	20.869.921	-	0	20.869.921	
42133	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara**	**17.088.698.643.000**	**29.768.041.620.114**	**174,20%**	**23.247.332.065.989**	**6.520.709.554.125**	**28,05%**
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	13.765.769.080.000	21.854.960.527.170	158,76%	23.247.332.065.989	-1.392.371.538.819	-5,99%
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	1.453.562.299.000	2.474.665.328.788	170,25%	0	2.474.665.328.788	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	1.038.932.533.000	3.014.269.148.774	290,13%	0	3.014.269.148.774	
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	36.651.347.000	89.309.735.873	243,67%	0	89.309.735.873	
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	470.575.384.000	1.431.581.482.578	304,22%	0	1.431.581.482.578	
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	305.520.000.000	687.472.008.752	225,02%	0	687.472.008.752	
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	17.688.000.000	215.783.388.179	1219,94%	0	215.783.388.179	
4214	**PENDAPATAN KEHUTANAN**	**4.166.711.459.000**	**4.760.407.698.602**	**114,25%**	**4.101.918.540.911**	**658.489.157.691**	**16,05%**
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**1.858.699.022.000**	**1.982.019.914.364**	**106,63%**	**1.728.935.988.957**	**253.083.925.407**	**14,64%**
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.858.699.022.000	1.982.019.914.364	106,63%	1.728.935.988.957	253.083.925.407	14,64%
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**921.026.787.000**	**1.141.414.248.868**	**123,93%**	**918.354.417.067**	**223.059.831.801**	**24,29%**
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	921.026.787.000	1.141.414.248.868	123,93%	918.354.417.067	223.059.831.801	24,29%
42143	**Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)**	**205.912.809.000**	**101.732.195.506**	**49,41%**	**40.477.518.350**	**61.254.677.156**	**151,33%**
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	205.912.809.000	101.732.195.506	49,41%	40.477.518.350	61.254.677.156	151,33%
42144	**Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan**	**1.181.072.841.000**	**1.535.241.339.864**	**129,99%**	**1.414.055.724.537**	**121.185.615.327**	**8,57%**
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.181.072.841.000	1.535.241.339.864	129,99%	1.413.168.383.981	122.072.955.883	8,64%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			-	808.534.746	-808.534.746	-100,00%
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih			-	78.805.810	-78.805.810	-100,00%
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan			-	94.892.000	-94.892.000	-100,00%
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan			-	94.892.000	-94.892.000	-100,00%
4215	**PENDAPATAN PERIKANAN**	**600.000.810.000**	**448.751.885.603**	**74,79%**	**491.033.529.369**	**-42.281.643.766**	**-8,61%**
42152	**Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan**	**23.125.810.000**	**6.274.976.907**	**27,13%**	**491.033.529.369**	**-484.758.552.462**	**-98,72%**
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	22.902.110.000	6.023.274.817	26,30%	491.033.529.369	-485.010.254.552	-98,77%
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	223.700.000	251.702.090	112,52%	0	251.702.090	
42153	**Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan**	**576.875.000.000**	**442.476.908.696**	**76,70%**	**0**	**442.476.908.696**	
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	576.875.000.000	442.476.908.696	76,70%	0	442.476.908.696	
4216	**PENDAPATAN PANAS BUMI**	**700.594.406.000**	**2.280.576.522.397**	**325,52%**	**932.981.336.400**	**1.347.595.185.997**	**144,44%**
42162	**Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi**	**681.365.153.000**	**2.252.646.884.360**	**330,61%**	**909.162.988.429**	**1.343.483.895.931**	**147,77%**
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	681.365.153.000	2.252.646.884.360	330,61%	909.162.988.429	1.343.483.895.931	147,77%
42163	**Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi**	**18.350.429.000**	**26.437.236.602**	**144,07%**	**22.320.119.055**	**4.117.117.547**	**18,45%**
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	17.309.514.000	25.409.429.618	146,79%	22.320.119.055	3.089.310.563	13,84%
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	1.040.915.000	1.027.806.984	98,74%	0	1.027.806.984	
42164	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi**	**878.824.000**	**1.492.401.435**	**169,82%**	**1.498.228.916**	**-5.827.481**	**-0,39%**
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	878.824.000	1.492.401.435	169,82%	1.498.228.916	-5.827.481	-0,39%
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**44.695.387.920.000**	**45.060.521.375.969**	**100,82%**	**43.904.217.111.673**	**1.156.304.264.296**	**2,63%**
4221	**PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN**	**44.695.387.920.000**	**45.060.521.375.969**	**100,82%**	**43.904.217.111.673**	**1.156.304.264.296**	**2,63%**
42213	**Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN**	**43.788.577.920.000**	**44.602.870.375.969**	**101,86%**	**43.904.217.111.673**	**698.653.264.296**	**1,59%**
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	13.923.320.000.000	16.267.751.186.649	116,84%	12.460.928.189.608	3.806.822.997.041	30,55%
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	29.865.257.920.000	28.335.119.189.320	94,88%	31.443.288.922.065	-3.108.169.732.745	-9,89%
42214	**Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan**	**906.810.000.000**	**457.651.000.000**	**50,47%**	**0**	**457.651.000.000**	
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	906.810.000.000	457.651.000.000	50,47%	0	457.651.000.000	
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**43.304.597.653.000**	**55.093.058.250.618**	**127,22%**	**47.345.432.555.948**	**7.747.625.694.670**	**16,36%**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**41.255.596.544.000**	**48.813.837.134.982**	**118,32%**	**44.250.619.466.173**	**4.563.217.668.809**	**10,31%**
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat**	**25.241.568.040.000**	**28.739.609.164.736**	**113,86%**	**25.499.135.736.497**	**3.240.473.428.239**	**12,71%**
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	13.216.007.167.000	13.468.152.546.364	101,91%	12.514.890.768.413	953.261.777.951	7,62%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	8.666.436.803.000	11.053.330.293.568	127,54%	9.342.558.845.242	1.710.771.448.326	18,31%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	290.997.229.000	440.382.485.600	151,34%	374.488.613.094	65.893.872.506	17,60%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	237.343.000	70.022.700	29,50%	997.359.907	-927.337.207	-92,98%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	253.621.368.000	301.504.866.353	118,88%	205.551.198.212	95.953.668.141	46,68%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.329.409.056.000	2.569.200.853.792	110,29%	2.469.169.897.608	100.030.956.184	4,05%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	39.860.340.000	256.894.230	0,64%	521.558.428	-264.664.198	-50,74%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	444.998.734.000	13.961.044.004	3,14%	578.022.735	13.383.021.269	2315,31%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	892.750.158.125	-	590.379.472.858	302.370.685.267	51,22%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
42412	**Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu**	**1.946.622.051.000**	**1.507.220.557.604**	**77,43%**	**1.173.415.343.107**	**333.805.214.497**	**28,45%**
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.522.343.342.000	1.257.203.387.695	82,58%	976.117.914.519	281.085.473.176	28,80%
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0	464.463.334	-	870.631.200	-406.167.866	-46,65%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	424.278.709.000	249.552.706.575	58,82%	196.426.797.388	53.125.909.187	27,05%
42413	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**	**13.712.304.703.000**	**17.622.794.124.394**	**128,52%**	**17.327.970.928.406**	**294.823.195.988**	**1,70%**
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.789.323.000	4.331.943.877	114,32%	7.192.215.956	-2.860.272.079	-39,77%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	325.117.690.000	463.567.036.550	142,58%	454.883.174.310	8.683.862.240	1,91%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	38.647.690.000	23.025.867.119	59,58%	26.685.223.399	-3.659.356.280	-13,71%
424136	Pendapatan Investasi	30.000.000.000	867.305.481.511	2891,02%	754.207.224.761	113.098.256.750	15,00%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	11.507.000.000.000	14.413.921.271.119	125,26%	14.277.243.703.515	136.677.567.604	0,96%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.807.750.000.000	1.850.642.524.218	102,37%	1.807.759.386.465	42.883.137.753	2,37%
42414	**Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang**	**355.101.750.000**	**944.213.288.248**	**265,90%**	**250.097.458.163**	**694.115.830.085**	**277,54%**
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	355.101.750.000	944.213.288.248	265,90%	250.097.458.163	694.115.830.085	277,54%
4242	**Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum**	**11.488.695.000**	**90.948.165.044**	**791,63%**	**174.211.852.608**	**-83.263.687.564**	**-47,79%**
42421	**Pendapatan Hibah Terikat - Uang**	**9.309.000.000**	**50.461.073.849**	**542,07%**	**150.380.967.979**	**-99.919.894.130**	**-66,44%**
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.966.000.000	2.269.722.309	115,45%	508.500.000	1.761.222.309	346,36%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.050.000.000	12.213.064.521	1163,15%	10.803.345.551	1.409.718.970	13,05%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	6.293.000.000	28.728.335.036	456,51%	137.175.876.053	-108.447.541.017	-79,06%
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	5.445.026.983	-	0	5.445.026.983	
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang	0	1.804.925.000	-	1.893.246.375	-88.321.375	-4,67%
42422	**Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang**	**2.179.695.000**	**40.487.091.195**	**1857,47%**	**23.830.884.629**	**16.656.206.566**	**69,89%**
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.939.695.000	31.198.150.000	1608,40%	23.029.134.629	8.169.015.371	35,47%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	240.000.000	9.277.265.695	3865,53%	801.750.000	8.475.515.695	1057,13%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang	0	11.675.500	-	0	11.675.500	
4243	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**545.882.124.000**	**1.556.582.772.589**	**285,15%**	**578.904.594.476**	**977.678.178.113**	**168,88%**
42431	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**545.882.124.000**	**1.556.582.772.589**	**285,15%**	**578.904.594.476**	**977.678.178.113**	**168,88%**
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	24.970.290.000	69.088.747.701	276,68%	63.202.955.819	5.885.791.882	9,31%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	414.603.018.000	1.302.943.551.461	314,26%	441.892.939.535	861.050.611.926	194,86%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	106.308.816.000	184.550.473.427	173,60%	73.808.699.122	110.741.774.305	150,04%
4244	**Pendapatan dari Alokasi APBN**	**0**	**235.873.713.666**	-	**0**	**235.873.713.666**	
42442	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**0**	**235.873.713.666**	-	**0**	**235.873.713.666**	
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	191.521.434.832	-	0	191.521.434.832	
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	44.352.278.834	-	0	44.352.278.834	
4249	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.491.630.290.000**	**4.395.816.464.337**	**294,70%**	**2.341.696.642.691**	**2.054.119.821.646**	**87,72%**
42491	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.491.630.290.000**	**4.182.323.918.597**	**280,39%**	**2.333.457.970.246**	**1.848.865.948.351**	**79,23%**
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.491.630.290.000	4.024.154.940.912	269,78%	2.311.074.174.733	1.713.080.766.179	74,12%
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	0	543.344.744	-	143.730.000	399.614.744	278,03%
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	0	2.844.811.716	-	0	2.844.811.716	
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26.951.018.124	-	531.751.312	26.419.266.812	4968,35%
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	768.647.952	-	145.263.871	623.384.081	429,14%
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0	176.411.569	-	0	176.411.569	
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	126.884.743.580	-	21.563.050.330	105.321.693.250	488,44%
42492	**Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa**	**0**	**212.846.139.940**	-	**8.233.372.445**	**204.612.767.495**	**2485,16%**
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	4.349.166.626	-	370.024.000	3.979.142.626	1075,37%
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	18.550.007.884	-	838.244.772	17.711.763.112	2112,96%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	170.834.730.030	-	6.789.074.673	164.045.655.357	2416,32%
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	9.240.417.760	-	187.076.000	9.053.341.760	4839,39%
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	4.130.945.157	-	48.653.000	4.082.292.157	8390,63%
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5.740.872.483	-	300.000	5.740.572.483	1913524,16%
42493	**Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU**	**0**	**646.405.800**	-	**5.300.000**	**641.105.800**	**12096,34%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	0	535.368.000	-	0	535.368.000	
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	111.037.800	-	5.300.000	105.737.800	1995,05%
425	**PENDAPATAN PNBP LAINNYA**	**83.753.115.091.000**	**128.574.010.038.218**	**153,52%**	**108.834.561.775.552**	**19.739.448.262.666**	**18,14%**
4251	**Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**23.313.211.604.000**	**47.238.075.748.023**	**202,62%**	**26.847.745.503.721**	**20.390.330.244.302**	**75,95%**
42511	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang**	**15.000.615.504.000**	**22.768.752.720.908**	**151,79%**	**17.395.210.236.393**	**5.373.542.484.515**	**30,89%**
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	14.236.751.637.000	19.313.686.076.030	135,66%	16.856.247.876.611	2.457.438.199.419	14,58%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	53.075.390.000	65.938.056.673	124,23%	81.739.559.943	-15.801.503.270	-19,33%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	18.826.000	1.385.489.934	7359,45%	1.635.891.000	-250.401.066	-15,31%
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	702.967.810.000	3.355.203.918.148	477,29%	404.568.064.997	2.950.635.853.151	729,33%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	7.801.841.000	32.539.180.123	417,07%	51.018.843.842	-18.479.663.719	-36,22%
42512	**Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN**	**169.586.181.000**	**250.827.244.737**	**147,91%**	**196.631.066.809**	**54.196.177.928**	**27,56%**
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	131.773.000	22.124.812.449	16790,10%	1.011.857.500	21.112.954.949	2086,55%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.183.457.000	76.098.520.939	929,91%	22.369.347.651	53.729.173.288	240,19%
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	7.824.348.000	17.542.553.524	224,20%	17.481.104.672	61.448.852	0,35%
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	135.365.000	-	114.500	135.250.500	118122,71%
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0	7.130.000	-	0	7.130.000	
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	153.446.603.000	134.918.862.825	87,93%	155.768.642.486	-20.849.779.661	-13,39%
42513	**Pendapatan dari Pemanfaatan BMN**	**941.185.091.000**	**1.575.471.215.636**	**167,39%**	**503.190.153.764**	**1.072.281.061.872**	**213,10%**
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	291.910.659.000	1.521.599.996.942	521,26%	423.279.205.010	1.098.320.791.932	259,48%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.760.618.000	8.952.903.922	508,51%	14.357.024.388	-5.404.120.466	-37,64%
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.000.000	768.092.244	1024,12%	2.365.920.600	-1.597.828.356	-67,54%
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18.022.487.087	-	7.949.500.447	10.072.986.640	126,71%
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	98.280.000	-	1.000	98.279.000	9827900,00%
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360.047.373	-	0	360.047.373	
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	0	2.125.500	-	0	2.125.500	
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	647.438.814.000	25.667.282.568	3,96%	55.238.502.319	-29.571.219.751	-53,53%
42514	**Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang**	**90.000.000**	**573.611.868.078**	**637346,52%**	**615.775.120.447**	**-42.163.252.369**	**-6,85%**
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	0	497.482.084.878	-	401.644.630.034	95.837.454.844	23,86%
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	0	26.515.283.300	-	586.695.000	25.928.588.300	4419,43%
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	0	1.643.589.980	-	2.282.433.000	-638.843.020	-27,99%
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	0	787.691.588	-	1.121.249.463	-333.557.875	-29,75%
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0	40.696.464.000	-	2.857.517.700	37.838.946.300	1324,19%
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	90.000.000	6.486.754.332	7207,50%	207.282.595.250	-200.795.840.918	-96,87%
42515	**Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**70.687.234.000**	**62.256.481.499**	**88,07%**	**0**	**62.256.481.499**	
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	70.687.234.000	62.256.481.499	88,07%	0	62.256.481.499	
42516	**Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas**	**6.181.047.594.000**	**20.655.579.279.504**	**334,18%**	**6.979.420.198.806**	**13.676.159.080.698**	**195,95%**
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.113.980.000.000	7.499.912.603.765	122,67%	6.239.688.148.016	1.260.224.455.749	20,20%
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	67.067.594.000	13.155.666.675.739	19615,53%	739.732.050.790	12.415.934.624.949	1678,44%
42517	**Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**950.000.000.000**	**1.351.576.937.661**	**142,27%**	**1.157.518.727.502**	**194.058.210.159**	**16,77%**
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	678.242.124.000	1.072.659.813.466	158,15%	862.796.192.354	209.863.621.112	24,32%
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	271.757.876.000	278.602.555.395	102,52%	294.722.535.148	-16.119.979.753	-5,47%
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	314.568.800	-	0	314.568.800	
4252	**PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM**	**14.658.093.518.000**	**17.768.155.575.932**	**121,22%**	**17.128.594.138.373**	**639.561.437.559**	**3,73%**
42521	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum**	**3.258.557.809.000**	**3.508.128.693.239**	**107,66%**	**1.891.930.718.910**	**1.616.197.974.329**	**85,43%**
425211	Pendapatan Paspor	1.000.154.900.000	1.097.623.900.000	109,75%	1.887.808.918.910	-790.185.018.910	-41,86%
425212	Pendapatan Visa	127.930.084.000	222.629.046.105	174,02%	0	222.629.046.105	
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	708.412.250.000	521.131.100.000	73,56%	0	521.131.100.000	
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	90.145.850.000	284.913.445.000	316,06%	0	284.913.445.000	
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	497.388.650.000	740.179.950.000	148,81%	0	740.179.950.000	
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	193.531.550.000	116.545.148.967	60,22%	0	116.545.148.967	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	179.340.525.000	26.693.152.424	14,88%	0	26.693.152.424	
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	461.654.000.000	498.294.215.005	107,94%	0	498.294.215.005	
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	118.735.738	-	4.121.800.000	-4.003.064.262	-97,12%
42522	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri**	**489.608.655.000**	**801.858.988.566**	**163,78%**	**743.766.318.732**	**58.092.669.834**	**7,81%**
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	150.917.830.000	346.182.363.003	229,38%	452.259.609.518	-106.077.246.515	-23,45%
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	229.524.800.000	122.731.687.406	53,47%	0	122.731.687.406	
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	109.166.025.000	161.102.991.326	147,58%	127.200.619.861	33.902.371.465	26,65%
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	0	59.464.713.186	-	61.336.779.510	-1.872.066.324	-3,05%
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	0	22.740.691.177	-	102.969.309.843	-80.228.618.666	-77,92%
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	0	89.636.542.468	-	0	89.636.542.468	
42523	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi**	**175.815.402.000**	**710.472.768.619**	**404,10%**	**829.074.665.967**	**-118.601.897.348**	**-14,31%**
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	517.217.000	332.375.000	64,26%	362.775.000	-30.400.000	-8,38%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.601.179.000	949.964.500	59,33%	1.084.950.882	-134.986.382	-12,44%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	22.435.284.000	28.345.178.960	126,34%	25.854.627.187	2.490.551.773	9,63%
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	0	7.021.831.765	-	4.501.256.489	2.520.575.276	56,00%
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	0	669.443.546	-	566.487.997	102.955.549	18,17%
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	44.000.000.000	91.838.022.563	208,72%	146.799.516.068	-54.961.493.505	-37,44%
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	63.000.000.000	458.458.080.139	727,71%	0	458.458.080.139	
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	22.000.000.000	89.431.576.201	406,51%	561.353.321.860	-471.921.745.659	-84,07%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.261.722.000	33.426.295.945	150,15%	88.551.730.484	-55.125.434.539	-62,25%
42524	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**	**313.944.983.000**	**1.253.573.712.907**	**399,30%**	**458.346.658.250**	**795.227.054.657**	**173,50%**
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	51.000.000.000	362.565.020.463	710,91%	94.500.382.533	268.064.637.930	283,67%
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.100.000.000	247.731.735.938	22521,07%	1.723.459.987	246.008.275.951	14274,09%
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	92.018.983.000	372.324.301.672	404,62%	249.676.794.437	122.647.507.235	49,12%
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	1.100.000.000	46.350.707.965	4213,70%	42.973.726.893	3.376.981.072	7,86%
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	99.000.000.000	14.644.901.085	14,79%	47.324.463.717	-32.679.562.632	-69,05%
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	62.000.000.000	83.048.203.124	133,95%	0	83.048.203.124	
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	7.000.000.000	706.300.000	10,09%	0	706.300.000	
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	66.000.000	75.988.842.399	115134,61%	22.147.830.683	53.841.011.716	243,10%
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	660.000.000	50.213.700.261	7608,14%	0	50.213.700.261	
42525	**Pendapatan Perizinan**	**926.451.475.000**	**1.566.453.310.352**	**169,08%**	**2.603.827.263.108**	**-1.037.373.952.756**	**-39,84%**
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	850.000.000.000	1.423.430.821.900	167,46%	2.576.964.484.894	-1.153.533.662.994	-44,76%
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	12.147.900.000	17.046.100.000	140,32%	0	17.046.100.000	
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	10.545.000.000	44.497.990.000	421,98%	0	44.497.990.000	
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	24.081.000.000	45.459.250.000	188,78%	0	45.459.250.000	
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.351.555.000	4.055.863.250	93,20%	26.862.778.214	-22.806.914.964	-84,90%
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	25.326.020.000	31.963.285.202	126,21%	0	31.963.285.202	
42526	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian I**	**8.627.060.815.000**	**8.491.555.385.000**	**98,43%**	**9.080.142.986.000**	**-588.587.601.000**	**-6,48%**
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	864.739.765.000	625.080.330.000	72,29%	660.298.000.000	-35.217.670.000	-5,33%
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	508.363.625.000	604.351.415.000	118,88%	572.269.710.000	32.081.705.000	5,61%
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	2.847.500.000.000	2.403.053.325.000	84,39%	3.502.910.836.000	-1.099.857.511.000	-31,40%
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	75.238.775.000	282.528.300.000	375,51%	80.598.700.000	201.929.600.000	250,54%
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.276.250.000.000	2.485.384.975.000	109,19%	2.317.695.905.000	167.689.070.000	7,24%
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.357.532.700.000	1.344.034.000.000	99,01%	1.211.267.435.000	132.766.565.000	10,96%
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	33.068.450.000	29.147.850.000	88,14%	29.639.150.000	-491.300.000	-1,66%
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	151.387.500.000	170.302.050.000	112,49%	172.810.750.000	-2.508.700.000	-1,45%
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	512.980.000.000	547.673.140.000	106,76%	532.652.500.000	15.020.640.000	2,82%
42527	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian II**	**415.857.701.000**	**876.003.488.818**	**210,65%**	**1.521.505.527.406**	**-645.502.038.588**	**-42,43%**
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.000.000.000	907.700.000	11,35%	0	907.700.000	
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.000.000.000	909.300.000	11,37%	0	909.300.000	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	3.698.200.000	299.610.715.000	8101,53%	3.324.000.000	296.286.715.000	8913,56%
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	267.973.080.000	202.890.885.000	75,71%	264.844.460.000	-61.953.575.000	-23,39%
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	20.377.555.000	28.707.426.410	140,88%	23.558.130.001	5.149.296.409	21,86%
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	99.308.866.000	334.724.562.408	337,05%	169.933.842.529	164.790.719.879	96,97%
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	8.500.000.000	8.252.900.000	97,09%	1.059.845.094.876	-1.051.592.194.876	-99,22%
42528	**Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi**	**450.796.678.000**	**560.109.228.431**	**124,25%**	**0**	**560.109.228.431**	
425281	Pendapatan Akreditasi	15.743.600.000	19.279.600.000	122,46%	0	19.279.600.000	
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.558.956.000	928.417.100	59,55%		928.417.100	
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	89.280.910.000	87.180.831.927	97,65%	0	87.180.831.927	
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	13.978.405.000	27.305.089.529	195,34%	0	27.305.089.529	
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	33.868.261.000	42.226.504.374	124,68%	0	42.226.504.374	
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	3.852.810.000	7.629.518.962	198,02%	0	7.629.518.962	
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	131.565.604.000	101.480.009.436	77,13%	0	101.480.009.436	
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	74.240.000.000	198.000.292.900	266,70%	0	198.000.292.900	
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	86.708.132.000	76.078.964.203	87,74%	0	76.078.964.203	
4253	**PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN**	**6.513.181.334.000**	**7.421.052.335.146**	**113,94%**	**6.807.179.045.090**	**613.873.290.056**	**9,02%**
42531	**Pendapatan Jasa Kesehatan**	**3.205.433.661.000**	**3.849.996.353.287**	**120,11%**	**3.692.049.439.026**	**157.946.914.261**	**4,28%**
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	135.690.120.000	150.987.861.839	111,27%	124.536.710.562	26.451.151.277	21,24%
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2.244.990.960.000	2.801.330.955.443	124,78%	3.556.989.653.464	-755.658.698.021	-21,24%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	628.010.791.000	574.772.060.540	91,52%	0	574.772.060.540	
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	33.090.880.000	48.359.610.383	146,14%	0	48.359.610.383	
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	140.330.485.000	235.939.212.082	168,13%	0	235.939.212.082	
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	23.320.425.000	38.606.653.000	165,55%	10.523.075.000	28.083.578.000	266,88%
42532	**Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan**	**84.830.000.000**	**179.606.380.001**	**211,73%**	**0**	**179.606.380.001**	
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	84.830.000.000	179.606.380.001	211,73%	0	179.606.380.001	
42533	**Pendapatan Jasa Karantina**	**176.144.838.000**	**344.312.823.136**	**195,47%**	**0**	**344.312.823.136**	
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	139.581.088.000	267.493.327.963	191,64%	0	267.493.327.963	
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	36.563.750.000	76.819.495.173	210,10%	0	76.819.495.173	
42534	**Pendapatan Jasa Agraria**	**2.307.119.235.000**	**2.177.144.211.554**	**94,37%**	**2.318.870.035.242**	**-141.725.823.688**	**-6,11%**
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.266.455.513.000	2.177.144.211.554	96,06%	2.318.870.035.242	-141.725.823.688	-6,11%
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	40.663.722.000	0	0,00%	0	0	
42535	**Pendapatan Jasa Keagamaan**	**739.653.600.000**	**869.992.567.168**	**117,62%**	**796.259.570.822**	**73.732.996.346**	**9,26%**
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	739.653.600.000	869.992.567.168	117,62%	796.259.570.822	73.732.996.346	9,26%
4254	**PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI**	**4.737.423.665.000**	**4.763.894.209.734**	**100,56%**	**4.603.461.244.398**	**160.432.965.336**	**3,49%**
42541	**Pendapatan Pendidikan**	**4.165.311.302.000**	**4.091.137.740.960**	**98,22%**	**4.484.816.582.419**	**-393.678.841.459**	**-8,78%**
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	79.763.648.000	78.033.811.448	97,83%	134.834.378.923	-56.800.567.475	-42,13%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.829.107.988.000	3.799.330.389.906	99,22%	3.956.797.554.032	-157.467.164.126	-3,98%
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	529.000.000	25.946.183.264	4904,76%	0	25.946.183.264	
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	255.910.666.000	187.827.356.342	73,40%	393.184.649.464	-205.357.293.122	-52,23%
42542	**Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**311.891.818.000**	**283.378.471.210**	**90,86%**	**0**	**283.378.471.210**	
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	301.962.925.000	255.235.125.257	84,53%	0	255.235.125.257	
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9.928.893.000	28.143.345.953	283,45%	0	28.143.345.953	
42543	**Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek**	**254.431.618.000**	**383.125.471.424**	**150,58%**	**102.755.561.086**	**280.369.910.338**	**272,85%**
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	36.808.232.000	73.168.285.301	198,78%	0	73.168.285.301	
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	72.527.365.000	107.261.809.466	147,89%	102.755.561.086	4.506.248.380	4,39%
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	102.875.550.000	111.620.131.097	108,50%	0	111.620.131.097	
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	32.448.156.000	20.518.625.945	63,24%	0	20.518.625.945	
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	7.514.190.000	26.153.313.294	348,05%	0	26.153.313.294	
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	801.000.000	5.524.461.080	689,70%	0	5.524.461.080	
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	1.457.125.000	38.878.845.241	2668,19%	0	38.878.845.241	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
42545	**Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan**	**5.788.927.000**	**6.252.526.140**	**108,01%**	**15.889.100.893**	**-9.636.574.753**	**-60,65%**
425451	Pendapatan Museum	3.543.230.000	3.348.070.000	94,49%	15.889.100.893	-12.541.030.893	-78,93%
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	2.245.697.000	2.904.456.140	129,33%	0	2.904.456.140	
4255	**PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**22.375.046.414.000**	**23.950.487.055.396**	**107,04%**	**17.639.681.081.421**	**6.310.805.973.975**	**35,78%**
42551	**Pendapatan Jasa Transportasi**	**6.753.243.224.000**	**6.319.589.621.391**	**93,58%**	**0**	**6.319.589.621.391**	
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	460.324.500.000	938.634.625.000	203,91%	0	938.634.625.000	
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.236.552.350.000	902.206.837.845	72,96%	0	902.206.837.845	
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.540.603.841.000	2.234.327.178.826	87,94%	0	2.234.327.178.826	
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	650.391.073.000	548.045.578.845	84,26%	0	548.045.578.845	
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	283.760.793.000	238.311.705.954	83,98%	0	238.311.705.954	
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	297.633.128.000	340.384.958.211	114,36%	0	340.384.958.211	
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	636.280.395.000	521.181.218.991	81,91%	0	521.181.218.991	
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	547.969.695.000	508.428.602.995	92,78%	0	508.428.602.995	
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	99.727.449.000	88.068.914.724	88,31%	0	88.068.914.724	
42552	**Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika**	**15.591.419.395.000**	**17.446.455.866.510**	**111,90%**	**17.578.783.121.175**	**-132.327.254.665**	**-0,75%**
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	14.628.136.271.000	16.364.753.538.293	111,87%	16.560.272.878.360	-195.519.340.067	-1,18%
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	931.763.622.000	1.027.001.367.847	110,22%	1.018.510.242.815	8.491.125.032	0,83%
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	29.245.502.000	47.799.896.741	163,44%	0	47.799.896.741	
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	174.000.000	825.002.500	474,14%	0	825.002.500	
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	0	1.886.706.490	-	0	1.886.706.490	
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	0	976.814.639	-	0	976.814.639	
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.100.000.000	3.212.540.000	152,98%	0	3.212.540.000	
42553	**Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik**	**30.383.795.000**	**184.441.567.495**	**607,04%**	**60.897.960.246**	**123.543.607.249**	**202,87%**
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	30.325.345.000	24.921.968.222	82,18%	53.714.415.124	-28.792.446.902	-53,60%
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	58.450.000	28.672.000	49,05%	7.183.545.122	-7.154.873.122	-99,60%
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	112.877.812.351	-	0	112.877.812.351	
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	0	46.613.114.922	-	0	46.613.114.922	
4256	**PENDAPATAN JASA LAINNYA**	**198.638.113.000**	**910.056.355.732**	**458,15%**	**6.853.858.987.581**	**-5.943.802.631.849**	**-86,72%**
42561	**Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**104.364.437.000**	**204.088.090.073**	**195,55%**	**158.901.986.453**	**45.186.103.620**	**28,44%**
425611	Pendapatan Wisata Alam	93.857.111.000	167.966.219.615	178,96%	158.189.355.087	9.776.864.528	6,18%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.491.776.000	21.094.153.074	201,05%		21.094.153.074	
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	15.550.000	15.027.717.384	96641,27%	712.631.366	14.315.086.018	2008,76%
42562	**Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan**	**18.011.993.000**	**21.799.455.591**	**121,03%**	**4.173.205.256.034**	**-4.151.405.800.443**	**-99,48%**
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	15.218.393.000	21.791.630.591	143,19%	4.173.205.256.034	-4.151.413.625.443	-99,48%
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.793.600.000	7.825.000	0,28%	0	7.825.000	
42569	**Pendapatan Jasa Lainnya**	**76.261.683.000**	**684.168.810.068**	**897,13%**	**2.521.751.745.094**	**-1.837.582.935.026**	**-72,87%**
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	6.879.375.000	5.663.582.398	82,33%	676.511.073.121	-670.847.490.723	-99,16%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	46.054.003.000	407.131.262.221	884,03%	1.729.039.879.031	-1.321.908.616.810	-76,45%
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol	0	110.076.543.484	-	116.200.792.942	-6.124.249.458	-5,27%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	23.328.305.000	161.297.421.965	691,42%	0	161.297.421.965	
4257	**PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**	**7.496.693.718.000**	**11.153.269.856.791**	**148,78%**	**13.503.079.012.415**	**-2.349.809.155.624**	**-17,40%**
42571	**Pendapatan Bunga**	**935.591.500.000**	**1.656.180.667.138**	**177,02%**	**1.535.360.256.560**	**120.820.410.578**	**7,87%**
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	935.591.500.000	1.309.111.487.158	139,92%	1.117.768.921.744	191.342.565.414	17,12%
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	0	60.552.451.830	-	118.014.288.401	-57.461.836.571	-48,69%
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	0	286.216.349.005	-	299.075.698.586	-12.859.349.581	-4,30%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	0	300.379.145	-	501.347.829	-200.968.684	-40,09%
42572	**Pendapatan Gain on Bond Redemption**	**0**	**0**	-	**6.497.500.000**	**-6.497.500.000**	**-100,00%**
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	0	0	-	6.497.500.000	-6.497.500.000	-100,00%
42573	**Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara**	**2.110.041.860.000**	**2.282.759.533.200**	**108,19%**	**6.110.092.446.400**	**-3.827.332.913.200**	**-62,64%**
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.110.041.860.000	1.141.132.650.700	54,08%	4.092.987.718.300	-2.951.855.067.600	-72,12%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	0	1.141.626.882.500	-	2.017.104.728.100	-875.477.845.600	-43,40%
42574	**Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara**	**84.864.361.000**	**94.901.097.815**	**111,83%**	**69.108.954.346**	**25.792.143.469**	**37,32%**
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	84.864.361.000	94.497.933.237	111,35%	69.108.954.346	25.388.978.891	36,74%
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN	0	139.460.000	-	0	139.460.000	
425743	Pendapatan Kupon SBN	0	259.840.000	-	0	259.840.000	
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	0	3.864.578	-	0	3.864.578	
42575	**Pendapatan dari Selisih Kurs**	**110.001.126.000**	**242.930.299.187**	**220,84%**	**23.239.529.318**	**219.690.769.869**	**945,33%**
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	110.000.000.000	242.713.600.134	220,65%	23.214.731.478	219.498.868.656	945,52%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	1.126.000	207.685.127	18444,51%	24.797.840	182.887.287	737,51%
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	0	9.013.926	-	0	9.013.926	
42576	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening**	**281.732.329.000**	**287.720.782.980**	**102,13%**	**264.409.379.457**	**23.311.403.523**	**8,82%**
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	891.308	-	72.441.207	-71.549.899	-98,77%
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	0	160.641.039	-	6.473.966.920	-6.313.325.881	-97,52%
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	0	74.556.330.261	-	47.502.727.325	27.053.602.936	56,95%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	281.732.329.000	207.822.645.528	73,77%	208.907.991.702	-1.085.346.174	-0,52%
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	5.180.274.844	-	1.452.252.303	3.728.022.541	256,71%
42577	**Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara**	**3.430.000.000.000**	**6.054.091.902.483**	**176,50%**	**5.041.464.684.573**	**1.012.627.217.910**	**20,09%**
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	60.000.000.000	256.947.451.726	428,25%	148.697.096.222	108.250.355.504	72,80%
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	210.000.000.000	332.449.155.560	158,31%	285.028.502.724	47.420.652.836	16,64%
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	3.160.000.000.000	5.464.695.295.197	172,93%	4.607.739.085.627	856.956.209.570	18,60%
42578	**Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara**	**380.522.231.000**	**481.447.093.712**	**126,52%**	**412.785.656.940**	**68.661.436.772**	**16,63%**
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	982.732.000	2.371.011.392	241,27%	2.522.550.922	-151.539.530	-6,01%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	308.030.455.675	-	238.448.003.875	69.582.451.800	29,18%
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	68.037.631.165	-	50.712.440.833	17.325.190.332	34,16%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	16.559.499.000	91.608.841.688	553,21%	101.978.082.340	-10.369.240.652	-10,17%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	362.980.000.000	11.399.153.792	3,14%	19.124.578.970	-7.725.425.178	-40,40%
42579	**Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**	**163.940.311.000**	**53.238.480.276**	**32,47%**	**40.120.604.821**	**13.117.875.455**	**32,70%**
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	163.851.121.000	16.918.424.771	10,33%	25.421.722.548	-8.503.297.777	-33,45%
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	89.190.000	3.827.704.570	4291,63%	14.698.882.273	-10.871.177.703	-73,96%
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	32.492.350.935	-	0	32.492.350.935	
4258	**PENDAPATAN DENDA**	**16.346.711.000**	**611.724.687.653**	**3742,19%**	**737.267.906.420**	**-125.543.218.767**	**-17,03%**
42581	**Pendapatan Denda I**	**16.201.711.000**	**540.373.238.968**	**3335,29%**	**565.766.276.076**	**-25.393.037.108**	**-4,49%**
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.681.511.000	508.183.330.466	8944,51%	447.318.998.095	60.864.332.371	13,61%
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	10.000.000.000	25.421.045.096	254,21%	112.024.980.817	-86.603.935.721	-77,31%
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	519.200.000	216.600.000	41,72%	0	216.600.000	
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	0	96.762	-	11.737.858	-11.641.096	-99,18%
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	1.000.000	8.592.034	859,20%	9.019.805	-427.771	-4,74%
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	347.459.213	-	1.821.234.053	-1.473.774.840	-80,92%
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	0	6.196.115.397	-	4.580.305.448	1.615.809.949	35,28%
42582	**Pendapatan Denda II**	**145.000.000**	**65.693.449.290**	**45305,83%**	**169.770.738.744**	**-104.077.289.454**	**-61,30%**
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	0	5.278.945.347	-	21.354.797	5.257.590.550	24620,19%
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	0	1.607.497.444	-	4.031.337.358	-2.423.839.914	-60,12%
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	145.000.000	180.092.454	124,20%	483.288.294	-303.195.840	-62,74%
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	0	929.616.900	-	0	929.616.900	
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	57.697.297.145	-	165.234.758.295	-107.537.461.150	-65,08%
42583	**Pendapatan Denda III**	**0**	**5.657.999.395**	-	**1.730.891.600**	**3.927.107.795**	**226,88%**
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5.657.999.395	-	1.730.891.600	3.927.107.795	226,88%
4259	**PENDAPATAN LAIN-LAIN**	**4.444.480.014.000**	**14.757.294.213.811**	**332,04%**	**14.713.694.856.133**	**43.599.357.678**	**0,30%**
42591	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I**	**4.434.967.331.000**	**6.467.615.893.218**	**145,83%**	**12.363.242.225.359**	**-5.895.626.332.141**	**-47,69%**
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.526.285.000	185.172.872.106	902,13%	457.149.799.641	-271.976.927.535	-59,49%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.745.580.000	1.101.775.087.107	40129,05%	843.192.718.010	258.582.369.097	30,67%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited*)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.230.000.000	1.434.357.954.147	44407,37%	1.003.033.506.472	431.324.447.675	43,00%
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	1.631.000	-1.631.000	-100,00%
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.174.920.308.894	-	258.983.070.509	1.915.937.238.385	739,79%
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	0	34.731.049.514	-	28.819.974.494	5.911.075.020	20,51%
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.265.881.745.564	-	302.316.583.514	963.565.162.050	318,73%
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15.464.387.256	-	5.464.727.290	9.999.659.966	182,99%
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	4.408.465.466.000	255.312.488.630	5,79%	9.464.280.214.429	-9.208.967.725.799	-97,30%
42592	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II**	**0**	**261.161.535.102**	-	**221.236.016.033**	**39.925.519.069**	**18,05%**
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	0	261.161.535.102	-	221.236.016.033	39.925.519.069	18,05%
42593	**Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan**	**0**	**33.306.961.074**	-	**14.368.455.221**	**18.938.505.853**	**131,81%**
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	29.301.333.275	-	12.094.364.721	17.206.968.554	142,27%
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	0	3.914.284.983	-	1.405.586.100	2.508.698.883	178,48%
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	0	1.314.216	-	858.304.400	-856.990.184	-99,85%
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	0	90.028.600	-	10.200.000	79.828.600	782,63%
42598	**Pendapatan Lain-Lain I**	**0**	**7.704.637.733.401**	-	**0**	**7.704.637.733.401**	
425982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun	0	7.704.637.733.401	-	0	7.704.637.733.401	
42599	**Pendapatan Lain-Lain II**	**9.512.683.000**	**290.572.091.016**	**3054,58%**	**2.114.848.159.520**	**-1.824.276.068.504**	**-86,26%**
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	0	0	-	1.700.103.052.202	-1.700.103.052.202	-100,00%
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	0	55.663.300.189	-	0	55.663.300.189	
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.942.387.000	6.179.868.939	156,75%	16.823.574.332	-10.643.705.393	-63,27%
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	0	0	-	98.074.018	-98.074.018	-100,00%
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	0	277.788	-	0	277.788	
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	5.412.836	-	1.277.285.335	-1.271.872.499	-99,58%
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	0	160.324.477	-	86.711.899	73.612.578	84,89%
425998	**Pendapatan dari Retur SP2D**	**0**	**22.851.019.981**	-	**222.345.903.094**	**-199.494.883.113**	**-89,72%**
425999	**Pendapatan Anggaran Lain-lain**	**5.570.296.000**	**205.711.886.806**	**3693,02%**	**174.113.558.640**	**31.598.328.166**	**18,15%**
43	PENDAPATAN HIBAH	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	11.629.815.002.490	3.935.045.236.830	33,84%
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	11.629.815.002.490	3.935.045.236.830	33,84%
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	**0**	**13.178.185.591.822**	-	**7.410.435.627.384**	**5.767.749.964.438**	**77,83%**
43113	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang**	**0**	**13.178.185.591.822**	-	**7.410.435.627.384**	**5.767.749.964.438**	**77,83%**
431131	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan**	**0**	**9.076.264.000**	-	**228.975.340.000**	**-219.899.076.000**	**-96,04%**
431132	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha**	**0**	**339.156.572.926**	-	**137.817.215.944**	**201.339.356.982**	**146,09%**
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah	0	12.814.628.074.896	-	7.043.656.235.321	5.770.971.839.575	81,93%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	0	15.324.680.000	-	-13.163.881	15.337.843.881	
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.196.865.400.000	2.386.674.647.498	199,41%	4.219.379.375.106	-1.832.704.727.608	-43,44%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	1.196.865.400.000	418.374.595.589	34,96%	530.076.024.609	-111.701.429.020	-21,07%
431212	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral**	**1.196.865.400.000**	**202.952.271.644**	**16,96%**	**234.472.316.950**	**-31.520.045.306**	**-13,44%**
431213	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral**	**0**	**215.422.323.945**	-	**295.603.707.659**	**-80.181.383.714**	**-27,12%**
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	0	1.968.300.051.909	-	3.689.303.350.497	-1.721.003.298.588	-46,65%
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral	0	1.527.744.362.454	-	2.994.461.088.630	-1.466.716.726.176	-48,98%
431233	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral**	**0**	**347.385.546.650**	-	**652.784.794.782**	**-305.399.248.132**	**-46,78%**
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya	0	93.170.142.805	-	42.057.467.085	51.112.675.720	121,53%
Grand Total		1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.800	102,58%	1.666.375.912.658.080	277.298.964.220.711	16,64%

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.472.280.892.834
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.572.714.448.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.859.459.907.905
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	363.295.937.910
Perbankan		**16.267.751.186.649**
1	PT Pertamina (Persero)	8.569.790.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.651.640.277.399
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	308.715.000.000
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	768.850.000.000
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	436.503.715.078
6	PT Jasa Raharja (Persero)	1.269.902.963.670
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	410.940.896.980
8	PT Pegadaian (Persero)	1.005.367.000.000
9	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	308.035.889.138
10	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	653.968.051.800
11	Perum Jaminan Kredit Indonesia	80.184.500.000
12	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	171.821.761.507
13	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	441.147.067.551
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	301.947.000.000
15	PT Angkasa Pura I (Persero)	283.716.000.000
16	PT Biofarma (Persero)	236.410.000.000
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	241.086.272.753
18	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	156.491.377.209
19	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	522.923.131.688
20	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	27.704.250.000
21	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	148.222.628.708
22	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1.031.387.739
23	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	88.300.000.000
24	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52.572.750.063
25	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	29.824.758.920
26	Perum Jasa Tirta II	17.455.197.202
27	PT Hutama Karya (Persero)	214.207.547.813
28	Perum Jasa Tirta I	12.333.045.000
29	PT Sucofindo (Persero)	26.949.137.622
30	PT Brantas Abipraya (Persero)	27.015.066.292
31	PT Surveyor Indonesia (Persero)	11.163.696.741
32	PT Dahana (Persero)	8.815.000.000
33	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.319.177.264
34	PT Perikanan Nusantara	723.042.778
35	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.067.022.678
36	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.954.745.552
37	PT Kawasan Industri Makassar	1.020.465.340
38	Perum Perhutani	81.189.600.000
39	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.973.967.036
40	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	20.000.000.000

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
41	Perum Damri	357.000.000
42	PT Pos Indonesia (Persero)	18.102.960.000
43	PT TWC Borobudur	13.929.212.000
44	Perum Peruri	121.177.000.000
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	8.779.645.000
46	PT Nindya Karya	175.000.000
47	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	116.939.940
48	PT LEN Industri (Persero)	1.850.000.000
49	PT Pindad (Persero)	6.400.000.000
50	PT Virama Karya (Persero)	2.926.971.174
51	PT Bina Karya	1.172.872.603
52	PT Indra Karya (Persero)	431.201.140
53	PT Sarinah (Persero)	558.000.000
54	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.265.392.101
55	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	15.089.791.336
56	PT Garam (Persero)	66.453.339.566
57	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.946.721.639
58	PT Perum Perikanan Indonesia	394.245.000
59	PT Yodya Karya (Persero)	2.622.861.792
60	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	54.010.679.700
61	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.919.750.000.000
62	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	7.926.703.560
Non Perbankan		**27.863.719.928.072**
No	**Nama Non BUMN (Minoritas)**	**Jumlah**
(1)	(2)	(3)
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.884.249.518
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	24.447.061.524
3	PT Socfin Indonesia	57.269.043.900
4	PT Indosat	56.693.625.000
5	PT Perkebunan Nusantara X	287.270.722
6	PT Perkebunan Nusantara VI	693.890.240
7	PT Perkebunan Nusantara IV	38.133.318.928
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.593
9	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2
10	PT Timah (Persero) Tbk	23
Non Perbankan		**190.408.461.450**

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Pembayaran Piutang		
No	**BUMN**	**Jumlah**
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.200.000.000
2	PT Inhutani I	900.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	PT TWC Borobudur	175.217.658
7	PT ASDP Indonesia Ferry	2.707.981.893
Jumlah Pembayaran Piutang		**5.388.199.551**
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT. Bank Ekspor Indonesia)	275.602.600.247
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	271.000.000.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	85.500.000.000
4	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	101.151.000.000
Jumlah Pembayaran Dividen BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		**733.253.600.247**
JUMLAH TOTAL		**45.060.521.375.969**

Lampiran 2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018

1. Menurut BA & Es I
2. Jenis Belanja
3. Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri
4. Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**952.803.014.000**	**1.040.191.480.000**	**919.832.189.679**	**20.827.891.351**	**899.004.298.328**	**141.187.181.672**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	157.180.219.000	161.321.772.000	153.801.036.758	124.743.603	153.676.293.155	7.645.478.845
02	MAJELIS	795.622.795.000	878.869.708.000	766.031.152.921	20.703.147.748	745.328.005.173	133.541.702.827
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**5.728.286.667.000**	**5.728.286.667.000**	**4.698.135.255.704**	**94.462.735.224**	**4.603.672.520.480**	**1.124.614.146.520**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.700.427.543.000	1.700.427.543.000	1.091.888.983.985	3.669.218.794	1.088.219.765.191	612.207.777.809
02	DEWAN	4.027.859.124.000	4.027.859.124.000	3.606.246.271.719	90.793.516.430	3.515.452.755.289	512.406.368.711
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**2.840.531.119.000**	**3.627.420.844.000**	**3.569.636.665.275**	**26.039.896.262**	**3.543.596.769.013**	**83.824.074.987**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.840.531.119.000	3.627.420.844.000	3.569.636.665.275	26.039.896.262	3.543.596.769.013	83.824.074.987
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**8.262.100.000.000**	**8.478.226.882.000**	**8.427.964.001.230**	**4.545.286.604**	**8.423.418.714.626**	**54.808.167.374**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7.716.684.359.000	7.891.296.405.000	7.862.896.213.931	2.739.946.658	7.860.156.267.273	31.140.137.727
02	KEPANITERAAN	157.270.100.000	168.615.995.000	168.470.696.977	9.276.303	168.461.420.674	154.574.326
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	152.581.761.000	152.581.761.000	141.982.086.630	308.405.991	141.673.680.639	10.908.080.361
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	71.643.906.000	71.950.031.000	70.537.734.694	228.494.499	70.309.240.195	1.640.790.805
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TAT	23.708.288.000	23.708.288.000	22.620.228.951	19.336.142	22.600.892.809	1.107.395.191
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	107.622.532.000	136.129.486.000	127.559.429.676	1.222.581.899	126.336.847.777	9.792.638.223
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	32.589.054.000	33.944.916.000	33.897.610.371	17.245.112	33.880.365.259	64.550.741
006	**KEJAKSAAN RI**	**6.386.605.675.000**	**6.727.265.343.000**	**6.124.467.686.057**	**5.679.099.673**	**6.118.788.586.384**	**608.476.756.616**
01	KEJAKSAAN RI	6.386.605.675.000	6.727.265.343.000	6.124.467.686.057	5.679.099.673	6.118.788.586.384	608.476.756.616
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**1.923.622.827.000**	**2.490.743.350.000**	**2.332.079.208.240**	**1.747.931.247**	**2.330.331.276.993**	**160.412.073.007**
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.101.322.827.000	1.361.182.590.000	1.237.027.201.038	301.887.917	1.236.725.313.121	124.457.276.879
03	SEKRETARIAT KEPRESIDENAN	369.800.000.000	511.445.398.000	504.007.605.264	376.473.889	503.631.131.375	7.814.266.625
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	131.800.000.000	229.371.904.000	213.537.943.071	109591487	213.428.351.584	15.943.552.416
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	35.000.000.000	32.005.000.000	31.762.758.319	279.553.559	31.483.204.760	521.795.240
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	41.000.000.000	122.250.133.000	119.214.938.343	0	119.214.938.343	3.035.194.657
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	40.000.000.000	38.978.810.000	38.391.576.738	353686	38.391.223.052	587.586.948
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	80.000.000.000	81.411.655.000	81.139.328.229	446.447.049	80.692.881.180	718.773.820
10	KANTOR STAF PRESIDEN	124.700.000.000	114.097.860.000	106.997.857.238	233.623.660	106.764.233.578	7.333.626.422
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**3.116.344.184.000**	**3.251.205.592.000**	**3.086.791.637.550**	**11.516.663.919**	**3.075.274.973.631**	**175.930.618.369**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.006.476.081.000	974.949.875.000	938.629.491.978	3.143.127.500	935.486.364.478	39.463.510.522
02	INSPEKTORAT JENDERAL	74.293.717.000	76.400.370.000	67.246.270.582	1.661.032.271	65.585.238.311	10.815.131.689
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	131.333.816.000	242.024.698.000	239.707.394.320	120.172.668	239.587.221.652	2.437.476.348
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	156.878.262.000	160.005.670.000	150.690.709.625	578.614.152	150.112.095.473	9.893.574.527
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	219.687.596.000	226.793.289.000	207.314.506.172	1.363.752.041	205.950.754.131	20.842.534.869
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	184.442.601.000	210.679.253.000	196.489.916.493	1.310.848.470	195.179.068.023	15.500.184.977
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	110.220.201.000	114.590.931.000	105.163.914.525	923.863.640	104.240.050.885	10.350.880.115
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	884.783.485.000	884.783.485.000	853.399.190.704	1.200.644.209	852.198.546.495	32.584.938.505
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	74.633.284.000	74.633.284.000	70.925.621.785	213.088.563	70.712.533.222	3.920.750.778
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.283.120.000	51.876.461.000	49.026.725.017	189.987.062	48.836.737.955	3.039.723.045
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	225.312.021.000	234.468.276.000	208.197.896.349	811.533.343	207.386.363.006	27.081.912.994
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**7.250.769.089.000**	**7.845.758.894.000**	**7.548.789.081.431**	**5.020.805.509**	**7.543.768.275.922**	**301.990.618.078**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.123.195.060.000	6.513.126.087.000	6.231.751.787.517	3.052.013.005	6.228.699.774.512	284.426.312.488
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	69.186.051.000	76.657.482.000	75.388.539.340	168.409.149	75.220.130.191	1.437.351.809
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	46.020.058.000	52.673.535.000	52.456.792.613	54.356.438	52.402.436.175	271.098.825
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	59.098.302.000	59.830.021.000	59.532.863.603	114.446.545	59.418.417.058	411.603.942
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	618.471.405.000	787.806.556.000	784.795.237.971	54.582.666	784.740.655.305	3.065.900.695
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	93.881.322.000	104.481.322.000	99.800.196.160	103.046.077	99.697.150.083	4.784.171.917

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	40.681.495.000	43.232.550.000	42.065.615.982	123.479.842	41.942.136.140	1.290.413.860
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	137.701.366.000	136.701.366.000	132.902.628.600	1.246.747.062	131.655.881.538	5.045.484.462
09	INSPEKTORAT JENDERAL	31.399.139.000	33.109.334.000	32.479.726.421	60.854.157	32.418.872.264	690.461.736
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	31.134.891.000	38.140.641.000	37.615.693.224	42.870.568	37.572.822.656	567.818.344
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**107.682.385.062.000**	**113.153.865.671.000**	**108.230.116.806.677**	**1.549.689.563.132**	**106.680.427.243.545**	**6.473.438.427.455**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	26.142.506.902.000	22.227.150.211.000	16.613.309.649.935	39.615.795.886	16.573.693.854.049	5.653.456.356.951
21	MARKAS BESAR TNI	7.532.830.911.000	8.304.019.023.000	8.303.250.630.024	6.461.651.352	8.296.788.978.672	7.230.044.328
22	MARKAS BESAR TNI AD	45.310.497.196.000	50.679.082.575.000	50.402.748.339.499	255.729.053.621	50.147.019.285.878	532.063.289.122
23	MARKAS BESAR TNI AL	16.103.833.758.000	17.959.873.042.000	17.840.003.201.544	12.012.006.334	17.827.991.195.210	131.881.846.790
24	MARKAS BESAR TNI AU	12.592.716.295.000	13.983.740.820.000	15.070.804.985.675	1.235.871.055.939	13.834.933.929.736	148.806.890.264
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**10.591.410.243.000**	**13.101.216.922.000**	**12.670.792.949.598**	**29.103.446.071**	**12.641.689.503.527**	**459.527.418.473**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.761.179.680.000	3.978.065.288.000	3.895.323.531.272	2.049.882.222	3.893.273.649.050	84.791.638.950
02	INSPEKTORAT JENDERAL	32.223.447.000	32.866.907.000	32.168.332.421	336.376.680	31.831.955.741	1.034.951.259
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	680.307.515.000	683.271.257.000	566.014.356.540	13.982.034.891	552.032.321.649	131.238.935.351
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	4.263.913.635.000	5.195.564.329.000	5.135.325.664.212	1.898.231.048	5.133.427.433.164	62.136.895.836
06	DITJEN IMIGRASI	2.257.320.972.000	2.366.728.137.000	2.248.333.072.928	7.959.190.988	2.240.373.881.940	126.354.255.060
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	193.723.991.000	261.845.006.000	236.207.817.432	1.138.867.912	235.068.949.520	26.776.056.480
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.419.507.000	43.501.071.000	41.323.888.026	60.610.357	41.263.277.669	2.237.793.331
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	34.283.683.000	37.663.698.000	36.460.026.071	79.540.500	36.380.485.571	1.283.212.429
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	108.570.670.000	108.570.670.000	103.162.178.092	114.943.862	103.047.234.230	5.523.435.770
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	29.900.158.000	29.900.158.000	29.354.349.151	37.695.442	29.316.653.709	583.504.291
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK	188.566.985.000	363.240.401.000	347.119.733.453	1.446.072.169	345.673.661.284	17.566.739.716
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**45.682.169.483.000**	**46.987.862.720.000**	**39.925.775.243.195**	**25.307.154.530**	**39.900.468.088.665**	**7.087.394.631.335**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.887.754.241.000	20.763.842.227.000	19.668.089.116.567	15.427.627.377	19.652.661.489.190	1.111.180.737.810
02	INSPEKTORAT JENDERAL	118.341.754.000	118.341.754.000	104.830.414.691	203.373.887	104.627.040.804	13.714.713.196
03	DITJEN ANGGARAN	154.537.430.000	154.537.430.000	133.798.783.475	468.985.372	133.329.798.103	21.207.631.897
04	DITJEN PAJAK	7.441.352.425.000	7.441.587.985.000	6.736.325.524.250	1.955.835.893	6.734.369.688.357	707.218.296.643
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.393.722.235.000	3.754.677.608.000	3.499.909.067.756	1.792.311.065	3.498.116.756.691	256.560.851.309
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	144.022.253.000	145.975.618.000	126.667.252.936	768.941.903	125.898.311.033	20.077.306.967
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	119.511.382.000	119.511.382.000	111.641.135.992	76.103.621	111.565.032.371	7.946.349.629
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	12.660.896.220.000	12.682.854.534.000	7.984.612.172.616	256.867.996	7.984.355.304.620	4.698.499.229.380
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	872.909.999.000	872.909.999.000	744.841.856.341	1.769.903.039	743.071.953.302	129.838.045.698
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	731.706.890.000	774.327.499.000	685.875.790.252	2.557.579.561	683.318.210.691	91.009.288.309
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	157.414.654.000	159.296.684.000	129.184.128.319	29.624.816	129.154.503.503	30.142.180.497
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**23.820.762.303.000**	**24.038.510.833.000**	**21.926.170.250.684**	**89.567.412.990**	**21.836.602.837.694**	**2.201.907.995.306**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.492.092.430.000	1.730.087.799.000	1.664.825.022.530	7.694.961.098	1.657.130.061.432	72.957.737.568
02	INSPEKTORAT JENDERAL	97.134.000.000	97.134.000.000	92.247.744.073	375.341.496	91.872.402.577	5.261.597.423
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	6.486.964.351.000	6.675.409.495.000	6.168.356.984.721	67.832.674.926	6.100.524.309.795	574.885.185.205
04	DITJEN HOLTIKULTURA	1.355.960.980.000	1.242.629.794.000	1.126.405.896.209	309.442.239	1.126.096.453.970	116.533.340.030
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.631.801.109.000	1.636.354.054.000	1.415.645.206.640	562.118.501	1.415.083.088.139	221.270.965.861
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.087.023.491.000	2.028.956.742.000	1.853.987.720.287	4.527.598.811	1.849.460.121.476	179.496.620.524
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	6.030.828.749.000	5.834.734.749.000	5.122.013.869.600	2.624.771.431	5.119.389.098.169	715.345.650.831
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	2.084.560.880.000	2.092.710.111.000	1.886.936.693.932	2.535.320.933	1.884.401.372.999	208.308.738.001
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDA PERTANIAN	1.253.599.323.000	1.264.588.172.000	1.177.201.395.207	1.541.674.879	1.175.659.720.328	88.928.451.672
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	527.612.000.000	600.286.783.000	587.591.785.845	1.315.194.014	586.276.591.831	14.010.191.169
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	773.184.990.000	835.619.134.000	830.957.931.640	248.314.662	830.709.616.978	4.909.517.022

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**2.827.854.207.000**	**2.847.922.836.000**	**2.629.621.597.547**	**1.511.494.653**	**2.628.110.102.894**	**219.812.733.106**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.078.722.835.000	1.139.651.155.000	1.087.911.681.440	677.234.155	1.087.234.447.285	52.416.707.715
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	124.964.753.000	121.536.458.000	101.837.823.850	44.360.940	101.793.462.910	19.742.995.090
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	126.141.000.000	124.334.748.000	107.854.803.005	90.827.741	107.763.975.264	16.570.772.736
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TING	124.904.050.000	120.493.000.000	98.893.368.957	14.349.796	98.879.019.161	21.613.980.839
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	369.897.840.000	369.897.840.000	353.760.336.800	91.914.104	353.668.422.696	16.229.417.304
06	INSPEKTORAT JENDERAL	43.616.390.000	43.616.390.000	42.001.083.414	67.911.178	41.933.172.236	1.683.217.764
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	709.671.398.000	734.114.223.000	688.421.116.793	288.690.841	688.132.425.952	45.981.797.048
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	195.297.671.000	140.456.953.000	101.162.549.560	220.035.937	100.942.513.623	39.514.439.377
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	54.638.270.000	53.822.069.000	47.778.833.728	16.169.961	47.762.663.767	6.059.405.233
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**6.497.099.834.000**	**6.571.484.341.000**	**5.920.499.789.115**	**9.652.547.491**	**5.910.847.241.624**	**660.637.099.376**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	351.974.082.000	360.723.780.000	341.316.639.725	1.555.427.245	339.761.212.480	20.962.567.520
02	INSPEKTORAT JENDERAL	80.431.910.000	80.431.910.000	71.996.468.174	49.892.846	71.946.575.328	8.485.334.672
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.729.967.194.000	1.736.467.194.000	1.572.195.099.550	17.556.705	1.572.177.542.845	164.289.651.155
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	141.273.370.000	141.273.370.000	129.612.445.066	264.530.966	129.347.914.100	11.925.455.900
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	364.571.634.000	364.522.073.000	328.615.320.099	654.776.642	327.960.543.457	36.561.529.543
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	57.116.345.000	57.116.345.000	53.034.444.722	32.478.868	53.001.965.854	4.114.379.146
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	566.950.824.000	597.170.889.000	522.661.972.264	1.581.360.016	521.080.612.248	76.090.276.752
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	439.422.918.000	468.387.223.000	401.866.027.840	200.687.953	401.665.339.887	66.721.883.113
13	BADAN GEOLOGI	859.817.575.000	859.817.575.000	768.439.812.540	1.750.130.681	766.689.681.859	93.127.893.141
14	BPH MIGAS	183.355.740.000	183.355.740.000	168.665.119.443	2.815.068.306	165.850.051.137	17.505.688.863
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.722.218.242.000	1.722.218.242.000	1.562.096.439.692	730.637.263	1.561.365.802.429	160.852.439.571
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**48.203.109.426.000**	**53.421.412.068.000**	**45.089.338.310.698**	**13.596.955.940**	**45.075.741.354.758**	**8.345.670.713.242**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	580.135.964.000	580.135.964.000	528.615.964.573	237.739.480	528.378.225.093	51.757.738.907
02	INSPEKTORAT JENDERAL	106.110.822.000	106.110.822.000	102.739.362.790	407	102.739.362.383	3.371.459.617
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	4.582.007.686.000	4.955.730.267.000	4.480.981.331.387	1.117.314.816	4.479.864.016.571	475.866.250.429
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.600.486.955.000	14.417.626.963.000	11.502.150.936.122	5.776.995.262	11.496.373.940.860	2.921.253.022.140
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	9.162.040.051.000	9.177.698.362.000	8.237.595.029.586	5.069.425.334	8.232.525.604.252	945.172.757.748
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	17.296.256.780.000	19.188.457.243.000	15.950.142.348.702	697.117.619	15.949.445.231.083	3.239.012.011.917
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	143.830.906.000	143.830.906.000	131.373.759.530	114.733.692	131.259.025.838	12.571.880.162
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	4.527.496.007.000	4.647.077.286.000	3.958.170.428.242	579.972.879	3.957.590.455.363	689.486.830.637
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	204.744.255.000	204.744.255.000	197.569.149.766	3.656.451	197.565.493.315	7.178.761.685
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**	**40.092.000.000.000**	**40.493.436.672.000**	**39.628.185.099.082**	**195.749.468.186**	**39.432.435.630.896**	**1.061.001.041.104**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.768.057.003.000	1.768.495.003.000	1.736.837.028.239	7.704.697.678	1.729.132.330.561	39.362.672.439
02	INSPEKTORAT JENDERAL	192.188.790.000	192.188.790.000	180.649.160.890	8.757.084.465	171.892.076.425	20.296.713.575
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	22.574.237.959.000	22.574.306.076.000	22.240.967.895.310	67.545.999.572	22.173.421.895.738	400.884.180.262
05	DITJEN PAUD-DIKMAS	1.805.463.073.000	2.204.186.491.000	2.116.994.193.921	24.202.081.067	2.092.792.112.854	111.394.378.146
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.154.945.174.000	1.154.945.174.000	1.057.329.653.368	27.731.018.238	1.029.598.635.130	125.346.538.870
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	396.946.190.000	396.946.190.000	373.105.704.928	2.656.071.806	370.449.633.122	26.496.556.878
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.829.626.560.000	1.831.833.697.000	1.668.966.494.584	8.952.783.832	1.660.013.710.752	171.819.986.248
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.370.535.251.000	10.370.535.251.000	10.253.334.967.842	48.199.731.528	10.205.135.236.314	165.400.014.686
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**59.097.729.214.000**	**61.864.479.406.000**	**57.594.527.906.764**	**245.870.500.087**	**57.348.657.406.677**	**4.515.821.999.323**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	28.165.890.422.000	28.138.096.577.000	27.445.707.938.175	10.095.804.545	27.435.612.133.630	702.484.443.370
02	INSPEKTORAT JENDERAL	119.983.200.000	119.983.200.000	115.696.760.216	2.101.782.611	113.594.977.605	6.388.222.395
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.102.710.381.000	2.114.745.619.000	1.960.859.328.489	6.721.212.981	1.954.138.115.508	160.607.503.492
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	15.388.088.064.000	17.204.700.290.000	15.596.718.755.945	164.103.073.176	15.432.615.682.769	1.772.084.607.231

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.723.525.128.000	3.378.571.989.000	3.088.234.861.280	15.755.754.831	3.072.479.106.449	306.092.882.551
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	4.939.179.936.000	5.086.359.848.000	4.194.184.011.909	7.036.646.326	4.187.147.365.583	899.212.482.417
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	909.016.668.000	930.898.816.000	839.842.706.389	11.354.457.680	828.488.248.709	102.410.567.291
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	4.749.335.415.000	4.891.123.067.000	4.353.283.544.361	28.701.767.937	4.324.581.776.424	566.541.290.576
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**62.154.741.091.000**	**63.848.099.224.000**	**59.448.952.829.457**	**67.953.619.190**	**59.380.999.210.267**	**4.467.100.013.733**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.220.689.530.000	2.239.867.534.000	2.154.683.181.878	3.600.817.612	2.151.082.364.266	88.785.169.734
02	INSPEKTORAT JENDERAL	153.471.473.000	153.786.179.000	153.699.842.978	646.873.660	153.052.969.318	733.209.682
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.130.689.599.000	5.184.871.735.000	5.095.007.842.489	6.589.634.834	5.088.418.207.655	96.453.527.345
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	49.089.647.287.000	50.506.369.452.000	46.844.330.704.564	31.811.682.229	46.812.519.022.335	3.693.850.429.665
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.895.576.212.000	1.896.007.498.000	1.647.217.497.257	5.069.803.705	1.642.147.693.552	253.859.804.448
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	911.534.193.000	924.066.292.000	853.683.410.687	3.046.214.568	850.637.196.119	73.429.095.881
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	767.569.592.000	773.353.877.000	702.167.366.704	2.662.740.055	699.504.626.649	73.849.250.351
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	280.422.135.000	280.722.135.000	255.906.254.486	756.725.581	255.149.528.905	25.572.606.095
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.085.824.226.000	1.212.308.943.000	1.120.812.837.290	7.552.370.198	1.113.260.467.092	99.048.475.908
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	600.793.776.000	600.793.776.000	557.810.928.865	5.423.205.930	552.387.722.935	48.406.053.065
	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	18.523.068.000	75.951.803.000	63.632.962.259	793.550.818	62.839.411.441	13.112.391.559
026	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**	**3.991.179.304.000**	**3.994.939.982.000**	**3.763.306.403.752**	**8.887.760.911**	**3.754.418.642.841**	**240.521.339.159**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	402.575.082.000	402.575.082.000	367.678.612.919	586.986.959	367.091.625.960	35.483.456.040
02	INSPEKTORAT JENDERAL	60.000.000.000	60.000.000.000	57.703.193.930	363.047.287	57.340.146.643	2.659.853.357
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN TENAGA KERJA	766.681.820.000	766.681.820.000	742.765.840.403	3.316.067.820	739.449.772.583	27.232.047.417
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	184.947.680.000	184.947.680.000	178.774.721.128	1.650.093.026	177.124.628.102	7.823.051.898
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	269.899.804.000	270.620.944.000	257.221.578.944	176.024.543	257.045.554.401	13.575.389.599
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	84.478.298.000	84.478.298.000	81.103.745.047	70.327.402	81.033.417.645	3.444.880.355
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	2.222.596.620.000	2.225.636.158.000	2.078.058.711.381	2.725.213.874	2.075.333.497.507	150.302.660.493
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**41.295.742.086.000**	**43.393.136.929.000**	**41.812.673.205.280**	**578.530.334.236**	**41.234.142.871.044**	**2.158.994.057.956**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	332.315.654.000	338.089.886.000	328.157.427.301	1.150.979.246	327.006.448.055	11.083.437.945
02	INSPEKTORAT JENDERAL	44.088.417.000	45.999.752.000	44.765.759.155	194.918.421	44.570.840.734	1.428.911.266
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	433.823.251.000	498.505.882.000	483.754.840.015	2.954.151.792	480.800.688.223	17.705.193.777
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1.006.519.857.000	1.025.616.559.000	1.000.638.593.455	8.165.459.237	992.473.134.218	33.143.424.782
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.671.377.420.000	19.668.377.420.000	19.601.013.911.053	48.839.629.896	19.552.174.281.157	116.203.138.843
06	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	21.455.112.967.000	21.455.112.967.000	19.999.845.572.910	516.125.955.638	19.483.719.617.272	1.971.393.349.728
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	352.504.520.000	361.434.463.000	354.497.101.391	1.099.240.006	353.397.861.385	8.036.601.615
029	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**	**8.025.646.692.000**	**8.060.961.667.000**	**7.209.022.019.518**	**28.087.294.062**	**7.180.934.725.456**	**880.026.941.544**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	573.955.156.000	603.956.342.000	565.103.171.752	1.323.607.748	563.779.564.004	40.176.777.996
02	INSPEKTORAT JENDERAL	66.990.220.000	64.970.525.000	63.914.077.587	639.152.605	63.274.924.982	1.695.600.018
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	407.691.364.000	407.691.364.000	396.351.984.476	580.910.190	395.771.074.286	11.920.289.714
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	1.082.474.152.000	1.084.817.437.000	1.035.772.813.261	476.651.104	1.035.296.162.157	49.521.274.843
05	DITJEN KONSERVASI SDA DAN	2.033.159.356.000	2.042.022.621.000	1.949.616.446.166	1.733.059.854	1.947.883.386.312	94.139.234.688
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	1.133.562.466.000	1.100.434.984.000	596.826.976.582	12.675.886.099	584.151.090.483	516.283.893.517
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	284.837.618.000	305.445.430.000	300.298.984.649	407.406.757	299.891.577.892	5.553.852.108
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	325.914.960.000	315.433.088.000	308.543.336.145	163.870.707	308.379.465.438	7.053.622.562
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMARITIMAN	416.014.975.000	410.420.946.000	375.405.091.036	1.970.815.781	373.434.275.255	36.986.670.745
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN	372.606.381.000	372.606.381.000	359.143.077.864	1.749.403.148	357.393.674.716	15.212.706.284

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	320.439.911.000	336.780.485.000	328.945.875.137	981.923.543	327.963.951.594	8.816.533.406
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN	278.630.287.000	288.649.982.000	280.703.161.944	315.131.328	280.388.030.616	8.261.951.384
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	729.369.846.000	727.732.082.000	648.397.022.919	5.069.475.198	643.327.547.721	84.404.534.279
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**7.287.582.609.000**	**7.632.526.314.000**	**6.105.253.866.171**	**7.883.011.874**	**6.097.370.854.297**	**1.535.155.459.703**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	423.513.361.000	476.784.747.000	416.335.642.729	1.315.503.505	415.020.139.224	61.764.607.776
02	INSPEKTORAT JENDERAL	73.117.458.000	79.016.175.000	77.475.885.703	27.446.605	77.448.439.098	1.567.735.902
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.264.959.688.000	1.279.761.056.000	828.358.250.135	622.365.609	827.735.884.526	452.025.171.474
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	944.857.746.000	969.593.786.000	692.900.840.662	895.487.170	692.005.353.492	277.588.432.508
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN &	813.454.764.000	813.199.676.000	642.987.200.841	818.135.692	642.169.065.149	171.030.610.851
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	785.003.713.000	789.399.807.000	670.199.361.947	1.063.245.690	669.136.116.257	120.263.690.743
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	666.921.318.000	679.122.286.000	429.856.693.160	454.450.037	429.402.243.123	249.720.042.877
12	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.785.978.817.000	1.966.080.364.000	1.805.320.726.110	2.390.353.582	1.802.930.372.528	163.149.991.472
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL	529.775.744.000	579.568.417.000	541.819.264.884	296.023.984	541.523.240.900	38.045.176.100
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**	**107.386.317.301.000**	**115.482.201.310.000**	**102.576.081.476.774**	**92.433.024.495**	**102.483.648.452.279**	**12.998.552.857.721**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	600.000.003.000	600.000.003.000	557.090.208.865	828.105.416	556.262.103.449	43.737.899.551
02	INSPEKTORAT JENDERAL	104.974.960.000	104.974.960.000	95.039.545.658	1.151.807.793	93.887.737.865	11.087.222.135
04	DITJEN BINA MARGA	41.673.066.930.000	46.351.969.681.000	40.577.821.877.838	12.776.212.873	40.565.045.664.965	5.786.924.016.035
05	DITJEN CIPTA KARYA	16.109.202.581.000	18.634.190.049.000	17.189.191.579.236	15.667.223.951	17.173.524.355.285	1.460.665.693.715
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	37.309.551.551.000	37.825.259.130.000	32.798.190.041.595	53.954.930.576	32.744.235.111.019	5.081.024.018.981
07	DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN	9.633.756.042.000	9.989.756.042.000	9.502.039.901.578	3.667.234.833	9.498.372.666.745	491.383.375.255
08	DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	261.638.463.000	254.238.463.000	239.356.156.362	320.261.948	239.035.894.414	15.202.568.586
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	611.986.939.000	614.509.139.000	565.040.510.967	1.059.834.108	563.980.676.859	50.528.462.141
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	338.716.396.000	338.716.396.000	335.520.708.440	1.092.134.521	334.428.573.919	4.287.822.081
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	248.359.063.000	273.523.074.000	253.691.315.916	1.028.413.666	252.662.902.250	20.860.171.750
15	BADAN PENGEMBANGAN SDM	495.064.373.000	495.064.373.000	463.099.630.319	886.864.810	462.212.765.509	32.851.607.491
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**	**283.651.000.000**	**289.230.376.000**	**231.821.130.429**	**143.549.101**	**231.677.581.328**	**57.552.794.672**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283.651.000.000	289.230.376.000	231.821.130.429	143.549.101	231.677.581.328	57.552.794.672
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**414.427.810.000**	**453.525.156.000**	**439.290.655.699**	**381.610.026**	**438.909.045.673**	**14.616.110.327**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810.000	453.525.156.000	439.290.655.699	381.610.026	438.909.045.673	14.616.110.327
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**	**382.103.310.000**	**382.103.310.000**	**269.130.210.078**	**102.034.034**	**269.028.176.044**	**113.075.133.956**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	382.103.310.000	382.103.310.000	269.130.210.078	102.034.034	269.028.176.044	113.075.133.956
040	**KEMENTERIAN PARIWISATA**	**3.733.408.080.000**	**3.737.618.611.000**	**3.536.459.181.397**	**3.485.941.313**	**3.532.973.240.084**	**204.645.370.916**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	3.733.408.080.000	3.737.618.611.000	3.536.459.181.397	3.485.941.313	3.532.973.240.084	204.645.370.916
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**247.041.755.000**	**247.041.755.000**	**227.626.605.854**	**178.248.817**	**227.448.357.037**	**19.593.397.963**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	247.041.755.000	247.041.755.000	227.626.605.854	178.248.817	227.448.357.037	19.593.397.963
042	**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**	**41.284.024.119.000**	**47.325.863.849.000**	**43.434.297.250.286**	**196.309.034.386**	**43.237.988.215.900**	**4.087.875.633.100**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	29.825.289.642.000	33.854.058.563.000	30.909.197.168.391	153.095.061.478	30.756.102.106.913	3.097.956.456.087
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.833.402.000	54.833.402.000	51.833.774.961	26.180.357	51.807.594.604	3.025.807.396
03	DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI	1.152.501.579.000	1.176.651.416.000	1.031.809.774.945	4.701.705.850	1.027.108.069.095	149.543.346.905
04	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	6.344.705.887.000	8.242.915.477.000	7.760.663.443.789	23.931.856.034	7.736.731.587.755	506.183.889.245
05	DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI	1.759.261.009.000	1.845.485.105.000	1.578.726.883.186	7.008.620.995	1.571.718.262.191	273.766.842.809
06	DITJEN RISET DAN PENGEMBANGAN	1.848.367.500.000	1.852.854.786.000	1.814.314.550.272	5.147.172.479	1.809.167.377.793	43.687.408.207

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
07	DITJEN PENGUASAAN INOVASI	299.065.100.000	299.065.100.000	287.751.654.742	2.398.437.193	285.353.217.549	13.711.882.451
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**	**944.538.384.000**	**944.538.384.000**	**858.662.646.931**	**168.697.991**	**858.493.948.940**	**86.044.435.060**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	944.538.384.000	944.538.384.000	858.662.646.931	168.697.991	858.493.948.940	86.044.435.060
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**553.849.035.000**	**556.170.204.000**	**520.068.068.348**	**3.185.518.107**	**516.882.550.241**	**39.287.653.759**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	553.849.035.000	556.170.204.000	520.068.068.348	3.185.518.107	516.882.550.241	39.287.653.759
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**357.366.400.000**	**357.366.400.000**	**310.788.654.382**	**6.825.961.862**	**303.962.692.520**	**53.403.707.480**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	357.366.400.000	357.366.400.000	310.788.654.382	6.825.961.862	303.962.692.520	53.403.707.480
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**5.646.215.000.000**	**5.682.698.210.000**	**5.629.110.278.111**	**535.998.998**	**5.628.574.279.113**	**54.123.930.887**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.646.215.000.000	5.682.698.210.000	5.629.110.278.111	535.998.998	5.628.574.279.113	54.123.930.887
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**969.255.000.000**	**969.255.000.000**	**945.295.710.890**	**2.898.515.474**	**942.397.195.416**	**26.857.804.584**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	969.255.000.000	969.255.000.000	945.295.710.890	2.898.515.474	942.397.195.416	26.857.804.584
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**42.390.000.000**	**44.629.547.000**	**40.679.644.586**	**12.800.000**	**40.666.844.586**	**3.962.702.414**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42.390.000.000	44.629.547.000	40.679.644.586	12.800.000	40.666.844.586	3.962.702.414
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**4.760.239.963.000**	**4.777.877.035.000**	**4.361.146.801.380**	**6.264.963.894**	**4.354.881.837.486**	**422.995.197.514**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.239.963.000	4.777.877.035.000	4.361.146.801.380	6.264.963.894	4.354.881.837.486	422.995.197.514
055	**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**	**1.994.104.303.000**	**3.099.723.901.000**	**2.525.827.844.636**	**4.499.778.646**	**2.521.328.065.990**	**578.395.835.010**
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.994.104.303.000	3.099.723.901.000	2.525.827.844.636	4.499.778.646	2.521.328.065.990	578.395.835.010
056	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN**	**9.065.881.486.000**	**9.218.317.478.000**	**7.901.768.207.907**	**15.235.144.567**	**7.886.533.063.340**	**1.331.784.414.660**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	8.264.324.436.000	8.414.953.927.000	7.207.759.047.511	10.708.195.160	7.197.050.852.351	1.217.903.074.649
02	INSPEKTORAT JENDERAL	13.314.061.000	13.314.061.000	12.883.669.112	328.209.611	12.555.459.501	758.601.499
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	220.906.151.000	220.906.151.000	203.979.065.715	285.641.120	203.693.424.595	17.212.726.405
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	309.874.469.000	311.680.970.000	240.504.179.684	1.255.933.378	239.248.246.306	72.432.723.694
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	32.278.360.000	32.278.360.000	23.266.122.468	543.075.232	22.723.047.236	9.555.312.764
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	21.149.080.000	21.149.080.000	20.502.371.903	92.834.232	20.409.537.671	739.542.329
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	13.169.583.000	13.169.583.000	12.295.489.775	81.640.930	12.213.848.845	955.734.155
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PEN	177.447.968.000	177.447.968.000	167.803.175.353	1.923.236.082	165.879.939.271	11.568.028.729
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA	13.417.378.000	13.417.378.000	12.775.086.386	16.378.822	12.758.707.564	658.670.436
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**584.933.638.000**	**584.933.638.000**	**550.689.387.683**	**127.249.541**	**550.562.138.142**	**34.371.499.858**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	584.933.638.000	584.933.638.000	550.689.387.683	127.249.541	550.562.138.142	34.371.499.858
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.922.660.273.000**	**5.164.066.055.000**	**4.904.604.477.051**	**8.181.466.040**	**4.896.423.011.011**	**267.643.043.989**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	264.760.364.000	272.451.139.000	266.897.770.974	212.075.344	266.685.695.630	5.765.443.370
02	INSPEKTORAT JENDERAL	22.605.960.000	21.605.960.000	20.792.374.859	84.452.962	20.707.921.897	898.038.103
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	855.320.081.000	850.520.081.000	815.596.753.696	1.097.213.289	814.499.540.407	36.020.540.593
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	144.971.236.000	143.971.236.000	138.719.563.909	111.269.492	138.608.294.417	5.362.941.583
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	3.219.800.394.000	3.219.800.394.000	3.027.631.186.097	5.882.697.218	3.021.748.488.879	198.051.905.121
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	220.358.878.000	223.414.117.000	213.370.001.791	661.528.209	212.708.473.582	10.705.643.418
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	194.843.360.000	432.303.128.000	421.596.825.725	132.229.526	421.464.596.199	10.838.531.801
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**95.031.469.792.000**	**100.611.422.605.000**	**98.497.727.761.517**	**373.722.285.194**	**98.124.005.476.323**	**2.487.417.128.677**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.031.469.792.000	100.611.422.605.000	98.497.727.761.517	373.722.285.194	98.124.005.476.323	2.487.417.128.677
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**2.173.728.393.000**	**2.174.979.482.000**	**1.925.222.862.600**	**9.961.163.251**	**1.915.261.699.349**	**259.717.782.651**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.173.728.393.000	2.174.979.482.000	1.925.222.862.600	9.961.163.251	1.915.261.699.349	259.717.782.651
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**277.698.000.000**	**288.239.118.000**	**285.507.748.580**	**600.821.229**	**284.906.927.351**	**3.332.190.649**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	277.698.000.000	288.239.118.000	285.507.748.580	600.821.229	284.906.927.351	3.332.190.649
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**548.229.840.000**	**548.229.840.000**	**481.267.825.257**	**581.200.398**	**480.686.624.859**	**67.543.215.141**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	548.229.840.000	548.229.840.000	481.267.825.257	581.200.398	480.686.624.859	67.543.215.141
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**1.732.033.274.000**	**1.822.956.981.000**	**1.695.120.784.730**	**7.421.045.007**	**1.687.699.739.723**	**135.257.241.277**
01	PELAKSANA HARIAN BNN	1.732.033.274.000	1.822.956.981.000	1.695.120.784.730	7.421.045.007	1.687.699.739.723	135.257.241.277
067	**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**5.145.253.061.000**	**5.888.602.212.000**	**5.480.756.370.561**	**20.080.012.123**	**5.460.676.358.438**	**427.925.853.562**
02	INSPEKTORAT JENDERAL KDPDTT	57.060.378.000	63.294.966.000	59.287.452.744	385.301.020	58.902.151.724	4.392.814.276
03	DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.822.670.394.000	3.469.077.267.000	3.204.380.935.104	16.641.485.865	3.187.739.449.239	281.337.817.761
04	DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	332.081.502.000	332.581.502.000	324.581.764.921	7.182.541	324.574.582.380	8.006.919.620
05	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU	262.792.792.000	262.792.792.000	249.456.802.298	231.874.385	249.224.927.913	13.567.864.087
06	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	320.060.761.000	320.060.761.000	300.218.911.113	442.293.837	299.776.617.276	20.284.143.724
07	DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN	391.254.350.000	391.254.350.000	372.717.195.410	113.419.689	372.603.775.721	18.650.574.279
08	DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000.000	400.000.000.000	367.335.904.928	1.276.118.662	366.059.786.266	33.940.213.734
09	BALITBANG DIKLAT SERTA INFO	280.557.341.000	305.861.891.000	286.261.665.405	343.403.831	285.918.261.574	19.943.629.426
10	SETJEN KEMENDES PDT DAN TRANSMIGRASI	278.775.543.000	343.678.683.000	316.515.738.638	638.932.293	315.876.806.345	27.801.876.655
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**5.544.784.337.000**	**5.574.162.165.000**	**4.316.272.614.677**	**17.540.687.499**	**4.298.731.927.178**	**1.275.430.237.822**
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337.000	5.574.162.165.000	4.316.272.614.677	17.540.687.499	4.298.731.927.178	1.275.430.237.822
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**86.682.000.000**	**97.945.574.000**	**85.370.688.528**	**814.175.484**	**84.556.513.044**	**13.389.060.956**
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	86.682.000.000	97.945.574.000	85.370.688.528	814.175.484	84.556.513.044	13.389.060.956
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**1.702.912.962.000**	**1.809.763.372.000**	**1.737.614.377.840**	**5.414.085.567**	**1.732.200.292.273**	**77.563.079.727**
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962.000	1.809.763.372.000	1.737.614.377.840	5.414.085.567	1.732.200.292.273	77.563.079.727
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**12.508.650.264.000**	**24.420.025.341.000**	**20.870.681.914.609**	**7.173.092.559**	**20.863.508.822.050**	**3.556.516.518.950**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264.000	24.420.025.341.000	20.870.681.914.609	7.173.092.559	20.863.508.822.050	3.556.516.518.950
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**321.149.542.000**	**360.652.908.000**	**347.497.483.207**	**823.895.700**	**346.673.587.507**	**13.979.320.493**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	321.149.542.000	360.652.908.000	347.497.483.207	823.895.700	346.673.587.507	13.979.320.493
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**131.004.000.000**	**143.869.148.000**	**138.184.611.547**	**295.954.979**	**137.888.656.568**	**5.980.491.432**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000.000	143.869.148.000	138.184.611.547	295.954.979	137.888.656.568	5.980.491.432
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**1.416.726.219.000**	**1.387.313.742.000**	**1.321.858.447.614**	**2.133.768.506**	**1.319.724.679.108**	**67.589.062.892**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.416.726.219.000	1.387.313.742.000	1.321.858.447.614	2.133.768.506	1.319.724.679.108	67.589.062.892
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**898.552.331.000**	**899.463.709.000**	**819.035.218.263**	**610.108.785**	**818.425.109.478**	**81.038.599.522**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	898.552.331.000	899.463.709.000	819.035.218.263	610.108.785	818.425.109.478	81.038.599.522
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**1.189.258.353.000**	**1.269.989.695.000**	**1.185.841.899.987**	**1.252.696.333**	**1.184.589.203.654**	**85.400.491.346**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.189.258.353.000	1.269.989.695.000	1.185.841.899.987	1.252.696.333	1.184.589.203.654	85.400.491.346
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**827.075.267.000**	**852.637.368.000**	**805.545.005.671**	**424.550.051**	**805.120.455.620**	**47.516.912.380**
01	L A P A N	827.075.267.000	852.637.368.000	805.545.005.671	424.550.051	805.120.455.620	47.516.912.380
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**	**790.877.075.000**	**796.117.205.000**	**701.550.122.662**	**5.068.068.263**	**696.482.054.399**	**99.635.150.601**
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075.000	796.117.205.000	701.550.122.662	5.068.068.263	696.482.054.399	99.635.150.601
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**182.465.697.000**	**183.641.416.000**	**177.987.242.239**	**126.427.159**	**177.860.815.080**	**5.780.600.920**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.465.697.000	183.641.416.000	177.987.242.239	126.427.159	177.860.815.080	5.780.600.920
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**177.868.325.000**	**177.868.325.000**	**167.511.272.515**	**1.390.385.188**	**166.120.887.327**	**11.747.437.673**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	177.868.325.000	177.868.325.000	167.511.272.515	1.390.385.188	166.120.887.327	11.747.437.673
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**291.891.512.000**	**333.486.408.000**	**321.005.310.663**	**181.914.865**	**320.823.395.798**	**12.663.012.202**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512.000	333.486.408.000	321.005.310.663	181.914.865	320.823.395.798	12.663.012.202
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**195.514.015.000**	**195.514.015.000**	**190.711.584.773**	**853.883.752**	**189.857.701.021**	**5.656.313.979**
01	ARSIP NASIONAL	195.514.015.000	195.514.015.000	190.711.584.773	853.883.752	189.857.701.021	5.656.313.979
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**654.926.411.000**	**1.073.369.802.000**	**979.109.694.360**	**1.821.965.081**	**977.287.729.279**	**96.082.072.721**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	654.926.411.000	1.073.369.802.000	979.109.694.360	1.821.965.081	977.287.729.279	96.082.072.721
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.451.983.609.000**	**1.608.453.127.000**	**1.557.552.570.481**	**1.891.576.299**	**1.555.660.994.182**	**52.792.132.818**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.451.983.609.000	1.608.453.127.000	1.557.552.570.481	1.891.576.299	1.555.660.994.182	52.792.132.818
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**3.534.508.009.000**	**4.209.118.299.000**	**3.707.309.987.567**	**5.480.724.296**	**3.701.829.263.271**	**507.289.035.729**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	720.530.123.000	728.169.077.000	673.414.380.351	810.875.559	672.603.504.792	55.565.572.208
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.982.444.315.000	2.633.509.949.000	2.248.027.681.364	2.314.110.497	2.245.713.570.867	387.796.378.133
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	150.000.000.000	155.071.952.000	143.401.208.668	390.481.576	143.010.727.092	12.061.224.908
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	148.887.001.000	148.887.001.000	134.075.343.999	528.970.752	133.546.373.247	15.340.627.753
05	INSPEKTORAT JENDERAL	44.500.000.000	44.500.000.000	42.411.000.199	137.768.042	42.273.232.157	2.226.767.843
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	155.463.929.000	153.463.929.000	134.465.419.564	31.335.320	134.434.084.244	19.029.844.756
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	70.426.317.000	70.426.317.000	61.602.478.255	334.069.197	61.268.409.058	9.157.907.942
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	37.256.324.000	36.456.324.000	35.755.656.344	28.885.696	35.726.770.648	729.553.352
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	225.000.000.000	238.633.750.000	234.156.818.823	904.227.657	233.252.591.166	5.381.158.834
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**5.037.540.061.000**	**9.434.847.434.000**	**8.780.146.426.268**	**81.360.031.747**	**8.698.786.394.521**	**736.061.039.479**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.037.540.061.000	9.434.847.434.000	8.780.146.426.268	81.360.031.747	8.698.786.394.521	736.061.039.479
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**790.170.548.000**	**854.230.815.000**	**815.517.828.298**	**2.348.286.272**	**813.169.542.026**	**41.061.272.974**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	790.170.548.000	854.230.815.000	815.517.828.298	2.348.286.272	813.169.542.026	41.061.272.974
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**1.082.392.940.000**	**1.082.392.940.000**	**1.044.129.083.918**	**15.382.109.501**	**1.028.746.974.417**	**53.645.965.583**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	230.297.694.000	230.297.694.000	208.378.443.320	460.470.701	207.917.972.619	22.379.721.381
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	852.095.246.000	852.095.246.000	835.750.640.598	14.921.638.800	820.829.001.798	31.266.244.202
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**114.860.602.000**	**122.421.071.000**	**121.656.698.841**	**45.314.455**	**121.611.384.386**	**809.686.614**
01	KOMISI YUDISIAL RI	114.860.602.000	122.421.071.000	121.656.698.841	45.314.455	121.611.384.386	809.686.614
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**749.380.299.000**	**7.192.186.163.000**	**7.113.492.996.337**	**8.782.882.614**	**7.104.710.113.723**	**87.476.049.277**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299.000	7.192.186.163.000	7.113.492.996.337	8.782.882.614	7.104.710.113.723	87.476.049.277
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**	**396.160.715.000**	**396.160.715.000**	**373.809.752.897**	**971.113.608**	**372.838.639.289**	**23.322.075.711**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	396.160.715.000	396.160.715.000	373.809.752.897	971.113.608	372.838.639.289	23.322.075.711
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**224.809.272.000**	**224.809.272.000**	**208.544.893.194**	**3.709.997.577**	**204.834.895.617**	**19.974.376.383**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272.000	224.809.272.000	208.544.893.194	3.709.997.577	204.834.895.617	19.974.376.383
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**2.235.099.560.000**	**2.235.099.560.000**	**2.182.072.292.448**	**554.670.639**	**2.181.517.621.809**	**53.581.938.191**
01	BADAN SAR NASIONAL	2.235.099.560.000	2.235.099.560.000	2.182.072.292.448	554.670.639	2.181.517.621.809	53.581.938.191
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**134.795.052.000**	**134.795.052.000**	**129.420.999.925**	**917.313.339**	**128.503.686.586**	**6.291.365.414**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134.795.052.000	134.795.052.000	129.420.999.925	917.313.339	128.503.686.586	6.291.365.414
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**242.479.384.000**	**242.479.384.000**	**227.100.041.047**	**23.669.000**	**227.076.372.047**	**15.403.011.953**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	242.479.384.000	242.479.384.000	227.100.041.047	23.669.000	227.076.372.047	15.403.011.953
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**148.125.006.000**	**151.839.556.000**	**149.081.347.788**	**1.493.039.087**	**147.588.308.701**	**4.251.247.299**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	148.125.006.000	151.839.556.000	149.081.347.788	1.493.039.087	147.588.308.701	4.251.247.299
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**203.542.280.000**	**203.542.280.000**	**175.192.633.979**	**900.427.802**	**174.292.206.177**	**29.250.073.823**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203.542.280.000	203.542.280.000	175.192.633.979	900.427.802	174.292.206.177	29.250.073.823
112	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**	**2.046.159.533.000**	**2.046.159.533.000**	**1.368.887.676.077**	-	**1.368.887.676.077**	**677.271.856.923**
01	BPKPB BATAM	2.046.159.533.000	2.046.159.533.000	1.368.887.676.077	-	1.368.887.676.077	677.271.856.923
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**	**505.586.324.000**	**543.733.483.000**	**538.263.765.143**	**1.862.709.257**	**536.401.055.886**	**7.332.427.114**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	505.586.324.000	543.733.483.000	538.263.765.143	1.862.709.257	536.401.055.886	7.332.427.114
114	**SEKRETARIAT KABINET**	**230.475.029.000**	**353.401.987.000**	**299.257.700.308**	**1.456.315.174**	**297.801.385.134**	**55.600.601.866**
01	SEKRETARIAT KABINET	230.475.029.000	353.401.987.000	299.257.700.308	1.456.315.174	297.801.385.134	55.600.601.866
115	**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**	**5.568.195.464.000**	**9.677.351.776.000**	**7.759.947.900.291**	**11.064.341.200**	**7.748.883.559.091**	**1.928.468.216.909**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (*Audited*)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	5.568.195.464.000	9.677.351.776.000	7.759.947.900.291	11.064.341.200	7.748.883.559.091	1.928.468.216.909
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**958.068.760.000**	**1.039.091.672.000**	**981.814.649.376**	**512.776.759**	**981.301.872.617**	**57.789.799.383**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.068.760.000	1.039.091.672.000	981.814.649.376	512.776.759	981.301.872.617	57.789.799.383
117	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**838.896.336.000**	**959.367.584.000**	**905.705.614.304**	**297.222.395**	**905.408.391.909**	**53.959.192.091**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336.000	959.367.584.000	905.705.614.304	297.222.395	905.408.391.909	53.959.192.091
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**	**224.864.020.000**	**224.864.020.000**	**152.957.668.389**	**23.375.000**	**152.934.293.389**	**71.929.726.611**
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	224.864.020.000	224.864.020.000	152.957.668.389	23.375.000	152.934.293.389	71.929.726.611
119	**BADAN KEAMANAN LAUT**	**558.997.000.000**	**558.997.000.000**	**542.879.018.283**	**193.697.750**	**542.685.320.533**	**16.311.679.467**
01	BADAN KEAMANAN LAUT	558.997.000.000	558.997.000.000	542.879.018.283	193.697.750	542.685.320.533	16.311.679.467
120	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**	**300.306.844.000**	**300.306.844.000**	**278.233.537.674**	**4.356.452.259**	**273.877.085.415**	**26.429.758.585**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.306.844.000	300.306.844.000	278.233.537.674	4.356.452.259	273.877.085.415	26.429.758.585
121	**BADAN EKONOMI KREATIF**	**746.158.140.000**	**746.158.140.000**	**662.082.772.527**	**5.959.145.628**	**656.123.626.899**	**90.034.513.101**
01	SEKRETARIAT BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140.000	746.158.140.000	662.082.772.527	5.959.145.628	656.123.626.899	90.034.513.101
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**607.059.203.577.000**	**623.808.784.256.000**	**608.763.240.084.018**		**608.763.240.084.018**	**15.045.544.171.982**
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	238.607.121.370.000	264.850.500.000.000	257.952.028.141.279		257.952.028.141.279	6.898.471.858.721
02	PENGELOLA HIBAH	1.460.845.703.000	1.988.620.314.000	1.520.560.988.285		1.520.560.988.285	468.059.325.715
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	156.228.125.107.000	223.590.040.996.000	216.883.304.115.301		216.883.304.115.301	6.706.736.880.699
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	100.422.042.713.000	15.472.570.425.000	15.075.455.517.087		15.075.455.517.087	397.114.907.913
99	TRANSAKSI KHUSUS	110.341.068.684.000	117.907.052.521.000	117.331.891.322.066		117.331.891.322.066	575.161.198.934
XXX						**(222)**	
XX						(222)	
JUMLAH		**1.454.494.390.020.000**	**1.547.176.957.250.000**	**1.459.294.959.016.680**	**3.970.079.789.065**	**1.455.324.879.227.620**	**91.852.078.022.383**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited)*

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	86.170.975.942	778.454.510.584	34.378.811.802						**899.004.298.328**
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.016.368.546.497	3.409.935.811.365	177.368.162.618						**4.603.672.520.480**
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.935.394.391.927	1.471.421.078.750	136.781.298.336						**3.543.596.769.013**
005	MAHKAMAH AGUNG	6.494.938.953.632	1.350.195.992.537	578.283.768.457						**8.423.418.714.626**
006	KEJAKSAAN RI	3.214.731.010.681	1.535.817.457.629	1.368.240.118.074						**6.118.788.586.384**
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	463.202.827.345	1.614.243.792.772	252.884.656.876						**2.330.331.276.993**
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	747.258.581.185	2.180.307.294.836	147.709.097.610						**3.075.274.973.631**
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.373.674.823.399	3.191.882.183.199	978.211.269.324						**7.543.768.275.922**
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	45.402.355.204.242	42.136.175.243.332	19.141.896.795.971						**106.680.427.243.545**
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	6.306.574.297.290	4.489.360.521.766	1.845.754.684.471						**12.641.689.503.527**
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	20.361.276.169.469	17.744.369.417.285	1.794.822.501.911						**39.900.468.088.665**
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.430.897.301.335	18.536.529.810.452	869.175.725.907						**21.836.602.837.694**
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	683.586.736.719	1.498.565.789.721	445.957.576.454						**2.628.110.102.894**
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	885.922.266.994	3.719.806.773.617	1.305.118.201.013						**5.910.847.241.624**
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.535.208.820.295	14.458.084.323.975	27.082.448.210.488						**45.075.741.354.758**
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.345.622.015.736	20.020.060.946.049	1.015.169.213.941				10.051.583.455.170		**39.432.435.630.896**
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.016.492.763.916	23.989.406.062.646	2.850.715.434.115				25.492.043.146.000		**57.348.657.406.677**
025	KEMENTERIAN AGAMA	35.772.161.121.423	18.041.375.535.542	4.050.707.389.362				1.516.755.163.940		**59.380.999.210.267**
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	402.989.197.496	2.585.580.220.182	765.849.225.163						**3.754.418.642.841**
027	KEMENTERIAN SOSIAL	471.787.790.216	3.472.332.616.879	134.171.280.952				37.155.851.182.997		**41.234.142.871.044**
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.917.981.838.419	4.589.002.842.831	673.950.044.206						**7.180.934.725.456**
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.842.935.277.585	3.477.393.598.803	777.041.977.909						**6.097.370.854.297**
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.631.721.467.832	29.618.990.691.437	70.232.936.293.010				-		**102.483.648.452.279**
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	57.070.605.464	168.783.435.937	5.823.539.927						**231.677.581.328**
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	90.734.621.345	339.235.959.903	8.938.464.425						**438.909.045.673**
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PMK	54.982.570.007	209.598.759.707	4.446.846.330						**269.028.176.044**
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	261.305.732.625	2.836.476.913.348	435.190.594.111						**3.532.973.240.084**
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	48.701.098.828	125.054.565.466	53.692.692.743						**227.448.357.037**
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	13.280.875.215.715	20.135.797.396.410	6.120.933.623.976				3.700.381.979.799		**43.237.988.215.900**
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	102.839.304.644	679.107.896.509	76.546.747.787						**858.493.948.940**
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39.627.029.366	474.959.429.117	2.296.091.758						**516.882.550.241**
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	71.852.712.173	209.700.342.475	22.409.637.872						**303.962.692.520**
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	277.795.577.797	2.220.809.029.416	3.129.969.671.900						**5.628.574.279.113**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited)*

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	120.526.940.891	272.968.696.120	548.901.558.405						**942.397.195.416**
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	20.697.566.925	19.969.277.661							**40.666.844.586**
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.995.459.018.043	2.009.571.195.781	349.851.623.662						**4.354.881.837.486**
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	155.691.045.921	2.306.280.180.629	59.356.839.440						**2.521.328.065.990**
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.042.764.441.246	5.199.330.912.447	644.437.709.647						**7.886.533.063.340**
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	84.674.548.185	335.312.296.970	130.575.292.987						**550.562.138.142**
059	KEMENTERIAN KOMINFO	400.706.908.212	4.265.388.630.083	230.327.472.716						**4.896.423.011.011**
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	46.662.847.953.298	23.501.312.948.373	27.959.844.574.652						**98.124.005.476.323**
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	475.778.964.428	948.943.275.024	490.539.459.897						**1.915.261.699.349**
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	73.231.063.843	112.992.029.422	98.683.834.086						**284.906.927.351**
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	124.417.949.241	336.423.267.240	19.845.408.378						**480.686.624.859**
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	476.917.743.154	846.839.556.022	363.942.440.547						**1.687.699.739.723**
067	KEMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	214.433.233.366	4.972.694.878.931	273.548.246.141						**5.460.676.358.438**
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.094.883.187.414	2.112.777.623.516	91.071.116.248						**4.298.731.927.178**
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	28.014.240.738	55.085.536.118	1.456.736.188						**84.556.513.044**
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	525.403.077.382	677.493.384.294	529.303.830.597						**1.732.200.292.273**
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.216.398.024.288	19.164.482.104.500	482.628.693.262						**20.863.508.822.050**
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	54.993.364.719	259.362.392.383	32.317.830.405						**346.673.587.507**
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	69.628.280.061	54.644.073.748	13.616.302.759						**137.888.656.568**
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	565.048.392.044	397.698.885.343	356.977.401.721						**1.319.724.679.108**
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	355.040.869.883	212.129.033.912	251.255.205.683						**818.425.109.478**
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	433.364.546.467	458.606.070.691	292.618.586.496						**1.184.589.203.654**
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	148.180.497.320	196.066.274.249	460.873.684.051						**805.120.455.620**
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	75.374.738.737	193.304.567.250	427.802.748.412						**696.482.054.399**
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	44.452.555.128	82.234.465.575	51.173.794.377						**177.860.815.080**
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	55.696.579.799	94.970.158.662	15.454.148.866						**166.120.887.327**
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	143.220.123.815	158.026.429.851	19.576.842.132						**320.823.395.798**
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	84.018.523.695	83.934.300.921	21.904.876.405						**189.857.701.021**
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	329.074.850.118	556.843.766.590	91.369.112.571						**977.287.729.279**
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	951.831.224.384	516.715.633.145	87.114.136.653						**1.555.660.994.182**
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	460.861.789.263	3.137.150.750.100	103.816.723.908						**3.701.829.263.271**
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	87.726.417.414	8.448.512.695.106	162.547.282.001						**8.698.786.394.521**
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	490.672.001.007	245.226.446.228	77.271.094.791						**813.169.542.026**
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	312.527.851.130	704.386.974.978	11.832.148.309						**1.028.746.974.417**
100	KOMISI YUDISIAL RI	33.621.815.707	85.284.151.512	2.705.417.167						**121.611.384.386**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 *(Audited)*

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	54.597.022.631	610.918.724.851	37.396.374.634				6.401.797.991.607		**7.104.710.113.723**
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	109.433.463.778	246.607.285.192	16.797.890.319						**372.838.639.289**
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	30.227.197.503	153.087.574.146	21.520.123.968						**204.834.895.617**
107	BADAN SAR NASIONAL	347.514.628.106	732.925.771.550	1.101.077.222.153						**2.181.517.621.809**
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	33.293.682.974	89.765.326.011	5.444.677.601						**128.503.686.586**
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	10.209.471.000	36.235.102.811	180.631.798.236						**227.076.372.047**
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	59.982.337.390	84.234.512.644	3.371.458.667						**147.588.308.701**
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	24.043.127.236	144.097.507.091	6.151.571.850						**174.292.206.177**
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		929.162.671.613	439.725.004.464						**1.368.887.676.077**
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	22.882.584.473	424.376.325.378	89.142.146.035						**536.401.055.886**
114	SEKRETARIAT KABINET	179.679.363.692	113.211.835.738	4.910.185.704						**297.801.385.134**
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	72.208.953.199	7.477.667.982.023	199.006.623.869						**7.748.883.559.091**
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	577.433.477.279	287.004.579.118	116.863.816.220						**981.301.872.617**
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	309.492.066.577	464.242.653.477	131.673.671.855						**905.408.391.909**
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		39.447.350.289	113.486.943.100						**152.934.293.389**
119	BADAN KEAMANAN LAUT	44.718.264.750	138.747.622.217	359.219.433.566						**542.685.320.533**
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	34.838.040.911	222.251.602.285	16.787.442.219						**273.877.085.415**
121	BADAN EKONOMI KREATIF	19.634.556.304	626.449.877.142	10.039.193.453						**656.123.626.899**
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	115.927.310.196.440	316.191.097.283		257.952.028.141.279	216.883.304.115.301	1.520.560.988.285		16.163.845.545.430	**608.763.240.084.018**
	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA BUN DAN SAI									
	JUMLAH	**346.890.715.609.048,00**	**347.468.404.508.711,00**	**184.127.607.400.272,00**	**257.952.028.141.279,00**	**216.883.304.115.301,00**	**1.520.560.988.285,00**	**84.318.412.919.513,00**	**16.163.845.545.430,00**	**1.455.324.879.227.840,00**
	Persentase Per Jenis Belanja	**23,84%**	**23,88%**	**12,65%**	**17,72%**	**14,90%**	**0,10%**	**5,79%**	**1,11%**	**100,00%**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 2018 (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
1	LK PLN 1	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (Phase II)	World Bank (IBRD)	WISMP II	IBRD 8027 ID	10837161	06 Oktober 2011	06 Oktober 2011	31 Juli 2018	IDR	65.952.480.000	54.506.181.818	9.550.904.428		9.550.904.426							PUPR	BPK dan BPKP
2	LK PLN 2	Second Additional Financing For Thir Water Supply And Sanitation For Law-Income Comunities / Community Basd Water Supply Project	Bank Dunia (World Bank)	PAMSIMAS III	IBRD LOAN No. 8578 ID	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	IDR	26.779.000.000	6.248.000.000	8.962.144.753		8.962.144.753							Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	BPKP
3	LK PLN 3	Asean Development Bank - Ordinary Fund	ADB	Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)	3440 INO	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	8.268.298.905	15.155.070.803		15.155.070.803				243.648.905			Ditjen SDA, KemenPUPR	BPK
4	LK PLN 4	Asean Development Bank - Ordinary Fund	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	3529 INO dan 8327 INO (AIF)	1883YQPA dan 11DDK81A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	600.000.000	-	17.425.523.167		17.425.523.167							Ditjen SDA, KemenPUPR	BPK
5	LK PLN 5	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	INA-19	21654001	22 Desember 2012	14 Februari 2012	14 Februari 2019	USD	100.000.000	36.750.870	159.201.503.218	-		159.201.503.218			159.201.503.218			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
6	LK PLN 6	Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management	KfW Jerman	Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management	BMZ 201066471	21667101	02 Mei 2013	02 Mei 2013	06 Juni 2018	EUR	75.000.000	2.937.770	121.190.147.115			121.190.147.115			121.190.147.115			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
7	LK PLN 7	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	Deutsche Bank-Spanyol	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	LA 21.06.2016	1ZPKKNUA	21 Juni 2016	02 Agustus 2018	31 Agustus 2018	EUR	6.979.739	2.010.753	56.874.921.496			56.874.921.496				56.874.921.496		Ditjen. Cipta Karya	BPKP
8	LK PLN 8	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	ICO - Spanyol	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	DNI-00805-023-T	1GNMNYFA	21 Juni 2016	02 Agustus 2018	31 Agustus 2018	EUR	6.979.739		45.344.434.060			45.344.434.060				45.344.434.060		Ditjen. Cipta Karya	BPKP
9	LK PLN 9	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	HS00216000	15PR17RA	20 Mei 2016	01 Agustus 2016	03 Agustus 2020	USD	36.443.330	10.175.513	228.939.526.983			228.939.526.983			228.939.526.983			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
10	LK PLN 10	Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	China	Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	PBC No. (2015) 39 TOTAL 382	1MZJG1EA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	198.772.235	59.484.364	1.277.232.416.424			1.277.232.416.424			1.277.232.416.424			Ditjen. Bina Marga	BPKP
11	LK PLN 11	Toll Road Development of Balikpapan - Samarinda	China	Toll Road Development of Balikpapan - Samarinda	PBC No. (2015) 42 TOTAL 385	1VMMBHYA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	53.405.756	6.989.766	170.327.495.551			170.327.495.551			170.327.495.551			Ditjen. Bina Marga	BPKP
12	LK PLN 12	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase II	China	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan-Sumedang Phase II	PBC No. (2016) 01 TOTAL 389	1RVNVDTA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	219.398.580	37.332.912	864.521.696.290			864.521.696.290			864.521.696.290			Ditjen. Bina Marga	BPKP
13	LK PLN 13	Toll Road Development of Manado-Bitung	China	Toll Road Development of Manado-Bitung	PBC No. (2016) 07 TOTAL 395	1UG6AGFA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	78.099.963	12.000.560	552.071.906.582			552.071.906.582			552.071.906.582			Ditjen. Bina Marga	BPKP
14	LK PLN 14	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	China	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	PBC No. (2012) 44 TOTAL 232	21663301	12 November 2012	11 Maret 2013	11 Maret 2018	USD	122.429.914	85.058.710	368.392.154.294			368.392.154.294			368.392.154.294			Ditjen. Bina Marga	BPKP
15	LK PLN 15	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	IP-551	21616401	31/03/2009	28 Juli 2009	28 Desember 2018	JPY	7.490.000.000	5.944.901.403	59.730.101.262			59.730.101.262			59.730.101.262			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
16	LK PLN 16	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I)		Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I)	IP-552	21617101	31 Maret 2009	28/07/2009	28/07/2018	JPY	6.060.000.000	5.287.388.327	16.460.370.121			16.460.370.121			16.460.370.121			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
17	LK PLN 17	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	JICA	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	IP-559	21668801	28/03/2013	25 Juli 2013	25 Juli 2020	JPY	3.311.000.000	792.523.097	34.178.834.597			34.178.834.597			34.178.834.597			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
18	LK PLN 18	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area – Phase II	JICA	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area – Phase II	IP-566	21682601	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	5.111.000.000	3.545.268.195	59.285.043.476			59.285.043.476			59.285.043.476			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
19	LK PLN 19	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)	IP-567	21684001	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	4.954.000.000	556.143.416	89.315.131.871		7.669.904.250	81.645.227.621		7.669.904.250	81.645.227.621			Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
20	LK PLN 20	Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	JICA	Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	IP-573	1HJ95NBA	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48.237.000.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
21	LK PLN 21	Komering Irrigation Project Stage III	JICA	Komering Irrigation Project Stage III	IP-574	1SYVA92A	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	15.896.000.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
22	LK PLN 22	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	JICA	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	IP-575	17HCS2YA	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	9.855.000.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
23	LK PLN 23	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	IP-564	21681901	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2019	JPY	10.029.000.000	9.554.358.849	-									Ditjen. Cipta Karya	BPKP
24	LK PLN 24	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	IP-565	21683301	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	1.968.000.000	147.853.876	54.811.395.418			54.811.395.418			54.811.395.418			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
25	LK PLN 25	Patimban Port Development Project (I)	JICA	Patimban Port Development Project (I)	IP-577	1AVH2LAA	15/11/2017	13 Maret 2018	13 Maret 2026	JPY	11.535.000.000	-	147.365.517.243			147.365.517.243			147.365.517.243			Ditjen. Bina Marga	BPKP
26	LK PLN 26	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	3455-IND	1F1NDHGA	28/11/2016	21 Desember 2016	30 Juni 2020	USD	148.200.000	1.031.941	30.921.829.528		14.531.689.486	16.390.140.042			16.390.140.042			Sekretariat Jenderal	BPK
27	LK PLN 27	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	ADB	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	3440-IND	1RUX78CA	02/11/20116	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	2.000.000	89.331.208.000		162.836.100	89.168.271.900			89.168.271.900			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
28	LK PLN 28	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	IFAD	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	2000001445	1116F8FA	13 Februari 2017	13 Februari 2017	30 September 2023	EUR	93.150.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
29	LK PLN 29	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB-OCR	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	3529-IND	1Z83YQPA	31/07/2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500.000.000	-	68.551.323.480		17.835.483.373	50.715.840.107		246.415.445	50.715.840.107			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
30	LK PLN 30	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB-AIF	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	8327-IND (AIF)	11DDKS1A	31/07/2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100.000.000	-	13.967.729.431		3.898.311.213	10.069.418.218		46.853.575	10.069.418.218			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
31	LK PLN 31	Regional Road Development (RRDP)	ADB	Regional Road Development (RRDP)	2817-IND	10846401	07 Mei 2019	05 Agustus 2012	30/11/2018	USD	180.000.000	131.988.879	365.140.103.365		10.759.299.193	354.380.804.172			354.380.804.172			Ditjen. Bina Marga	BPK
32	LK PLN 32	Regional Road Development (RRDP)	IDB	Regional Road Development (RRDP)	IND-161	10848801	17/04/2012	29 April 2013	10 Juni 2019	USD	65.000.000	23.852.315	154.347.186.228			154.347.186.228			154.347.186.228			Ditjen. Bina Marga	BPKP
33	LK PLN 33	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	2654-IND	10811901	21/019/2010	22 November 2010	31 Desember 2020	USD	35.000.000	22.084.024	-									Ditjen. Cipta Karya	BPK
34	LK PLN 34	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - Ordinary Operations	ADB-OCR	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - Ordinary Operations	3123-IND	10883301	13/05/2014	09 Juli 2014	31 Desember 2020	USD	80.000.000	1.648.262	15.437.864.965			15.437.864.965			15.437.864.965			Ditjen. Cipta Karya	BPK
35	LK PLN 35	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - AIF	ADB-AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) - AIF	8280-IND (AIF)	10884001	13/05/2015	09 Juli 2014	31 Desember 2020	USD	40.000.000		-									Ditjen. Cipta Karya	BPK
36	LK PLN 36	National Slum Upgrading Project (Service Ijara)	IDB	National Slum Upgrading Project (Service Ijara)	IND-174	1VFX57JA	19/05/2016	18 September 2016	04 Mei 2021	USD	8.000.000	2.000.000	9.828.555.605		9.828.555.605							Ditjen. Cipta Karya	BPKP
37	LK PLN 37	National Slum Upgrading Project (Isthsina Financing)	IDB	National Slum Upgrading Project (Isthsina Financing)	IND-175	1ENYRFPA	19/05/2017	18 September 2016	09 Mei 2021	USD	311.760.000	71.911.000	874.672.705.842		874.672.705.842							Ditjen. Cipta Karya	BPKP
38	LK PLN 38	National Slum Upgrading Project (ISFD Loan)	IDB	National Slum Upgrading Project (ISFD Loan)	IND-176	1INT81PXA	19/05/2018	18 September 2016	22 November 2021	USD	10.000.000	689.552	-									Ditjen. Cipta Karya	BPKP
39	LK PLN 39	Community Based Sanitation Program (SANIMAS PROJECT)	IDB	Community Based Sanitation Program (SANIMAS PROJECT)	IND-167	10880201	19/02/2014	12 Juni 2015	12 Juni 2020	USD	100.000.000	38.337.813	179.138.390.249		179.138.390.249			3.740.055.695				Ditjen. Cipta Karya	BPKP
40	LK PLN 40	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase - 2 (NUSP-2)	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase - 2 (NUSP-2)	3122-IND	10882601	23/04/2014	17 Juli 2014	31 Desember 2019	USD	74.400.000	56.225.098	203.982.090.188		140.728.467.858	63.253.622.330			63.253.622.330			Ditjen. Cipta Karya	BPK
41	LK PLN 41	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Ijara)	IDB	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Ijara)	IDN-1012	1SMHNPCA	16/05/2017	07 November 2017	14 Agustus 2022	USD	15.000.000	-	-									Ditjen. Bina Marga	BPKP

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 2018 (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
42	LK PLN 42	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	World Bank	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	8027-ID	10837101	06 Oktober 2011	04 November 2011	31 Mei 2018	USD	150.000.000	109.745.178	54.750.491.308		23.000.569.540	31.749.921.768		37.207.560	234.259.875	31.515.661.893		Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
43	LK PLN 43	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	World Bank	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	8121-ID	10845701	17 Februari 2012	08 Agustus 2012	28 Februari 2019	USD	139.640.000	87.021.321	105.390.779.288		484.502.800	104.906.276.488		69.542.800	104.906.276.488			Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
44	LK PLN 44	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	World Bank	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	8711-ID	1ZZ7LGXA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	3.626.747	85.779.222.274		47.161.925.645	38.617.296.629		56.512.800	31.836.063.547	6.781.233.082		Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
45	LK PLN 45	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	AIIB	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	LN000010-1-IDN	1XH37L2A	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	3.626.747	85.755.483.991		47.138.187.362	38.617.296.629		56.512.800	31.836.063.547	6.781.233.082		Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
46	LK PLN 46	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	World Bank	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	8043-ID	10842601	14 Desember 2011	13 Maret 2012	28 Februari 2021	USD	250.000.000	156.090.199	526.281.255.242		745.841.919	525.535.413.323			525.535.413.323			Ditjen. Bina Marga	BPK
47	LK PLN 47	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	World Bank	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	8213-ID	10861901	28 Desember 2012	01 Maret 2013	31 Desember 2018	USD	266.000.000	257.786.429	173.972.546.000		173.972.546.000							Ditjen. Cipta Karya	BPK
48	LK PLN 48	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	World Bank	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	8259-ID	10865701	11 Juni 2013	02 Agustus 2013	30 November 2018	USD	99.900.000	87.600.000	263.169.488.790		263.169.488.790							Ditjen. Cipta Karya	BPK
49	LK PLN 49	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	World Bank	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	8578-ID	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	USD	300.000.000	74.250.000	911.009.288.532		911.009.288.532							Ditjen. Cipta Karya	BPK
50	LK PLN 50	National Slum Upgrading Program (NSUP)	World Bank	National Slum Upgrading Program (NSUP)	8636-ID	18KGECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Maret 2022	USD	216.500.000	20.200.000	392.235.447.886		392.235.447.886							Ditjen. Cipta Karya	BPK
51	LK PLN 51	National Slum Upgrading Program (NSUP)	AIIB	National Slum Upgrading Program (NSUP)	LN00040-IND	1PTDQOAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Maret 2022	USD	216.500.000	20.200.000	437.851.602.405		435.189.334.405	2.662.268.000			2.662.268.000			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
52	LK PLN 52	National Affordable Housing Program	World Bank	National Affordable Housing Program	8717-ID	1HG72SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	31 Maret 2021	USD	450.000.000	-	586.710.455.120		586.710.455.120							Ditjen. Pembiayaan Perumahan	BPK
53	LK PLN 53	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	World Bank	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	8891-ID	1NF3PM6A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPK
54	LK PLN 54	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	AIIB	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	0060A	1HS4NF9A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	-	-									Ditjen. Sumber Daya Air	BPKP
55	LK PLN 55	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	World Bank	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	8872-ID	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100.000.000	-	-									Ditjen. Cipta Karya	BPK
56	LK PLN 56	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	World Bank	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	P4820	1NM6DKDA	21 November 2017	21 November 2017	30 November 2018	USD	4.000.000	-	4.711.277.500		4.711.277.500							BPIW	BPK
57	LK PLN 57	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/ Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	World Bank	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/ Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	8861-ID	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300.000.000	-	-									BPIW	BPK
58	LK PLN 58	Padang Bypass Capacity Expansion Project	Korea	Padang Bypass Capacity Expansion Project	INA-17	21643301	03 Januari 2011	14 April 2011	14/08/2017	USD	58.000.000	44.530.515	2.086.075.454		2.086.075.454				2.086.075.454			Ditjen. Bina Marga	BPKP
59	LK PLN 59	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	The Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)	IBRD Loan 8897-ID	1BUY9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditjen Jenderal Infrastruktur Keagrariaan	
60	LK PLN 60	State Accountability Revitalization (SAR)	ADB	State Accountability Revitalization (SAR)	2927-IND	10859501	26 November 2012	19 Februari 2013	31 Maret 2019	USD	57.750.000	806.831.550.789	120.580.035.075		62.689.449.175	57.890.585.900			58.861.081.500			BPKP	BPK
61	LK PLN 61	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD	World Bank	Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI	8336-ID	10881901	17 Maret 2014	05 Juni 2014	31 Juni 2019	USD	47.380.000,00	15.800.000,00	22.200.000,00	-	48.357.688.193,00	32.281.587.675,00	-	2.810.080.551,00	32.800.422.675,00	-	-	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014-2017) 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	BPK RI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan /GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount		Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
														Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
1	LK HLN 1	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)	IFAD	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)		71697101				SGD	675.000		2.983.919.382		2.983.919.382							BKP (Kementerian Pertanian)	
2	LK HLN 2	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Australia	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	66387	74936401	26 Desember 2012	28 Februari 2014	31 Desember 2021	AUD	38.000.000											Ditjen. Bina Marga	BPKP
3	LK HLN 3	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	World Bank	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	TF-A4649	2XNH4UXA	21 November 2017	21 November 2017	30 April 2019	USD	2.100.000		7.867.080.613		7.867.080.613							BPIW	BPK
4	LK HLN 4	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG)	Australia	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIIG)	66387	73736401	26 April 2012	01 Juli 2012	30 Juni 2020	AUD	40.000.000	2.730.600	-									Ditjen. Cipta Karya	BPKP
5	LK HLN 5	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	Australia	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	62031	72599501	26 April 2012	01 Juli 2012	30 Juni 2020	AUD	93.645.646	73.342.346	-									Ditjen. Cipta Karya	BPKP
6	LK HLN 6	TA for Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management Programme	KfW Jerman	TA for Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management Programme	202060796	73657101	02 Mei 2013	02 Mei 2013	31 Desember 2020	EUR	7.600.000					9.124.373.324			9.124.373.324			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
7	LK HLN 7	Feasibility Studi for the Project Emission Reduction in Cities - Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	KfW Jerman	Feasibility Studi for the Project Emission Reduction in Cities - Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	FA07112016	2H1GNLLA	07 November 2016	07 November 2016	30/06/2019	EUR	2.550.000					15.210.896.806			15.210.896.806			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
8	LK HLN 8	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	KfW Jerman	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	FA07112016	2VPZGQ7A	07 November 2018	07 November 2018	28/02/2019	EUR	750.000					1.868.736.375			1.868.736.375			Ditjen. Cipta Karya	BPKP
9	LK HLN 9	The Palembang City Sewerage Project	Australia	The Palembang City Sewerage Project	73826	2K6Q8TSA	11 September 2017	12 September 2017	31/08/2022	AUD	45.000.000											Ditjen. Cipta Karya	BPKP
10	LK HLN 10	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	World Bank	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	TF OA2519	23AEKS4A	20 Mei 2016	20 Mei 2016	31/03/2018	USD	1.619.522			7.758.707.602								Ditjen. Cipta Karya	BPK

Lampiran 3

Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah & Dana Desa TA 2018

1. Transfer Ke Daerah & Dana Desa
2. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
4. Dana Bagi Hasil Cukai
5. Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus
6. Dana Otonomi Khusus

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH	Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	619.337.169.038	483.568.805.058	17.676.274.500	1.120.582.248.596	14.728.915.636.000	5.553.347.971.407	12.890.263.689.605	34.293.109.545.608
2	Provinsi Sumatera Utara	1.547.139.987.073	282.354.513.400	19.965.326.000	1.849.459.826.473	24.095.779.124.000	10.324.279.044.495	3.944.917.896.029	40.214.435.890.997
3	Provinsi Sumatera Barat	388.484.446.202	54.408.987.428	13.184.125.000	456.077.558.630	13.525.163.475.000	4.963.027.046.732	1.182.622.631.951	20.126.890.712.313
4	Provinsi Riau	3.801.621.548.163	4.316.191.573.096	-	8.117.813.121.259	8.417.436.573.000	3.990.725.716.990	1.414.544.431.890	21.940.519.843.139
5	Provinsi Kepulauan Riau	495.882.018.988	1.437.770.319.791	5.567.378.500	1.939.219.717.279	4.283.236.970.000	1.487.380.658.749	280.364.348.000	7.990.201.694.028
6	Provinsi Jambi	719.068.065.783	1.170.099.900.395	6.916.952.000	1.896.084.918.178	7.969.270.503.000	2.776.264.332.706	1.249.928.163.726	13.891.547.917.610
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.106.132.851.305	4.703.784.114.966	5.781.980.250	7.815.698.946.521	12.331.394.490.000	6.062.880.715.312	2.709.607.020.998	28.919.581.172.831
8	Provinsi Bangka Belitung	211.142.990.337	579.307.686.240	-	790.450.676.577	4.263.148.464.000	1.400.639.224.897	304.957.427.435	6.759.195.792.909
9	Provinsi Bengkulu	164.527.312.568	131.600.040.373	-	296.127.352.941	6.421.416.639.000	1.988.548.737.223	977.827.322.866	9.683.920.052.030
10	Provinsi Lampung	429.801.936.209	327.690.648.032	12.014.171.500	769.506.755.741	12.891.526.399.000	6.004.999.454.005	2.351.313.494.117	22.017.346.102.863
11	Provinsi DKI Jakarta	15.026.197.590.222	183.375.491.488	-	15.209.573.081.710	-	2.645.603.991.214	-	17.855.177.072.924
12	Provinsi Jawa Barat	3.931.726.545.349	1.318.924.973.088	336.567.841.000	5.587.219.359.437	34.413.898.308.000	19.683.952.304.082	5.351.306.165.462	65.036.376.136.981
13	Provinsi Banten	1.668.926.950.939	22.498.861.504	-	1.691.425.812.443	8.262.705.267.000	4.437.916.406.970	1.077.638.619.416	15.469.686.105.829
14	Provinsi Jawa Tengah	1.667.570.702.322	79.416.234.359	676.928.097.000	2.423.915.033.681	37.142.002.322.000	17.093.070.951.096	7.521.069.742.397	64.180.058.049.174
15	Provinsi DI Yogyakarta	243.537.781.714	3.729.954.563	16.343.513.000	263.611.249.277	5.595.709.705.000	2.290.588.087.559	1.591.269.133.000	9.741.178.174.836
16	Provinsi Jawa Timur	2.764.610.508.122	6.071.677.201.120	1.512.096.546.000	10.348.384.255.242	39.914.884.656.000	18.282.047.759.159	7.283.419.016.104	75.828.735.686.505
17	Provinsi Kalimantan Barat	541.873.951.835	201.887.073.161	3.702.593.500	747.463.618.496	11.820.595.796.000	4.874.748.024.063	1.818.545.564.108	19.261.353.002.667
18	Provinsi Kalimantan Tengah	585.887.174.418	1.277.282.180.650	4.870.659.250	1.868.040.014.318	10.166.646.080.000	3.288.065.901.154	1.404.136.245.555	16.726.888.241.027
19	Provinsi Kalimantan Selatan	659.772.148.531	3.805.222.953.734	-	4.464.995.102.265	7.970.942.063.000	3.224.639.170.496	1.629.857.335.500	17.290.433.671.261
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.309.485.003.064	10.214.886.450.239	-	12.524.371.453.303	5.134.617.596.000	2.715.756.477.639	849.007.847.943	21.223.753.374.885
21	Provinsi Kalimantan Utara	358.393.428.393	793.952.569.655	-	1.152.345.998.048	3.709.631.308.000	1.003.716.191.589	457.051.684.000	6.322.745.181.637
22	Provinsi Sulawesi Utara	302.637.502.428	223.523.070.985	-	526.160.573.413	8.518.499.008.000	3.358.322.380.587	1.358.496.475.000	13.761.478.437.000
23	Provinsi Gorontalo	77.252.238.633	8.612.045.583	-	85.864.284.216	4.025.329.702.000	1.574.706.607.805	690.984.810.400	6.376.885.404.421
24	Provinsi Sulawesi Tengah	260.918.877.092	647.019.841.205	6.896.545.750	914.835.264.047	9.540.123.610.000	3.596.299.664.919	1.500.871.188.512	15.552.129.727.478
25	Provinsi Sulawesi Selatan	616.431.237.099	236.559.474.030	16.853.828.000	869.844.539.129	18.369.987.919.000	8.917.469.770.474	2.433.473.562.018	30.590.775.790.621
26	Provinsi Sulawesi Barat	81.828.679.643	6.917.771.867	-	88.746.451.510	4.224.888.264.000	1.585.806.097.335	662.378.279.000	6.561.819.091.845
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	210.971.586.898	377.198.350.965	-	588.169.937.863	9.821.734.403.000	3.880.199.084.929	1.603.163.676.792	15.893.267.102.584
28	Provinsi Bali	485.988.966.592	6.311.111.319	11.717.881.250	504.017.959.161	7.092.130.533.000	2.555.972.556.804	975.706.388.800	11.127.827.437.765
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	269.395.545.793	555.531.853.382	249.100.695.995	1.074.028.095.170	8.564.172.174.000	4.232.152.727.841	1.285.659.409.721	15.156.012.406.732
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	241.598.838.446	25.059.154.647	6.006.756.750	272.664.749.843	13.482.237.846.000	5.924.189.687.782	2.592.421.858.753	22.271.514.142.378
31	Provinsi Maluku	172.552.969.004	69.210.870.486	-	241.763.839.490	7.958.690.251.000	2.992.700.813.952	1.059.440.492.076	12.252.595.396.518
32	Provinsi Maluku Utara	138.427.574.901	350.167.709.990	-	488.595.284.891	6.356.366.224.000	2.258.940.266.892	920.822.171.757	10.024.723.947.540
33	Provinsi Papua	923.888.130.711	3.213.493.719.388	-	4.137.381.850.099	22.451.726.641.000	6.039.528.597.239	12.381.087.726.544	45.009.724.814.882
34	Provinsi Papua Barat	672.166.646.978	1.907.432.818.195	-	2.579.599.465.173	8.024.771.700.000	2.087.115.228.981	5.395.587.975.800	18.087.074.369.954
35	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	353.976.565.607	-	353.976.565.607
JUMLAH		**45.695.178.904.793**	**45.086.668.324.382**	**2.922.191.165.245**	**93.704.038.394.420**	**401.489.579.649.000**	**173.449.578.218.684**	**89.149.741.795.275**	**757.792.938.057.379**

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**153.815.821.172**	**92.067.929.935**	**61.747.891.237**	**153.815.821.172**
2	Kab. Aceh Barat	13.877.807.354	6.231.612.022	7.646.195.332	13.877.807.354
3	Kab. Aceh Besar	13.593.001.718	7.296.924.785	6.296.076.933	13.593.001.718
4	Kab. Aceh Selatan	11.261.304.493	5.526.019.491	5.735.285.002	11.261.304.493
5	Kab. Aceh Singkil	13.482.013.051	3.449.085.994	10.032.927.057	13.482.013.051
6	Kab. Aceh Tengah	10.418.230.537	4.892.068.171	5.526.162.366	10.418.230.537
7	Kab. Aceh Tenggara	8.606.740.512	3.413.979.928	5.192.760.584	8.606.740.512
8	Kab. Aceh Timur	32.007.950.528	4.425.049.234	27.582.901.294	32.007.950.528
9	Kab. Aceh Utara	96.473.023.759	6.314.624.969	90.158.398.790	96.473.023.759
10	Kab. Bireuen	13.614.101.639	6.126.591.284	7.487.510.355	13.614.101.639
11	Kab. Pidie	11.616.418.206	6.181.466.302	5.434.951.904	11.616.418.206
12	Kab. Simeulue	8.347.313.987	2.910.126.303	5.437.187.684	8.347.313.987
13	Kota Banda Aceh	36.334.696.132	31.809.628.597	4.525.067.535	36.334.696.132
14	Kota Sabang	7.817.975.001	3.158.153.628	4.659.821.373	7.817.975.001
15	Kota Langsa	13.858.904.834	8.348.990.969	5.509.913.865	13.858.904.834
16	Kota Lhokseumawe	28.928.488.941	9.657.080.161	19.271.408.780	28.928.488.941
17	Kab. Nagan Raya	14.401.570.751	4.552.767.753	9.848.802.998	14.401.570.751
18	Kab. Aceh Jaya	9.141.099.442	2.823.292.191	6.317.807.251	9.141.099.442
19	Kab. Pidie Jaya	7.693.302.498	2.968.980.952	4.724.321.546	7.693.302.498
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.681.343.321	3.226.056.670	5.455.286.651	8.681.343.321
21	Kab. Gayo Lues	8.338.551.222	2.620.637.168	5.717.914.054	8.338.551.222
22	Kab. Aceh Tamiang	79.776.702.346	5.647.812.600	74.128.889.746	79.776.702.346
23	Kab. Bener Meriah	8.272.979.491	3.423.597.614	4.849.381.877	8.272.979.491
24	Kota Subulussalam	8.977.828.103	3.194.213.085	5.783.615.018	8.977.828.103
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**449.086.001.729**	**329.303.454.923**	**119.782.546.806**	**449.086.001.729**
26	Kab. Asahan	61.767.184.941	14.024.918.816	47.742.266.125	61.767.184.941
27	Kab. Dairi	12.496.303.541	6.179.749.521	6.316.554.020	12.496.303.541
28	Kab. Deli Serdang	62.265.354.132	30.374.319.761	31.891.034.371	62.265.354.132
29	Kab. Karo	13.658.236.123	7.884.318.634	5.773.917.489	13.658.236.123
30	Kab. Labuhan Batu	45.414.292.241	13.711.357.105	31.702.935.136	45.414.292.241
31	Kab. Langkat	143.898.133.603	12.008.910.872	131.889.222.731	143.898.133.603
32	Kab. Mandailing Natal	24.374.119.932	8.404.345.723	15.969.774.209	24.374.119.932
33	Kab. Nias	9.029.889.003	4.840.816.968	4.189.072.035	9.029.889.003
34	Kab. Simalungun	48.449.791.190	11.973.004.890	36.476.786.300	48.449.791.190
35	Kab. Tapanuli Selatan	39.962.868.961	10.257.468.815	29.705.400.146	39.962.868.961
36	Kab. Tapanuli Tengah	14.533.718.353	6.146.833.765	8.386.884.588	14.533.718.353
37	Kab. Tapanuli Utara	31.466.317.865	8.341.927.203	23.124.390.662	31.466.317.865
38	Kab. Toba Samosir	14.534.229.244	9.449.218.057	5.085.011.187	14.534.229.244
39	Kota Binjai	16.231.271.134	8.907.286.509	7.323.984.625	16.231.271.134
40	Kota Medan	212.631.219.115	202.854.855.415	9.776.363.700	212.631.219.115
41	Kota Pematang Siantar	19.423.364.321	15.154.796.327	4.268.567.994	19.423.364.321
42	Kota Sibolga	12.455.401.558	8.049.175.011	4.406.226.547	12.455.401.558
43	Kota Tanjung Balai	11.352.617.318	6.906.275.631	4.446.341.687	11.352.617.318
44	Kab. Batu Bara	27.100.703.654	13.868.532.408	13.232.171.246	27.100.703.654
45	Kab. Labuhan Batu Utara	35.147.628.245	6.762.537.826	28.385.090.419	35.147.628.245
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	57.043.301.599	8.546.909.307	48.496.392.292	57.043.301.599
47	Kab. Padang Lawas Utara	21.006.522.429	6.010.163.476	14.996.358.953	21.006.522.429
48	Kab. Padang Lawas	22.631.226.502	6.392.147.529	16.239.078.973	22.631.226.502
49	Kab. Nias Utara	9.602.903.718	5.132.040.749	4.470.862.969	9.602.903.718
50	Kab. Nias Barat	9.105.043.509	4.943.710.381	4.161.333.128	9.105.043.509
51	Kota Tebing Tinggi	12.670.403.267	8.326.433.390	4.343.969.877	12.670.403.267
52	Kota Padang Sidempuan	14.242.055.101	9.180.418.828	5.061.636.273	14.242.055.101
53	Kab. Pakpak Bharat	10.318.081.406	5.121.762.363	5.196.319.043	10.318.081.406
54	Kab. Nias Selatan	11.581.508.325	5.408.323.540	6.173.184.785	11.581.508.325
55	Kab. Humbang Hasundutan	11.538.878.604	5.614.773.043	5.924.105.561	11.538.878.604
56	Kab. Serdang Bedagai	39.989.314.861	10.380.391.296	29.608.923.565	39.989.314.861
57	Kab. Samosir	10.653.795.549	5.366.605.005	5.287.190.544	10.653.795.549
58	Kota Gunungsitoli	11.478.306.000	7.430.854.221	4.047.451.779	11.478.306.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**112.139.095.402**	**93.181.301.499**	**18.957.793.903**	**112.139.095.402**
60	Kab. Lima Puluh Kota	10.223.879.620	4.321.613.516	5.902.266.104	10.223.879.620
61	Kab. Agam	14.000.068.393	5.945.564.866	8.054.503.527	14.000.068.393
62	Kab. Kepulauan Mentawai	10.870.117.367	3.110.647.034	7.759.470.333	10.870.117.367
63	Kab. Padang Pariaman	8.812.618.584	3.854.186.306	4.958.432.278	8.812.618.584
64	Kab. Pasaman	9.241.287.041	4.080.471.132	5.160.815.909	9.241.287.041
65	Kab. Pesisir Selatan	15.452.877.217	4.248.095.779	11.204.781.438	15.452.877.217
66	Kab. Sijunjung	10.218.731.808	4.006.855.239	6.211.876.569	10.218.731.808
67	Kab. Solok	10.218.439.468	4.751.125.462	5.467.314.006	10.218.439.468
68	Kab. Tanah Datar	9.815.933.386	5.035.171.673	4.780.761.713	9.815.933.386
69	Kota Bukit Tinggi	10.905.190.472	7.012.627.657	3.892.562.815	10.905.190.472
70	Kota Padang Panjang	7.682.058.808	3.565.099.458	4.116.959.350	7.682.058.808
71	Kota Padang	62.854.411.577	55.294.125.648	7.560.285.929	62.854.411.577
72	Kota Payakumbuh	9.968.959.414	5.978.566.418	3.990.392.996	9.968.959.414
73	Kota Sawahlunto	8.632.934.607	4.024.417.109	4.608.517.498	8.632.934.607
74	Kota Solok	9.719.458.572	5.544.767.371	4.174.691.201	9.719.458.572

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
75	Kota Pariaman	9.901.058.761	5.409.271.378	4.491.787.383	9.901.058.761
76	Kab. Pasaman Barat	24.031.899.148	4.928.421.448	19.103.477.700	24.031.899.148
77	Kab. Dharmasraya	17.420.678.094	5.082.367.216	12.338.310.878	17.420.678.094
78	Kab. Solok Selatan	16.374.748.463	4.313.594.029	12.061.154.434	16.374.748.463
79	**Provinsi Riau**	856.660.641.569	209.908.107.164	646.752.534.405	856.660.641.569
80	Kab. Bengkalis	1.436.254.223.765	46.121.906.260	1.390.132.317.505	1.436.254.223.765
81	Kab. Indragiri Hilir	51.845.980.126	15.290.789.044	36.555.191.082	51.845.980.126
82	Kab. Indragiri Hulu	86.882.825.819	13.667.867.680	73.214.958.139	86.882.825.819
83	Kab. Kampar	222.848.856.511	15.498.333.512	207.350.522.999	222.848.856.511
84	Kab. Kuantan Singingi	34.567.430.336	12.387.939.857	22.179.490.479	34.567.430.336
85	Kab. Pelalawan	130.445.877.647	24.882.865.459	105.563.012.188	130.445.877.647
86	Kab. Rokan Hilir	237.776.893.564	14.338.970.354	223.437.923.210	237.776.893.564
87	Kab. Rokan Hulu	67.647.644.590	13.927.483.484	53.720.161.106	67.647.644.590
88	Kab. Siak	451.431.044.871	26.779.202.874	424.651.841.997	451.431.044.871
89	Kota Dumai	58.145.053.156	32.588.849.375	25.556.203.781	58.145.053.156
90	Kota Pekanbaru	109.210.648.782	92.404.623.962	16.806.024.820	109.210.648.782
91	Kab. Kepulauan Meranti	57.904.427.427	11.174.920.469	46.729.506.958	57.904.427.427
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	155.976.997.739	122.662.996.761	33.314.000.978	155.976.997.739
93	Kab. Bintan	23.918.046.951	14.325.557.566	9.592.489.385	23.918.046.951
94	Kab. Natuna	74.842.416.265	10.350.482.078	64.491.934.187	74.842.416.265
95	Kab. Karimun	42.148.249.401	18.821.889.659	23.326.359.742	42.148.249.401
96	Kota Batam	104.694.249.054	94.694.584.954	9.999.664.100	104.694.249.054
97	Kab. Kepulauan Anambas	50.508.491.223	16.251.232.983	34.257.258.240	50.508.491.223
98	Kota Tanjung Pinang	26.220.652.195	19.676.025.994	6.544.626.201	26.220.652.195
99	Kab. Lingga	17.572.916.160	9.874.721.908	7.698.194.252	17.572.916.160
100	**Provinsi Jambi**	168.557.795.503	60.586.732.418	107.971.063.085	168.557.795.503
101	Kab. Batanghari	80.430.599.417	4.816.067.139	75.614.532.278	80.430.599.417
102	Kab. Bungo	23.135.813.832	7.904.421.675	15.231.392.157	23.135.813.832
103	Kab. Kerinci	9.238.623.294	2.959.250.528	6.279.372.766	9.238.623.294
104	Kab. Merangin	16.483.944.721	5.716.835.765	10.767.108.956	16.483.944.721
105	Kab. Muaro Jambi	83.483.597.769	6.023.834.302	77.459.763.467	83.483.597.769
106	Kab. Sarolangun	49.402.602.195	4.414.462.615	44.988.139.580	49.402.602.195
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	105.796.317.817	6.922.401.941	98.873.915.876	105.796.317.817
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	63.308.094.672	6.262.837.471	57.045.257.201	63.308.094.672
109	Kab. Tebo	37.921.345.610	4.730.559.914	33.190.785.696	37.921.345.610
110	Kota Jambi	71.532.045.324	35.461.693.153	36.070.352.171	71.532.045.324
111	Kota Sungai Penuh	9.777.285.629	5.667.734.124	4.109.551.505	9.777.285.629
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	705.105.611.881	199.501.946.552	505.603.665.329	705.105.611.881
113	Kab. Lahat	92.448.266.434	11.374.802.121	81.073.464.313	92.448.266.434
114	Kab. Musi Banyuasin	629.683.242.091	19.491.479.808	610.191.762.283	629.683.242.091
115	Kab. Musi Rawas	177.684.232.848	7.549.299.614	170.134.933.234	177.684.232.848
116	Kab Musi Rawas Utara	32.706.142.410	6.822.692.448	25.883.449.962	32.706.142.410
117	Kab. Muara Enim	470.035.153.625	35.931.347.151	434.103.806.474	470.035.153.625
118	Kab. Ogan Komering Ilir	52.254.143.385	11.862.868.642	40.391.274.743	52.254.143.385
119	Kab. Ogan Komering Ulu	77.757.601.756	9.938.271.045	67.819.330.711	77.757.601.756
120	Kota Palembang	122.318.774.030	115.113.319.389	7.205.454.641	122.318.774.030
121	Kota Pagar Alam	12.295.658.249	6.559.596.960	5.736.061.289	12.295.658.249
122	Kota Lubuk linggau	15.518.389.184	10.448.759.180	5.069.630.004	15.518.389.184
123	Kota Prabumulih	100.947.039.667	15.551.941.863	85.395.097.804	100.947.039.667
124	Kab. Empat Lawang	13.297.451.290	6.525.907.154	6.771.544.136	13.297.451.290
125	Kab. Banyuasin	71.489.631.880	11.615.371.022	59.874.260.858	71.489.631.880
126	Kab. Ogan Ilir	67.693.628.871	7.778.793.171	59.914.835.700	67.693.628.871
127	Kab. OKU Timur	16.790.165.153	7.608.702.443	9.181.462.710	16.790.165.153
128	Kab. OKU Selatan	14.540.706.101	6.640.542.418	7.900.163.683	14.540.706.101
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	433.567.012.450	8.439.225.402	425.127.787.048	433.567.012.450
130	**Provinsi Bangka Belitung**	53.519.592.074	33.660.997.191	19.858.594.883	53.519.592.074
131	Kab. Bangka	25.264.920.209	7.664.302.068	17.600.618.141	25.264.920.209
132	Kab. Belitung	24.496.592.350	5.945.336.558	18.551.255.792	24.496.592.350
133	Kota Pangkal Pinang	22.358.726.468	16.436.929.917	5.921.796.551	22.358.726.468
134	Kab. Bangka Selatan	17.217.671.853	3.802.822.795	13.414.849.058	17.217.671.853
135	Kab. Bangka Tengah	18.586.505.648	5.528.040.674	13.058.464.974	18.586.505.648
136	Kab. Bangka Barat	28.941.619.932	6.750.275.086	22.191.344.846	28.941.619.932
137	Kab. Belitung Timur	20.757.361.803	4.363.788.688	16.393.573.115	20.757.361.803
138	**Provinsi Bengkulu**	40.963.179.706	29.108.229.171	11.854.950.535	40.963.179.706
139	Kab. Bengkulu Selatan	7.512.322.919	2.758.105.417	4.754.217.502	7.512.322.919
140	Kab. Bengkulu Utara	23.959.869.175	3.988.032.921	19.971.836.254	23.959.869.175
141	Kab. Rejang Lebong	9.127.305.162	4.101.795.803	5.025.509.359	9.127.305.162
142	Kota Bengkulu	21.928.043.675	17.197.110.583	4.730.933.092	21.928.043.675
143	Kab. Kaur	7.757.649.884	2.053.653.213	5.703.996.671	7.757.649.884
144	Kab. Seluma	9.438.784.632	2.458.951.098	6.979.833.534	9.438.784.632
145	Kab. Mukomuko	15.287.862.063	3.150.064.130	12.137.797.933	15.287.862.063
146	Kab. Lebong	9.194.706.183	2.448.451.188	6.746.254.995	9.194.706.183
147	Kab. Bengkulu Tengah	11.725.621.151	2.844.450.137	8.881.171.014	11.725.621.151
148	Kab. Kepahiang	7.631.968.018	2.661.729.266	4.970.238.752	7.631.968.018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
149	**Provinsi Lampung**	**122.496.301.793**	**92.534.598.872**	**29.961.702.921**	**122.496.301.793**
150	Kab. Lampung Barat	**9.552.225.861**	**4.620.998.472**	**4.931.227.389**	**9.552.225.861**
151	Kab. Lampung Selatan	**26.368.741.577**	**10.333.453.031**	**16.035.288.546**	**26.368.741.577**
152	Kab. Lampung Tengah	**37.875.008.130**	**13.028.387.133**	**24.846.620.997**	**37.875.008.130**
153	Kab. Lampung Utara	**16.829.252.921**	**7.229.907.911**	**9.599.345.010**	**16.829.252.921**
154	Kab. Lampung Timur	**24.368.533.379**	**7.335.441.257**	**17.033.092.122**	**24.368.533.379**
155	Kab. Tanggamus	**30.166.651.408**	**7.066.539.862**	**23.100.111.546**	**30.166.651.408**
156	Kab. Tulang Bawang	**20.675.231.142**	**6.813.076.265**	**13.862.154.877**	**20.675.231.142**
157	Kab. Way Kanan	**16.221.717.943**	**5.043.744.561**	**11.177.973.382**	**16.221.717.943**
158	Kab. Pesawaran	**12.127.938.063**	**4.919.075.070**	**7.208.862.993**	**12.127.938.063**
159	Kab. Pesisir Barat	**9.043.182.462**	**3.788.419.397**	**5.254.763.065**	**9.043.182.462**
160	Kab. Pringsewu	**9.953.425.654**	**5.323.666.651**	**4.629.759.003**	**9.953.425.654**
161	Kab. Mesuji	**16.787.209.613**	**4.144.901.949**	**12.642.307.664**	**16.787.209.613**
162	Kab. Tulang Bawang Barat	**11.609.606.793**	**4.234.833.341**	**7.374.773.452**	**11.609.606.793**
163	Kota Bandar Lampung	**52.082.460.745**	**46.079.120.795**	**6.003.339.950**	**52.082.460.745**
164	Kota Metro	**13.644.448.725**	**8.840.332.614**	**4.804.116.111**	**13.644.448.725**
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**15.026.197.590.222**	**14.961.540.040.248**	**64.657.549.974**	**15.026.197.590.222**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**1.390.469.986.853**	**1.252.723.209.767**	**137.746.777.086**	**1.390.469.986.853**
167	Kab. Bandung	**144.933.549.485**	**57.691.068.608**	**87.242.480.877**	**144.933.549.485**
168	Kab. Bekasi	**381.014.848.306**	**332.249.305.205**	**48.765.543.101**	**381.014.848.306**
169	Kab. Bogor	**182.236.486.914**	**124.400.369.811**	**57.836.117.103**	**182.236.486.914**
170	Kab. Ciamis	**35.895.351.200**	**27.523.639.903**	**8.371.711.297**	**35.895.351.200**
171	Kab. Cianjur	**50.671.681.980**	**34.168.076.195**	**16.503.605.785**	**50.671.681.980**
172	Kab. Cirebon	**58.225.698.832**	**40.287.956.659**	**17.937.742.173**	**58.225.698.832**
173	Kab. Garut	**81.986.650.287**	**31.394.183.279**	**50.592.467.008**	**81.986.650.287**
174	Kab. Indramayu	**150.821.818.345**	**47.630.214.784**	**103.191.603.561**	**150.821.818.345**
175	Kab. Karawang	**210.865.030.191**	**171.864.790.541**	**39.000.239.650**	**210.865.030.191**
176	Kab. Kuningan	**35.175.286.150**	**27.392.091.034**	**7.783.195.116**	**35.175.286.150**
177	Kab. Majalengka	**45.531.009.015**	**28.264.192.778**	**17.266.816.237**	**45.531.009.015**
178	Kab. Pangandaran	**30.529.916.504**	**23.694.305.550**	**6.835.610.954**	**30.529.916.504**
179	Kab. Purwakarta	**73.146.049.017**	**64.198.134.407**	**8.947.914.610**	**73.146.049.017**
180	Kab. Subang	**98.049.171.694**	**38.976.551.757**	**59.072.619.937**	**98.049.171.694**
181	Kab. Sukabumi	**82.692.108.437**	**38.400.257.000**	**44.291.851.437**	**82.692.108.437**
182	Kab. Sumedang	**40.559.138.415**	**33.079.589.155**	**7.479.549.260**	**40.559.138.415**
183	Kab. Tasikmalaya	**38.041.432.761**	**26.863.906.366**	**11.177.526.395**	**38.041.432.761**
184	Kab. Bandung Barat	**52.430.756.272**	**42.021.256.792**	**10.409.499.480**	**52.430.756.272**
185	Kota Bandung	**294.579.081.924**	**286.152.830.910**	**8.426.251.014**	**294.579.081.924**
186	Kota Bekasi	**119.526.364.254**	**110.205.147.359**	**9.321.216.895**	**119.526.364.254**
187	Kota Bogor	**66.718.674.350**	**61.059.017.264**	**5.659.657.086**	**66.718.674.350**
188	Kota Cirebon	**44.701.110.749**	**39.003.662.840**	**5.697.447.909**	**44.701.110.749**
189	Kota Depok	**78.494.670.284**	**71.286.982.409**	**7.207.687.875**	**78.494.670.284**
190	Kota Sukabumi	**34.178.252.108**	**29.886.975.738**	**4.291.276.370**	**34.178.252.108**
191	Kota Cimahi	**39.647.090.718**	**34.977.821.288**	**4.669.269.430**	**39.647.090.718**
192	Kota Tasikmalaya	**37.974.632.883**	**32.860.209.168**	**5.114.423.715**	**37.974.632.883**
193	Kota Banjar	**32.630.697.421**	**23.985.228.308**	**8.645.469.113**	**32.630.697.421**
194	**Provinsi Banten**	**647.226.228.299**	**637.477.681.805**	**9.748.546.494**	**647.226.228.299**
195	Kab. Lebak	**62.448.874.317**	**47.063.817.083**	**15.385.057.234**	**62.448.874.317**
196	Kab. Pandeglang	**57.338.339.557**	**47.853.084.603**	**9.485.254.954**	**57.338.339.557**
197	Kab. Serang	**78.571.340.558**	**69.822.884.398**	**8.748.456.160**	**78.571.340.558**
198	Kab. Tangerang	**199.354.194.945**	**189.945.462.749**	**9.408.732.196**	**199.354.194.945**
199	Kota Cilegon	**118.352.788.466**	**113.763.776.026**	**4.589.012.440**	**118.352.788.466**
200	Kota Tangerang	**260.382.410.953**	**253.202.330.769**	**7.180.080.184**	**260.382.410.953**
201	Kota Serang	**70.738.966.362**	**65.928.166.793**	**4.810.799.569**	**70.738.966.362**
202	Kota Tangerang Selatan	**174.513.807.482**	**168.637.000.285**	**5.876.807.197**	**174.513.807.482**
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**555.693.157.918**	**493.828.217.226**	**61.864.940.692**	**555.693.157.918**
204	Kab. Banjarnegara	**22.256.029.329**	**11.562.284.510**	**10.693.744.819**	**22.256.029.329**
205	Kab. Banyumas	**35.407.240.494**	**24.289.774.439**	**11.117.466.055**	**35.407.240.494**
206	Kab. Batang	**28.478.078.368**	**17.457.137.879**	**11.020.940.489**	**28.478.078.368**
207	Kab. Blora	**86.617.980.036**	**14.861.009.228**	**71.756.970.808**	**86.617.980.036**
208	Kab. Boyolali	**23.855.761.561**	**16.574.543.292**	**7.281.218.269**	**23.855.761.561**
209	Kab. Brebes	**24.589.836.258**	**11.916.619.119**	**12.673.217.139**	**24.589.836.258**
210	Kab. Cilacap	**60.421.115.064**	**43.459.864.411**	**16.961.250.653**	**60.421.115.064**
211	Kab. Demak	**21.641.358.012**	**13.379.869.726**	**8.261.488.286**	**21.641.358.012**
212	Kab. Grobogan	**29.550.114.637**	**12.228.662.443**	**17.321.452.194**	**29.550.114.637**
213	Kab. Jepara	**32.112.528.419**	**21.501.083.059**	**10.611.445.360**	**32.112.528.419**
214	Kab. Karanganyar	**23.260.774.389**	**15.877.252.406**	**7.383.521.983**	**23.260.774.389**
215	Kab. Kebumen	**20.803.060.743**	**12.761.712.456**	**8.041.348.287**	**20.803.060.743**
216	Kab. Kendal	**27.929.803.964**	**14.806.913.674**	**13.122.890.290**	**27.929.803.964**
217	Kab. Klaten	**24.846.841.755**	**18.343.705.774**	**6.503.135.981**	**24.846.841.755**
218	Kab. Kudus	**86.425.599.596**	**79.367.847.963**	**7.057.751.633**	**86.425.599.596**
219	Kab. Magelang	**19.795.869.884**	**13.219.712.908**	**6.576.156.976**	**19.795.869.884**
220	Kab. Pati	**25.409.066.041**	**15.186.649.134**	**10.222.416.907**	**25.409.066.041**
221	Kab. Pekalongan	**18.774.993.989**	**9.754.318.143**	**9.020.675.846**	**18.774.993.989**
222	Kab. Pemalang	**21.400.365.523**	**11.131.345.121**	**10.269.020.402**	**21.400.365.523**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
223	Kab. Purbalingga	17.522.139.880	11.451.968.096	6.070.171.784	17.522.139.880
224	Kab. Purworejo	17.301.712.596	11.032.409.163	6.269.303.433	17.301.712.596
225	Kab. Rembang	20.192.268.635	11.494.263.196	8.698.005.439	20.192.268.635
226	Kab. Semarang	30.211.932.991	20.924.393.605	9.287.539.386	30.211.932.991
227	Kab. Sragen	19.056.875.440	12.412.641.206	6.644.234.234	19.056.875.440
228	Kab. Sukoharjo	25.167.028.223	19.436.676.033	5.730.352.190	25.167.028.223
229	Kab. Tegal	21.232.470.187	12.320.425.594	8.912.044.593	21.232.470.187
230	Kab. Temanggung	17.951.069.172	11.313.312.921	6.637.756.251	17.951.069.172
231	Kab. Wonogiri	19.299.570.422	12.017.301.471	7.282.268.951	19.299.570.422
232	Kab. Wonosobo	20.295.505.728	10.174.539.495	10.120.966.233	20.295.505.728
233	Kota Magelang	17.018.271.075	12.863.814.220	4.154.456.855	17.018.271.075
234	Kota Pekalongan	18.389.981.062	13.489.977.254	4.900.003.808	18.389.981.062
235	Kota Salatiga	17.102.363.894	12.838.870.149	4.263.493.745	17.102.363.894
236	Kota Semarang	159.709.311.870	151.461.246.819	8.248.065.051	159.709.311.870
237	Kota Surakarta	39.592.216.688	34.936.525.972	4.655.690.716	39.592.216.688
238	Kota Tegal	18.258.408.479	14.150.154.417	4.108.254.062	18.258.408.479
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	88.194.755.176	85.634.891.641	2.559.863.535	88.194.755.176
240	Kab. Bantul	24.848.763.991	19.175.250.119	5.673.513.872	24.848.763.991
241	Kab. Gunung kidul	20.375.691.123	14.769.665.011	5.606.026.112	20.375.691.123
242	Kab. Kulon Progo	17.790.198.027	13.067.561.640	4.722.636.387	17.790.198.027
243	Kab. Sleman	47.600.928.548	41.564.539.542	6.036.389.006	47.600.928.548
244	Kota Yogyakarta	44.727.444.849	40.350.210.890	4.377.233.959	44.727.444.849
245	**Provinsi Jawa Timur**	932.783.028.517	810.811.243.915	121.971.784.602	932.783.028.517
246	Kab. Bangkalan	27.765.125.049	14.253.403.245	13.511.721.804	27.765.125.049
247	Kab. Banyuwangi	46.077.600.987	25.669.048.786	20.408.552.201	46.077.600.987
248	Kab. Blitar	24.042.193.334	15.407.792.369	8.634.400.965	24.042.193.334
249	Kab. Bojonegoro	216.818.133.601	20.582.163.156	196.235.970.445	216.818.133.601
250	Kab. Bondowoso	23.062.310.577	13.217.714.021	9.844.596.556	23.062.310.577
251	Kab. Gresik	104.081.963.966	73.860.274.089	30.221.689.877	104.081.963.966
252	Kab. Jember	48.127.727.032	28.310.645.277	19.817.081.755	48.127.727.032
253	Kab. Jombang	27.419.123.153	18.241.723.052	9.177.400.101	27.419.123.153
254	Kab. Kediri	34.512.204.971	18.646.180.722	15.866.024.249	34.512.204.971
255	Kab. Lamongan	29.420.364.959	16.792.939.980	12.627.424.979	29.420.364.959
256	Kab. Lumajang	25.579.762.430	15.162.868.815	10.416.893.615	25.579.762.430
257	Kab. Madiun	22.456.675.810	13.419.309.829	9.037.365.981	22.456.675.810
258	Kab. Magetan	19.936.443.725	14.237.500.214	5.698.943.511	19.936.443.725
259	Kab. Malang	53.533.384.247	33.453.177.727	20.080.206.520	53.533.384.247
260	Kab. Mojokerto	34.072.285.924	23.802.479.253	10.269.806.671	34.072.285.924
261	Kab. Nganjuk	25.123.313.495	15.157.766.693	9.965.546.802	25.123.313.495
262	Kab. Ngawi	24.842.486.121	14.070.478.439	10.772.007.682	24.842.486.121
263	Kab. Pacitan	18.084.182.730	12.577.226.044	5.506.956.686	18.084.182.730
264	Kab. Pamekasan	23.083.303.943	15.546.393.646	7.536.910.297	23.083.303.943
265	Kab. Pasuruan	50.360.760.004	39.578.939.075	10.781.820.929	50.360.760.004
266	Kab. Ponorogo	24.770.535.001	15.375.311.959	9.395.223.042	24.770.535.001
267	Kab. Probolinggo	27.219.327.257	18.332.163.372	8.887.163.885	27.219.327.257
268	Kab. Sampang	21.914.175.973	12.857.241.122	9.056.934.851	21.914.175.973
269	Kab. Sidoarjo	102.471.641.335	84.400.204.070	18.071.437.265	102.471.641.335
270	Kab. Situbondo	23.099.526.076	13.875.330.084	9.224.195.992	23.099.526.076
271	Kab. Sumenep	35.275.942.812	14.256.799.021	21.019.143.791	35.275.942.812
272	Kab. Trenggalek	21.172.033.419	13.167.270.808	8.004.762.611	21.172.033.419
273	Kab. Tuban	62.383.736.994	22.714.936.535	39.668.800.459	62.383.736.994
274	Kab. Tulungagung	25.986.820.686	17.491.038.652	8.495.782.034	25.986.820.686
275	Kota Blitar	19.629.923.801	15.634.320.193	3.995.603.608	19.629.923.801
276	Kota Kediri	36.840.130.893	32.621.266.300	4.218.864.593	36.840.130.893
277	Kota Madiun	25.390.798.853	21.341.314.333	4.049.484.520	25.390.798.853
278	Kota Malang	59.220.052.598	53.911.092.464	5.308.960.134	59.220.052.598
279	Kota Mojokerto	18.931.773.681	14.793.425.139	4.138.348.542	18.931.773.681
280	Kota Pasuruan	20.615.996.480	16.339.727.225	4.276.269.255	20.615.996.480
281	Kota Probolinggo	22.780.341.763	15.952.928.852	6.827.412.911	22.780.341.763
282	Kota Surabaya	389.788.594.246	380.109.394.123	9.679.200.123	389.788.594.246
283	Kota Batu	15.936.781.679	11.055.077.190	4.881.704.489	15.936.781.679
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	146.425.501.580	95.619.467.366	50.806.034.214	146.425.501.580
285	Kab. Bengkayang	14.570.464.880	5.103.354.101	9.467.110.779	14.570.464.880
286	Kab. Landak	23.310.540.776	5.586.564.551	17.723.976.225	23.310.540.776
287	Kab. Kapuas Hulu	26.176.062.371	6.822.981.153	19.353.081.218	26.176.062.371
288	Kab. Ketapang	75.032.860.428	13.587.256.582	61.445.603.846	75.032.860.428
289	Kab. Mempawah	12.531.717.365	6.339.472.070	6.192.245.295	12.531.717.365
290	Kab. Sambas	29.203.256.518	7.445.507.767	21.757.748.751	29.203.256.518
291	Kab. Sanggau	37.578.479.204	8.742.080.494	28.836.398.710	37.578.479.204
292	Kab. Sintang	33.991.902.668	8.288.445.563	25.703.457.105	33.991.902.668
293	Kota Pontianak	49.328.591.474	43.818.998.394	5.509.593.080	49.328.591.474
294	Kota Singkawang	13.002.346.987	8.445.849.120	4.556.497.867	13.002.346.987
295	Kab. Kayong Utara	13.277.814.635	4.329.037.818	8.948.776.817	13.277.814.635
296	Kab. Kubu Raya	29.901.570.464	13.934.720.489	15.966.849.975	29.901.570.464

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
297	Kab. Sekadau	17.637.699.617	5.692.213.935	11.945.485.682	17.637.699.617
298	Kab. Melawi	19.905.142.868	5.292.719.012	14.612.423.856	19.905.142.868
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	140.130.497.862	64.043.901.226	76.086.596.636	140.130.497.862
300	Kab. Barito Selatan	16.888.941.807	4.468.201.132	12.420.740.675	16.888.941.807
301	Kab. Barito Utara	41.626.690.732	6.164.891.139	35.461.799.593	41.626.690.732
302	Kab. Kapuas	35.904.511.636	5.433.302.780	30.471.208.856	35.904.511.636
303	Kab. Kotawaringin Barat	57.565.969.093	13.378.340.744	44.187.628.349	57.565.969.093
304	Kab. Kotawaringin Timur	76.380.357.846	14.693.808.796	61.686.549.050	76.380.357.846
305	Kota Palangkaraya	21.895.091.517	16.741.455.680	5.153.635.837	21.895.091.517
306	Kab. Barito Timur	22.214.782.098	8.183.829.344	14.030.952.754	22.214.782.098
307	Kab. Murung Raya	27.995.341.812	5.095.000.370	22.900.341.442	27.995.341.812
308	Kab. Pulang Pisau	13.641.888.709	4.016.040.979	9.625.847.730	13.641.888.709
309	Kab. Gunung Mas	21.522.201.950	3.684.117.890	17.838.084.060	21.522.201.950
310	Kab. Lamandau	17.433.697.693	3.289.124.824	14.144.572.869	17.433.697.693
311	Kab. Sukamara	12.426.450.426	3.080.979.459	9.345.470.967	12.426.450.426
312	Kab. Katingan	51.107.874.841	3.981.406.220	47.126.468.621	51.107.874.841
313	Kab. Seruyan	29.152.876.396	4.131.916.291	25.020.960.105	29.152.876.396
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	169.920.751.085	102.452.732.631	67.468.018.454	169.920.751.085
315	Kab. Banjar	28.519.954.396	10.861.987.325	17.657.967.071	28.519.954.396
316	Kab. Barito Kuala	17.310.473.638	6.075.704.457	11.234.769.181	17.310.473.638
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	32.955.082.272	5.907.346.416	27.047.735.856	32.955.082.272
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.121.683.857	6.649.252.384	5.472.431.473	12.121.683.857
319	Kab. Hulu Sungai Utara	12.049.768.283	5.810.887.390	6.238.880.893	12.049.768.283
320	Kab. Kotabaru	49.189.299.562	13.013.615.181	36.175.684.381	49.189.299.562
321	Kab. Tabalong	77.183.883.874	13.242.178.828	63.941.705.046	77.183.883.874
322	Kab. Tanah Laut	45.696.273.093	9.417.503.353	36.278.769.740	45.696.273.093
323	Kab. Tapin	51.312.428.427	7.002.486.198	44.309.942.229	51.312.428.427
324	Kota Banjarbaru	20.151.911.952	15.087.972.063	5.063.939.889	20.151.911.952
325	Kota Banjarmasin	42.418.194.520	37.241.765.568	5.176.428.952	42.418.194.520
326	Kab. Balangan	27.858.480.903	9.829.095.299	18.029.385.604	27.858.480.903
327	Kab. Tanah Bumbu	73.083.962.669	13.562.563.028	59.521.399.641	73.083.962.669
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	599.348.148.844	303.513.905.813	295.834.243.031	599.348.148.844
329	Kab. Berau	86.907.777.801	35.363.184.546	51.544.593.255	86.907.777.801
330	Kab. Kutai Kartanegara	859.880.761.437	53.395.522.659	806.485.238.778	859.880.761.437
331	Kab. Kutai Barat	68.730.739.648	25.385.997.562	43.344.742.086	68.730.739.648
332	Kab. Kutai Timur	210.988.623.151	53.699.528.328	157.289.094.823	210.988.623.151
333	Kab. Mahakam Ulu	28.042.001.829	16.241.867.710	11.800.134.119	28.042.001.829
334	Kab. Pasir	77.700.447.420	26.758.502.683	50.941.944.737	77.700.447.420
335	Kota Balikpapan	123.953.578.235	115.198.045.567	8.755.532.668	123.953.578.235
336	Kota Bontang	88.073.151.363	54.778.648.063	33.294.503.300	88.073.151.363
337	Kota Samarinda	93.507.456.251	56.577.179.805	36.930.276.446	93.507.456.251
338	Kab. Penajam Paser Utara	72.352.317.085	17.872.381.795	54.479.935.290	72.352.317.085
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	77.752.121.867	20.345.068.115	57.407.053.752	77.752.121.867
340	Kab. Bulungan	71.609.084.744	7.442.486.345	64.166.598.399	71.609.084.744
341	Kab. Malinau	29.574.493.073	4.482.424.835	25.092.068.238	29.574.493.073
342	Kab. Nunukan	55.951.008.328	4.499.283.813	51.451.724.515	55.951.008.328
343	Kab. Tana Tidung	18.452.250.509	3.135.394.266	15.316.856.243	18.452.250.509
344	Kota Tarakan	105.054.469.872	10.958.012.913	94.096.456.959	105.054.469.872
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	78.154.251.915	62.474.345.501	15.679.906.414	78.154.251.915
346	Kab. Bolaang Mongondow	9.215.546.535	2.764.422.483	6.451.124.052	9.215.546.535
347	Kab. Minahasa	19.216.098.573	5.760.412.254	13.455.686.319	19.216.098.573
348	Kab. Sangihe	8.549.383.578	4.233.299.243	4.316.084.335	8.549.383.578
349	Kota Bitung	31.964.373.954	7.252.964.129	24.711.409.825	31.964.373.954
350	Kota Manado	40.240.148.585	35.438.340.683	4.801.807.902	40.240.148.585
351	Kab. Kepulauan Talaud	7.779.479.132	2.846.214.781	4.933.264.351	7.779.479.132
352	Kab. Minahasa Selatan	9.024.979.611	3.979.816.850	5.045.162.761	9.024.979.611
353	Kab. Minahasa Tenggara	7.875.667.635	3.064.679.739	4.810.987.896	7.875.667.635
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	7.244.554.111	2.819.966.553	4.424.587.558	7.244.554.111
355	Kota Kotamubagu	9.637.785.220	5.276.478.828	4.361.306.392	9.637.785.220
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7.772.079.294	2.761.825.047	5.010.254.247	7.772.079.294
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	8.612.051.575	2.582.101.085	6.029.950.490	8.612.051.575
358	Kota Tomohon	13.415.852.461	4.256.659.777	9.159.192.684	13.415.852.461
359	Kab. Minahasa Utara	36.338.294.535	8.173.564.816	28.164.729.719	36.338.294.535
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.596.955.714	2.609.113.777	4.987.841.937	7.596.955.714
361	**Provinsi Gorontalo**	19.881.801.282	16.565.376.939	3.316.424.343	19.881.801.282
362	Kab. Boalemo	7.820.521.943	2.310.919.042	5.509.602.901	7.820.521.943
363	Kab. Gorontalo	9.607.643.593	4.393.153.958	5.214.489.635	9.607.643.593
364	Kota Gorontalo	14.235.584.241	10.183.003.648	4.052.580.593	14.235.584.241
365	Kab. Pohuwato	9.212.021.992	2.733.417.599	6.478.604.393	9.212.021.992
366	Kab. Gorontalo Utara	8.425.940.560	2.263.001.806	6.162.938.754	8.425.940.560
367	Kab. Bone Bolango	8.068.725.022	2.964.569.355	5.104.155.667	8.068.725.022
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	63.317.044.581	39.331.701.128	23.985.343.453	63.317.044.581
369	Kab. Banggai	68.849.491.022	9.294.902.186	59.554.588.836	68.849.491.022
370	Kab. Banggai Laut	6.598.532.102	2.022.162.083	4.576.370.019	6.598.532.102

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
371	Kab. Banggai Kepulauan	7.222.509.411	2.043.098.177	5.179.411.234	7.222.509.411
372	Kab. Buol	10.594.395.481	2.623.606.697	7.970.788.784	10.594.395.481
373	Kab. Toli-Toli	9.170.365.383	3.689.447.676	5.480.917.707	9.170.365.383
374	Kab. Donggala	10.056.794.863	2.766.035.546	7.290.759.317	10.056.794.863
375	Kab. Morowali	14.480.398.836	5.436.891.944	9.043.506.892	14.480.398.836
376	Kab. Morowali Utara	13.194.529.331	3.117.586.590	10.076.942.741	13.194.529.331
377	Kab. Poso	10.943.702.899	3.747.688.362	7.196.014.537	10.943.702.899
378	Kota Palu	20.980.564.177	16.310.852.169	4.669.712.008	20.980.564.177
379	Kab. Parigi Moutong	9.627.739.448	3.093.503.424	6.534.236.024	9.627.739.448
380	Kab. Sigi	7.677.742.059	2.459.253.059	5.218.489.000	7.677.742.059
381	Kab. Tojo Una Una	8.205.067.499	2.392.523.779	5.812.543.720	8.205.067.499
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	189.182.309.749	164.256.930.524	24.925.379.225	189.182.309.749
383	Kab. Bantaeng	9.969.283.777	4.917.363.564	5.051.920.213	9.969.283.777
384	Kab. Barru	9.907.534.977	4.944.224.669	4.963.310.308	9.907.534.977
385	Kab. Bone	17.583.162.612	7.898.863.978	9.684.298.634	17.583.162.612
386	Kab. Bulukumba	13.338.072.172	6.620.372.379	6.717.699.793	13.338.072.172
387	Kab. Enrekang	10.596.582.860	4.797.141.197	5.799.441.663	10.596.582.860
388	Kab. Gowa	14.012.264.933	7.392.386.905	6.619.878.028	14.012.264.933
389	Kab. Jeneponto	12.050.670.579	6.468.018.227	5.582.652.352	12.050.670.579
390	Kab. Luwu	10.367.184.717	5.026.045.514	5.341.139.203	10.367.184.717
391	Kab. Luwu Utara	11.397.337.140	4.667.854.814	6.729.482.326	11.397.337.140
392	Kab. Maros	20.964.916.412	10.501.259.675	10.463.656.737	20.964.916.412
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	20.095.060.874	8.888.541.821	11.206.519.053	20.095.060.874
394	Kab. Pinrang	11.112.968.665	5.719.456.000	5.393.512.665	11.112.968.665
395	Kab. Selayar	9.700.430.982	4.293.893.974	5.406.537.008	9.700.430.982
396	Kab. Sidenreng Rappang	12.214.654.305	6.312.330.094	5.902.324.211	12.214.654.305
397	Kab. Sinjai	10.075.095.567	5.129.022.592	4.946.072.975	10.075.095.567
398	Kab. Soppeng	9.953.630.514	4.861.524.198	5.092.106.316	9.953.630.514
399	Kab. Takalar	12.780.545.377	5.257.823.027	7.522.722.350	12.780.545.377
400	Kab. Tana Toraja	9.274.052.897	4.498.638.859	4.775.414.038	9.274.052.897
401	Kab. Wajo	29.088.604.838	6.404.235.737	22.684.369.101	29.088.604.838
402	Kota Pare-pare	12.767.283.620	8.344.195.582	4.423.088.038	12.767.283.620
403	Kab. Toraja Utara	9.373.697.742	4.699.113.863	4.674.583.879	9.373.697.742
404	Kota Makassar	102.913.565.625	95.758.546.448	7.155.019.177	102.913.565.625
405	Kota Palopo	10.960.605.312	6.614.862.665	4.345.742.647	10.960.605.312
406	Kab. Luwu Timur	36.751.720.853	16.482.454.687	20.269.266.166	36.751.720.853
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	18.378.410.941	12.063.902.838	6.314.508.103	18.378.410.941
408	Kab. Majene	8.121.890.371	2.591.927.083	5.529.963.288	8.121.890.371
409	Kab. Mamuju	13.811.229.239	5.779.149.348	8.032.079.891	13.811.229.239
410	Kab. Mamuju Tengah	8.755.090.846	1.525.164.403	7.229.926.443	8.755.090.846
411	Kab. Polewali Mandar	9.647.557.695	3.947.184.231	5.700.373.464	9.647.557.695
412	Kab. Mamasa	7.484.852.802	1.982.559.287	5.502.293.515	7.484.852.802
413	Kab. Pasangkayu	15.629.647.749	2.269.869.904	13.359.777.845	15.629.647.749
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	49.254.878.141	36.682.537.718	12.572.340.423	49.254.878.141
415	Kab. Buton	6.669.604.008	1.782.860.202	4.886.743.806	6.669.604.008
416	Kab. Konawe	9.256.950.538	2.823.529.284	6.433.421.254	9.256.950.538
417	Kab. Konawe Kepulauan	5.720.604.948	1.265.084.418	4.455.520.530	5.720.604.948
418	Kab. Kolaka	20.854.226.184	8.093.544.379	12.760.681.805	20.854.226.184
419	Kab. Kolaka Timur	6.375.565.791	1.435.065.352	4.940.500.439	6.375.565.791
420	Kab. Muna	7.434.870.033	2.761.705.763	4.673.164.270	7.434.870.033
421	Kota Kendari	21.785.883.530	17.039.821.333	4.746.062.197	21.785.883.530
422	Kota Bau-bau	9.275.651.305	4.410.186.551	4.865.464.754	9.275.651.305
423	Kab. Konawe Selatan	14.007.061.852	2.409.992.872	11.597.068.980	14.007.061.852
424	Kab. Bombana	7.936.349.837	2.140.120.059	5.796.229.778	7.936.349.837
425	Kab. Konawe Utara	10.751.026.816	1.358.888.626	9.392.138.190	10.751.026.816
426	Kab. Buton Utara	6.167.712.455	1.421.730.074	4.745.982.381	6.167.712.455
427	Kab. Wakatobi	6.928.158.661	1.902.618.566	5.025.540.095	6.928.158.661
428	Kab. Kolaka Utara	9.218.322.474	1.810.560.024	7.407.762.450	9.218.322.474
429	Kab. Muna Barat	5.754.556.339	1.440.637.182	4.313.919.157	5.754.556.339
430	Kab. Buton Tengah	6.802.212.175	1.649.494.180	5.152.717.995	6.802.212.175
431	Kab. Buton Selatan	6.777.951.811	1.569.077.319	5.208.874.492	6.777.951.811
432	**Provinsi Bali**	179.005.916.512	175.334.969.151	3.670.947.361	179.005.916.512
433	Kab. Badung	79.158.567.575	74.638.402.976	4.520.164.599	79.158.567.575
434	Kab. Bangli	16.440.861.953	11.963.683.399	4.477.178.554	16.440.861.953
435	Kab. Buleleng	24.498.664.444	18.862.277.756	5.636.386.688	24.498.664.444
436	Kab. Gianyar	25.216.664.438	20.619.900.920	4.596.763.518	25.216.664.438
437	Kab. Jembrana	17.945.002.056	12.827.358.561	5.117.643.495	17.945.002.056
438	Kab. Karangasem	19.658.751.772	14.688.068.265	4.970.683.507	19.658.751.772
439	Kab. Klungkung	17.256.463.918	13.035.049.899	4.221.414.019	17.256.463.918
440	Kab. Tabanan	21.959.807.412	17.065.204.637	4.894.602.775	21.959.807.412
441	Kota Denpasar	84.848.266.512	79.302.507.312	5.545.759.200	84.848.266.512
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	72.229.982.291	56.098.053.461	16.131.928.830	72.229.982.291
443	Kab. Bima	9.339.650.070	3.240.507.620	6.099.142.450	9.339.650.070
444	Kab. Dompu	9.797.480.045	4.564.561.065	5.232.918.980	9.797.480.045

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
445	Kab. Lombok Barat	12.451.322.502	6.042.936.800	6.408.385.702	12.451.322.502
446	Kab. Lombok Tengah	17.317.950.171	9.892.092.103	7.425.858.068	17.317.950.171
447	Kab. Lombok Timur	18.436.096.681	10.538.632.341	7.897.464.340	18.436.096.681
448	Kab. Sumbawa	20.500.851.596	6.945.798.988	13.555.052.608	20.500.851.596
449	Kota Mataram	28.078.881.733	22.622.691.439	5.456.190.294	28.078.881.733
450	Kab. Lombok Utara	9.540.227.689	4.469.357.580	5.070.870.109	9.540.227.689
451	Kota Bima	12.114.935.072	7.500.219.519	4.614.715.553	12.114.935.072
452	Kab. Sumbawa Barat	59.588.167.943	12.933.373.912	46.654.794.031	59.588.167.943
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	59.067.321.926	50.120.668.894	8.946.653.032	59.067.321.926
454	Kab. Alor	7.609.272.632	2.526.316.360	5.082.956.272	7.609.272.632
455	Kab. Belu	7.674.247.432	3.369.160.224	4.305.087.208	7.674.247.432
456	Kab. Ende	8.980.002.657	4.050.818.840	4.929.183.817	8.980.002.657
457	Kab. Flores Timur	8.280.628.007	3.019.570.658	5.261.057.349	8.280.628.007
458	Kab. Kupang	8.011.432.328	2.508.579.508	5.502.852.820	8.011.432.328
459	Kab. Lembata	6.778.993.131	2.113.884.614	4.665.108.517	6.778.993.131
460	Kab. Malaka	6.115.560.508	1.770.526.689	4.345.033.819	6.115.560.508
461	Kab. Manggarai	8.056.284.586	3.221.788.459	4.834.496.127	8.056.284.586
462	Kab. Ngada	6.884.324.547	2.369.690.402	4.514.634.145	6.884.324.547
463	Kab. Sikka	9.462.746.943	4.384.697.062	5.078.049.881	9.462.746.943
464	Kab. Sumba Barat	6.719.298.148	2.329.164.644	4.390.133.504	6.719.298.148
465	Kab. Sumba Timur	10.236.552.411	4.024.463.531	6.212.088.880	10.236.552.411
466	Kab. Timor Tengah Selatan	8.660.586.109	3.003.318.752	5.657.267.357	8.660.586.109
467	Kab. Timor Tengah Utara	7.519.333.764	2.417.283.957	5.102.049.807	7.519.333.764
468	Kota Kupang	25.320.729.080	20.843.514.203	4.477.214.877	25.320.729.080
469	Kab. Rote Ndao	6.673.049.901	1.798.649.039	4.874.400.862	6.673.049.901
470	Kab. Nagekeo	6.445.799.997	1.778.425.835	4.667.374.162	6.445.799.997
471	Kab. Sumba Tengah	6.028.027.185	1.400.225.479	4.627.801.706	6.028.027.185
472	Kab. Sumba Barat Daya	7.042.855.700	2.060.633.140	4.982.222.560	7.042.855.700
473	Kab. Manggarai Timur	6.796.429.035	2.001.150.188	4.795.278.847	6.796.429.035
474	Kab. Sabu Raijua	5.478.375.038	1.434.896.376	4.043.478.662	5.478.375.038
475	Kab. Manggarai Barat	7.756.987.381	2.754.245.383	5.002.741.998	7.756.987.381
476	**Provinsi Maluku**	40.626.368.858	26.219.086.051	14.407.282.807	40.626.368.858
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	9.525.590.878	3.160.818.885	6.364.771.993	9.525.590.878
478	Kab. Maluku Tengah	15.030.193.843	3.056.738.691	11.973.455.152	15.030.193.843
479	Kab. Maluku Tenggara	8.183.926.639	2.684.360.459	5.499.566.180	8.183.926.639
480	Kab. Pulau Buru	8.680.022.232	2.103.622.966	6.576.399.266	8.680.022.232
481	Kota Ambon	23.349.590.150	17.817.995.919	5.531.594.231	23.349.590.150
482	Kab. Seram Bagian Barat	8.195.252.573	1.901.827.596	6.293.424.977	8.195.252.573
483	Kab. Seram Bagian Timur	28.574.945.008	2.163.889.436	26.411.055.572	28.574.945.008
484	Kab. Maluku Barat Daya	7.616.199.264	1.654.956.769	5.961.242.495	7.616.199.264
485	Kab. Buru Selatan	7.186.648.390	1.311.483.004	5.875.165.386	7.186.648.390
486	Kab. Kepulauan Aru	9.539.943.688	2.053.711.082	7.486.232.606	9.539.943.688
487	Kota Tual	6.044.287.481	1.419.224.267	4.625.063.214	6.044.287.481
488	**Provinsi Maluku Utara**	33.402.200.226	25.266.451.087	8.135.749.139	33.402.200.226
489	Kab. Halmahera Tengah	9.206.084.182	1.911.036.992	7.295.047.190	9.206.084.182
490	Kab. Halmahera Barat	8.031.660.380	1.964.155.218	6.067.505.162	8.031.660.380
491	Kota Ternate	16.884.154.782	11.056.656.685	5.827.498.097	16.884.154.782
492	Kab. Halmahera Timur	8.801.845.097	1.956.091.582	6.845.753.515	8.801.845.097
493	Kota Tidore Kepulauan	8.845.603.352	3.503.626.950	5.341.976.402	8.845.603.352
494	Kab. Kepulauan Sula	8.859.144.651	1.902.579.752	6.956.564.899	8.859.144.651
495	Kab. Pulau Morotai	7.184.075.017	1.899.769.505	5.284.305.512	7.184.075.017
496	Kab. Pulau Taliabu	7.274.170.735	1.505.796.117	5.768.374.618	7.274.170.735
497	Kab. Halmahera Selatan	11.397.194.081	2.539.275.813	8.857.918.268	11.397.194.081
498	Kab. Halmahera Utara	18.541.442.398	9.660.688.015	8.880.754.383	18.541.442.398
499	**Provinsi Papua**	253.674.351.616	176.216.319.179	77.458.032.437	253.674.351.616
500	Kab. Yalimo	7.543.949.828	2.930.302.683	4.613.647.145	7.543.949.828
501	Kab. Lanny Jaya	8.039.740.733	3.006.096.688	5.033.644.045	8.039.740.733
502	Kab. Biak Numfor	11.431.063.484	6.184.646.419	5.246.417.065	11.431.063.484
503	Kab. Jayapura	15.269.567.256	5.688.145.254	9.581.422.002	15.269.567.256
504	Kab. Jayawijaya	12.163.748.190	6.177.388.847	5.986.359.343	12.163.748.190
505	Kab. Merauke	36.988.971.766	9.902.117.573	27.086.854.193	36.988.971.766
506	Kab. Mimika	304.025.685.168	131.073.600.669	172.952.084.499	304.025.685.168
507	Kab. Nabire	13.036.621.406	4.893.346.176	8.143.275.230	13.036.621.406
508	Kab. Paniai	10.174.374.948	3.958.247.979	6.216.126.969	10.174.374.948
509	Kab. Puncak Jaya	9.760.840.294	3.610.568.899	6.150.271.395	9.760.840.294
510	Kab. Kepulauan Yapen	11.251.664.334	4.077.913.934	7.173.750.400	11.251.664.334
511	Kota Jayapura	32.843.963.442	28.226.857.382	4.617.106.060	32.843.963.442
512	Kab. Sarmi	15.122.362.786	3.402.863.378	11.719.499.408	15.122.362.786
513	Kab. Keerom	13.815.202.332	3.543.662.757	10.271.539.575	13.815.202.332
514	Kab. Yahukimo	11.338.488.081	3.240.627.353	8.097.860.728	11.338.488.081
515	Kab. Pegunungan Bintang	11.392.195.135	3.323.900.751	8.068.294.384	11.392.195.135
516	Kab. Tolikara	9.762.873.503	3.100.916.374	6.661.957.129	9.762.873.503
517	Kab. Boven Digoel	15.960.761.992	3.443.633.660	12.517.128.332	15.960.761.992
518	Kab. Mappi	12.412.804.939	3.358.794.803	9.054.010.136	12.412.804.939

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
519	Kab. Asmat	12.226.695.419	3.443.448.553	8.783.246.866	12.226.695.419
520	Kab. Waropen	16.435.846.994	3.066.849.784	13.368.997.210	16.435.846.994
521	Kab. Mamberamo Raya	15.165.176.227	2.966.349.854	12.198.826.373	15.165.176.227
522	Kab. Mamberamo Tengah	7.497.548.750	2.995.056.964	4.502.491.786	7.497.548.750
523	Kab. Nduga	8.304.805.488	3.038.242.260	5.266.563.228	8.304.805.488
524	Kab. Dogiyai	8.865.165.457	3.185.780.084	5.679.385.373	8.865.165.457
525	Kab. Intan Jaya	12.691.983.068	5.047.208.000	7.644.775.068	12.691.983.068
526	Kab. Puncak	9.965.820.791	3.444.756.626	6.521.064.165	9.965.820.791
527	Kab. Deiyai	8.395.486.290	3.139.618.595	5.255.867.695	8.395.486.290
528	Kab. Supiori	8.330.370.994	3.113.715.839	5.216.655.155	8.330.370.994
529	**Provinsi Papua Barat**	140.766.513.456	33.253.228.608	107.513.284.848	140.766.513.456
530	Kab. Sorong	154.914.034.506	3.970.076.442	150.943.958.064	154.914.034.506
531	Kab. Manokwari	20.153.143.793	7.410.337.774	12.742.806.019	20.153.143.793
532	Kab. Manokwari Selatan	8.998.457.718	1.400.845.817	7.597.611.901	8.998.457.718
533	Kab. Fak Fak	12.564.317.006	1.711.979.844	10.852.337.162	12.564.317.006
534	Kota Sorong	18.407.664.644	11.433.695.006	6.973.969.638	18.407.664.644
535	Kab. Pegunungan Arfak	19.061.964.489	1.421.395.867	17.640.568.622	19.061.964.489
536	Kab. Sorong Selatan	12.707.952.679	1.972.208.221	10.735.744.458	12.707.952.679
537	Kab. Raja Ampat	14.092.467.236	1.736.630.099	12.355.837.137	14.092.467.236
538	Kab. Teluk Bintuni	230.303.035.891	12.995.727.707	217.307.308.184	230.303.035.891
539	Kab. Teluk Wondama	10.861.352.054	1.562.512.194	9.298.839.860	10.861.352.054
540	Kab. Tambrauw	9.117.164.799	1.585.183.820	7.531.980.979	9.117.164.799
541	Kab. Maybrat	8.735.079.126	1.311.186.088	7.423.893.038	8.735.079.126
542	Kab. Kaimana	11.483.499.581	1.517.022.190	9.966.477.391	11.483.499.581
	JUMLAH	45.695.178.904.793	29.991.687.612.756	15.703.491.292.037	45.695.178.904.793

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**332.884.297.055**	**187.455.671.783**	**137.727.508.321**	**7.050.605.724**	**96.922.756**	**276.815.139**	-	**332.607.523.723**
2	Kab. Aceh Barat	15.994.469.124	993.328.460	1.267.108.105	13.009.625.682	8.811.215	14.361.071	701.234.591	**15.994.469.124**
3	Kab. Aceh Besar	3.773.053.009	993.328.460	1.267.108.105	634.836.571	134.811.374	41.733.908	701.234.591	**3.773.053.009**
4	Kab. Aceh Selatan	3.985.874.697	993.328.460	1.267.108.105	997.140.703	8.811.215	5.495.400	701.234.591	**3.973.118.474**
5	Kab. Aceh Singkil	3.707.139.516	993.328.460	1.267.108.105	707.405.106	8.811.215	3.000.300	701.234.591	**3.680.887.777**
6	Kab. Aceh Tengah	4.236.453.222	993.328.460	1.267.108.105	1.155.502.985	8.811.215	110.467.866	701.234.591	**4.236.453.222**
7	Kab. Aceh Tenggara	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	**3.553.182.577**
8	Kab. Aceh Timur	16.834.342.379	2.332.193.836	13.175.909.950	568.555.203	8.811.215	4.384.500	701.234.591	**16.791.089.295**
9	Kab. Aceh Utara	40.800.022.990	19.512.607.749	19.992.979.042	568.555.203	8.811.215	2.815.200	701.234.591	**40.787.003.000**
10	Kab. Bireuen	3.553.164.026	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.708.200	701.234.591	**3.540.745.774**
11	Kab. Pidie	3.954.250.228	993.328.460	1.267.108.105	969.578.191	8.811.215	1.946.100	701.234.591	**3.942.006.662**
12	Kab. Simeulue	3.557.704.024	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.104.812	701.234.591	**3.553.142.386**
13	Kota Banda Aceh	3.553.164.026	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.708.200	701.234.591	**3.540.745.774**
14	Kota Sabang	3.612.215.687	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	67.844.325	14.145.003	701.234.591	**3.612.215.687**
15	Kota Langsa	3.555.439.393	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.745.700	701.234.591	**3.540.783.274**
16	Kota Lhokseumawe	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	**3.553.182.577**
17	Kab. Nagan Raya	5.221.122.057	993.328.460	1.267.108.105	2.231.445.600	8.811.215	4.918.500	701.234.591	**5.206.846.471**
18	Kab. Aceh Jaya	3.561.406.003	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	3.777.600	701.234.591	**3.542.815.174**
19	Kab. Pidie Jaya	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	**3.553.182.577**
20	Kab. Aceh Barat Daya	3.606.978.894	993.328.460	1.267.108.105	621.750.867	8.811.215	1.708.200	701.234.591	**3.593.941.438**
21	Kab. Gayo Lues	4.222.104.153	993.328.460	1.267.108.105	1.219.654.252	8.811.215	31.967.530	701.234.591	**4.222.104.153**
22	Kab. Aceh Tamiang	5.700.645.142	3.121.311.848	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	2.552.400	701.234.591	**5.669.573.362**
23	Kab. Bener Meriah	3.613.162.723	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	6.441.000	701.234.591	**3.545.478.574**
24	Kota Subulussalam	3.567.679.226	993.328.460	1.267.108.105	583.070.403	8.811.215	1.708.200	701.234.591	**3.555.260.974**
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**58.317.018.988**	**468.091.031**	**628.611.060**	**45.381.648.376**	**278.839.285**	**11.559.829.236**	-	**58.317.018.988**
26	Kab. Asahan	3.694.034.648	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	77.829.300	701.234.591	**3.586.343.037**
27	Kab. Dairi	4.492.552.537	29.255.886	39.287.950	3.357.557.518	17.427.394	85.546.500	701.234.591	**4.230.309.839**
28	Kab. Deli Serdang	3.787.195.865	30.520.180	130.093.553	2.721.307.916	17.427.394	186.612.231	701.234.591	**3.787.195.865**
29	Kab. Karo	3.862.867.703	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	354.353.966	701.234.591	**3.862.867.703**
30	Kab. LabuhanBatu	3.842.285.299	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	155.658.300	701.234.591	**3.664.172.037**
31	Kab. Langkat	5.359.175.531	560.352.621	1.166.416.517	2.721.307.916	17.427.394	192.436.492	701.234.591	**5.359.175.531**
32	Kab. Mandailing Natal	7.793.573.016	29.255.886	39.287.950	5.326.367.381	557.678.241	993.277.200	701.234.591	**7.647.101.249**
33	Kab. Nias	3.694.034.648	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	77.829.300	701.234.591	**3.586.343.037**
34	Kab. Simalungun	3.740.686.437	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	232.172.700	701.234.591	**3.740.686.437**
35	Kab. Tapanuli Selatan	92.592.324.179	29.255.886	39.287.950	91.619.373.933	17.427.394	98.408.400	701.234.591	**92.504.988.154**
36	Kab. Tapanuli Tengah	4.452.818.522	29.255.886	39.287.950	3.352.235.420	17.427.394	249.263.615	701.234.591	**4.388.704.856**
37	Kab. Tapanuli Utara	5.736.802.204	29.255.886	39.287.950	4.553.707.028	17.427.394	395.889.355	701.234.591	**5.736.802.204**
38	Kab. Toba Samosir	4.122.186.942	29.255.886	39.287.950	2.914.118.017	17.427.394	420.863.104	701.234.591	**4.122.186.942**
39	Kota Binjai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
40	Kota Medan	3.804.802.631	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	296.288.894	701.234.591	**3.804.802.631**
41	Kota Pematang Siantar	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
42	Kota Sibolga	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Kota Tanjung Balai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
44	Kab. Batu Bara	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
45	Kab. LabuhanBatu Utara	5.836.325.040	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	2.261.294.720	701.234.591	**5.769.808.457**
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	4.049.372.937	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	540.859.200	701.234.591	**4.049.372.937**
47	Kab. Padang Lawas Utara	3.869.320.613	29.255.886	39.287.950	2.746.346.916	17.427.394	289.710.397	701.234.591	**3.823.263.134**
48	Kab. Padang Lawas	4.321.042.897	403.821.346	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	437.963.700	701.234.591	**4.321.042.897**
49	Kab. Nias Utara	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
50	Kab. Nias Barat	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
51	Kota Tebing Tinggi	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
52	Kota Padang Sidempuan	4.082.749.967	29.255.886	39.287.950	3.109.177.918	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**4.082.749.967**
53	Kab. Pakpak Bharat	4.792.838.427	29.255.886	39.287.950	2.744.870.616	17.427.394	81.945.000	701.234.591	**3.614.021.437**
54	Kab. Nias Selatan	4.056.813.739	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	509.990.400	701.234.591	**4.018.504.137**
55	Kab. Humbang Hasundutan	4.126.329.650	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	191.014.500	701.234.591	**3.699.528.237**
56	Kab. Serdang Bedagai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
57	Kab. Samosir	3.948.237.089	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	180.210.300	701.234.591	**3.688.724.037**
58	Kota Gunungsitoli	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	**3.694.879.965**
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**15.535.825.002**	-	-	**4.932.058.001**	**370.295.881**	**10.233.471.120**	-	**15.535.825.002**
60	Kab. LimaPuluh Kota	1.608.745.501	-	-	673.218.423	41.144.132	160.993.906	701.234.591	**1.576.591.052**
61	Kab. Agam	1.465.917.325	-	-	531.522.453	41.144.132	75.024.300	701.234.591	**1.348.925.476**
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.483.658.883	-	-	522.184.453	41.144.132	1.027.003.200	701.234.591	**2.291.566.376**
63	Kab. Padang Pariaman	1.455.781.978	-	-	522.184.453	41.144.132	191.218.802	701.234.591	**1.455.781.978**
64	Kab. Pasaman	1.700.641.251	-	-	765.217.456	41.144.132	193.045.072	701.234.591	**1.700.641.251**
65	Kab. Pesisir Selatan	1.615.084.425	-	-	676.737.519	41.144.132	87.062.100	701.234.591	**1.506.178.342**
66	Kab. Sijunjung	1.999.724.007	-	-	911.323.413	41.144.132	346.021.871	701.234.591	**1.999.724.007**
67	Kab. Solok	1.804.158.708	-	-	631.308.384	266.710.603	79.037.100	701.234.591	**1.678.290.678**
68	Kab. Tanah Datar	1.456.188.422	-	-	522.184.453	41.144.132	160.666.351	701.234.591	**1.425.229.527**
69	Kota Bukit Tinggi	1.457.702.965	-	-	522.184.453	41.144.132	193.139.789	701.234.591	**1.457.702.965**
70	Kota Padang Panjang	1.455.781.978	-	-	522.184.453	41.144.132	191.218.802	701.234.591	**1.455.781.978**
71	Kota Padang	1.456.536.096	-	-	523.733.812	41.144.132	180.275.330	701.234.591	**1.446.387.865**
72	Kota Payakumbuh	1.455.784.321	-	-	522.184.453	41.144.132	191.221.145	701.234.591	**1.455.784.321**
73	Kota Sawahlunto	9.958.106.870	-	-	9.020.525.672	41.144.132	187.354.464	701.234.591	**9.950.258.859**
74	Kota Solok	1.455.782.349	-	-	522.184.453	41.144.132	191.219.173	701.234.591	**1.455.782.349**
75	Kota Pariaman	1.460.532.178	-	-	522.184.453	41.144.132	195.969.002	701.234.591	**1.460.532.178**
76	Kab. Pasaman Barat	1.472.366.800	-	-	531.038.753	41.144.132	198.949.324	701.234.591	**1.472.366.800**
77	Kab. Dharmasraya	1.729.956.123	-	-	783.747.868	41.144.132	203.829.532	701.234.591	**1.729.956.123**
78	Kab. Solok Selatan	2.053.193.676	-	-	645.179.847	515.024.963	144.240.900	701.234.591	**2.005.680.301**
79	**Provinsi Riau**	**864.950.038.139**	**812.548.162.439**	**18.834.225.216**	**10.707.972.698**	-	**22.859.677.786**	-	**864.950.038.139**
80	Kab. Bengkalis	818.101.260.166	803.642.583.241	3.424.404.683	1.813.824.579	-	8.519.213.072	701.234.591	**818.101.260.166**
81	Kab. Indragiri Hilir	172.302.436.388	147.736.029.758	3.424.404.683	16.115.091.069	-	4.325.676.287	701.234.591	**172.302.436.388**
82	Kab. Indragiri Hulu	161.991.433.553	150.156.572.586	3.424.404.683	3.432.735.276	-	4.276.486.417	701.234.591	**161.991.433.553**
83	Kab. Kampar	373.824.111.279	354.235.398.537	11.823.470.939	1.886.581.922	-	5.177.425.290	701.234.591	**373.824.111.279**
84	Kab. Kuantan Singingi	161.799.587.168	147.736.029.758	3.424.404.683	5.888.557.665	-	4.049.360.471	701.234.591	**161.799.587.168**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Kab. Pelalawan	199.938.435.166	151.780.236.083	27.973.644.349	1.856.160.579	-	17.627.159.564	701.234.591	**199.938.435.166**
86	Kab. Rokan Hilir	500.945.219.255	490.916.075.821	3.424.404.683	1.813.824.579	-	4.089.679.581	701.234.591	**500.945.219.255**
87	Kab. Rokan Hulu	163.065.226.019	153.632.318.328	3.424.404.683	1.887.234.980	-	3.420.033.437	701.234.591	**163.065.226.019**
88	Kab. Siak	422.274.864.980	404.079.024.956	5.891.277.700	1.813.824.579	-	9.789.503.154	701.234.591	**422.274.864.980**
89	Kota Dumai	158.526.075.439	147.736.029.758	3.424.404.683	1.813.824.579	-	4.850.581.828	701.234.591	**158.526.075.439**
90	Kota Pekanbaru	156.957.018.140	147.736.029.758	3.424.404.683	1.813.824.579	-	3.281.524.529	701.234.591	**156.957.018.140**
91	Kab. Kepulauan Meranti	161.515.867.404	150.806.322.429	3.822.422.058	2.523.519.921	-	3.662.368.405	701.234.591	**161.515.867.404**
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**379.767.968.007**	**61.990.229.751**	**303.275.953.954**	**14.024.521.534**	-	**477.262.768**	-	**379.767.968.007**
93	Kab. Bintan	116.209.673.565	20.460.816.243	90.641.521.814	4.381.735.449	-	12.264.900	701.234.591	**116.197.572.997**
94	Kab. Natuna	269.750.039.838	83.036.516.945	182.141.705.310	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	**269.738.664.979**
95	Kab. Karimun	125.750.464.141	20.460.816.243	90.641.521.828	13.835.593.758	-	42.384.600	701.234.591	**125.681.551.020**
96	Kota Batam	115.675.640.431	20.460.816.243	90.641.521.828	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	**115.662.780.795**
97	Kab. Kepulauan Anambas	198.662.699.221	54.152.301.439	139.910.851.661	3.846.943.233	-	44.956.485	701.234.591	**198.656.287.409**
98	Kota Tanjung Pinang	115.715.443.087	20.460.816.243	90.641.521.828	3.887.967.776	-	19.642.913	701.234.591	**115.711.183.351**
99	Kab. Lingga	116.354.311.233	20.460.816.243	90.641.521.828	4.507.267.971	-	43.470.600	701.234.591	**116.354.311.233**
100	**Provinsi Jambi**	**236.361.941.734**	**62.493.692.403**	**131.859.314.422**	**31.032.154.664**	-	**10.976.780.245**	-	**236.361.941.734**
101	Kab. Batanghari	59.590.797.381	13.337.142.039	26.371.862.693	15.741.480.275	-	3.439.077.783	701.234.591	**59.590.797.381**
102	Kab. Bungo	65.223.864.037	12.498.738.580	26.371.862.693	24.577.937.529	-	1.074.090.644	701.234.591	**65.223.864.037**
103	Kab. Kerinci	46.492.397.004	12.498.738.580	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.067.443.367	701.234.591	**46.492.397.004**
104	Kab. Merangin	47.046.611.642	12.498.738.580	26.371.862.693	6.286.346.890	-	1.188.428.888	701.234.591	**47.046.611.642**
105	Kab. Muaro Jambi	50.207.893.469	14.017.886.179	26.449.728.850	7.697.344.480	-	413.249.100	701.234.591	**49.279.443.200**
106	Kab. Sarolangun	75.252.666.201	13.313.321.228	26.384.951.342	30.708.192.432	-	463.393.200	701.234.591	**71.571.092.793**
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	340.962.107.966	102.366.369.145	225.081.108.750	7.089.581.233	-	5.723.814.247	701.234.591	**340.962.107.966**
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	104.794.606.439	31.103.229.405	64.918.428.530	5.853.117.773	-	2.218.596.140	701.234.591	**104.794.606.439**
109	Kab. Tebo	55.431.716.603	13.230.203.874	26.371.862.693	10.065.694.683	-	5.062.720.762	701.234.591	**55.431.716.603**
110	Kota Jambi	46.849.999.483	12.856.341.059	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.067.443.367	701.234.591	**46.849.999.483**
111	Kota Sungai Penuh	46.495.322.113	12.498.738.580	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.070.368.476	701.234.591	**46.495.322.113**
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**936.907.319.894**	**95.875.954.953**	**542.294.890.067**	**290.587.611.086**	**159.007.277**	**7.989.856.511**	-	**936.907.319.894**
113	Kab. Lahat	367.592.492.523	13.278.629.818	93.414.795.773	259.034.722.247	83.877.958	926.158.558	701.234.591	**367.439.418.945**
114	Kab. Musi Banyuasin	1.140.595.500.033	146.921.908.705	913.752.047.568	75.318.985.023	19.875.565	3.881.448.581	701.234.591	**1.140.595.500.033**
115	Kab. Musi Rawas	238.857.767.080	30.470.952.368	162.354.426.992	43.975.296.950	19.875.565	1.335.980.614	701.234.591	**238.857.767.080**
116	Kab Musi Rawas Utara	131.380.124.327	11.984.494.572	67.786.861.498	49.964.785.816	19.875.565	920.848.564	701.234.591	**131.378.100.606**
117	Kab. Muara Enim	425.449.223.197	18.413.015.321	108.501.891.548	296.054.797.174	212.369.592	1.565.914.971	701.234.591	**425.449.223.197**
118	Kab. Ogan Komering Ilir	127.823.654.693	11.984.494.572	67.786.861.498	36.639.619.075	19.875.565	10.691.569.392	701.234.591	**127.823.654.693**
119	Kab. Ogan Komering Ulu	133.919.630.138	20.550.902.270	72.979.885.443	38.704.081.963	19.875.565	474.505.500	701.234.591	**133.430.485.332**
120	Kota Palembang	116.882.059.110	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	19.875.565	926.517.709	701.234.591	**116.882.059.110**
121	Kota Pagar Alam	118.479.980.899	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	59.048.370	2.265.033.666	701.234.591	**118.259.747.872**
122	Kota Lubuk linggau	116.882.059.110	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	19.875.565	926.517.709	701.234.591	**116.882.059.110**
123	Kota Prabumulih	123.031.546.418	14.315.806.473	71.129.753.726	35.938.358.354	19.875.565	926.517.709	701.234.591	**123.031.546.418**
124	Kab. Empat Lawang	119.047.627.328	11.984.494.572	67.786.861.498	37.628.643.393	19.875.565	926.517.709	701.234.591	**119.047.627.328**
125	Kab. Banyuasin	125.040.668.207	15.221.406.293	67.786.861.498	40.319.892.291	19.875.565	991.397.969	701.234.591	**125.040.668.207**
126	Kab. Ogan Ilir	118.848.156.043	13.701.602.180	67.780.625.220	35.718.300.778	19.875.565	926.517.709	701.234.591	**118.848.156.043**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	Kab. OKU Timur	118.170.553.502	11.984.494.572	67.786.861.498	36.750.508.036	19.875.565	927.579.240	701.234.591	**118.170.553.502**
128	Kab. OKU Selatan	117.789.853.759	11.984.494.572	67.786.861.498	36.323.553.994	23.948.624	969.760.480	701.234.591	**117.789.853.759**
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	127.952.017.193	18.791.870.615	69.184.383.391	38.329.825.728	19.875.565	923.183.947	701.234.591	**127.950.373.837**
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**162.566.556.351**	**5.663.154.403**	-	**155.723.973.336**	-	**649.159.790**	-	**162.036.287.529**
131	Kab. Bangka	86.760.314.596	1.616.479.128	-	84.384.902.916	-	10.012.800	701.234.591	**86.712.629.435**
132	Kab. Belitung	47.757.442.292	1.616.479.128	-	45.389.852.863	-	35.034.300	701.234.591	**47.742.600.882**
133	Kota Pangkal Pinang	42.367.869.981	1.616.479.128	-	40.004.781.686	-	45.374.576	701.234.591	**42.367.869.981**
134	Kab. Bangka Selatan	70.388.824.822	1.616.479.128	-	67.501.857.916	-	561.985.019	701.234.591	**70.381.556.654**
135	Kab. Bangka Tengah	52.826.781.988	1.616.479.128	-	50.028.407.890	-	401.887.049	701.234.591	**52.748.008.658**
136	Kab. Bangka Barat	55.860.361.836	1.616.479.128	-	53.495.826.280	-	46.821.837	701.234.591	**55.860.361.836**
137	Kab. Belitung Timur	61.458.371.265	1.616.479.128	-	58.405.720.815	-	734.936.731	701.234.591	**61.458.371.265**
138	**Provinsi Bengkulu**	**25.953.334.012**	-	-	**24.799.297.280**	**58.084.698**	**548.173.160**	-	**25.405.555.138**
139	Kab. Bengkulu Selatan	6.114.407.990	-	-	5.382.580.621	12.907.856	2.979.300	701.234.591	**6.099.702.368**
140	Kab. Bengkulu Utara	27.217.754.603	-	-	25.046.153.735	12.907.856	26.812.800	701.234.591	**25.787.108.982**
141	Kab. Rejang Lebong	6.155.933.005	-	-	5.382.580.621	55.348.338	2.979.300	701.234.591	**6.142.142.850**
142	Kota Bengkulu	6.144.729.883	-	-	5.382.580.621	12.907.856	47.106.390	701.234.591	**6.143.829.458**
143	Kab. Kaur	6.267.622.658	-	-	5.519.936.416	12.907.856	33.543.795	701.234.591	**6.267.622.658**
144	Kab. Seluma	8.616.825.302	-	-	7.882.509.976	12.907.856	20.172.879	701.234.591	**8.616.825.302**
145	Kab. Mukomuko	6.113.492.523	-	-	5.382.580.621	12.907.856	2.979.300	701.234.591	**6.099.702.368**
146	Kab. Lebong	7.480.040.569	-	-	6.703.630.385	12.907.856	2.979.300	701.234.591	**7.420.752.132**
147	Kab. Bengkulu Tengah	27.451.038.486	-	-	26.720.126.560	12.907.880	16.769.455	701.234.591	**27.451.038.486**
148	Kab. Kepahiang	6.176.315.021	-	-	5.382.580.621	73.728.915	8.216.504	701.234.591	**6.165.760.631**
149	**Provinsi Lampung**	**89.921.761.457**	**66.089.197.466**	**17.363.207.583**	**1.508.968.080**	**4.584.982.945**	**375.405.383**	-	**89.921.761.457**
150	Kab. Lampung Barat	12.922.139.039	8.967.380.194	2.313.955.822	221.390.212	665.757.126	52.421.094	701.234.591	**12.922.139.039**
151	Kab. Lampung Selatan	13.199.205.438	8.967.380.194	2.313.955.822	313.265.836	820.821.953	82.547.042	701.234.591	**13.199.205.438**
152	Kab. Lampung Tengah	12.900.387.832	8.967.380.194	2.313.955.822	210.261.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**12.900.387.832**
153	Kab. Lampung Utara	12.876.058.612	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	39.924.300	701.234.591	**12.863.561.818**
154	Kab. Lampung Timur	44.454.946.251	40.521.938.613	2.313.955.822	210.261.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**44.454.946.251**
155	Kab. Tanggamus	23.614.217.350	8.967.380.194	2.313.955.822	3.031.793.214	8.439.068.178	160.785.351	701.234.591	**23.614.217.350**
156	Kab. Tulang Bawang	12.984.905.132	8.967.380.194	2.313.955.822	294.778.912	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**12.984.905.132**
157	Kab. Way Kanan	13.724.222.749	8.967.380.194	2.313.955.822	463.105.297	654.997.299	623.549.546	701.234.591	**13.724.222.749**
158	Kab. Pesawaran	13.389.806.645	8.967.380.194	2.313.955.822	280.485.839	1.074.191.885	52.558.314	701.234.591	**13.389.806.645**
159	Kab. Pesisir Barat	12.876.532.991	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	43.049.983	701.234.591	**12.866.687.501**
160	Kab. Pringsewu	12.896.551.132	8.967.380.194	2.313.955.822	206.424.912	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**12.896.551.132**
161	Kab. Mesuji	13.195.118.519	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.613	654.997.299	371.481.000	701.234.591	**13.195.118.519**
162	Kab. Tulang Bawang Barat	12.876.195.832	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**12.876.195.832**
163	Kota Bandar Lampung	13.011.176.886	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	790.115.573	45.989.713	701.234.591	**13.004.745.505**
164	Kota Metro	12.876.195.832	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	**12.876.195.832**
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**183.375.491.488**	**130.238.555.574**	**52.435.701.394**	-	-	-	**701.234.520**	**183.375.491.488**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**307.513.548.008**	**66.627.817.955**	**79.076.521.901**	**5.266.894.160**	**155.572.404.668**	**969.909.324**	-	**307.513.548.008**
167	Kab. Bandung	184.280.656.644	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	172.198.178.337	154.724.880	701.234.591	**184.280.656.644**
168	Kab. Bekasi	31.877.244.515	6.486.866.541	12.273.045.063	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**31.877.244.515**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Kab. Bogor	75.624.857.352	4.944.070.438	5.908.065.237	9.741.057.872	54.219.793.528	110.635.686	701.234.591	**75.624.857.352**
170	Kab. Ciamis	24.333.314.822	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	438.454.637	701.234.591	**24.333.314.822**
171	Kab. Cianjur	25.392.269.761	4.944.070.438	5.908.065.237	1.516.822.959	11.967.106.758	354.969.778	701.234.591	**25.392.269.761**
172	Kab. Cirebon	23.972.292.072	4.944.070.438	5.908.065.237	374.841.812	11.967.106.758	76.973.236	701.234.591	**23.972.292.072**
173	Kab. Garut	81.410.721.837	4.944.070.438	5.908.065.237	607.235.563	69.155.674.758	94.441.250	701.234.591	**81.410.721.837**
174	Kab. Indramayu	32.432.300.220	8.399.061.278	10.823.479.278	374.383.161	11.967.106.758	167.035.154	701.234.591	**32.432.300.220**
175	Kab. Karawang	36.982.967.582	7.474.504.415	16.390.533.294	374.383.161	11.967.106.758	75.205.363	701.234.591	**36.982.967.582**
176	Kab. Kuningan	24.023.614.014	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	128.753.829	701.234.591	**24.023.614.014**
177	Kab. Majalengka	24.216.392.102	5.042.910.841	6.027.064.365	374.383.161	11.967.106.758	103.692.386	701.234.591	**24.216.392.102**
178	Kab. Pangandaran	24.227.179.528	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	332.319.343	701.234.591	**24.227.179.528**
179	Kab. Purwakarta	24.189.736.124	4.944.070.438	5.908.065.237	392.082.435	12.007.459.551	236.823.872	701.234.591	**24.189.736.124**
180	Kab. Subang	46.425.739.102	6.172.701.525	27.077.062.735	374.383.161	12.008.227.595	92.129.495	701.234.591	**46.425.739.102**
181	Kab. Sukabumi	64.015.895.237	4.944.070.438	5.908.065.237	906.500.279	51.346.349.675	209.675.017	701.234.591	**64.015.895.237**
182	Kab. Sumedang	24.020.721.600	4.944.070.438	5.908.065.237	374.426.326	11.972.732.957	120.192.051	701.234.591	**24.020.721.600**
183	Kab. Tasikmalaya	24.035.212.694	4.944.070.438	5.908.065.237	365.571.358	11.967.106.758	149.164.312	701.234.591	**24.035.212.694**
184	Kab. Bandung Barat	24.060.444.084	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	12.006.112.359	126.578.298	701.234.591	**24.060.444.084**
185	Kota Bandung	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
186	Kota Bekasi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
187	Kota Bogor	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
188	Kota Cirebon	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
189	Kota Depok	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
190	Kota Sukabumi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
191	Kota Cimahi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
192	Kota Tasikmalaya	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	**23.969.468.586**
193	Kota Banjar	24.134.117.102	4.944.070.438	5.908.065.237	377.247.147	11.967.106.758	236.392.931	701.234.591	**24.134.117.102**
194	**Provinsi Banten**	**3.378.868.313**	-	-	**2.438.542.508**	**460.863.819**	**479.461.986**	-	**3.378.868.313**
195	Kab. Lebak	2.186.779.805	-	-	1.199.969.886	131.675.630	153.899.698	701.234.591	**2.186.779.805**
196	Kab. Pandeglang	6.980.328.786	-	-	4.806.691.047	530.414.385	941.988.763	701.234.591	**6.980.328.786**
197	Kab. Serang	1.984.463.485	-	-	623.397.845	522.987.854	131.655.721	701.234.591	**1.979.276.011**
198	Kab. Tangerang	1.600.419.761	-	-	630.520.399	131.675.630	136.989.141	701.234.591	**1.600.419.761**
199	Kota Cilegon	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	**1.593.297.207**
200	Kota Tangerang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	**1.593.297.207**
201	Kota Serang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	**1.593.297.207**
202	Kota Tangerang Selatan	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	**1.593.297.207**
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**11.258.878.606**	**617.899.676**	**4.951.031.508**	**96.167.508**	**451.708.450**	**5.142.071.464**	-	**11.258.878.606**
204	Kab. Banjarnegara	1.381.781.534	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	323.749.370	701.234.591	**1.381.781.534**
205	Kab. Banyumas	1.613.765.918	36.346.929	291.237.025	2.642.858	155.520.720	333.035.199	701.234.591	**1.520.017.322**
206	Kab. Batang	1.550.296.911	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	492.264.747	701.234.591	**1.550.296.911**
207	Kab. Blora	17.015.980.402	1.235.799.353	9.902.062.422	2.642.858	26.570.761	5.147.670.417	701.234.591	**17.015.980.402**
208	Kab. Boyolali	1.413.096.043	36.346.929	291.237.025	2.642.858	29.072.970	352.561.670	701.234.591	**1.413.096.043**
209	Kab. Brebes	1.748.636.703	36.346.929	291.237.025	2.642.858	107.144.776	610.030.524	701.234.591	**1.748.636.703**
210	Kab. Cilacap	1.650.381.787	36.346.929	291.237.025	105.085.062	26.570.761	489.907.419	701.234.591	**1.650.381.787**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Kab. Demak	1.345.825.990	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	287.793.826	701.234.591	**1.345.825.990**
212	Kab. Grobogan	1.968.820.449	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	910.788.285	701.234.591	**1.968.820.449**
213	Kab. Jepara	1.398.370.142	36.346.929	291.237.025	11.664.712	26.570.761	331.316.124	701.234.591	**1.398.370.142**
214	Kab. Karanganyar	1.690.895.599	36.346.929	291.237.025	2.642.858	364.543.572	294.890.624	701.234.591	**1.690.895.599**
215	Kab. Kebumen	1.417.931.636	36.346.929	291.237.025	26.447.758	26.570.761	336.094.572	701.234.591	**1.417.931.636**
216	Kab. Kendal	1.627.524.417	36.346.929	291.237.025	2.642.858	34.905.773	561.157.241	701.234.591	**1.627.524.417**
217	Kab. Klaten	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
218	Kab. Kudus	1.340.380.149	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.347.985	701.234.591	**1.340.380.149**
219	Kab. Magelang	1.384.029.091	36.346.929	291.237.025	2.642.858	61.945.699	290.621.989	701.234.591	**1.384.029.091**
220	Kab. Pati	1.683.829.392	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	625.797.228	701.234.591	**1.683.829.392**
221	Kab. Pekalongan	1.412.196.759	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	354.164.595	701.234.591	**1.412.196.759**
222	Kab. Pemalang	1.931.441.590	36.346.929	291.237.025	2.642.858	46.706.549	853.273.638	701.234.591	**1.931.441.590**
223	Kab. Purbalingga	1.370.725.108	36.346.929	291.237.025	2.642.858	41.725.995	297.537.710	701.234.591	**1.370.725.108**
224	Kab. Purworejo	1.384.455.122	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	326.422.958	701.234.591	**1.384.455.122**
225	Kab. Rembang	2.206.958.859	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	1.148.926.695	701.234.591	**2.206.958.859**
226	Kab. Semarang	1.535.145.516	36.346.929	291.237.025	2.642.858	144.864.576	358.819.537	701.234.591	**1.535.145.516**
227	Kab. Sragen	1.465.666.498	36.346.929	291.237.025	2.642.858	83.479.538	350.725.557	701.234.591	**1.465.666.498**
228	Kab. Sukoharjo	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
229	Kab. Tegal	1.580.665.102	36.346.929	291.237.025	2.642.858	85.408.015	463.795.684	701.234.591	**1.580.665.102**
230	Kab. Temanggung	1.382.471.079	36.346.929	291.237.025	2.642.858	39.572.737	311.436.939	701.234.591	**1.382.471.079**
231	Kab. Wonogiri	1.581.592.203	36.346.929	291.237.025	212.631.367	33.474.011	306.668.280	701.234.591	**1.581.592.203**
232	Kab. Wonosobo	1.391.005.084	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	332.972.920	701.234.591	**1.391.005.084**
233	Kota Magelang	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
234	Kota Pekalongan	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
235	Kota Salatiga	1.341.711.048	36.346.929	291.237.025	2.642.858	28.111.440	282.138.205	701.234.591	**1.341.711.048**
236	Kota Semarang	1.394.502.004	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	336.469.840	701.234.591	**1.394.502.004**
237	Kota Surakarta	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
238	Kota Tegal	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	**1.340.170.369**
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**44.756.323**	-	-	**22.980.691**	-	**21.775.632**	-	**44.756.323**
240	Kab. Bantul	713.613.199	-	-	1.489.441	-	10.889.167	701.234.591	**713.613.199**
241	Kab. Gunung kidul	746.273.941	-	-	1.489.441	-	43.549.909	701.234.591	**746.273.941**
242	Kab. Kulon Progo	798.087.404	-	-	85.964.997	-	10.887.816	701.234.591	**798.087.404**
243	Kab. Sleman	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	701.234.591	**713.611.848**
244	Kota Yogyakarta	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	701.234.591	**713.611.848**
245	**Provinsi Jawa Timur**	**1.237.819.248.991**	**1.157.989.967.942**	**58.768.355.271**	**15.388.619.409**	**577.281.112**	**5.095.025.257**	-	**1.237.819.248.991**
246	Kab. Bangkalan	74.403.438.039	65.556.392.830	7.043.568.124	814.454.968	31.203.994	256.583.532	701.234.591	**74.403.438.039**
247	Kab. Banyuwangi	100.073.579.995	62.568.101.586	3.099.167.031	30.316.870.959	389.175.367	2.999.030.461	701.234.591	**100.073.579.995**
248	Kab. Blitar	67.813.967.013	62.568.101.586	3.099.167.031	814.903.487	31.203.994	599.356.324	701.234.591	**67.813.967.013**
249	Kab. Bojonegoro	2.281.171.868.831	2.274.535.553.497	4.376.587.362	814.447.240	31.203.994	712.842.147	701.234.591	**2.281.171.868.831**
250	Kab. Bondowoso	68.044.170.471	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	209.165.322	652.054.701	701.234.591	**68.044.170.471**
251	Kab. Gresik	67.656.560.411	62.584.661.653	3.242.222.454	814.447.240	31.203.994	282.790.479	701.234.591	**67.656.560.411**
252	Kab. Jember	68.371.280.627	62.568.101.586	3.099.167.031	870.231.781	31.203.994	1.101.341.644	701.234.591	**68.371.280.627**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	Kab. Jombang	67.570.446.261	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	356.291.819	701.234.591	**67.570.446.261**
254	Kab. Kediri	67.657.259.548	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	443.105.106	701.234.591	**67.657.259.548**
255	Kab. Lamongan	67.878.634.176	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	664.479.734	701.234.591	**67.878.634.176**
256	Kab. Lumajang	68.776.133.401	62.568.101.586	3.099.167.031	1.927.030.345	31.203.994	449.395.854	701.234.591	**68.776.133.401**
257	Kab. Madiun	68.260.537.856	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	124.075.999	953.511.409	701.234.591	**68.260.537.856**
258	Kab. Magetan	67.505.629.262	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	66.648.428	256.030.386	701.234.591	**67.505.629.262**
259	Kab. Malang	67.674.547.652	62.568.101.586	3.099.167.031	815.525.940	51.934.491	438.584.013	701.234.591	**67.674.547.652**
260	Kab. Mojokerto	67.573.074.718	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	97.756.310	292.367.960	701.234.591	**67.573.074.718**
261	Kab. Nganjuk	67.837.368.461	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	623.214.019	701.234.591	**67.837.368.461**
262	Kab. Ngawi	68.047.978.545	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	121.213.662	743.814.435	701.234.591	**68.047.978.545**
263	Kab. Pacitan	67.494.241.557	62.568.101.586	3.099.167.031	842.389.140	31.203.994	252.145.215	701.234.591	**67.494.241.557**
264	Kab. Pamekasan	67.474.493.348	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	260.338.906	701.234.591	**67.474.493.348**
265	Kab. Pasuruan	67.564.288.164	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	80.362.676	300.975.040	701.234.591	**67.564.288.164**
266	Kab. Ponorogo	68.003.061.903	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	213.998.223	606.113.232	701.234.591	**68.003.061.903**
267	Kab. Probolinggo	67.630.981.571	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	416.827.129	701.234.591	**67.630.981.571**
268	Kab. Sampang	67.465.013.364	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.858.922	701.234.591	**67.465.013.364**
269	Kab. Sidoarjo	69.683.433.642	62.558.306.241	5.328.063.523	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**69.683.433.642**
270	Kab. Situbondo	67.511.714.466	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	34.222.238	294.541.780	701.234.591	**67.511.714.466**
271	Kab. Sumenep	70.116.679.712	62.568.101.586	5.738.713.221	814.447.240	31.203.994	262.979.080	701.234.591	**70.116.679.712**
272	Kab. Trenggalek	67.610.023.958	62.568.101.586	3.099.167.031	850.755.542	31.203.994	359.561.214	701.234.591	**67.610.023.958**
273	Kab. Tuban	72.249.797.730	66.717.633.509	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	886.111.365	701.234.591	**72.249.797.730**
274	Kab. Tulungagung	67.509.044.392	62.568.101.586	3.099.167.031	816.048.421	31.203.994	293.288.769	701.234.591	**67.509.044.392**
275	Kota Blitar	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
276	Kota Kediri	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
277	Kota Madiun	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
278	Kota Malang	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
279	Kota Mojokerto	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
280	Kota Pasuruan	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
281	Kota Probolinggo	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
282	Kota Surabaya	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	**67.464.332.495**
283	Kota Batu	67.514.043.095	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	78.053.234	253.039.413	701.234.591	**67.514.043.095**
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**64.690.232.937**	-	-	**25.192.406.117**	-	**39.497.826.820**	-	**64.690.232.937**
285	Kab. Bengkayang	4.536.246.330	-	-	3.055.343.137	-	778.215.808	701.234.591	**4.534.793.536**
286	Kab. Landak	8.803.016.155	-	-	6.762.629.885	-	1.339.151.679	701.234.591	**8.803.016.155**
287	Kab. Kapuas Hulu	7.399.769.155	-	-	5.410.939.064	-	1.287.595.500	701.234.591	**7.399.769.155**
288	Kab. Ketapang	41.835.407.183	-	-	28.627.335.980	-	12.506.836.612	701.234.591	**41.835.407.183**
289	Kab. Mempawah	4.738.794.215	-	-	3.169.959.720	-	867.599.904	701.234.591	**4.738.794.215**
290	Kab. Sambas	4.278.961.865	-	-	2.858.831.071	-	718.896.203	701.234.591	**4.278.961.865**
291	Kab. Sanggau	30.894.092.479	-	-	28.284.219.429	-	1.908.638.459	701.234.591	**30.894.092.479**
292	Kab. Sintang	7.302.712.059	-	-	5.010.303.487	-	1.175.371.800	701.234.591	**6.886.909.878**
293	Kota Pontianak	4.372.674.332	-	-	2.843.879.072	-	827.560.669	701.234.591	**4.372.674.332**
294	Kota Singkawang	4.272.454.327	-	-	2.857.037.975	-	714.181.761	701.234.591	**4.272.454.327**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	Kab. Kayong Utara	4.496.070.980	-	-	3.092.193.715	-	480.002.393	701.234.591	**4.273.430.699**
296	Kab. Kubu Raya	5.492.893.463	-	-	2.954.633.772	-	1.837.025.100	701.234.591	**5.492.893.463**
297	Kab. Sekadau	5.204.342.771	-	-	3.792.584.092	-	710.524.088	701.234.591	**5.204.342.771**
298	Kab. Melawi	4.661.463.383	-	-	2.852.251.775	-	655.813.800	701.234.591	**4.209.300.166**
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**440.616.398.456**	**14.551.600**	**149.076.900**	**165.697.915.497**	-	**274.754.854.459**	-	**440.616.398.456**
300	Kab. Barito Selatan	56.863.612.880	2.238.600	22.925.000	51.065.952.153	-	5.071.262.536	701.234.591	**56.863.612.880**
301	Kab. Barito Utara	121.298.995.124	28.912.800	298.021.500	107.755.560.596	-	12.515.265.637	701.234.591	**121.298.995.124**
302	Kab. Kapuas	136.187.992.842	2.238.600	22.925.000	121.950.442.573	-	13.511.152.078	701.234.591	**136.187.992.842**
303	Kab. Kotawaringin Barat	33.109.106.805	2.238.600	22.925.000	23.924.351.626	-	8.458.356.988	701.234.591	**33.109.106.805**
304	Kab. Kotawaringin Timur	37.978.232.343	2.238.600	22.925.000	29.558.361.390	-	7.693.472.762	701.234.591	**37.978.232.343**
305	Kota Palangkaraya	29.576.838.372	2.238.600	22.925.000	24.058.105.145	-	4.792.335.036	701.234.591	**29.576.838.372**
306	Kab. Barito Timur	52.966.127.133	2.429.000	22.925.000	45.776.556.755	-	6.462.981.787	701.234.591	**52.966.127.133**
307	Kab. Murung Raya	121.741.543.643	2.238.600	22.925.000	106.139.219.270	-	14.875.926.182	701.234.591	**121.741.543.643**
308	Kab. Pulang Pisau	30.291.079.086	2.238.600	22.925.000	23.841.863.565	-	5.410.693.258	701.234.591	**29.978.955.014**
309	Kab. Gunung Mas	40.220.167.102	2.238.600	22.925.000	24.656.008.447	-	14.837.760.464	701.234.591	**40.220.167.102**
310	Kab. Lamandau	41.513.381.213	2.238.600	22.925.000	29.840.896.134	-	10.946.086.888	701.234.591	**41.513.381.213**
311	Kab. Sukamara	29.356.326.275	2.238.600	22.925.000	23.866.055.569	-	4.763.872.515	701.234.591	**29.356.326.275**
312	Kab. Katingan	51.656.622.576	2.238.600	22.925.000	31.647.499.692	-	19.282.724.693	701.234.591	**51.656.622.576**
313	Kab. Seruyan	54.217.880.872	2.238.600	22.925.000	25.473.778.899	-	28.017.703.782	701.234.591	**54.217.880.872**
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**762.758.179.083**	**1.452.221.703**	-	**755.187.580.493**	-	**6.118.376.887**	-	**762.758.179.083**
315	Kab. Banjar	197.092.896.470	242.037.107	-	195.836.718.075	-	240.448.290	701.234.591	**197.020.438.063**
316	Kab. Barito Kuala	126.171.287.472	242.037.107	-	125.098.779.065	-	129.236.709	701.234.591	**126.171.287.472**
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	202.212.473.634	242.037.107	-	201.139.682.599	-	129.519.337	701.234.591	**202.212.473.634**
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	126.252.595.802	242.037.107	-	125.180.136.566	-	128.376.021	701.234.591	**126.251.784.285**
319	Kab. Hulu Sungai Utara	126.187.948.382	242.037.107	-	125.115.489.146	-	30.549.600	701.234.591	**126.089.310.444**
320	Kab. Kotabaru	175.075.899.507	242.037.107	-	173.948.700.915	-	30.549.600	701.234.591	**174.922.522.213**
321	Kab. Tabalong	276.826.921.179	2.581.262.337	-	272.676.502.334	-	140.825.100	701.234.591	**276.099.824.362**
322	Kab. Tanah Laut	363.706.003.309	242.037.107	-	362.505.766.231	-	256.965.380	701.234.591	**363.706.003.309**
323	Kab. Tapin	262.830.476.936	242.037.107	-	261.758.017.700	-	129.187.538	701.234.591	**262.830.476.936**
324	Kota Banjarbaru	126.294.708.315	242.037.107	-	125.221.190.865	-	130.245.752	701.234.591	**126.294.708.315**
325	Kota Banjarmasin	126.203.073.402	242.037.107	-	125.098.779.065	-	161.022.639	701.234.591	**126.203.073.402**
326	Kab. Balangan	493.743.642.997	565.217.546	-	492.256.619.729	-	134.883.939	701.234.591	**493.657.955.805**
327	Kab. Tanah Bumbu	441.408.747.791	242.037.107	-	439.815.111.613	-	246.533.100	701.234.591	**441.004.916.411**
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**2.391.882.976.117**	**258.780.194.198**	**508.222.115.251**	**1.376.416.405.134**	-	**248.464.261.534**	-	**2.391.882.976.117**
329	Kab. Berau	848.392.350.462	54.539.323.240	106.094.112.160	658.026.589.288	-	29.031.091.183	701.234.591	**848.392.350.462**
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.678.266.613.567	263.589.232.742	450.765.831.826	948.716.678.779	-	14.493.635.629	701.234.591	**1.678.266.613.567**
331	Kab. Kutai Barat	720.953.272.569	54.539.323.240	106.094.112.160	544.597.393.309	-	15.021.209.269	701.234.591	**720.953.272.569**
332	Kab. Kutai Timur	1.369.165.385.570	55.072.616.323	106.094.112.160	1.195.877.049.023	-	11.420.373.473	701.234.591	**1.369.165.385.570**
333	Kab. Mahakam Ulu	478.569.984.865	54.539.323.240	106.094.112.160	302.686.322.225	-	14.548.992.649	701.234.591	**478.569.984.865**
334	Kab. Paser	761.308.544.258	54.539.323.240	106.094.112.160	591.697.764.441	-	8.276.109.826	701.234.591	**761.308.544.258**
335	Kota Balikpapan	469.470.265.663	54.539.323.240	106.094.112.160	302.309.377.228	-	5.826.218.444	701.234.591	**469.470.265.663**
336	Kota Bontang	476.458.032.797	59.739.616.604	107.682.982.457	302.499.211.632	-	5.834.987.513	701.234.591	**476.458.032.797**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	Kota Samarinda	523.611.520.869	56.323.588.470	106.981.181.948	353.777.651.509	-	5.827.852.194	701.234.591	**523.611.508.712**
338	Kab. Penajam Paser Utara	496.807.515.659	62.682.519.953	117.333.554.458	307.139.372.579	-	8.950.834.078	701.234.591	**496.807.515.659**
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**223.771.675.390**	**9.181.078.099**	**841.168.236**	**117.306.132.439**	-	**96.443.296.616**	-	**223.771.675.390**
340	Kab. Bulungan	117.342.320.158	7.972.373.801	1.113.217.047	89.853.318.762	-	17.702.175.957	701.234.591	**117.342.320.158**
341	Kab. Malinau	139.126.380.435	4.590.539.049	420.584.119	126.985.385.085	-	6.428.637.591	701.234.591	**139.126.380.435**
342	Kab. Nunukan	141.469.575.100	6.053.966.494	877.831.500	115.125.264.973	-	18.711.277.542	701.234.591	**141.469.575.100**
343	Kab. Tana Tidung	94.618.094.982	4.592.354.427	420.584.119	77.333.873.404	-	11.570.048.441	701.234.591	**94.618.094.982**
344	Kota Tarakan	77.624.523.590	14.569.719.119	608.914.094	56.018.568.541	-	5.726.087.245	701.234.591	**77.624.523.590**
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**42.604.269.019**	-	-	**38.609.808.653**	**3.308.117.665**	**686.342.701**	-	**42.604.269.019**
346	Kab. Bolaang Mongondow	7.202.882.775	-	-	6.011.200.515	472.588.593	11.833.200	701.234.591	**7.196.856.899**
347	Kab. Minahasa	9.617.113.012	-	-	5.366.856.650	3.537.653.946	11.367.825	701.234.591	**9.617.113.012**
348	Kab. Sangihe	6.831.275.613	-	-	5.646.084.609	472.588.588	11.367.825	701.234.591	**6.831.275.613**
349	Kota Bitung	59.656.199.896	-	-	58.471.008.892	472.588.588	11.367.825	701.234.591	**59.656.199.896**
350	Kota Manado	6.588.934.171	-	-	5.369.953.450	506.378.305	11.367.825	701.234.591	**6.588.934.171**
351	Kab. Kepulauan Talaud	6.720.665.755	-	-	5.535.474.751	472.588.588	11.367.825	701.234.591	**6.720.665.755**
352	Kab. Minahasa Selatan	6.999.645.216	-	-	5.788.879.050	495.933.879	4.454.700	701.234.591	**6.990.502.220**
353	Kab. Minahasa Tenggara	6.832.159.704	-	-	5.639.684.756	478.731.790	7.692.300	701.234.591	**6.827.343.437**
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.552.047.654	-	-	5.366.856.650	472.588.588	11.367.825	701.234.591	**6.552.047.654**
355	Kota Kotamobagu	6.623.916.390	-	-	5.438.725.386	472.588.588	11.367.825	701.234.591	**6.623.916.390**
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10.671.188.844	-	-	9.484.631.585	472.588.588	4.922.400	701.234.591	**10.663.377.164**
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16.806.459.711	-	-	15.524.894.029	472.588.588	107.742.503	701.234.591	**16.806.459.711**
358	Kota Tomohon	9.370.138.123	-	-	5.366.856.650	3.290.679.057	11.367.825	701.234.591	**9.370.138.123**
359	Kab. Minahasa Utara	13.550.443.091	-	-	12.168.041.134	669.799.541	11.367.825	701.234.591	**13.550.443.091**
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.947.769.904	-	-	5.723.246.251	472.588.588	26.459.400	701.234.591	**6.923.528.830**
361	**Provinsi Gorontalo**	**1.738.621.363**	-	-	**532.806.154**	-	**1.205.814.625**	-	**1.738.620.779**
362	Kab. Boalemo	758.559.471	-	-	162.580	-	57.162.300	701.234.591	**758.559.471**
363	Kab. Gorontalo	1.013.833.512	-	-	220.620.645	-	90.647.100	701.234.591	**1.012.502.336**
364	Kota Gorontalo	755.540.670	-	-	162.579	-	54.143.500	701.234.591	**755.540.670**
365	Kab. Pohuwato	1.715.590.579	-	-	874.461.188	-	139.894.800	701.234.591	**1.715.590.579**
366	Kab. Gorontalo Utara	1.134.850.474	-	-	196.310.984	-	132.731.700	701.234.591	**1.030.277.275**
367	Kab. Bone Bolango	1.600.954.473	-	-	844.403.182	-	55.316.700	701.234.591	**1.600.954.473**
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**130.835.477.495**	**9.313.351.600**	**95.519.542.177**	**20.326.758.863**	-	**5.675.824.855**	-	**130.835.477.495**
369	Kab. Banggai	217.006.961.648	18.626.702.500	191.039.083.287	5.312.252.105	-	1.327.689.165	701.234.591	**217.006.961.648**
370	Kab. Banggai Laut	20.990.401.093	1.552.225.500	15.919.923.670	2.699.893.793	-	117.123.539	701.234.591	**20.990.401.093**
371	Kab. Banggai Kepulauan	20.985.806.834	1.552.225.500	15.919.923.670	2.695.684.281	-	35.424.000	701.234.591	**20.904.492.042**
372	Kab. Buol	22.452.606.774	1.552.225.500	15.919.923.670	4.117.157.895	-	71.169.300	701.234.591	**22.361.710.956**
373	Kab. Toli-toli	22.561.680.055	1.552.225.500	15.919.923.670	4.254.281.594	-	134.014.700	701.234.591	**22.561.680.055**
374	Kab. Donggala	21.245.305.610	1.552.225.500	15.919.923.670	2.913.754.302	-	70.406.400	701.234.591	**21.157.544.463**
375	Kab. Morowali	54.251.914.710	1.552.225.500	15.919.923.670	34.957.247.191	-	1.121.283.758	701.234.591	**54.251.914.710**
376	Kab Morowali Utara	26.553.155.780	1.552.225.500	15.919.923.670	7.486.502.607	-	893.269.412	701.234.591	**26.553.155.780**
377	Kab. Poso	22.700.899.727	1.552.225.500	15.919.923.670	3.758.925.888	-	768.590.078	701.234.591	**22.700.899.727**
378	Kota Palu	21.266.237.118	1.552.225.500	15.919.923.670	2.976.058.856	-	35.424.000	701.234.591	**21.184.866.617**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Kab. Parigi Moutong	22.404.438.963	1.552.225.500	15.919.923.670	4.033.154.392	-	189.725.872	701.234.591	**22.396.264.025**
380	Kab. Sigi	21.129.293.771	1.552.225.500	15.919.923.670	2.803.312.486	-	40.640.400	701.234.591	**21.017.336.647**
381	Kab. Tojo Una Una	23.097.135.947	1.552.225.500	15.919.923.670	4.151.471.204	-	772.280.982	701.234.591	**23.097.135.947**
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**44.586.701.611**	**858.951**	**9.922.700.200**	**32.741.849.137**	-	**842.512.877**	-	**43.507.921.165**
383	Kab. Bantaeng	4.343.619.422	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	26.931.071	701.234.591	**4.343.619.422**
384	Kab. Barru	4.381.507.996	74.650	862.843.100	2.785.600.687	-	13.610.562	701.234.591	**4.363.363.590**
385	Kab. Bone	4.899.170.095	74.650	862.843.100	3.287.899.546	-	47.118.208	701.234.591	**4.899.170.095**
386	Kab. Bulukumba	4.077.967.928	74.650	862.843.100	2.487.824.691	-	25.990.896	701.234.591	**4.077.967.928**
387	Kab. Enrekang	4.428.446.951	74.650	862.843.100	2.833.192.110	-	31.102.500	701.234.591	**4.428.446.951**
388	Kab. Gowa	4.552.960.383	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	236.272.032	701.234.591	**4.552.960.383**
389	Kab. Jeneponto	4.342.990.765	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	26.302.414	701.234.591	**4.342.990.765**
390	Kab. Luwu	5.370.717.026	74.650	862.843.100	3.779.627.147	-	20.953.603	701.234.591	**5.364.733.091**
391	Kab. Luwu Utara	4.915.566.810	74.650	862.843.100	3.323.845.907	-	27.568.562	701.234.591	**4.915.566.810**
392	Kab. Maros	4.435.813.555	74.650	862.843.100	2.788.751.210	-	82.910.004	701.234.591	**4.435.813.555**
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.558.641.359	74.650	862.843.100	2.990.404.818	-	4.084.200	701.234.591	**4.558.641.359**
394	Kab. Pinrang	4.346.022.479	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	29.334.128	701.234.591	**4.346.022.479**
395	Kab. Kepulauan Selayar	5.388.498.847	74.650	862.843.100	3.798.355.610	-	25.990.896	701.234.591	**5.388.498.847**
396	Kab. Sidenreng Rappang	4.664.514.966	74.650	862.843.100	3.074.410.710	-	3.589.500	701.234.591	**4.642.152.551**
397	Kab. Sinjai	4.349.076.173	74.650	862.843.100	2.752.536.011	-	32.387.821	701.234.591	**4.349.076.173**
398	Kab. Soppeng	4.362.980.186	74.650	862.843.100	2.755.846.171	-	42.981.674	701.234.591	**4.362.980.186**
399	Kab. Takalar	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	**4.342.679.247**
400	Kab. Tana Toraja	4.407.101.559	74.650	862.843.100	2.808.954.314	-	33.994.904	701.234.591	**4.407.101.559**
401	Kab. Wajo	23.349.400.970	1.717.273	19.845.399.700	2.775.058.510	-	25.990.896	701.234.591	**23.349.400.970**
402	Kota Pare-pare	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	**4.342.679.247**
403	Kab. Toraja Utara	4.419.408.345	74.650	862.843.100	2.828.317.765	-	26.938.239	701.234.591	**4.419.408.345**
404	Kota Makassar	4.473.840.753	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	50.096.529	701.234.591	**4.366.784.880**
405	Kota Palopo	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	**4.342.679.247**
406	Kab. Luwu Timur	70.108.815.185	74.650	862.843.100	68.191.671.484	-	352.991.360	701.234.591	**70.108.815.185**
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**826.153.886**	-	-	**140.906.501**	-	**450.437.227**	-	**591.343.728**
408	Kab. Majene	716.680.512	-	-	-	-	6.844.430	701.234.591	**708.079.021**
409	Kab. Mamuju	867.213.626	-	-	137.652.202	-	4.942.200	701.234.591	**843.828.993**
410	Kab. Mamuju Tengah	738.927.586	-	-	-	-	37.692.995	701.234.591	**738.927.586**
411	Kab. Polewali Mandar	764.809.243	-	-	46.400.200	-	2.667.600	701.234.591	**750.302.391**
412	Kab. Mamasa	2.440.307.998	-	-	137.652.200	-	1.500.045.966	701.234.591	**2.338.932.757**
413	Kab. Pasangkayu	978.121.577	-	-	241.920.000	-	3.202.800	701.234.591	**946.357.391**
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**75.288.076.201**	-	-	**70.403.856.239**	-	**4.884.219.962**	-	**75.288.076.201**
415	Kab. Buton	10.364.193.939	-	-	9.591.050.651	-	8.371.800	701.234.591	**10.300.657.042**
416	Kab. Konawe	12.798.172.625	-	-	10.112.917.275	-	1.984.020.759	701.234.591	**12.798.172.625**
417	Kab Konawe Kepulauan	9.365.725.211	-	-	8.612.457.093	-	52.033.527	701.234.591	**9.365.725.211**
418	Kab. Kolaka	85.045.559.859	-	-	82.969.670.592	-	1.374.654.676	701.234.591	**85.045.559.859**
419	Kab. Kolaka Timur	9.439.305.616	-	-	8.526.421.410	-	13.122.300	701.234.591	**9.240.778.301**
420	Kab. Muna	9.419.452.929	-	-	8.665.017.210	-	7.934.700	701.234.591	**9.374.186.501**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	Kota Kendari	9.351.406.770	-	-	8.592.455.251	-	12.994.471	701.234.591	**9.306.684.313**
422	Kota Bau-bau	9.280.142.678	-	-	8.526.421.411	-	52.486.676	701.234.591	**9.280.142.678**
423	Kab. Konawe Selatan	29.765.273.270	-	-	29.010.056.907	-	11.925.000	701.234.591	**29.723.216.498**
424	Kab. Bombana	23.298.949.194	-	-	22.128.995.862	-	364.793.424	701.234.591	**23.195.023.877**
425	Kab. Konawe Utara	37.343.634.897	-	-	34.508.879.604	-	1.971.052.800	701.234.591	**37.181.166.995**
426	Kab. Buton Utara	9.479.275.798	-	-	8.564.069.667	-	8.826.000	701.234.591	**9.274.130.258**
427	Kab. Wakatobi	9.279.754.219	-	-	8.526.421.410	-	52.098.218	701.234.591	**9.279.754.219**
428	Kab. Kolaka Utara	10.793.330.140	-	-	10.040.044.727	-	10.108.800	701.234.591	**10.751.388.118**
429	Kab. Muna Barat	9.279.675.627	-	-	8.526.421.410	-	7.236.600	701.234.591	**9.234.892.601**
430	Kab. Buton Tengah	9.291.396.500	-	-	8.538.142.283	-	7.236.600	701.234.591	**9.246.613.474**
431	Kab. Buton Selatan	9.372.057.519	-	-	8.603.711.003	-	7.236.600	701.234.591	**9.312.182.194**
432	**Provinsi Bali**	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
434	Kab. Bangli	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
435	Kab. Buleleng	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
436	Kab. Gianyar	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
437	Kab. Jembrana	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
438	Kab. Karangasem	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
439	Kab. Klungkung	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
440	Kab. Tabanan	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
441	Kota Denpasar	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	**701.234.591**
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**114.678.544.196**	-	-	**112.692.161.917**	-	**1.986.382.279**	-	**114.678.544.196**
443	Kab. Bima	19.440.961.289	-	-	18.671.507.754	-	5.202.600	701.234.591	**19.377.944.945**
444	Kab. Dompu	21.606.605.831	-	-	20.867.824.312	-	37.546.928	701.234.591	**21.606.605.831**
445	Kab. Lombok Barat	25.779.327.317	-	-	24.938.714.380	-	40.193.675	800.419.262	**25.779.327.317**
446	Kab. Lombok Tengah	25.330.163.811	-	-	24.477.917.335	-	25.537.181	800.419.262	**25.303.873.778**
447	Kab. Lombok Timur	25.522.053.155	-	-	24.642.144.653	-	42.313.506	800.419.262	**25.484.877.421**
448	Kab. Sumbawa	26.770.143.133	-	-	25.783.887.043	-	185.836.828	800.419.262	**26.770.143.133**
449	Kota Mataram	25.319.832.803	-	-	24.477.917.335	-	35.073.776	800.419.262	**25.313.410.373**
450	Kab. Lombok Utara	25.319.886.838	-	-	24.477.917.335	-	41.550.241	800.419.262	**25.319.886.838**
451	Kota Bima	18.806.308.370	-	-	18.078.907.841	-	26.165.938	701.234.591	**18.806.308.370**
452	Kab. Sumbawa Barat	227.159.944.208	-	-	226.227.611.409	-	62.900.509	800.419.262	**227.090.931.180**
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.871.923.397**	-	-	**1.252.364.964**	**607.469.333**	**12.089.100**	-	**1.871.923.397**
454	Kab. Alor	791.742.188	-	-	3.900.448	83.554.049	3.053.100	701.234.591	**791.742.188**
455	Kab. Belu	1.476.753.654	-	-	716.513.237	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.476.753.654**
456	Kab. Ende	1.132.256.114	-	-	4.202.591	417.311.632	9.507.300	701.234.591	**1.132.256.114**
457	Kab. Flores Timur	786.223.596	-	-	3.810.591	80.027.014	1.151.400	701.234.591	**786.223.596**
458	Kab. Kupang	1.365.204.266	-	-	604.963.849	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.365.204.266**
459	Kab. Lembata	847.184.359	-	-	3.810.591	140.987.777	1.151.400	701.234.591	**847.184.359**
460	Kab. Malaka	764.049.094	-	-	3.808.677	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**764.049.094**
461	Kab. Manggarai	1.532.048.248	-	-	121.971.292	707.690.965	1.151.400	701.234.591	**1.532.048.248**
462	Kab. Ngada	780.836.585	-	-	3.810.591	74.640.003	1.151.400	701.234.591	**780.836.585**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
463	Kab. Sikka	776.819.908	-	-	3.810.591	57.854.426	13.920.300	701.234.591	**776.819.908**
464	Kab. Sumba Barat	1.099.715.008	-	-	339.474.591	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.099.715.008**
465	Kab. Sumba Timur	1.362.605.567	-	-	602.365.150	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.362.605.567**
466	Kab. Timor Tengah Selatan	1.323.446.242	-	-	563.205.825	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.323.446.242**
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.682.081.635	-	-	921.841.218	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.682.081.635**
468	Kota Kupang	764.051.008	-	-	3.810.591	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**764.051.008**
469	Kab. Rote Ndao	764.089.408	-	-	3.848.991	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**764.089.408**
470	Kab. Nagekeo	771.495.651	-	-	11.255.234	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**771.495.651**
471	Kab. Sumba Tengah	1.239.786.409	-	-	479.545.992	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.239.786.409**
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.324.579.508	-	-	564.339.091	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**1.324.579.508**
473	Kab. Manggarai Timur	884.003.406	-	-	123.762.989	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**884.003.406**
474	Kab. Sabu Raijua	877.664.772	-	-	117.424.355	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**877.664.772**
475	Kab. Manggarai Barat	840.594.624	-	-	80.354.207	57.854.426	1.151.400	701.234.591	**840.594.624**
476	**Provinsi Maluku**	**38.549.994.417**	**118.201.794**	-	**1.664.980.166**	-	**36.766.812.457**	-	**38.549.994.417**
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.673.478.262	23.640.359	-	270.467.944	-	1.017.428.700	701.234.591	**2.012.771.594**
478	Kab. Maluku Tengah	4.526.220.158	23.640.359	-	270.467.944	-	3.530.877.264	701.234.591	**4.526.220.158**
479	Kab. Maluku Tenggara	1.567.619.930	23.640.359	-	270.467.944	-	572.277.036	701.234.591	**1.567.619.930**
480	Kab. Buru	4.193.008.617	23.640.359	-	270.467.944	-	1.050.983.400	701.234.591	**2.046.326.294**
481	Kota Ambon	1.564.541.790	23.640.359	-	270.467.944	-	568.696.929	701.234.591	**1.564.039.823**
482	Kab. Seram Bagian Barat	2.901.981.445	23.640.359	-	473.813.744	-	1.703.292.751	701.234.591	**2.901.981.445**
483	Kab. Seram Bagian Timur	2.151.359.772	236.403.588	-	270.467.944	-	294.647.700	701.234.591	**1.502.753.823**
484	Kab. Maluku Barat Daya	5.252.393.027	23.640.359	-	3.955.241.038	-	572.277.039	701.234.591	**5.252.393.027**
485	Kab. Buru Selatan	6.427.818.448	23.640.359	-	328.322.944	-	5.374.620.554	701.234.591	**6.427.818.448**
486	Kab. Kepulauan Aru	1.594.241.871	23.640.359	-	270.467.944	-	295.988.700	701.234.591	**1.291.331.594**
487	Kota Tual	1.567.619.933	23.640.359	-	270.467.944	-	572.277.039	701.234.591	**1.567.619.933**
488	**Provinsi Maluku Utara**	**81.821.475.756**	-	-	**60.722.510.254**	**59.508.301**	**21.039.457.201**	-	**81.821.475.756**
489	Kab. Halmahera Tengah	41.024.345.425	-	-	39.617.261.840	13.223.994	692.625.000	701.234.591	**41.024.345.425**
490	Kab. Halmahera Barat	13.129.254.493	-	-	12.155.830.508	13.223.994	258.965.400	701.234.591	**13.129.254.493**
491	Kota Ternate	12.580.528.509	-	-	11.608.765.624	13.223.994	257.304.300	701.234.591	**12.580.528.509**
492	Kab. Halmahera Timur	36.205.099.141	-	-	28.484.878.075	13.223.994	7.005.762.481	701.234.591	**36.205.099.141**
493	Kota Tidore Kepulauan	13.309.661.287	-	-	12.337.898.402	13.223.994	257.304.300	701.234.591	**13.309.661.287**
494	Kab. Kepulauan Sula	29.730.608.006	-	-	28.234.723.538	13.223.994	503.158.800	701.234.591	**29.452.340.923**
495	Kab. Pulau Morotai	12.920.942.521	-	-	11.757.179.636	13.223.994	449.304.300	701.234.591	**12.920.942.521**
496	Kab. Pulau Taliabu	17.695.007.990	-	-	15.369.913.177	13.223.994	1.250.904.300	701.234.591	**17.335.276.062**
497	Kab. Halmahera Selatan	42.695.817.981	-	-	40.055.686.416	119.016.274	1.819.880.700	701.234.591	**42.695.817.981**
498	Kab. Halmahera Utara	49.692.967.892	-	-	48.713.576.907	13.223.994	264.932.400	701.234.591	**49.692.967.892**
499	**Provinsi Papua**	**670.366.816.672**	-	-	**608.904.254.879**	-	**61.462.561.793**	-	**670.366.816.672**
500	Kab. Yalimo	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
501	Kab. Lanny Jaya	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
502	Kab. Biak Numfor	44.548.403.301	-	-	42.905.611.503	-	142.229.100	701.234.591	**43.749.075.194**
503	Kab. Jayapura	46.403.415.951	-	-	44.606.275.327	-	253.042.800	701.234.591	**45.560.552.718**
504	Kab. Jayawijaya	44.767.776.358	-	-	43.124.984.560	-	889.312.163	701.234.591	**44.715.531.314**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	Kab. Merauke	54.607.528.697	-	-	42.905.611.503	-	11.000.682.603	701.234.591	**54.607.528.697**
506	Kab. Mimika	1.230.408.200.693	-	-	1.215.658.954.826	-	14.048.011.276	701.234.591	**1.230.408.200.693**
507	Kab. Nabire	52.900.866.805	-	-	44.628.807.102	-	7.570.825.112	701.234.591	**52.900.866.805**
508	Kab. Paniai	48.300.796.583	-	-	46.656.460.006	-	943.101.986	701.234.591	**48.300.796.583**
509	Kab. Puncak Jaya	54.570.426.062	-	-	52.925.173.808	-	944.017.663	701.234.591	**54.570.426.062**
510	Kab. Kepulauan Yapen	44.548.403.301	-	-	42.905.611.503	-	888.903.329	701.234.591	**44.495.749.423**
511	Kota Jayapura	44.556.201.737	-	-	42.905.611.503	-	926.462.871	701.234.591	**44.533.308.965**
512	Kab. Sarmi	59.364.181.562	-	-	46.655.511.630	-	1.146.193.800	701.234.591	**48.502.940.021**
513	Kab. Keerom	50.790.203.228	-	-	45.720.032.164	-	4.368.936.473	701.234.591	**50.790.203.228**
514	Kab. Yahukimo	48.175.770.840	-	-	46.370.268.503	-	1.104.267.746	701.234.591	**48.175.770.840**
515	Kab. Pegunungan Bintang	47.326.827.097	-	-	45.682.490.520	-	943.101.986	701.234.591	**47.326.827.097**
516	Kab. Tolikara	45.486.299.580	-	-	43.841.963.003	-	943.101.986	701.234.591	**45.486.299.580**
517	Kab. Boven Digoel	48.065.951.060	-	-	42.905.611.503	-	4.459.104.966	701.234.591	**48.065.951.060**
518	Kab. Mappi	44.728.850.654	-	-	42.905.611.503	-	1.122.004.560	701.234.591	**44.728.850.654**
519	Kab. Asmat	46.848.890.462	-	-	42.905.611.503	-	1.305.116.115	701.234.591	**44.911.962.209**
520	Kab. Waropen	47.109.835.789	-	-	45.465.211.972	-	142.229.100	701.234.591	**46.308.675.663**
521	Kab. Mamberamo Raya	52.369.771.101	-	-	47.902.759.603	-	2.959.989.900	701.234.591	**51.563.984.094**
522	Kab. Mamberamo Tengah	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
523	Kab. Nduga	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
524	Kab. Dogiyai	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
525	Kab. Intan Jaya	47.009.985.008	-	-	45.365.648.431	-	943.101.986	701.234.591	**47.009.985.008**
526	Kab. Puncak	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
527	Kab. Deiyai	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	**44.549.948.080**
528	Kab. Supiori	44.563.780.248	-	-	42.918.070.103	-	944.475.554	701.234.591	**44.563.780.248**
529	**Provinsi Papua Barat**	**824.997.794.065**	**322.132.593.141**	**454.941.360.523**	**4.624.293.390**	-	**43.299.547.011**	-	**824.997.794.065**
530	Kab. Sorong	68.190.167.408	19.309.390.493	45.077.707.079	371.755.160	-	858.843.300	701.234.591	**66.318.930.623**
531	Kab. Manokwari	47.411.397.330	2.942.249.834	39.679.466.673	2.483.362.083	-	1.605.084.149	701.234.591	**47.411.397.330**
532	Kab. Manokwari Selatan	45.792.070.642	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	1.066.083.482	701.234.591	**44.621.427.663**
533	Kab. Fak fak	46.799.517.155	2.942.249.834	39.679.466.673	2.268.149.883	-	684.661.200	701.234.591	**46.275.762.181**
534	Kota Sorong	44.732.836.902	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	1.154.290.961	701.234.591	**44.709.635.142**
535	Kab. Pegunungan Arfak	44.732.836.913	2.942.249.834	39.679.466.684	232.393.083	-	813.649.004	701.234.591	**44.368.993.196**
536	Kab. Sorong Selatan	49.929.400.777	2.942.249.834	39.679.466.673	354.598.524	-	6.251.851.155	701.234.591	**49.929.400.777**
537	Kab. Raja Ampat	49.729.160.518	3.268.224.914	39.679.466.673	4.864.402.157	-	466.512.600	701.234.591	**48.979.840.935**
538	Kab. Teluk Bintuni	499.332.019.784	19.635.229.741	470.755.358.869	4.766.251.783	-	3.473.944.800	701.234.591	**499.332.019.784**
539	Kab. Teluk Wondama	50.118.460.388	2.942.249.834	39.679.466.673	681.195.447	-	6.114.313.843	701.234.591	**50.118.460.388**
540	Kab. Tambrauw	44.734.645.203	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	626.844.900	701.234.591	**44.182.189.081**
541	Kab. Maybrat	45.941.419.547	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.084	-	850.935.900	701.234.591	**44.406.280.082**
542	Kab. Kaimana	51.780.686.948	2.942.249.834	39.679.466.673	2.059.784.383	-	6.397.951.467	701.234.591	**51.780.686.948**
JUMLAH		**45.135.219.307.215**	**13.265.216.482.405**	**9.210.412.221.754**	**19.807.904.298.246**	**832.936.590.401**	**1.612.576.032.161**	**357.622.699.454**	**45.086.668.324.392**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**5.787.725.000**	**5.787.725.000**
2	Kab. Aceh Barat	263.078.000	263.078.000
3	Kab. Aceh Besar	908.754.000	908.754.000
4	Kab. Aceh Selatan	263.078.000	197.308.500
5	Kab. Aceh Singkil	263.078.000	-
6	Kab. Aceh Tengah	517.162.000	517.162.000
7	Kab. Aceh Tenggara	263.078.000	-
8	Kab. Aceh Timur	339.072.000	339.072.000
9	Kab. Aceh Utara	375.814.000	281.860.500
10	Kab. Bireuen	275.732.000	68.933.000
11	Kab. Pidie	555.386.000	555.386.000
12	Kab. Simeulue	263.078.000	-
13	Kota Banda Aceh	263.078.000	197.308.500
14	Kota Sabang	263.078.000	197.308.500
15	Kota Langsa	263.078.000	263.078.000
16	Kota Lhokseumawe	263.078.000	197.308.500
17	Kab. Nagan Raya	263.078.000	131.539.000
18	Kab. Aceh Jaya	263.078.000	263.078.000
19	Kab. Pidie Jaya	529.055.000	529.055.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	263.078.000	131.539.000
21	Kab. Gayo Lues	4.483.236.000	4.483.236.000
22	Kab. Aceh Tamiang	263.078.000	263.078.000
23	Kab. Bener Meriah	1.837.389.000	1.837.389.000
24	Kota Subulussalam	263.078.000	263.078.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**6.445.996.000**	**6.445.996.000**
26	Kab. Asahan	268.583.000	268.583.000
27	Kab. Dairi	1.269.294.000	1.269.294.000
28	Kab. Deli Serdang	2.442.249.000	2.442.249.000
29	Kab. Karo	397.750.000	397.750.000
30	Kab. Labuhan Batu	268.583.000	67.145.750
31	Kab. Langkat	268.583.000	268.583.000
32	Kab. Mandailing Natal	354.590.000	354.590.000
33	Kab. Nias	268.583.000	201.437.250
34	Kab. Simalungun	268.583.000	268.583.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	268.583.000	201.437.250
36	Kab. Tapanuli Tengah	268.583.000	268.583.000
37	Kab. Tapanuli Utara	313.180.000	313.180.000
38	Kab. Toba Samosir	268.583.000	201.437.250
39	Kota Binjai	268.583.000	134.291.500
40	Kota Medan	441.632.000	331.224.000
41	Kota Pematang Siantar	2.213.968.000	2.213.968.000
42	Kota Sibolga	268.583.000	268.583.000
43	Kota Tanjung Balai	268.583.000	268.583.000
44	Kab. Batu Bara	268.583.000	268.583.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	268.583.000	201.437.250
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	268.583.000	201.437.250
47	Kab. Padang Lawas Utara	268.583.000	201.437.250

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
48	Kab. Padang Lawas	268.583.000	268.583.000
49	Kab. Nias Utara	268.583.000	201.437.250
50	Kab. Nias Barat	268.583.000	67.145.750
51	Kota Tebing Tinggi	268.583.000	268.583.000
52	Kota Padang Sidempuan	268.583.000	201.437.250
53	Kab. Pakpak Bharat	352.820.000	352.820.000
54	Kab. Nias Selatan	268.583.000	268.583.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	809.182.000	606.886.500
56	Kab. Serdang Bedagai	268.583.000	268.583.000
57	Kab. Samosir	268.583.000	201.437.250
58	Kota Gunungsitoli	268.583.000	201.437.250
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**4.091.621.000**	**4.091.621.000**
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.683.510.000	2.683.510.000
61	Kab. Agam	859.217.000	859.217.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	227.313.000	227.313.000
63	Kab. Padang Pariaman	227.313.000	227.313.000
64	Kab. Pasaman	557.848.000	557.848.000
65	Kab. Pesisir Selatan	227.313.000	170.484.750
66	Kab. Sijunjung	227.313.000	227.313.000
67	Kab. Solok	556.913.000	556.913.000
68	Kab. Tanah Datar	995.806.000	995.806.000
69	Kota Bukit Tinggi	227.313.000	227.313.000
70	Kota Padang Panjang	227.313.000	113.656.500
71	Kota Padang	227.313.000	227.313.000
72	Kota Payakumbuh	605.521.000	605.521.000
73	Kota Sawahlunto	560.559.000	560.559.000
74	Kota Solok	227.313.000	227.313.000
75	Kota Pariaman	227.313.000	227.313.000
76	Kab. Pasaman Barat	227.313.000	56.828.250
77	Kab. Dharmasraya	227.313.000	227.313.000
78	Kab. Solok Selatan	227.313.000	113.656.500
79	**Provinsi Riau**	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.713.037.000**	**1.713.037.000**
93	Kab. Bintan	285.507.000	142.753.500
94	Kab. Natuna	285.507.000	285.507.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
95	Kab. Karimun	285.507.000	285.507.000
96	Kota Batam	2.284.053.000	2.284.053.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	285.507.000	285.507.000
98	Kota Tanjung Pinang	285.507.000	285.507.000
99	Kab. Lingga	285.507.000	285.507.000
100	**Provinsi Jambi**	**2.513.649.000**	**1.885.236.750**
101	Kab. Batanghari	251.365.000	251.365.000
102	Kab. Bungo	251.365.000	125.682.500
103	Kab. Kerinci	2.768.339.000	2.768.339.000
104	Kab. Merangin	488.389.000	244.194.500
105	Kab. Muaro Jambi	251.365.000	188.523.750
106	Kab. Sarolangun	251.365.000	188.523.750
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	251.365.000	251.365.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	251.365.000	62.841.250
109	Kab. Tebo	251.365.000	251.365.000
110	Kota Jambi	251.365.000	251.365.000
111	Kota Sungai Penuh	597.534.000	448.150.500
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**2.593.005.000**	**1.944.753.750**
113	Kab. Lahat	162.063.000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	162.063.000	-
115	Kab. Musi Rawas	162.063.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	162.063.000	-
117	Kab. Muara Enim	162.063.000	-
118	Kab. Ogan Komering Ilir	162.063.000	81.031.500
119	Kab. Ogan Komering Ulu	162.063.000	-
120	Kota Palembang	162.063.000	40.515.750
121	Kota Pagar Alam	162.063.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	162.063.000	-
123	Kota Prabumulih	162.063.000	-
124	Kab. Empat Lawang	162.063.000	162.063.000
125	Kab. Banyuasin	162.063.000	81.031.500
126	Kab. Ogan Ilir	162.063.000	121.547.250
127	Kab. OKU Timur	357.822.000	89.455.500
128	Kab. OKU Selatan	3.261.582.000	3.261.582.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	162.063.000	-
130	**Provinsi Bangka Belitung**	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	**Provinsi Bengkulu**	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	**Provinsi Lampung**	**3.623.000.000**	**3.623.000.000**
150	Kab. Lampung Barat	3.216.913.000	3.216.913.000
151	Kab. Lampung Selatan	306.685.000	306.685.000
152	Kab. Lampung Tengah	354.045.000	354.045.000
153	Kab. Lampung Utara	332.066.000	332.066.000
154	Kab. Lampung Timur	917.492.000	917.492.000
155	Kab. Tanggamus	541.023.000	541.023.000
156	Kab. Tulang Bawang	241.533.000	241.533.000
157	Kab. Way Kanan	267.751.000	267.751.000
158	Kab. Pesawaran	467.420.000	467.420.000
159	Kab. Pesisir Barat	241.533.000	241.533.000
160	Kab. Pringsewu	574.018.000	574.018.000
161	Kab. Mesuji	241.533.000	241.533.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	249.986.000	187.489.500
163	Kota Bandar Lampung	241.533.000	241.533.000
164	Kota Metro	260.137.000	260.137.000
165	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-
166	**Provinsi Jawa Barat**	**106.557.067.000**	**106.557.067.000**
167	Kab. Bandung	11.229.654.000	11.229.654.000
168	Kab. Bekasi	4.288.251.000	1.072.062.750
169	Kab. Bogor	4.311.913.000	4.311.913.000
170	Kab. Ciamis	4.467.324.000	4.467.324.000
171	Kab. Cianjur	4.621.396.000	4.621.396.000
172	Kab. Cirebon	4.957.147.000	4.957.147.000
173	Kab. Garut	26.420.902.000	26.420.902.000
174	Kab. Indramayu	4.336.185.000	4.336.185.000
175	Kab. Karawang	63.924.503.000	63.924.503.000
176	Kab. Kuningan	5.804.529.000	5.804.529.000
177	Kab. Majalengka	10.095.738.000	7.571.803.500
178	Kab. Pangandaran	4.527.935.000	4.527.935.000
179	Kab. Purwakarta	4.464.934.000	3.348.700.500
180	Kab. Subang	4.413.679.000	4.413.679.000
181	Kab. Sukabumi	4.333.418.000	4.333.418.000
182	Kab. Sumedang	38.582.754.000	38.582.754.000
183	Kab. Tasikmalaya	4.540.377.000	3.405.282.750
184	Kab. Bandung Barat	4.925.857.000	4.925.857.000
185	Kota Bandung	4.233.733.000	3.175.299.750
186	Kota Bekasi	4.233.512.000	3.175.134.000
187	Kota Bogor	4.270.252.000	4.270.252.000
188	Kota Cirebon	4.275.665.000	3.206.748.750

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
189	Kota Depok	4.235.871.000	-
190	Kota Sukabumi	4.285.081.000	3.213.810.750
191	Kota Cimahi	4.255.489.000	3.191.616.750
192	Kota Tasikmalaya	4.296.762.000	3.222.571.500
193	Kota Banjar	4.300.295.000	4.300.295.000
194	**Provinsi Banten**	-	-
195	Kab. Lebak	-	-
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**203.078.428.000**	**203.078.428.000**
204	Kab. Banjarnegara	6.410.840.000	6.410.840.000
205	Kab. Banyumas	5.980.898.000	5.980.898.000
206	Kab. Batang	6.170.847.000	6.170.847.000
207	Kab. Blora	8.830.957.000	8.830.957.000
208	Kab. Boyolali	17.631.437.000	17.631.437.000
209	Kab. Brebes	6.321.642.000	6.321.642.000
210	Kab. Cilacap	6.126.478.000	6.126.478.000
211	Kab. Demak	12.474.350.000	12.474.350.000
212	Kab. Grobogan	9.441.765.000	9.441.765.000
213	Kab. Jepara	6.325.997.000	6.325.997.000
214	Kab. Karanganyar	13.930.058.000	13.930.058.000
215	Kab. Kebumen	7.406.434.000	7.406.434.000
216	Kab. Kendal	17.958.292.000	17.958.292.000
217	Kab. Klaten	14.944.437.000	14.944.437.000
218	Kab. Kudus	147.894.137.000	147.894.137.000
219	Kab. Magelang	15.251.693.000	15.251.693.000
220	Kab. Pati	6.359.218.000	6.359.218.000
221	Kab. Pekalongan	6.035.205.000	6.035.205.000
222	Kab. Pemalang	6.984.403.000	6.984.403.000
223	Kab. Purbalingga	6.541.387.000	6.541.387.000
224	Kab. Purworejo	7.141.300.000	7.141.300.000
225	Kab. Rembang	18.612.460.000	18.612.460.000
226	Kab. Semarang	8.702.409.000	8.702.409.000
227	Kab. Sragen	6.906.202.000	6.906.202.000
228	Kab. Sukoharjo	7.018.220.000	7.018.220.000
229	Kab. Tegal	6.608.140.000	6.608.140.000
230	Kab. Temanggung	30.735.722.000	30.735.722.000
231	Kab. Wonogiri	6.928.844.000	6.928.844.000
232	Kab. Wonosobo	12.940.062.000	12.940.062.000
233	Kota Magelang	6.064.653.000	6.064.653.000
234	Kota Pekalongan	6.962.880.000	6.962.880.000
235	Kota Salatiga	5.973.923.000	5.973.923.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
236	Kota Semarang	7.680.546.000	7.680.546.000
237	Kota Surakarta	6.580.938.000	6.580.938.000
238	Kota Tegal	5.972.895.000	5.972.895.000
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**4.903.054.000**	**4.903.054.000**
240	Kab. Bantul	5.021.795.000	5.021.795.000
241	Kab. Gunung Kidul	1.584.686.000	1.584.686.000
242	Kab. Kulon Progo	1.225.764.000	1.225.764.000
243	Kab. Sleman	2.370.891.000	2.370.891.000
244	Kota Yogyakarta	1.237.323.000	1.237.323.000
245	**Provinsi Jawa Timur**	**453.628.963.000**	**453.628.963.000**
246	Kab. Bangkalan	13.189.491.000	13.189.491.000
247	Kab. Banyuwangi	15.338.964.000	15.338.964.000
248	Kab. Blitar	15.787.197.000	15.787.197.000
249	Kab. Bojonegoro	34.817.896.000	34.817.896.000
250	Kab. Bondowoso	25.557.195.000	25.557.195.000
251	Kab. Gresik	13.258.402.000	13.258.402.000
252	Kab. Jember	55.076.650.000	55.076.650.000
253	Kab. Jombang	31.354.594.000	31.354.594.000
254	Kab. Kediri	34.970.472.000	34.970.472.000
255	Kab. Lamongan	27.454.023.000	27.454.023.000
256	Kab. Lumajang	16.843.019.000	16.843.019.000
257	Kab. Madiun	13.929.340.000	13.929.340.000
258	Kab. Magetan	13.990.430.000	13.990.430.000
259	Kab. Malang	73.641.430.000	73.641.430.000
260	Kab. Mojokerto	13.934.023.000	13.934.023.000
261	Kab. Nganjuk	15.563.577.000	15.563.577.000
262	Kab. Ngawi	19.044.881.000	19.044.881.000
263	Kab. Pacitan	13.428.481.000	13.428.481.000
264	Kab. Pamekasan	45.183.528.000	45.183.528.000
265	Kab. Pasuruan	173.544.009.000	173.544.009.000
266	Kab. Ponorogo	14.641.525.000	14.641.525.000
267	Kab. Probolinggo	50.841.284.000	50.841.284.000
268	Kab. Sampang	17.819.022.000	17.819.022.000
269	Kab. Sidoarjo	13.656.908.000	13.656.908.000
270	Kab. Situbondo	27.456.765.000	27.456.765.000
271	Kab. Sumenep	33.255.724.000	33.255.724.000
272	Kab. Trenggalek	13.077.240.000	13.077.240.000
273	Kab. Tuban	19.657.858.000	19.657.858.000
274	Kab. Tulungagung	17.731.144.000	17.731.144.000
275	Kota Blitar	13.681.855.000	13.681.855.000
276	Kota Kediri	58.059.072.000	58.059.072.000
277	Kota Madiun	13.119.146.000	13.119.146.000
278	Kota Malang	25.675.809.000	25.675.809.000
279	Kota Mojokerto	13.538.254.000	13.538.254.000
280	Kota Pasuruan	13.054.050.000	13.054.050.000
281	Kota Probolinggo	13.115.695.000	13.115.695.000
282	Kota Surabaya	21.105.780.000	21.105.780.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
283	Kota Batu	13.072.850.000	13.072.850.000
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	2.221.555.000	**1.110.777.500**
285	Kab. Bengkayang	170.889.000	**85.444.500**
286	Kab. Landak	170.889.000	**85.444.500**
287	Kab. Kapuas Hulu	170.889.000	**85.444.500**
288	Kab. Ketapang	2.962.075.000	**1.481.037.500**
289	Kab. Pontianak	170.889.000	**85.444.500**
290	Kab. Sambas	170.889.000	**85.444.500**
291	Kab. Sanggau	170.889.000	**85.444.500**
292	Kab. Sintang	170.889.000	**85.444.500**
293	Kota Pontianak	170.889.000	**85.444.500**
294	Kota Singkawang	170.889.000	**85.444.500**
295	Kab. Kayong Utara	**170.889.000**	**85.444.500**
296	Kab. Kubu Raya	170.889.000	85.444.500
297	Kab. Sekadau	170.889.000	85.444.500
298	Kab. Melawi	170.889.000	85.444.500
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**2.013.243.000**	**2.013.243.000**
300	Kab. Barito Selatan	183.023.000	183.023.000
301	Kab. Barito Utara	183.023.000	-
302	Kab. Kapuas	183.023.000	91.511.500
303	Kab. Kotawaringin Barat	736.813.000	736.813.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	188.926.000	188.926.000
305	Kota Palangkaraya	183.023.000	183.023.000
306	Kab. Barito Timur	183.023.000	-
307	Kab. Murung Raya	183.023.000	183.023.000
308	Kab. Pulang Pisau	1.758.590.000	879.295.000
309	Kab. Gunung Mas	183.023.000	183.023.000
310	Kab. Lamandau	183.023.000	-
311	Kab. Sukamara	183.023.000	183.023.000
312	Kab. Katingan	183.023.000	45.755.750
313	Kab. Seruyan	183.023.000	-
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	-
329	Kab. Berau	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Pasir	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**-**	**-**
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**-**	**-**
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	**Provinsi Gorontalo**	**-**	**-**
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**2.195.087.000**	**2.195.087.000**
369	Kab. Banggai	803.621.000	602.715.750
370	Kab. Banggai Laut	219.509.000	219.509.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	219.509.000	219.509.000
372	Kab. Buol	219.509.000	219.509.000
373	Kab. Toli-Toli	219.509.000	164.631.750
374	Kab. Donggala	219.509.000	219.509.000
375	Kab. Morowali	219.509.000	164.631.750
376	Kab. Morowali Utara	219.509.000	219.509.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
377	Kab. Poso	219.509.000	164.631.750
378	Kota Palu	1.756.070.000	1.756.070.000
379	Kab. Parigi Moutong	367.092.000	367.092.000
380	Kab. Sigi	219.509.000	219.509.000
381	Kab. Tojo Una Una	219.509.000	164.631.750
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**5.056.141.000**	**5.056.141.000**
383	Kab. Bantaeng	303.897.000	303.897.000
384	Kab. Barru	239.874.000	239.874.000
385	Kab. Bone	819.711.000	819.711.000
386	Kab. Bulukumba	428.601.000	428.601.000
387	Kab. Enrekang	219.833.000	219.833.000
388	Kab. Gowa	219.833.000	219.833.000
389	Kab. Jeneponto	234.864.000	234.864.000
390	Kab. Luwu	241.158.000	241.158.000
391	Kab. Luwu Utara	219.833.000	219.833.000
392	Kab. Maros	219.833.000	219.833.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	219.833.000	219.833.000
394	Kab. Pinrang	219.833.000	219.833.000
395	Kab. Selayar	219.833.000	219.833.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	219.833.000	219.833.000
397	Kab. Sinjai	1.772.176.000	1.772.176.000
398	Kab. Soppeng	4.220.593.000	4.220.593.000
399	Kab. Takalar	219.833.000	219.833.000
400	Kab. Tana Toraja	219.833.000	219.833.000
401	Kab. Wajo	239.318.000	239.318.000
402	Kota Pare-pare	219.833.000	219.833.000
403	Kab. Toraja Utara	219.833.000	219.833.000
404	Kota Makassar	219.833.000	219.833.000
405	Kota Palopo	219.833.000	219.833.000
406	Kab. Luwu Timur	219.833.000	219.833.000
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	**Provinsi Bali**	**3.548.633.000**	**3.548.633.000**
433	Kab. Badung	443.579.000	332.684.250
434	Kab. Bangli	503.459.000	503.459.000
435	Kab. Buleleng	3.366.514.000	3.366.514.000
436	Kab. Gianyar	1.536.554.000	1.536.554.000
437	Kab. Jembrana	499.529.000	499.529.000
438	Kab. Karangasem	599.771.000	599.771.000
439	Kab. Klungkung	443.579.000	443.579.000
440	Kab. Tabanan	443.579.000	443.579.000
441	Kota Denpasar	443.579.000	443.579.000
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**74.734.327.148**	**74.734.327.148**
443	Kab. Bima	8.331.598.000	8.331.598.000
444	Kab. Dompu	5.343.594.000	5.343.594.000
445	Kab. Lombok Barat	13.327.700.729	13.327.700.729
446	Kab. Lombok Tengah	41.641.222.888	41.641.222.888
447	Kab. Lombok Timur	53.417.315.590	53.417.315.590
448	Kab. Sumbawa	8.266.351.032	8.266.351.032
449	Kota Mataram	31.229.352.604	31.229.352.604
450	Kab. Lombok Utara	8.453.757.530	8.453.757.530
451	Kota Bima	1.761.805.000	1.761.805.000
452	Kab. Sumbawa Barat	2.593.671.474	2.593.671.474
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**4.741.989.000**	**3.556.491.750**
454	Kab. Alor	545.116.000	-
455	Kab. Belu	286.438.000	-
456	Kab. Ende	225.809.000	-
457	Kab. Flores Timur	1.301.402.000	325.350.500
458	Kab. Kupang	309.662.000	154.831.000
459	Kab. Lembata	466.613.000	-
460	Kab. Malaka	225.809.000	-
461	Kab. Manggarai	1.809.766.000	-
462	Kab. Ngada	236.512.000	59.128.000
463	Kab. Sikka	903.646.000	-
464	Kab. Sumba Barat	236.512.000	236.512.000
465	Kab. Sumba Timur	375.643.000	93.910.750
466	Kab. Timor Tengah Selatan	259.681.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	225.809.000	-
468	Kota Kupang	225.809.000	-
469	Kab. Rote Ndao	225.809.000	-
470	Kab. Nagekeo	743.110.000	185.777.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
471	Kab. Sumba Tengah	225.809.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.076.651.000	807.488.250
473	Kab. Manggarai Timur	479.082.000	479.082.000
474	Kab. Sabu Raijua	247.214.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	432.740.000	108.185.000
476	**Provinsi Maluku**	-	-
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	**Provinsi Maluku Utara**	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	**Provinsi Papua**	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	**Provinsi Papua Barat**	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		**2.964.808.087.998**	**2.922.191.165.249**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**2.060.263.235.000**	**2.060.263.235.000**	**1.576.401.640.000**	**1.471.613.112.593**
2	Kab. Aceh Barat	570.763.544.000	570.763.544.000	189.325.546.000	180.969.637.761
3	Kab. Aceh Besar	713.344.629.000	713.344.629.000	241.500.986.000	198.391.154.414
4	Kab. Aceh Selatan	641.605.359.000	641.605.359.000	324.209.737.000	315.285.379.749
5	Kab. Aceh Singkil	441.266.415.000	441.266.415.000	138.467.819.000	119.272.244.615
6	Kab. Aceh Tengah	603.737.495.000	603.737.495.000	221.449.494.000	210.625.435.066
7	Kab. Aceh Tenggara	586.091.423.000	586.091.423.000	199.342.084.000	151.157.752.221
8	Kab. Aceh Timur	786.034.858.000	786.034.858.000	199.139.509.000	192.612.259.187
9	Kab. Aceh Utara	847.191.268.000	847.191.268.000	372.779.369.000	364.373.142.302
10	Kab. Bireuen	802.618.535.000	802.618.535.000	273.347.486.000	265.190.124.110
11	Kab. Pidie	794.948.892.000	794.948.892.000	309.703.441.000	293.595.826.388
12	Kab. Simeulue	444.554.705.000	444.554.705.000	140.952.070.000	132.388.792.225
13	Kota Banda Aceh	591.711.772.000	591.711.772.000	129.961.032.000	116.595.706.007
14	Kota Sabang	350.863.359.000	350.863.359.000	134.168.011.000	127.162.931.061
15	Kota Langsa	444.012.586.000	444.012.586.000	134.356.202.000	131.946.202.463
16	Kota Lhokseumawe	459.628.037.000	459.628.037.000	102.792.279.000	93.948.851.900
17	Kab. Nagan Raya	507.106.599.000	507.106.599.000	149.202.595.000	146.257.947.462
18	Kab. Aceh Jaya	421.315.269.000	421.315.269.000	153.015.629.000	150.114.010.462
19	Kab. Pidie Jaya	420.639.477.000	420.639.477.000	184.146.496.000	177.599.868.091
20	Kab. Aceh Barat Daya	451.309.794.000	451.309.794.000	201.210.730.000	192.663.131.445
21	Kab. Gayo Lues	462.943.021.000	462.943.021.000	170.506.857.000	166.695.480.399
22	Kab. Aceh Tamiang	532.641.693.000	532.641.693.000	172.342.579.000	163.435.948.924
23	Kab. Bener Meriah	448.988.545.000	448.988.545.000	121.935.612.000	117.742.883.739
24	Kota Subulussalam	345.335.126.000	345.335.126.000	79.444.673.000	73.710.148.823
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**2.629.224.545.000**	**2.629.224.545.000**	**4.082.135.830.000**	**3.923.216.182.249**
26	Kab. Asahan	877.794.641.000	877.794.641.000	247.058.157.000	231.933.908.489
27	Kab. Dairi	612.745.792.000	612.745.792.000	169.332.568.000	154.914.774.714
28	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	466.075.998.000	455.242.047.339
29	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	211.431.929.000	184.960.051.262
30	Kab. LabuhanBatu	684.408.474.000	684.408.474.000	209.425.055.000	199.352.228.211
31	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	414.927.706.000	392.914.470.349
32	Kab. Mandailing Natal	783.200.132.000	783.200.132.000	253.694.038.000	248.799.513.596
33	Kab. Nias	430.091.477.000	430.091.477.000	186.691.760.000	170.260.660.801
34	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.209.194.704.000	396.528.444.000	364.957.717.597
35	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	644.304.467.000	166.840.616.000	163.894.825.061
36	Kab. Tapanuli Tengah	627.027.553.000	627.027.553.000	257.399.477.000	241.018.512.560
37	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	203.769.695.000	191.102.620.448
38	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	168.007.248.000	158.583.010.253
39	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	137.072.598.000	129.936.136.339
40	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	388.300.386.000	356.788.804.200
41	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	196.049.598.000	188.366.544.385
42	Kota Sibolga	405.554.215.000	405.554.215.000	96.453.637.000	90.935.128.378
43	Kota Tanjung Balai	418.666.416.000	418.666.416.000	95.262.968.000	90.844.606.170
44	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	165.400.037.000	151.358.139.644
45	Kab. LabuhanBatu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	245.247.454.000	235.115.494.290
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	160.723.218.000	147.933.110.879
47	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.469.609.000	147.681.324.000	138.216.844.240
48	Kab. Padang Lawas	521.562.942.000	521.562.942.000	160.101.069.000	157.464.009.272
49	Kab. Nias Utara	413.837.391.000	413.837.391.000	146.587.743.000	136.489.812.774
50	Kab. Nias Barat	348.251.352.000	348.251.352.000	214.083.960.000	206.066.316.839
51	Kota Tebing Tinggi	409.399.195.000	409.399.195.000	120.547.171.000	114.868.858.164
52	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.768.033.000	135.687.423.000	124.683.309.074
53	Kab. Pakpak Bharat	339.271.690.000	339.271.690.000	76.630.526.000	71.532.318.937
54	Kab. Nias Selatan	556.410.357.000	556.410.357.000	205.201.189.000	199.651.552.996
55	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	147.110.998.000	142.133.738.492
56	Kab. Serdang Bedagai	763.943.386.000	763.943.386.000	323.742.306.000	310.954.071.433

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
57	Kab. Samosir	453.737.230.000	453.737.230.000	145.102.356.000	139.883.498.974
58	Kota Gunungsitoli	426.758.929.000	426.758.929.000	113.748.744.000	109.906.226.086
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**2.014.646.639.000**	**2.014.646.639.000**	**1.825.208.546.000**	**1.763.791.244.387**
60	Kab. Lima Puluh Kota	747.073.168.000	747.073.168.000	254.372.166.000	236.061.072.373
61	Kab. Agam	813.474.914.000	813.474.914.000	284.359.411.000	262.382.906.117
62	Kab. Kepulauan Mentawai	610.939.918.000	610.939.918.000	170.723.124.000	152.970.429.302
63	Kab. Padang Pariaman	769.827.010.000	769.827.010.000	325.744.165.000	306.685.313.801
64	Kab. Pasaman	596.083.486.000	596.083.486.000	162.181.140.000	147.062.049.488
65	Kab. Pesisir Selatan	838.100.134.000	838.100.134.000	278.271.663.000	265.159.690.710
66	Kab. Sijunjung	548.573.107.000	548.573.107.000	151.719.988.000	139.505.882.043
67	Kab. Solok	710.962.915.000	710.962.915.000	230.998.945.000	211.524.645.912
68	Kab. Tanah Datar	695.555.745.000	695.555.745.000	273.243.829.000	237.114.024.294
69	Kota Bukit Tinggi	450.905.882.000	450.905.882.000	66.569.182.000	59.565.781.339
70	Kota Padang Panjang	375.436.356.000	375.436.356.000	67.562.403.000	57.424.847.367
71	Kota Padang	1.100.370.559.000	1.100.370.559.000	284.775.700.000	263.030.961.104
72	Kota Payakumbuh	437.696.934.000	437.696.934.000	105.347.474.000	99.022.990.283
73	Kota Sawahlunto	375.131.128.000	375.131.128.000	82.041.001.000	64.415.138.140
74	Kota Solok	398.106.262.000	398.106.262.000	78.922.163.000	71.968.447.294
75	Kota Pariaman	415.241.327.000	415.241.327.000	91.269.676.000	83.096.934.607
76	Kab. Pasaman Barat	644.333.727.000	644.333.727.000	232.170.727.000	217.224.642.075
77	Kab. Dharmasraya	502.298.085.000	502.298.085.000	193.590.735.000	187.705.190.546
78	Kab. Solok Selatan	480.406.179.000	480.406.179.000	147.086.555.000	137.314.855.550
79	**Provinsi Riau**	**1.465.261.007.000**	**1.465.261.007.000**	**1.728.536.844.000**	**1.635.090.586.303**
80	Kab. Bengkalis	345.070.716.000	345.070.716.000	218.058.065.000	183.801.494.841
81	Kab. Indragiri Hilir	918.602.922.000	918.602.922.000	241.540.908.000	221.058.798.121
82	Kab. Indragiri Hulu	646.609.433.000	646.609.433.000	198.259.495.000	162.440.212.758
83	Kab. Kampar	774.370.036.000	774.370.036.000	332.767.162.000	305.292.493.019
84	Kab. Kuantan Singingi	618.561.583.000	618.561.583.000	214.660.548.000	202.328.743.402
85	Kab. Pelalawan	610.599.637.000	610.599.637.000	169.518.518.000	147.794.646.899
86	Kab. Rokan Hilir	432.022.856.000	432.022.856.000	199.517.128.000	168.071.481.411
87	Kab. Rokan Hulu	654.291.480.000	654.291.480.000	247.278.920.000	234.938.355.856
88	Kab. Siak	323.293.793.000	323.293.793.000	202.931.802.000	191.890.258.298
89	Kota Dumai	427.188.089.000	427.188.089.000	182.864.333.000	166.331.273.455
90	Kota Pekanbaru	798.138.148.000	798.138.148.000	235.800.179.000	212.931.929.581
91	Kab. Kepulauan Meranti	403.426.873.000	403.426.873.000	172.997.560.000	158.755.443.046
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.150.516.796.000**	**1.150.516.796.000**	**598.868.305.000**	**581.563.538.822**
93	Kab. Bintan	484.586.669.000	484.586.669.000	123.177.913.000	115.572.160.116
94	Kab. Natuna	368.413.963.000	368.413.963.000	105.912.412.000	100.102.868.329
95	Kab. Karimun	403.184.262.000	403.184.262.000	223.948.899.000	210.593.110.332
96	Kota Batam	599.074.016.000	599.074.016.000	174.229.056.000	162.160.638.526
97	Kab. Kepulauan Anambas	364.336.885.000	364.336.885.000	109.115.713.000	102.809.320.682
98	Kota Tanjung Pinang	457.366.176.000	457.366.176.000	105.169.584.000	100.173.268.328
99	Kab. Lingga	455.758.203.000	455.758.203.000	120.294.283.000	114.405.753.614
100	**Provinsi Jambi**	**1.399.367.134.000**	**1.399.367.134.000**	**984.106.096.000**	**935.300.581.842**
101	Kab. Batanghari	605.739.426.000	605.739.426.000	155.943.284.000	141.430.445.078
102	Kab. Bungo	635.999.293.000	635.999.293.000	201.368.830.000	191.980.404.384
103	Kab. Kerinci	589.202.611.000	589.202.611.000	163.055.528.000	155.138.708.215
104	Kab. Merangin	718.849.295.000	718.849.295.000	214.271.029.000	194.318.877.142
105	Kab. Muaro Jambi	670.341.091.000	670.341.091.000	202.418.501.000	175.375.563.818
106	Kab. Sarolangun	583.152.387.000	583.152.387.000	161.113.327.000	143.747.196.458
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	506.589.288.000	506.589.288.000	147.210.829.000	142.753.764.049
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	540.400.531.000	540.400.531.000	210.425.771.000	196.922.022.086
109	Kab. Tebo	582.313.417.000	582.313.417.000	139.842.780.000	129.648.054.971
110	Kota Jambi	714.783.378.000	714.783.378.000	291.823.567.000	277.298.116.284
111	Kota Sungai Penuh	422.532.652.000	422.532.652.000	103.162.020.000	92.350.598.379
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.697.897.817.000**	**1.697.897.817.000**	**2.239.022.240.000**	**2.170.012.209.131**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
113	Kab. Lahat	696.379.856.000	696.379.856.000	228.458.230.000	221.396.196.527
114	Kab. Musi Banyuasin	370.826.979.000	370.826.979.000	264.004.132.000	258.339.719.486
115	Kab. Musi Rawas	639.753.278.000	639.753.278.000	280.633.217.000	274.429.844.260
116	Kab Musi Rawas Utara	383.935.458.000	383.935.458.000	201.842.840.000	186.721.499.530
117	Kab. Muara Enim	661.337.068.000	661.337.068.000	243.024.261.000	235.688.695.036
118	Kab. Ogan Komering Ilir	1.053.840.757.000	1.053.840.757.000	380.678.836.000	369.716.929.562
119	Kab. Ogan Komering Ulu	636.233.972.000	636.233.972.000	192.582.480.000	183.161.504.401
120	Kota Palembang	1.269.426.417.000	1.269.426.417.000	497.046.815.000	481.900.223.636
121	Kota Pagar Alam	391.943.478.000	391.943.478.000	131.337.080.000	113.818.849.262
122	Kota Lubuk linggau	449.082.849.000	449.082.849.000	132.148.074.000	124.671.818.972
123	Kota Prabumulih	416.312.645.000	416.312.645.000	100.964.525.000	97.780.605.399
124	Kab. Empat Lawang	424.811.343.000	424.811.343.000	193.137.833.000	187.918.012.283
125	Kab. Banyuasin	933.631.693.000	933.631.693.000	339.674.743.000	319.248.731.658
126	Kab. Ogan Ilir	623.348.780.000	623.348.780.000	249.132.726.000	239.900.136.052
127	Kab. OKU Timur	767.167.031.000	767.167.031.000	281.840.479.000	268.448.705.478
128	Kab. OKU Selatan	598.063.061.000	598.063.061.000	183.972.625.000	176.993.703.944
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	317.402.008.000	317.402.008.000	164.622.621.000	152.733.330.695
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**1.018.673.218.000**	**1.018.673.218.000**	**477.958.706.000**	**457.248.755.861**
131	Kab. Bangka	529.693.057.000	529.693.057.000	158.979.164.000	146.711.843.788
132	Kab. Belitung	480.560.681.000	480.560.681.000	148.235.984.000	136.413.967.928
133	Kota Pangkal Pinang	443.476.956.000	443.476.956.000	164.883.946.000	157.626.702.360
134	Kab. Bangka Selatan	466.182.109.000	466.182.109.000	156.062.373.000	148.733.631.210
135	Kab. Bangka Tengah	439.128.449.000	439.128.449.000	131.553.770.000	127.994.070.259
136	Kab. Bangka Barat	445.168.706.000	445.168.706.000	134.617.979.000	125.830.480.976
137	Kab. Belitung Timur	440.265.288.000	440.265.288.000	113.777.568.000	100.079.772.515
138	**Provinsi Bengkulu**	**1.301.538.847.000**	**1.301.538.847.000**	**624.124.581.000**	**596.924.519.743**
139	Kab. Bengkulu Selatan	554.227.555.000	554.227.555.000	157.045.584.000	151.473.245.759
140	Kab. Bengkulu Utara	625.146.185.000	625.146.185.000	188.106.625.000	178.507.519.724
141	Kab. Rejang Lebong	593.702.491.000	593.702.491.000	207.561.174.000	199.934.328.125
142	Kota Bengkulu	671.384.345.000	671.384.345.000	163.657.480.000	157.409.377.766
143	Kab. Kaur	435.518.398.000	435.518.398.000	112.497.595.000	102.413.423.004
144	Kab. Seluma	497.868.275.000	497.868.275.000	177.567.584.000	165.274.694.591
145	Kab. Mukomuko	492.562.518.000	492.562.518.000	122.923.745.000	118.315.585.553
146	Kab. Lebong	405.048.287.000	405.048.287.000	100.669.737.000	94.531.189.096
147	Kab. Bengkulu Tengah	430.023.533.000	430.023.533.000	121.812.643.000	117.192.906.321
148	Kab. Kepahiang	414.396.205.000	414.396.205.000	110.689.648.000	106.571.947.541
149	**Provinsi Lampung**	**1.857.043.487.000**	**1.857.043.487.000**	**2.195.260.835.000**	**2.132.385.102.832**
150	Kab. Lampung Barat	521.743.958.000	521.743.958.000	312.627.934.000	307.395.275.747
151	Kab. Lampung Selatan	1.019.207.779.000	1.019.207.779.000	353.878.952.000	348.372.103.639
152	Kab. Lampung Tengah	1.319.480.688.000	1.319.480.688.000	457.631.283.000	437.002.533.599
153	Kab. Lampung Utara	949.774.837.000	949.774.837.000	308.458.247.000	226.503.513.121
154	Kab. Lampung Timur	1.069.168.109.000	1.069.168.109.000	363.143.901.000	355.380.212.579
155	Kab. Tanggamus	778.605.786.000	778.605.786.000	247.678.372.000	240.167.619.173
156	Kab. Tulang Bawang	612.112.587.000	612.112.587.000	273.610.957.000	256.723.192.931
157	Kab. Way Kanan	655.518.878.000	655.518.878.000	344.457.373.000	337.441.152.282
158	Kab. Pesawaran	669.276.831.000	669.276.831.000	255.672.043.000	250.821.838.688
159	Kab. Pesisir Barat	417.412.494.000	417.412.494.000	141.842.215.000	133.816.358.062
160	Kab. Pringsewu	621.967.450.000	621.967.450.000	203.636.701.000	196.385.795.591
161	Kab. Mesuji	446.272.067.000	446.272.067.000	144.700.488.000	138.886.646.742
162	Kab. Tulang Bawang Barat	463.478.442.000	463.478.442.000	239.852.919.000	237.255.143.339
163	Kota Bandar Lampung	1.034.730.849.000	1.034.730.849.000	270.866.364.000	264.908.878.825
164	Kota Metro	455.732.157.000	455.732.157.000	145.660.812.000	141.554.086.855
165	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-	**3.136.629.255.000**	**2.645.603.991.214**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**3.023.552.986.000**	**3.023.552.986.000**	**9.745.960.170.000**	**9.379.847.926.040**
167	Kab. Bandung	2.060.202.697.000	2.060.202.697.000	792.150.938.000	737.019.669.306
168	Kab. Bekasi	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	378.522.198.000	336.464.448.595

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
169	Kab. Bogor	1.919.023.527.000	1.919.023.527.000	670.569.805.000	637.617.713.872
170	Kab. Ciamis	1.183.061.992.000	1.183.061.992.000	416.875.558.000	405.372.512.431
171	Kab. Cianjur	1.548.376.287.000	1.548.376.287.000	642.510.404.000	617.131.832.222
172	Kab. Cirebon	1.500.538.688.000	1.500.538.688.000	507.436.424.000	482.734.102.661
173	Kab. Garut	1.776.936.655.000	1.776.936.655.000	690.598.890.000	658.897.211.119
174	Kab. Indramayu	1.371.769.951.000	1.371.769.951.000	450.837.686.000	429.382.722.396
175	Kab. Karawang	1.245.521.327.000	1.245.521.327.000	537.455.851.000	491.491.861.535
176	Kab. Kuningan	1.197.194.996.000	1.197.194.996.000	415.861.747.000	399.724.583.341
177	Kab. Majalengka	1.204.397.174.000	1.204.397.174.000	440.694.096.000	420.418.332.786
178	Kab. Pangandaran	538.882.193.000	538.882.193.000	199.579.730.000	190.111.565.695
179	Kab. Purwakarta	854.419.670.000	854.419.670.000	282.962.084.000	265.883.032.920
180	Kab. Subang	1.282.683.362.000	1.282.683.362.000	451.750.555.000	436.390.303.341
181	Kab. Sukabumi	1.580.414.660.000	1.580.414.660.000	551.398.996.000	533.275.079.784
182	Kab. Sumedang	1.125.798.410.000	1.125.798.410.000	415.546.749.000	409.715.609.147
183	Kab. Tasikmalaya	1.451.247.063.000	1.451.247.063.000	565.948.278.000	550.280.189.633
184	Kab. Bandung Barat	1.091.118.868.000	1.091.118.868.000	374.063.434.000	352.833.523.306
185	Kota Bandung	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	499.234.857.000	462.437.060.573
186	Kota Bekasi	1.212.033.531.000	1.212.033.531.000	305.718.986.000	295.252.447.074
187	Kota Bogor	791.929.143.000	791.929.143.000	191.716.946.000	179.875.196.265
188	Kota Cirebon	577.778.746.000	577.778.746.000	179.184.996.000	164.489.195.433
189	Kota Depok	860.675.991.000	860.675.991.000	224.968.437.000	195.519.453.727
190	Kota Sukabumi	495.865.420.000	495.865.420.000	144.697.321.000	130.989.790.173
191	Kota Cimahi	576.278.051.000	576.278.051.000	157.470.504.000	144.938.837.788
192	Kota Tasikmalaya	780.073.445.000	780.073.445.000	307.728.472.000	299.932.769.876
193	Kota Banjar	368.153.289.000	368.153.289.000	79.090.159.000	75.925.333.043
194	**Provinsi Banten**	**1.072.903.468.000**	**1.072.903.468.000**	**2.395.789.872.000**	**2.269.670.919.999**
195	Kab. Lebak	1.086.661.291.000	1.086.661.291.000	421.108.405.000	387.752.105.644
196	Kab. Pandeglang	1.172.374.842.000	1.172.374.842.000	426.373.358.000	385.626.887.343
197	Kab. Serang	1.078.411.345.000	1.078.411.345.000	418.238.755.000	387.690.019.660
198	Kab. Tangerang	1.178.485.856.000	1.178.485.856.000	412.980.894.000	381.460.784.571
199	Kota Cilegon	598.515.134.000	598.515.134.000	128.161.069.000	123.996.175.236
200	Kota Tangerang	866.113.340.000	866.113.340.000	227.879.834.000	213.587.477.495
201	Kota Serang	636.602.678.000	636.602.678.000	152.816.021.000	146.974.402.472
202	Kota Tangerang Selatan	572.637.313.000	572.637.313.000	152.702.482.000	141.157.634.550
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**3.652.586.431.000**	**3.652.586.431.000**	**6.756.315.118.000**	**6.507.583.153.672**
204	Kab. Banjarnegara	959.486.489.000	959.486.489.000	383.655.403.000	364.545.234.875
205	Kab. Banyumas	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	490.108.673.000	477.533.051.326
206	Kab. Batang	781.383.387.000	781.383.387.000	241.996.944.000	231.124.509.384
207	Kab. Blora	926.754.302.000	926.754.302.000	338.981.256.000	333.004.046.384
208	Kab. Boyolali	1.014.602.019.000	1.014.602.019.000	389.150.665.000	381.026.305.696
209	Kab. Brebes	1.322.465.038.000	1.322.465.038.000	419.479.479.000	398.599.759.143
210	Kab. Cilacap	1.362.443.518.000	1.362.443.518.000	463.571.821.000	443.618.853.481
211	Kab. Demak	894.376.873.000	894.376.873.000	283.657.892.000	275.348.403.392
212	Kab. Grobogan	1.094.460.434.000	1.094.460.434.000	400.743.048.000	385.401.361.674
213	Kab. Jepara	984.937.249.000	984.937.249.000	328.599.224.000	314.882.423.372
214	Kab. Karanganyar	978.664.650.000	978.664.650.000	332.279.859.000	308.185.919.715
215	Kab. Kebumen	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	412.176.759.000	390.504.708.527
216	Kab. Kendal	956.765.777.000	956.765.777.000	306.531.100.000	295.942.730.376
217	Kab. Klaten	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000	394.218.628.000	373.028.991.537
218	Kab. Kudus	807.711.173.000	807.711.173.000	258.820.220.000	239.054.267.051
219	Kab. Magelang	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000	322.883.487.000	301.160.637.595
220	Kab. Pati	1.189.796.870.000	1.189.796.870.000	435.261.793.000	414.061.984.957
221	Kab. Pekalongan	915.154.037.000	915.154.037.000	366.638.864.000	346.840.785.740
222	Kab. Pemalang	1.180.834.332.000	1.180.834.332.000	356.263.948.000	331.768.131.456
223	Kab. Purbalingga	881.574.483.000	881.574.483.000	372.175.819.000	333.565.496.887
224	Kab. Purworejo	924.251.795.000	924.251.795.000	308.339.590.000	297.357.422.378

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
225	Kab. Rembang	771.584.367.000	771.584.367.000	282.210.059.000	258.619.192.504
226	Kab. Semarang	952.362.147.000	952.362.147.000	327.925.404.000	314.696.838.280
227	Kab. Sragen	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	334.257.047.000	320.063.100.709
228	Kab. Sukoharjo	906.416.629.000	906.416.629.000	302.965.064.000	286.887.271.862
229	Kab. Tegal	1.144.494.182.000	1.144.494.182.000	352.404.227.000	339.287.872.985
230	Kab. Temanggung	793.801.136.000	793.801.136.000	232.143.431.000	225.548.811.404
231	Kab. Wonogiri	1.125.312.680.000	1.125.312.680.000	395.201.647.000	379.596.211.850
232	Kab. Wonosobo	827.791.657.000	827.791.657.000	284.687.567.000	277.386.975.847
233	Kota Magelang	440.041.244.000	440.041.244.000	113.246.363.000	105.991.302.809
234	Kota Pekalongan	449.055.738.000	449.055.738.000	115.135.973.000	110.631.025.427
235	Kota Salatiga	448.067.710.000	448.067.710.000	95.645.513.000	88.527.219.754
236	Kota Semarang	1.190.422.387.000	1.190.422.387.000	350.631.680.000	330.030.704.917
237	Kota Surakarta	826.753.038.000	826.753.038.000	226.716.078.000	216.821.173.609
238	Kota Tegal	482.150.715.000	482.150.715.000	124.689.784.000	94.845.070.521
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**1.314.372.147.000**	**1.314.372.147.000**	**946.184.887.000**	**912.156.183.851**
240	Kab. Bantul	982.250.842.000	982.250.842.000	356.069.177.000	342.620.916.112
241	Kab. Gunung kidul	938.221.136.000	938.221.136.000	322.400.991.000	303.863.880.056
242	Kab. Kulon Progo	705.868.940.000	705.868.940.000	260.428.120.000	247.883.109.094
243	Kab. Sleman	996.492.454.000	996.492.454.000	339.258.544.000	321.540.108.398
244	Kota Yogyakarta	658.504.186.000	658.504.186.000	188.129.240.000	162.523.890.048
245	**Provinsi Jawa Timur**	**3.813.411.928.000**	**3.813.411.928.000**	**7.150.849.653.000**	**6.869.606.818.234**
246	Kab. Bangkalan	994.460.684.000	994.460.684.000	308.312.968.000	260.696.538.242
247	Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000	1.375.784.247.000	442.593.081.000	423.717.990.705
248	Kab. Blitar	1.109.812.753.000	1.109.812.753.000	410.165.755.000	382.043.194.822
249	Kab. Bojonegoro	932.445.113.000	932.445.113.000	378.811.650.000	349.495.303.481
250	Kab. Bondowoso	910.319.122.000	910.319.122.000	329.658.613.000	309.056.755.613
251	Kab. Gresik	909.888.092.000	909.888.092.000	351.571.255.000	330.283.398.649
252	Kab. Jember	1.697.477.217.000	1.697.477.217.000	529.854.557.000	478.354.824.047
253	Kab. Jombang	1.091.779.457.000	1.091.779.457.000	364.092.359.000	341.135.141.100
254	Kab. Kediri	1.225.331.641.000	1.225.331.641.000	424.783.623.000	406.576.707.166
255	Kab. Lamongan	1.146.161.266.000	1.146.161.266.000	454.501.481.000	429.800.064.440
256	Kab. Lumajang	972.852.929.000	972.852.929.000	330.054.686.000	306.661.771.652
257	Kab. Madiun	877.868.685.000	877.868.685.000	320.302.605.000	303.837.979.055
258	Kab. Magetan	899.960.340.000	899.960.340.000	306.067.226.000	278.740.644.408
259	Kab. Malang	1.665.195.901.000	1.665.195.901.000	588.243.213.000	553.022.487.244
260	Kab. Mojokerto	973.768.511.000	973.768.511.000	369.041.904.000	337.920.214.957
261	Kab. Nganjuk	1.059.746.429.000	1.059.746.429.000	384.950.335.000	361.601.592.261
262	Kab. Ngawi	1.039.619.057.000	1.039.619.057.000	350.461.658.000	334.579.617.361
263	Kab. Pacitan	793.715.346.000	793.715.346.000	282.439.173.000	277.683.212.331
264	Kab. Pamekasan	849.764.469.000	849.764.469.000	289.125.093.000	266.900.962.262
265	Kab. Pasuruan	1.179.777.625.000	1.179.777.625.000	415.803.948.000	387.073.986.651
266	Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000	1.043.916.636.000	434.499.623.000	405.686.933.708
267	Kab. Probolinggo	967.345.237.000	967.345.237.000	302.117.135.000	282.727.096.204
268	Kab. Sampang	825.443.163.000	825.443.163.000	294.214.648.000	279.475.126.533
269	Kab. Sidoarjo	1.203.737.401.000	1.203.737.401.000	449.062.283.000	415.805.733.813
270	Kab. Situbondo	806.660.581.000	806.660.581.000	327.642.434.000	303.035.021.045
271	Kab. Sumenep	1.144.489.870.000	1.144.489.870.000	330.553.820.000	318.164.202.097
272	Kab. Trenggalek	885.545.437.000	885.545.437.000	306.254.354.000	290.488.992.985
273	Kab. Tuban	1.028.370.328.000	1.028.370.328.000	323.808.210.000	311.052.055.461
274	Kab. Tulungagung	1.151.959.732.000	1.151.959.732.000	471.895.459.000	438.491.758.679
275	Kota Blitar	421.212.306.000	421.212.306.000	126.977.276.000	104.546.300.626
276	Kota Kediri	606.928.225.000	606.928.225.000	121.069.685.000	111.321.491.483
277	Kota Madiun	502.392.070.000	502.392.070.000	77.420.525.000	70.689.542.010
278	Kota Malang	844.576.426.000	844.576.426.000	202.637.120.000	184.452.461.185
279	Kota Mojokerto	390.118.825.000	390.118.825.000	85.000.428.000	74.274.872.665
280	Kota Pasuruan	424.499.789.000	424.499.789.000	151.989.086.000	124.354.364.356

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
281	Kota Probolinggo	461.952.836.000	461.952.836.000	119.364.796.000	102.056.324.513
282	Kota Surabaya	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	440.719.915.000	398.797.386.102
283	Kota Batu	474.881.106.000	474.881.106.000	90.110.425.000	77.838.891.013
290	**Provinsi Kalimantan Barat**	**1.724.402.496.000**	**1.724.402.496.000**	**1.554.705.923.000**	**1.487.264.125.073**
291	Kab. Bengkayang	581.274.511.000	581.274.511.000	183.342.723.000	173.905.503.371
292	Kab. Landak	670.222.701.000	670.222.701.000	276.056.375.000	268.890.449.941
293	Kab. Kapuas Hulu	975.757.515.000	975.757.515.000	299.935.750.000	292.467.332.303
294	Kab. Ketapang	1.122.269.534.000	1.122.269.534.000	357.881.688.000	335.157.692.404
295	Kab. Mempawah	583.210.092.000	583.210.092.000	207.542.224.000	199.602.980.557
296	Kab. Sambas	873.609.250.000	873.609.250.000	360.100.826.000	345.123.001.262
297	Kab. Sanggau	824.217.941.000	824.217.941.000	320.804.657.000	280.489.089.182
298	Kab. Sintang	909.410.866.000	909.410.866.000	372.440.549.000	351.581.836.133
299	Kota Pontianak	699.448.985.000	699.448.985.000	193.884.869.000	189.323.074.300
300	Kota Singkawang	492.487.388.000	492.487.388.000	172.857.374.000	149.662.300.565
301	Kab. Kayong Utara	472.544.021.000	472.544.021.000	154.122.780.000	146.013.672.816
302	Kab. Kubu Raya	782.647.725.000	782.647.725.000	332.788.854.000	322.384.358.285
303	Kab. Sekadau	504.548.895.000	504.548.895.000	204.110.372.000	150.505.334.115
304	Kab. Melawi	604.543.876.000	604.543.876.000	193.812.228.000	182.377.273.756
305	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.574.382.856.000**	**1.574.382.856.000**	**899.006.537.000**	**871.152.626.504**
306	Kab. Barito Selatan	576.041.341.000	576.041.341.000	166.820.611.000	159.775.921.222
307	Kab. Barito Utara	559.665.616.000	559.665.616.000	171.230.664.000	162.376.186.859
308	Kab. Kapuas	866.321.730.000	866.321.730.000	285.162.297.000	271.460.074.291
309	Kab. Kotawaringin Barat	652.906.913.000	652.906.913.000	176.267.742.000	169.591.409.220
310	Kab. Kotawaringin Timur	820.559.562.000	820.559.562.000	214.452.736.000	198.592.942.745
311	Kota Palangkaraya	646.270.544.000	646.270.544.000	155.288.671.000	149.663.978.896
312	Kab. Barito Timur	478.975.191.000	478.975.191.000	122.459.353.000	117.705.864.742
313	Kab. Murung Raya	667.654.598.000	667.654.598.000	192.661.943.000	185.940.755.229
314	Kab. Pulang Pisau	568.390.382.000	568.390.382.000	213.497.077.000	207.858.468.017
315	Kab. Gunung Mas	559.898.689.000	559.898.689.000	189.633.870.000	180.921.429.482
316	Kab. Lamandau	462.248.605.000	462.248.605.000	99.823.112.000	95.832.653.032
317	Kab. Sukamara	420.535.543.000	420.535.543.000	127.591.219.000	122.277.982.314
318	Kab. Katingan	696.300.554.000	696.300.554.000	217.731.471.000	208.340.312.389
319	Kab. Seruyan	616.493.956.000	616.493.956.000	191.940.444.000	186.575.296.212
320	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**1.118.213.289.000**	**1.118.213.289.000**	**977.026.328.000**	**932.766.102.579**
321	Kab. Banjar	709.407.411.000	709.407.411.000	291.390.017.000	272.331.969.107
322	Kab. Barito Kuala	565.599.843.000	565.599.843.000	208.458.268.000	199.754.994.741
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	522.814.008.000	522.814.008.000	197.137.474.000	186.501.672.823
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	519.741.516.000	519.741.516.000	182.519.056.000	169.416.141.770
325	Kab. Hulu Sungai Utara	485.062.285.000	485.062.285.000	187.659.373.000	175.927.903.178
326	Kab. Kotabaru	612.929.409.000	612.929.409.000	184.086.491.000	167.498.841.495
327	Kab. Tabalong	494.109.854.000	494.109.854.000	174.327.801.000	152.343.418.702
328	Kab. Tanah Laut	528.690.162.000	528.690.162.000	254.526.431.000	239.891.419.691
329	Kab. Tapin	448.697.311.000	448.697.311.000	138.933.004.000	134.346.921.703
330	Kota Banjarbaru	428.542.067.000	428.542.067.000	160.488.832.000	153.802.001.843
331	Kota Banjarmasin	696.828.787.000	696.828.787.000	173.793.606.000	162.900.494.334
332	Kab. Balangan	382.593.322.000	382.593.322.000	123.973.940.000	107.140.074.624
333	Kab. Tanah Bumbu	457.712.799.000	457.712.799.000	180.156.223.000	170.017.213.906
334	**Provinsi Kalimantan Timur**	**767.682.423.000**	**767.682.423.000**	**1.117.790.753.000**	**1.075.683.891.680**
335	Kab. Berau	561.401.129.000	561.401.129.000	220.844.708.000	185.757.595.993
336	Kab. Kutai Kartanegara	249.562.937.000	249.562.937.000	376.951.357.000	349.024.531.165
337	Kab. Kutai Barat	600.687.747.000	600.687.747.000	128.792.838.000	119.348.431.316
338	Kab. Kutai Timur	552.776.510.000	552.776.510.000	170.571.244.000	158.879.642.260
339	Kab. Mahakam Ulu	470.722.849.000	470.722.849.000	89.403.526.000	76.368.544.292
340	Kab. Paser	386.895.907.000	386.895.907.000	156.088.435.000	151.266.217.629
341	Kota Balikpapan	410.543.293.000	410.543.293.000	179.838.266.000	170.566.774.550
342	Kota Bontang	215.830.009.000	215.830.009.000	80.518.946.000	76.069.380.994

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
343	Kota Samarinda	659.322.535.000	659.322.535.000	242.306.672.000	234.160.199.197
344	Kab. Penajam Paser Utara	259.192.257.000	259.192.257.000	138.899.602.000	118.631.268.563
284	**Provinsi Kalimantan Utara**	**1.185.105.787.000**	**1.185.105.787.000**	**354.147.252.000**	**340.690.138.981**
285	Kab. Bulungan	497.449.426.000	497.449.426.000	162.288.240.000	158.479.243.265
286	Kab. Malinau	798.139.775.000	798.139.775.000	129.902.724.000	123.374.212.863
287	Kab. Nunukan	453.241.796.000	453.241.796.000	188.036.112.000	180.609.548.271
288	Kab. Tana Tidung	394.725.005.000	394.725.005.000	47.185.154.000	42.974.348.710
289	Kota Tarakan	380.969.519.000	380.969.519.000	164.159.864.000	157.588.699.499
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**1.427.544.997.000**	**1.427.544.997.000**	**1.013.884.068.000**	**963.695.634.505**
346	Kab. Bolaang Mongondow	556.612.417.000	556.612.417.000	213.885.530.000	206.410.223.418
347	Kab. Minahasa	656.641.151.000	656.641.151.000	232.625.482.000	221.231.538.080
348	Kab. Sangihe	518.472.055.000	518.472.055.000	170.640.394.000	153.984.975.135
349	Kota Bitung	476.935.367.000	476.935.367.000	211.596.335.000	203.284.399.558
350	Kota Manado	727.970.839.000	727.970.839.000	176.496.324.000	165.407.742.587
351	Kab. Kepulauan Talaud	488.354.687.000	488.354.687.000	158.834.739.000	139.669.923.500
352	Kab. Minahasa Selatan	523.238.733.000	523.238.733.000	264.626.265.000	243.492.758.581
353	Kab. Minahasa Tenggara	407.185.484.000	407.185.484.000	120.661.600.000	113.856.997.510
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	385.429.131.000	385.429.131.000	170.586.105.000	134.767.591.603
355	Kota Kotamobagu	376.388.719.000	376.388.719.000	175.243.709.000	171.048.865.141
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	341.807.077.000	341.807.077.000	133.900.982.000	129.408.162.373
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	349.643.086.000	349.643.086.000	110.843.836.000	106.573.164.734
358	Kota Tomohon	401.366.876.000	401.366.876.000	138.730.505.000	133.006.595.896
359	Kab. Minahasa Utara	496.136.006.000	496.136.006.000	145.568.655.000	131.495.165.367
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	384.772.383.000	384.772.383.000	151.519.546.000	140.988.642.599
361	**Provinsi Gorontalo**	**1.006.924.707.000**	**1.006.924.707.000**	**395.083.511.000**	**370.824.273.846**
362	Kab. Boalemo	452.535.801.000	452.535.801.000	229.642.212.000	209.589.456.124
363	Kab. Gorontalo	653.986.983.000	653.986.983.000	360.446.224.000	337.657.059.816
364	Kota Gorontalo	508.677.825.000	508.677.825.000	170.959.881.000	132.026.723.646
365	Kab. Pohuwato	513.389.155.000	513.389.155.000	184.748.664.000	178.359.374.852
366	Kab. Gorontalo Utara	402.570.414.000	402.570.414.000	153.235.829.000	144.151.240.328
367	Kab. Bone Bolango	487.244.817.000	487.244.817.000	217.595.287.000	202.098.479.193
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.586.163.908.000**	**1.586.163.908.000**	**976.962.777.000**	**953.221.062.164**
369	Kab. Banggai	869.604.156.000	869.604.156.000	261.487.704.000	249.050.528.494
370	Kab. Banggai Laut	397.037.063.000	397.037.063.000	102.823.702.000	88.799.346.787
371	Kab. Banggai Kepulauan	465.346.799.000	465.346.799.000	176.537.342.000	164.512.996.173
372	Kab. Buol	528.033.354.000	528.033.354.000	204.062.877.000	192.891.578.885
373	Kab. Toli-toli	618.784.625.000	618.784.625.000	177.757.647.000	164.916.344.191
374	Kab. Donggala	659.731.826.000	659.731.826.000	211.607.349.000	207.662.219.147
375	Kab. Morowali	509.533.134.000	509.533.134.000	205.364.920.000	197.507.484.461
376	Kab Morowali Utara	558.773.483.000	558.773.483.000	209.441.702.000	206.738.086.961
377	Kab. Poso	723.089.621.000	723.089.621.000	281.178.342.000	275.669.370.626
378	Kota Palu	671.600.535.000	671.600.535.000	203.483.077.000	195.171.092.200
379	Kab. Parigi Moutong	750.918.302.000	750.918.302.000	302.673.259.000	290.626.082.739
380	Kab. Sigi	634.133.821.000	634.133.821.000	256.206.197.000	244.935.609.690
381	Kab. Tojo Una Una	567.372.983.000	567.372.983.000	170.625.051.000	164.597.862.401
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**2.509.480.255.000**	**2.509.480.255.000**	**2.695.227.590.000**	**2.553.260.115.413**
383	Kab. Bantaeng	494.749.832.000	494.749.832.000	222.720.011.000	215.529.019.670
384	Kab. Barru	510.978.699.000	510.978.699.000	219.627.726.000	208.448.805.220
385	Kab. Bone	1.070.426.493.000	1.070.426.493.000	467.789.754.000	454.581.140.617
386	Kab. Bulukumba	705.099.263.000	705.099.263.000	340.624.256.000	318.538.927.491
387	Kab. Enrekang	534.335.959.000	534.335.959.000	233.963.668.000	228.774.951.421
388	Kab. Gowa	837.326.483.000	837.326.483.000	384.326.476.000	380.202.231.681
389	Kab. Jeneponto	627.644.516.000	627.644.516.000	304.866.064.000	296.771.322.098
390	Kab. Luwu	680.212.384.000	680.212.384.000	231.601.785.000	226.035.056.309
391	Kab. Luwu Utara	655.693.773.000	655.693.773.000	262.743.673.000	255.514.760.202
392	Kab. Maros	697.947.111.000	697.947.111.000	272.589.059.000	265.357.127.967

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	752.773.975.000	752.773.975.000	272.041.805.000	254.489.977.990
394	Kab. Pinrang	693.794.315.000	693.794.315.000	260.788.933.000	250.453.739.206
395	Kab. Kepulauan Selayar	580.780.803.000	580.780.803.000	238.701.256.000	232.128.162.002
396	Kab. Sidenreng Rappang	610.506.232.000	610.506.232.000	288.880.838.000	283.058.010.217
397	Kab. Sinjai	585.911.082.000	585.911.082.000	268.441.908.000	262.570.872.744
398	Kab. Soppeng	624.804.701.000	624.804.701.000	250.203.550.000	244.013.518.712
399	Kab. Takalar	595.466.518.000	595.466.518.000	274.879.684.000	256.130.933.270
400	Kab. Tana Toraja	551.496.571.000	551.496.571.000	234.234.567.000	223.679.321.245
401	Kab. Wajo	714.224.148.000	714.224.148.000	292.072.056.000	280.429.998.297
402	Kota Pare-pare	454.752.410.000	454.752.410.000	132.727.738.000	127.529.699.403
403	Kab. Toraja Utara	519.040.535.000	519.040.535.000	274.652.761.000	262.417.829.026
404	Kota Makassar	1.300.764.306.000	1.300.764.306.000	462.625.154.000	401.425.917.297
405	Kota Palopo	516.167.587.000	516.167.587.000	218.799.860.000	215.391.889.365
406	Kab. Luwu Timur	545.609.968.000	545.609.968.000	226.794.297.000	220.736.443.611
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**1.025.033.063.000**	**1.025.033.063.000**	**468.342.173.000**	**450.334.925.040**
408	Kab. Majene	512.162.492.000	512.162.492.000	149.560.436.000	147.835.927.732
409	Kab. Mamuju	627.775.288.000	627.775.288.000	223.868.146.000	219.255.558.042
410	Kab. Mamuju Tengah	347.815.396.000	347.815.396.000	141.810.691.000	136.069.833.276
411	Kab. Polewali Mandar	713.339.396.000	713.339.396.000	305.761.113.000	299.025.456.064
412	Kab. Mamasa	515.625.843.000	515.625.843.000	190.551.944.000	184.942.913.656
413	Kab. Pasangkayu	483.136.786.000	483.136.786.000	152.896.742.000	148.341.483.525
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**1.575.959.517.000**	**1.575.959.517.000**	**1.214.075.997.000**	**1.169.536.638.180**
415	Kab. Buton	424.357.645.000	424.357.645.000	196.613.689.000	182.974.007.913
416	Kab. Konawe	678.419.303.000	678.419.303.000	194.309.628.000	190.070.966.295
417	Kab Konawe Kepulauan	315.499.213.000	315.499.213.000	96.711.049.000	91.377.903.711
418	Kab. Kolaka	582.742.370.000	582.742.370.000	173.798.991.000	167.763.941.686
419	Kab. Kolaka Timur	402.711.812.000	402.711.812.000	101.836.510.000	96.732.158.509
420	Kab. Muna	658.128.350.000	658.128.350.000	246.322.950.000	243.260.160.556
421	Kota Kendari	662.782.152.000	662.782.152.000	252.453.612.000	249.387.870.879
422	Kota Bau-bau	509.013.667.000	509.013.667.000	150.094.879.000	145.768.712.848
423	Kab. Konawe Selatan	666.731.360.000	666.731.360.000	253.959.666.000	248.877.062.901
424	Kab. Bombana	482.294.441.000	482.294.441.000	140.553.132.000	132.453.388.634
425	Kab. Konawe Utara	454.226.840.000	454.226.840.000	126.533.244.000	124.059.735.478
426	Kab. Buton Utara	410.109.235.000	410.109.235.000	114.765.484.000	111.341.616.173
427	Kab. Wakatobi	463.652.327.000	463.652.327.000	209.793.672.000	204.709.145.524
428	Kab. Kolaka Utara	475.754.194.000	475.754.194.000	124.751.513.000	120.905.705.029
429	Kab. Muna Barat	356.862.831.000	356.862.831.000	121.208.618.000	119.238.946.228
430	Kab. Buton Tengah	358.696.369.000	358.696.369.000	160.176.709.000	156.709.766.310
431	Kab. Buton Selatan	343.792.777.000	343.792.777.000	126.954.121.000	125.031.358.075
432	**Provinsi Bali**	**1.268.585.388.000**	**1.268.585.388.000**	**1.102.440.440.000**	**1.048.792.635.535**
433	Kab. Badung	330.336.650.000	330.336.650.000	153.350.911.000	147.499.745.680
434	Kab. Bangli	559.867.699.000	559.867.699.000	123.630.664.000	98.523.654.743
435	Kab. Buleleng	965.435.235.000	965.435.235.000	270.730.677.000	251.132.931.738
436	Kab. Gianyar	693.573.732.000	693.573.732.000	216.328.339.000	207.925.722.534
437	Kab. Jembrana	552.643.376.000	552.643.376.000	132.747.433.000	121.721.250.874
438	Kab. Karangasem	729.378.991.000	729.378.991.000	199.915.436.000	187.547.161.754
439	Kab. Klungkung	530.371.681.000	530.371.681.000	128.490.929.000	120.943.257.704
440	Kab. Tabanan	811.768.631.000	811.768.631.000	237.947.837.000	228.591.669.673
441	Kota Denpasar	650.169.150.000	650.169.150.000	155.434.473.000	143.294.526.569
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1.537.777.886.000**	**1.537.777.886.000**	**1.454.262.126.000**	**1.401.066.660.559**
443	Kab. Bima	880.920.216.000	880.920.216.000	423.326.232.000	416.530.293.427
444	Kab. Dompu	572.061.726.000	572.061.726.000	228.459.417.000	223.893.542.356
445	Kab. Lombok Barat	771.028.054.000	771.028.054.000	291.474.620.000	283.970.250.081
446	Kab. Lombok Tengah	985.217.157.000	985.217.157.000	387.895.658.000	375.752.025.902
447	Kab. Lombok Timur	1.147.731.584.000	1.147.731.584.000	556.344.948.000	528.019.968.808
448	Kab. Sumbawa	821.927.598.000	821.927.598.000	333.839.050.000	315.746.201.466

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
449	Kota Mataram	598.318.257.000	598.318.257.000	205.027.649.000	198.061.418.460
450	Kab. Lombok Utara	392.932.943.000	392.932.943.000	175.229.910.000	167.347.499.619
451	Kota Bima	455.972.250.000	455.972.250.000	157.886.864.000	152.038.608.385
452	Kab. Sumbawa Barat	400.284.503.000	400.284.503.000	177.899.376.000	169.726.258.778
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.827.412.640.000**	**1.827.412.640.000**	**1.885.339.844.000**	**1.784.037.619.507**
454	Kab. Alor	600.881.201.000	600.881.201.000	276.559.920.000	264.126.614.328
455	Kab. Belu	501.312.256.000	501.312.256.000	214.403.552.000	208.282.595.364
456	Kab. Ende	621.873.578.000	621.873.578.000	202.083.516.000	182.115.289.753
457	Kab. Flores Timur	608.246.576.000	608.246.576.000	239.294.828.000	216.818.990.907
458	Kab. Kupang	681.370.762.000	681.370.762.000	292.327.076.000	270.417.611.896
459	Kab. Lembata	466.007.663.000	466.007.663.000	141.217.781.000	136.212.752.068
460	Kab. Malaka	436.377.451.000	436.377.451.000	147.373.968.000	138.791.619.406
461	Kab. Manggarai	572.870.496.000	572.870.496.000	234.979.250.000	224.296.757.486
462	Kab. Ngada	470.536.836.000	470.536.836.000	118.674.358.000	111.889.898.276
463	Kab. Sikka	622.679.290.000	622.679.290.000	192.918.147.000	182.748.667.364
464	Kab. Sumba Barat	397.976.871.000	397.976.871.000	223.871.607.000	217.843.032.706
465	Kab. Sumba Timur	637.391.140.000	637.391.140.000	189.063.851.000	169.415.544.661
466	Kab. Timor Tengah Selatan	747.723.272.000	747.723.272.000	341.268.889.000	301.043.603.693
467	Kab. Timor Tengah Utara	582.372.204.000	582.372.204.000	157.175.223.000	147.002.815.808
468	Kota Kupang	649.542.427.000	649.542.427.000	235.537.591.000	226.807.530.550
469	Kab. Rote Ndao	445.782.708.000	445.782.708.000	177.168.259.000	169.559.232.423
470	Kab. Nagekeo	432.406.320.000	432.406.320.000	125.879.410.000	119.884.445.535
471	Kab. Sumba Tengah	351.241.387.000	351.241.387.000	101.464.960.000	94.958.670.474
472	Kab. Sumba Barat Daya	467.693.510.000	467.693.510.000	180.223.341.000	166.481.523.168
473	Kab. Manggarai Timur	507.763.475.000	507.763.475.000	258.477.600.000	248.587.452.378
474	Kab. Sabu Raijua	346.280.257.000	346.280.257.000	115.129.037.000	91.344.353.490
475	Kab. Manggarai Barat	506.495.526.000	506.495.526.000	265.694.182.000	251.523.066.541
476	**Provinsi Maluku**	**1.670.234.402.000**	**1.670.234.402.000**	**872.454.524.000**	**829.326.348.724**
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	561.838.215.000	561.838.215.000	147.175.421.000	140.556.393.564
478	Kab. Maluku Tengah	965.391.210.000	965.391.210.000	338.561.120.000	317.645.449.651
479	Kab. Maluku Tenggara	495.979.781.000	495.979.781.000	183.296.137.000	176.807.140.414
480	Kab. Buru	500.117.604.000	500.117.604.000	228.295.886.000	221.272.221.252
481	Kota Ambon	674.130.364.000	674.130.364.000	182.270.533.000	170.302.430.309
482	Kab. Seram Bagian Barat	597.525.057.000	597.525.057.000	291.125.795.000	281.041.633.010
483	Kab. Seram Bagian Timur	530.650.657.000	530.650.657.000	190.247.018.000	168.884.101.312
484	Kab. Maluku Barat Daya	566.039.812.000	566.039.812.000	121.056.644.000	96.764.184.296
485	Kab. Buru Selatan	421.390.061.000	421.390.061.000	230.849.684.000	222.630.267.264
486	Kab. Kepulauan Aru	580.686.128.000	580.686.128.000	277.967.664.000	245.644.477.961
487	Kota Tual	394.706.960.000	394.706.960.000	123.517.854.000	121.826.166.195
488	**Provinsi Maluku Utara**	**1.331.236.347.000**	**1.331.236.347.000**	**664.497.731.000**	**651.539.307.564**
489	Kab. Halmahera Tengah	448.490.415.000	448.490.415.000	122.275.444.000	119.065.631.953
490	Kab. Halmahera Barat	493.248.990.000	493.248.990.000	279.313.566.000	277.966.179.429
491	Kota Ternate	610.569.215.000	610.569.215.000	121.623.139.000	120.641.348.267
492	Kab. Halmahera Timur	477.350.304.000	477.350.304.000	103.557.907.000	98.759.437.040
493	Kota Tidore Kepulauan	545.226.947.000	545.226.947.000	162.976.273.000	157.075.843.604
494	Kab. Kepulauan Sula	480.487.794.000	480.487.794.000	192.946.647.000	189.637.591.907
495	Kab. Pulau Morotai	391.524.047.000	391.524.047.000	144.896.753.000	142.851.217.542
496	Kab. Pulau Taliabu	341.053.281.000	341.053.281.000	106.575.813.000	102.976.849.067
497	Kab. Halmahera Selatan	751.125.982.000	751.125.982.000	247.892.965.000	242.796.536.711
498	Kab. Halmahera Utara	486.052.902.000	486.052.902.000	158.347.443.000	155.630.323.808
499	**Provinsi Papua**	**2.571.298.119.000**	**2.571.298.119.000**	**1.222.885.646.000**	**914.093.743.390**
500	Kab. Yalimo	620.836.641.000	620.836.641.000	164.960.191.000	144.756.859.320
501	Kab. Lanny Jaya	635.655.130.000	635.655.130.000	232.620.876.000	225.547.207.578
502	Kab. Biak Numfor	590.680.088.000	590.680.088.000	183.819.387.000	168.667.986.726
503	Kab. Jayapura	685.569.817.000	685.569.817.000	159.095.366.000	152.581.529.364
504	Kab. Jayawijaya	714.016.533.000	714.016.533.000	280.935.172.000	268.643.813.140

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 *(Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
505	Kab. Merauke	1.220.130.325.000	1.220.130.325.000	332.045.406.000	305.830.656.603
506	Kab. Mimika	610.285.895.000	610.285.895.000	277.861.017.000	262.684.868.136
507	Kab. Nabire	709.282.575.000	709.282.575.000	273.860.021.000	263.699.417.579
508	Kab. Paniai	586.036.724.000	586.036.724.000	190.851.642.000	187.487.053.110
509	Kab. Puncak Jaya	749.825.236.000	749.825.236.000	137.860.990.000	131.587.202.300
510	Kab. Kepulauan Yapen	547.266.529.000	547.266.529.000	181.289.417.000	161.068.118.800
511	Kota Jayapura	634.300.774.000	634.300.774.000	141.667.687.000	124.614.710.613
512	Kab. Sarmi	711.725.614.000	711.725.614.000	127.110.240.000	106.363.979.400
513	Kab. Keerom	545.712.219.000	545.712.219.000	192.245.500.000	171.776.040.877
514	Kab. Yahukimo	748.276.221.000	748.276.221.000	284.109.864.000	279.292.133.135
515	Kab. Pegunungan Bintang	851.061.519.000	851.061.519.000	269.479.359.000	260.412.057.995
516	Kab. Tolikara	734.503.655.000	734.503.655.000	239.872.588.000	232.433.220.965
517	Kab. Boven Digoel	831.711.325.000	831.711.325.000	157.562.759.000	148.316.810.100
518	Kab. Mappi	781.328.280.000	781.328.280.000	170.293.282.000	162.404.939.921
519	Kab. Asmat	895.264.341.000	895.264.341.000	138.641.461.000	112.241.299.203
520	Kab. Waropen	562.528.293.000	562.528.293.000	115.732.915.000	104.092.907.290
521	Kab. Mamberamo Raya	720.547.800.000	720.547.800.000	92.463.749.000	75.210.895.955
522	Kab. Mamberamo Tengah	635.796.762.000	635.796.762.000	139.860.513.000	136.978.037.570
523	Kab. Nduga	632.951.682.000	632.951.682.000	241.407.194.000	239.319.080.946
524	Kab. Dogiyai	492.099.027.000	492.099.027.000	145.950.602.000	143.001.200.811
525	Kab. Intan Jaya	700.866.324.000	700.866.324.000	164.393.834.000	153.534.741.550
526	Kab. Puncak	805.591.888.000	805.591.888.000	198.900.267.000	178.133.391.688
527	Kab. Deiyai	475.401.856.000	475.401.856.000	153.525.149.000	150.001.046.414
528	Kab. Supiori	451.175.449.000	451.175.449.000	78.311.909.000	74.753.646.760
529	**Provinsi Papua Barat**	**1.431.332.966.000**	**1.431.332.966.000**	**452.640.969.000**	**435.382.845.960**
530	Kab. Sorong	512.300.811.000	512.300.811.000	233.538.688.000	229.351.163.641
531	Kab. Manokwari	529.220.329.000	529.220.329.000	156.866.403.000	138.557.527.784
532	Kab. Manokwari Selatan	347.705.874.000	347.705.874.000	116.315.878.000	113.928.830.106
533	Kab. Fak fak	668.545.841.000	668.545.841.000	159.827.017.000	147.899.355.835
534	Kota Sorong	471.797.886.000	471.797.886.000	105.541.553.000	92.961.897.100
535	Kab. Pegunungan Arfak	380.420.717.000	380.420.717.000	133.597.480.000	128.740.245.564
536	Kab. Sorong Selatan	448.077.175.000	448.077.175.000	108.726.993.000	97.199.401.538
537	Kab. Raja Ampat	666.645.462.000	666.645.462.000	175.428.684.000	164.950.039.083
538	Kab. Teluk Bintuni	549.667.337.000	549.667.337.000	116.253.860.000	114.758.771.274
539	Kab. Teluk Wondama	444.837.467.000	444.837.467.000	136.539.003.000	132.546.484.315
540	Kab. Tambrauw	519.425.053.000	519.425.053.000	170.269.951.000	167.550.411.626
541	Kab. Maybrat	444.866.529.000	444.866.529.000	91.270.486.000	86.981.311.960
542	Kab. Kaimana	609.928.253.000	609.928.253.000	85.660.134.000	36.306.943.195
543	**Dana Cadangan**	-	-	2.695.766.600.000	353.976.565.607
	JUMLAH	**401.489.579.649.003**	**401.489.579.649.004**	**185.888.071.708.005**	**173.449.578.218.690**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 +11
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	8.029.791.593.000	-		-	**8.029.791.593.000**	8.029.791.593.000	-		-	**8.029.791.593.000**
2	Kab. Aceh Barat		220.927.595.000		35.250.000.000	**256.177.595.000**		220.192.020.000		35.250.000.000	**255.442.020.000**
3	Kab. Aceh Besar		394.170.701.000		18.000.000.000	**412.170.701.000**		394.170.700.800		18.000.000.000	**412.170.700.800**
4	Kab. Aceh Selatan		180.986.876.000		35.250.000.000	**216.236.876.000**		180.986.875.995		35.250.000.000	**216.236.875.995**
5	Kab. Aceh Singkil		91.394.344.000		-	**91.394.344.000**		91.080.148.829		-	**91.080.148.829**
6	Kab. Aceh Tengah		197.926.546.000		34.750.000.000	**232.676.546.000**		197.926.546.000		34.750.000.000	**232.676.546.000**
7	Kab. Aceh Tenggara		252.238.604.000		-	**252.238.604.000**		252.238.604.000		-	**252.238.604.000**
8	Kab. Aceh Timur		345.119.425.000		19.750.000.000	**364.869.425.000**		345.119.425.000		19.750.000.000	**364.869.425.000**
9	Kab. Aceh Utara		562.234.583.000		-	**562.234.583.000**		562.234.583.000		-	**562.234.583.000**
10	Kab. Bireuen		416.718.854.000		8.750.000.000	**425.468.854.000**		416.718.854.000		8.750.000.000	**425.468.854.000**
11	Kab. Pidie		498.843.013.000		-	**498.843.013.000**		498.843.013.000		-	**498.843.013.000**
12	Kab. Simeulue		102.024.542.000		43.500.000.000	**145.524.542.000**		102.024.542.000		43.500.000.000	**145.524.542.000**
13	Kota Banda Aceh		64.464.666.000		35.500.000.000	**99.964.666.000**		64.147.528.037		17.750.000.000	**81.897.528.037**
14	Kota Sabang		19.527.822.000		34.250.000.000	**53.777.822.000**		19.527.822.000		34.250.000.000	**53.777.822.000**
15	Kota Langsa		53.459.733.000		-	**53.459.733.000**		53.459.732.999		-	**53.459.732.999**
16	Kota Lhokseumawe		54.102.499.000		-	**54.102.499.000**		53.113.862.465		-	**53.113.862.465**
17	Kab. Nagan Raya		158.922.821.000		33.250.000.000	**192.172.821.000**		158.913.821.000		33.250.000.000	**192.163.821.000**
18	Kab. Aceh Jaya		117.810.988.000		35.500.000.000	**153.310.988.000**		117.810.988.000		35.500.000.000	**153.310.988.000**
19	Kab. Pidie Jaya		151.154.709.000		-	**151.154.709.000**		151.154.709.000		-	**151.154.709.000**
20	Kab. Aceh Barat Daya		105.354.225.000		-	**105.354.225.000**		105.033.672.600		-	**105.033.672.600**
21	Kab. Gayo Lues		101.209.135.000		26.500.000.000	**127.709.135.000**		101.209.134.895		26.500.000.000	**127.709.134.895**
22	Kab. Aceh Tamiang		150.088.313.000		25.500.000.000	**175.588.313.000**		150.088.312.985		25.500.000.000	**175.588.312.985**
23	Kab. Bener Meriah		157.060.749.000		35.750.000.000	**192.810.749.000**		157.060.749.000		35.750.000.000	**192.810.749.000**
24	Kota Subulussalam		63.666.451.000		-	**63.666.451.000**		63.666.451.000		-	**63.666.451.000**
25	**Provinsi Sumatera Utara**		-		-	-		-		-	-
26	Kab. Asahan		126.612.806.000		-	**126.612.806.000**		126.612.806.000		-	**126.612.806.000**
27	Kab. Dairi		111.931.480.000		26.750.000.000	**138.681.480.000**		111.931.480.000		26.750.000.000	**138.681.480.000**
28	Kab. Deli Serdang		271.727.110.000		-	**271.727.110.000**		271.727.069.600		-	**271.727.069.600**
29	Kab. Karo		173.032.360.000		-	**173.032.360.000**		173.032.360.000		-	**173.032.360.000**
30	Kab. LabuhanBatu		60.319.154.000		-	**60.319.154.000**		60.319.154.000		-	**60.319.154.000**
31	Kab. Langkat		179.187.255.000		-	**179.187.255.000**		179.187.255.000		-	**179.187.255.000**
32	Kab. Mandailing Natal		253.119.996.000		-	**253.119.996.000**		251.925.512.200		-	**251.925.512.200**
33	Kab. Nias		149.540.247.000		-	**149.540.247.000**		148.167.029.009		-	**148.167.029.009**
34	Kab. Simalungun		259.242.614.000		-	**259.242.614.000**		259.088.113.999		-	**259.088.113.999**
35	Kab. Tapanuli Selatan		145.867.334.000		8.000.000.000	**153.867.334.000**		144.815.909.800		8.000.000.000	**152.815.909.800**
36	Kab. Tapanuli Tengah		121.729.547.000		-	**121.729.547.000**		120.966.783.000		-	**120.966.783.000**
37	Kab. Tapanuli Utara		164.171.758.000		34.250.000.000	**198.421.758.000**		164.171.758.000		34.250.000.000	**198.421.758.000**
38	Kab. Toba Samosir		154.311.189.000		17.000.000.000	**171.311.189.000**		153.248.394.400		17.000.000.000	**170.248.394.400**
39	Kota Binjai		-		17.500.000.000	**17.500.000.000**		-		17.500.000.000	**17.500.000.000**
40	Kota Medan		-		-	-		-		-	-
41	Kota Pematang Siantar		-		-	-		-		-	-
42	Kota Sibolga		-		-	-		-		-	-
43	Kota Tanjung Balai		-		-	-		-		-	-
44	Kab. Batu Bara		104.278.229.000		-	**104.278.229.000**		104.278.228.948		-	**104.278.228.948**
45	Kab. Labuhan Batu Utara		67.742.000.000		-	**67.742.000.000**		67.742.000.000		-	**67.742.000.000**
46	Kab. Labuhan Batu Selatan		46.111.054.000		-	**46.111.054.000**		46.111.054.000		-	**46.111.054.000**
47	Kab. Padang Lawas Utara		254.182.148.000		-	**254.182.148.000**		252.229.192.200		-	**252.229.192.200**
48	Kab. Padang Lawas		204.968.532.000		-	**204.968.532.000**		203.014.984.800		-	**203.014.984.800**
49	Kab. Nias Utara		111.964.852.000		-	**111.964.852.000**		109.293.137.200		-	**109.293.137.200**
50	Kab. Nias Barat		92.981.905.000		-	**92.981.905.000**		92.981.904.984		-	**92.981.904.984**
51	Kota Tebing Tinggi		-		-	-		-		-	-
52	Kota Padang Sidempuan		33.662.556.000		-	**33.662.556.000**		33.662.556.000		-	**33.662.556.000**
53	Kab. Pakpak Bharat		40.948.983.000		25.500.000.000	**66.448.983.000**		40.021.955.400		25.500.000.000	**65.521.955.400**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
54	Kab. Nias Selatan		315.110.810.000		-	**315.110.810.000**		267.448.027.033		-	**267.448.027.033**
55	Kab. Humbang Hasundutan		105.690.046.000		-	**105.690.046.000**		105.690.046.000		-	**105.690.046.000**
56	Kab. Serdang Bedagai		162.795.883.000		-	**162.795.883.000**		161.297.332.647		-	**161.297.332.647**
57	Kab. Samosir		90.953.371.000		-	**90.953.371.000**		90.953.371.000		-	**90.953.371.000**
58	Kota Gunungsitoli		77.492.216.000		-	**77.492.216.000**		76.000.480.809		-	**76.000.480.809**
59	**Provinsi Sumatera Barat**		-		71.250.000.000	**71.250.000.000**		-		71.250.000.000	**71.250.000.000**
60	Kab. Lima Puluh Kota		64.726.914.000		26.750.000.000	**91.476.914.000**		64.726.913.998		26.750.000.000	**91.476.913.998**
61	Kab. Agam		63.842.103.000		25.500.000.000	**89.342.103.000**		63.842.103.000		25.500.000.000	**89.342.103.000**
62	Kab. Kepulauan Mentawai		45.361.198.000		-	**45.361.198.000**		45.361.140.800		-	**45.361.140.800**
63	Kab. Padang Pariaman		81.807.844.000		16.500.000.000	**98.307.844.000**		81.807.844.000		16.500.000.000	**98.307.844.000**
64	Kab. Pasaman		39.081.007.000		16.750.000.000	**55.831.007.000**		39.081.007.000		8.375.000.000	**47.456.007.000**
65	Kab. Pesisir Selatan		145.956.367.000		8.750.000.000	**154.706.367.000**		145.956.367.000		8.750.000.000	**154.706.367.000**
66	Kab. Sijunjung		49.651.473.000		35.250.000.000	**84.901.473.000**		49.651.473.000		35.250.000.000	**84.901.473.000**
67	Kab. Solok		62.971.507.000		-	**62.971.507.000**		62.971.507.000		-	**62.971.507.000**
68	Kab. Tanah Datar		56.799.295.000		25.750.000.000	**82.549.295.000**		56.799.295.000		25.750.000.000	**82.549.295.000**
69	Kota Bukit Tinggi		-		28.250.000.000	**28.250.000.000**		-		28.250.000.000	**28.250.000.000**
70	Kota Padang Panjang		-		8.000.000.000	**8.000.000.000**		-		4.000.000.000	**4.000.000.000**
71	Kota Padang		-		28.250.000.000	**28.250.000.000**		-		28.250.000.000	**28.250.000.000**
72	Kota Payakumbuh		-		16.500.000.000	**16.500.000.000**		-		16.500.000.000	**16.500.000.000**
73	Kota Sawahlunto		23.469.694.000		27.500.000.000	**50.969.694.000**		23.469.694.000		27.500.000.000	**50.969.694.000**
74	Kota Solok		-		9.500.000.000	**9.500.000.000**		-		9.500.000.000	**9.500.000.000**
75	Kota Pariaman		41.606.563.000		8.500.000.000	**50.106.563.000**		41.270.376.154		8.500.000.000	**49.770.376.154**
76	Kab. Pasaman Barat		35.839.479.000		34.750.000.000	**70.589.479.000**		35.839.479.000		34.750.000.000	**70.589.479.000**
77	Kab. Dharmasraya		43.249.031.000		17.500.000.000	**60.749.031.000**		43.249.031.000		17.500.000.000	**60.749.031.000**
78	Kab. Solok Selatan		35.721.401.000		-	**35.721.401.000**		35.721.400.999		-	**35.721.400.999**
79	**Provinsi Riau**		-		9.000.000.000	**9.000.000.000**		-		9.000.000.000	**9.000.000.000**
80	Kab. Bengkalis		118.033.975.000		26.750.000.000	**144.783.975.000**		118.033.974.996		26.750.000.000	**144.783.974.996**
81	Kab. Indragiri Hilir		146.756.324.000		-	**146.756.324.000**		146.426.521.200		-	**146.426.521.200**
82	Kab. Indragiri Hulu		140.433.302.000		-	**140.433.302.000**		140.433.275.000		-	**140.433.275.000**
83	Kab. Kampar		185.162.993.000		-	**185.162.993.000**		184.378.856.000		-	**184.378.856.000**
84	Kab. Kuantan Singingi		153.076.959.000		-	**153.076.959.000**		153.076.959.000		-	**153.076.959.000**
85	Kab. Pelalawan		90.154.697.000		-	**90.154.697.000**		89.841.146.300		-	**89.841.146.300**
86	Kab. Rokan Hilir		126.860.825.000		-	**126.860.825.000**		126.860.825.000		-	**126.860.825.000**
87	Kab. Rokan Hulu		120.306.632.000		-	**120.306.632.000**		120.306.631.400		-	**120.306.631.400**
88	Kab. Siak		97.135.442.000		55.750.000.000	**152.885.442.000**		97.135.441.994		55.750.000.000	**152.885.441.994**
89	Kota Dumai		-		-	-		-		-	-
90	Kota Pekanbaru		-		27.250.000.000	**27.250.000.000**		-		27.250.000.000	**27.250.000.000**
91	Kab. Kepulauan Meranti		84.050.804.000		35.250.000.000	**119.300.804.000**		84.050.801.000		35.250.000.000	**119.300.801.000**
92	**Provinsi Kepulauan Riau**		-		-	-		-		-	-
93	Kab. Bintan		30.903.914.000		17.750.000.000	**48.653.914.000**		30.903.914.000		17.750.000.000	**48.653.914.000**
94	Kab. Natuna		54.514.794.000		-	**54.514.794.000**		54.514.794.000		-	**54.514.794.000**
95	Kab. Karimun		35.444.527.000		41.250.000.000	**76.694.527.000**		35.444.527.000		41.250.000.000	**76.694.527.000**
96	Kota Batam		-		-	-		-		-	-
97	Kab. Kepulauan Anambas		43.487.568.000		-	**43.487.568.000**		43.487.568.000		-	**43.487.568.000**
98	Kota Tanjung Pinang		-		-	-		-		-	-
99	Kab. Lingga		57.013.545.000		-	**57.013.545.000**		57.013.545.000		-	**57.013.545.000**
100	**Provinsi Jambi**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**		-		9.125.000.000	**9.125.000.000**
101	Kab. Batanghari		88.949.104.000		25.250.000.000	**114.199.104.000**		88.949.104.000		25.250.000.000	**114.199.104.000**
102	Kab. Bungo		99.662.383.000		-	**99.662.383.000**		99.662.379.349		-	**99.662.379.349**
103	Kab. Kerinci		189.579.503.000		35.250.000.000	**224.829.503.000**		187.861.330.200		35.250.000.000	**223.111.330.200**
104	Kab. Merangin		148.823.813.000		-	**148.823.813.000**		148.823.812.977		-	**148.823.812.977**
105	Kab. Muaro Jambi		107.496.108.000		35.250.000.000	**142.746.108.000**		107.496.108.000		35.250.000.000	**142.746.108.000**
106	Kab. Sarolangun		116.644.095.000		44.000.000.000	**160.644.095.000**		115.844.592.000		44.000.000.000	**159.844.592.000**
107	Kab. Tanjung Jabung Barat		89.944.914.000		-	**89.944.914.000**		89.944.914.000		-	**89.944.914.000**
108	Kab. Tanjung Jabung Timur		61.125.428.000		-	**61.125.428.000**		61.125.428.000		-	**61.125.428.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
109	Kab. Tebo		91.640.792.000		26.750.000.000	**118.390.792.000**		91.640.792.000		26.750.000.000	**118.390.792.000**
110	Kota Jambi		-		18.000.000.000	**18.000.000.000**		-		18.000.000.000	**18.000.000.000**
111	Kota Sungai Penuh		47.271.346.000		17.750.000.000	**65.021.346.000**		47.204.703.200		17.750.000.000	**64.954.703.200**
112	**Provinsi Sumatera Selatan**		-		64.750.000.000	**64.750.000.000**		-		64.750.000.000	**64.750.000.000**
113	Kab. Lahat		269.158.286.000		25.250.000.000	**294.408.286.000**		269.158.284.000		25.250.000.000	**294.408.284.000**
114	Kab. Musi Banyuasin		194.512.079.000		26.750.000.000	**221.262.079.000**		194.512.079.000		26.750.000.000	**221.262.079.000**
115	Kab. Musi Rawas		166.798.219.000		37.250.000.000	**204.048.219.000**		166.798.219.000		37.250.000.000	**204.048.219.000**
116	Kab Musi Rawas Utara		83.178.183.000		-	**83.178.183.000**		83.178.142.999		-	**83.178.142.999**
117	Kab. Muara Enim		208.161.174.000		43.500.000.000	**251.661.174.000**		208.161.174.000		43.500.000.000	**251.661.174.000**
118	Kab. Ogan Komering Ilir		253.191.679.000		26.250.000.000	**279.441.679.000**		253.191.679.000		26.250.000.000	**279.441.679.000**
119	Kab. Ogan Komering Ulu		118.813.420.000		25.000.000.000	**143.813.420.000**		118.180.845.600		25.000.000.000	**143.180.845.600**
120	Kota Palembang		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**
121	Kota Pagar Alam		-		8.000.000.000	**8.000.000.000**		-		8.000.000.000	**8.000.000.000**
122	Kota Lubuk linggau		-		17.750.000.000	**17.750.000.000**		-		17.750.000.000	**17.750.000.000**
123	Kota Prabumulih		16.294.634.000		17.000.000.000	**33.294.634.000**		16.294.634.000		17.000.000.000	**33.294.634.000**
124	Kab. Empat Lawang		112.223.919.000		-	**112.223.919.000**		112.223.919.000		-	**112.223.919.000**
125	Kab. Banyuasin		253.420.207.000		35.750.000.000	**289.170.207.000**		253.420.206.999		35.750.000.000	**289.170.206.999**
126	Kab. Ogan Ilir		176.964.320.000		17.500.000.000	**194.464.320.000**		176.332.916.400		17.500.000.000	**193.832.916.400**
127	Kab. OKU Timur		205.926.152.000		8.000.000.000	**213.926.152.000**		205.926.152.000		8.000.000.000	**213.926.152.000**
128	Kab. OKU Selatan		190.415.134.000		18.750.000.000	**209.165.134.000**		190.415.134.000		18.750.000.000	**209.165.134.000**
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		65.063.635.000		-	**65.063.635.000**		65.063.635.000		-	**65.063.635.000**
130	**Provinsi Bangka Belitung**		-		-	-		-		-	-
131	Kab. Bangka		51.718.989.000		16.500.000.000	**68.218.989.000**		51.718.988.898		8.250.000.000	**59.968.988.898**
132	Kab. Belitung		38.805.104.000		-	**38.805.104.000**		38.805.104.000		-	**38.805.104.000**
133	Kota Pangkal Pinang		-		-	-		-		-	-
134	Kab. Bangka Selatan		42.487.059.000		-	**42.487.059.000**		42.487.059.000		-	**42.487.059.000**
135	Kab. Bangka Tengah		47.148.882.000		8.000.000.000	**55.148.882.000**		47.148.882.000		8.000.000.000	**55.148.882.000**
136	Kab. Bangka Barat		48.519.806.000		25.250.000.000	**73.769.806.000**		47.679.073.537		25.250.000.000	**72.929.073.537**
137	Kab. Belitung Timur		35.618.320.000		-	**35.618.320.000**		35.618.320.000		-	**35.618.320.000**
138	**Provinsi Bengkulu**		-		-	-		-		-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan		97.393.929.000		-	**97.393.929.000**		97.388.065.000		-	**97.388.065.000**
140	Kab. Bengkulu Utara		146.743.965.000		-	**146.743.965.000**		145.830.615.400		-	**145.830.615.400**
141	Kab. Rejang Lebong		97.529.213.000		-	**97.529.213.000**		97.526.692.700		-	**97.526.692.700**
142	Kota Bengkulu		-		-	-		-		-	-
143	Kab. Kaur		129.967.425.000		9.250.000.000	**139.217.425.000**		129.967.424.400		9.250.000.000	**139.217.424.400**
144	Kab. Seluma		126.703.577.000		-	**126.703.577.000**		126.703.576.979		-	**126.703.576.979**
145	Kab. Mukomuko		106.544.049.000		-	**106.544.049.000**		106.544.049.000		-	**106.544.049.000**
146	Kab. Lebong		68.355.722.000		26.750.000.000	**95.105.722.000**		67.737.752.400		26.750.000.000	**94.487.752.400**
147	Kab. Bengkulu Tengah		98.197.538.000		-	**98.197.538.000**		95.171.279.187		-	**95.171.279.187**
148	Kab. Kepahiang		74.958.035.000		-	**74.958.035.000**		74.957.867.800		-	**74.957.867.800**
149	**Provinsi Lampung**		-		-	-		-		-	-
150	Kab. Lampung Barat		112.483.521.000		16.750.000.000	**129.233.521.000**		112.483.521.000		16.750.000.000	**129.233.521.000**
151	Kab. Lampung Selatan		225.519.782.000		35.000.000.000	**260.519.782.000**		225.199.887.396		35.000.000.000	**260.199.887.396**
152	Kab. Lampung Tengah		258.648.643.000		8.500.000.000	**267.148.643.000**		258.648.643.000		4.250.000.000	**262.898.643.000**
153	Kab. Lampung Utara		215.481.590.000		34.500.000.000	**249.981.590.000**		215.481.589.996		34.500.000.000	**249.981.589.996**
154	Kab. Lampung Timur		234.301.839.000		-	**234.301.839.000**		234.301.839.000		-	**234.301.839.000**
155	Kab. Tanggamus		248.590.256.000		-	**248.590.256.000**		248.590.256.000		-	**248.590.256.000**
156	Kab. Tulang Bawang		128.010.109.000		18.000.000.000	**146.010.109.000**		127.242.124.629		9.000.000.000	**136.242.124.629**
157	Kab. Way Kanan		164.879.793.000		16.750.000.000	**181.629.793.000**		164.879.793.000		16.750.000.000	**181.629.793.000**
158	Kab. Pesawaran		134.135.688.000		34.000.000.000	**168.135.688.000**		134.135.688.000		34.000.000.000	**168.135.688.000**
159	Kab. Pesisir Barat		98.950.577.000		-	**98.950.577.000**		98.950.576.096		-	**98.950.576.096**
160	Kab. Pringsewu		105.274.360.000		26.250.000.000	**131.524.360.000**		105.274.360.000		26.250.000.000	**131.524.360.000**
161	Kab. Mesuji		87.417.060.000		35.250.000.000	**122.667.060.000**		87.417.060.000		35.250.000.000	**122.667.060.000**
162	Kab. Tulang Bawang Barat		74.708.156.000		26.750.000.000	**101.458.156.000**		74.708.156.000		26.750.000.000	**101.458.156.000**
163	Kota Bandar Lampung		-		-	-		-		-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
164	Kota Metro		-		25.500.000.000	**25.500.000.000**		-		25.500.000.000	**25.500.000.000**
165	**Provinsi DKI Jakarta**		-		-	-		-		-	-
166	**Provinsi Jawa Barat**		-		33.750.000.000	**33.750.000.000**		-		33.750.000.000	**33.750.000.000**
167	Kab. Bandung		259.468.420.000		34.250.000.000	**293.718.420.000**		259.468.420.000		34.250.000.000	**293.718.420.000**
168	Kab. Bekasi		196.713.680.000		27.750.000.000	**224.463.680.000**		196.713.680.000		13.875.000.000	**210.588.680.000**
169	Kab. Bogor		402.068.049.000		17.500.000.000	**419.568.049.000**		402.068.048.852		17.500.000.000	**419.568.048.852**
170	Kab. Ciamis		217.285.506.000		25.750.000.000	**243.035.506.000**		217.285.506.000		25.750.000.000	**243.035.506.000**
171	Kab. Cianjur		346.804.878.000		25.750.000.000	**372.554.878.000**		346.452.870.400		25.750.000.000	**372.202.870.400**
172	Kab. Cirebon		370.242.221.000		35.750.000.000	**405.992.221.000**		370.242.221.000		35.750.000.000	**405.992.221.000**
173	Kab. Garut		393.536.092.000		17.250.000.000	**410.786.092.000**		393.536.092.000		17.250.000.000	**410.786.092.000**
174	Kab. Indramayu		310.922.174.000		35.000.000.000	**345.922.174.000**		310.922.174.000		35.000.000.000	**345.922.174.000**
175	Kab. Karawang		283.709.059.000		25.750.000.000	**309.459.059.000**		280.948.448.400		25.750.000.000	**306.698.448.400**
176	Kab. Kuningan		262.301.673.000		-	**262.301.673.000**		262.301.673.000		-	**262.301.673.000**
177	Kab. Majalengka		312.485.897.000		-	**312.485.897.000**		312.485.897.000		-	**312.485.897.000**
178	Kab. Pangandaran		76.670.519.000		17.000.000.000	**93.670.519.000**		76.670.519.000		17.000.000.000	**93.670.519.000**
179	Kab. Purwakarta		142.032.991.000		32.750.000.000	**174.782.991.000**		141.719.243.083		32.750.000.000	**174.469.243.083**
180	Kab. Subang		185.677.056.000		-	**185.677.056.000**		185.339.855.150		-	**185.339.855.150**
181	Kab. Sukabumi		304.406.625.000		18.750.000.000	**323.156.625.000**		300.895.124.977		18.750.000.000	**319.645.124.977**
182	Kab. Sumedang		192.462.069.000		25.000.000.000	**217.462.069.000**		192.462.067.600		25.000.000.000	**217.462.067.600**
183	Kab. Tasikmalaya		322.586.652.000		33.750.000.000	**356.336.652.000**		322.586.652.000		33.750.000.000	**356.336.652.000**
184	Kab. Bandung Barat		198.291.361.000		-	**198.291.361.000**		198.291.361.000		-	**198.291.361.000**
185	Kota Bandung		-		-	-		-		-	-
186	Kota Bekasi		-		-	-		-		-	-
187	Kota Bogor		-		-	-		-		-	-
188	Kota Cirebon		-		17.500.000.000	**17.500.000.000**		-		17.500.000.000	**17.500.000.000**
189	Kota Depok		-		78.250.000.000	**78.250.000.000**		-		78.250.000.000	**78.250.000.000**
190	Kota Sukabumi		-		39.250.000.000	**39.250.000.000**		-		39.250.000.000	**39.250.000.000**
191	Kota Cimahi		-		9.000.000.000	**9.000.000.000**		-		4.500.000.000	**4.500.000.000**
192	Kota Tasikmalaya		-		-	-		-		-	-
193	Kota Banjar		17.291.312.000		32.250.000.000	**49.541.312.000**		17.291.312.000		32.250.000.000	**49.541.312.000**
194	**Provinsi Banten**		-		-	-		-		-	-
195	Kab. Lebak		239.383.197.000		25.750.000.000	**265.133.197.000**		239.378.424.400		25.750.000.000	**265.128.424.400**
196	Kab. Pandeglang		231.185.206.000		-	**231.185.206.000**		231.185.206.000		-	**231.185.206.000**
197	Kab. Serang		227.676.618.000		34.750.000.000	**262.426.618.000**		226.934.084.800		34.750.000.000	**261.684.084.800**
198	Kab. Tangerang		242.671.332.000		17.500.000.000	**260.171.332.000**		240.890.904.216		8.750.000.000	**249.640.904.216**
199	Kota Cilegon		-		-	-		-		-	-
200	Kota Tangerang		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**
201	Kota Serang		-		-	-		-		-	-
202	Kota Tangerang Selatan		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**
203	**Provinsi Jawa Tengah**		-		33.500.000.000	**33.500.000.000**		-		33.500.000.000	**33.500.000.000**
204	Kab. Banjarnegara		222.775.782.000		26.750.000.000	**249.525.782.000**		222.775.782.000		26.750.000.000	**249.525.782.000**
205	Kab. Banyumas		295.876.047.000		34.250.000.000	**330.126.047.000**		295.876.047.000		34.250.000.000	**330.126.047.000**
206	Kab. Batang		168.403.538.000		34.250.000.000	**202.653.538.000**		168.403.538.000		34.250.000.000	**202.653.538.000**
207	Kab. Blora		229.733.837.000		26.250.000.000	**255.983.837.000**		229.733.837.000		26.250.000.000	**255.983.837.000**
208	Kab. Boyolali		192.998.474.000		23.500.000.000	**216.498.474.000**		192.998.474.000		23.500.000.000	**216.498.474.000**
209	Kab. Brebes		344.197.496.000		-	**344.197.496.000**		344.197.496.000		-	**344.197.496.000**
210	Kab. Cilacap		240.787.259.000		27.250.000.000	**268.037.259.000**		240.787.259.000		27.250.000.000	**268.037.259.000**
211	Kab. Demak		229.565.688.000		34.000.000.000	**263.565.688.000**		229.565.688.000		34.000.000.000	**263.565.688.000**
212	Kab. Grobogan		248.195.231.000		25.000.000.000	**273.195.231.000**		248.195.231.000		25.000.000.000	**273.195.231.000**
213	Kab. Jepara		190.273.424.000		8.000.000.000	**198.273.424.000**		190.273.424.000		8.000.000.000	**198.273.424.000**
214	Kab. Karanganyar		138.839.437.000		68.250.000.000	**207.089.437.000**		138.839.437.000		68.250.000.000	**207.089.437.000**
215	Kab. Kebumen		350.691.179.000		-	**350.691.179.000**		350.023.637.000		-	**350.023.637.000**
216	Kab. Kendal		215.090.043.000		27.000.000.000	**242.090.043.000**		215.090.043.000		27.000.000.000	**242.090.043.000**
217	Kab. Klaten		320.940.593.000		-	**320.940.593.000**		320.940.593.000		-	**320.940.593.000**
218	Kab. Kudus		117.966.044.000		26.250.000.000	**144.216.044.000**		117.344.518.400		26.250.000.000	**143.594.518.400**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
219	Kab. Magelang		325.360.832.000		-	**325.360.832.000**		325.360.832.000		-	**325.360.832.000**
220	Kab. Pati		365.454.541.000		42.500.000.000	**407.954.541.000**		365.454.541.000		42.500.000.000	**407.954.541.000**
221	Kab. Pekalongan		227.842.747.000		8.000.000.000	**235.842.747.000**		227.517.071.400		8.000.000.000	**235.517.071.400**
222	Kab. Pemalang		249.322.556.000		9.000.000.000	**258.322.556.000**		249.322.556.000		4.500.000.000	**253.822.556.000**
223	Kab. Purbalingga		199.934.262.000		9.500.000.000	**209.434.262.000**		199.934.262.000		9.500.000.000	**209.434.262.000**
224	Kab. Purworejo		326.085.184.000		9.000.000.000	**335.085.184.000**		325.017.443.600		9.000.000.000	**334.017.443.600**
225	Kab. Rembang		229.010.130.000		-	**229.010.130.000**		229.010.130.000		-	**229.010.130.000**
226	Kab. Semarang		157.084.768.000		17.500.000.000	**174.584.768.000**		157.084.768.000		17.500.000.000	**174.584.768.000**
227	Kab. Sragen		146.148.323.000		9.000.000.000	**155.148.323.000**		146.148.323.000		9.000.000.000	**155.148.323.000**
228	Kab. Sukoharjo		126.076.256.000		35.750.000.000	**161.826.256.000**		126.076.256.000		35.750.000.000	**161.826.256.000**
229	Kab. Tegal		282.703.163.000		35.000.000.000	**317.703.163.000**		282.703.162.997		35.000.000.000	**317.703.162.997**
230	Kab. Temanggung		213.042.611.000		18.750.000.000	**231.792.611.000**		213.042.611.000		18.750.000.000	**231.792.611.000**
231	Kab. Wonogiri		196.188.133.000		25.500.000.000	**221.688.133.000**		196.188.133.000		12.750.000.000	**208.938.133.000**
232	Kab. Wonosobo		184.414.648.000		8.750.000.000	**193.164.648.000**		184.414.648.000		8.750.000.000	**193.164.648.000**
233	Kota Magelang		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**
234	Kota Pekalongan		-		33.250.000.000	**33.250.000.000**		-		33.250.000.000	**33.250.000.000**
235	Kota Salatiga		-		38.500.000.000	**38.500.000.000**		-		38.500.000.000	**38.500.000.000**
236	Kota Semarang		-		60.250.000.000	**60.250.000.000**		-		60.250.000.000	**60.250.000.000**
237	Kota Surakarta		-		33.250.000.000	**33.250.000.000**		-		33.250.000.000	**33.250.000.000**
238	Kota Tegal		-		-	-		-		-	-
239	**Provinsi DI Yogyakarta**		-	1.000.000.000.000	37.250.000.000	**1.037.250.000.000**		-	1.000.000.000.000	37.250.000.000	**1.037.250.000.000**
240	Kab. Bantul		79.076.105.000		34.250.000.000	**113.326.105.000**		79.076.105.000		34.250.000.000	**113.326.105.000**
241	Kab. Gunung kidul		117.574.520.000		9.000.000.000	**126.574.520.000**		117.574.520.000		9.000.000.000	**126.574.520.000**
242	Kab. Kulon Progo		76.680.810.000		62.250.000.000	**138.930.810.000**		76.680.810.000		62.250.000.000	**138.930.810.000**
243	Kab. Sleman		81.187.698.000		51.500.000.000	**132.687.698.000**		81.187.698.000		51.500.000.000	**132.687.698.000**
244	Kota Yogyakarta		-		42.500.000.000	**42.500.000.000**		-		42.500.000.000	**42.500.000.000**
245	**Provinsi Jawa Timur**		-		77.500.000.000	**77.500.000.000**		-		77.500.000.000	**77.500.000.000**
246	Kab. Bangkalan		270.643.937.000		-	**270.643.937.000**		270.643.937.000		-	**270.643.937.000**
247	Kab. Banyuwangi		167.707.413.000		74.500.000.000	**242.207.413.000**		167.707.412.850		74.500.000.000	**242.207.412.850**
248	Kab. Blitar		163.105.009.000		36.250.000.000	**199.355.009.000**		163.105.009.000		36.250.000.000	**199.355.009.000**
249	Kab. Bojonegoro		316.364.467.000		17.250.000.000	**333.614.467.000**		316.364.467.000		17.250.000.000	**333.614.467.000**
250	Kab. Bondowoso		197.149.839.000		24.500.000.000	**221.649.839.000**		197.149.839.000		24.500.000.000	**221.649.839.000**
251	Kab. Gresik		246.902.275.000		34.250.000.000	**281.152.275.000**		246.902.275.000		17.125.000.000	**264.027.275.000**
252	Kab. Jember		236.182.333.000		-	**236.182.333.000**		235.267.846.549		-	**235.267.846.549**
253	Kab. Jombang		238.440.982.000		18.500.000.000	**256.940.982.000**		238.440.974.712		18.500.000.000	**256.940.974.712**
254	Kab. Kediri		270.691.907.000		34.750.000.000	**305.441.907.000**		270.691.907.000		34.750.000.000	**305.441.907.000**
255	Kab. Lamongan		321.349.755.000		43.750.000.000	**365.099.755.000**		321.349.755.000		43.750.000.000	**365.099.755.000**
256	Kab. Lumajang		163.728.393.000		35.000.000.000	**198.728.393.000**		163.206.258.000		35.000.000.000	**198.206.258.000**
257	Kab. Madiun		142.156.308.000		18.000.000.000	**160.156.308.000**		142.156.308.000		9.000.000.000	**151.156.308.000**
258	Kab. Magetan		147.948.351.000		33.250.000.000	**181.198.351.000**		147.948.351.000		33.250.000.000	**181.198.351.000**
259	Kab. Malang		314.215.308.000		26.250.000.000	**340.465.308.000**		314.215.308.000		26.250.000.000	**340.465.308.000**
260	Kab. Mojokerto		208.535.750.000		9.000.000.000	**217.535.750.000**		203.605.688.600		9.000.000.000	**212.605.688.600**
261	Kab. Nganjuk		235.353.730.000		-	**235.353.730.000**		235.353.700.000		-	**235.353.700.000**
262	Kab. Ngawi		167.815.849.000		17.250.000.000	**185.065.849.000**		167.815.849.000		17.250.000.000	**185.065.849.000**
263	Kab. Pacitan		125.652.536.000		37.000.000.000	**162.652.536.000**		125.652.536.000		37.000.000.000	**162.652.536.000**
264	Kab. Pamekasan		162.867.892.000		25.750.000.000	**188.617.892.000**		162.014.284.400		25.750.000.000	**187.764.284.400**
265	Kab. Pasuruan		301.266.507.000		25.750.000.000	**327.016.507.000**		301.027.884.400		25.750.000.000	**326.777.884.400**
266	Kab. Ponorogo		216.613.335.000		27.250.000.000	**243.863.335.000**		216.613.335.000		27.250.000.000	**243.863.335.000**
267	Kab. Probolinggo		322.100.878.000		16.250.000.000	**338.350.878.000**		322.100.877.987		16.250.000.000	**338.350.877.987**
268	Kab. Sampang		179.206.635.000		-	**179.206.635.000**		179.206.635.000		-	**179.206.635.000**
269	Kab. Sidoarjo		252.255.524.000		45.000.000.000	**297.255.524.000**		247.400.305.606		45.000.000.000	**292.400.305.606**
270	Kab. Situbondo		115.130.385.000		26.750.000.000	**141.880.385.000**		115.130.381.000		26.750.000.000	**141.880.381.000**
271	Kab. Sumenep		278.366.376.000		-	**278.366.376.000**		278.366.376.000		-	**278.366.376.000**
272	Kab. Trenggalek		127.606.280.000		17.000.000.000	**144.606.280.000**		127.606.280.000		17.000.000.000	**144.606.280.000**
273	Kab. Tuban		226.950.413.000		26.500.000.000	**253.450.413.000**		226.950.413.000		26.500.000.000	**253.450.413.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
274	Kab. Tulungagung		205.952.328.000		-	**205.952.328.000**		205.952.328.000		-	**205.952.328.000**
275	Kota Blitar		-		26.000.000.000	**26.000.000.000**		-		13.000.000.000	**13.000.000.000**
276	Kota Kediri		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**
277	Kota Madiun		-		-	-		-		-	-
278	Kota Malang		-		25.500.000.000	**25.500.000.000**		-		25.500.000.000	**25.500.000.000**
279	Kota Mojokerto		-		66.750.000.000	**66.750.000.000**		-		66.750.000.000	**66.750.000.000**
280	Kota Pasuruan		-		8.000.000.000	**8.000.000.000**		-		4.000.000.000	**4.000.000.000**
281	Kota Probolinggo		-		-	-		-		-	-
282	Kota Surabaya		-		48.750.000.000	**48.750.000.000**		-		48.750.000.000	**48.750.000.000**
283	Kota Batu		21.347.494.000		54.750.000.000	**76.097.494.000**		21.347.494.000		54.750.000.000	**76.097.494.000**
284	**Provinsi Kalimantan Barat**		-		7.250.000.000	**7.250.000.000**		-		7.250.000.000	**7.250.000.000**
285	Kab. Bengkayang		92.400.237.000		-	**92.400.237.000**		92.400.237.000		-	**92.400.237.000**
286	Kab. Landak		154.158.590.000		18.500.000.000	**172.658.590.000**		154.158.590.000		18.500.000.000	**172.658.590.000**
287	Kab. Kapuas Hulu		228.933.717.000		-	**228.933.717.000**		228.933.717.000		-	**228.933.717.000**
288	Kab. Ketapang		217.293.380.000		18.750.000.000	**236.043.380.000**		217.293.380.000		18.750.000.000	**236.043.380.000**
289	Kab. Mempawah		55.232.991.000		18.750.000.000	**73.982.991.000**		55.232.991.000		18.750.000.000	**73.982.991.000**
290	Kab. Sambas		172.844.238.000		-	**172.844.238.000**		172.844.238.000		-	**172.844.238.000**
291	Kab. Sanggau		128.783.898.000		27.750.000.000	**156.533.898.000**		128.479.518.000		13.875.000.000	**142.354.518.000**
292	Kab. Sintang		294.873.842.000		-	**294.873.842.000**		294.718.224.000		-	**294.718.224.000**
293	Kota Pontianak		-		16.750.000.000	**16.750.000.000**		-		16.750.000.000	**16.750.000.000**
294	Kota Singkawang		-		-	-		-		-	-
295	Kab. Kayong Utara		39.856.608.000		-	**39.856.608.000**		39.856.608.000		-	**39.856.608.000**
296	Kab. Kubu Raya		111.498.747.000		26.250.000.000	**137.748.747.000**		110.330.425.000		26.250.000.000	**136.580.425.000**
297	Kab. Sekadau		69.076.050.000		9.000.000.000	**78.076.050.000**		68.763.682.135		4.500.000.000	**73.263.682.135**
298	Kab. Melawi		130.908.954.000		-	**130.908.954.000**		130.908.953.973		-	**130.908.953.973**
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**		-		-	-		-		-	-
300	Kab. Barito Selatan		70.547.743.000		-	**70.547.743.000**		70.221.534.200		-	**70.221.534.200**
301	Kab. Barito Utara		76.315.979.000		27.250.000.000	**103.565.979.000**		76.315.979.000		27.250.000.000	**103.565.979.000**
302	Kab. Kapuas		160.073.599.000		-	**160.073.599.000**		160.073.599.000		-	**160.073.599.000**
303	Kab. Kotawaringin Barat		65.845.758.000		17.750.000.000	**83.595.758.000**		65.247.882.799		17.750.000.000	**82.997.882.799**
304	Kab. Kotawaringin Timur		129.483.060.000		34.750.000.000	**164.233.060.000**		126.501.547.800		34.750.000.000	**161.251.547.800**
305	Kota Palangkaraya		-		36.500.000.000	**36.500.000.000**		-		36.500.000.000	**36.500.000.000**
306	Kab. Barito Timur		73.784.575.000		27.750.000.000	**101.534.575.000**		73.784.575.000		27.750.000.000	**101.534.575.000**
307	Kab. Murung Raya		102.176.180.000		8.750.000.000	**110.926.180.000**		102.176.180.000		8.750.000.000	**110.926.180.000**
308	Kab. Pulang Pisau		78.360.356.000		44.000.000.000	**122.360.356.000**		78.360.356.000		44.000.000.000	**122.360.356.000**
309	Kab. Gunung Mas		87.206.969.000		17.250.000.000	**104.456.969.000**		85.418.505.400		17.250.000.000	**102.668.505.400**
310	Kab. Lamandau		65.425.783.000		26.500.000.000	**91.925.783.000**		65.117.047.152		26.500.000.000	**91.617.047.152**
311	Kab. Sukamara		28.277.201.000		-	**28.277.201.000**		28.277.201.000		-	**28.277.201.000**
312	Kab. Katingan		123.109.956.000		17.250.000.000	**140.359.956.000**		123.109.685.400		17.250.000.000	**140.359.685.400**
313	Kab. Seruyan		84.482.209.000		9.250.000.000	**93.732.209.000**		82.532.152.804		9.250.000.000	**91.782.152.804**
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**		-		25.500.000.000	**25.500.000.000**		-		12.750.000.000	**12.750.000.000**
315	Kab. Banjar		188.881.942.000		17.250.000.000	**206.131.942.000**		188.881.942.000		17.250.000.000	**206.131.942.000**
316	Kab. Barito Kuala		132.904.071.000		34.500.000.000	**167.404.071.000**		132.904.071.000		34.500.000.000	**167.404.071.000**
317	Kab. Hulu Sungai Selatan		105.076.993.000		36.000.000.000	**141.076.993.000**		104.769.835.800		36.000.000.000	**140.769.835.800**
318	Kab. Hulu Sungai Tengah		113.048.455.000		34.750.000.000	**147.798.455.000**		113.048.455.000		34.750.000.000	**147.798.455.000**
319	Kab. Hulu Sungai Utara		155.822.737.000		25.750.000.000	**181.572.737.000**		155.822.737.000		12.875.000.000	**168.697.737.000**
320	Kab. Kotabaru		144.947.050.000		-	**144.947.050.000**		144.947.050.000		-	**144.947.050.000**
321	Kab. Tabalong		93.539.641.000		50.000.000.000	**143.539.641.000**		93.539.641.000		50.000.000.000	**143.539.641.000**
322	Kab. Tanah Laut		93.622.628.000		9.500.000.000	**103.122.628.000**		92.050.239.700		9.500.000.000	**101.550.239.700**
323	Kab. Tapin		88.565.041.000		8.000.000.000	**96.565.041.000**		88.565.041.000		8.000.000.000	**96.565.041.000**
324	Kota Banjarbaru		-		8.750.000.000	**8.750.000.000**		-		8.750.000.000	**8.750.000.000**
325	Kota Banjarmasin		-		26.500.000.000	**26.500.000.000**		-		26.500.000.000	**26.500.000.000**
326	Kab. Balangan		105.312.544.000		27.750.000.000	**133.062.544.000**		104.545.595.000		27.750.000.000	**132.295.595.000**
327	Kab. Tanah Bumbu		105.407.731.000		26.750.000.000	**132.157.731.000**		105.407.728.000		26.750.000.000	**132.157.728.000**
328	**Provinsi Kalimantan Timur**		-		-	-		-		-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
329	Kab. Berau		90.992.725.000		-	**90.992.725.000**		90.871.653.500		-	**90.871.653.500**
330	Kab. Kutai Kartanegara		159.897.070.000		-	**159.897.070.000**		157.684.888.906		-	**157.684.888.906**
331	Kab. Kutai Barat		148.195.189.000		34.750.000.000	**182.945.189.000**		148.195.189.000		34.750.000.000	**182.945.189.000**
332	Kab. Kutai Timur		141.179.638.000		9.000.000.000	**150.179.638.000**		140.507.968.337		9.000.000.000	**149.507.968.337**
333	Kab. Mahakam Ulu		56.364.021.000		-	**56.364.021.000**		55.962.436.600		-	**55.962.436.600**
334	Kab. Paser		106.475.887.000		27.750.000.000	**134.225.887.000**		104.926.336.600		27.750.000.000	**132.676.336.600**
335	Kota Balikpapan		-		26.000.000.000	**26.000.000.000**		-		26.000.000.000	**26.000.000.000**
336	Kota Bontang		-		24.750.000.000	**24.750.000.000**		-		24.750.000.000	**24.750.000.000**
337	Kota Samarinda		-		-	-		-		-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara		28.609.375.000		-	**28.609.375.000**		28.609.375.000		-	**28.609.375.000**
339	**Provinsi Kalimantan Utara**		-		-	-		-		-	-
340	Kab. Bulungan		67.596.565.000		-	**67.596.565.000**		67.596.562.000		-	**67.596.562.000**
341	Kab. Malinau		118.919.224.000		34.250.000.000	**153.169.224.000**		118.919.224.000		34.250.000.000	**153.169.224.000**
342	Kab. Nunukan		166.800.519.000		35.250.000.000	**202.050.519.000**		166.800.519.000		35.250.000.000	**202.050.519.000**
343	Kab. Tana Tidung		34.235.379.000		-	**34.235.379.000**		34.235.379.000		-	**34.235.379.000**
344	Kota Tarakan		-		-	-		-		-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**		-		8.750.000.000	**8.750.000.000**		-		8.750.000.000	**8.750.000.000**
346	Kab. Bolaang Mongondow		141.107.482.000		-	**141.107.482.000**		141.107.482.000		-	**141.107.482.000**
347	Kab. Minahasa		151.906.617.000		18.750.000.000	**170.656.617.000**		151.906.617.000		18.750.000.000	**170.656.617.000**
348	Kab. Sangihe		99.715.800.000		17.250.000.000	**116.965.800.000**		99.715.800.000		17.250.000.000	**116.965.800.000**
349	Kota Bitung		-		18.750.000.000	**18.750.000.000**		-		18.750.000.000	**18.750.000.000**
350	Kota Manado		-		-	-		-		-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud		98.448.136.000		35.250.000.000	**133.698.136.000**		98.448.136.000		35.250.000.000	**133.698.136.000**
352	Kab. Minahasa Selatan		120.399.906.000		27.000.000.000	**147.399.906.000**		120.399.906.000		27.000.000.000	**147.399.906.000**
353	Kab. Minahasa Tenggara		93.325.083.000		43.500.000.000	**136.825.083.000**		93.325.083.000		43.500.000.000	**136.825.083.000**
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		59.926.989.000		-	**59.926.989.000**		59.926.989.000		-	**59.926.989.000**
355	Kota Kotamobagu		17.430.851.000		18.750.000.000	**36.180.851.000**		17.430.851.000		18.750.000.000	**36.180.851.000**
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur		59.104.609.000		17.750.000.000	**76.854.609.000**		58.488.264.000		17.750.000.000	**76.238.264.000**
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		59.560.601.000		8.000.000.000	**67.560.601.000**		59.560.601.000		8.000.000.000	**67.560.601.000**
358	Kota Tomohon		-		25.000.000.000	**25.000.000.000**		-		25.000.000.000	**25.000.000.000**
359	Kab. Minahasa Utara		89.468.459.000		19.000.000.000	**108.468.459.000**		89.468.459.000		19.000.000.000	**108.468.459.000**
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara		75.468.287.000		35.500.000.000	**110.968.287.000**		75.468.287.000		35.500.000.000	**110.968.287.000**
361	**Provinsi Gorontalo**		-		17.000.000.000	**17.000.000.000**		-		17.000.000.000	**17.000.000.000**
362	Kab. Boalemo		72.967.579.000		-	**72.967.579.000**		72.967.579.000		-	**72.967.579.000**
363	Kab. Gorontalo		170.949.169.000		41.000.000.000	**211.949.169.000**		170.949.169.000		41.000.000.000	**211.949.169.000**
364	Kota Gorontalo		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**		-		35.000.000.000	**35.000.000.000**
365	Kab. Pohuwato		79.073.314.000		27.000.000.000	**106.073.314.000**		79.073.314.000		27.000.000.000	**106.073.314.000**
366	Kab. Gorontalo Utara		88.869.533.000		-	**88.869.533.000**		88.869.533.000		-	**88.869.533.000**
367	Kab. Bone Bolango		125.177.663.000		34.250.000.000	**159.427.663.000**		124.875.215.400		34.250.000.000	**159.125.215.400**
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**		-		-	-		-		-	-
369	Kab. Banggai		203.474.376.000		17.250.000.000	**220.724.376.000**		203.474.376.000		17.250.000.000	**220.724.376.000**
370	Kab. Banggai Laut		47.192.680.000		-	**47.192.680.000**		47.192.680.000		-	**47.192.680.000**
371	Kab. Banggai Kepulauan		99.213.710.000		-	**99.213.710.000**		99.213.710.000		-	**99.213.710.000**
372	Kab. Buol		79.718.705.000		33.750.000.000	**113.468.705.000**		79.718.686.925		33.750.000.000	**113.468.686.925**
373	Kab. Toli-toli		76.404.400.000		-	**76.404.400.000**		76.404.399.600		-	**76.404.399.600**
374	Kab. Donggala		123.460.807.000		-	**123.460.807.000**		123.460.807.000		-	**123.460.807.000**
375	Kab. Morowali		90.213.479.000		33.250.000.000	**123.463.479.000**		90.213.479.000		33.250.000.000	**123.463.479.000**
376	Kab Morowali Utara		95.403.798.000		-	**95.403.798.000**		95.403.798.000		-	**95.403.798.000**
377	Kab. Poso		110.953.533.000		-	**110.953.533.000**		110.953.533.000		-	**110.953.533.000**
378	Kota Palu		-		18.750.000.000	**18.750.000.000**		-		18.750.000.000	**18.750.000.000**
379	Kab. Parigi Moutong		207.264.407.000		-	**207.264.407.000**		207.264.406.987		-	**207.264.406.987**
380	Kab. Sigi		127.246.327.000		-	**127.246.327.000**		127.246.327.000		-	**127.246.327.000**
381	Kab. Tojo Una Una		103.574.985.000		33.750.000.000	**137.324.985.000**		103.574.985.000		33.750.000.000	**137.324.985.000**
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**		-		16.000.000.000	**16.000.000.000**		-		8.000.000.000	**8.000.000.000**
383	Kab. Bantaeng		38.832.248.000		9.000.000.000	**47.832.248.000**		38.832.248.000		9.000.000.000	**47.832.248.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
384	Kab. Barru		41.950.855.000		16.500.000.000	**58.450.855.000**		41.950.855.000		16.500.000.000	**58.450.855.000**
385	Kab. Bone		289.886.499.000		17.500.000.000	**307.386.499.000**		289.120.285.200		17.500.000.000	**306.620.285.200**
386	Kab. Bulukumba		95.646.406.000		34.750.000.000	**130.396.406.000**		95.646.406.000		34.750.000.000	**130.396.406.000**
387	Kab. Enrekang		97.769.717.000		-	**97.769.717.000**		97.769.717.000		-	**97.769.717.000**
388	Kab. Gowa		124.707.358.000		26.250.000.000	**150.957.358.000**		123.986.915.999		26.250.000.000	**150.236.915.999**
389	Kab. Jeneponto		85.403.574.000		-	**85.403.574.000**		85.403.574.000		-	**85.403.574.000**
390	Kab. Luwu		166.790.061.000		25.250.000.000	**192.040.061.000**		166.790.061.000		25.250.000.000	**192.040.061.000**
391	Kab. Luwu Utara		143.801.788.000		8.750.000.000	**152.551.788.000**		143.801.788.000		8.750.000.000	**152.551.788.000**
392	Kab. Maros		74.083.395.000		35.750.000.000	**109.833.395.000**		74.083.395.000		35.750.000.000	**109.833.395.000**
393	Kab. Pangkajene Kepulauan		60.274.262.000		8.000.000.000	**68.274.262.000**		60.274.262.000		4.000.000.000	**64.274.262.000**
394	Kab. Pinrang		57.070.425.000		25.750.000.000	**82.820.425.000**		57.070.425.000		25.750.000.000	**82.820.425.000**
395	Kab. Kepulauan Selayar		70.757.748.000		33.250.000.000	**104.007.748.000**		70.757.748.000		33.250.000.000	**104.007.748.000**
396	Kab. Sidenreng Rappang		55.539.074.000		17.000.000.000	**72.539.074.000**		55.539.074.000		17.000.000.000	**72.539.074.000**
397	Kab. Sinjai		59.003.589.000		41.000.000.000	**100.003.589.000**		59.003.588.193		41.000.000.000	**100.003.588.193**
398	Kab. Soppeng		43.861.085.000		17.000.000.000	**60.861.085.000**		43.861.085.000		17.000.000.000	**60.861.085.000**
399	Kab. Takalar		70.305.555.000		-	**70.305.555.000**		70.305.555.000		-	**70.305.555.000**
400	Kab. Tana Toraja		103.514.268.000		-	**103.514.268.000**		103.514.268.000		-	**103.514.268.000**
401	Kab. Wajo		104.219.771.000		18.250.000.000	**122.469.771.000**		103.913.127.626		18.250.000.000	**122.163.127.626**
402	Kota Pare-pare		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**
403	Kab. Toraja Utara		109.601.625.000		34.250.000.000	**143.851.625.000**		109.601.625.000		17.125.000.000	**126.726.625.000**
404	Kota Makassar		-		35.750.000.000	**35.750.000.000**		-		17.875.000.000	**17.875.000.000**
405	Kota Palopo		-		10.250.000.000	**10.250.000.000**		-		10.250.000.000	**10.250.000.000**
406	Kab. Luwu Timur		99.497.559.000		34.250.000.000	**133.747.559.000**		99.497.559.000		34.250.000.000	**133.747.559.000**
407	**Provinsi Sulawesi Barat**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**
408	Kab. Majene		53.384.442.000		34.250.000.000	**87.634.442.000**		53.384.442.000		34.250.000.000	**87.634.442.000**
409	Kab. Mamuju		70.314.731.000		-	**70.314.731.000**		70.314.731.000		-	**70.314.731.000**
410	Kab. Mamuju Tengah		45.226.004.000		16.500.000.000	**61.726.004.000**		45.226.000.000		16.500.000.000	**61.726.000.000**
411	Kab. Polewali Mandar		130.070.147.000		43.500.000.000	**173.570.147.000**		130.070.093.000		43.500.000.000	**173.570.093.000**
412	Kab. Mamasa		124.446.771.000		42.000.000.000	**166.446.771.000**		124.446.771.000		42.000.000.000	**166.446.771.000**
413	Kab. Pasangkayu		48.436.242.000		36.000.000.000	**84.436.242.000**		48.436.242.000		36.000.000.000	**84.436.242.000**
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**		-		16.500.000.000	**16.500.000.000**		-		16.500.000.000	**16.500.000.000**
415	Kab. Buton		63.341.301.000		36.500.000.000	**99.841.301.000**		63.341.301.000		36.500.000.000	**99.841.301.000**
416	Kab. Konawe		201.473.903.000		16.000.000.000	**217.473.903.000**		198.933.402.800		16.000.000.000	**214.933.402.800**
417	Kab. Konawe Kepulauan		65.308.557.000		-	**65.308.557.000**		64.079.694.000		-	**64.079.694.000**
418	Kab. Kolaka		75.174.449.000		16.000.000.000	**91.174.449.000**		75.174.449.000		16.000.000.000	**91.174.449.000**
419	Kab. Kolaka Timur		84.611.627.000		-	**84.611.627.000**		84.611.627.000		-	**84.611.627.000**
420	Kab. Muna		102.572.896.000		-	**102.572.896.000**		101.956.550.400		-	**101.956.550.400**
421	Kota Kendari		-		16.500.000.000	**16.500.000.000**		-		8.250.000.000	**8.250.000.000**
422	Kota Bau-bau		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**		-		25.250.000.000	**25.250.000.000**
423	Kab. Konawe Selatan		225.016.754.000		16.750.000.000	**241.766.754.000**		224.819.174.000		16.750.000.000	**241.569.174.000**
424	Kab. Bombana		90.639.986.000		17.750.000.000	**108.389.986.000**		90.639.985.000		17.750.000.000	**108.389.985.000**
425	Kab. Konawe Utara		110.381.184.000		-	**110.381.184.000**		110.381.183.800		-	**110.381.183.800**
426	Kab. Buton Utara		59.873.876.000		-	**59.873.876.000**		59.873.875.600		-	**59.873.875.600**
427	Kab. Wakatobi		57.444.549.000		16.500.000.000	**73.944.549.000**		57.444.545.400		16.500.000.000	**73.944.545.400**
428	Kab. Kolaka Utara		106.445.883.000		24.000.000.000	**130.445.883.000**		106.445.882.793		24.000.000.000	**130.445.882.793**
429	Kab. Muna Barat		66.818.419.000		-	**66.818.419.000**		66.818.419.000		-	**66.818.419.000**
430	Kab. Buton Tengah		54.296.304.000		-	**54.296.304.000**		54.296.303.999		-	**54.296.303.999**
431	Kab. Buton Selatan		50.847.283.000		-	**50.847.283.000**		50.847.283.000		-	**50.847.283.000**
432	**Provinsi Bali**		-		41.500.000.000	**41.500.000.000**		-		41.500.000.000	**41.500.000.000**
433	Kab. Badung		42.302.590.000		81.250.000.000	**123.552.590.000**		42.302.590.000		81.250.000.000	**123.552.590.000**
434	Kab. Bangli		52.857.670.000		52.000.000.000	**104.857.670.000**		52.857.669.800		52.000.000.000	**104.857.669.800**
435	Kab. Buleleng		107.039.777.000		34.750.000.000	**141.789.777.000**		107.039.777.000		34.750.000.000	**141.789.777.000**
436	Kab. Gianyar		51.971.543.000		50.500.000.000	**102.471.543.000**		51.971.543.000		50.500.000.000	**102.471.543.000**
437	Kab. Jembrana		39.391.724.000		37.250.000.000	**76.641.724.000**		39.391.724.000		37.250.000.000	**76.641.724.000**
438	Kab. Karangasem		64.239.619.000		35.250.000.000	**99.489.619.000**		64.239.619.000		35.250.000.000	**99.489.619.000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
439	Kab. Klungkung		43.276.499.000		34.750.000.000	**78.026.499.000**		43.276.499.000		34.750.000.000	**78.026.499.000**
440	Kab. Tabanan		101.721.992.000		51.000.000.000	**152.721.992.000**		101.721.992.000		51.000.000.000	**152.721.992.000**
441	Kota Denpasar		27.404.975.000		27.250.000.000	**54.654.975.000**		27.404.975.000		27.250.000.000	**54.654.975.000**
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**		-		27.250.000.000	**27.250.000.000**		-		27.250.000.000	**27.250.000.000**
443	Kab. Bima		156.776.861.000		25.250.000.000	**182.026.861.000**		156.776.860.725		25.250.000.000	**182.026.860.725**
444	Kab. Dompu		61.698.788.000		-	**61.698.788.000**		61.698.788.000		-	**61.698.788.000**
445	Kab. Lombok Barat		128.321.278.000		35.750.000.000	**164.071.278.000**		128.321.278.000		35.750.000.000	**164.071.278.000**
446	Kab. Lombok Tengah		155.444.598.000		16.500.000.000	**171.944.598.000**		155.444.598.000		16.500.000.000	**171.944.598.000**
447	Kab. Lombok Timur		252.711.702.000		35.750.000.000	**288.461.702.000**		252.711.702.000		35.750.000.000	**288.461.702.000**
448	Kab. Sumbawa		123.909.408.000		27.750.000.000	**151.659.408.000**		123.909.408.000		27.750.000.000	**151.659.408.000**
449	Kota Mataram		-		38.000.000.000	**38.000.000.000**		-		38.000.000.000	**38.000.000.000**
450	Kab. Lombok Utara		49.433.654.000		36.000.000.000	**85.433.654.000**		49.037.342.000		36.000.000.000	**85.037.342.000**
451	Kota Bima		-		27.750.000.000	**27.750.000.000**		-		27.750.000.000	**27.750.000.000**
452	Kab. Sumbawa Barat		52.509.433.000		35.250.000.000	**87.759.433.000**		52.509.432.996		35.250.000.000	**87.759.432.996**
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**		-		-	-		-		-	-
454	Kab. Alor		139.899.534.000		-	**139.899.534.000**		139.899.534.000		-	**139.899.534.000**
455	Kab. Belu		72.451.173.000		-	**72.451.173.000**		72.451.173.000		-	**72.451.173.000**
456	Kab. Ende		175.257.121.000		-	**175.257.121.000**		175.257.120.198		-	**175.257.120.198**
457	Kab. Flores Timur		155.311.387.000		-	**155.311.387.000**		155.311.387.000		-	**155.311.387.000**
458	Kab. Kupang		136.520.446.000		-	**136.520.446.000**		136.520.446.000		-	**136.520.446.000**
459	Kab. Lembata		114.468.459.000		-	**114.468.459.000**		114.221.367.400		-	**114.221.367.400**
460	Kab. Malaka		95.196.646.000		-	**95.196.646.000**		95.187.554.592		-	**95.187.554.592**
461	Kab. Manggarai		125.785.322.000		-	**125.785.322.000**		125.785.322.000		-	**125.785.322.000**
462	Kab. Ngada		96.524.287.000		-	**96.524.287.000**		95.747.929.863		-	**95.747.929.863**
463	Kab. Sikka		125.012.694.000		26.500.000.000	**151.512.694.000**		125.012.694.000		26.500.000.000	**151.512.694.000**
464	Kab. Sumba Barat		67.192.170.000		-	**67.192.170.000**		67.192.170.000		-	**67.192.170.000**
465	Kab. Sumba Timur		108.473.996.000		17.500.000.000	**125.973.996.000**		108.382.480.500		17.500.000.000	**125.882.480.500**
466	Kab. Timor Tengah Selatan		233.686.745.000		-	**233.686.745.000**		233.686.745.000		-	**233.686.745.000**
467	Kab. Timor Tengah Utara		137.831.056.000		-	**137.831.056.000**		137.831.055.200		-	**137.831.055.200**
468	Kota Kupang		-		-	-		-		-	-
469	Kab. Rote Ndao		91.824.992.000		-	**91.824.992.000**		91.824.992.000		-	**91.824.992.000**
470	Kab. Nagekeo		75.953.714.000		-	**75.953.714.000**		75.953.714.000		-	**75.953.714.000**
471	Kab. Sumba Tengah		59.271.547.000		-	**59.271.547.000**		59.271.547.000		-	**59.271.547.000**
472	Kab. Sumba Barat Daya		186.636.451.000		-	**186.636.451.000**		186.636.451.000		-	**186.636.451.000**
473	Kab. Manggarai Timur		160.856.109.000		-	**160.856.109.000**		160.856.109.000		-	**160.856.109.000**
474	Kab. Sabu Raijua		63.498.620.000		-	**63.498.620.000**		63.498.620.000		-	**63.498.620.000**
475	Kab. Manggarai Barat		127.893.447.000		-	**127.893.447.000**		127.893.447.000		-	**127.893.447.000**
476	**Provinsi Maluku**		-		18.250.000.000	**18.250.000.000**		-		9.125.000.000	**9.125.000.000**
477	Kab. Maluku Tenggara Barat		71.097.358.000		-	**71.097.358.000**		71.097.347.536		-	**71.097.347.536**
478	Kab. Maluku Tengah		150.561.589.000		26.250.000.000	**176.811.589.000**		149.892.385.623		26.250.000.000	**176.142.385.623**
479	Kab. Maluku Tenggara		131.874.165.000		37.750.000.000	**169.624.165.000**		131.874.165.000		37.750.000.000	**169.624.165.000**
480	Kab. Buru		65.863.399.000		26.250.000.000	**92.113.399.000**		65.863.399.000		26.250.000.000	**92.113.399.000**
481	Kota Ambon		30.779.402.000		-	**30.779.402.000**		30.779.402.000		-	**30.779.402.000**
482	Kab. Seram Bagian Barat		86.318.043.000		-	**86.318.043.000**		86.318.043.000		-	**86.318.043.000**
483	Kab. Seram Bagian Timur		140.065.596.000		-	**140.065.596.000**		140.065.596.000		-	**140.065.596.000**
484	Kab. Maluku Barat Daya		93.674.327.000		-	**93.674.327.000**		93.674.327.000		-	**93.674.327.000**
485	Kab. Buru Selatan		74.041.238.000		-	**74.041.238.000**		71.288.799.217		-	**71.288.799.217**
486	Kab. Kepulauan Aru		90.552.385.000		-	**90.552.385.000**		90.552.382.700		-	**90.552.382.700**
487	Kota Tual		28.659.645.000		-	**28.659.645.000**		28.659.645.000		-	**28.659.645.000**
488	**Provinsi Maluku Utara**		-		-	-		-		-	-
489	Kab. Halmahera Tengah		50.445.563.000		-	**50.445.563.000**		50.445.552.472		-	**50.445.552.472**
490	Kab. Halmahera Barat		116.654.285.000		-	**116.654.285.000**		116.654.285.000		-	**116.654.285.000**
491	Kota Ternate		-		16.750.000.000	**16.750.000.000**		-		16.750.000.000	**16.750.000.000**
492	Kab. Halmahera Timur		83.978.431.000		25.750.000.000	**109.728.431.000**		83.978.256.000		25.750.000.000	**109.728.256.000**
493	Kota Tidore Kepulauan		39.930.625.000		27.000.000.000	**66.930.625.000**		39.930.624.988		27.000.000.000	**66.930.624.988**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 *(Audited)*
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
494	Kab. Kepulauan Sula		62.699.592.000		-	**62.699.592.000**		62.699.591.508		-	**62.699.591.508**
495	Kab. Pulau Morotai		65.910.753.000		-	**65.910.753.000**		65.910.752.589		-	**65.910.752.589**
496	Kab. Pulau Taliabu		54.510.776.000		-	**54.510.776.000**		54.510.775.800		-	**54.510.775.800**
497	Kab. Halmahera Selatan		171.935.114.000		28.250.000.000	**200.185.114.000**		171.935.113.200		28.250.000.000	**200.185.113.200**
498	Kab. Halmahera Utara		140.160.498.000		37.750.000.000	**177.910.498.000**		139.257.220.200		37.750.000.000	**177.007.220.200**
499	**Provinsi Papua**	8.020.854.115.000	-		-	**8.020.854.115.000**	8.020.854.115.000	-		-	**8.020.854.115.000**
500	Kab. Yalimo		209.824.398.000		-	**209.824.398.000**		209.824.398.000		-	**209.824.398.000**
501	Kab. Lanny Jaya		246.393.527.000		-	**246.393.527.000**		246.393.527.000		-	**246.393.527.000**
502	Kab. Biak Numfor		180.962.759.000		-	**180.962.759.000**		180.962.758.532		-	**180.962.758.532**
503	Kab. Jayapura		111.970.736.000		25.250.000.000	**137.220.736.000**		111.970.736.000		25.250.000.000	**137.220.736.000**
504	Kab. Jayawijaya		240.932.941.000		16.500.000.000	**257.432.941.000**		240.932.941.000		8.250.000.000	**249.182.941.000**
505	Kab. Merauke		182.467.383.000		18.500.000.000	**200.967.383.000**		182.467.383.000		18.500.000.000	**200.967.383.000**
506	Kab. Mimika		122.773.890.000		-	**122.773.890.000**		121.920.720.800		-	**121.920.720.800**
507	Kab. Nabire		76.884.837.000		-	**76.884.837.000**		76.528.379.028		-	**76.528.379.028**
508	Kab. Paniai		173.404.573.000		-	**173.404.573.000**		173.404.573.000		-	**173.404.573.000**
509	Kab. Puncak Jaya		243.549.531.000		-	**243.549.531.000**		243.549.531.000		-	**243.549.531.000**
510	Kab. Kepulauan Yapen		119.682.949.000		-	**119.682.949.000**		119.682.949.000		-	**119.682.949.000**
511	Kota Jayapura		18.465.060.000		8.500.000.000	**26.965.060.000**		18.465.060.000		8.500.000.000	**26.965.060.000**
512	Kab. Sarmi		83.866.011.000		-	**83.866.011.000**		83.866.011.000		-	**83.866.011.000**
513	Kab. Keerom		85.103.081.000		-	**85.103.081.000**		85.103.081.000		-	**85.103.081.000**
514	Kab. Yahukimo		357.953.032.000		-	**357.953.032.000**		357.953.032.000		-	**357.953.032.000**
515	Kab. Pegunungan Bintang		219.018.657.000		-	**219.018.657.000**		219.018.657.000		-	**219.018.657.000**
516	Kab. Tolikara		365.435.608.000		-	**365.435.608.000**		365.435.608.000		-	**365.435.608.000**
517	Kab. Boven Digoel		107.925.695.000		-	**107.925.695.000**		107.925.694.994		-	**107.925.694.994**
518	Kab. Mappi		135.265.105.000		-	**135.265.105.000**		135.265.105.000		-	**135.265.105.000**
519	Kab. Asmat		184.603.058.000		16.000.000.000	**200.603.058.000**		184.603.058.000		16.000.000.000	**200.603.058.000**
520	Kab. Waropen		83.950.063.000		-	**83.950.063.000**		83.950.063.000		-	**83.950.063.000**
521	Kab. Mamberamo Raya		73.626.016.000		-	**73.626.016.000**		72.393.326.000		-	**72.393.326.000**
522	Kab. Mamberamo Tengah		64.302.828.000		-	**64.302.828.000**		64.302.828.000		-	**64.302.828.000**
523	Kab. Nduga		177.338.214.000		-	**177.338.214.000**		177.338.214.000		-	**177.338.214.000**
524	Kab. Dogiyai		69.721.372.000		-	**69.721.372.000**		65.559.328.403		-	**65.559.328.403**
525	Kab. Intan Jaya		92.186.735.000		-	**92.186.735.000**		92.186.735.000		-	**92.186.735.000**
526	Kab. Puncak		166.578.832.000		-	**166.578.832.000**		166.578.831.974		-	**166.578.831.974**
527	Kab. Deiyai		62.044.921.000		-	**62.044.921.000**		62.044.920.813		-	**62.044.920.813**
528	Kab. Supiori		34.106.161.000		-	**34.106.161.000**		34.106.161.000		-	**34.106.161.000**
529	**Provinsi Papua Barat**	4.008.937.478.000	-		-	**4.008.937.478.000**	4.008.937.478.000	-		-	**4.008.937.478.000**
530	Kab. Sorong		169.164.934.000		8.000.000.000	**177.164.934.000**		169.164.934.000		8.000.000.000	**177.164.934.000**
531	Kab. Manokwari		122.819.328.000		-	**122.819.328.000**		122.819.327.200		-	**122.819.327.200**
532	Kab. Manokwari Selatan		50.765.671.000		-	**50.765.671.000**		50.765.671.000		-	**50.765.671.000**
533	Kab. Fak fak		114.404.235.000		-	**114.404.235.000**		114.404.235.000		-	**114.404.235.000**
534	Kota Sorong		-		-	-		-		-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak		124.105.369.000		-	**124.105.369.000**		124.105.369.000		-	**124.105.369.000**
536	Kab. Sorong Selatan		90.956.708.000		-	**90.956.708.000**		90.956.708.000		-	**90.956.708.000**
537	Kab. Raja Ampat		90.332.849.000		8.750.000.000	**99.082.849.000**		90.332.849.000		4.375.000.000	**94.707.849.000**
538	Kab. Teluk Bintuni		95.889.728.000		43.750.000.000	**139.639.728.000**		95.889.609.400		43.750.000.000	**139.639.609.400**
539	Kab. Teluk Wondama		60.808.826.000		-	**60.808.826.000**		60.808.182.200		-	**60.808.182.200**
540	Kab. Tambrauw		156.933.803.000		-	**156.933.803.000**		156.933.803.000		-	**156.933.803.000**
541	Kab. Maybrat		176.533.271.000		-	**176.533.271.000**		176.533.271.000		-	**176.533.271.000**
542	Kab. Kaimana		77.811.539.000		-	**77.811.539.000**		77.811.539.000		-	**77.811.539.000**
	JUMLAH	**20.059.583.186.000**	**60.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**8.500.000.000.000**	**89.559.583.186.000**	**20.059.583.186.000**	**59.859.408.609.275**	**1.000.000.000.000**	**8.230.750.000.000**	**89.149.741.795.275**

Lampiran 4

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Per 31 Desember 2018

PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)
PER 31 DESEMBER 2018

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	Total sd 2023
1	011	Kementerian Luar Negeri	78.136.003.000	186.606.735.000	179.531.152.000	172.208.630.000	164.586.281.000	781.379.371.202
2	012	Kementerian Pertahanan	510.814.970.000	105.560.000.000				616.726.153.930
3	015	Kementerian Keuangan	739.867.605.000	1.131.320.091.000	756.863.822.000	521.166.728.000	240.356.810.000	3.389.575.056.000
4	024	Kementerian Kesehatan	133.990.135.000	186.366.527.000				320.451.585.733
5	025	Kementerian Agama	439.009.981.000	171.516.651.000				610.680.901.158
6	022	Kementerian Perhubungan	9.751.172.814.000	3.376.298.507.000				13.127.471.321.000
7	033	Kementerian PU Pera	37.607.695.790.000	17.238.491.476.000	12.356.566.593.000	6.446.222.232.000		73.648.976.091.000
8	084	Badan Standardisasi Nasional	50.000.000.000					50.000.000.000
9	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	124.635.000.000	63.450.000.000				188.198.890.000
10	112	BP Batam	40.135.758.000					40.135.758.000
11	118	BP Sabang	81.721.000.000					81.721.000.000
Jumlah			**49.557.179.056.000**	**22.459.609.987.000**	**13.292.961.567.000**	**7.139.597.590.000**	**404.943.091.000**	**92.855.316.128.024**

Lampiran 5

Saldo Kas Di Rekening KPPN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 *(AUDITED)*
	DJPB PUSAT		**5.126.994.858.550**	**2.280.287.123.733**
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	5.126.994.858.550	2.280.287.123.733
2	RPKBUN - PUSAT	902	0	0
	I. NAD			
3	BANDA ACEH	001	0	0
4	LANGSA	002	0	0
5	MEULABOH	003	0	0
6	TAPAK TUAN	074	0	0
7	LHOKSEUMAWE	089	0	-
8	KUTACANE	105	0	-
9	TAKENGON	122	0	-
	II. SUMATERA UTARA			
10	MEDAN I	004	0	-
11	PEMATANG SIANTAR	005	0	-
12	PADANG SIDEMPUAN	006	0	-
13	GUNUNG SITOLI	007	0	-
14	RANTAU PRAPAT	075	0	-
15	TANJUNG BALAI	076	0	-
16	SIBOLGA	106	0	-
17	SIDIKALANG	119	0	0
18	MEDAN II	123	0	0
19	TEBING TINGGI	124	0	-
20	BALIGE	125	0	-
	III. SUMATERA BARAT			
21	PADANG	010	0	-
22	BUKIT TINGGI	011	0	-
23	SIJUNJUNG	077	0	-
24	SOLOK	090	0	-
25	LUBUK SIKAPING	091	0	0
26	PAINAN	142	0	0
	IV. RIAU			
27	PEKANBARU	008	0	-
28	RENGAT	092	0	0
29	DUMAI	120	0	0
	V. JAMBI			
30	JAMBI	012	0	-
31	SUNGAI PENUH	013	0	0
32	MUARA BUNGO	078	0	0
33	KUALA TUNGKAL	143	0	0
34	BANGKO	159	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	VI. SUMATERA SELATAN			
35	PALEMBANG	014	0	-
36	LUBUK LINGGAU	070	0	0
37	BATURAJA	109	0	-
38	LAHAT	144	0	0
39	SEKAYU	160	0	0
	VII. LAMPUNG			
40	BANDAR LAMPUNG	017	0	-
41	KOTABUMI	116	0	-
42	METRO	126	0	-
43	LIWA	145	0	0
	VIII. BENGKULU			
44	BENGKULU	016	0	0
45	MANNA	121	0	0
46	CURUP	146	0	0
47	MUKO MUKO	181	0	0
	IX. BANGKA BELITUNG			
48	PANGKAL PINANG	015	0	-
49	TANJUNG PANDAN	107	0	-
	X. BANTEN			
50	SERANG	020	0	-
51	TANGERANG	127	0	-
52	RANGKASBITUNG	161	0	-
	XI. DKI JAKARTA		**782.358.523**	**1.790.445.550**
53	JAKARTA I	018	0	0
54	JAKARTA II	019	0	-
55	JAKARTA III	088	0	1.764.382.865
56	JAKARTA IV	133	0	-
57	JAKARTA V	139	0	-
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	782.358.523	26.062.685
59	JAKARTA VI	175	0	0
60	JAKARTA VII	182	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	XII. JAWA BARAT			
61	PURWAKARTA	021	0	-
62	BANDUNG I	022	0	-
63	BOGOR	023	0	0
64	CIREBON	024	0	-
65	TASIKMALAYA	025	0	0
66	KARAWANG	086	0	0
67	SUMEDANG	087	0	0
68	BANDUNG II	095	0	-
69	GARUT	096	0	-
70	SUKABUMI	128	0	-
71	KUNINGAN	147	0	0
72	BEKASI	171	0	0
	XIII. JAWA TENGAH			
73	SEMARANG I	026	0	-
74	PURWOREJO	027	0	-
75	SURAKARTA	028	0	-
76	PURWOKERTO	029	0	-
77	PEKALONGAN	072	0	-
78	PATI	097	0	-
79	MAGELANG	115	0	-
80	TEGAL	118	0	-
81	KUDUS	129	0	-
82	CILACAP	130	0	-
83	SEMARANG II	134	0	0
84	KLATEN	148	0	0
85	SRAGEN	162	0	0
86	PURWODADI	163	0	-
87	BANJARNEGARA	164	0	-
	XIV. DIY			
88	YOGYAKARTA	030	0	-
89	WONOSARI	149	0	-
90	WATES	176	0	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	XV. JAWA TIMUR			
91	SURABAYA I	031	0	-
92	MALANG	032	0	-
93	MADIUN	033	0	-
94	KEDIRI	034	0	-
95	BONDOWOSO	035	0	0
96	PAMEKASAN	036	0	-
97	BOJONEGORO	073	0	-
98	MOJOKERTO	098	0	0
99	PACITAN	099	0	0
100	BANYUWANGI	100	0	-
101	JEMBER	131	0	-
102	SURABAYA II	135	0	0
103	BLITAR	150	0	-
104	SIDOARJO	165	0	-
105	TUBAN	166	0	-
	XVI. KALIMANTAN BARAT			
106	PONTIANAK	042	0	-
107	SINTANG	079	0	0
108	SINGKAWANG	093	0	-
109	KETAPANG	094	0	0
110	PUTUSSIBAU	117	0	0
111	SANGGAU	167	0	-
	XVII. KALIMANTAN TENGAH			
112	PALANGKARAYA	043	0	0
113	SAMPIT	044	0	0
114	BUNTOK	080	0	0
115	PANGKALAN BUN	102	0	0
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN			
116	BANJARMASIN	045	0	0
117	KOTABARU	081	0	0
118	BARABAI	110	0	0
119	TANJUNG	151	0	0
120	PELAIHARI	168	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	XIX. KALIMANTAN TIMUR			
121	SAMARINDA	046	0	0
122	BALIKPAPAN	047	0	-
123	TARAKAN	048	0	-
124	NUNUKAN	152	0	0
125	TANJUNG REDEP	153	0	0
	XX. BALI			
126	DENPASAR	037	0	0
127	SINGARAJA	132	0	0
128	AMLAPURA	154	0	0
	XXI. NTB			
129	MATARAM	038	0	0
130	BIMA	071	0	0
131	SUMBAWA BESAR	101	0	0
132	SELONG	169	0	0
	XXII. NTT			
133	KUPANG	039	0	0
134	ENDE	040	0	0
135	WAINGAPU	041	0	0
136	RUTENG	111	0	0
137	ATAMBUA	172	0	0
138	LARANTUKA	174	0	0
	XXIII. SULAWESI SELATAN			
139	MAKASSAR I	054	0	0
140	WATAMPONE	055	0	0
141	BANTAENG	056	0	0
142	PARE-PARE	057	0	0
143	PALOPO	058	0	0
144	MAKASAR II	136	0	0
145	BENTENG	155	0	0
146	MAKALE	170	0	0
147	SINJAI	177	0	0
	XXIV. SULAWESI TENGAH			
148	PALU	051	0	-
149	POSO	052	0	0
150	LUWUK	053	0	0
151	TOLI-TOLI	082	0	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	XXV. SULAWESI TENGGARA			
152	KENDARI	060	0	-
153	BAU-BAU	103	0	-
154	KOLAKA	156	0	0
155	RAHA	157	0	0
	XXVI. GORONTALO			
156	GORONTALO	050	0	-
157	MARISA	180	0	0
	XXVII. SULAWESI UTARA			
158	MANADO	049	0	-
159	TAHUNA	083	0	0
160	KOTAMOBAGU	158	0	-
161	BITUNG	179	0	0
	XXVIII. MALUKU UTARA			
162	TERNATE	062	0	-
163	TOBELO	112	0	0
	XXIX. MALUKU			
164	AMBON	061	0	-
165	TUAL	084	0	-
166	SAUMLAKI	104	0	0
167	MASOHI	173	0	0
	XXX. PAPUA			
168	JAYAPURA	063	0	-
169	BIAK	064	0	-
170	MERAUKE	068	0	-
171	NABIRE	085	0	0
172	WAMENA	113	0	0
173	SERUI	138	0	0
174	T I M I K A	141	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
	XXXI. KEPRI			
175	TANJUNG PINANG	009	0	-
176	B A T A M	137	0	-
	XXXII. SULAWESI BARAT			
177	M A J E N E	059	0	-
178	MAMUJU	178	0	0
	XXXIII. PAPUA BARAT			
179	MANOKWARI	065	0	-
180	S O R O N G	066	0	0
181	FAK-FAK	067	0	0
JUMLAH KAS DI KPPN			**5.127.777.217.073**	**2.282.077.569.283**

Lampiran 6

Kas pada K/L dan BUN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
	BA		31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*	31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*	31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	4.394.113	-	-	7.991.268	267.468.248
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	43.223.870.642	4.198.123.779
4	005	MAHKAMAH AGUNG	273.808.265	41.343.500	172.019.680	61.309.801	83.330.667	247.141.999
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.437.588.539	830.414.895	49.747.260.089	1.648.312.460	64.023.781.991	76.537.993.226
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.134.682.240	6.281.732.577	-	-	43.346.258.768	44.553.108.684
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	143.743.791	143.514.400	4.030.950.000	2.318.750.000	1.129.504.310	9.338.053.629
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	166.373.082.924	119.867.022.901	17.634.868.167	20.772.633.298	49.597.819.355	37.031.523.542
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	513.621.500	13.502.999	-	-	86.891.991.725	38.241.570.044
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.473.362.985	1.294.724.415	-	-	32.906.472.664	36.289.582.072
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.313.040.226	2.533.211.245	3.658.057.948	6.330.715.641	363.024.058.349	471.927.362.187
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	348.601.261	6.915.057.587	1.400.000	651.711.457	16.728.092.179	31.942.760.365
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	487.542.376	70.859.339	-	25.520.000	17.974.532	141.006.450
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	37.944.493	-	26.462.561	3.305.418.786	3.337.319.164
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.703.397.121	7.929.652.381	1.381.754.969	1.241.057.661	37.072.720.984	27.484.286.145
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.424.255.920	17.803.152.339	325.000	75.537.000	222.407.919.463	54.112.301.810
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.659.565.736	1.320.666.799	849.108.715	218.677.700	173.145.297.853	574.442.183.969
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.097.762.414	2.694.462.913	813.089.991	44.176.550	69.233.159.758	60.147.935.567
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	38.350.000	714.208.315	500	5.000.000	433.310.701	89.419.780
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	211.191.900	85.430.900	992.366.000	-	391.775.845.227	335.962.866.982
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	433.086.289	1.040.061.029	498.020.500	1.636.578.500	58.433.019.192	43.939.120.401
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	997.164.079	546.762.090	81.252.337	41.669.445	4.153.747.344	8.905.907.153
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	89.433.535	162.261.960	-	-	39.139.679	36.257.424.764
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	58.450.000	-	-	-	2.245.494.963	2.413.819.878
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	4.861.000	-	-	756.122.835	951.029.083
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	185.843.797	138.770.095	-	-	204.488.113	231.503.520
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	30.996.559	10.000	-	249.085.262	-	369.334.760
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.120.995.548	3.001.316.341	6.790.646.185	66.556.092.999	1.281.396.850.338	790.575.624.052
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	45.651.150	-	-	5.214.488.215	4.219.142.469
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.412.887.953	-	-	2.123.408.012	1.986.463.595
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	95.000	1.027.500	-	-	46.512.282	80.853.400
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	178.812.587	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	63.448	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	262.099.491	4.879.223.807	80.000	10.000.000	8.573.176.162	8.004.257.733
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	205.713.244	659.923.772	-	-	26.811.835.914	542.920.796.056
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	25.043.881	122.832.777	-	-	20.185.135.659	1.265.975.848
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	13.720.600	420.000	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	160.430.233	74.714.000	-	2.883.172	212.857.027	11.940.000
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	122.930.729	716.375.997	1.527.976.500	1.376.826.300	126.473.628.235	741.201.340.537
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	326.927.000	-	-	-	6.811.810
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	472.469.831	284.499.790	-	-	1.519.541.000	4.242.465.945
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	909.613	112.621.575	-	-	13.366.623.268	424.887.604
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	16.831.000	18.938.471	-	-	-	1.182.986

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
	BA		31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*	31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*	31 DESEMBER 2018 *AUDITED*	31 DESEMBER 2017 *AUDITED*
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	71.065.068	-	-	301.703.933	1.255.196.936
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	6.249.325.250	1.696.322.621
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	-	-	1.375.000	250.000	170.000	230.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.199.147.128	3.385.459.380	-	-	20.645.677.672	2.736.090.651.979
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	150.729.965	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.394.382	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	7.616.396	361.996.100	455.548.400	1.809.135.278	403.239.846
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	668.429.983	603.658.983	-	-	548.841.411	332.409.648
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.221.303	124.314.478	894.941.252	894.027.094	2.883.687.144	1.541.139.025
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	88.731.703	4.127.708	-	-	32.025.846	22.830.018
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	3.535.317	387.465.154	38.386.320
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	10.564.192	8.344.850
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	33.049.600	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	5.038.000	-	-	160.675.524	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	45.644.000
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	9.242.309.176	8.685.477.847	2.833.954.982	15.655.000	2.465.438.568	3.032.043.224
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	354.442.744	646.841.213	-	-	13.575.289.272	8.522.072.979
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	500.000.000	299.227.500	852.463	-	13.274.181.027	27.947.696.290
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.244.617.605	2.783.677.454	-	-	7.142.305.426	8.259.964.507
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	6.448.280	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	265.088.934.982	34.683.033.156
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	150.000.000	-	-	-	-	33.455.722
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	42.031	-	-	9.840	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	110.291.608
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	3.661.000	-	-	465.454.036	421.963.906
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	105.945.287.155	121.049.516.851
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	55.078.000	114.322.000	-	-	2.247.800.333	1.746.404.351
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.650.017.080	1.688.396.606	-	-	2.528.755.745	903.253.008
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	54.650.444.304	6.630.389.917	-	-	30.423.399.232	730.131.317.730
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	191.778.834	32.313.100	8.500.000	-	304.983.823	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.700.000	80.892.500	-	1.076.397.138	223.138.219	4.022.885.752
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	3.052.000	22.343.100
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	2.041.278	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
	PENYESUAIAN (Reklasifikasi Dana Kelolaan BLU)						(722.521.164.344)	3.687.119.773
	JUMLAH KAS PADA K/L		**284.832.122.869**	**210.331.016.647**	**92.280.796.378**	**105.738.412.756**	**2.904.645.056.288**	**7.680.309.646.436**
	JUMLAH KAS PADA SATKER BUN		**318.150.600**	**497.147.493**	-	-	**734.083.631.611**	**22.643.658**
	JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN		**285.150.273.469**	**210.828.164.140**	**92.280.796.378**	**105.738.412.756**	**3.638.728.687.899**	**7.680.332.290.094**

Lampiran 7

Belanja Dibayar Di Muka,
Uang Muka Belanja,
& Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8.081.642.144	357.453.807	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.047.125.304	1.095.671.281	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.244.268.080	-	-	-	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	18.806.044.829	18.821.994.720	-	-	15.799.083	334.080.000
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46.339.409.828	70.423.287.306	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10.281.967.652.641	1.541.545.722.838	5.825.359.174.425	10.838.536.884.561	-	11.138.314.702
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.586.621.509	14.616.502.667	-	75.516.187.188	6.258.866	24.546.979
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	403.999.653.767	436.912.535.114	3.191.963.782	3.251.678.938	547.460.256.932	265.793.509.448
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.199.940.494.192	1.183.182.121	-	-	39.400.000	798.368.000
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	1.683.139.314	1.444.469.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	609.884.111	13.691.034.387	65.712.600	-	-	2.318.605
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	13.232.318.730	12.247.000	-	-	656.668.774	199.145.435.459
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	746.624.152.037	2.781.927.171.918	3.239.072.280	-	1.276.144.200	1.006.223.020
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	57.881.942.877	90.593.929.623	-	9.566.508.000	514.275.732	627.111.298
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	110.961.057.652	334.252.428	2.863.054.200	-	453.533.788	10.585.069.823
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	621.810.720	457.050.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	508.490.858	5.000.000	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.715.982.899	3.097.413.072	-	-	6.007.500	867.518.093
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.538.743.092	1.813.676.034	-	-	559.083.651	205.943.307
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.392.000.000	6.657.558.999	8.035.327.500	-	12.469.580.396	3.308.414.845
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	461.096.315	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	58.236.633	133.478.544	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	9.633.438.059	11.678.383.948	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	481.258.001	2.302.234.817	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	4.690.204.581	10.661.747.689	152.800.298	1.958.017.187	26.684.078.461	12.744.529.763
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	415.762.001	575.437.390	-	-	(1.768.108.828)	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	182.011.382	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	225.026.073.712	107.641.492.716	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.616.040.032	1.390.969.539	-	-	11.190.198	16.827.080

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	28.553.827.881	38.698.322.327	-	-	224.200	110.173.600
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	389.100.033	366.399.131	-	-	17.586.730	-
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.710.114.042	1.904.139.050	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	207.086.265	19.044.986.376	-	-	-	2.000.000
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	167.323.892.899	18.446.256.104	1.494.519.431.842	232.068.191.536	19.080.548	55.568.712
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14.190.671.821	816.965.199	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	79.530.000	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	49.500.000	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.234.307.331	869.160.353	-	-	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	-	1.863.514
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	927.000	1.821.500	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.000.000	3.000.000	-	-	13.557.888.534	23.727.143.345
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	25.449.832.216	2.966.488.111	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	99.467.503	7.095.059	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.783.708.900	1.792.897.141	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	155.833.333	115.500.000	-	-	88.405.911	359.821.880
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	153.609.000	136.205.666	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	37.950.000	42.166.664	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	556.499.787	87.258.983
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	82.848.542	-	13.793.480.760	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.650.000	19.950.000	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.211.250.276	1.296.695.876	-	-	15.440.600	21.762.859
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7.423.010.101	11.565.716.696	-	56.875.000	21.816.188	791.880.736
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	177.468.835.532	5.123.314.000	29.731.456.507	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	2.209.379.781	1.299.149.210	-	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.052.169.757	1.704.255.477	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	340.575.001	442.033.463	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.848.213.548.984	486.181.132.504	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	529.976.513	644.147.062	-	-	-	-
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	259.589.052	314.677.984	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	882.592.499	717.308.000	-	-	-	-

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	497.751.375	951.377.875	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.113.505.376	3.120.991.906	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	12.350.000	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	27.818.764.946	28.046.814.084
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	5.976.000	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	249.816.402.819	64.607.256.433	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	-	294.034.000	320.409.000	22.946.250	152.310.000
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	60.412	97.774.871	-	22.054.746.964	4.339.517.000	15.010.768.716
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	3.466.610	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	106.203.147.477	87.257.669.877	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	3.084.017.500	4.185.855.852	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**23.667.667.801.258**	**6.045.121.028.182**	**7.356.819.377.069**	**11.213.060.954.881**	**637.147.289.481**	**576.867.095.851**
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	1.750.000.084	3.453.385.539	-	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	135.664.283	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BA BUN			**1.750.000.084**	**3.589.049.822**	-	-	-	-
TOTAL			**23.669.417.801.342**	**6.048.710.078.004**	**7.356.819.377.069**	**11.213.060.954.881**	**637.147.289.481**	**576.867.095.851**

Lampiran 8

Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2018

1. Berdasarkan Jenis Pajak
2. Berdasarkan Jenis dan Umur Pajak
3. Penyisihan Pajak Per Kualitas
4. Piutang Pajak Daluarsa

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.179.013.937.280
115122	Piutang PPh Pasal 22	513.491.595.695
115123	PPh Pasal 22 Impor	56.267.402.423
115124	Piutang PPh Pasal 23	1.274.118.662.166
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.583.276.185.064
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	16.109.153.823.702
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Final	1.818.771.827.092
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	23.743.183.930.888
115132	PPN Impor	317.942.525.280
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	504.887.065.463
115142	PPnBM Impor	2.051.369.198
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004.670
115154	Piutang PBB Kehutanan	611.275.366.842
115155	Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958.747
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	21.618.657.418
115161	Cukai Hasil Tembakau	8.869.155.688.606
115162	Cukai Etil Alkohol	12.120.000
115163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.098.196.600
115164	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	28.458.154.707
115169	Pendapatan Cukai Lainnya	12.667.767.967
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.025.634.020
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443.940
115174	Bunga Penagihan PPN	794.282.304
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193.213.126.394
115181	Bea masuk	1.076.661.519.002
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.083.214.902.034
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	372.162.006.946
115185	Pajak/Pungutan Ekspor	482.125.830.727
115186	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.065.266.082
115187	Pendapatan Bunga Bea Keluar	536.564.390
115191	Bea Masuk Andidumping	61.483.362.000
115193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.617.543.000
Jumlah Piutang Pajak		**81.477.055.227.031**
116112	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(15.608.454.939.722)
116113	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974.419)
116114	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(452.316.382.119)
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.811.730)
116116	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Meterai	(157.090.888.152)
116117	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.375.801)
116118	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495.412)
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		**(44.487.442.867.354)**
Jumlah Piutang Pajak Netto		**36.989.612.359.677**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

A. PIUTANG PAJAK

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	3 sd 4 thn	4 sd 5 thn	diatas 5 th	JUMLAH
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.080.540.080.479	2.895.854.841.741	2.010.181.854.415	148.842.177.991	9.628.877.858	449.157.611.453	6.594.205.443.937
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	474.643.029.343	2.875.424.875.691	1.459.610.315.773	62.605.091.978	20.151.946.267	22.102.862.140	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	28.074.826.814	49.016.964.745	59.245.826.216	56.428.325.682	-	447.182.937	193.213.126.394
115154	Piutang PBB Kehutanan	207.635.950.688	107.579.175.222	94.156.820.685	90.508.276.732	51.536.505.831	59.858.637.684	611.275.366.842
115153	Piutang BB Perkebunan	527.831.074.037	171.886.216.340	183.511.051.028	171.412.171.563	159.947.865.124	87.794.626.578	1.302.383.004.670
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.221.500.975.010	403.763.336.770	544.337.881.644	1.098.247.149.405	351.158.568.692	1.414.387.047.227	6.033.394.958.748
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	10.420.812.684	2.025.795.171	6.695.913.504	2.476.136.059	-	-	21.618.657.418
115121	Piutang PPh Psl. 21	442.797.162.841	209.550.476.948	124.835.877.894	128.883.034.367	98.709.543.051	174.237.842.184	1.179.013.937.285
115122	Piutang PPh Psl. 22	67.341.920.022	10.485.897.489	2.583.984.710	6.292.581.855	5.199.743.111	421.587.468.508	513.491.595.695
115124	Piutang PPh Psl. 23	427.725.860.874	115.067.041.116	104.569.364.445	111.487.605.700	140.419.276.337	374.849.513.691	1.274.118.662.163
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	3.632.261.544.934	2.641.233.262.622	2.706.150.308.618	1.718.199.267.662	1.288.704.344.884	4.122.605.095.003	16.109.153.823.723
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	444.723.459.965	208.093.102.767	163.878.354.466	322.937.817.230	172.576.669.096	271.066.781.541	1.583.276.185.065
115127	Piutang PPh Psl. 26	402.550.218.186	44.190.288.737	99.773.990.653	708.952.475.108	96.037.405.572	340.685.006.936	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	1.002.697.280.331	278.761.678.359	146.662.088.365	151.441.418.068	174.009.156.312	65.200.205.646	1.818.771.827.081
115131	Piutang PPN	9.005.647.665.974	3.678.593.702.313	2.103.445.901.963	2.216.740.633.823	2.127.934.042.025	4.610.821.984.793	23.743.183.930.891
115141	Piutang PPn BM	56.079.979.507	1.244.368.167	6.801.303.365	223.860.195.407	2.782.803.469	214.118.415.548	504.887.065.463
115172	Piutang PTLL	1.965.556.020	-	60.078.000	-	-	-	2.025.634.020
Jumlah		**20.034.437.397.709**	**13.692.771.024.198**	**9.816.500.915.744**	**7.219.314.358.630**	**4.698.796.747.629**	**12.628.920.281.869**	**68.090.740.725.779**

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	di atas 3 thn	JUMLAH
115181	Piutang Bea Masuk	315.030.034.889	23.838.810.476	11.914.412.000	725.878.261.638	1.076.661.519.002
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	38.524.987.000	-	-	22.958.375.000	61.483.362.000
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.482.431.000	2.135.112.000	-	-	3.617.543.000
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	233.103.852.975	28.973.440.000	2.816.953.000	1.818.320.656.059	2.083.214.902.034
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	21.484.040.975	1.610.850.760	660.214.000	348.406.901.210	372.162.006.945
115185	Piutang Pungutan ekspor	328.280.567.944	185.078.026	523.640	153.659.661.117	482.125.830.727
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	28.267.000	-	-	16.036.999.081	16.065.266.082
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	3.703.000	84.000	532.777.390	536.564.390
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.798.112.540.440	1.063.360.000	-	69.979.788.166	8.869.155.688.606
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	12.120.000	-	-	-	12.120.000
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	1.023.511.000	20.000.000	-	27.414.643.707	28.458.154.707
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	183.891.200	285.127.600	2.160.000	12.196.589.167	12.667.767.967
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	30.387.995.777	2.444.185.872	879.022.000	22.556.198.773	56.267.402.423
115142	Piutang PPnBM Impor	198.000	-	-	2.051.171.198	2.051.369.198
115132	Piutang PPN Impor	213.114.100.573	6.460.668.782	5.543.185.000	92.824.570.925	317.942.525.280
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	311.607.000	10.982.000	-	471.693.304	794.282.304
Jumlah		**9.981.080.145.773**	**67.031.318.516**	**21.816.553.640**	**3.316.386.483.337**	**13.386.314.501.266**

JUMLAH PIUTANG PAJAK, BEA DAN CUKAI (A+B)	**81.477.055.227.045**
Penyesuaian Berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang LK BA 015	**(14)**
JUMLAH PIUTANG PERPAJAKAN & BEA CUKAI	**81.477.055.227.031**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

1. Direktorat Jenderal Pajak **(dalam Rupiah)**

Akun	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115173	Bunga Penagihan PPh	397.425.607	60.898.381.678	504.413.767.813	4.896.625.621.989	5.462.335.197.087
115174	Bunga Penagihan PPN	359.316.555	56.092.307.245	385.918.334.822	3.508.941.237.865	3.951.311.196.487
115175	Bunga Penagihan PPnBM	26.554.257	2.311.342.125	20.673.038.295	123.442.777.143	146.453.711.820
115154	PBB Kehutanan	1.038.179.752	20.173.599.596	71.022.391.294	59.858.637.684	152.092.808.326
115153	PBB Perkebunan	2.637.185.800	35.407.936.955	165.680.018.379	87.794.626.578	291.519.767.712
115155	PBB Pertambangan	11.107.504.878	94.628.415.223	724.702.859.078	1.416.204.113.522	2.246.642.892.701
115159	PBB Sektor Lainnya	52.104.063	872.170.875	1.238.068.033		2.162.342.971
115121	PPh Psl. 21	1.003.904.699	26.832.106.065	121.065.345.127	467.197.913.427	616.099.269.318
115122	PPh Psl. 22	165.141.622	2.731.706.422	9.812.438.618	433.520.592.764	446.229.879.426
115124	PPh Psl. 23	1.184.431.678	15.378.726.341	96.325.111.926	690.331.218.187	803.219.488.132
115125	PPh Psl. 25 Badan	6.692.502.158	205.871.462.640	2.199.091.291.784	8.289.200.352.712	10.700.855.609.294
115126	PPh Psl. 25 OP	924.908.874	26.868.094.948	123.654.901.726	882.139.130.734	1.033.587.036.282
115127	PPh Psl. 26	1.254.457.733	14.108.422.635	53.364.306.285	1.193.482.740.266	1.262.209.926.919
115128	PPh Psl.4 Ayat (2)	1.777.199.249	63.197.985.142	172.868.789.872	484.616.741.956	722.460.716.219
115131	PPN	17.517.523.790	568.105.754.233	2.301.938.532.913	9.923.213.149.560	12.810.774.960.496
115141	PPn BM	237.888.675	319.189.306	4.409.305.426	445.298.826.524	450.265.209.931
115172	PTLL	46.800	146.674.002	248.334.000	52.866.000	447.920.802
	Grand Total	**46.376.276.190**	**1.193.944.275.431**	**6.956.426.835.391**	**32.901.920.546.911**	**41.098.667.933.923**

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	s.d 1 th	1-2 th	2-3 th	diatas 3 th	Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
115181	Piutang Bea Masuk	1.571.733.641	2.374.888.548	4.989.959.000	728.556.128.696	**737.492.709.885**
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	192.624.935	-	-	22.958.375.000	**23.150.999.935**
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	7.412.155	213.511.200	-	-	**220.923.355**
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.165.005.595	2.897.344.000	1.383.476.500	1.818.110.407.677	**1.823.556.233.772**
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	107.362.954	160.905.176	313.559.500	348.445.268.230	**349.027.095.860**
115185	Piutang Pungutan ekspor	1.641.402.840	2.160.903	-	153.823.653.757	**155.467.217.499**
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	141.335	-	-	16.036.999.081	**16.037.140.416**
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	43.300	-	536.131.390	**536.174.690**
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	43.990.562.702	106.336.000	-	69.979.788.166	**114.076.686.868**
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	60.600	-	-	-	**60.600**
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	**3.098.196.600**
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	4.767.555	-	-	27.504.643.707	**27.509.411.262**
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	54.695	27.816.760	-	12.378.661.367	**12.406.532.822**
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	151.745.197	244.418.587	77.327.000	23.319.523.319	**23.793.014.104**
115142	Piutang PPnBM Impor	990	-	-	2.051.171.198	**2.051.172.188**
115132	Piutang PPN Impor	1.065.055.934	646.066.878	304.779.000	97.861.112.111	**99.877.013.923**
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.558.034	1.098.200	-	471.693.304	**474.349.539**
		49.899.489.163	**6.674.589.552**	**7.069.101.000**	**3.325.131.753.603**	**3.388.774.933.317**

PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	DALUARSA
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.979.152.867.319
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.386.274.519.962
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	6.072.574.178
115154	Piutang PBB Kehutanan	217.840.784.822
115153	Piutang PBB Perkebunan	194.284.410.409
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.886.102.453.558
115159	PBB Sektor Lainnya	-
115121	Piutang PPh Pasal 21	477.478.783.157
115122	Piutang PPh Pasal 22	32.819.090.366
115124	Piutang PPh Pasal 23	548.923.318.695
115125	Piutang PPh Pasal 25 Badan	6.192.327.443.680
115126	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	685.306.722.705
115127	Piutang PPh Pasal 26	353.277.160.761
115128	Piutang PPh Final	324.113.343.842
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	6.190.664.770.095
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	71.088.938.090
115172	Piutang PTLL	4.618.450
Jumlah		**23.545.731.800.089**

Lampiran 9

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2017 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	170.026.803	(850.135)	169.176.668	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	600.181.033	(15.375.905)	584.805.128	493.439.437	(24.890.698)	468.548.739
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	616.722.457	(79.594.140)	537.128.317	3.626.968.686	(25.439.867)	3.601.528.819
4	005	MAHKAMAH AGUNG	918.553.121	(4.592.765)	913.960.356	902.540.921	(4.512.704)	898.028.217
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.658.347.583.931	(11.389.499.015.869)	6.268.848.568.062	17.207.138.324.097	(11.232.408.079.064)	5.974.730.245.033
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	9.834.118	(49.170)	9.784.948
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	33.844.804.945	(4.905.287.529)	28.939.517.416	37.112.398.138	(1.081.373.246)	36.031.024.892
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	51.407.086.714	(257.614.420)	51.149.472.294	48.238.263.965	(241.191.323)	47.997.072.642
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	456.088.556.143	(32.578.121.269)	423.510.434.874	464.652.140.360	(35.088.135.064)	429.564.005.296
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386.127.641.921	(347.983.315.237)	38.144.326.684	389.792.042.282	(359.843.265.606)	29.948.776.676
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	106.065.442.231	(45.572.869.279)	60.492.572.952	55.583.122.513	(45.673.329.718)	9.909.792.795
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	101.880.036.002	(2.408.637.087)	99.471.398.915	1.308.819.636	(312.781.522)	996.038.114
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	56.789.334.387	(27.054.979.774)	29.734.354.613	55.259.785.609	(27.567.081.593)	27.692.704.016
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.659.967.368.426	(13.715.443.026.585)	944.524.341.841	11.795.354.469.701	(10.099.483.949.336)	1.695.870.520.365
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	847.089.111.102	(266.148.929.509)	580.940.181.593	274.210.888.813	(22.455.062.296)	251.755.826.517
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.150.450.806	(10.752.255)	2.139.698.551	323.373.693	(44.882.550)	278.491.143
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.317.031.629	(3.417.159.202)	26.899.872.427	41.694.452.251	(5.475.319.552)	36.219.132.699
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	16.032.073.364	(2.421.177.379)	13.610.895.985	10.598.392.702	(2.630.248.439)	7.968.144.263
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	120.649.943	(603.250)	120.046.693	70.357.193	(351.786)	70.005.407
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	343.275.773	(1.716.386)	341.559.387	336.267.961	(157.491.481)	178.776.480
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.999.519.410.852	(3.636.250.700.963)	363.268.709.889	3.604.825.051.714	(3.208.649.715.591)	396.175.336.123
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	57.096.652.401	(19.683.633.005)	37.413.019.396	55.776.488.794	(19.647.685.249)	36.128.803.545
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	393.573.107.028	(34.881.416.800)	358.691.690.228	174.387.359.767	(33.768.081.146)	140.619.278.621
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	184.217.101	(921.084)	183.296.017	694.956.249	(3.474.780)	691.481.469
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	449.026.084	(2.245.132)	446.780.952	129.505.616	(647.529)	128.858.087
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	25.289.572.755	(126.447.863)	25.163.124.892	31.562.247.418	(157.811.237)	31.404.436.181
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.879.053.586	(444.927.415)	3.434.126.171	3.016.921.085	(440.616.754)	2.576.304.331
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	119.788.093.963	(64.042.573.002)	55.745.520.961	166.409.433.378	(101.845.812.986)	64.563.620.392
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	97.892.269.367	(97.393.704.417)	498.564.950	91.764.183.638	(89.845.174.398)	1.919.009.240
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	241.323.805	-	241.323.805	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 *(A UDITED)*			31 DESEMBER 2017 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	834.372.539	(4.171.863)	830.200.676	19.954.100	(99.771)	19.854.329
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	1.145.882.259	(5.729.410)	1.140.152.849
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	2.018.000	(10.090)	2.007.910
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.621.948.090	(57.584.671)	2.564.363.419	1.946.347.573	(81.560.901)	1.864.786.672
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	3.516.480	(17.582)	3.498.898	154.281.400	-	154.281.400
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.065.256.942	(2.543.903.682)	521.353.260	4.073.366.909	(2.550.287.482)	1.523.079.427
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.323.688.942.817	(2.198.455.907.576)	125.233.035.241	2.405.493.494.580	(2.175.923.549.755)	229.569.944.825
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.752.094.238	(59.576.595)	6.692.517.643	44.254.772.350	(247.089.986)	44.007.682.364
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.746.515.029	(13.732.576)	2.732.782.453	377.604.756	(1.888.024)	375.716.732
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	71.735.340	(358.676)	71.376.664	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	29.563.380	-	29.563.380	38.406.235	(192.031)	38.214.204
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	287.628.443	(1.438.145)	286.190.298	14.135.582.951	(175.617.083)	13.959.965.868
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	14.895.514	(74.477)	14.821.037	964.895.514	(4.824.477)	960.071.037
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	12.218.691.442	(61.133.287)	12.157.558.155	7.958.019.645	(39.646.723)	7.918.372.922
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	425.000	(2.125)	422.875	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	40.350.361.621	(201.751.809)	40.148.609.812	2.808.079.592	(14.040.399)	2.794.039.193
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	236.837.860	(1.184.189)	235.653.671	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	4.879.096.474	(1.747.572.299)	3.131.524.175	5.864.453.726	(2.818.851.034)	3.045.602.692
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.362.560.602	(1.812.098.394)	2.550.462.208	3.385.333.470	(1.807.212.254)	1.578.121.216
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	35.100.915.315	(29.888.966.967)	5.211.948.348	53.303.623.314	(49.226.404.090)	4.077.219.224
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	108.908.698	(544.543)	108.364.155	8.767.698.427	(43.838.495)	8.723.859.932
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.585.146.089	(153.885.795)	1.431.260.294	2.512.459.030	(42.474.833)	2.469.984.197
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.101.085.944	(21.681.407)	1.079.404.537	1.809.585.944	(9.047.930)	1.800.538.014
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	26.040.828	(130.204)	25.910.624	58.468.470	(292.343)	58.176.127
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	485.956.341	(2.429.782)	483.526.559	158.216.952	(791.085)	157.425.867
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.194.544.373	(313.662.276)	880.882.097	706.503.121	(307.953.706)	398.549.415

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2017 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	10.034.043.078	(171.690.419)	9.862.352.659	22.535.809.851	(231.443.690)	22.304.366.161
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	30.406.745	(152.034)	30.254.711	303.002.210	(1.515.011)	301.487.199
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	576.147.537.379	(10.677.075.615)	565.470.461.764	523.774.435.781	(17.036.892.655)	506.737.543.126
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	225.846.455	(1.129.232)	224.717.223	105.479.044	(527.395)	104.951.649
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	114.048.605	(570.243)	113.478.362	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	2.573.110.780	(2.562.196.346)	10.914.434
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	306.213.128	(296.573.750)	9.639.378
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	101.308.655	(506.544)	100.802.111	81.797.154	(408.986)	81.388.168
73	107	BADAN SAR NASIONAL	30.341.969.149	(27.167.783.497)	3.174.185.652	28.928.600.000	(27.322.670.000)	1.605.930.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	162.347.404.463	(152.173.372.020)	10.174.032.443	159.528.084.343	(145.344.844.188)	14.183.240.155
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	646.249.000	(3.231.245)	643.017.755	549.388.956	(2.746.944)	546.642.012
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	37.014.633	(185.073)	36.829.560	119.447.063	(597.235)	118.849.828
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.966.135.668	-	1.966.135.668	2.031.729.289	-	2.031.729.289
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	6.990.000	(34.950)	6.955.050
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	1.019.999.998	-	1.019.999.998
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.051.472.500	(1.166.621.888)	884.850.612	3.369.035.985	(1.134.557.081)	2.234.478.904
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	101.396.470.471	(89.403.169.333)	11.993.301.138	123.983.091.557	(84.078.585.153)	39.904.506.404
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.768.746.963	(1.523.968.203)	244.778.760	1.213.035.410	(11.992.724)	1.201.042.686
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	545.277.384	(2.726.387)	542.550.997	1.281.793.530	(4.034.298)	1.277.759.232
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	73.474.787	(367.374)	73.107.413
JUMLAH PADA K/L			**42.436.309.628.220**	**(32.208.264.178.309)**	**10.228.045.449.911**	**37.946.995.596.919**	**(27.798.207.844.367)**	**10.148.787.752.552**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	133.806.951.655.973	(93.997.385.751.924)	39.809.565.904.049	120.673.577.411.630	(99.456.395.011.878)	21.217.182.399.752
TOTAL			**176.243.261.284.193**	**(126.205.649.930.233)**	**50.037.611.353.960**	**158.620.573.008.549**	**(127.254.602.856.245)**	**31.365.970.152.304**

Lampiran 10

Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2018

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian Tahun 2017	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018			
1	2		15	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan							
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	8.150.345,00	62.432.303.026,78	324.604.591,00	72.289.864.957,85	140.797.811.123,91	137.790.863.417,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	173.803.487,00	53.693.721.137,21	1.012.429.346,00	238.261.158.483,21	106.107.201.031,41	12.793.849.516,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	382.021.799,00	105.445.778.465,52	271.508.051,00	691.445.343.015,52	136.297.409.195,04	3.174.736.969.836,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	527.736.991,00	8.939.838.669,00	9.090.909,00	34.047.118.415,19	172.736.782.621,00	167.755.048.520,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	523.820.349,00	52.269.852.048,83	18.181.818,00	99.160.235.937,83	157.450.001.984,00	102.652.378.353,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	0,00	9.507.058.537,00	0,00	40.693.058.537,00	6.760.484.884,70	296.070.151.329,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	291.480.270,00	276.328.490.911,96	10.306.543.092,00	618.658.110.271,76	1.638.279.007.000,00	1.514.708.324.567,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	2.068.322.313,00	366.250.312.955,15	7.724.410.996,00	1.231.361.941.344,80	1.015.640.110.944,00	455.987.574.027,73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	0,00	97.482.364.439,79	0,00	196.785.083.820,68	181.953.841.474,06	702.613.939.485,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	370.997.961,00	28.025.558.872,00	0,00	34.995.693.472,00	114.546.599.155,04	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	2.036.818.273,00	69.792.196.192,42	13.074.954.600,00	214.816.754.392,42	56.733.811.676,21	364.101.506.306,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	498.784.053,00	46.854.867.581,52	283.417.291,00	65.594.964.972,63	92.182.282.117,24	615.489.525.946,95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	0,00	90.034.069.938,00	0,00	210.993.999.999,67	81.323.394.608**	0,00
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	39.484.546,00	83.326.130.673,00	731.691.677,00	363.181.822.350,00	238.376.301.422,00	148.288.406.976,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		**6.921.420.387,00**	**1.350.382.543.448,18**	**33.756.832.371,00**	**4.114.785.149.970,56**	**4.057.861.644.628,61**	**7.774.153.631.587,39**

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian Tahun 2017	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018			
1	2		15	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan							
1	PT Bank Asiatic		2.678.511.707,00	83.700.289.552,00	685.569.126,00	89.385.858.678,00		797.193.365.765,83
2	PT Bank Dagang Bali		73.707.577.815,00	490.159.813.294,00	3.998.645.569,00	494.158.458.863,00		837.358.452.614,24
3	PT Bank Global Internasional		481.500.000,00	325.276.936.482,00	529.650.000,00	325.806.586.482,00		478.427.683.913,51
4	PT Bank Ratu		41.817.985.352,00	71.817.985.352,00	0,00	71.817.985.352,00		0,00
5	PT Bank Prasidha Utama		0,00	16.898.914.545,52	0,00	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		**118.685.574.874,00**	**987.853.939.225,52**	**5.213.864.695,00**	**1.002.067.803.920,52**		**2.319.215.146.892,06**

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI	5.116.852.953.891,08		10.093.368.778.479,40

Lampiran 11

Rincian Aset Kredit Eks BPPN & Eks PT PPA
Per 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (*Audited*)

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	18.157.554.088.107,60	26.708.951.618.345,30	28.583.268.405.495,70	**73.449.774.111.948,60**

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	542.894.417,41	7.861.654.058.514,21	541.235.832,35	7.332.663.056.677,80
Rupiah	7.707.129.407.177,64	7.707.129.407.177,64	7.410.962.766.853,05	7.410.962.766.853,05
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
		16.521.936.747.405,50		**15.630.528.231.942,20**

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.584,87	410.631.705.502,47	28.356.584,87	384.175.011.818,76
Rupiah	1.224.986.625.699,63	1.224.986.625.699,63	1.228.619.059.526,81	1.228.619.059.526,81
		1.635.618.331.202,10		**1.612.794.071.345,57**

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (*Audited*)

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	571.251.002,28	8.272.285.764.016,68	569.592.417,22	7.716.838.068.496,56
Rupiah	8.932.116.032.877,27	8.932.116.032.877,27	8.639.581.826.379,86	8.639.581.826.379,86
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
Jumlah		**18.157.555.078.607,60**		**17.243.322.303.287,80**

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018	Mutasi TA 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00	0,00	577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00	0,00	155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00	0,00	170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00	0,00	4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	0,00	0,00	0,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00	0,00	136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00	0,00	596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,00	0,00	509.986.363.636,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791,18	0,00	7.831.110.763.791,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00	0,00	188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00	0,00	790.557.000.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (*Audited*)

Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703,00	0,00	2.525.651.574.703,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00	0,00	70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00	0,00	406.415.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669,00	0,00	4.893.525.874.669,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00	0,00	424.656.000.000,00
KAHARUDIN ONGKO	Bank Arya Panduartha (BBK	359.435.826.603,76		0,00
SUJANTO GONDOKUSUMO	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,32		0,00
HINDARTO TANTULAR/ANTON TANTULAR	Bank Central Dagang (BBKU	1.470.120.709.878,01		0,00
SJAMSUL NURSALIM	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,00		0,00
Jumlah		**26.708.951.618.345,30**	**0,00**	**23.586.482.694.981,20**

Catatan:

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Rupiah	11.364.155.398.555,00	11.364.155.398.555,00	11.484.758.087.138,00	11.484.758.087.138,00
Dollar Amerika	996.655.658,92	14.432.570.596.820,50	996.655.658,92	13.502.690.867.048,20
Yen Jepang	998.413.744,00	130.907.117.885,93	998.413.744,00	120.027.702.841,69
Deutschmark	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro **	436.387,00	7.226.459.623,25	436.387,00	7.057.957.510,94
Dollar Australia	1.332.783,00	13.609.433.720,07	1.332.783,00	14.070.576.638,07
Poundsterling**	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**25.948.469.006.604,80**		**25.128.605.191.176,90**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (*Audited*)

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.988,65	382.356.159.640,65	26.403.988,65	357.721.238.230,20
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00
Penyerahan Aset Kredit 2016 yang belum tercatat pada KPKNL	Rupiah	0,00	0,00	1.623.424.334,00	1.623.424.334,00
Total			**2.634.799.398.890,90**		**2.611.787.901.814,45**

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2018
TOTAL	4.021.040.786.202,22	5.203.783.891.104,09	**9.224.824.677.306,31**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.508,72	1.546.751.938.774,32	106.812.508,56	1.447.095.865.964,48
Dollar Singapore	79.397,45	841.848.780,43	79.397,45	804.576.441,50
Rupiah	2.448.509.128.092,74	2.448.509.128.092,74	2.448.683.794.112,41	2.448.683.794.112,41
Yen Jepang	141.216.722,50	18.515.644.692,26	141.216.722,50	16.976.848.432,19
Deutchmark	758.512,78	6.422.225.862,48	758.512,78	6.272.476.375,18
Jumlah		**4.021.040.786.202,22**		**3.919.833.561.325,76**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	873.811.488.440,40	0,00
Jumlah		**3.610.641.294.586,29**	**2.736.829.806.145,89**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	562.187.637.792,00	38.822.432,00	525.966.308.736,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	13.903.092.252,00	960.092,00	13.007.326.416,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	35.261.235,00	2.435,00	32.989.380,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	369.844.855.848,00	25.540.008,00	346.016.028.384,00
Grand Total				**1.568.573.257.460,00**		**1.507.625.063.249,00**

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875,00	24.561.586.875,00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46	252.041,46
Total			**24.569.339.057,80**	**24.569.339.057,80**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53

Lampiran 12

Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	82.051.392	(410.257)	81.641.135	340.360.952	(1.701.805)	338.659.147
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	250.000.000	(1.250.000)	248.750.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	106.226.996	(13.919.051)	92.307.945	41.446.296	(13.595.148)	27.851.148
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.041.454.419	(867.137.012)	174.317.407	1.166.591.178	(923.482.693)	243.108.485
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	20.262.450	(101.312)	20.161.138	20.292.450	(101.462)	20.190.988
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.509.229.574	(92.546.148)	18.416.683.426	18.462.979.574	(92.314.898)	18.370.664.676
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	34.908.690.307	(33.289.023.154)	1.619.667.153	32.967.279.648	(31.997.124.048)	970.155.600
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	337.616.858	(1.688.082)	335.928.776	594.027.312	(2.970.136)	591.057.176
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	239.190.122	(1.195.951)	237.994.171	327.629.565	(1.638.147)	325.991.418
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	24.227.611.824	(17.783.976.531)	6.443.635.293	25.046.109.301	(20.110.981.249)	4.935.128.052
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.230.000	(9.483.750)	746.250	41.430.000	(9.639.750)	31.790.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	-	-	-	149.580.000	(747.900)	148.832.100
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	840.073.333	(4.200.367)	835.872.966	38.800.000	(194.000)	38.606.000
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	542.781.764	(3.055.728)	539.726.036	1.394.732.983	(18.834.387)	1.375.898.596
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	5.392.000	-	5.392.000	-	-	-
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12.866.689.195	(5.473.790.297)	7.392.898.898	13.239.021.735	(5.475.901.960)	7.763.119.775
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.491.101.667	(9.422.471.963)	68.629.704	9.540.598.800	(9.428.507.114)	112.091.686
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.827.151	(109.626)	23.717.525	21.874.020	(109.370)	21.764.650
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	188.021.714	(940.110)	187.081.604	119.184.500	(595.923)	118.588.577
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	3.000.000	(15.000)	2.985.000	1.800.000	(9.000)	1.791.000
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	10.890.000	(54.451)	10.835.549
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	87.737.143	(438.686)	87.298.457
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19.710.338.388	(18.330.000.346)	1.380.338.042	19.771.175.874	(18.535.693.127)	1.235.482.747
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	1.410.788	(7.054)	1.403.734
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	319.962.078	(1.742.310)	318.219.768	170.472.504	(852.363)	169.620.141
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.396.980	(21.985)	4.374.995	4.396.980	(21.985)	4.374.995
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.269.849.548	(762.633.498)	507.216.050	1.411.215.548	(291.953.978)	1.119.261.570
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	235.891.869	(1.749.460)	234.142.409	1.306.351.645	(6.531.759)	1.299.819.886
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.839.984	(24.200)	4.815.784	4.839.984	(24.200)	4.815.784
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	2.315.762	(11.579)	2.304.183
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	12.009.672	(60.049)	11.949.623	85.477.700	(427.388)	85.050.312
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	88.468.100	(442.338)	88.025.762	88.468.100	(442.338)	88.025.762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.433.680	(197.168)	39.236.512	39.363.480	(196.818)	39.166.662
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.356.464	(61.782)	12.294.682	15.000.000	(75.000)	14.925.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.762.067.846	(27.364.195)	1.734.703.651	1.279.172.095	(17.972.106)	1.261.199.989
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	101.904.000	(101.904.000)	-	76.428.000	(7.642.800)	68.785.200
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	21.136.000	(105.680)	21.030.320	89.052.000	(445.260)	88.606.740
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	198.741.111	(993.706)	197.747.405	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.100.434.041	(10.502.170)	2.089.931.871	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	4.104.000	(20.520)	4.083.480	4.104.000	(20.520)	4.083.480
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	12.000.000	(60.000)	11.940.000	17.676.256	(88.381)	17.587.875
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.956	(310.344)	61.758.612	62.068.956	(310.344)	61.758.612
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	3.499.500	(17.498)	3.482.002
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	873.971.250	(4.369.856)	869.601.394	114.411.250	(572.056)	113.839.194
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	101.466.324	(507.332)	100.958.992	94.823.324	(474.117)	94.349.207
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	162.032.709	(6.282.664)	155.750.045	154.541.454	(772.707)	153.768.747
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	531.468.683	(245.934.342)	285.534.341	4.092.473.190	(404.806.069)	3.687.667.121
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	192.580.000	(12.362.900)	180.217.100	355.423.277	(179.991.300)	175.431.977
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	4.060.000	(20.300)	4.039.700	5.220.000	(26.100)	5.193.900
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	664.701.149	(456.883.215)	207.817.934	630.728.070	(504.575.823)	126.152.247
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	181.451.044	(148.918.027)	32.533.017	207.548.644	(147.181.447)	60.367.197
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	188.620.978	(464.100)	188.156.878	20.000.000	-	20.000.000
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	165.144.000	(825.720)	164.318.280	14.589.000	(72.945)	14.516.055
TOTAL			**132.923.950.960**	**(87.509.960.349)**	**45.413.990.611**	**134.439.614.178**	**(88.612.532.992)**	**45.827.081.186**

Lampiran 13

Persediaan
Per 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	11.286.396.319	7.483.566.263
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	23.226.536.663	18.560.434.078
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.843.612.528	15.887.954.266
4	005	MAHKAMAH AGUNG	23.353.040.743	18.069.171.901
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	468.311.929.929	340.677.490.552
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	596.880.169.078	567.141.947.498
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	170.851.287.822	279.686.794.522
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	63.604.896.877	47.636.453.144
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	57.801.718.824.526	48.618.947.782.931
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	411.488.366.832	547.645.750.308
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	368.543.028.343	376.664.699.351
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	889.356.431.578	553.130.416.941
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	312.622.732.637	410.615.589.704
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.027.676.296.737	843.424.910.555
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.189.041.789.589	7.022.058.287.675
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.232.210.766.192	1.428.258.639.787
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	81.382.238.309	67.960.460.498
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	416.157.184.324	18.111.579.777
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	451.765.319.891	478.497.291.788
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	973.194.410.140	536.427.131.856
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	187.113.345.598	851.505.706.652
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10.117.302.555.177	4.398.225.644.611
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.038.950	26.603.867
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	781.297.894	680.594.496
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.828.380.778	1.624.989.732
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	29.104.736.750	37.730.094.642
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.633.934.371	759.008.096
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.809.327.268.968	1.802.435.378.484
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	64.301.362.339	2.072.111.304
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.426.066.348	19.220.776.479
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.474.233.641	757.741.009
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	11.181.461.354	2.473.967.943
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	611.821.950	1.290.554.583
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	3.647.425
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	29.209.225.390	28.528.286.333
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.003.556.532.748	482.466.729.156
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	82.903.600.336	75.566.143.863
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.868.690.299	26.187.007.204

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.442.895.214	16.728.626.689
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.823.228.307.786	4.980.541.918.826
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	155.641.585.196	121.624.164.634
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	249.894.626	329.336.508
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.156.865.494	2.338.336.351
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.902.363.191	39.811.236.832
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	581.713.720.524	399.770.817.759
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	623.579.528.663	639.967.637.712
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	527.832.004	280.124.178
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	114.812.864.174	97.229.087.022
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.050.272.584.033	355.853.933.684
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.052.266.170	1.619.210.613
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.772.854.264	980.510.696
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	81.013.520.968	92.518.037.456
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	66.781.667.698	60.036.135.675
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	14.646.643.458	13.534.849.078
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	57.318.366.099	54.955.291.470
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131.413.937.869	130.224.546.891
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	111.866.751	182.863.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3.252.036.988	2.789.540.385
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.640.228.608	2.930.769.434
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.268.275.397	1.385.672.418
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11.054.864.115	9.655.127.921
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.843.219.941	6.963.618.456
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.881.570.620.917	36.526.527.839
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	498.832.224.112	180.369.796.059
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.098.833.089.639	842.295.854.659
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	790.360.885	956.735.193
68	100	KOMISI YUDISIAL	484.539.172	600.075.136
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	234.196.545.653	317.831.111.871
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	45.677.965.002	45.558.182.496
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.467.142.113
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.060.478.766	766.276.037
73	107	BADAN SAR NASIONAL	157.465.334.995	152.152.104.712
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	368.339.492	302.686.686
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	90.363.242.495	227.111.413.322
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	837.246.364	878.410.028
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.331.227.996	12.903.122.585
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	18.626.355.115	16.260.345.536
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	438.355.222	446.582.121

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.763.974.162	1.899.303.426
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	169.498.213	187.822.279
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.855.554.074	4.849.642.361
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.544.479.692	4.383.256.789
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	206.172.928	231.005.071
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	15.325.391.914	4.672.748.150
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	321.591.664	370.324.846
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	874.545.140	1.425.205.930
JUMLAH PADA K/L			**112.585.262.923.923**	**82.262.262.310.961**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	5.394.004.262	**2.039.495.859.264**
TOTAL			**112.590.656.928.185**	**84.301.758.170.225**

Lampiran 14

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2018

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Penjelasan Mutasi Lain-Lain

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
1	Perum Perhutani	Audited 2018		3.314.309	12.737.655	16.051.964	987.073	1.508.755	4.004.081	2.586.303	(1.334.148)	-	(778.185)	10.594.425	11.068.395	(7.585)	11.060.810	100,00	11.068.395
2	Perum Perikanan indonesia	Audited 2018		526.825	384.205	911.030	235.930	259.396	495.326	341.434	-	-	(7.852)	82.122	415.704		415.704	100,00	415.704
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.693.415	9.731.783	13.425.198	3.292.897	4.033.407	7.326.304	1.051.567	1.080	-	3.356.563	1.185.032	5.594.242	504.652	6.098.894	100,00	5.594.242
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018		367.685	464.887	832.572	73.367	290.816	364.183	350.537	-	-	3.713	114.139	468.389		468.389	100,00	468.389
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018		16.874.548	107.445.587	124.320.135	26.625.084	41.473.116	68.098.200	34.059.877	798	-	27.917.220	(10.849.788)	51.128.107	5.093.828	56.221.935	100,00	51.128.107
6	Perum Bulog	Audited 2018		35.226.557	8.216.346	43.442.903	31.685.112	952.025	32.637.137	12.522.387	-	-	(251.053)	(1.373.357)	10.897.977	(92.211)	10.805.766	100,00	10.897.977
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018		531.067	335.935	867.002	119.812	18.627	138.439	31.701	4.186	-	1.366	690.695	727.948	615	728.563	100,00	727.948
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018		751.254	565.535	1.316.789	162.931	79.403	242.334	164.548	-	-	(49.606)	949.513	1.064.455	10.000	1.074.455	100,00	1.064.455
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018		57.647.384	81.256.095	138.903.479	24.524.445	48.352.148	72.876.593	25.000.000	-	-	29.325.012	11.496.803	65.821.815	205.071	66.026.886	100,00	65.821.815
10	PT BioFarma (Persero)	Audited 2018		2.391.930	5.009.229	7.401.159	745.305	693.015	1.438.320	2.000.000	-	-	1.880.115	2.082.724	5.962.839		5.962.839	100,00	5.962.839
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018		5.369.548	4.090.879	9.460.427	3.774.305	2.329.663	6.103.968	555.400	67.436	-	315.478	2.263.680	3.201.994	154.465	3.356.459	90,03	2.882.755
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018		532.688	137.723	670.411	524.660	39.516	564.176	75.000	-	-	8.982	22.253	106.235		106.235	100,00	106.235
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018		237.112	323.190	560.302	729.294	1.229.172	1.958.466	534.000	1.008	-	-	(1.933.172)	(1.398.164)		(1.398.164)	100,00	-
14	PT Pertani (Persero)	Audited 2018		864.330	368.257	1.232.587	316.786	589.373	906.159	1.021.315	39.721	-	21.971	(756.633)	326.374	54	326.428	100,00	326.374
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018		529.530	557.924	1.087.454	98.320	89.187	187.507	600.000	158.829	-	-	141.118	899.947		899.947	100,00	899.947
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2018		867.493	574.857	1.442.350	827.237	118.466	945.703	309.927	81.120	-	51	105.549	496.647		496.647	80,66	400.595
17	PT Pertamina (Persero)	Audited 2018		335.296.028	582.965.403	918.261.431	202.341.304	306.063.610	508.404.914	234.464.825	(13.384.730)	5.808.619	8.798.134	145.043.759	380.730.607	29.125.910	409.856.517	100,00	380.730.607
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018		265.291	383.319	648.610	73.863	22.920	96.783	250.000	106	-	(22.639)	324.359	551.826	1	551.827	100,00	551.826
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018		51.193	27.708	78.901	44.477	2.578	47.055	15.555	-	-	799	15.479	31.833	13	31.846	100,00	31.833
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018		176.411	9.557.980	9.734.391	197.812	1.055.433	1.253.245	101.700	82	-	8.494.589	(115.225)	8.481.146		8.481.146	100,00	8.481.146
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018		383.742	1.463.131	1.846.873	206.112	143.121	349.234	880.000	297.808	-	(697)	320.502	1.497.614	25	1.497.639	100,00	1.497.614
22	PT Sarinah (Persero)	Audited 2018		225.314	140.650	365.964	92.892	33.558	126.450	46.850	181	-	-	192.436	239.467	47	239.514	100,00	239.467
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018		436.171	2.864.888	3.301.059	143.978	1.007.781	1.151.759	156.200	-	-	(19.244)	2.009.170	2.146.126	3.174	2.149.300	100,00	2.146.126
24	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018		545.065	403.799	948.864	376.477	46.390	422.867	375.000	-	-	(1.449)	152.446	525.997		525.997	100,00	525.997
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.824.092	5.006.433	8.830.525	3.742.337	1.064.780	4.807.117	455.023	-	-	2.016.658	1.576.348	4.048.029	(24.621)	4.023.408	100,00	4.048.029
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2018		90.241.787	1.288.830.707	1.379.072.494	157.895.954	407.177.934	565.073.888	109.826.526	274.330	19.905.003	665.849.322	107.844.462	903.699.643	540.750	904.240.393	100,00	903.699.643
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018		623.263	1.542.380	2.165.643	523.488	134.587	658.075	363.945	111.968	-	(5.220)	1.036.875	1.507.568		1.507.568	73,15	1.102.786
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018		116.293	202.634	318.927	42.232	30.571	72.803	25.863	-	-	1.210	219.051	246.124		246.124	51,09	125.745
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018		356.864	146.242	503.105	57.202	18.699	75.901	150.000	-	-	-	277.204	427.204		427.204	60,00	256.323
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018		219.124	106.433	325.557	127.510	24.281	151.791	40.000	86.696	-	(979)	48.049	173.766		173.766	60,00	104.260
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018		519.539	97.745	617.284	264.826	171.503	436.329	43.749	-	-	(88)	137.294	180.955		180.955	100,00	180.955
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018		1.921.786	3.133.518	5.055.304	972.415	1.568.754	2.541.169	363.573	(64.059)	-	(34.941)	2.238.594	2.503.167	10.968	2.514.135	100,00	2.503.167
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018		11.458	30.341	41.799	18.517	2.602	21.119	40.000	16.783	-	-	(36.103)	20.680		20.680	100,00	20.680
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018		150.553	65.267	215.820	60.664	102.349	163.013	9.116	32.033	-	(45.586)	57.298	52.861	(54)	52.807	100,00	52.861
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		16.007.685	35.148.205	51.155.890	8.202.837	10.216.757	18.419.594	593.152	1.458.258	-	526.896	28.613.779	31.192.085	1.544.211	32.736.296	51,01	15.911.083
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018		1.358.329	4.179.750	5.538.079	636.408	1.428.000	2.064.408	993.254	1.270.607	-	(47.054)	1.256.828	3.473.635	36	3.473.671	75,57	2.625.026
37	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2018		12.556	597.760	610.316	26.018	570.882	596.900	133.713	-	-	5.305	(125.602)	13.416		13.416	61,48	8.248
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018		134.868	176.467	311.335	154.976	37.004	191.980	14.400	-	-	122.178	(17.223)	119.355		119.355	100,00	119.355
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		43.268.000	206.196.000	249.464.000	46.261.000	42.632.000	88.893.000	4.953.000	2.455.000	-	507.000	90.995.000	98.910.000	18.393.000	117.303.000	52,09	51.522.219
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.202.265	2.916.418	6.118.683	2.083.120	3.774.535	5.857.655	3.885.661	12.450	-	214.595	(3.851.645)	261.061	(33)	261.028	100,00	261.061
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018		177.771	583.093	760.864	92.612	233.840	326.452	456.694	3.656	-	(645)	(25.293)	434.412		434.412	100,00	434.412
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2018		1.163.339	1.370.564	2.533.903	3.360.530	285.145	3.645.675	976.600	635	-	639.989	(2.728.996)	(1.111.772)		(1.111.772)	99,95	-
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018		294.245	355.976	650.221	468.408	459.473	927.881	240.936	51	-	141.118	(666.699)	(284.594)	6.934	(277.660)	100,00	-
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018		45.085.189	120.593.500	165.678.689	19.951.262	69.734.787	89.686.049	54.177.941	(18.199.606)	-	14.294.178	11.601.760	61.874.273	14.118.367	75.992.640	100,00	61.874.273
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018		14.332.135	47.911.808	62.243.943	23.150.413	13.024.646	36.175.059	14.301.045	1.768.666	-	19.890.725	(9.768.492)	26.191.944	(123.060)	26.068.884	80,00	20.953.555
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018		415.712	419.039	834.751	394.635	211.371	606.006	340.916	9.564	-	288.056	(409.707)	228.829	(84)	228.745	100,00	228.829
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018		18.386	20.503	38.889	10.035	26.438	36.473	27.200	-	-	-	(24.784)	2.416		2.416	100,00	2.416
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		976.780	852.894	1.829.674	1.485.562	122.545	1.608.107	350.000	1.229	-	714.643	(844.823)	221.049	518	221.567	100,00	221.049
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.573.898	973.464	4.547.362	2.841.044	511.293	3.352.337	762.915	3.221	-	480.374	(51.485)	1.195.025		1.195.025	100,00	1.195.025

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
50	PT Dahana (Persero)	Audited 2018		1.246.663	548.595	1.795.258	847.933	5.802	853.735	250.000	6.397	-	37.644	611.355	905.396	36.127	941.523	100,00	905.396
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018		4.302.343	1.834.498	6.136.841	3.916.151	1.307.617	5.223.768	175.001	-	-	293.365	347.690	816.056	97.017	913.073	100,00	816.056
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018		5.607.213	846.073	6.453.286	3.460.700	1.619.765	5.080.465	1.367.542	-	-	(332.510)	337.774	1.372.806	15	1.372.821	100,00	1.372.806
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		9.476.902	3.524.670	13.001.572	7.499.418	2.053.619	9.553.038	21.167.765	74.751	-	1.877.200	(19.671.182)	3.448.534	-	3.448.534	100,00	3.448.534
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		25.429.544	4.689.071	30.118.615	18.964.304	4.869.039	23.833.343	356.085	2.588.834	-	336.728	2.992.838	6.274.485	10.787	6.285.272	51,00	3.199.987
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018		757.365	298.849	1.056.214	573.041	293.063	866.104	44.285	-	-	230.564	(84.739)	190.110		190.110	100,00	190.110
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018		3.195.197	2.108.469	5.303.666	2.469.145	1.259.287	3.728.432	161.555	-	-	348.399	1.055.023	1.564.977	10.257	1.575.234	100,00	1.564.977
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018		11.813.856	70.604.744	82.418.600	31.081.475	31.138.139	62.219.614	3.628.936	3.997.085	-	(604.893)	9.887.378	16.908.506	3.290.480	20.198.986	70,00	11.835.954
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		66.989.131	57.402.451	124.391.582	56.799.726	38.704.738	95.504.464	1.357.390	5.552.026	-	744.295	10.347.404	18.001.115	10.886.003	28.887.118	66,04	11.887.936
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		43.555.496	15.674.505	59.230.001	28.251.952	13.762.734	42.014.686	896.995	7.829.094	-	597.600	5.479.925	14.803.614	2.411.701	17.215.315	65,05	9.629.751
60	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2018		14.813.363	49.720.044	64.533.407	16.937.331	36.980.162	53.917.493	6.100.000	-	-	467.494	4.044.182	10.611.676	4.238	10.615.914	100,00	10.611.676
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018		37.534.483	15.014.668	52.549.151	26.522.885	9.710.654	36.233.539	619.990	4.710.054	-	2.161.391	5.274.318	12.765.753	3.549.859	16.315.612	51,00	6.510.534
62	Perum Perumnas	Audited 2018		9.286.525	751.689	10.038.214	5.537.213	1.114.806	6.652.019	1.000	1.960.375	-	281.870	1.130.450	3.373.695	12.500	3.386.195	100,00	3.373.695
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018		5.222.126	1.040.702	6.262.828	4.244.016	447.058	4.691.074	1.251.843	-	-	379.213	(72.211)	1.558.845	12.909	1.571.754	100,00	1.558.845
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018		41.695	55.568	97.263	9.894	30.771	40.665	19.000	-	-	(6)	37.604	56.598		56.598	100,00	56.598
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018		2.622.950	11.397.903	14.020.853	2.677.740	4.863.536	7.541.276	1.700.000	-	527.133	(158.093)	3.380.016	5.449.056	1.030.521	6.479.577	100,00	5.449.056
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018		24.554.336	26.878.541	51.432.877	5.498.194	29.500.227	34.998.421	1.444.029	(290.771)	-	(112.143)	14.106.256	15.147.371	1.287.085	16.434.456	100,00	15.147.371
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018		6.462.869	24.042.847	30.505.716	3.574.313	16.576.088	20.150.402	1.018.953	-	-	38.741	8.021.542	9.079.236	1.276.078	10.355.314	100,00	9.079.236
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018		2.474.141	7.899.027	10.373.168	1.171.231	3.219.673	4.390.904	3.112.085	1.466	-	105.840	2.749.791	5.969.182	13.082	5.982.264	100,00	5.969.182
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018		250.538	256.683	507.221	151.029	189.213	340.242	7.000	97.707	-	2.199	60.073	166.979		166.979	100,00	166.979
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018		93.099	49.701	142.800	72.757	23.314	96.071	15.000	-	-	(6.403)	38.132	46.729		46.729	100,00	46.729
71	Perum Damri	Audited 2018		187.492	976.953	1.164.445	123.755	299.641	423.396	19.700	631.987	-	(61.627)	150.989	741.049		741.049	100,00	741.049
72	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2018		103.124	203.844	306.968	152.756	107.877	260.633	231.769	271.039	-	5.620	(462.093)	46.335		46.335	100,00	46.335
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018		3.588.962	2.036.168	5.625.130	944.952	30.349	975.301	1.541.350	(516.195)	975.506	29.778	2.619.390	4.649.829		4.649.829	100,00	4.649.829
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018		5.115.607	26.493.309	31.608.916	7.614.989	8.941.702	16.556.691	6.414.412	22.963	-	374.350	8.235.636	15.047.361	4.864	15.052.225	100,00	15.047.361
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018		5.507.894	33.012.920	38.520.814	4.796.882	10.106.948	14.903.830	7.000.000	4.434.924	881.023	(281.400)	11.582.175	23.616.722	262	23.616.984	100,00	23.616.722
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018		277.981	116.131	394.112	191.001	24.540	215.541	25.000	1.051	-	109.262	43.258	178.571		178.571	100,00	178.571
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018		409.796	86.852	496.648	271.238	3.057	274.295	50.000	-	-	(6.872)	179.225	222.353		222.353	100,00	222.353
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018		93.263	88.089	181.352	75.815	32.597	108.412	2.000	-	-	58.791	12.149	72.940		72.940	100,00	72.940
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		267.836.821	540.735.190	808.572.011	648.417.017	49.781.205	698.198.222	9.054.807	14.568.468	-	13.406.777	71.046.832	108.076.884	2.296.905	110.373.789	60,00	64.846.130
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018		506.332.915	695.919.179	1.202.252.094	932.732.816	84.558.973	1.017.291.789	11.666.667	17.316.192	-	25.134.972	127.084.686	181.202.517	3.757.788	184.960.305	60,00	108.721.510
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		1.244.965.192	51.933.101	1.296.898.293	976.428.738	135.194.224	1.111.622.962	6.167.291	273.715	-	13.396.148	163.130.389	182.967.543	2.307.788	185.275.331	57,27	104.785.512
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018		78.698.153	227.738.041	306.436.194	242.801.199	39.794.547	282.595.746	5.295.000	2.054.454	-	2.776.675	13.714.319	23.840.448		23.840.448	60,00	14.304.269
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018		13.080.077	3.160.920	16.240.997	3.476.714	1.468.603	4.945.317	7.638.733	-	-	65.792	3.591.140	11.295.665	15	11.295.680	100,00	11.295.665
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018		36.294.884	12.004.794	48.299.678	4.168.576	42.532.078	46.700.654	200.000	-	-	(425.308)	1.824.332	1.599.024		1.599.024	100,00	1.599.024
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018		6.657.406	6.818.445	13.475.851	2.740.270	7.567.605	10.307.875	425.000	-	-	52.923	2.681.998	3.159.921	8.055	3.167.976	100,00	3.159.921
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018		448.214	36.369.453	36.817.667	7.890.605	39.168.213	47.058.818	235.000	3.037	-	2.599.898	(13.084.937)	(10.247.002)	5.851	(10.241.151)	100,00	-
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018		17.283.179	764.242	18.047.421	7.985.446	218.054	8.203.500	6.611.000	-	-	(153.409)	3.386.330	9.843.921		9.843.921	100,00	9.843.921
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018		14.090.106	1.127.942	15.218.048	4.302.085	235.771	4.537.856	5.000.000	13.504	-	(485.220)	6.094.650	10.622.934	57.258	10.680.192	100,00	10.622.934
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018		7.802.025	889.671	8.691.696	5.245.082	541.699	5.786.781	878.358	270	-	961.153	1.065.119	2.904.900	15	2.904.915	100,00	2.904.900
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018		30.493.116	201.372.920	231.866.036	835.572	221.311.778	222.147.350	100.000	400.000	-	(4.651.725)	13.861.551	9.709.826	8.860	9.718.686	100,00	9.709.826
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		19.650.351	43.655.653	63.306.004	35.494.620	14.630.946	50.125.566	18.974.845	340.688	-	(878.880)	(5.933.971)	12.502.682	677.756	13.180.438	60,54	7.569.123
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018		2.886.301	3.675.537	6.561.838	444.787	223.999	668.786	7.065.092	564.951	-	689.012	(2.428.388)	5.890.667	2.385	5.893.052	100,00	5.890.667
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018		8.950.940	30.044.819	38.995.759	7.251.784	13.443.920	20.695.704	12.268.743	-	-	(222.788)	6.060.149	18.106.104	193.951	18.300.055	100,00	18.106.104
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.193.126	949.867	4.142.993	877.717	2.041.220	2.918.937	272.500	-	-	3.652	66.642	342.794	881.262	1.224.056	100,00	342.794
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		492.462	332.203	824.665	112.710	99.655	212.365	255.000	-	-	23.153	334.147	612.300		612.300	100,00	612.300
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018		1.691.247	1.604.169	3.295.416	1.862.660	8.627	1.871.287	701.480	85.927	-	492.740	143.837	1.423.984	145	1.424.129	100,00	1.423.984
97	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018		1.857.663	21.035	1.878.698	1.547.854	13.207	1.561.061	102.000	-	-	(1.429)	215.618	316.189	1.448	317.637	100,00	316.189
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018		12.637.306	5.611.264	18.248.570	4.310.355	12.044.636	16.354.991	1.300.000	-	-	12.563	571.171	1.883.734	9.845	1.893.579	100,00	1.883.734
99	PT PANN (Persero)	Audited 2018		404.857	482.122	886.979	279.536	4.161.848	4.441.384	45.997	192.066	-	-	(3.792.468)	(3.554.405)	-	(3.554.405)	93,04	-
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018		43.525.272	9.265.916	52.791.188	24.053.213	8.621.486	32.674.699	6.250.000	-	-	5.813.506	8.050.805	20.114.311	2.178	20.116.489	100,00	20.114.311
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018		1.755.617	1.743.825	3.499.442	596.352	398.705	995.057	300.000	1.182	-	796.140	1.408.257	2.505.579	(1.194)	2.504.385	95,00	2.380.300

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018		968.612	607.377	1.575.989	362.952	68.833	431.785	25.000	105	-	202.417	918.958	1.146.480	(2.276)	1.144.204	85,12	975.884
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018		2.128.738	5.189.614	7.318.352	974.642	120.368	1.095.010	3.857.489	181.766	620.969	(10.597)	1.430.429	6.080.056	143.286	6.223.342	100,00	6.080.056
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018		411.846	530.916	942.762	176.391	294.470	470.861	2.015.044	1.427	-	(583)	(1.543.996)	471.892	9	471.901	73,23	345.567
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018		7.280.098	4.464.403	11.744.501	5.440.230	1.042.228	6.482.458	2.996.688	(308.059)	-	503.517	1.952.285	5.144.431	117.612	5.262.043	100,00	5.144.431
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018		18.860	123.209	142.068	1.204.146	-	1.204.146	47.007	94.583	-	-	(1.203.667)	(1.062.077)		(1.062.077)	63,82	-
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018		209.959	415.834	625.793	349.445	46.717	396.162	198.870	650	-	189.491	(159.380)	229.631		229.631	100,00	229.631
108	PT Primissima (Persero)	Audited 2018		85.573	106.081	191.654	135.180	14.120	149.300	13.000	2.276	-	86.359	(59.281)	42.354		42.354	52,79	22.359
109	PT Survai Udara Penas (Persero)	Audited 2018		71.774	69.654	141.428	93.949	165.157	259.106	13.000	-	-	-	(131.924)	(118.924)	1.246	(117.678)	100,00	-
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018		52.680	16.682	69.362	45.958	24.415	70.373	11.000	-	-	3.355	(15.366)	(1.011)		(1.011)	100,00	-
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018		114.809	763.338	878.147	1.726.923	141.612	1.868.535	798.994	-	-	-	(1.789.382)	(990.388)		(990.388)	96,65	-
112	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018		6.088	694.520	700.608	1.101.355	218.000	1.319.355	415.073	1.976	-	618.400	(1.654.196)	(618.747)		(618.747)	100,00	-
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Audited 2017		58.354	726.086	784.440	7.411.031	3.138.419	10.549.450	1.964.556	-	-	45.162	(11.774.863)	(9.765.145)	135	(9.765.010)	96,99	-
114																			
	TOTAL			3.318.559.382	4.799.045.691	8.117.605.073	3.738.333.226	1.864.547.606	5.604.389.085	684.161.267	42.336.924	28.718.253	852.511.266	847.605.893	2.455.333.602	103.869.100	2.559.202.702		2.180.049.007

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	Perum Perhutani	Audited 2018	5.361.968	4.763.783	598.185	214.556	-	812.741	18.334	794.407	140.428	653.979	-	96.586	653.954	750.538
2	Perum Perikanan indonesia	Audited 2018	1.002.330	970.860	31.470	77.123	69.190	39.403	26.884	12.519	(13.477)	25.996	(8.097)	17.899	25.996	17.899
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.186.962	5.110.712	76.250	600.923	207.835	469.338	312.809	156.529	(31.771)	188.300	20.731	209.031	152.764	162.735
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018	580.137	577.922	2.215	13.398		15.613	-	15.613	1.528	14.085	(1.935)	12.150	14.085	12.150
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018	33.320.129	32.086.962	1.233.167	3.288.372		4.521.539	2.849.657	1.671.882	757.145	914.737	7.833.992	8.748.729	870.197	7.775.477
6	Perum Bulog	Audited 2018	28.436.610	27.342.710	1.093.900	764.688	912.412	946.176	2.198.158	(1.251.982)	(290.196)	(961.786)	126.286	(835.500)	(923.229)	(797.391)
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018	501.058	365.050	136.008	38.593	27.858	146.743	-	146.743	32.915	113.828	636	114.464	113.828	114.464
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018	825.545	602.060	223.485	31.255	18.209	236.531	-	236.531	69.935	166.596	54.062	220.658	166.596	220.658
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018	69.448.132	60.002.067	9.446.065	83.304	148.695	9.380.674	3.456.859	5.923.815	1.710.438	4.213.377	(18.329)	4.195.048	4.180.476	4.162.147
10	PT BioFarma (Persero)	Audited 2018	3.235.225	2.498.461	736.764	454.802	464.198	727.368	-	727.368	184.142	543.226	6.067	549.293	543.226	549.293
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018	7.454.115	6.880.813	573.302	194.453	2.736	765.019	187.291	577.728	175.934	401.794	373.909	775.703	415.896	786.883
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018	1.382.345	1.363.832	18.513	37.214	17.650	38.077	3.072	35.005	5.860	29.145	-	29.145	29.145	29.145
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018	172.947	270.950	(98.003)	46.861	64.946	(116.088)	66.454	(182.542)	-	(182.542)	-	(182.542)	(182.542)	(182.542)
14	PT Pertani (Persero)	Audited 2018	1.772.938	1.857.766	(84.828)	15.945	6.517	(75.400)	41.520	(116.920)	(33.848)	(83.072)	1.694	(81.378)	(83.075)	(81.381)
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018	389.115	236.786	152.329	46.407	19.091	179.645	47	179.598	41.448	138.150	(7.136)	131.014	138.150	131.014
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2018	1.592.980	1.587.826	5.154	52.659	31.871	25.942	51.240	(25.298)	7.438	(32.736)	2.973	(29.763)	(32.736)	(29.763)
17	PT Pertamina (Persero)	Unaudited 2018	798.687.886	733.231.306	65.456.580	4.431.176	4.429.024	65.458.732	11.800.232	53.658.500	39.963.777	13.694.723	1.038.804	14.733.527	12.209.406	13.966.978
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018	424.608	271.749	152.859	22.326	517	174.668	666	174.002	46.276	127.726	6.093	133.819	127.726	133.819
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	21.498	21.301	197	13.269	5.335	8.131	2.259	5.872	(1.684)	7.556	112	7.668	7.556	7.668
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018	698.791	649.940	48.851	39.468	24.582	63.737	45.277	18.460	1.018	17.442	(8.320)	9.122	17.442	9.122
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018	289.816	201.764	88.052	35.285	47.249	76.089	-	76.089	3.048	73.041	3.453	76.494	73.041	76.493
22	PT Sarinah (Persero)	Audited 2018	822.365	801.549	20.816	13.850	3.370	31.296	-	31.296	10.448	20.848	-	20.848	20.848	20.848
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.496.513	1.490.970	5.543	217.800	78.092	145.251	-	145.251	34.785	110.466	2.493	112.959	109.783	111.685
24	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018	1.211.989	1.089.032	122.957		27.067	95.890	-	95.890	34.708	61.182	-	61.182	61.182	61.182
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.223.036	5.252.594	(29.558)	340.446	102.128	208.760	93.921	114.839	(12.614)	127.453	603.472	730.925	120.742	730.925
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Unaudited 2018	328.642.335	308.398.097	20.244.238	14.928.705	9.858.852	25.314.091	21.631.473	3.682.618	3.468.127	214.491	(19.824.961)	(19.610.470)	185.086	(19.639.875)
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018	649.704	457.961	191.743	41.100	23.977	208.866	10.509	198.357	48.573	149.784	(542)	149.242	149.784	149.242
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018	117.507	59.472	58.035	2.174	85	60.124	2.531	57.593	3.503	54.090	(47)	54.043	54.090	54.043
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018	240.804	176.260	64.545	6.745		71.290	648	70.642	6.987	63.655	-	63.655	63.655	63.655
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018	104.387	54.387	50.000	7.554	292	57.262	3.319	53.943	5.894	48.049	(722)	47.327	48.049	47.327
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018	295.521	262.660	32.861	5.013	8.024	29.850	16.970	12.880	3.914	8.966	-	8.966	8.966	8.966
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018	3.196.517	2.740.783	455.734	107.336	17.511	545.559	137.612	407.947	120.412	287.535	(6.003)	281.532	285.041	278.614
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018	22.365	22.406	(41)	6.421	(21)	6.401	-	6.401	1.084	5.317	-	5.317	5.317	5.317
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018	339.527	326.868	12.659	8.627	4.048	17.238	-	17.238	5.252	11.986	8.586	20.572	11.975	20.561
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	30.687.626	25.914.360	4.773.266	290.952		5.064.218	959.259	4.104.959	1.019.255	3.085.704	431.669	3.517.373	3.079.115	3.475.788
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018	1.995.808	1.748.306	247.502	16.503		264.005	118.648	145.357	69.282	76.075	(2.510)	73.565	76.072	73.562
37	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2018	12.282	4.415	7.867	9		7.876	2.383	5.493	-	5.493	-	5.493	5.493	5.493
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018	108.494	106.668	1.826	15.421	9.921	7.326	150	7.176	1.788	5.388	60	5.448	5.388	5.448
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	132.604.000	93.759.000	38.845.000	1.067.000	-	39.912.000	3.507.000	36.405.000	9.426.000	26.979.000	4.942.000	31.921.000	18.032.000	22.844.000
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.581.828	1.535.286	46.542	268.364	473.601	(158.695)	83.856	(242.551)	61.604	(304.155)	5.404	(298.751)	(304.156)	(298.752)
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018	153.794	134.952	18.842	4.403	3.954	19.291	-	19.291	3.897	15.394	3.023	18.417	15.394	18.417
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2018	427.708	611.250	(183.542)	84.098	81.874	(181.318)	22.307	(203.625)	69.254	(272.879)	639.989	367.110	(272.879)	367.110
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018	129.333	172.971	(43.638)	77.373	4.714	29.021	26.883	2.138	(440)	2.578	2.664	5.242	1.905	4.569
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018	65.277.429	55.372.058	9.905.371	7.610.337	1.582.828	15.932.880	2.082.465	13.850.415	3.133.213	10.717.202	2.527.510	13.244.712	8.283.715	10.516.326
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018	24.781.416	24.805.092	(23.677)	866.271	401.908	440.686	1.600.310	(1.159.624)	(60.360)	(1.099.264)	349.981	(749.283)	(1.083.425)	(716.289)
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018	340.979	328.105	12.874	5.464	1.191	17.147	6.797	10.350	(116)	10.466	(8.105)	2.361	10.441	2.336
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018	23.618	24.500	(882)	3.959	173	2.904	-	2.904	2.262	642	-	642	642	642
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	847.756	747.937	99.819	15.962	29.581	86.200	68.252	17.948	17.485	463	5.594	6.057	1.702	7.296
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018	2.176.896	2.023.699	153.197	55.957	18.571	190.583	42.658	147.925	80.118	67.807	(5.042)	62.765	67.807	62.765

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
50	PT Dahana (Persero)	Audited 2018	1.982.662	1.833.295	149.367	33.876		183.243	16.852	166.391	32.426	133.965	262	134.227	134.559	134.821
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018	5.337.972	4.971.876	366.096	49.299	80.594	334.801	123.449	211.352	39.877	171.475	11.889	183.364	133.181	144.966
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018	3.200.897	2.816.760	384.137	68.246	122.018	330.365	193.061	137.304	36.726	100.578	(25.542)	75.036	100.578	75.036
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	3.244.893	3.545.359	(300.466)	190.039	122.220	(232.646)	286.310	(518.956)	30.724	(549.680)	(7.035)	(556.714)	(549.680)	(556.714)
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	15.655.499	13.985.688	1.669.811	197.232	175.522	1.691.521	523.744	1.167.777	522.748	645.029	(131.771)	513.258	644.159	512.387
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018	704.516	665.282	39.234	15.470	111	54.593	23.923	30.670	21.567	9.103	17.402	26.505	9.103	26.505
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018	4.729.278	4.407.800	321.478	264.405	11.783	574.100	83.850	490.250	132.891	357.359	189.808	547.167	356.328	546.136
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018	36.974.075	32.381.894	4.592.181	1.285.130	827.344	5.049.967	1.839.660	3.210.307	1.173.816	2.036.491	48.303	2.084.794	2.202.600	2.249.998
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	48.788.951	41.594.078	7.194.873	2.905.200	2.104.388	7.995.685	2.459.242	5.536.443	916.875	4.619.568	289.488	4.909.056	3.962.838	4.252.326
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	31.158.193	28.339.210	2.818.983	1.655.229	1.116.662	3.357.550	998.921	2.358.629	285.329	2.073.300	140.243	2.213.543	1.730.256	1.860.118
60	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2018	26.747.664	23.397.232	3.350.432	438.690	1.098.033	2.691.089	293.484	2.397.605	121.181	2.276.424	8.679	2.285.103	2.274.876	2.283.556
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018	25.119.560	22.727.114	2.392.446	1.388.437	208.540	3.572.343	759.837	2.812.506	853.513	1.958.993	157.616	2.116.609	1.501.973	1.602.553
62	Perum Perumnas	Audited 2018	2.667.116	2.077.744	589.372	66.509	291.263	364.618	-	364.618	58.846	305.772	-	305.772	305.960	305.960
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018	3.255.889	3.138.777	117.112			117.112	-	117.112	27.658	89.454	15.230	104.684	86.401	101.631
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018	63.031	63.530	(499)	5.538	918	4.121	-	4.121	606	3.515	6	3.521	3.515	3.521
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018	3.113.533	1.868.587	1.244.946	239.691	135.374	1.349.263	153.281	1.195.982	291.111	904.871	(30.940)	873.931	911.814	880.874
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018	12.218.360	8.824.214	3.394.146	1.881.519	1.012.765	4.262.900	1.130.782	3.132.118	701.408	2.430.710	(40.589)	2.390.121	2.379.262	2.339.484
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018	10.778.773	8.210.531	2.568.243	143.194	79.521	2.631.915	808.410	1.823.505	438.103	1.385.403	739.672	2.125.075	759.639	1.502.625
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018	3.305.799	2.752.141	553.658	152.026	154.938	550.746	68.151	482.595	156.392	326.203	2.177	328.380	326.133	328.310
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018	195.583	156.037	39.546	1.553	8.672	32.426	725	31.701	8.964	22.738	193	22.931	22.738	22.931
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018	90.929	87.308	3.621	13.558	1.313	15.866	-	15.866	4.226	11.640	1.860	13.500	11.640	13.500
71	Perum Damri	Audited 2018	1.237.678	1.177.664	60.014	19.434	8.169	71.279	20.486	50.793	29.231	21.562	(25.526)	(3.964)	21.562	(3.964)
72	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2018	328.554	314.892	13.662	9.777	7.831	15.608	-	15.608	2.286	13.322	-	13.322	13.322	13.322
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018	3.275.758	2.869.186	406.572	134.414	12.392	528.594	440	528.154	146.708	381.446	7.011	388.457	381.446	388.457
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018	8.521.087	5.762.646	2.758.441	390.605	60.850	3.088.196	265.134	2.823.062	817.144	2.005.918	(71.104)	1.934.814	2.007.018	1.935.914
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018	9.486.855	6.430.746	3.056.109	331.377	164.035	3.223.451	476.942	2.746.509	834.957	1.911.552	(30.751)	1.880.801	1.911.610	1.880.859
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018	462.259	398.645	63.614	945	1.085	63.474	8.378	55.096	16.671	38.425	119	38.544	38.425	38.544
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018	520.505	382.394	138.111	1.052	4.957	134.206	4.050	130.156	8.062	122.094	(1.061)	121.033	122.094	121.033
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018	166.224	150.171	16.053	106	1.120	15.039	32	15.007	4.990	10.017	(1.508)	8.509	10.017	8.509
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	71.748.629	52.149.230	19.599.399	703.116	481.800	19.820.715	-	19.820.715	4.728.952	15.091.763	(855.511)	14.236.252	15.015.118	14.250.362
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018	119.681.209	85.775.412	33.905.797	37.572		33.943.369	-	33.943.369	8.091.432	25.851.937	(1.316.749)	24.535.188	25.015.021	23.771.531
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	139.186.447	97.457.996	41.728.451	27.817	2.574	41.753.694	-	41.753.694	9.335.208	32.418.486	(3.477.661)	28.940.825	32.351.133	28.910.721
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018	24.923.352	21.329.552	3.593.800	16.475	-	3.610.275	-	3.610.275	802.352	2.807.923	(25.416)	2.782.507	2.807.923	2.782.507
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018	2.326.010	2.365.249	(39.239)	547.522	-	508.283	-	508.283	110.740	397.543	(135.958)	261.585	397.542	261.585
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018	2.630.841	2.636.807	(5.966)	147.761		141.795	-	141.795	31.329	110.466	301.088	411.554	110.466	411.554
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018	4.451.130	3.904.337	546.793	352.697	601.028	298.462	59.297	239.165	37.595	201.570	(6.855)	194.715	201.093	194.235
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018	7.811.135	23.728.178	(15.917.043)	218.440	47.568	(15.746.171)	-	(15.746.171)	85.983	(15.832.154)	(70.917)	(15.903.071)	(15.832.201)	(15.903.118)
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018	6.761.150	5.257.460	1.503.690	(57.348)	696.885	749.457	-	749.457	98.622	650.835	(29.053)	621.782	650.804	621.745
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018	6.941.421	4.916.562	2.024.859			2.024.859	-	2.024.859	398.585	1.626.274	(428.154)	1.198.120	1.620.235	1.193.047
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018	4.457.768	4.181.896	275.872	2.027	814	277.085	76.500	200.585	(2.801)	203.386	(170.395)	32.991	203.385	32.991
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018	15.726.606	15.800.301	(73.695)	791.927	202.183	516.049	-	516.049	244.497	271.552	(4.510.477)	(4.238.925)	270.242	(4.240.235)
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	62.300.281	65.236.133	(2.935.853)	4.427.419	-	1.491.567	1.220.756	270.811	199.320	71.491	(444.878)	(373.387)	11.537	(447.274)
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018	4.593.313	4.518.202	75.111	215.535		290.646	-	290.646	86.473	204.174	(14.757)	189.417	203.631	315.044
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018	26.864.014	23.732.306	3.131.708	514.469	694.510	2.951.667	1.002.481	1.949.186	413.603	1.535.583	236.080	1.771.663	1.555.221	1.791.215
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018	747.886	606.352	141.534	10.589		152.123	-	152.123	31.661	120.462	13.392	133.854	45.530	56.251
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	795.680	665.524	130.156		23.361	106.795	-	106.795	33.897	72.898	24.827	97.725	72.898	97.725

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018	287.442	784.353	(496.911)	965.604	-	468.693	143.459	325.234	179.949	145.285	42.145	187.430	145.284	187.428
97	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018	70.805	48.913	21.892	19.535	2.855	38.572	-	38.572	11.043	27.529	(1.071)	26.458	27.444	26.373
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018	3.255.748	3.167.497	88.251	134.954	124.048	99.157	-	99.157	31.359	67.798	4.998	72.796	65.960	70.958
99	PT PANN (Persero)	Unaudited 2018	219.401	164.273	55.128	7.811		62.939	19.589	43.350	41.005	2.345	-	2.345	2.345	2.345
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018	11.464.462	5.578.241	5.886.221	28.921	351	5.914.791	2.251.619	3.663.172	887.691	2.775.481	136.161	2.911.642	2.775.080	2.911.241
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018	2.801.809	2.375.798	426.011	39.751	61.546	404.216	15	404.201	109.890	294.311	8.947	303.258	293.916	302.837
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.417.420	1.240.026	177.394	21.476	15.351	183.519	-	183.519	47.542	135.977	(4.032)	131.945	137.433	133.399
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018	2.799.967	2.657.431	142.536	154.756	16.736	280.556	-	280.556	24.923	255.633	(2.608)	253.025	263.536	260.928
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018	561.706	486.177	75.529	32.109	28.065	79.573	18.419	61.154	(152)	61.306	(582)	60.724	61.306	60.724
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018	6.824.001	6.292.565	531.436	197.783	211.555	517.664	76.004	441.660	12.860	428.800	61.779	490.579	426.077	467.878
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018	690	6.259	(5.569)	2.849	57.138	(59.857)	48.422	(108.280)	(23.662)	(84.618)	-	(84.618)	(84.618)	(84.618)
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018	325.164	321.660	3.504	8.526	10.503	1.527	-	1.527	841	686	1.418	2.104	686	2.104
108	PT Primissima (Persero)	Audited 2018	168.227	152.222	16.005	-	14.750	1.255	-	1.255	212	1.043	33.399	34.442	1.043	34.442
109	PT Survai Udara Penas (Persero)	Audited 2018	53.710	53.851	(141)	11.753	533	11.079	8.163	2.916	754	2.162	-	2.162	1.958	1.958
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018	159.101	162.943	(3.842)	434	5.679	(9.087)	-	(9.087)	(2.436)	(6.651)	-	(6.651)	(6.651)	(6.651)
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018	172.695	188.217	(15.522)	5.463	8.692	(18.751)	56.365	(75.116)	-	(75.116)	-	(75.116)	(75.116)	(75.116)
112	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018	1.515	16.917	(15.402)	19.979		4.577	-	4.577	-	4.577	-	4.577	4.577	4.577
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		2.360.159.500	2.072.605.898	287.553.602	58.060.194	30.350.599	315.263.198	66.998.943	248.264.255	94.088.971	154.175.283	(10.267.201)	143.350.690	138.114.838	127.510.497

Lampiran 15

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian KeuanganTahun 2018

1. Laporan Laba Rugi
2. Neraca

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 -6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 -13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2018	4.008.063.076.873	2.188.192.000.120	1.819.871.076.753	22.702.098.036	27.278.444.666	1.815.294.730.123	-	1.815.294.730.123	284.184.774.358	1.531.109.955.765	(5.373.253.334)	1.525.736.702.431	1.531.109.955.765	1.525.736.702.431
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018	834.251.967.000	356.786.956.000	477.465.011.000	-	-	477.465.011.000	-	477.465.011.000	6.384.835.000	471.080.176.000	(140.702.373.000)	330.377.803.000	471.080.176.000	330.377.803.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited 2018	1.345.406.000.000	851.572.000.000	493.834.000.000			493.834.000.000	-	493.834.000.000	57.291.000.000	436.543.000.000	(38.476.000.000)	398.067.000.000	436.543.000.000	398.067.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2018	783.549.583.858	526.252.737.200	257.296.846.658	39.067.680.604	52.312.868.983	244.051.658.279	-	244.051.658.279	73.712.757.804	170.338.900.475	40.186.691	170.379.087.166	158.977.295.813	159.014.802.052
			6.971.270.627.731	**3.922.803.693.320**	**3.048.466.934.411**	**61.769.778.640**	**79.591.313.649**	**3.030.645.399.402**	-	**3.030.645.399.402**	**421.573.367.162**	**2.609.072.032.240**	**(184.511.439.643)**	**2.424.560.592.597**	**2.597.710.427.578**	**2.413.196.307.483**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistibusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 + 6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 8 + 9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*6 = 11 + 12 + 13 + 14 + 1*	*(17)*	*(18 = 16 + 17)*	*(19)*	*(20 = 16 x 19)*
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2018	-	-	62.493.190.581.375	-	-	26.917.300.925.196	30.516.600.000.000	-		507.343.678.196	4.551.945.977.983	35.575.889.656.179		35.575.889.656.179	100,00	35.575.889.656.179
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018	-	-	10.620.915.509.000	-	-	140.244.832.000	8.000.000.000.000			(110.532.768.000)	2.591.203.445.000	10.480.670.677.000		10.480.670.677.000	100,00	10.480.670.677.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited 2018	-	-	19.491.557.000.000	-	-	11.305.635.000.000	6.000.000.000.000			(29.383.000.000)	2.215.305.000.000	8.185.922.000.000		8.185.922.000.000	100,00	8.185.922.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2018	676.127.451.745	3.000.148.418.963	3.676.275.870.708	257.126.207.677	606.803.347.703	863.929.555.380	3.275.443.770.000				(463.097.454.672)	2.812.346.315.328		2.812.346.315.328	93,33	2.624.762.816.096
			676.127.451.745	**3.000.148.418.963**	**96.281.938.961.083**	**257.126.207.677**	**606.803.347.703**	**39.227.110.312.576**	**47.792.043.770.000**	-	-	**367.427.910.196**	**8.895.356.968.311**	**57.054.828.648.507**	-	**57.054.828.648.507**		**56.867.245.149.275**

Lampiran 16

Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2018

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang		
				USD	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.822.482.670.109			
	World Bank Group							
2	International Bank for Reconstruction and Development (	USD		167.203.427,47	2.421.272.833.205			-
3	International Development Association (IDA)	USD		34.411.001,07	498.305.706.424			5.237.901.545
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		31.602.000,00	457.628.562.000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	54.996.231.420	USD	1.135.018	16.436.195.658
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	136.086.967,25		2.740.795.601.663			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	29.830.860.000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and	ID	125.140,32		2.520.329.798			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		71.959.000,00	1.042.038.279.000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 20	EUR	223.450,00		18.599.791.519	EUR	223.450	3.700.282.430
		USD		1.028.901,00				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private S	USD		16.305.864,78	236.125.227.879			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	182.460.600.000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		537.680.000,00	7.786.144.080.000			
	Jumlah*		**425.535.557,57**	**878.648.014,32**	**21.293.200.773.016**			
	PMN Lainnya							
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.737.720.000.000			
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	57.924.000.000			
	Jumlah		-	**124.000.000,00**	**1.795.644.000.000**			
	Jumlah		**425.535.557,57**	**1.002.648.014,32**	**23.088.844.773.016**			**25.374.379.633**

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,39079
2. Kurs Euro to IDR 16.559,75
3. Kurs USD to IDR Rp 14.481
4. Kurs Islamic Dinar (ID) to IDR Rp 20.140

*Selisih jumlah antara Lampiran dengan CaLK sebesar Rp7.240 akibat pembulatan kurs mata uang asing

Lampiran 17

Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2018

1. Laporan Laba Rugi
2. Neraca

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2018	758.903	600.645	158.258	22.007	-	180.265	2.297	177.968	16.304	161.664	(5.145)	156.519	161.682	156.537
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018	320.435	171.848	148.587	13.560	21.827	140.320	-	140.320	24.092	116.228	(44)	116.184	116.228	116.184
3	PT Nindya Karya	Audited 2018	6.226.913	5.834.721	392.192	173.626	219.593	346.225	72.837	273.388	1.207	272.181	178	272.359	271.522	271.772
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	834.095	818.241	15.854	9.157	47.130	(22.119)	119.821	(141.940)	-	(141.940)	-	(141.940)	(141.942)	(113.781)
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	1.225.668	1.123.108	102.560	269.800	119.026	253.334	173.700	79.634	-	79.634	265.526	345.160	345.450	(220.483)
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	5.200.019	4.103.381	1.096.638	139.255	105.384	1.130.509	305.532	824.977	265.341	559.636	320.649	880.285	924.142	547.073
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	4.907.512	4.365.546	541.966	-	-	541.966	219.815	322.151	80.897	241.254	304.579	545.833	545.833	203.457
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	1.422.855	1.237.011	185.844	24.955	18.463	192.336	90.283	102.053	30.962	71.091	61.860	132.951	137.408	55.935
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	2.897.762	3.019.623	(121.861)	122.184	-	323	546.030	(545.707)	5.165	(550.872)	1.061.256	510.384	510.537	(232.591)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	1.445.775	1.662.723	(216.948)	1.736.841	95.678	1.424.215	230.990	1.193.225	18.462	1.174.763	4.959.572	6.134.335	6.134.279	(295.473)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	986.460	1.282.401	(295.941)	121.789	-	(174.152)	152.032	(326.184)	-	(326.184)	97.922	(228.262)	(228.262)	(193.277)
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.726.459	2.479.627	246.832	153.713	119.888	280.657	124.342	156.315	51.207	105.108	106.371	211.479	202.999	53.458
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.735.330	1.801.900	(66.570)	89.613	12.093	10.950	151.685	(140.735)	(4.488)	(136.247)	-	(136.247)	(136.437)	(77.053)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018	1.148.230	1.018.532	129.698	146.978	101.768	174.908	166.757	8.151	5.878	2.273	87.144	89.417	89.741	(73.434)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	1.392.478	1.663.340	(270.862)	50.915	98.618	(318.565)	365.982	(684.547)	1.944	(686.491)	221.784	(464.707)	(468.670)	(381.397)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018	608.624	726.903	(118.279)	69.468	-	(48.811)	141.511	(190.322)	-	(190.322)	32.909	(157.413)	(157.413)	(152.962)
17	PT Rekayasa Industri	unaudited 2018	4.914.923	4.571.474	343.449	50.343	18.784	375.008	174.223	200.785	-	200.785	36.140	236.925	184.237	220.377
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	unaudited 2018	13.659	152.350	(138.691)	199.512	18.405	42.416	-	42.416	41.005	1.411	-	1.411	1.411	1.411
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2018	23.139.551	24.888.440	(1.748.889)	1.360.299	149.894	(538.484)	2.125.059	(2.663.543)	(578.484)	(2.085.059)	223.925	(1.861.134)	(2.403.843)	(2.181.969)
20	PT Bank Bukopin Tbk	Audited 2018	7.980.892	8.457.928	(477.036)	855.041	161.670	216.335	-	216.335	26.365	189.970	188.966	378.936	189.595	378.410
21	PT Socfindo	Audited 2017	2.440.713	1.425.743	1.014.970	21.523	-	1.036.493	-	1.036.493	262.946	773.547	(9.154)	764.393	773.547	764.393
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	905.384	839.664	65.720	16.142	-	81.862	-	81.862	12.529	69.333	-	69.333	69.333	69.333
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2017	911.761	723.315	188.446	24.552	10.503	202.495	3.169	199.326	69.544	129.782	(5.016)	124.766	129.782	124.766
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	-	752	(752)	1.614	-	862	-	862	232	630	-	630	631	631
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2018	21.166.993	15.218.740	5.948.253	1.013.365	-	6.961.618	103.543	6.858.075	1.736.963	5.121.112	740.459	5.861.571	5.023.946	5.764.405
26	PT Timah Tbk	Audited 2018	11.049.946	10.303.124	746.822	324.301	(43.464)	1.114.587	304.641	809.946	191.669	618.277	104.885	723.162	531.359	636.244
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2018	25.241.267	23.388.540	1.852.727	487.333	520.228	1.819.832	554.331	1.265.501	391.075	874.426	422.178	1.296.604	874.425	1.296.603
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2018	56.045.322	47.066.595	8.978.727	2.896.591	1.183.503	10.691.815	2.221.820	8.469.995	3.189.672	5.280.323	(402.615)	4.877.708	4.416.589	4.004.967
29	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2018	418.488	385.190	33.298	3.382	1.311	35.369	7.721	27.648	7.207	20.441	-	20.441	20.441	20.441

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	unaudited 2018	584.826	290.800	875.626	70.491	31.484	101.975	200.000	443	-	(5.603)	578.808	773.648	3	773.651	50,00%	386.824.000.000
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	unaudited 2018	428.720	228.569	657.289	133.694	7.560	141.254	200.000	-	-	(67)	316.102	516.035	-	516.035	50,00%	258.017.500.000
3	PT Nindya Karya	unaudited 2018	4.517.913	1.173.088	5.691.001	3.667.131	511.824	4.178.955	559.497	-	-	420.954	514.459	1.494.910	17.136	1.512.046	1,00%	59.500.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	196.794	2.284.318	2.481.112	698.279	1.641.042	2.339.321	160.997	720.201	-	38.150	(777.802)	141.546	245	141.791	24,00%	38.641.000.000
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	498.329	6.327.028	6.825.357	3.363.007	1.672.321	5.035.328	327.606	-	-	4.128.574	(2.867.630)	1.788.550	1.479	1.790.029	10,00%	32.761.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	1.874.775	15.079.692	16.954.467	2.093.968	7.199.162	9.293.130	2.942.116	-	-	2.609.089	1.957.964	7.509.169	152.168	7.661.337	10,00%	294.212.000.000
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	1.260.216	7.783.088	9.043.304	1.387.133	4.919.433	6.306.566	1.313.322	-	-	1.106.384	317.031	2.736.737	1	2.736.738	10,00%	131.332.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	428.967	3.726.665	4.155.632	749.258	1.791.410	2.540.668	653.293	334	-	649.287	307.504	1.610.418	4.546	1.614.964	10,00%	65.329.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	1.202.828	11.741.703	12.944.531	3.650.946	6.741.480	10.392.426	1.401.223	8.889	-	4.511.827	(3.372.185)	2.549.754	2.351	2.552.105	10,00%	140.122.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	842.527	14.637.057	15.479.584	1.881.569	2.438.161	4.319.730	930.302	-	-	4.954.123	5.273.673	11.158.098	1.756	11.159.854	13,00%	122.528.000.000
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	1.422.828	3.215.739	4.638.567	2.464.727	725.095	3.189.822	1.599.815	-	-	1.522.007	(1.673.077)	1.448.745	-	1.448.745	10,00%	159.981.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.538.613	10.667.074	13.205.687	1.749.507	2.195.427	3.944.934	1.845.596	-	-	6.843.562	519.827	9.208.985	51.768	9.260.753	10,00%	184.560.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.393.912	6.306.035	7.699.947	2.032.820	2.129.222	4.162.042	1.168.481	105	-	2.405.153	(36.024)	3.537.715	190	3.537.905	10,00%	116.848.000.000
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018	1.217.401	10.170.480	11.387.881	2.407.550	2.240.287	4.647.837	1.272.976	-	-	5.322.782	139.627	6.735.385	4.659	6.740.044	10,00%	127.298.000.000
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	443.398	4.643.865	5.087.263	2.359.280	3.985.922	6.345.202	1.029.738	-	-	(286.978)	(2.133.658)	(1.390.898)	132.959	(1.257.939)	10,00%	102.974.000.000
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018	591.505	1.672.458	2.263.963	1.007.642	1.810.551	2.818.193	235.001	-	-	1.218.522	(2.007.753)	(554.230)	-	(554.230)	10,00%	23.500.000.000
17	PT Rekayasa Industri	SMT I / 2018	5.518.500	2.188.297	7.706.797	3.880.863	3.067.132	6.947.995	450.000	1.035	-	226.177	59.083	736.295	22.507	758.802	4,97%	22.366.000.000
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	unaudited 2018	327.695	388.189	715.884	309.991	-	309.991	678.413	724.338	-	-	(996.858)	405.893	-	405.893	0,00%	1.000.000
19	PT Indosat, Tbk	TW III / 2018	7.906.525	45.233.062	53.139.587	21.040.365	19.962.975	41.003.340	543.393	1.546.587	-	587.121	8.497.003	11.174.104	962.143	12.136.247	14,29%	77.662.499.900
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2018	86.272.075	9.371.848	95.643.923	83.434.091	3.615.546	87.049.637	1.376.437	2.923.938	-	1.327.037	2.944.853	8.572.265	22.021	8.594.286	11,44%	150.785.787.600
21	PT Socfindo	Audited 2017	433.932	1.423.025	1.856.957	483.457	575.517	1.058.974	42.250	3.671	-	-	752.062	797.983	-	797.983	10,00%	4.225.000.000
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2016	978.516	2.670.815	3.649.330	210.068	462.601	672.670	1.000.500	-	-	-	1.976.161	2.976.661	-	2.976.661	13,00%	136.227.000.000
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2017	962.967	541.319	1.504.286	190.583	122.915	313.498	50.888	(22.637)	-	408.714	753.823	1.190.788	-	1.190.788	5,00%	2.478.911.250
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	-	78	8.656	-	-	-	13.031	21.687	-	21.687	20,36%	1.762.087.000
25	PT Bukit Asam Tbk	TW III / 2018	11.739.344	12.433.589	24.172.933	4.935.696	2.967.541	7.903.237	1.152.066	(2.271.151)	-	319.554	16.814.700	16.015.169	254.527	16.269.696	0,00%	500
26	PT Timah Tbk	TW III / 2018	9.204.287	5.913.661	15.117.948	6.176.251	2.419.816	8.596.067	372.388	55	-	(25.117)	6.174.365	6.521.691	190	6.521.881	0,00%	50
27	PT Aneka Tambang Tbk	TW III / 2018	8.498.443	24.807.948	33.306.391	5.511.745	8.055.416	13.567.161	2.403.076	3.934.833	-	2.810.123	10.591.179	19.739.211	19	19.739.230	0,00%	100
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	TW III / 2018	35.820.346	79.148.280	114.968.626	23.235.127	45.366.931	68.602.058	4.981.739	(6.770.954)	-	(876.202)	39.947.287	37.281.870	9.084.699	46.366.569	0,00%	100
29	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2018	411.483	281.824	693.307	502.109	-	502.109	50.000	602.898	-	(482.141)	20.441	191.198		191.198,01	7,66%	50.000.000.000
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																	**644.841.500.000**
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	**2.045.094.286.500**
	Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	**2.689.935.786.500**

Lampiran 18

Ikhtisar Laporan Keuangan LPS (Audited) 31 Desember 2018

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)
Audited 2018	4.000.000.000.000	14.634.820.441.000	19.890.741.000	87.464.519.773.000	102.119.230.955.000

Lampiran 19

Aset Tetap
Per 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017

1. Tanah Pada K/L dan BUN
2. Peralatan & Mesin Pada K/L dan BUN
3. Gedung & Bangunan K/L dan BUN
4. Jalan, Irigasi & Jaringan Pada K/L dan BUN
5. Aset Tetap Lainnya Pada K/L dan BUN
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada K/L dan BUN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	343.728.232.605	343.728.232.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.989.704.672.051	1.857.964.547.083
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.864.312.403.867	4.793.673.683.460
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.844.291.889.173	3.830.796.872.345
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	87.070.470.339.603	87.074.543.797.603
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.253.066.003.779	2.276.589.447.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	11.502.743.450.419	11.066.986.986.557
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	294.345.486.868.825	296.536.866.272.608
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.625.444.631.053	12.672.489.520.638
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	19.436.535.504.094	19.349.423.511.784
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	11.608.949.370.893	11.628.839.367.360
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.620.380.005.603	2.575.568.019.159
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.276.347.034.160	3.737.148.692.766
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	74.768.518.687.719	75.742.121.286.401
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.040.119.575.914	4.207.264.327.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.404.565.123.149	15.781.343.836.355
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	17.129.404.796.332	17.432.422.531.102
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.622.328.251.528	1.625.315.206.554
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.495.475.164.694	3.556.821.561.447
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.365.498.329.641	2.662.177.738.345
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.444.400.900.882	2.703.873.839.795
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	269.138.602.834.438	292.480.373.394.093
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.420.230.276.062	1.420.889.583.062
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	76.039.000.565.104	58.651.792.675.836
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	876.321.187.609	1.183.259.332.609
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	294.120.000	294.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.651.451.539.479	1.545.973.041.479
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	446.959.267.105	446.514.387.105
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	772.800.959.901	773.225.293.257
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	180.483.709.805	179.478.885.500
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.040.367.985.540	2.027.972.861.507
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	326.366.052.000	326.366.052.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	998.225.868.635	998.033.700.475
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.953.588.425.160	45.787.314.955.912
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	622.657.329.807	555.367.081.351
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	100.600.000.000	100.600.000.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	324.379.067.106	125.751.844.930
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	122.404.255.697	120.992.735.697
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	372.869.158.878	377.635.858.956
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	860.125.687.828	846.738.707.121
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	585.704.428.389	606.358.583.625
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.705.022.040	80.978.000.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.201.291.154.537	6.846.181.762.046
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.782.773.318.225	1.782.773.318.225

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	781.190.927.385	840.070.594.665
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	325.015.190.655	320.651.455.392
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.250.883.554	11.250.883.554
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	515.131.306.413	515.131.306.413
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	216.312.132.396	216.312.132.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	440.002.155.618	444.447.889.239
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.015.394.877.901	1.040.119.546.830
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	937.546.345.302	888.598.843.330
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	336.575.243.520	336.575.243.520
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	515.234.741.435	453.822.133.060
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	69.139.276.742	57.502.052.742
68	100	KOMISI YUDISIAL	48.799.520.400	47.188.389.400
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	113.143.589.776	113.143.589.776
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	43.853.876.181	44.748.936.081
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	3.520.341.767.980
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
73	107	BADAN SAR NASIONAL	314.683.285.364	303.615.044.275
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.987.200.000	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	471.736.231.125	429.505.041.845
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7.315.400.000	7.315.400.000
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	21.822.314.130.937	21.830.341.424.135
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	1.977.000.000
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	221.628.762	221.628.762
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.585.286.126.373	2.639.261.998.650
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.307.355.554.899	3.348.951.908.778
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	597.525.625.314	588.009.096.314
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	6.737.260.600	5.544.500.600
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			**1.019.501.217.507.960**	**1.037.753.703.553.270**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	4.016.775.779	4.016.775.779
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(857.211.200.000)	-
TOTAL			**1.018.648.023.083.740**	**1.037.757.720.329.050**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	157.535.478.383	(127.882.666.316)	29.652.812.067	148.831.544.599	(120.071.320.509)	28.760.224.090
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.320.157.553.414	(929.544.472.379)	390.613.081.035	1.188.424.521.149	(804.093.379.649)	384.331.141.500
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.971.544.524.387	(1.630.757.004.133)	340.787.520.254	1.961.947.628.280	(1.502.512.437.022)	459.435.191.258
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.917.147.390.887	(2.301.314.727.130)	615.832.663.757	2.703.706.525.961	(2.098.944.069.588)	604.762.456.373
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.487.200.803.633	(2.064.770.585.061)	1.422.430.218.572	2.829.780.003.481	(1.792.932.045.372)	1.036.847.958.109
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.622.893.042.849	(2.129.636.610.118)	1.493.256.432.731	3.078.891.846.102	(1.851.721.409.808)	1.227.170.436.294
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.963.315.687.798	(2.679.559.533.823)	283.756.153.975	2.916.134.984.443	(2.580.034.879.096)	336.100.105.347
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.160.421.214.721	(1.467.545.543.785)	692.875.670.936	1.856.678.982.918	(1.298.774.583.385)	557.904.399.533
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	227.303.639.687.598	(108.488.012.725.453)	118.815.626.962.145	191.232.696.715.953	(91.801.816.953.578)	99.430.879.762.375
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.680.447.076.850	(4.407.498.695.412)	2.272.948.381.438	5.714.938.492.900	(3.602.514.871.035)	2.112.423.621.865
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.107.977.235.913	(10.861.430.455.942)	3.246.546.779.971	13.627.399.300.896	(10.269.980.408.649)	3.357.418.892.247
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.225.890.240.250	(4.700.564.104.242)	1.525.326.136.008	6.007.283.535.144	(4.270.325.461.087)	1.736.958.074.057
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.838.718.583.443	(1.953.087.290.290)	885.631.293.153	2.646.562.621.961	(1.741.695.049.720)	904.867.572.241
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.134.852.582.106	(3.966.609.219.808)	1.168.243.362.298	5.052.666.303.415	(3.663.751.438.234)	1.388.914.865.181
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	49.051.998.331.321	(25.733.040.571.422)	23.318.957.759.899	43.493.459.809.414	(21.599.967.169.435)	21.893.492.639.979
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.417.235.655.314	(2.446.822.749.458)	970.412.905.856	3.192.976.280.873	(2.269.707.578.060)	923.268.702.813
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	19.931.915.819.977	(14.702.932.779.488)	5.228.983.040.489	30.298.593.008.907	(22.794.222.198.080)	7.504.370.810.827
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	8.666.975.027.179	(6.587.245.554.537)	2.079.729.472.642	7.863.111.088.549	(5.783.375.986.927)	2.079.735.101.622
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.493.107.556.237	(1.515.160.349.103)	977.947.207.134	2.333.052.146.841	(1.328.154.058.006)	1.004.898.088.835
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.788.554.554.510	(1.402.111.593.278)	386.442.961.232	1.751.270.679.842	(1.237.589.909.574)	513.680.770.268
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.373.676.281.912	(2.444.112.122.135)	929.564.159.777	3.196.243.543.792	(2.330.361.494.746)	865.882.049.046
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.631.552.945.324	(3.728.287.515.633)	1.903.265.429.691	5.620.044.740.193	(3.480.878.317.492)	2.139.166.422.701
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	13.109.431.069.667	(7.885.247.316.585)	5.224.183.753.082	10.907.002.968.381	(6.801.456.896.357)	4.105.546.072.024
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	125.456.875.877	(94.025.592.776)	31.431.283.101	122.823.118.743	(82.707.456.693)	40.115.662.050
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	64.652.995.149	(49.172.886.473)	15.480.108.676	59.427.718.065	(43.394.951.212)	16.032.766.853
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	75.422.307.424	(57.514.810.127)	17.907.497.297	79.588.439.223	(56.808.098.805)	22.780.340.418
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	471.713.974.169	(333.857.259.112)	137.856.715.057	409.256.751.706	(293.230.345.226)	116.026.406.480
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	122.026.524.215	(92.638.266.811)	29.388.257.404	114.169.368.148	(82.094.961.098)	32.074.407.050
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	23.585.360.888.712	(17.122.789.183.343)	6.462.571.705.369	22.043.852.287.476	(15.382.916.956.126)	6.660.935.331.350
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	406.599.540.127	(347.934.033.813)	58.665.506.314	400.639.177.271	(324.419.005.264)	76.220.172.007
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.571.541.415	(69.673.879.550)	25.897.661.865	94.259.793.486	(55.027.890.538)	39.231.902.948
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	103.103.352.431	(70.059.645.563)	33.043.706.868	90.317.431.592	(62.471.363.229)	27.846.068.363

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.505.136.328.482	(5.393.001.721.005)	5.112.134.607.477	8.951.547.860.450	(3.777.863.767.557)	5.173.684.092.893
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.793.202.944.519	(5.422.295.375.071)	1.370.907.569.448	6.532.100.035.646	(4.686.677.387.395)	1.845.422.648.251
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	158.821.733.247	(98.335.210.140)	60.486.523.107	159.188.547.377	(67.804.455.621)	91.384.091.756
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.891.531.310.334	(1.497.332.102.001)	394.199.208.333	1.737.061.101.350	(1.349.822.429.256)	387.238.672.094
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	332.663.047.278	(219.799.543.037)	112.863.504.241	273.023.533.027	(166.253.412.340)	106.770.120.687
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.618.852.315.583	(1.819.887.630.853)	798.964.684.730	2.386.990.201.224	(1.609.216.863.801)	777.773.337.423
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	558.958.560.402	(249.337.171.171)	309.621.389.231	496.477.053.115	(223.558.444.571)	272.918.608.544
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.146.630.406.292	(1.434.297.408.422)	712.332.997.870	2.782.208.505.075	(1.325.048.895.769)	1.457.159.609.306
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	110.053.992.531.197	(54.943.646.544.149)	55.110.345.987.048	86.798.752.155.212	(40.142.958.672.907)	46.655.793.482.305
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.434.616.953.555	(1.447.632.923.296)	986.984.030.259	2.086.540.043.491	(1.246.620.404.822)	839.919.638.669
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	350.702.533.884	(257.273.579.791)	93.428.954.093	298.742.412.095	(217.580.784.725)	81.161.627.370
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	232.085.022.345	(208.364.527.467)	23.720.494.878	232.559.785.523	(203.116.450.159)	29.443.335.364
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.026.684.912.696	(1.107.894.183.748)	918.790.728.948	1.706.969.603.844	(852.616.803.434)	854.352.800.410
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	344.347.161.374	(229.816.758.575)	114.530.402.799	331.245.725.328	(194.282.897.487)	136.962.827.841
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	454.276.912.620	(358.991.953.504)	95.284.959.116	422.748.982.559	(332.435.367.149)	90.313.615.410
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	27.794.544.161	(24.854.145.591)	2.940.398.570	25.016.080.524	(21.490.245.373)	3.525.835.151
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	4.158.147.493.545	(3.135.554.878.698)	1.022.592.614.847	3.633.316.469.312	(2.644.166.297.028)	989.150.172.284
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.304.109.267.235	(727.024.679.172)	577.084.588.063	832.980.215.769	(614.917.078.109)	218.063.137.660
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	255.815.979.563	(222.332.659.936)	33.483.319.627	243.000.749.346	(209.000.026.524)	34.000.722.822
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	118.793.778.109	(87.175.449.795)	31.618.328.314	110.597.292.348	(75.996.128.595)	34.601.163.753
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.723.437.864.534	(1.127.698.823.009)	595.739.041.525	1.436.999.731.660	(1.003.749.463.150)	433.250.268.510
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.013.923.992.497	(595.864.147.550)	418.059.844.947	876.178.559.164	(536.294.889.043)	339.883.670.121
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.994.893.473.642	(1.876.960.845.823)	1.117.932.627.819	2.754.354.375.370	(1.650.798.131.303)	1.103.556.244.067
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.368.808.513.310	(755.640.242.292)	613.168.271.018	1.202.377.314.869	(630.917.040.610)	571.460.274.259
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.034.767.353.697	(776.592.235.901)	258.175.117.796	923.707.281.421	(691.850.436.854)	231.856.844.567
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	41.509.541.786	(29.926.011.659)	11.583.530.127	42.750.590.319	(26.795.023.959)	15.955.566.360
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120.042.125.093	(78.128.930.239)	41.913.194.854	115.518.436.047	(71.502.476.146)	44.015.959.901
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	176.039.169.071	(149.789.427.780)	26.249.741.291	171.006.618.574	(143.363.945.116)	27.642.673.458
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	196.135.354.724	(170.519.136.473)	25.616.218.251	195.093.264.253	(162.069.997.505)	33.023.266.748
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	539.281.544.640	(428.443.721.524)	110.837.823.116	496.480.147.511	(379.113.220.088)	117.366.927.423
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	381.726.544.930	(300.753.302.051)	80.973.242.879	328.936.657.011	(273.420.280.814)	55.516.376.197
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	771.053.591.013	(645.245.133.726)	125.808.457.287	738.830.977.606	(619.430.173.926)	119.400.803.680
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	682.617.192.748	(432.200.825.066)	250.416.367.682	501.711.614.402	(387.062.309.743)	114.649.304.659

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	605.972.934.481	(363.363.123.793)	242.609.810.688	555.634.140.026	(290.926.262.647)	264.707.877.379
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	137.187.762.130	(117.557.831.415)	19.629.930.715	140.141.212.363	(116.113.429.045)	24.027.783.318
68	100	KOMISI YUDISIAL	49.765.110.623	(43.570.068.789)	6.195.041.834	48.589.855.918	(40.013.473.449)	8.576.382.469
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.301.094.714.025	(1.006.930.866.457)	294.163.847.568	1.295.301.771.927	(829.678.734.347)	465.623.037.580
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	167.841.381.133	(138.085.844.574)	29.755.536.559	170.630.985.540	(137.463.308.040)	33.167.677.500
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	151.490.237.335	(91.413.879.691)	60.076.357.644
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	208.050.847.316	(129.336.280.053)	78.714.567.263	186.982.734.923	(90.048.170.378)	96.934.564.545
73	107	BADAN SAR NASIONAL	8.601.402.036.170	(4.661.260.231.535)	3.940.141.804.635	7.910.772.864.082	(3.772.425.810.436)	4.138.347.053.646
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	28.161.334.109	(20.260.272.594)	7.901.061.515	25.745.668.889	(18.816.404.704)	6.929.264.185
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	33.262.317.682	(20.967.135.230)	12.295.182.452	22.233.577.944	(19.008.186.746)	3.225.391.198
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	41.357.097.591	(29.564.103.963)	11.792.993.628	40.151.199.049	(26.838.741.033)	13.312.458.016
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	79.414.853.670	(56.123.409.898)	23.291.443.772	76.974.049.537	(50.492.711.876)	26.481.337.661
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.221.776.217.713	(850.616.980.842)	371.159.236.871	1.063.527.969.569	(743.101.607.819)	320.426.361.750
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	317.333.696.415	(168.724.029.178)	148.609.667.237	313.135.625.991	(103.652.918.477)	209.482.707.514
80	114	SEKRETARIAT KABINET	55.019.747.053	(43.100.096.667)	11.919.650.386	54.506.077.745	(42.324.283.490)	12.181.794.255
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	354.870.590.962	(135.443.539.890)	219.427.051.072	174.727.792.977	(100.113.085.724)	74.614.707.253
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.358.515.800.522	(1.129.616.551.398)	228.899.249.124	1.285.833.879.179	(1.100.042.928.399)	185.790.950.780
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.532.465.596.166	(1.367.020.241.310)	1.165.445.354.856	1.764.777.955.416	(1.263.802.256.292)	500.975.699.124
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	57.636.862.010	(40.341.576.809)	17.295.285.201	55.795.062.810	(35.431.505.857)	20.363.556.953
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.347.247.788.067	(656.550.790.187)	690.696.997.880	1.192.231.455.635	(549.410.961.343)	642.820.494.292
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	100.422.974.762	(43.780.967.605)	56.642.007.157	59.069.896.632	(20.990.790.421)	38.079.106.211
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	28.091.846.029	(12.445.615.436)	15.646.230.593	24.406.262.576	(6.361.962.883)	18.044.299.693
JUMLAH PADA K/L			**589.844.387.849.927**	**(329.678.110.529.237)**	**260.166.277.320.690**	**519.473.703.556.589**	**(287.394.218.557.576)**	**232.079.484.999.013**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	442.306.166.552	(344.680.350.375)	97.625.816.177	422.386.780.615	(288.090.838.707)	134.295.941.908
TOTAL			**590.286.694.016.479**	**(330.022.790.879.612)**	**260.263.903.136.867**	**519.896.090.337.204**	**(287.682.309.396.283)**	**232.213.780.940.921**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	220.385.697.914	(53.307.270.932)	167.078.426.982	207.005.054.808	(47.218.863.812)	159.786.190.996
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	907.534.052.443	(188.580.554.347)	718.953.498.096	885.368.481.115	(162.370.878.565)	722.997.602.550
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.332.971.508.643	(316.182.639.145)	2.016.788.869.498	2.325.635.127.982	(264.185.397.241)	2.061.449.730.741
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.992.652.726.378	(1.572.348.334.794)	6.420.304.391.584	7.555.156.372.496	(1.401.650.266.883)	6.153.506.105.613
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	6.007.786.627.706	(1.251.601.872.108)	4.756.184.755.598	5.839.341.744.774	(1.139.224.734.772)	4.700.117.010.002
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.790.344.144.015	(1.748.617.456.319)	4.041.726.687.696	3.697.178.100.803	(1.589.364.908.568)	2.107.813.192.235
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.522.795.952.068	(652.840.708.857)	1.869.955.243.211	2.799.100.959.818	(676.650.608.209)	2.122.450.351.609
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.451.334.088.938	(3.957.710.066.559)	2.493.624.022.379	6.702.165.653.533	(3.826.118.328.110)	2.876.047.325.423
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	44.899.893.872.846	(14.083.695.076.689)	30.816.198.796.157	42.887.557.331.350	(12.832.159.956.366)	30.055.397.374.984
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.457.963.798.623	(2.323.816.547.094)	8.134.147.251.529	11.135.467.855.672	(2.214.457.972.033)	8.921.009.883.639
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.544.545.225.457	(3.755.337.542.619)	10.789.207.682.838	14.271.267.493.102	(3.377.393.779.502)	10.893.873.713.600
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.734.934.884.794	(1.089.264.819.476)	3.645.670.065.318	4.758.157.681.267	(1.029.783.779.916)	3.728.373.901.351
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.675.432.517.112	(390.886.203.044)	1.284.546.314.068	1.515.316.610.965	(352.566.425.628)	1.162.750.185.337
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.166.250.483.575	(598.483.944.019)	1.567.766.539.556	2.163.560.176.324	(528.463.001.881)	1.635.097.174.443
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	25.586.841.177.815	(3.433.685.733.626)	22.153.155.444.189	23.274.257.931.008	(2.821.639.832.399)	20.452.618.098.609
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.004.481.460.948	(932.178.235.827)	4.072.303.225.121	4.719.650.447.399	(847.350.612.257)	3.872.299.835.142
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.574.335.256.508	(2.903.594.715.702)	10.670.740.540.806	14.264.231.925.068	(2.744.288.397.671)	11.519.943.527.397
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	26.802.836.201.742	(4.646.032.458.595)	22.156.803.743.147	25.604.968.974.564	(4.289.518.753.369)	21.315.450.221.195
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.442.717.606.755	(277.117.457.764)	1.165.600.148.991	1.435.418.016.658	(260.052.162.477)	1.175.365.854.181
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.513.338.943.015	(361.072.631.791)	1.152.266.311.224	1.510.007.242.771	(318.029.253.097)	1.191.977.989.674
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.397.477.874.437	(455.828.665.741)	1.941.649.208.696	2.232.634.338.395	(403.775.047.886)	1.828.859.290.509
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.103.635.605.049	(603.034.197.284)	3.500.601.407.765	3.894.176.044.395	(546.105.521.470)	3.348.070.522.925
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	17.505.734.217.644	(1.569.561.723.730)	15.936.172.493.914	20.178.006.715.792	(1.690.020.962.088)	18.487.985.753.704
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	8.134.999.202	(920.333.975)	7.214.665.227	5.598.310.526	(860.824.459)	4.737.486.067
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	22.785.169.780	(4.100.080.218)	18.685.089.562	22.785.169.780	(3.632.952.978)	19.152.216.802
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	162.802.785.121	(17.750.071.892)	145.052.713.229	162.486.121.051	(14.491.499.398)	147.994.621.653
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.167.697.980.889	(222.582.630.238)	945.115.350.651	865.451.960.378	(206.793.790.658)	658.658.169.720
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	245.548.812.957	(41.869.842.418)	203.678.970.539	196.573.019.634	(37.347.676.623)	159.225.343.011
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	29.801.781.695.588	(4.928.782.106.647)	24.872.999.588.941	27.303.772.194.881	(4.450.828.235.815)	22.852.943.959.066
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	797.166.836.674	(170.319.817.769)	626.847.018.905	854.798.416.600	(154.235.218.889)	700.563.197.711
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	104.426.273.203	(9.288.716.796)	95.137.556.407	104.426.273.203	(7.195.138.738)	97.231.134.465
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	37.572.097.436	(5.808.012.690)	31.764.084.746	33.626.425.495	(4.414.400.195)	29.212.025.300
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	730.064.092.473	(110.438.044.612)	619.626.047.861	578.418.037.421	(91.993.672.774)	486.424.364.647
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.016.402.983.406	(72.388.014.872)	944.014.968.534	983.445.174.536	(51.506.945.658)	931.938.228.878
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.930.243.613.988	(364.456.539.093)	1.565.787.074.895	1.873.467.611.438	(340.215.836.170)	1.533.251.775.268
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	144.131.361.953	(34.504.274.610)	109.627.087.343	137.642.745.900	(29.057.419.254)	108.585.326.646
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.083.541.389.078	(337.182.419.604)	1.746.358.969.474	1.882.135.331.888	(290.114.803.343)	1.592.020.528.545
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	556.219.926.984	(61.462.435.333)	494.757.491.651	553.771.098.393	(47.451.196.201)	506.319.902.192
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	739.117.374.472	(209.055.295.451)	530.062.079.021	750.241.479.014	(193.354.839.431)	556.886.639.583
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	21.137.675.588.196	(4.558.876.072.562)	16.578.799.515.634	17.720.687.344.074	(4.120.803.236.600)	13.599.884.107.474
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	669.133.787.588	(138.352.024.302)	530.781.763.286	641.816.205.428	(164.277.431.690)	477.538.773.738

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	274.667.240.692	(24.927.059.575)	249.740.181.117	252.579.816.384	(19.700.164.644)	232.879.651.740
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245.317.298.605	(58.887.102.839)	186.430.195.766	245.317.298.605	(51.939.275.882)	193.378.022.723
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.020.982.337.974	(154.539.268.910)	866.443.069.064	951.563.570.792	(136.879.894.907)	814.683.675.885
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	329.194.678.847	(39.039.732.598)	290.154.946.249	330.387.908.090	(35.697.915.518)	294.689.992.572
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	367.230.483.740	(111.690.663.556)	255.539.820.184	340.567.625.332	(101.876.209.897)	238.691.415.435
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	11.440.763.193	(1.144.076.319)	10.296.686.874	13.058.303.193	(1.043.056.439)	12.015.246.754
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.060.044.349.465	(224.726.111.508)	835.318.237.957	1.108.913.087.133	(213.478.253.169)	895.434.833.964
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	503.775.867.237	(74.749.011.115)	429.026.856.122	496.220.140.998	(64.883.023.448)	431.337.117.550
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	249.040.949.062	(43.230.167.739)	205.810.781.323	246.873.832.513	(38.873.012.749)	208.000.819.764
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	147.070.688.731	(19.852.382.588)	127.218.306.143	146.085.491.154	(16.926.979.381)	129.158.511.773
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.215.315.192.230	(197.489.134.192)	1.017.826.058.038	1.105.408.347.634	(161.569.479.529)	943.838.868.105
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	607.102.240.600	(258.474.880.040)	348.627.360.560	805.804.854.900	(207.954.029.736)	597.850.825.164
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	882.480.723.826	(181.349.873.405)	701.130.850.421	742.838.607.831	(123.160.064.873)	619.678.542.958
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	317.054.317.655	(83.008.126.628)	234.046.191.027	296.511.486.642	(70.316.901.473)	226.194.585.169
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	113.637.697.525	(27.715.786.908)	85.921.910.617	105.679.034.732	(24.359.563.679)	81.319.471.053
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.950.542.915	(4.812.747.250)	15.137.795.665	20.103.550.480	(4.504.627.508)	15.598.922.972
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	466.235.260.661	(104.888.123.762)	361.347.136.899	462.280.170.172	(93.030.230.776)	369.249.939.396
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	232.559.835.154	(57.350.517.341)	175.209.317.813	233.874.874.154	(75.927.296.465)	157.947.577.689
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	687.835.852.268	(124.269.328.618)	563.566.523.650	664.526.079.484	(110.320.190.359)	554.205.889.125
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	913.574.996.570	(201.982.264.181)	711.592.732.389	905.663.787.449	(176.299.447.474)	729.364.339.975
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	794.985.145.735	(143.970.715.514)	651.014.430.221	794.505.857.974	(127.457.607.821)	667.048.250.153
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	254.853.529.859	(49.255.433.817)	205.598.096.042	245.333.338.859	(44.000.422.451)	201.332.916.408
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	407.107.703.622	(44.946.939.118)	362.160.764.504	404.563.747.058	(34.569.983.227)	369.993.763.831
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	65.863.779.175	(5.013.541.288)	60.850.237.887	67.600.455.175	(3.714.111.742)	63.886.343.433
68	100	KOMISI YUDISIAL	72.314.003.716	(13.493.236.208)	58.820.767.508	71.676.580.588	(12.046.203.734)	59.630.376.854
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	576.047.389.075	(46.697.340.620)	529.350.048.455	539.690.594.752	(36.152.213.811)	503.538.380.941
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	74.834.040.087	(11.906.893.096)	62.927.146.991	73.374.094.030	(10.509.071.360)	62.865.022.670
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	9.646.391.985	(237.480.480)	9.408.911.505
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	160.657.530.329	(11.037.351.555)	149.620.178.774	160.430.583.711	(7.822.127.627)	152.608.456.084
73	107	BADAN SAR NASIONAL	946.399.056.369	(103.131.248.788)	843.267.807.581	871.645.179.876	(87.502.161.506)	784.143.018.370
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	173.700.000	(45.429.231)	128.270.769	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	36.419.569.236	(3.345.626.821)	33.073.942.415	18.470.776.884	(2.542.362.987)	15.928.413.897
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	30.273.586.663	(2.894.590.367)	27.378.996.296	31.977.517.063	(2.478.612.721)	29.498.904.342
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.233.215.663.807	(188.568.337.618)	1.044.647.326.189	1.062.442.964.853	(171.837.704.041)	890.605.260.812
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	205.269.758.084	(14.835.307.177)	190.434.450.907	163.590.307.114	(11.133.631.431)	152.456.675.683
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.940.294.000	(77.611.760)	1.862.682.240	1.940.294.000	(38.805.880)	1.901.488.120
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	463.272.406.105	(159.301.576.147)	303.970.829.958	445.111.125.952	(148.107.172.858)	297.003.953.094
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	479.810.814.660	(194.357.970.143)	285.452.844.517	592.501.519.758	(181.647.766.883)	410.853.752.875

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.522.249.681.813	(120.080.591.206)	1.402.169.090.607	1.550.241.578.543	(89.340.104.053)	1.460.901.474.490
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	47.107.069.885	(6.237.784.772)	40.869.285.113	47.007.069.885	(5.297.312.232)	41.709.757.653
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**287.027.976.732.583**	**(61.566.239.473.462)**	**225.461.737.259.121**	**275.152.781.045.431**	**(56.276.139.037.825)**	**218.876.642.007.606**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	490.017.000	(4.900.170)	485.116.830	-	-	-
TOTAL			**287.028.466.749.583**	**(61.566.244.373.632)**	**225.462.222.375.951**	**275.152.781.045.431**	**(56.276.139.037.825)**	**218.876.642.007.606**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(3.553.308.580)	10.092.969.120	13.646.277.700	(3.200.892.824)	10.445.384.876
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	90.637.956.944	(40.142.772.764)	50.495.184.180	85.649.875.877	(35.643.662.046)	50.006.213.831
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	352.549.239.113	(216.390.289.863)	136.158.949.250	352.210.045.652	(203.330.032.143)	148.880.013.509
4	005	MAHKAMAH AGUNG	249.518.888.772	(96.517.729.176)	153.001.159.596	242.845.274.991	(89.453.541.866)	153.391.733.125
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	66.084.044.018	(39.860.667.266)	26.223.376.752	72.065.373.960	(40.501.407.913)	31.563.966.047
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	814.259.751.249	(514.733.606.903)	299.526.144.346	706.030.462.751	(467.514.250.394)	238.516.212.357
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	284.698.704.165	(122.075.841.748)	162.622.862.417	283.321.001.463	(109.991.065.265)	173.329.936.198
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	45.366.823.820	(39.488.880.748)	5.877.943.072	47.665.251.029	(41.846.666.413)	5.818.584.616
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	11.739.190.777.222	(7.201.855.039.741)	4.537.335.737.481	10.867.833.184.048	(6.773.185.627.655)	4.094.647.556.393
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	74.628.773.346	(48.688.864.957)	25.939.908.389	75.128.078.754	(46.378.170.689)	28.749.908.065
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	492.466.667.314	(191.431.511.743)	301.035.155.571	496.240.136.223	(177.977.779.276)	318.262.356.947
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	608.350.078.280	(267.419.208.831)	340.930.869.449	606.318.041.651	(250.159.940.102)	356.158.101.549
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	39.083.159.489	(14.838.695.711)	24.244.463.778	51.998.623.466	(16.011.633.283)	35.986.990.183
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.625.304.817.685	(361.226.107.241)	1.264.078.710.444	5.819.181.998.686	(732.456.322.764)	5.086.725.675.922
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	109.896.131.855.771	(51.100.510.033.793)	58.795.621.821.978	107.378.546.316.060	(45.175.573.540.813)	62.202.972.775.247
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	253.532.131.731	(112.982.103.721)	140.550.028.010	241.083.683.411	(99.058.055.228)	142.025.628.183
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	659.140.096.700	(322.164.666.134)	336.975.430.566	675.062.859.576	(308.745.534.426)	366.317.325.150
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	852.690.815.796	(223.662.940.060)	629.027.875.736	597.171.065.155	(240.808.398.494)	356.362.666.661
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	87.131.238.977	(62.661.926.117)	24.469.312.860	70.384.152.585	(53.427.066.754)	16.957.085.831
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	116.099.265.531	(54.928.812.462)	61.170.453.069	115.380.301.270	(48.260.685.072)	67.119.616.198
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	366.068.778.168	(161.409.243.755)	204.659.534.413	278.439.235.093	(125.520.345.514)	152.918.889.579
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.867.557.664.078	(1.329.097.279.387)	1.538.460.384.691	2.971.164.972.970	(1.295.206.973.758)	1.675.957.999.212
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	448.629.109.542.751	(276.172.334.850.102)	172.456.774.692.649	535.321.612.427.100	(240.614.899.608.726)	294.706.712.818.374
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMAN	2.475.255.400	(542.701.287)	1.932.554.113	2.475.255.400	(478.544.521)	1.996.710.879
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(33.171.325)	111.214.675	144.386.000	(29.561.675)	114.824.325
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	56.927.687.773	(29.161.163.550)	27.766.524.223	60.913.210.545	(28.941.968.759)	31.971.241.786
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(987.919.863)	2.213.136.557	3.201.056.420	(899.703.235)	2.301.353.185
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.275.363.488.177	(628.405.530.355)	646.957.957.822	1.266.045.901.613	(612.037.645.046)	654.008.256.567
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	48.254.855.445	(22.103.633.324)	26.151.222.121	49.425.853.297	(20.841.120.705)	28.584.732.592
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA	5.152.456.725	(4.633.723.553)	518.733.172	5.152.456.725	(3.605.557.207)	1.546.899.518
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(603.858.894)	791.357.656	1.395.216.550	(559.128.606)	836.087.944
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	142.624.465.295	(60.540.546.196)	82.083.919.099	150.949.571.850	(61.163.364.890)	89.786.206.960
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.449.601.826	(12.861.647.553)	24.587.954.273	37.449.601.826	(11.686.681.487)	25.762.920.339
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.507.585.170	(3.153.379.513)	3.354.205.657	6.507.585.170	(2.942.850.366)	3.564.734.804
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	22.816.996.787	(8.898.074.532)	13.918.922.255	22.416.744.583	(8.131.569.681)	14.285.174.902
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(957.853.858)	53.766.515.084	54.724.368.942	(923.932.208)	53.800.436.734
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.262.337.137	(12.101.181.807)	19.161.155.330	30.161.281.609	(11.237.338.868)	18.923.942.741
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	847.085.525.229	(459.488.158.831)	387.597.366.398	824.913.528.281	(423.204.897.391)	401.708.630.890

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.520.550.327	(7.227.367.300)	21.293.183.027	26.004.587.222	(6.542.559.991)	19.462.027.231
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.118.997.502	(2.059.426.170)	9.059.571.332	3.999.150.587	(1.527.179.401)	2.471.971.186
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.863.164.183	(1.607.288.915)	3.255.875.268	4.863.164.183	(1.483.491.423)	3.379.672.760
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	45.387.927.803	(15.750.916.292)	29.637.011.511	39.273.107.803	(13.880.200.515)	25.392.907.288
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	732.005.217.423	(190.165.972.058)	541.839.245.365	965.108.724.575	(238.312.806.499)	726.795.918.076
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	27.500.273.480	(14.123.553.364)	13.376.720.116	25.919.449.694	(13.003.248.677)	12.916.201.017
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	229.990.006.233	(93.183.026.150)	136.806.980.083	253.577.868.489	(109.838.853.630)	143.739.014.859
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.284.045.495	(462.665.517)	821.379.978	1.427.412.095	(489.216.236)	938.195.859
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.054.462.043	(23.280.974.631)	21.773.487.412	45.408.062.043	(22.339.764.668)	23.068.297.375
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	628.286.198	(357.002.027)	271.284.171	628.286.198	(299.882.741)	328.403.457
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	203.024.166.928	(90.114.751.486)	112.909.415.442	245.205.663.209	(101.188.942.446)	144.016.720.763
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	121.863.800.285	(41.252.018.440)	80.611.781.845	51.315.651.636	(38.393.630.345)	12.922.021.291
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	123.426.801.131	(33.644.640.593)	89.782.160.538	121.834.021.131	(28.691.696.172)	93.142.324.959
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	42.420.442.869	(26.651.419.398)	15.769.023.471	45.407.620.981	(26.414.878.053)	18.992.742.928
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.420.314.030	(2.880.752.972)	6.539.561.058	8.863.738.475	(2.654.457.977)	6.209.280.498
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.030.662.162)	1.241.749.710	2.272.411.872	(1.439.292.232)	833.119.640
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	9.201.428.880	(3.660.184.058)	5.541.244.822	8.471.679.216	(2.828.017.204)	5.643.662.012
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.741.372.797	(6.158.324.313)	5.583.048.484	11.543.273.797	(5.820.756.893)	5.722.516.904
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23.239.393.756	(14.151.529.407)	9.087.864.349	23.258.684.256	(13.120.348.736)	10.138.335.520
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	15.185.311.538	(8.812.507.418)	6.372.804.120	17.382.563.038	(8.392.713.148)	8.989.849.890
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	25.690.278.749	(22.060.204.221)	3.630.074.528	25.507.442.449	(21.815.136.017)	3.692.306.432
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.881.430.936	(8.990.874.337)	2.890.556.599	12.049.455.936	(8.468.621.459)	3.580.834.477
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	126.156.177.603	(34.948.712.402)	91.207.465.201	117.956.045.292	(30.211.403.577)	87.744.641.715
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	27.677.000	(294.436)	27.382.564
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.628	(3.457.085.931)	131.783.697	3.588.869.628	(3.449.181.876)	139.687.752
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(119.042.900)	1.071.386.100	1.190.429.000	(71.425.740)	1.119.003.260
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	12.077.735.207	(9.823.672.353)	2.254.062.854	12.120.395.452	(9.338.483.788)	2.781.911.664
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	597.961.790.333	(115.474.586.535)	482.487.203.798
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	(14.326.273.749)	(14.326.273.749)
73	107	BADAN SAR NASIONAL	57.593.114.435	(15.385.843.125)	42.207.271.310	46.592.688.404	-	46.592.688.404
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	105.238.959.033	(20.686.235.155)	84.552.723.878	48.908.454.347	(15.492.578.981)	33.415.875.366
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	(20.567.863.530)	(20.567.863.530)
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	36.015.310.318	(24.129.367.370)	11.885.942.948	39.235.842.818	(3.751.983.407.915)	(3.712.747.565.097)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	7.427.274.269.254	(3.962.176.977.500)	3.465.097.291.754	7.405.404.216.665	(15.167.736.562)	7.390.236.480.103
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	58.854.528.469	(19.411.879.312)	39.442.649.157	52.401.186.939	-	52.401.186.939
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.115.711.700	(553.413.763)	562.297.937	1.113.759.200	(452.987.967)	660.771.233
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	20.006.091.035	(10.974.725.569)	9.031.365.466	23.581.471.790	(11.500.132.399)	12.081.339.391

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	26.715.212.180	(12.077.175.979)	14.638.036.201	20.917.102.526	(12.922.798.209)	7.994.304.317
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	617.385.904.920	(278.289.223.243)	339.096.681.677	695.650.598.420	(241.033.704.575)	454.616.893.845
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	35.895.980.460	(6.833.181.469)	29.062.798.991	35.895.980.460	(5.993.291.059)	29.902.689.401
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**593.013.461.009.196**	**(344.948.939.522.544)**	**248.064.521.486.652**	**680.926.723.185.441**	**(303.050.766.911.424)**	**377.875.956.274.017**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	227.735.842.632	(60.842.255.085)	166.893.587.547	154.452.073.132	(40.889.131.179)	113.562.941.953
TOTAL			**593.241.196.851.828**	**(345.009.781.777.629)**	**248.231.415.074.199**	**681.081.175.258.573**	**(303.091.656.042.603)**	**377.989.519.215.970**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	73.440.383.488	-	73.440.383.488	66.451.125.475	0	66.451.125.475
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	19.832.817.868	-	19.832.817.868	19.238.192.079	0	19.238.192.079
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	24.329.110.328	(482.415.781)	23.846.694.547	23.870.580.607	(402.519.155)	23.468.061.452
4	005	MAHKAMAH AGUNG	73.890.244.537	(525.440.920)	73.364.803.617	65.999.639.840	(546.287.205)	65.453.352.635
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.425.940.639	(497.222.054)	11.928.718.585	11.619.447.041	(416.868.300)	11.202.578.741
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.214.731.558.617	(4.503.555.713)	3.210.228.002.904	1.224.227.578.028	(4.457.307.775)	1.219.770.270.253
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	186.880.348.286	(137.811.871.932)	49.068.476.354	190.887.797.956	(79.580.030.559)	111.307.767.397
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.258.327.925	(5.861.398.720)	91.396.929.205	94.709.830.232	(5.748.953.851)	88.960.876.381
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.624.453.663.962	(1.365.586.686.650)	4.258.866.977.312	4.147.202.957.721	(987.436.356.496)	3.159.766.601.225
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	68.218.739.768	(6.043.713.717)	62.175.026.051	70.832.527.797	(5.787.294.902)	65.045.232.895
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	51.089.377.176	(585.696.709)	50.503.680.467	55.953.215.349	(549.119.806)	55.404.095.543
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	72.295.320.166	(1.468.982.573)	70.826.337.593	79.520.885.958	(1.263.655.777)	78.257.230.181
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	28.003.391.321	(1.022.149.100)	26.981.242.221	29.911.166.531	(1.021.649.100)	28.889.517.431
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	430.305.894.454	(1.598.722.991)	428.707.171.463	439.695.860.786	(1.380.257.420)	438.315.603.366
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.303.454.098.620	(80.887.399.119)	3.222.566.699.501	3.207.799.393.553	(125.112.862.944)	3.082.686.530.609
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	412.300.389.335	(4.722.701.103)	407.577.688.232	338.127.542.172	(4.344.229.407)	333.783.312.765
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	180.330.322.376	(3.278.310.046)	177.052.012.330	253.351.060.234	(7.157.937.466)	246.193.122.768
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.320.276.033.117	(71.400.253.882)	1.248.875.779.235	1.234.806.086.792	(66.758.185.989)	1.168.047.900.803
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	16.880.404.515	(1.190.018.197)	15.690.386.318	8.817.233.763	(83.195.375)	8.734.038.388
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	14.798.697.676	(3.430.878.695)	11.367.818.981	14.788.440.270	(3.115.510.718)	11.672.929.552
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	105.333.767.646	(5.249.320.685)	100.084.446.961	103.905.414.761	(5.168.946.240)	98.736.468.521
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.166.184.657	(6.111.680.008)	110.054.504.649	146.902.957.776	(6.126.218.671)	140.776.739.105
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	35.911.136.545.120	(5.821.560.452.289)	30.089.576.092.831	35.350.410.359.224	(3.816.556.095.304)	31.533.854.263.920
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	24.595.834.418	(3.000.000)	24.592.834.418	23.244.640.159	(3.000.000)	23.241.640.159
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925	-	63.071.925	63.071.925	0	63.071.925

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.439.174.836	(120.264.375)	1.318.910.461	944.775.132	(85.903.125)	858.872.007
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	15.236.395.367	(840.089.751)	14.396.305.616	22.423.958.462	(856.756.608)	21.567.201.854
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.046.413.262	-	1.046.413.262	1.260.287.262	0	1.260.287.262
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.019.472.809.235	(53.255.002.897)	966.217.806.338	952.144.078.123	(46.515.557.958)	905.628.520.165
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.069.152.260	-	3.069.152.260	2.599.575.930	(4.137.388)	2.595.438.542
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.310.076	(13.875.000)	301.435.076	310.310.194	(10.125.000)	300.185.194
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	864.607.100	-	864.607.100	3.111.007.523	0	3.111.007.523
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.133.994.145	(39.750.000)	3.094.244.145	2.942.398.145	(39.750.000)	2.902.648.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.778.000.866	(143.498.901)	6.634.501.965	7.677.372.866	(281.244.276)	7.396.128.590
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	811.201.704	-	811.201.704	811.201.704	0	811.201.704
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	51.045.639.716	(38.727.714)	51.006.912.002	47.815.514.459	(9.460.000)	47.806.054.459
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5.379.109.730	-	5.379.109.730	5.146.207.030	0	5.146.207.030
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.478.019.156.338	(2.384.273.929)	1.475.634.882.409	1.330.272.790.778	(2.312.106.304)	1.327.960.684.474
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	194.244.882.925	(15.900.000)	194.228.982.925	162.468.924.990	(15.900.000)	162.453.024.990
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.196.091.736	(368.160.615)	47.827.931.121	42.290.193.159	(437.950.434)	41.852.242.725
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	66.043.685.608	(18.098.799.570)	47.944.886.038	138.370.540.740	(16.974.085.381)	121.396.455.359
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	18.972.377.860	(58.607.348)	18.913.770.512	18.367.157.511	(19.994.563)	18.347.162.948
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.573.803.403	(886.617.168)	9.687.186.235	9.781.286.403	(788.526.090)	8.992.760.313
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	13.069.442.164	(2.150.063.936)	10.919.378.228	9.297.243.795	(2.020.752.373)	7.276.491.422
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	159.755.240.972	(14.323.842.768)	145.431.398.204	212.537.171.053	(18.116.842.339)	194.420.328.714
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.936.690.490	(64.150.063)	2.872.540.427	2.895.657.920	(50.996.125)	2.844.661.795
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.553.250.979	(33.534.981)	1.519.715.998	1.452.974.731	(33.534.981)	1.419.439.750
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.972.272.991	(753.816.700)	12.218.456.291	8.683.016.521	(753.816.700)	7.929.199.821
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.878.987.154	(676.408.641)	3.202.578.513	2.877.583.766	(555.459.390)	2.322.124.376

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	24.893.021.573	(206.912.750)	24.686.108.823	23.018.919.620	0	23.018.919.620
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	306.151.787	(22.552.500)	283.599.287	286.237.147	(22.552.500)	263.684.647
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	366.066.403.488	(13.406.000)	366.052.997.488	373.114.069.121	(13.406.000)	373.100.663.121
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	26.806.386.594	(31.200.000)	26.775.186.594	26.896.865.153	(31.200.000)	26.865.665.153
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	39.222.145.529	(263.783.941)	38.958.361.588	36.316.206.117	(65.147.500)	36.251.058.617
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	13.422.975.780	(17.952.500)	13.405.023.280	13.075.435.280	(13.635.000)	13.061.800.280
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	12.365.100.402	(36.400.000)	12.328.700.402	12.274.176.402	(36.400.000)	12.237.776.402
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	3.307.132.388	-	3.307.132.388	7.187.550.434	0	7.187.550.434
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.040.553.507	(3.000.000)	2.037.553.507	2.139.936.140	(3.000.000)	2.136.936.140
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.109.228.202	(66.608.214)	6.042.619.988	5.783.313.827	(64.027.200)	5.719.286.627
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.627.955.878	(60.483.100)	15.567.472.778	15.346.484.496	(60.483.100)	15.286.001.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.889.943.122	(129.192.970)	9.760.750.152	7.240.522.049	(29.800.000)	7.210.722.049
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.810.633.321	(457.712.040)	3.352.921.281	2.492.311.492	(352.306.255)	2.140.005.237
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.246.574.376	(615.062.339)	7.631.512.037	7.757.976.025	(582.003.214)	7.175.972.811
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	86.321.915.762	(33.603.053.855)	52.718.861.907	50.964.957.299	(10.270.649.714)	40.694.307.585
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	7.297.619.585	-	7.297.619.585	7.354.852.418	0	7.354.852.418
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.466.968.323	(391.613.526)	44.075.354.797	42.473.617.501	0	42.473.617.501
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.901.048.257	-	1.901.048.257	1.256.182.536	0	1.256.182.536
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	13.345.213.780	-	13.345.213.780	10.970.170.780	0	10.970.170.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	10.637.399.936	(276.955.250)	10.360.444.686	10.192.040.942	(276.955.250)	9.915.085.692
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	3.305.748.483	0	3.305.748.483
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	641.685.335	(34.150.000)	607.535.335	546.809.785	(34.150.000)	512.659.785
73	107	BADAN SAR NASIONAL	21.973.714.657	(1.869.041.000)	20.104.673.657	19.284.334.945	0	19.284.334.945
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.787.801.648	(5.637.500)	1.782.164.148	1.859.938.530	(5.637.500)	1.854.301.030
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.588.990.050	-	5.588.990.050	5.542.088.050	0	5.542.088.050

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.225.119.385	(336.465.610)	3.888.653.775	3.069.208.880	(100.682.392)	2.968.526.488
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	17.069.784.125	-	17.069.784.125	17.727.381.614	-	17.727.381.614
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.912.068.009	(536.448.250)	14.375.619.759	14.901.552.509	(473.027.250)	14.428.525.259
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	-	4.497.207.735	4.497.207.735	0	4.497.207.735
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.123.646.923	-	1.123.646.923	1.025.306.923	0	1.025.306.923
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.713.420.664	(133.760.620)	10.579.660.044	18.235.785.529	(74.100.003)	18.161.685.526
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	15.821.273.204	(6.090.618.088)	9.730.655.116	15.391.594.544	(6.049.865.752)	9.341.728.792
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	5.090.373.816	(1.471.137.102)	3.619.236.714	3.159.583.066	(1.393.306.602)	1.766.276.464
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298	39.134.440.949	(136.874.651)	38.997.566.298
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	20.230.559.652	-	20.230.559.652	1.755.192.300	0	1.755.192.300
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	77.166.944.364	(64.050.000)	77.102.894.364	76.437.138.451	0	76.437.138.451
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	13.751.130.817	-	13.751.130.817	8.426.720.817	0	8.426.720.817
JUMLAH PADA K/L			**55.451.024.499.709**	**(7.665.412.014.697)**	**47.785.612.485.012**	**51.080.294.513.044**	**(5.233.439.279.028)**	**45.846.855.234.016**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	87.194.673.901	(12.456.910.765)	74.737.763.136	84.997.116.700	(5.013.140.737)	79.983.975.963
TOTAL			**55.538.219.173.610**	**(7.677.868.925.462)**	**47.860.350.248.148**	**51.165.291.629.744**	**(5.238.452.419.765)**	**45.926.839.209.979**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	18.925.965.286	17.328.422.600
4	005	MAHKAMAH AGUNG	195.373.014.198	239.137.575.785
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	15.699.534.950	17.864.222.300
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.325.208.050	12.376.892.818
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.496.252.653	152.309.976.430
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	415.204.726.270	89.431.455.069
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.991.717.524.943	18.532.210.503.625
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	722.754.577.352	288.538.742.791
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	278.968.308.402	206.417.421.601
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	14.198.879.909	22.236.085.173
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	51.976.363.654	63.090.939.723
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	667.023.445.885	532.270.673.797
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	42.859.398.535.213	32.109.534.219.729
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	764.495.228.518	701.356.750.775
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.148.494.656.000	3.379.500.085.896
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.840.176.765.988	1.235.865.769.638
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	57.859.210.133	22.775.291.346
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	623.272.587	623.272.587
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	35.479.636.017	41.570.765.718
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	339.926.330.712	329.571.709.867
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.955.196.610.516	52.596.156.693.721
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	1.861.761.752
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	240.073.284.120	221.138.438.031
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	47.802.332.780	1.288.255.220
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	6.242.058.075.615	5.442.112.727.159
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	4.407.331.012	2.505.285.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	5.369.662.030	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	247.504.586.414	4.241.599.437
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	23.786.153.661	1.265.812.700
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	16.179.258.363	28.726.057.332
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	742.732.400	7.013.851.417
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.346.499.832.363	3.488.138.787.834
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	85.011.000.826	5.855.812.906
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.553.739.362	5.553.739.362
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.585.610.008	80.224.344.455
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	11.181.884.170	24.495.714.219
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.761.235.555	3.190.102.000
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	44.085.900	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	41.661.090.360	12.939.713.578
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	1.225.776.283
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	14.122.950.475	8.701.286.854
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	7.778.778.600	684.298.900
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.223.689.500	845.053.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	583.053.947.699	391.004.559.635
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	4.384.589.900
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	45.122.863.976	3.837.380.508
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	28.583.355.350	12.468.732.200
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.712.566.399	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.584.600.500	7.265.552.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	18.547.973.000	202.790.179.132
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	834.285.000	2.770.819.290
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	1.065.989.528
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	19.009.056.300
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.534.331.148	2.352.784.000
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	648.273.500
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	27.005.000	1.401.456.713
73	107	BADAN SAR NASIONAL	200.985.906.541	680.670.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	99.438.855.200	51.250.225.230
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.482.425.218	11.754.922.708
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	437.978.646.602	426.717.114.669
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.907.353.514	1.439.032.500
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	463.125.675	17.418.636.877
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	157.235.901.675	93.881.368.045
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	847.029.736.240	704.879.141.912
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	12.131.378.142
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			**130.374.085.651.859**	**121.909.229.164.089**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	211.040.616.878	50.099.177.219
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	
TOTAL			**130.585.126.268.737**	**121.959.328.341.308**

Lampiran 20

Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	108.400.474	(542.003)	107.858.471
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	216.000.000	(210.030.000)	5.970.000	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.196.262.033	(2.696.178.366)	500.083.667	2.908.215.990	(2.523.276.509)	384.939.481
4	005	MAHKAMAH AGUNG	13.770.947	(68.854)	13.702.093	49.115.563	(245.578)	48.869.985
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	93.888.627	(469.443)	93.419.184	99.858.627	(499.293)	99.359.334
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.750.000	(93.750)	18.656.250	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	-	-	-	1.022.251.411	(744.651.976)	277.599.435
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	825.035.872	(788.281.647)	36.754.225	992.767.597	(947.375.148)	45.392.449
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.097.460.531	(85.597.165)	1.011.863.366	901.155.492	(16.168.275)	884.987.217
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.051.328.428	(11.772.909.904)	278.418.524	11.935.622.280	(11.532.349.151)	403.273.129
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	9.199.782.860	(132.861.669)	9.066.921.191	927.024.746	(77.866.372)	849.158.374
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	750.000	(3.750)	746.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.894.416.883	(498.436.997)	9.395.979.886	9.289.750.741	(306.686.998)	8.983.063.743
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	88.902.167	(444.511)	88.457.656	9.300.000	(46.500)	9.253.500
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.843.156.898	(1.672.952.782)	7.170.204.116	8.906.350.598	(1.616.556.125)	7.289.794.473
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	800.585.529	(5.075.000)	795.510.529	792.492.741	(119.163)	792.373.578
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	29.000.000	(145.000)	28.855.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.686.969.463	(1.271.842.162)	1.415.127.301	2.730.658.857	(1.272.060.609)	1.458.598.248
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	71.515.619	(215.130)	71.300.489	258.335.449	(1.201.934)	257.133.515
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	431.664.134	(236.413.983)	195.250.151	395.413.327	(287.925.030)	107.488.297
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	168.064.805	(168.064.805)	-	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33.964.410	(169.822)	33.794.588	33.964.410	(169.822)	33.794.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	7.659.162.099	(5.389.399.515)	2.269.762.584	5.939.574.151	(5.380.169.465)	559.404.686
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	784.230.781	(784.230.781)	-	817.073.466	(817.073.466)	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	280.954.219	(23.539.911)	257.414.308	77.732.912	(5.475.316)	72.257.596

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.818.354.115	(2.008.102.701)	810.251.414	2.893.259.407	(2.008.394.105)	884.865.302
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	101.589.211	(507.945)	101.081.266	91.984.349	(459.921)	91.524.428
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.580.559.280	(1.338.850.567)	9.241.708.713	8.101.385.125	(1.325.510.920)	6.775.874.205
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	10.113.380	(50.567)	10.062.813	14.953.364	(74.767)	14.878.597
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	756.943.840	(755.401.590)	1.542.250	747.851.422	(740.827.049)	7.024.373
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	19.541.286	-	19.541.286	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	58.626.778	(790.655)	57.836.123	118.837.638	(791.005)	118.046.633
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	189.863.000	(189.863.000)	-	212.680.410	(1.063.402)	211.617.008
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.238.000	(26.190)	5.211.810	108.356.464	(541.782)	107.814.682
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.770.862.410	(117.604.056)	5.653.258.354	3.015.240.306	(147.605.981)	2.867.634.325
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	25.476.000	(2.547.600)	22.928.400
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.782.496.467	(9.782.496.467)	-	62.463.254.102	(62.463.254.102)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	22.905.685.655	(19.967.042.473)	2.938.643.182	23.542.910.041	(20.650.812.959)	2.892.097.082
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594	65.957.508.409	(65.957.508.409)	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8.360.332.688	(5.777.466.579)	2.582.866.109	2.026.247.201	(2.026.247.201)	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.710.968.626	(10.700.119.146)	10.849.480	10.600.324.210	(10.585.391.250)	14.932.960
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.360.000	(71.800)	14.288.200	71.360.000	(356.800)	71.003.200
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	155.172.436	(775.862)	154.396.574	222.413.805	(1.112.069)	221.301.736
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	3.499.500	(17.498)	3.482.002
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	28.816.238.986	(28.552.394.836)	263.844.150	30.241.842.834	(29.922.736.384)	319.106.450
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.267.093.320	(331.351.332)	1.935.741.988	2.249.977.644	(331.265.754)	1.918.711.890
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	152.132.669	(760.663)	151.372.006	254.654.453	(1.273.272)	253.381.181
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	2.750.000	(13.750)	2.736.250
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	527.808.275	(169.984.725)	357.823.550	293.020.000	(1.465.100)	291.554.900
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	70.990.922	(1.340.922)	69.650.000	2.081.830	(2.081.830)	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	101.182.608	(505.913)	100.676.695	116.847.608	(584.238)	116.263.370
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	363.569.394	(1.304.097)	362.265.297	123.125.000	(49.375)	123.075.625
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	110.096.000	(550.480)	109.545.520	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**163.209.394.539**	**(105.463.890.057)**	**57.745.504.482**	**261.894.714.759**	**(221.870.658.811)**	**40.024.055.948**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			**163.209.394.539**	**(105.463.890.057)**	**57.745.504.482**	**261.894.714.759**	**(221.870.658.811)**	**40.024.055.948**

Lampiran 21

Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.887.621.020	-	(1.570.558.520)	317.062.500	2.048.944.540	-	(1.260.756.045)	**788.188.495**
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	47.375.876.247	-	(22.343.908.839)	25.031.967.408	41.851.828.145	-	(20.248.695.119)	**21.603.133.026**
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	176.965.980.064	-	(113.780.436.620)	63.185.543.444	186.848.003.424	-	(92.995.689.043)	**93.852.314.381**
4	005	MAHKAMAH AGUNG	35.119.419.017	-	(30.230.407.133)	4.889.011.884	31.509.885.319	-	(27.460.451.378)	**4.049.433.941**
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	615.696.541.777	-	(213.679.502.596)	402.017.039.181	279.643.543.244	-	(86.512.450.302)	**193.131.092.942**
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	55.941.988.423	-	(29.025.309.652)	26.916.678.771	35.096.856.423	-	(21.646.238.431)	**13.450.617.992**
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	803.524.362.949	-	(762.999.735.964)	40.524.626.985	787.967.553.266	-	(710.627.656.569)	**77.339.896.697**
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	92.736.286.129	-	(59.712.893.675)	33.023.392.454	85.980.730.994	-	(42.920.934.432)	**43.059.796.562**
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.298.265.237.160	186.738.706.991	(1.146.630.409.887)	2.338.373.534.264	3.276.440.860.850	160.554.154.191	(933.005.739.662)	**2.503.989.275.379**
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	526.019.128.257	-	(354.852.166.897)	171.166.961.360	486.690.695.488	-	(328.424.502.247)	**158.266.193.241**
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.370.630.220.833	-	(1.085.012.343.458)	285.617.877.375	1.202.236.914.878	-	(952.878.516.287)	**249.358.398.591**
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	92.020.243.837	-	(22.006.731.346)	70.013.512.491	91.781.280.244	-	(29.988.481.728)	**61.792.798.516**
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	27.358.799.081	-	(22.442.735.215)	4.916.063.866	24.275.992.406	-	(19.322.236.131)	**4.953.756.275**
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	249.839.002.115	213.324.400	(173.012.024.968)	77.040.301.547	234.486.989.726	213.324.400	(150.362.467.998)	**84.337.846.128**
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.488.094.406.760	44.504.716.108	(412.839.551.474)	2.119.759.571.394	2.226.511.102.716	27.384.526.240	(350.226.863.727)	**1.903.668.765.229**
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	273.541.419.740	-	(135.847.321.339)	137.694.098.401	280.089.370.653	-	(130.993.724.869)	**149.095.645.784**
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	271.946.991.563	-	(180.961.896.869)	90.985.094.694	230.678.798.039	-	(155.600.611.475)	**75.078.186.564**
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	161.835.481.098	-	(101.780.914.757)	60.054.566.341	140.303.459.538	-	(92.128.112.341)	**48.175.347.197**
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	51.411.962.866	-	(32.738.104.837)	18.673.858.029	46.692.881.104	-	(25.381.243.244)	**21.311.637.860**
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	94.613.896.087	-	(72.837.403.209)	21.776.492.878	84.518.479.682	-	(62.238.285.243)	**22.280.194.439**
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	113.349.663.351	-	(58.461.720.931)	54.887.942.420	128.691.760.797	-	(55.131.953.667)	**73.559.807.130**
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	216.434.890.696	-	(97.851.052.099)	118.583.838.597	227.867.709.404	-	(83.211.149.032)	**144.656.560.372**
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.484.744.654.096	33.446.695.075	(102.086.956.816)	7.416.104.392.355	7.109.439.406.318	18.272.265.508	(79.343.230.442)	**7.048.368.441.384**
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.430.621.425	-	(11.331.679.989)	2.098.941.436	12.973.832.925	-	(10.509.786.354)	**2.464.046.571**
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	14.473.017.969	-	(6.536.854.292)	7.936.163.677	11.050.106.455	-	(3.726.105.444)	**7.324.001.011**
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.267.026.500	-	(674.038.438)	592.988.062	824.826.500	-	(573.706.813)	**251.119.687**
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	43.742.820.878	-	(14.411.746.192)	29.331.074.686	40.509.270.005	-	(9.107.497.914)	**31.401.772.091**
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.033.447.590	-	(16.821.802.780)	6.211.644.810	20.665.430.090	-	(18.187.193.269)	**2.478.236.821**
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	685.639.932.233	10.000.000	(297.142.550.306)	388.507.381.927	659.214.561.968	-	(272.364.973.760)	**386.849.588.208**
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	34.332.242.833	-	(35.572.294.821)	(1.240.051.988)	33.602.470.392	-	(32.610.613.123)	**991.857.269**
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.450.041.700	-	(11.906.626.938)	5.543.414.762	17.450.041.700	-	(8.120.515.137)	**9.329.526.563**
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.212.718.420	-	(2.304.079.688)	908.638.732	2.764.262.420	-	(1.801.383.655)	**962.878.765**
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.625.879.247.072	-	(748.798.612.096)	2.877.080.634.976	2.395.915.619.396	-	(666.254.090.724)	**1.729.661.528.672**
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	524.522.811.827	-	(327.481.890.454)	197.040.921.373	519.579.003.827	-	(290.434.062.700)	**229.144.941.127**
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	118.329.609.412	-	(60.653.532.110)	57.676.077.302	125.931.109.678	-	(34.387.154.066)	**91.543.955.612**
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	660.902.639.698	-	(444.748.810.285)	216.153.829.413	610.562.099.050	-	(398.430.633.714)	**212.131.465.336**
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	49.586.947.884	-	(35.707.224.356)	13.879.723.528	44.716.060.923	-	(28.275.579.590)	**16.440.481.333**
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	199.607.672.280	-	(143.313.223.160)	56.294.449.120	188.349.708.641	-	(136.594.388.921)	**51.755.319.720**
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133.099.603.713	-	(35.222.740.249)	97.876.863.464	120.320.467.050	-	(31.789.615.621)	**88.530.851.429**
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362.881.073.382	-	(276.796.047.384)	86.085.025.998	348.431.857.608	-	(253.534.169.345)	**94.897.688.263**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.260.389.635.058	-	(1.118.262.922.344)	2.142.126.712.714	2.566.058.520.086	-	(616.095.070.229)	**1.949.963.449.857**
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	97.890.198.613	-	(38.480.862.511)	59.409.336.102	87.632.831.258	8.236.000	(30.274.586.793)	**57.366.480.465**
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	210.664.394.406	-	(189.805.985.167)	20.858.409.239	202.982.948.732	-	(176.043.862.461)	**26.939.086.271**
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	80.164.757.135	-	(58.478.381.211)	21.686.375.924	72.133.349.427	-	(55.244.939.910)	**16.888.409.517**
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	150.801.107.700	-	(89.207.571.092)	61.593.536.608	134.423.480.480	620.181.072	(73.698.815.701)	**61.344.845.851**
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.854.215.654	-	(4.167.482.042)	3.686.733.612	7.775.495.654	-	(3.350.454.065)	**4.425.041.589**
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37.160.307.101	-	(31.840.084.367)	5.320.222.734	35.664.443.701	-	(26.404.030.957)	**9.260.412.744**
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	658.885.000	-	(2.722.070.005)	(2.063.185.005)	2.807.924.589	-	(2.517.750.527)	**290.174.062**
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	449.658.379.456	-	(399.190.246.112)	50.468.133.344	435.079.324.618	-	(322.305.865.181)	**112.773.459.437**
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.162.754.056	-	(6.312.261.630)	4.850.492.426	5.281.486.456	-	(3.941.423.652)	**1.340.062.804**
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	27.256.404.411	-	(12.509.075.514)	14.747.328.897	15.188.586.616	-	(10.314.413.285)	**4.874.173.331**
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	23.821.857.738	-	(18.799.050.866)	5.022.806.872	23.693.936.634	-	(15.605.032.978)	**8.088.903.656**
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	126.791.506.448	-	(26.578.765.283)	100.212.741.165	68.725.714.782	-	(23.582.931.031)	**45.142.783.751**
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	38.345.597.682	-	(24.382.605.982)	13.962.991.700	29.703.690.264	-	(21.215.361.924)	**8.488.328.340**
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	108.958.715.394	-	(95.581.586.295)	13.377.129.099	101.173.070.117	-	(90.335.040.760)	**10.838.029.357**
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	374.445.802.861	4.528.150.000	(87.637.845.809)	291.336.107.052	288.449.451.263	109.347.500	(62.258.641.367)	**226.300.157.396**
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.642.771.136.054	2.421.811.801	(1.527.896.901.137)	1.117.296.046.718	2.324.586.515.746	12.447.669.044	(1.236.507.054.414)	**1.100.527.130.376**
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.160.797.150	-	(8.091.726.868)	1.069.070.282	9.964.060.400	-	(6.120.315.114)	**3.843.745.286**
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	10.668.937.629	-	(4.343.875.451)	6.325.062.178	5.914.301.501	-	(2.686.023.015)	**3.228.278.486**
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.891.837.900	-	(2.804.112.568)	1.087.725.332	2.907.022.400	-	(2.603.776.400)	**303.246.000**
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.520.424.655	-	(9.057.490.982)	2.462.933.673	11.164.778.155	-	(8.600.850.258)	**2.563.927.897**
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	178.604.173.959	-	(168.328.442.736)	10.275.731.223	171.319.688.743	-	(164.208.110.769)	**7.111.577.974**
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	47.405.179.997	701.263.200	(24.729.384.337)	23.377.058.860	28.890.230.947	91.848.750	(17.877.018.118)	**11.105.061.579**
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	103.885.747.514	-	(89.625.170.759)	14.260.576.755	115.035.820.201	-	(93.057.662.629)	**21.978.157.572**
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	935.513.694.684	-	(12.160.483.365)	923.353.211.319	18.380.270.511	662.762.984.362	(9.321.727.022)	**671.821.527.851**
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	69.466.817.064	725.055.000	(41.814.250.597)	28.377.621.467	59.262.265.326	-	(34.917.771.045)	**24.344.494.281**
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.813.495.152	-	(6.618.468.543)	(1.804.973.391)	4.601.574.152	-	(6.083.556.008)	**(1.481.981.856)**
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.017.355.940	-	(2.086.234.928)	931.121.012	2.304.693.472	-	(1.792.254.982)	**512.438.490**
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	190.119.649.115	-	(65.536.374.673)	124.583.274.442	168.552.971.840	-	(38.539.342.467)	**130.013.629.373**
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	14.469.131.238	-	(12.144.886.323)	2.324.244.915	13.433.259.188	-	(11.081.823.262)	**2.351.435.926**
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	549.989.747	-	(475.697.897)	**74.291.850**
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	29.107.768.566	1.714.492.815	(19.466.375.243)	11.355.886.138	26.292.596.173	1.524.809.315	(18.131.785.630)	**9.685.619.858**
73	107	BADAN SAR NASIONAL	204.836.520.335	-	(97.201.349.826)	107.635.170.509	157.063.868.355	-	(69.605.396.465)	**87.458.471.890**
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	882.292.863	-	(612.519.108)	269.773.755	853.777.863	-	(617.551.548)	**236.226.315**
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	85.906.871.271	2.160.000	(2.263.892.478)	83.645.138.793	83.622.017.421	157.293.440	(2.035.890.228)	**81.743.420.633**
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	764.229.234	-	(663.562.449)	100.666.785	669.729.234	-	(537.294.420)	**132.434.814**
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	204.846.316.215	-	(9.166.239.619)	195.680.076.596	185.113.852.194	-	(7.805.174.514)	**177.308.677.680**
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	193.842.470.450	3.302.885.193	(19.487.045.291)	177.658.310.352	66.148.324.196	3.302.885.193	(17.457.399.673)	**51.993.809.716**
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	232.294.756.728	-	(20.885.329.074)	211.409.427.654	232.294.756.728	-	(7.208.755.326)	**225.086.001.402**
80	114	SEKRETARIAT KABINET	3.457.298.192	-	(8.229.847.146)	(4.772.548.954)	7.838.307.274	-	(8.076.332.584)	**(238.025.310)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	11.294.156.637	-	(12.680.323.010)	(1.386.166.373)	10.053.076.337	-	(10.901.105.496)	**(848.029.159)**
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5.771.910.518	-	(4.324.226.615)	1.447.683.903	4.836.516.518	-	(2.978.097.616)	**1.858.418.902**
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.683.270.416	-	(1.300.145.143)	2.383.125.273	2.721.976.916	-	(887.216.468)	**1.834.760.448**
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	310.609.000	-	-	310.609.000	260.850.000	-	0	**260.850.000**
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.295.955.208	-	(59.933.646.610)	8.362.308.598	65.021.318.908	-	(48.928.451.337)	**16.092.867.571**
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.940.368.500	-	(1.213.292.439)	2.727.076.061	1.232.575.000	-	(422.776.500)	**809.798.500**
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	7.995.138.520	-	(200.716.250)	7.794.422.270	6.688.347.500	-	(186.466.250)	**6.501.881.250**
JUMLAH PADA K/L			**35.349.308.377.399**	**278.309.260.583**	**(12.138.950.950.437)**	**23.488.666.687.545**	**30.258.867.363.449**	**887.449.525.015**	**(10.015.012.414.379)**	**21.131.304.474.085**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	148.907.231.481	-	(70.195.621.600)	78.711.609.881	146.774.243.367	-	(57.616.621.604)	**89.157.621.763**
TOTAL			**35.498.215.608.880**	**278.309.260.583**	**(12.209.146.572.037)**	**23.567.378.297.426**	**30.405.641.606.816**	**887.449.525.015**	**(10.072.629.035.983)**	**21.220.462.095.848**

Lampiran 22

Rincian Aset Eks BPPN
Per 31 Desember 2018

1. Aset Properti
2. Aset Inventaris
3. Aset Rekening Nostro
4. Surat Berharga
5. Aset Saham
6. Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA
7. Surat Berharga Ek Kelolaan PT PPA
8. Saham Eks Kelolaan PT PPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2017		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018 (*Audited*)	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	363.788.450.347,00			915	363.788.450.347,00		430.284.201.950,00	915	794.072.652.297,00
2	Temuan BPK	370	767.275.549.869,15			370	767.275.549.869,15	(1)	15.520.250.000,00	369	782.795.799.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-			-	-			-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-			-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	96	157.799.804.037,00			96	157.799.804.037,00		182.766.723.000,00	96	340.566.527.037,00
		1.488	**1.709.554.940.253**			**1.488**	**1.709.554.940.253,15**		**628.571.174.950,00**	**1.487**	**2.338.126.115.203,15**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017 (*Audited*)		Mutasi TA 2018		Saldo 31 Desember 2018 (*Audited*)		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	**Aset Inventaris**	**32.408**	**11.009.466.267,35**	**13.755**	**2.504.758.110**	**18.653**	**8.504.708.157,35**	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35			11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	21.134	4.608.865.929,00	13.755	2.504.758.110	7.379	2.104.107.819,00	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2017	Mutasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018
			Rekening Nostro tercatat dalam Neraca			
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp 5.841.796.415,00	-	Rp 5.841.796.415,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp 3.501.324.798,00	Rp 241.123.120,50	Rp 3.742.447.918,50
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	Rp 4.748.929.499,52	Rp (4.748.929.499,52)	Rp -
	Total			**Rp 14.092.050.712,52**		**Rp 9.584.244.333,50**
			Rekening Nostro tercatat dalam CaLK			
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negari	Rp 2.044.748,60		Rp 2.044.748,60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp 83.311.328,35		Rp 83.311.328,35
4	BUN	Citibank		Rp 8.776.916.074,45		Rp 8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp 97.686.237,95		Rp 97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706.429.119,47		Rp 706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196.059.779,49		Rp 196.059.779,49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp 287.761,43		Rp 287.761,43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp 6.601.373,85		Rp 6.601.373,85
10	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		Rp 625.069,88		Rp 625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.990,16		Rp 2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp 6.207.877,95		Rp 6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122.086.331,08		Rp 122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp 4.887.591,05		Rp 4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp 1.020.060.447,69		Rp 1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp 6.017.122,84		Rp 6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11.739.033,84		Rp 11.739.033,84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp 141.402.439,43		Rp 141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp 361.433.693,83		Rp 361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.864.035,05		Rp 2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268.237.424,51		Rp 268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKI	Indover Bank		Rp 109.652.042,65		Rp 109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp 925.492.300,93		Rp 925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.595,65		Rp 531.317.595,65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,65		Rp 24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,32		Rp 32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,21		Rp 16.993.382,21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45.288.112,29		Rp 45.288.112,29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,60		Rp 24.849.497,60
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354.542.691,02		Rp 354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92.060.251,91		Rp 92.060.251,91
34	Bank Ficorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.574.756,22		Rp 77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1.139.267,42		Rp 1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.664.932,40		Rp 11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,65		Rp 108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,99		Rp 120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341.740.942,42		Rp 341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,60		Rp 195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956.004.466,45		Rp 956.004.466,45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.996.775,68		Rp 2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,54		Rp 254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.358.123,38		Rp 27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp 122.424.186,80		Rp 122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406.733.525.331,33		Rp 406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2.359.921.197,78		Rp 2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 2.257.377.867,88		Rp 2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp 1.758.722.655,31		Rp 1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,61		Rp 1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666.429.511,70		Rp 666.429.511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp 61.815.826,61		Rp 61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44.241.246,97		Rp 44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp 2.270.531,95		Rp 2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp 378.699.549,31		Rp 378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234.342.412,12		Rp 234.342.412,12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp 58.834.913,90		Rp 58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65.028.723,58		Rp 65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.766.481,92		Rp 41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,03		Rp 6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.029,06		Rp 266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.690.834,35		Rp 339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.818,21		Rp 357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,47		Rp 6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 208.766.445,27		Rp 208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327.222.390,61		Rp 327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1.675.910,59		Rp 1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp 1.312.775.083,50		Rp 1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp 490.837.088,12		Rp 490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4.122.298,55		Rp 4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909.494.195,25		Rp 909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980.037.418,44		Rp 980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103.609.247,09		Rp 103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1.708.457.513,38		Rp 1.708.457.513,38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp 1.332.284.084,60		Rp 1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp 25.528.725,87		Rp 25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.226.080,57		Rp 72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp 566.327.485,65		Rp 566.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 456.068.074,81		Rp 456.068.074,81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,20		Rp 1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp 219.893.772,84		Rp 219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp 457.663.217,47		Rp 457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp 449.662.818,68		Rp 449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp 25.317.208,51		Rp 25.317.208,51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp 230.472.902,02		Rp 230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp 124.810.097,58		Rp 124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp 22.488.860,17		Rp 22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93.484.495,37		Rp 93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp 51.007.390,52		Rp 51.007.390,52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp 1.926.555.302,27		Rp 1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp 7.752.795,93		Rp 7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp 508.554.149,20		Rp 508.554.149,20
	Total			**Rp 454.445.361.290,83**		**Rp 454.445.361.290,83**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

*** Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia**

	Akhir Desember 2017		31 Desember 2018	
Kurs tengah Bank Indonesia	Rp	13.548,00	Rp	14.481,00
			13436	Rp 13.548,00

** **Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan selisih kurs**

****	**Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN**		
	Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp	54.584.286,49
	Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	1.187.712.120,85
	Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	8.840.515.509,00
	Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp	4.697.519.206,00
	Total	**Rp**	**14.780.331.122,34**

Penjelasan

Penelusuran dan Konfirmasi Dana Nostro

1 Telah dilaksanakan rapat dengan PPATK pada tanggal 18 Juni 2015
2 DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfimasi rekening tersebut serta telah menyetorkannnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Progress Pengelolaan Dana Nostro di Bank Indonesia

1 Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014,menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.

2 Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014.
a. Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa
b. Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee
c. Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait
3 Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP- OI /KN.5.2/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN.5/2016
4 Melalui surat nomor 18/35/DPTP/Srt/B tanggal 31 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan hak Kementerian Keuangan. Selanjutnya melalui surat nomor 18/104/DPTP-GPTP-DPT/Srt/B tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan dana eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata tersebut telah disetorkan ke RKUN

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. BDR di PT Bank Ganesha Tbk

1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00.
2 Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa :
a. Tidak terdapat outstanding dana eks BDNI pada PT Bank Ganesha.
b. Terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara set off
3 Menanggapi surat PT Bank Ganesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk
4 Melalui surat nomor S-2734/KN.5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Dit PKNSI telah meminta bantuan saran/pendapat dari OJK terkait dana eks. BDR yang tersimpan di PT Bank Ganesha. Melalui surat nomor SR-
5 Selanjutnya, melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut,
6 Berdasarkan PMK nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan
7 Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017, PT Bank Ganesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum
8 Berkenaan dengan tanggapan PT Bank Ganesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks. BDR ke rekening kas Negara.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA

1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking S.A dengan nilai 258.438,50 USD
2 Melalui surat nomor S-10044/KN.5/2015 tanggal 18 November 2015, DJKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Perbendaharaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB.3/2015
3 Selanjutnya melalui surat nomor S-S-1147/KN.5/2017 Tanggal 31 Juli 2017, dalam rangka pengalihan dana tersebut ke RKUN, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada Konsultan Hukum Widyawan & Partners selaku kuasa hukum Clearstream Banking S.A nomor RKUN dalam dollar USD serta draf surat Direktur PKNSI kepada Clearstream Banking S.A untuk permintaan pengalihan dana eks. Bank BIRA tersebut ke RKUN dan spesimen
4 Saat ini, Direktorat PKNSI sedang menunggu tanggapan dari Konsultan Hukum Widyawan & Partners untuk pengembalian dana eks. Bank Bira tersebut ke RKUN.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank Bahari di Coutts Bank

1 Berdasarkan surat surat Konsultan Hukum Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) nomor 001/COB-1601/4/XII/2017/AAD-PW tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 004/COB-1601/14/XI/2017/AAD-PW tanggal 14 November 2014 hal Penyampaian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengembalian Aset Bank Bahari, surat Alternate Chief Executive, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch tanggal 21 Juli 2017 hal Pemberian Konfirmasi dan Permintaan Dokumen serta Prosedur oleh DJKN, dan surat Head and Front Office, Coutts and Co Ltd, Singapore Branch tanggal 17 April 2017 hal Permohonan Klarifikasi Proses Pengembalian Asett maka oleh terkonfirmasi dana eks. Bank Bahari tersimpan di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch sebesar USD250.526,24
2 Mengingat Coutts and Co Ltd akan segera menutup cabang nya di Hongkong dan Singapura, Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah meminta Coutts and Co Ltd,
3 melalui email tanggal 2 Januari 2017, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan
4 Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI DJKN melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 telah bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai SWIFT details RKUN di Bank Indonesia dan
5 Selanjutnya, melalui email tanggal 26 Januari 2018 Direktorat PKNSI menyampaikan kembali mekasnisme pemindahbukuan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia
nomor 20/27/DOTP-GLP-LIP/Srt/B tanggal 23 Januari 2018.
6 Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telaj efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2018.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2017	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2018	Keterangan	Kustodian
	a. Corporate Bonds											
1	Dgs International Finance Co.	*Scripless*	0,01	USD	1.000.000	-	-		-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	*Scripless*	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.685,50	30 November 2018	62.113.319.154,00	66.390.830.725,50	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000,00	01 November 2018	3.387.000.000,00	3.620.250.000,00	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	*Coupon*	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000,00	27 Juni 2008	38.750.000,00	38.750.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	*Coupon*	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000,00	27 Juni 2008	800.000.000,00	800.000.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	*Coupon*	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000,00	30 November 2018	853.524.000,00	912.303.000,00	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	*Scripless*	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000,00	30 November 2018	270.960.000,00	289.620.000,00	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	*Principal dan Coupon*	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000,00	10 Juni 2015	500.000.000,00	500.000.000,00	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000,00	30 November 2018	1.138.032.000,00	1.216.404.000,00	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	88,21	USD	182.000	0,88	160.547,48	30 November 2018	2.175.097.259,04	2.324.888.057,88	Emiten Aktif	EUROCLEAR
	Total								**71.352.932.413,04**	**76.169.295.783,38**		
	b. Medium Term Notes											
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	93,92	USD	182.000	0,94	170.937,49	30 November 2018	2.315.861.114,52	2.475.345.792,69	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	30 November 2018	243.864.000.000,00	260.658.000.000,00	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	30 November 2018	11.712.300.192,00	12.518.882.424,00	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	30 November 2018	11.776.680.288,00	12.587.696.136,00	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	67.740.000.000,00	72.405.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
	Total								**378.052.841.594,52**	**404.087.924.352,69**		
	c. Non-Convertible Debentures											
1	Polysindo Eka Perkasa	*Principal*	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	30 November 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
	Total								**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**		
	Total (a+b+c)								**454.405.774.007,56**	**485.257.220.136,07**		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018

Catatan		
Kurs Tengah BI	**Per 31 Desember 2018**	
1	Dollar Amerika	14.481,00

Keterangan :

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berhara di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI

** Emiten surat berharga berstatus akfif karena masih tercatat di Bursa

*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk)	Manufaktur Textile	*Sertifikat*	32.137.300	144,00	Rp 4.917.006.900,00	Rp 4.627.771.200,00	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	*Sertifikat*	37.459.700	112,00	Rp 5.731.334.100,00	Rp 3.970.728.200,00	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	*Scripless*	40.000	850,00	Rp 34.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	*Sertifikat*	46.250	75,00	Rp 3.468.750,00	Rp 3.468.750,00	BBO		-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	*Sertifikat*	363	75,00	Rp 27.225,00	Rp 27.225,00	BBO		-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	*Sertifikat*	400	50,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	BBKU		-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	*Sertifikat*	250	350,00	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00	BTO		-	-	-
8	PT Bank Surya	-	*Sertifikat*	800	300,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	BBO		-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	11.304.425	114,00	Rp 1.266.095.600,00	Rp 1.345.226.575,00	Aktif		Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	41.421.439	114,00	Rp 4.639.201.168,00	Rp 4.929.151.241,00	Aktif		Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	*Sertifikat*	200	640,00	Rp 143.000,00	Rp 130.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk	Manufaktur Semen	*Sertifikat*	13.898.500	1.900,00	Rp 11.188.292.500,00	Rp 26.198.672.500,00	Aktif		Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	*Scripless*	57.901.002	142,00	Rp 9.785.269.338,00	Rp 8.337.744.288,00	Aktif		Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
14	PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis media	*Sertifikat*	100	140,00	Rp 14.000,00	Rp 14.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

15	PT Merck, Tbk.	Farmasi dan Kimia	*Sertifikat*	100	40.000,00	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	*Sertifikat*	-	0,00	Rp	-	Rp	-	-	Berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset		
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	*Sertifikat*	94.600	675,00	Rp	63.855.000,00	Rp	63.855.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui	Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	*Sertifikat*	49.251.500	50,00	Rp	2.462.575.000,00	Rp	2.462.575.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui	Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	*Sertifikat*	2.500	75,00	Rp	187.500,00	Rp	187.500,00	Aktif	Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	*Scripless*	1.918.865	1.160,00	Rp	1.419.960.100,00	Rp	1.966.836.625,00	Aktif	Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
21	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	*Sertifikat*	700	9.000,00	Rp	6.230.000,00	Rp	6.090.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	-
22	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	*Scripless*	348.000	9.000,00	Rp	3.097.200.000,00	Rp	3.027.600.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylene dan polyester film	*Sertifikat*	100	400,00	Rp	38.800,00	Rp	40.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Prima d.h. saham PT BDNI Reksadana	-	*Scripless*	80.000.000		Rp	42.726.015.195,72	Rp	44.798.339.066,32	Aktif	Berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten no DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saai ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.		
Total						**Rp**	**87.345.261.676,72**	**Rp**	**101.776.804.670,32**				

Senua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikana nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018 (sumber : https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/296/reksa-dana-prima)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bentuk Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	eterangan Nilai Penyaji	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf		100,00%	10.000	Rp 251.240.740.586	251.240.740.585,80	Aktif	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karabha Digdaya Nomor 067.2/DIR/PTKD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods		0,0024%	312	Rp 312.000	312.000,00	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel		6,24%	69.882.400	Rp 47.100.737.600	47.100.737.600,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor 084/DIR-S/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
Total						**Rp 298.341.790.185,80**	**Rp 298.341.790.185,80**			
Total Aset Saham Eks BPPN						**Rp 400.118.594.856,12**				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2018, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019 , Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	285	1.804.429.239.851	5	31.199.803.000	290	1.835.629.042.851	(4)	(4.098.310.000)	286	1.831.530.732.851
BS	1.076	1.580.829.348.019	(11)	(45.832.640.000)	1.065	1.534.996.708.019	(74)	(16.197.370.000)	991	1.518.799.338.019
BT	323	865.910.243.344			323	865.910.243.344			323	865.910.243.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452			37	123.953.401.452			37	123.953.401.452
penebusan tanah										
JUMLAH	**1.721**	**4.375.122.232.666**			**1.715**	**4.360.489.395.666**			**1.637**	**4.340.193.715.666**
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam CaLK										
BD (Dokumen berupa AJB,APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833	(7)	(8.914.000.000)	633	2.083.549.091.833
JUMLAH	**640**	**2.092.463.091.833**			**640**	**2.092.463.091.833**			**633**	**2.083.549.091.833**
JUMLAH TOTAL	**2.361**	**6.467.585.324.499**							**2.270**	**6.423.742.807.499**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2017 *(Audited)* *	Nilai Aset Per 31 Desember 2018	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 186.230.000.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00	BII	USD	15.356.072,52	Rp 129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			**16.657.242.209,00**	**16.657.242.209,00**				**Rp 625.201.523.307,80**	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs 8465

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	Rp 223.500,00	Rp 223.500,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum,
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000,00	Rp 141.550.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000,00	Rp 28.310.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871,00	Rp 234.871,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125.015.692,00	Rp 125.015.692,00	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000,00	Rp 385.154.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200.933	2.30%	Rp 323.903.996,00	Rp 323.903.996,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 06/DIR/SJV/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498.260	3,67%	Rp 355.094.954,20	Rp 355.094.954,20	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 453/SKV/07/2017 tanggal 28 Juli 2017	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 382.656.812,00	Rp 390.958.650,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/I/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,41%	Rp 31.286.000,00	Rp 31.286.000,00	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 34.239.460.920,00	Rp 4.038.531.683,65	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited)	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	- Berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI per 31 Desember 2017 (audited), saham perseroan yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1.412 lembar saham, yang terdiri atas 1.115 lembar saham eks. kelolaan PT PPA dan 397 lembar saham eks BDL. Berdasarkan hal tersebut dilakukan koreksi pencatatan. - Pada tahun 2018, berdasarkan hasil RUPST perseroan tahun 2017, dilakukan pembagian cash sebagai hasil divestasi anak usaha PT SBPI yaitu AFC. Merchant Bank. Atas kepemilikan 1.115 lembar saham PT SBPI, Kementerian Keuangan menerima Rp24.382.173.300,00,
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Ma	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.500.000.000,00	Rp 4.341.276.000,00	Aktif	Nilai wajar saham per 09 Juni 2017 berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT AJTM Nomor LAP-0215/1/1/WKN.07/KNL.03/03.01/2017 tanggal 8 Juli 2017	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalab KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000,00	Rp 335.020.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007	-	-
17	BDNI Reksadana (PT Reksa	-	BDNI	0	0,00%	Rp -	Rp -	0	0		Saham PT BDNI Reksadana dihapusbukukan dari akun surat berharga eks kelolalan PT PPA dikarenakan berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten no DE/X/2014-7152 tanggal 9
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000,00	Rp 61.553.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	861.465	3,74%	Rp 861.465.000,00	Rp 970.886.000,00	Aktif	Nilai saldo saham berdasarkan surat Direksi PT Sarana Sumbar Ventura nomor 07/SSBV-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018	Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000,00	Rp 82.471.000,00	Aktif	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ADM/SPV.V/2016 tanggal 22 Agustus 2016	Jalan Santorosa, Tasangkapura No. 20, 99223. Jayapura, Papua	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
21	PT SMBC Indonesia Financ	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000,00	Rp 3.750.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-
22	PT Asia Natural Resources	Perdangangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000,00	Rp 1.100.325.000,00	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-
23	PT Jemblo Cable Company	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 3.403.400.000,00	Rp 4.352.425.000,00	Aktif	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di
24	PT Sukapraja Estetika Pad	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13.87%	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
25	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-		100,00%	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA
26	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273.000	96,53%	Rp -	Rp 22.470.000.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Pada tahun 2018, aset saham PT Sejahtera Eka Graha tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham eks kelolaan PT PPA.
27	PT Turban Petrochemical Industries	Petrokimia	-	-	70,00%	Rp -	Rp 8.750.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017		Pada tahun 2018, aset saham PT Turban Petrochemical Industriestidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifasi dari akun aset saham yang diserahkelolakan ke aset saham
Total						**Rp 53.107.124.745,20**	**Rp 46.292.969.346,85**				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2017, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019 , Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK Itahun 2018 belum ada emiten yang menberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

Lampiran 23

Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	12.287.110.720	(262.752.167)	12.024.358.553	12.093.595.400	(1.283.710.421)	10.809.884.979
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.627.927.252	(8.284.185.458)	10.343.741.794	16.513.703.434	(5.846.076.518)	10.667.626.916
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	61.551.373.767	(55.653.217.360)	5.898.156.407	21.421.653.287	(20.447.536.349)	974.116.938
4	005	MAHKAMAH AGUNG	135.623.038.742	(114.569.274.531)	21.053.764.211	121.947.499.753	(104.123.178.191)	17.824.321.562
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	78.507.611.770	(72.786.529.897)	5.721.081.873	55.088.376.025	(50.099.183.630)	4.989.192.395
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	262.071.923.074	(114.947.470.049)	147.124.453.025	276.502.028.994	(107.525.285.055)	168.976.743.939
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	388.378.557.288	(177.980.572.171)	210.397.985.117	243.017.275.805	(116.957.094.440)	126.060.181.365
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	113.688.381.260	(81.938.129.579)	31.750.251.681	117.733.922.822	(64.846.101.544)	52.887.821.278
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.305.613.513.814	(3.471.143.073.409)	2.834.470.440.405	5.099.567.905.903	(3.475.590.062.866)	1.623.977.843.037
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	349.586.548.982	(256.677.527.937)	92.909.021.045	271.241.635.576	(234.938.144.439)	36.303.491.137
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.139.813.993.517	(910.595.400.676)	229.218.592.841	865.287.703.248	(700.350.560.167)	164.937.143.081
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	716.975.689.013	(245.244.101.082)	471.731.587.931	366.970.350.022	(176.107.287.347)	190.863.062.675
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.180.818.896.191	(828.808.401.464)	352.010.494.727	1.203.012.177.177	(560.070.438.889)	642.941.738.288
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.129.200.211.249	(413.742.922.887)	715.457.288.362	1.110.690.803.891	(370.775.357.075)	739.915.446.816
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5.231.113.506.667	(1.382.199.721.916)	3.848.913.784.751	4.689.311.508.841	(869.299.894.710)	3.820.011.614.131
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	607.599.164.234	(539.078.925.000)	68.520.239.234	564.843.100.649	(487.310.308.816)	77.532.791.833
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.896.652.429.657	(4.821.936.883.640)	1.074.715.546.017	1.861.374.860.857	(1.572.540.013.150)	288.834.847.707
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	303.467.082.927	(208.612.292.851)	94.854.790.076	182.792.595.700	(140.465.330.209)	42.327.265.491
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	545.056.528.846	(458.228.910.138)	86.827.618.708	617.430.188.157	(460.742.008.640)	156.688.179.517
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	27.417.688.583	(24.858.951.495)	2.558.737.088	29.632.501.014	(28.327.019.000)	1.305.482.014
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	482.878.816.419	(383.422.746.684)	99.456.069.735	374.479.476.319	(286.310.901.032)	88.168.575.287
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	342.965.519.318	(258.241.124.883)	84.724.394.435	214.641.530.229	(173.983.874.404)	40.657.655.825
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	233.130.907.196.903	(31.778.517.454.240)	201.352.389.742.663	34.514.284.618.434	(7.026.126.413.099)	27.488.158.205.335
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.028.775.466	(116.970.835)	911.804.631	1.710.707.023	(1.706.444.523)	4.262.500
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.380.215.129	(2.908.769.049)	471.446.080	3.183.506.702	(2.695.909.439)	487.597.263
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.365.400	(250.365.400)	-	481.804.150	(432.744.150)	49.060.000
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	57.765.832.615	(11.233.662.781)	46.532.169.834	60.435.929.219	(10.674.865.958)	49.761.063.261
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	906.938.624	(882.577.124)	24.361.500	4.429.388.813	(367.056.514)	4.062.332.299

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	555.046.603.518	(308.887.568.529)	246.159.034.989	441.472.902.832	(243.729.312.557)	197.743.590.275
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	185.922.326.191	(16.947.230.725)	168.975.095.466	299.762.228.161	(24.175.450.199)	275.586.777.962
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	261.326.200	(149.329.256)	111.996.944
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.484.310.584	(1.484.018.084)	292.500	16.008.239	(10.672.159)	5.336.080
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.767.753.563	(1.802.482.743)	2.965.270.820	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	9.285.528.963	(2.143.836.815)	7.141.692.148	1.782.860.067	(1.782.860.067)	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	99.943.393.399	(87.230.572.407)	12.712.820.992	82.265.888.737	(66.028.892.181)	16.236.996.556
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	62.680.178.299	(2.607.734.195)	60.072.444.104	63.873.985.294	(2.598.368.149)	61.275.617.145
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	125.004.264.599	(114.427.810.259)	10.576.454.340	103.004.149.752	(100.572.588.356)	2.431.561.396
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93.930.401.983	(8.786.378.146)	85.144.023.837	79.122.343.101	(9.058.743.306)	70.063.599.795
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.621.187.552	(18.983.762.369)	1.637.425.183	25.020.789.361	(22.005.191.820)	3.015.597.541
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	856.260.491.543	(777.902.275.224)	78.358.216.319	753.747.925.477	(697.789.953.531)	55.957.971.946
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15.276.035.516	(15.838.332.018)	(562.296.502)	14.942.717.477	(12.375.262.569)	2.567.454.908
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	8.343.400.965	(197.200.000)	8.146.200.965	528.172.499	(80.922.000)	447.250.499
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	49.773.970	(49.773.970)	-	-	(45.648.308.323)	(45.648.308.323)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	50.688.053.831	(49.759.618.763)	928.435.068	46.461.721.651	(963.858.970.889)	(917.397.249.238)
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.994.248.710.782	(889.622.125.693)	1.104.626.585.089	2.501.523.762.400	0	2.501.523.762.400
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14.797.720.282	(10.129.262.907)	4.668.457.375	14.862.441.763	(8.835.820.857)	6.026.620.906
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.356.007.867	(104.785.675)	2.251.222.192	104.785.675	(104.785.675)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	36.375.441.590	(27.370.078.199)	9.005.363.391	28.109.240.771	(20.588.880.932)	7.520.359.839
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	62.663.133.603	(58.927.231.688)	3.735.901.915	57.677.783.200	(55.457.487.505)	2.220.295.695
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	7.000.920.398	(6.989.131.973)	11.788.425	6.984.249.898	(6.984.249.898)	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.107.133.503	(94.176.500)	3.012.957.003	3.575.551.002	(1.847.088.579)	1.728.462.423
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	104.689.484.879	(56.807.950.403)	47.881.534.476	22.535.167.957	(19.013.407.476)	3.521.760.481
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.528.081.274	(8.645.504.434)	(117.423.160)	10.958.952.504	(10.459.088.421)	499.864.083

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	237.493.496.013	(109.451.928.198)	128.041.567.815	122.883.418.331	(101.962.014.813)	20.921.403.518
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	5.983.005.475	(4.812.248.441)	1.170.757.034	4.876.735.931	(4.022.518.154)	854.217.777
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	#VALUE!	6.416.386.500	(182.054.000)	6.234.332.500
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4.322.338.489	(1.578.329.735)	2.744.008.754	98.178.705	(34.259.705)	63.919.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.260.701.850	(1.119.293.140)	141.408.710	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.375.539.100	(1.328.233.450)	47.305.650	737.034.955	(464.606.455)	272.428.500
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.254.929.769	(7.124.928.900)	130.000.869	4.764.944.283	(4.665.040.908)	99.903.375
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.040.713.882	(4.945.244.595)	95.469.287	13.056.081.276	(7.888.934.771)	5.167.146.505
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.778.682.115	(2.575.132.384)	203.549.731	3.834.449.277	(2.703.079.525)	1.131.369.752
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	111.442.518.114	(47.878.273.001)	63.564.245.113	2.724.474.604.741	(200.053.878.185)	2.524.420.726.556
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	196.677.386.495	(82.460.492.234)	114.216.894.261	246.870.284.728	(82.367.454.297)	164.502.830.431
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	4.435.355.597	(4.203.290.277)	232.065.320	4.266.426.001	(4.134.838.476)	131.587.525
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	9.594.029.740	(6.850.182.100)	2.743.847.640	7.497.924.955	(5.595.290.375)	1.902.634.580
68	100	KOMISI YUDISIAL	100.987.032	-	#VALUE!	522.029.174	(514.385.636)	7.643.538
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	81.529.802.239	(71.720.001.019)	9.809.801.220	171.500.999.962	(140.130.883.580)	31.370.116.382
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	23.375.013.984	(22.902.059.451)	472.954.533	16.759.004.183	(16.316.546.264)	442.457.919
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	#VALUE!	10.567.651.901	(7.623.831.428)	2.943.820.473
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.685.537.677	(1.627.893.151)	8.057.644.526	11.708.907.835	(2.816.123.141)	8.892.784.694
73	107	BADAN SAR NASIONAL	213.233.575.302	(65.346.477.613)	147.887.097.689	219.142.248.577	(58.911.411.450)	160.230.837.127
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	0	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	815.822.395	(509.078.084)	306.744.311	1.256.377.439	(921.304.271)	335.073.168
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	37.195.313.400	(21.855.629.535)	15.339.683.865	61.443.336.957	(31.201.482.699)	30.241.854.258
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	245.153.378.589	(149.836.409.876)	95.316.968.713	200.659.098.517	(203.972.156.865)	(3.313.058.348)
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	683.050.000	(662.621.428)	20.428.572	322.362.443	(107.640.766)	214.721.677
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.261.239.836	(941.919.382)	5.319.320.454	1.324.821.904	(556.352.889)	768.469.015
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	13.564.770.668	(7.234.337.428)	6.330.433.240	6.719.477.637	(693.438.332)	6.026.039.305

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	42.526.514.418	(41.255.719.947)	1.270.794.471	40.326.424.921	(39.422.247.992)	904.176.929
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	218.664.209.118	(193.540.378.614)	25.123.830.504	106.391.060.184	(104.934.932.312)	1.456.127.872
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(2.287.151.679)	1.260.437.717	3.547.589.396	(1.782.976.591)	1.764.612.805
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	14.445.733.031	(14.439.506.531)	6.226.500	482.232.826	(473.243.826)	8.989.000
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	#VALUE!	-	0	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	46.249.000	(34.303.417)	11.945.583	20.089.000	(10.044.500)	10.044.500
JUMLAH PADA K/L			**264.349.885.641.992**	**(49.961.295.798.219)**	214.388.589.843.773	**61.455.378.467.188**	**(20.387.914.329.132)**	41.067.464.138.056
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	578.750.594.207.564	**(3.586.380.347)**	578.747.007.827.217	**598.059.673.768.407**	**(201.034.632.686.026)**	397.025.041.082.381
TOTAL			**843.100.479.849.556**	**(49.964.882.178.566)**	793.135.597.670.990	**659.515.052.235.595**	**(221.422.547.015.158)**	438.092.505.220.437

Lampiran 24

Daftar BMN Eks BMN Idle Yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang Atau Pemda Periode 31 Desember 2018

1. BMN Eks BMN Idle
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2018

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	615	01/01/2010	145.755.000	-	145.755.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	2010201001	Tanah Rawa	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Seroja Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kec.	4.205	01/01/2013	1.567.177.840	-	1.567.177.840	PSP pada BPS RI
3	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	1.130	01/01/1988	60.500.000		60.500.000	PSP pada Kementerian Keuangan
4	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Tangerang I	Tangerang	Jl. Komplek Perumahan Griya Pinang Asri,	730	01/01/2013	1.611.131.000		1.611.131.000	PSP pada Komisi Yudisial
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Dr. Maliholo	531	01/04/1968	356.400.000		356.400.000	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL TANAH						**7.211**		**3.740.963.840**	-	**3.740.963.840**	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	144	01/01/2010	60.425.000	9.668.000	50.757.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	360	01/01/1988	82.300.000	23.941.818	58.358.182	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL BANGUNAN						**504**		**142.725.000**	**33.609.818**	**109.115.182**	
TOTAL						**7.715**		**3.883.688.840**	**33.609.818**	**3.850.079.022**	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166128	*Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN*									
	TANAH		**73.487**	**44.038.153.518**	**281.374**	**25.103.886.550**	**7.211**	**3.740.963.840**	**347.650**	**65.401.076.228**
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	6.631	2.597.922.602	667	140.326.000			7.298	2.738.248.602
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.289	11.596.150.416	3.061	181.481.000	531	356.400.000	15.819	11.421.231.416
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000					200	1.001.000.000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	15.329	16.470.008.500	4.948	316.208.000	2.475	1.817.386.000	17.802	14.968.830.500
2.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1.380.400.000					1.015	1.380.400.000
2.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga	M2	-	-	6.508	71.980.550			6.508	71.980.550
2.01.01.99.999	Tanah Persil Lainnya	M2	889	7.477.138.000					889	7.477.138.000
2.01.02.01.001	Tanah Rawa	M2	9.144	3.407.913.000			4.205	1.567.177.840	4.939	1.840.735.160
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621.000					26.990	107.621.000
2.01.03.08.003	Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	M2	-	-	266.190	24.393.891.000			266.190	24.393.891.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN		**93**	**10.625.554.884**	**30**	**3.499.823.036**	**2**	**142.725.000**	**121**	**13.982.652.920**
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	16	6.785.871.041	2	1.728.633.171	2	142.725.000	16	8.371.779.212
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	26.555.288	1	15.117.825			2	41.673.113
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	6.200.000	2	59.265.000			3	65.465.000
4.01.01.04.001	Gedung Instalasi Studio	Unit	-	-	1	7.562.000			1	7.562.000
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694.000					2	8.694.000
4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	-	-	2	295.543.000			2	295.543.000
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	-	-	1	10.184.248			1	10.184.248
4.01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	1	15.271.000	7	245.363.347			8	260.634.347
4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	62.500.000					1	62.500.000
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485
4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000					2	118.927.000
4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437					2	120.804.437
4.01.02.01.013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	-	-	4	173.936.000			4	173.936.000
4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	289.995.000	3	455.205.591			6	745.200.591
4.01.02.02.008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Unit	-	-	1	15.317.000			1	15.317.000
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	52	1.769.175.029					52	1.769.175.029
4.01.02.02.013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	1	77.520.134					1	77.520.134
4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	2	80.943.778					2	80.943.778
4.01.02.02.015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Unit	2	28.100.000					2	28.100.000
4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	-	-	2	398.222.854			2	398.222.854
4.01.02.09.999	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	Unit	-	-	1	3.813.000			1	3.813.000
4.01.02.99.999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	3	703.311.000					3	703.311.000
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	1	43.928.000	3	91.660.000			4	135.588.000
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000
TOTAL				**54.663.708.402**		**28.603.709.586**		**3.883.688.840**		**79.383.729.148**

Lampiran 25

Utang Kepada Pihak Ketiga & Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	345213143	406.765.290	-	135.416.000	7.991.268	129.414.237
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	99388158	2.359.840.672	5.361.621.728	4.439.877.981	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	62537868997	60.986.545.027	952.515.553	1.075.292.762	1.286.850	43.936.941
4	005	MAHKAMAH AGUNG	23504418265	30.084.076.014	971.400.491	844.110.148	2.819.000	10.718.466
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1,3287E+11	88.528.814.594	419.977.265	-	1.031.673.674	863.250
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1,07304E+11	67.213.565.692	63.334.688.539	71.843.462.056	5.541.091.473	7.218.551.826
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.099.580.668	12.055.539.377	3.388.124.870	1.348.220.166	-	617.569.067
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	66.046.352.492	51.796.815.809	383.250.000	638.750.000	197.781.298	16.179.293
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.488.408.342.644	6.454.161.190.355	1.169.368.774.536	6.007.668.352	25.144.591.430	8.660.097.620
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	105.218.621.484	222.697.385.108	297.076.909.128	293.567.777.306	893.850	41.628.677
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	472.206.297.236	1.486.741.001.607	88.730.205.183	267.311.529.885	2.690.975.505	1.634.231.652
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	247.540.754.802	29.986.921.676	4.991.253.179	4.111.131.341	-	2.178.462.038
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.736.812.603	2.518.832.120	19.723.767.548	19.104.459.056	-	11.297.816
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	111.949.273.418	75.690.991.106	10.351.484.291	16.362.159.263	288.913.070	194.956.199
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	446.077.282.624	219.484.907.017	31.947.759.585	52.281.877.089	1.781.300	271.351.355
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508.819.563.523	1.046.462.808.793	1.405.663.161	1.344.508.821	268.624.707	409.552.089
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	115.414.379.017	116.097.544.526	109.374.898	174.220.925
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	489.786.337.885	1.098.066.469.844	28.527.070.912	27.837.498.982	4.072.446.624	2.732.064.166
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.397.831.487	7.246.549.166	551.319.155.846	497.671.397.490	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.205.917.841	155.625.426	146.742.000	316.883.583	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	48.511.655.011	39.464.238.717	1.663.905.634	1.739.210.196	2.727.272	5.827.150
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.224.707.014	175.323.176.542	2.795.261.502	2.599.217.498	-	775.481
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.152.176.385.294	79.442.197.871	18.512.859.775	21.548.857.458	13.349.261	109.819.154
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.132.143.718	2.467.902.405	-	-	257.551.671	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.232.554.692	4.668.404.629	-	-	93.258.415	65.968.790
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	384.536.115	281.336.587	-	-	106.603.805	231.503.520
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	30.808.255.546	35.640.614.494	4.453.731.971	4.556.975.543	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	6.626.846.612	37.109.483	1.627.566.300	3.126.930.400	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.466.618.127.260	819.900.650.121	480.381.269.898	581.809.786.686	7.559.368.598	12.459.754.131
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	7.907.900.743	7.399.751.015	27.580.098.626	24.236.796.334	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.203.141.374	-	10.283.000	20.566.000	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	2.694.682.148	258.443.937	-	-	12.543.385	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	54.791.945.996	10.783.800.003	473.783.631	853.409.262	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	937.297.137	826.821.026	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.076.426.760	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	132.577.726.879	67.116.062.498	406.655.330	76.987.320	162.548.572	247.823.811
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	21.715.821.483	13.270.000.291	200.409.583	110.938.166	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	57.486.088.181	59.165.382.652	428.229.924.943	448.354.593.856	28.517.852	23.040.532
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.771.297.238	2.298.377.533	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.449.639.269	9.424.956.990	10.455.045.823.788	11.660.741.708.117	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	309.249.930.906	703.448.690.296	20.182.640.866	40.741.580.208	1.142.655.681	24.104.024.451
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12.307.969.987	3.206.263.638	33.391.680.815	31.863.416.571	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	461.426.721	405.609.250	1.251.405.956	998.761.290	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.018.700.285	4.665.237.219	1.627.616.429	1.630.840.096	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.647.769.945	3.572.577.082	19.387.500	34.897.500	388.900	19.403.181
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	4.357.312.149	6.611.032.907	-	-	-	1.182.408
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.716.023.450	1.315.735.102	467.789.000	896.127.517	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	715.839.862	537.844.410	-	-	-	175.000
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.260.040.398	4.245.598.516	-	-	-	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	19.325.252.305	8.997.844.787	-	-	1.685.207.180	1.258.616.446
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	540.604.451	650.287.175	1.806.470.877	2.306.117.323	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	144.780.102	990.452.993	3.828.330	13.016.327	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.333.816.164	3.429.695.646	361.643.820	361.643.820	717.750.664	103.253.321
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	24.119.681.385	2.784.516.563	107.883.967	109.542.858	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	26.850.031.216	29.906.879.523	-	-	1.373.004.832	1.109.078.849
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10.216.744.310	752.183.933	93.913.250	5.541.508	-	22.778.384
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.354.183.940	664.082.523	69.030.970	40.367.507	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	5.225.574.491	31.594.478	609.000.000	745.500.000	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.916.503	252.273.498	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	542.824.852	234.971.695	2.576.406.102	1.802.497.421	10.564.192	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.458.992.441	549.493.059	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.961.186.258	2.041.990.119	299.415.347	458.488.712	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.846.298.102	3.214.411.201	714.393.028	642.930.618	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)*	31 DESEMBER 2017 (*AUDITED*)
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.077.868.216	4.370.754.385	1.476.673.228	2.539.337.866	16.128.950	22.600.150
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.111.364.834	18.460.027.268	628.236.150	58.586.996	4.076.053	8.727.272
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.794.536.717	12.043.630.323	29.427.488	27.187.680	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.763.656.901	5.589.408.903	-	-	218.367.763	241.979.367
68	100	KOMISI YUDISIAL	129.925.795	131.992.624	10.512.667	72.900.667	6.448.280	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	179.616.426.130	12.311.613.581	197.955.000	318.266.250	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	4.471.661.968	3.674.605.147	17.513.526	72.878.901	-	33.455.722
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.042.433.878	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	620.028.446	598.750.160	293.488.828	295.935.518	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	5.300.455.703	1.241.445.972	201.646.100	481.495.900	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	23.903.801	47.694.160	6.709.073.996	11.002.242.566	-	92.672.608
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA		-	16.097.200	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	375.211.249	329.574.269	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	540.454.036	674.790.136	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	123.023.117.279	127.672.110.075	1.671.126.470.419	1.169.990.012.803	8.079.500	5.384.500
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	206.869.613	95.048.260	-	-	-	28.341.373
80	114	SEKRETARIAT KABINET	8.147.367.714	4.070.837.821	-	-	385.225.904	422.053.397
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.126.405.160	28.295.180.195	-	-	2.303.213.408	2.988.089.793
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.359.492.707	8.692.631.294	14.262.668.912	13.023.514.604	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	138.167.775.441	132.751.962.826	10.862.669.813	9.472.287.295	3.040.959.468	3.094.746.998
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.052.000	22.343.100	380.174.667	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	451.754.231	3.622.700.001	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.503.407.505	3.219.400.853	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	831.846.622	2.466.357.607	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**17.548.296.494.980**	**14.934.504.654.454**	**15.584.991.431.064**	**15.422.121.457.965**	**58.508.784.553**	**71.046.171.406**
Jurnal Konsolidasi SPAN			5.065.326.093.892	-	-	-	(5.092.755.757.470)	**(54.572.479.892)**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	**77.267.818.090.744**	**29.503.730.518.739**	100.581.952.941	**126.927.059.727**	5.067.125.419.119	**20.847.698**
TOTAL			**99.881.440.679.616**	**44.438.235.173.193**	**15.685.573.384.005**	**15.549.048.517.692**	**32.878.446.202**	**16.494.539.212**

Lampiran 26

Rincian Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Perbankan
Per 31 Desember 2018

1. Outstanding Utang Program Pinjaman LN Per Kreditor
2. Outstanding Utang Project Pinjaman LN Per Kreditor
3. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Rupiah
4. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Valas
5. Unamortized Discount/Premium Obligasi SBSN Rupiah

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	USD	31	7.320.574.083	12.055.474.253.791	93.953.759.041.842	106.009.233.295.633
AFD	EUR	7	859.364.286	88.358.094.548	14.142.499.635.904	14.230.857.730.452
	USD	3	450.000.000	1.158.480.000.000	5.357.970.000.000	6.516.450.000.000
IBRD	USD	34	13.314.849.390	10.184.862.050.208	182.627.471.966.093	192.812.334.016.300
IDA	SDR	1	26.053.500	91.931.195.842	432.787.075.965	524.718.271.806
JICA	JPY	38	376.509.998.000	7.400.676.044.867	41.965.469.993.903	49.366.146.038.770
KfW	EUR	5	1.100.000.000	-	18.215.725.000.000	18.215.725.000.000
	USD	5	832.649.882	945.480.674.545	11.112.122.271.910	12.057.602.946.455
TOTAL		**124**		**31.925.262.313.800**	**367.807.804.985.616**	**399.733.067.299.417**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
2	**ABN AMRO ROTTERDAM**	EUR	2	6.855.351,82	20.640.529.780,30	92.882.382.520,95	113.522.912.301,25
3	**ADB**	ADB	6	34.841.819,49	147.870.528.215,85	356.673.859.818,84	504.544.388.034,69
4		SDR	45	354.358.326,05	1.345.592.622.068,44	5.791.194.695.328,34	7.136.787.317.396,78
5		USD	84	1.939.654.472,29	3.728.783.204.548,89	24.359.353.208.610,20	28.088.136.413.159,10
6	**AFD**	EUR	1	34.496.668,41	60.132.232.178,54	511.123.972.523,96	571.256.204.702,50
7		USD	4	93.380.662,97	144.607.872.985,60	1.207.637.507.410,57	1.352.245.380.396,17
8	**AIIB**	USD	3	73.648.422,69	-	1.066.502.808.973,89	1.066.502.808.973,89
9	**AKA**	USD	1	29.182.631,03	90.146.299.837,68	332.447.380.107,75	422.593.679.945,43
10	**ATRADIUS DSB**	EUR	1	24.443.395,61	150.380.530.613,85	254.395.989.838,85	404.776.520.452,70
11		USD	1	6.699.685,30	36.043.690.927,68	60.974.451.901,62	97.018.142.829,30
12	**AUSTRALIA**	AUD	2	468.954.614,01	99.566.239.065,34	4.689.060.631.882,69	4.788.626.870.948,03
13	**B A W A G**	EUR	2	14.586.788,84	57.358.251.490,50	184.195.324.986,14	241.553.576.476,63
14	**BANCO DE SABADELL**	USD	1	38.336.105,00	138.786.284.271,06	416.358.852.233,94	555.145.136.505,00
15	**BANK MANDIRI SIN**	USD	9	150.676.998,67	879.680.007.996,12	1.302.273.609.744,15	2.181.953.617.740,27
16	**BANQUE DE FRANCE**	EUR	3	73.832.520,21	334.392.503.083,79	888.255.573.463,76	1.222.648.076.547,55
17	**BBVA**	EUR	2	7.120.715,86	43.923.077.091,26	73.994.197.371,38	117.917.274.462,64
18		USD	2	32.500.000,00	117.658.125.289,62	352.974.374.710,38	470.632.500.000,00
19	**BBVAIT**	EUR	1	5.009.375,00	23.701.142.187,50	59.252.855.468,75	82.953.997.656,25
20	**BELGIUM**	EUR	11	18.962.219,76	77.756.071.307,75	236.253.547.362,92	314.009.618.670,66
21	**BLG**	EUR	1	19.714.000,00	-	326.458.911.500,00	326.458.911.500,00
22	**BNP PARIBAS, PARIS**	CHF	1	29.984.349,00	-	441.062.277.702,75	441.062.277.702,75
23		EUR	8	118.911.324,03	851.183.320.091,47	1.117.958.478.014,32	1.969.141.798.105,79
24		GBP	1	4.212.241,72	19.347.636.892,76	58.042.911.413,20	77.390.548.305,96
25		USD	3	41.445.797,22	260.425.267.884,45	339.751.321.658,37	600.176.589.542,82
26	**BNP PARIBAS, SPAIN**	EUR	1	527.863,68	8.741.290.574,88	-	8.741.290.574,88
27	**BOC CAYMAN ISLAND**	USD	1	6.302.728,74	45.634.907.586,78	45.634.907.297,16	91.269.814.883,94
28	**BOTM SINGAPORE**	USD	5	120.690.643,17	540.002.380.291,56	1.207.718.823.453,21	1.747.721.203.744,77
29	**BRI SINGAPORE**	USD	1	2.851.077,18	11.796.128.183,88	29.490.320.459,70	41.286.448.643,58
30	**BRI-CAYMAN ISLAND**	EUR	1	14.157.186,13	-	234.439.463.016,27	234.439.463.016,27
31		USD	3	160.774.823,29	968.271.196.140,00	1.359.909.019.922,49	2.328.180.216.062,49
32	**BRUNEI INVEST. BANK**	USD	2	5.264.026,32	60.982.692.459,48	15.245.672.680,44	76.228.365.139,92
33	**CA CIB LONDON BRANCH**	USD	1	91.675.850,51	287.206.509.654,00	1.040.351.481.581,31	1.327.557.991.235,31
34	**CASA OF FRANCE**	EUR	1	91.036.314,00	-	1.507.538.600.761,50	1.507.538.600.761,50
35	**CASSA DEPOSITI**	USD	2	2.204.854,41	14.161.279.503,78	17.767.217.207,43	31.928.496.711,21
36	**CDC**	GBP	1	1.589.233,04	10.847.721.047,38	18.350.892.072,94	29.198.613.120,32
37	**CESCE, SPAIN**	USD	1	11.444.216,83	61.568.830.744,49	104.154.873.185,22	165.723.703.929,71
38	**CEXIM**	USD	1	9.979.000,00	57.802.359.600,00	86.703.539.400,00	144.505.899.000,00
39	**CIDA**	CAD	24	77.424.202,51	104.505.415.588,65	718.077.958.832,52	822.583.374.421,17
40	**CITIBANK LONDON**	EUR	3	26.269.855,03	79.094.951.603,68	355.927.280.229,37	435.022.231.833,04
41	**COFACE**	EUR	1	42.893.895,68	263.891.575.568,97	446.420.613.417,91	710.312.188.986,88
42		USD	1	25.756.714,37	138.568.737.743,05	234.414.243.048,92	372.982.980.791,97
43	**CREDIT AGRICOLE CIB**	EUR	6	139.482.294,93	984.654.995.010,91	1.325.136.938.456,16	2.309.791.933.467,07
44		USD	2	69.952.121,05	288.926.664.925,05	724.050.000.000,00	1.012.976.664.925,05
45	**CREDIT SUISSE**	CHF	2	4.688.902,63	28.007.805.292,50	40.964.780.169,14	68.972.585.461,64
46	**CZECH EXPORT BANK**	USD	1	37.590.154,50	-	544.343.027.314,50	544.343.027.314,50
47	**DENMARK**	DKK	3	13.168.205,00	8.837.359.622,56	20.368.007.200,79	29.205.366.823,35
48	**DEUTSCHE BANK AG, HK**	USD	1	676.585,14	9.797.629.412,34	-	9.797.629.412,34
49	**DEUTSCHE BANK LONDON**	USD	2	24.224.450,15	78.773.455.338,48	272.020.807.283,67	350.794.262.622,15
50	**DEUTSCHE BANK MADRID**	EUR	2	7.856.047,81	28.562.431.008,57	101.531.756.713,08	130.094.187.721,65
51	**DEUTSCHE BANK TOKYO**	USD	2	1.974.397,54	28.591.250.776,74	-	28.591.250.776,74
52	**DFAS**	USD	1	1.544.923,16	8.311.548.558,65	14.060.483.721,31	22.372.032.279,96
53	**DRESDNER SINGAPORE**	EUR	3	271.645,13	3.961.587.717,40	536.787.773,80	4.498.375.491,20
54		USD	1	119.842,14	1.156.956.280,22	578.477.749,12	1.735.434.029,34
55	**DZ Bank AG Singapore**	USD	3	11.802.675,79	70.744.778.735,19	100.169.769.379,80	170.914.548.114,99
56	**ECGD**	GBP	1	63.904.799,04	436.198.737.338,82	737.909.437.319,32	1.174.108.174.658,14
57		USD	1	12.193.443,42	65.599.603.916,78	110.973.650.248,24	176.573.254.165,02
58	**EDC**	USD	3	114.623.218,70	365.706.415.224,31	1.294.152.414.770,39	1.659.858.829.994,70
59	**EFIC**	EUR	3	20.196.299,05	137.792.678.795,91	196.652.984.314,53	334.445.663.110,44
60		USD	20	65.022.562,58	412.719.559.994,08	528.872.168.741,38	941.591.728.735,46
61	**EIB**	USD	1	9.902.491,31	94.410.005.397,75	48.987.971.262,36	143.397.976.660,11
62	**EKF**	EUR	1	1.609.452,31	9.901.664.035,54	16.750.463.854,98	26.652.127.890,52
63		USD	1	6.307.720,34	33.934.955.123,69	57.407.143.061,93	91.342.098.185,62
64	**EKN**	USD	1	3.657.173,71	19.681.869.048,52	33.277.663.445,99	52.959.532.494,51
65	**EKSPORTFINANS ASA**	USD	6	15.132.831,45	85.167.094.004,82	133.971.438.222,63	219.138.532.227,45
66	**EKSPORTKREDITT AS**	USD	1	79.376.470,00	-	1.149.450.662.070,00	1.149.450.662.070,00
67	**ERSTE BANK, VIENNA**	EUR	2	18.944.480,48	20.481.044.484,02	293.234.816.144,66	313.715.860.628,68
68	**EXIM BANK KOREA**	KRW	18	325.245.648.180,00	152.690.716.037,20	4.085.260.079.748,20	4.237.950.795.785,40

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
69		USD	22	1.092.567.435,42	2.669.323.718.484,98	13.152.145.313.846,50	15.821.469.032.331,50
70	**EXIM BANK OF CHINA**	CNY	1	1.007.554.261,87	327.059.863.778,20	1.798.829.251.054,40	2.125.889.114.832,61
71		USD	16	1.435.640.373,71	1.651.960.645.317,14	19.137.547.606.435,30	20.789.508.251.752,40
72	**EXIM BANK TAIPEI**	USD	1	913.907,26	4.916.736.840,68	8.317.554.191,38	13.234.291.032,06
73	**EXIMBANK HUNGARY**	USD	1	26.263.491,98	-	380.321.627.362,38	380.321.627.362,38
74	**FINNVERA**	EUR	4	500.075,02	2.835.204.733,35	5.445.912.529,42	8.281.117.262,77
75		USD	1	602.106,88	3.239.279.565,62	5.479.830.163,66	8.719.109.729,28
76	**GIEK**	USD	1	3.578.200,72	19.250.394.084,82	32.565.530.541,50	51.815.924.626,32
77	**GOSPODRSTWA**	USD	4	6.550.431,59	56.475.881.898,75	38.380.917.956,04	94.856.799.854,79
78	**HAPOALIM, ZURICH**	USD	1	4.080.000,00	39.388.320.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00
79	**HSBC LONDON**	GBP	4	5.850.041,25	77.008.712.906,34	30.472.749.470,42	107.481.462.376,76
80	**IBRD**	USD	59	3.786.553.631,54	2.155.966.276.420,95	52.677.116.861.851,90	54.833.083.138.272,80
81	**ICO**	EUR	9	78.318.097,03	7.327.171.717,22	1.289.600.935.575,33	1.296.928.107.292,54
82		USD	19	119.845.958,93	278.994.704.311,85	1.456.494.626.953,48	1.735.489.331.265,33
83	**IDA**	SDR	31	743.038.080,67	2.182.820.884.716,85	12.781.988.351.119,40	14.964.809.235.836,20
84		USD	48	124.746.462,33	404.804.833.858,48	1.401.648.687.142,25	1.806.453.521.000,73
85	**IDB**	ACU	42	195.833.399,28	487.613.251.751,51	2.348.250.203.207,69	2.835.863.454.959,20
86		USD	25	792.241.816,23	1.324.989.086.395,09	10.147.464.654.373,60	11.472.453.740.768,70
87	**IFAD**	EUR	2	8.495.708,24	8.009.851.716,50	132.676.952.810,84	140.686.804.527,34
88		SDR	8	122.914.664,74	138.150.817.745,42	2.337.354.217.558,12	2.475.505.035.303,54
89		USD	1	2.500.000,00	-	36.202.500.000,00	36.202.500.000,00
90	**ING BANK AMSTERDAM**	EUR	7	327.124.426,68	915.988.841.561,28	4.501.109.883.152,86	5.417.098.724.714,13
91	**JAICAF**	JPY	2	6.892.880.000,00	139.244.891.775,50	764.515.758.712,50	903.760.650.488,00
92	**JBIC**	JPY	12	33.239.684.563,00	1.751.857.220.867,53	2.606.367.344.578,67	4.358.224.565.446,20
93		USD	4	45.591.558,83	313.119.807.535,05	347.091.555.882,18	660.211.363.417,23
94	**JICA**	JPY	239	1.017.276.854.869,00	13.984.280.551.502,90	119.396.076.002.332,00	133.380.356.553.834,00
95	**KFAED**	KWD	2	886.800,00	21.128.426.796,00	21.128.426.700,70	42.256.853.496,70
96	**KfW**	EUR	63	671.048.099,42	1.727.543.361.391,92	9.384.845.402.978,43	11.112.388.764.370,30
97		USD	2	37.027.921,25	213.441.843.528,09	322.759.484.093,16	536.201.327.621,25
98	**KOMERCNI BANKA**	USD	1	4.030.356,60	29.181.796.962,30	29.181.796.962,30	58.363.593.924,60
99	**MAFF, JAPAN**	JPY	2	4.253.103.675,00	156.430.039.631,43	401.216.074.026,57	557.646.113.657,99
100	**METI, GOV. OF JAPAN**	JPY	1	5.359.332.998,00	261.059.602.736,33	441.629.879.229,74	702.689.481.966,07
101	**MIZUHO SINGAPORE**	USD	1	15.199.487,07	48.911.949.487,80	171.191.822.772,87	220.103.772.260,67
102	**N I O**	EUR	10	69.730.500,57	386.853.218.944,43	767.866.437.869,63	1.154.719.656.814,06
103	**NATIXIS BANQUE**	EUR	74	442.580.472,41	1.320.648.303.128,39	6.008.373.674.863,10	7.329.021.977.991,50
104	**NIB**	EUR	3	8.921.050,12	10.730.141.720,70	137.000.218.003,97	147.730.359.724,67
105	**NORDEA FINLAND**	USD	1	6.345.373,45	22.971.838.775,40	68.915.514.125,09	91.887.352.900,49
106	**OEKB**	EUR	1	47.432.969,58	291.816.862.065,46	493.661.255.936,95	785.478.118.002,41
107	**ONDD**	EUR	1	13.189.961,19	81.147.210.976,15	137.275.248.839,95	218.422.459.816,10
108	**PT BNI TOKYO BRANCH**	USD	3	5.440.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00	78.776.640.000,00
109	**PT MANDIRI CAYMAN IS**	EUR	2	121.162.023,58	958.500.066.659,05	1.047.912.753.319,86	2.006.412.819.978,91
110		USD	2	283.610.394,74	1.246.191.393.540,78	2.860.770.732.689,16	4.106.962.126.229,94
111	**PT MANDIRI HONGKONG**	USD	1	21.250.000,00	153.860.625.000,00	153.860.625.000,00	307.721.250.000,00
112	**PT. BNI-HONG KONG**	USD	5	37.559.697,20	91.973.862.133,83	451.928.113.019,37	543.901.975.153,20
113	**PT. BNI-SINGAPORE**	GBP	1	1.021.607,75	12.513.176.269,80	6.256.587.951,17	18.769.764.220,97
114		USD	24	198.370.548,47	1.053.383.389.560,41	1.819.220.522.833,66	2.872.603.912.394,07
115	**RAIFFEISEN BANK INTL**	EUR	3	14.680.608,66	40.517.868.043,98	202.589.341.213,46	243.107.209.257,44
116	**RUSIA FED.**	USD	7	209.400.453,75	416.151.509.800,50	2.616.176.460.953,25	3.032.327.970.753,75
117	**SACE**	EUR	1	365.159,45	2.246.535.875,51	3.800.413.326,62	6.046.949.202,14
118		USD	1	1.710.114,27	9.200.257.201,96	15.563.907.541,91	24.764.164.743,87
119	**SERV**	CHF	5	43.342.578,38	231.262.559.517,04	406.295.932.808,16	637.558.492.325,21
120	**SFD**	SAR	5	177.778.950,85	85.583.392.772,24	600.534.912.348,75	686.118.305.120,98
121	**SOCIETE GENERALE**	EUR	2	5.009.555,00	-	82.956.978.411,25	82.956.978.411,25
122	**SWISS**	CHF	1	2.833.333,30	41.677.624.509,68	-	41.677.624.509,68
123	**UBS AG, SINGAPORE**	USD	2	41.966.549,55	607.717.604.033,55	-	607.717.604.033,55
124	**UNICREDIT BANK AUSTR**	EUR	35	177.964.952,67	581.139.505.482,23	2.365.915.619.494,81	2.947.055.124.977,03
125	**UNICREDIT MUNICH**	EUR	1	4.326.316,25	20.469.347.339,01	51.173.368.181,93	71.642.715.520,94
126	**US DEP TREASURY**	USD	2	5.129.321,01	37.424.575.773,27	36.853.121.772,54	74.277.697.545,81
127	**US EXIM**	USD	9	126.176.317,25	575.624.583.077,19	1.251.534.667.020,06	1.827.159.250.097,25
128	**USAID**	USD	110	201.633.712,26	613.318.943.790,33	2.306.538.843.417,77	2.919.857.787.208,10
129	**USDA**	USD	10	109.712.291,88	390.810.863.976,75	1.197.932.834.737,53	1.588.743.698.714,28
130	**VNESHECONOMBANK**	USD	2	99.875.000,00	1.446.289.875.000,00	-	1.446.289.875.000,00
131	**Grand Total**		**1293**		**56.807.705.485.166,50**	**346.526.988.201.325,00**	**403.334.693.686.492,00**
132	*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-						

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15-Nov-20	(168.270.917.000,00)	88.385.985.000,00
2	FR0034	15-Jun-21	(941.746.000,00)	51.737.802.000,00
3	FR0035	15-Jun-22	(7.358.964.000,00)	-
4	FR0037	15-Sep-26	(60.748.763.000,00)	-
5	FR0039	15-Aug-23	(16.454.792.000,00)	-
6	FR0040	15-Sep-25	(11.705.210.000,00)	609.333.102.000,00
7	FR0042	15-Jul-27	(108.291.531.000,00)	48.919.032.000,00
8	FR0043	15-Jul-22	(71.244.181.000,00)	36.970.671.000,00
9	FR0044	15-Sep-24	(617.843.580.000,00)	11.881.409.000,00
10	FR0045	15-May-37	(39.287.747.000,00)	655.998.320.000,00
11	FR0046	15-Jul-23	(797.798.701.000,00)	268.709.145.000,00
12	FR0047	15-Feb-28	(853.077.807.000,00)	32.433.952.000,00
13	FR0050	15-Jul-38	(470.080.715.000,00)	142.485.235.000,00
14	FR0052	15-Aug-30	(297.693.698.000,00)	111.928.972.000,00
15	FR0053	15-Jul-21	(197.914.460.000,00)	991.536.857.000,00
16	FR0054	15-Jul-31	(383.552.731.000,00)	394.520.901.000,00
17	FR0056	15-Sep-26	(797.582.111.000,00)	2.120.925.199.000,00
18	FR0057	15-May-41	(28.582.168.000,00)	1.169.714.224.000,00
19	FR0058	15-Jun-32	(43.632.332.000,00)	3.957.668.048.000,00
20	FR0059	15-May-27	(998.745.865.000,00)	1.209.077.539.000,00
21	FR0061	15-May-22	(254.289.063.000,00)	1.336.468.032.000,00
22	FR0062	15-Apr-42	(374.707.396.000,00)	110.170.285.000,00
23	FR0063	15-May-23	(3.484.225.388.000,00)	140.673.566.000,00
24	FR0064	15-May-28	(4.830.751.605.000,00)	139.172.980.000,00
25	FR0065	15-May-33	(4.137.516.218.000,00)	641.639.105.000,00
26	FR0067	15-Feb-44	(392.405.823.000,00)	1.027.689.567.000,00
27	FR0068	15-Mar-34	(2.129.894.069.000,00)	872.315.946.000,00
28	FR0070	15-Mar-24	(457.614.633.000,00)	1.745.793.795.000,00
29	FR0071	15-Mar-29	(193.930.573.000,00)	3.010.165.206.000,00
30	FR0072	15-May-36	(664.594.048.000,00)	2.797.394.782.000,00
31	FR0073	15-May-31	(196.631.835.000,00)	3.694.440.223.000,00
32	FR0074	15-Aug-32	(343.581.741.000,00)	513.011.016.000,00
33	FR0075	15-May-38	(1.966.671.363.000,00)	1.268.614.589.000,00
34	FR0076	15-May-48	(134.626.823.000,00)	11.286.314.000,00
35	FR0077	15-May-24	(228.594.616.000,00)	40.276.821.000,00
36	FR0078	15-May-29	(273.154.182.000,00)	74.709.344.000,00
Grand Total			**(26.033.997.395.000,00)**	**29.326.047.964.000,00**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-35	-	638.241.056.000,00
2	RI0037	17-Feb-37	(131.245.719.000,00)	-
3	RI0038	17-Jan-38	(268.220.543.000,00)	-
4	RI0122	8-Jan-22	(14.009.586.000,00)	-
5	RI0123	11-Jan-23	(25.333.239.000,00)	-
6	RI0124	15-Jan-24	(68.065.006.000,00)	-
7	RI0125	15-Jan-25	(92.539.564.000,00)	-
8	RI0126	8-Jan-26	(87.306.574.000,00)	-
9	RI0127	8-Jan-27	(54.712.559.000,00)	-
10	RI0128	11-Jan-28	(64.269.898.000,00)	-
11	RI0142	17-Jan-42	(228.085.213.000,00)	165.138.384.000,00
12	RI0144	15-Jan-44	(255.247.974.000,00)	-
13	RI0145	15-Jan-45	(248.174.156.000,00)	-
14	RI0146	8-Jan-46	(109.380.352.000,00)	-
15	RI0147	8-Jan-47	(142.063.579.000,00)	-
16	RI0148	11-Jan-48	(190.720.343.000,00)	-
17	RI0320	13-Mar-20	(20.958.997.000,00)	-
18	RI0422	25-Apr-22	(50.221.085.000,00)	-
19	RI0423	15-Apr-23	(65.391.027.000,00)	-
20	RI0428	24-Apr-28	(31.585.610.000,00)	-
21	RI0443	15-Apr-43	(234.427.085.000,00)	-
22	RI0521	5-May-21	(87.616.603.000,00)	-
23	RI0727	18-Jul-27	(46.764.185.000,00)	-
24	RI0747	18-Jul-47	(100.210.008.000,00)	-
25	RI1023	17-Oct-23	(28.649.854.000,00)	-
26	RIEUR0425	24-Apr-25	(29.995.899.000,00)	-
27	RIEUR0623	14-Jun-23	(132.183.951.000,00)	-
28	RIEUR0628	14-Jun-28	(260.783.425.000,00)	-
29	RIEUR0721	8-Jul-21	(36.065.876.000,00)	-
30	RIEUR0724	18-Jul-24	(21.895.618.000,00)	-
31	RIEUR0725	30-Jul-25	(181.427.248.000,00)	-
Grand Total			**(3.307.550.776.000,00)**	**803.379.440.000,00**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi SBSN Rupiah
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(5.411.444.000,00)	14.624.904.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(8.932.948.000,00)	10.964.453.000,00
3	IFR0008	15-Mar-20	(513.200.000,00)	473.762.000,00
4	IFR0010	15-Feb-36	(15.932.545.000,00)	267.534.760.000,00
5	PBS002	15-Jan-22	(575.544.125.000,00)	-
6	PBS003	15-Jan-27	(426.800.270.000,00)	2.244.233.000,00
7	PBS004	15-Feb-37	(1.329.182.458.000,00)	-
8	PBS005	15-Apr-43	(1.775.928.688.000,00)	-
9	PBS006	15-Sep-20	(53.334.762.000,00)	361.598.179.000,00
10	PBS007	15-Sep-40	(14.387.962.000,00)	351.937.481.000,00
11	PBS011	15-Aug-23	(4.546.572.000,00)	1.056.141.009.000,00
12	PBS012	15-Nov-31	(63.574.887.000,00)	2.842.526.304.000,00
13	PBS014	15-May-21	(334.686.140.000,00)	48.200.014.000,00
14	PBS015	15-Jul-47	(431.518.786.000,00)	47.672.458.000,00
15	PBS016	15-Mar-20	(145.244.502.000,00)	138.467.859.000,00
16	PBS017	15-Oct-25	(252.777.095.000,00)	-
17	PBS018	15-May-28	(66.034.006.000,00)	-
18	PBS019	15-Sep-23	(55.487.558.000,00)	-
19	PBS020	15-Oct-27	(23.697.662.000,00)	4.486.301.000,00
20	PBS021	15-Nov-26	(4.352.651.000,00)	-
Grand Total			**(5.587.888.261.000,00)**	**5.146.871.717.000,00**

Lampiran 27

Ikhtisar Laporan Keuangan
Unit Badan Lainnya
Per 31 Desember 2018

1. Lembaga Non Struktural Dana APBN & Non APBN
2. Pendapatan, Beban, & Surplus/Defisit
3. Aktiva, Kewajiban, & Ekuitas

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.500.000		9.363.558			9.363.558	136.442	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0	Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	279.150	-	265.597			265.597	13.554	Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	1.337.687		1.337.687			1.337.687	0	Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	99.844.802	6.335.227	85.097.850	2.758.060		94.191.138	5.653.664	Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	10.000.000		10.000.000			10.000.000	-	Bagian satker	025
7	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda						0	0	tidak aktif	033
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	54.419.000	4.406.623	45.901.921	1.815.147		52.123.692	2.295.308	Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	183.355.740	38.594.902	123.102.115	4.153.033	-	165.850.051	17.505.689	Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)						0	0	Bukan satker	025
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0		inaktif	025
12	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	12.000.000	7.838.734	3.506.739	171.127		11.516.599	483.401	Satker	090
13	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.065.140		1.040.758			1.040.758	24.382	Bagian satker	088
14	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)						0	0	Bukan satker	091
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0	Bagian satker	040
16	Badan Restorasi Gambut	234.762.553	11.514.673	187.341.961	12.688.545		211.545.179	23.217.374	Satker	029
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	3.216.279	2.783.686			5.999.966	34	Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	57.116.345	17.979.694	32.907.839	2.114.433		53.001.966	4.114.379	Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	21.600.000		18.990.850	232.400		19.223.250	2.376.750	Satker	036
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	278.522.850				255.921.175	255.921.175	22.601.675	Satker	999
21	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	1.000.000		902.898	34.500		937.398	62.602	Bagian satker	018
22	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	14.325.000		13.357.180			13.357.180	967.820	Bagian satker	044
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	18.252.213	1.574.285	16.556.998	80.300		18.211.583	40.630	Satker	035
24	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	1.152.380		1.152.134			1.152.134	246	Bagian satker	026
25	Dewan Pers	17.854.774	2.894.169	13.720.717	34.901		16.649.787	1.204.987	Satker	059
26	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	2.000.000		1.845.522			1.845.522	154.478	Bagian satker	010
27	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	38.978.810	3.380.485	34.885.104	125.634		38.391.223	587.587	Satker	007
28	Dewan Riset Nasional (DRN)	5.436.040	-	5.333.890			5.333.890	102.150	Bagian satker	042
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.207.707	248.682	9.499.084	199.918		9.947.684	260.023	Satker	033
30	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3.200.000		3.154.495			3.154.495	45.505	Bagian satker	055
31	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	38.768.467	7.288.643	24.634.006	1.231.859		33.154.508	5.613.959	Bagian satker	048
32	Komisi Banding Merek	722.964		474.124			474.124	248.840	Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	447.201	-	439.474	-		439.474	7.727	Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	16.750.702	3.369.234	12.801.144	251.773		16.422.151	328.551	Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	749.390		747.707			747.707	1.683	Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	9.530.512		8.733.439			8.733.439	797.073	Bagian satker	034
37	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	14.714.529	2.825.766	11.718.221			14.543.987	170.542	Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	18.782.982	7.430.983	9.592.321	44.086		17.067.390	1.715.592	Bagian satker	074
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	2.405.285		66.900			66.900	2.338.385	Bagian satker	027

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
40	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	-	-	-			-	-	tidak aktif	036
41	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	3.155.169		3.147.974			3.147.974	7.196	Bagian satker	025
42	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	51.381.082	6.525.241	40.167.832	3.795.035		50.488.108	892.974	Satker	059
43	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	15.000.000	1.395.000	12.925.146	570.440		14.890.586	109.414	Satker	047
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	16.552.224		14.364.011			14.364.011	2.188.213	Bagian satker	084
45	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	58.500.000		57.953.371			57.953.371	546.629	Bagian satker	035
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	33.320.000	14.663.030	2.683.287	2.457.216	8.887.981	28.691.514	4.628.486	Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.000.000		994.071			994.071	5.929	Bagian satker	035
48	Komite Keuangan Nasional Syariah	18.900.000		16.302.308	1.288.484		17.590.792	1.309.208	satker	055
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	40.000.000		39.587.001	146.561		39.733.562	266.438	Bagian satker	035
50	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	564.320		405.418			405.418	158.902	Bagian satker	078
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	42.756.192	8.371.587	24.175.778	6.790.680	-	39.338.045	3.418.147	Satker	022
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	50.252.256	6.925.350	1.417.438		41.709.576	50.052.364	199.892	Bagian satker	092
53	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	2.726.100	-	1.835.505			1.835.505	890.595	Bagian satker	048
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)						-	-	Tidak aktif	035
55	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)						0	0	Tidak aktif	041
56	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.544.315		3.520.467			3.520.467	23.848	Satker	015
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-	Tidak aktif	084
58	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	34.565.651	-	26.476.535	4.011.171		30.487.705	4.077.946	Satker	024
59	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.200.000		1.197.564		-	1.197.564	2.436	Bagian satker	088
60	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.089.590		1.867.705			1.867.705	221.885	Bagian satker	026
61	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	81.411.655	8.296.633	64.620.022	7.776.226		80.692.881	718.774	Satker	007
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	834.240		833.288			833.288	952	Bagian satker	026
63	Lembaga Sensor Film (LSF)	41.130.449	12.384.937	25.226.852	1.269.343	-	38.881.131	2.249.318	Satker	023
64	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0	Tidak aktif	024
65	Otorita Asahan	5.740.000	1.491.449	204.475			1.695.924	4.044.076	Bukan satker	019
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	99.336.906	70.917.251	21.451.017	4.254.484		96.622.751	2.714.155	Satker	015
67	SKK MIGAS (Satker)	1.856.364.450				1.611.276.862	1.611.276.862	245.087.588	satker	999
68	SKK MIGAS (Bukan Satker)						0	0	Bukan satker	999
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	45.458.965	-	37.198.920			37.198.920	8.260.045	Bagian satker	114
70	Badan Pembinaan Idelolgi Pancasila (BPIP)	41.616.381	-	4.215.586	583.876		4.799.462	36.816.919	Bagian satker	114
71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						0	0	Bukan Satker	999
72	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-				-	0	0	Satker	999
73	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0	Bukan Satker	007
74	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0	Bukan Satker	007
75	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	73.500.000	2.597.774	37.669.842	3.523.540		43.791.156	29.708.844	Satker	040
76	Otoritas Nasional Senjata Kimia	4.153.716		3.851.752			3.851.752	301.964	Bagian satker	019
77	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur								Belum aktif	040
78	Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan								Belum aktif	092
79	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								Belum aktif	024
	J U M L A H	**3.810.135.884**	**252.466.632**	**1.135.549.083**	**62.402.772**	**1.917.795.594**	**3.368.214.080**	**441.921.804**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	239.407.364	-	239.407.364	245.680.595	-	245.680.595	(6.273.231)	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)			-	92.428.698		92.428.698	(92.428.698)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)		575.037	575.037	50.751.406	-	50.751.406	(50.176.369)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.415.740.143	4.294.701	1.420.034.844	163.545.466	9.509	163.554.975	1.256.479.868	020	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)			-			-	-	025	tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	14.955.533.310	68.302.769	15.023.836.079	14.802.653.933		14.802.653.933	221.182.146	025	Bukan satker
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	8.685	8.685	11.633.361	59.100	11.692.461	(11.683.776)	090	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	487.657.312	-	487.657.312	3.470.351		3.470.351	484.186.961	091	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	74.686	7.991.975	8.066.662	151.122.035	3.138.897	154.260.932	(146.194.271)		
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	237.910	6.237.910	5.999.966	9.229	6.009.195	228.716	025	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)		449.351	449.351	53.018.257	4.470	53.022.727	(52.573.375)	020	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	20.570	20.570	19.557.865	48.752	19.606.616	(19.586.047)	036	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	3.022	304.921	307.943	48.269.038	5.318	48.274.355	(47.966.412)	999	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	9.174	9.174	18.226.176	1.154	18.227.329	(18.218.155)	035	Satker
16	Dewan Pers	499	24.720	25.219	17.136.166	20.738	17.156.904	(17.131.685)	059	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	23.177	23.177	39.136.221	9.491	39.145.712	(39.122.535)	007	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	334	334	9.959.964	621	9.960.585	(9.960.251)	033	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	264	40.058	40.322	33.850.027	667	33.850.694	(33.810.372)	048	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	71.954	71.954	16.703.141	206.041	16.909.182	(16.837.228)	059	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	26.121	19.755	45.876	50.042.032	114.464	50.156.496	(50.110.620)	059	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)		218.287	218.287	14.872.944	93.364	14.966.308	(14.748.022)	047	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	1.082	-	1.082	16.786.955	-	16.786.955	(16.785.873)	055	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	93.516	1.610	95.126	37.166.334	11	37.166.345	(37.071.219)	022	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		8.000	8.000	3.531.492	74	3.531.567	(3.523.567)	015	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	10.786.703	138.813	10.925.516	29.503.950	14.657	29.518.607	(18.593.091)	024	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	50	313.162	313.212	80.396.666	33.713	80.430.379	(80.117.167)	007	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.384.177	378.896	3.763.073	42.641.873	92.817	42.734.691	(38.971.617)	023	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	-		-			-	-	019	Bukan satker

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	2.953	187.937	190.889	96.814.548	130.525	96.945.072	(96.754.183)	015	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.173.979	15.432.918	18.606.896	1.621.096.467	649.435	1.621.745.902	(1.603.139.006)	999	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.611.292.317		1.611.292.317	1.715.701.276	-	1.715.701.276	(104.408.960)	999	Bukan satker
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	5.569.587.680	-	5.569.587.680	5.034.453.918		5.034.453.918	535.133.762	999	Bukan Satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	2.294.753	2.294.753	50.602.486		50.602.486	(48.307.733)	999	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	115.617.020	-	115.617.020	114.537.123	-	114.537.123	1.079.897	007	Bukan satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.843.516	-	3.843.516	1.660.144	3.577.529	5.237.673	(1.394.157)	007	Bukan satker
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	7.479	7.695	15.173	40.931.268	20.533	40.951.801	(40.936.628)	040	satker
	J U M L A H	**24.422.233.192**	**101.357.161**	**24.523.590.353**	**24.733.882.142**	**8.241.108**	**24.742.123.250**	**(218.532.897)**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	98.713.929	-	9.915.996	-	108.629.925	5.404.705	-	5.404.705	103.225.220	108.629.925	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1.883.918		2.914.505		4.798.423	-		-	4.798.423	4.798.423	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	773		2.378.195	22.260	2.401.227	-		-	2.401.227	2.401.227	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	117.934.596	-	253.027.909	1.971.840	372.934.345	13.802.013		13.802.013	359.132.332	372.934.345	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)					-			-	-	-	Tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	72.203.669.370	40.720.915.397	1.011.469	242.979	112.925.839.215	361.761.842	108.774.780.536	109.136.542.378	112.925.839.215	112.925.839.215	Bukan Satker
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	155.306		431.154	246.800	833.260	-		-	833.260	833.260	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	1.385.433.160	8.814.486.707	-	-	10.199.919.867	-	9.715.732.906	9.715.732.906	484.186.961	10.199.919.867	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	161.895.995		13.780.896	601.790	176.278.682	-		-	176.278.682	176.278.682	Satker
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	694.872	563.276	184.087	4.660.450	6.102.685	702.442	4.131.694	4.834.135	1.268.550	6.102.685	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	365.739		3.921.680	42.276	4.329.696	-		-	4.329.696	4.329.696	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional	245.046		895.239	-	1.140.285	178.880		178.880	961.405	1.140.285	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	428.773.260	3.301.928	432.075.188	-	-	-	432.075.188	432.075.188	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	70.919		25.916	74.414	171.249	100.867		100.867	70.382	171.249	Satker
16	Dewan Pers	172.183		828.647	83.750	1.084.580	5.599		5.599	1.078.981	1.084.580	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	794.754		806.488	80.763	1.682.005	3.612		3.612	1.678.393	1.682.005	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	22.537	-	576.297	-	598.834	-		-	598.834	598.834	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	214.105	-	7.111.702	439.418	7.765.225	145.698		145.698	7.619.527	7.765.225	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	124.295	-	525.365	38.144	687.804	13.707		13.707	674.097	687.804	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	376.204	-	8.893.672	52.706	9.322.582	79.260		79.260	9.243.322	9.322.582	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	233.590		1.144.775	183.583	1.561.947	-	-	-	1.561.947	1.561.947	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	21.518		1.822.672	-	1.844.189	345.356		345.356	1.498.833	1.844.189	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	27.187		11.827.040	10.603.134	22.457.361	-		-	22.457.361	22.457.361	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	32.605		18.334		50.939	-		-	50.939	50.939	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1.969.754		158.126.615	563.260	160.659.629	809.704		809.704	159.849.925	160.659.629	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	100.996		145.349.236	321.613	145.771.845	240.275		240.275	145.531.569	145.771.845	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	1.601.431	-	12.972.519	321.303	14.895.253	20		20	14.895.233	14.895.253	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	1.255.399		4.504.964	1.239.478.731	1.245.239.094	85.642.943		85.642.943	1.159.596.151	1.245.239.094	Bukan satker (dibubarkan)
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	735.979		8.167.099	-	8.903.078	-		-	8.903.078	8.903.078	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.117.970		69.684.435	48.452.578	121.254.984	12.036.224	-	12.036.224	109.218.760	121.254.984	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	2.541.534		103.748.132		106.289.666	133.599.223	868.896.091	1.002.495.313	(896.205.647)	106.289.666	Bukan satker
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.115.776.314		1.128.523.052	551.575.699	7.795.875.066	244.129.818	1.769.260.112	2.013.389.929	5.782.485.137	7.795.875.066	Bukan Satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	5.338.796		98.035.195	26.957.104	130.331.095	-	-	-	130.331.095	130.331.095	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	35.913.947		87.931.725		123.845.672	15.863.847	16.946.418	32.810.265	91.035.407	123.845.672	Bukan Satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.958.801		2.932.453		6.891.253			-	6.891.253	6.891.253	Bukan Satker
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	10.608		3.989.100	-	3.999.709	11.023	-	11.023	3.988.686	3.999.709	Satker
TOTAL		**80.145.404.129**	**49.535.965.380**	**2.574.779.824**	**1.890.316.524**	**134.146.465.856**	**874.877.058**	**121.149.747.755**	**122.024.624.814**	**121.258.383.421**	**134.146.465.856**	

Lampiran 28

Dana Kelolaan BLU
Pada Pusat Pembiayaan Perumahan
Per 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	20.286.930.568,33
2	MANDIRI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	3.963.832,70
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	6.671.891.834,00
4	BUKOPIN	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.715.113,56
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	67.924.654,45
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	391.763.027,06
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	17.195.170,30
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11100244	178.528.937,39
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	3.027.627,49
10	BANK NTT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	870.840.980,24
11	BANK DIY	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1111001471	1.307.233,98
12	BRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	5.125.775,72
13	BNI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	1.739.010.758,00
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	551.583.437,41
15	BPD JATIM	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11268862	339.861.123,28
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	6.722.601,47
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1-034—02557-2	1.828.324,00
18	BPD Papua	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	7.937.885,55
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100-002-000003591-0	293.767.010,00
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	2.497.862,44
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	244.105.365,83
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	267.835.906,25
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	99.770.546,00
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	8.947.302.621,37
25	Bank NTB	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	115.367.349,50
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	5.451.896,00
27	Bank Mayora	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	19.964.413,53
28	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	182.285.538,00
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.552.003,39
30	Bank Jabar Banten Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	109.102.625,93
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	13.416.368,00
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	12.767.378,76
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	3.980.105,00
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	264.687.887,23
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10101000353	197.690.403,44
36	Bank Bali	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100121000548	23.551.700,92
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	32.131.521,85
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	8.875.499,49
39	BTPN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5373000630	3.839.595,00
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7001170273	11.225.875,07
41	Bank Kaltimtara syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	3.442.564,00
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	2.443.991,00
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	0
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	9.695.280,19
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	600.772,62
46	BTN	Pengelolaan Kas	101400224547	200.000.000.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
47	BTN	Pengelolaan Kas	101400225218	150.000.000.000,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				**392.024.510.965,74**
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)				*** (101.403.796,82)**
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)				**391.923.107.168,92**
Total Aset Lainnya (4=3)				**391.923.107.168,92**

Keterangan :

Selisih kas rekening dana kelolaan senilai Rp.100.736.544,00 terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

a. Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp457.344.115,60);
b. Pencairan FLPP pada bank Sulteng yang seharusnya dipindahkan ke dana program sebelum 31 Desember 2018, namun baru dilakukan setelah 31 Desember 2018 sebesar (Rp183.825.000,00);
c. Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp395.548,15;
d. Kesalahan Bank Sultra yang melakukan *double* pendebetan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp194.250.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019;

e. Kesalahan Bank NTT yang kelebihan dalam melakukan pendebetan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp10.000.000,00 serta kekurangan pendebetan sebesar (Rp8.326.000,00) (dua kali kekurangan pendebetan masing-masing sebesar Rp.4.163.000,00), sehingga jika dijumlahkan adalah PPDPP lebih bayar sebesar Rp1.674.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019 (rekening terlampir);

f. Pembatalan FLPP sebesar Rp381.445.763,00 atas beberapa bank yaitu :
   a. Bank Jatim sebesar Rp92.625.000,00;
   b. Bank Sumsel Babel sebesar Rp89.250.000,00;
   c. Bank Sultra sebesar Rp96.900.000,00;
   d. Bank Sumsel Babel Syariah sebesar Rp102.670.763,00.

   atas pembatalan beberapa bank tersebut telah dana telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan PPDPP pada bulan Januari 2019.
g. Kesalahan pemindahbukuan bank dari rekening operasional bank Sulselbar ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp38.000.000,00), dan akan dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening operasional pada Januari 2019;

h. Serta beberapa kesalahan pencatatan oleh beberapa bank sebesar Rp7,63,00.

Lampiran 29

Laporan Penilaian Kembali BMN
Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	131111	Tanah	353.496.962.605	937.764.422.000	584.267.459.395
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	160.568.289.493	201.278.735.000	40.710.445.507
3	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	131111	Tanah	188.409.157.000	1.073.370.956.905	884.961.799.905
4	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	722.151.448.273	826.074.360.556	103.922.912.283
5	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	6.870.699.000	6.870.699.000	0
6	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134112	Irigasi	3.388.031.928	3.388.031.928	0
7	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131111	Tanah	1.695.021.150.768	5.393.085.509.622	3.698.064.358.854
8	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.874.796.628.372	2.154.254.141.535	279.457.513.163
9	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	5.045.811.543	16.097.672.416	11.051.860.873
10	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134112	Irigasi	9.476.290.763	13.090.041.946	3.613.751.183
11	005	MAHKAMAH AGUNG	131111	Tanah	4.674.570.201.359	18.590.587.433.846	13.916.017.232.487
12	005	MAHKAMAH AGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
13	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	5.376.248.766.311	6.799.952.598.875	1.423.703.832.564
14	005	MAHKAMAH AGUNG	134111	Jalan dan Jembatan	12.416.781.360	14.907.717.902	2.490.936.542
15	005	MAHKAMAH AGUNG	134112	Irigasi	13.505.181.291	11.772.777.772	(1.732.403.519)
16	005	MAHKAMAH AGUNG	135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
17	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	3.561.671.405.231	15.332.134.078.146	11.770.462.672.915
18	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	4.291.149.722.005	3.856.815.866.992	(434.333.855.013)
19	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	6.103.210.905	14.304.798.924	8.201.588.019
20	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	6.370.747.340	6.512.643.251	141.895.911
21	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	131111	Tanah	87.074.216.197.603	559.533.523.926.383	472.459.307.728.780
22	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	4.082.450.411.857	6.764.028.915.607	2.681.578.503.750
23	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	96.349.832.668	308.350.248.390	212.000.415.722
24	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134112	Irigasi	59.821.647.437	110.699.422.492	50.877.775.055
25	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	2.273.442.063.655	11.229.540.817.000	8.956.098.753.345
26	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.855.664.967.978	2.490.376.042.273	634.711.074.295

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
27	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	31.565.116.287	30.698.010.202	(867.106.085)
28	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134112	Irigasi	8.464.999.229	11.333.495.877	2.868.496.648
29	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	131111	Tanah	10.987.477.162.452	38.193.366.319.037	27.205.889.156.585
30	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.896.301.944.078	6.778.444.985.396	4.882.143.041.318
31	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	24.644.803	13.010.308.077	12.985.663.274
32	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134112	Irigasi	3.649.502	3.649.502	0
33	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131111	Tanah	294.835.406.765.490	1.466.872.624.813.270	1.172.037.218.047.780
34	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
35	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	133111	Gedung dan Bangunan	23.834.922.396.954	53.769.102.464.825	29.934.180.067.871
36	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.350.639.967.619	6.630.977.337.771	5.280.337.370.152
37	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134112	Irigasi	510.651.937.276	725.342.567.655	214.690.630.379
38	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	131111	Tanah	12.529.831.996.828	45.705.235.412.953	33.175.403.416.125
39	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	6.831.801.421.177	8.784.787.551.093	1.952.986.129.916
40	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	134111	Jalan dan Jembatan	9.591.169.054	23.051.610.929	13.460.441.875
41	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	134112	Irigasi	7.859.359.770	8.436.254.983	576.895.213
42	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	131111	Tanah	19.215.320.495.376	91.266.532.570.966	72.051.212.075.590
43	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	10.325.780.551.852	14.274.045.587.039	3.948.265.035.187
44	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	134.516.561.740	156.498.749.730	21.982.187.990
45	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134112	Irigasi	24.481.215.196	34.065.716.472	9.584.501.276
46	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	131111	Tanah	11.491.409.430.690	80.262.934.985.401	68.771.525.554.711
47	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	133111	Gedung dan Bangunan	3.108.401.959.119	5.441.815.505.120	2.333.413.546.001
48	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134111	Jalan dan Jembatan	64.254.198.545	167.198.212.875	102.944.014.330
49	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134112	Irigasi	91.776.340.396	200.632.287.353	108.855.946.957
50	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	131111	Tanah	2.529.491.595.203	8.301.434.578.250	5.771.942.983.047
51	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	133111	Gedung dan Bangunan	975.736.040.859	1.508.529.543.877	532.793.503.018
52	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.098.186.672	11.741.052.369	10.642.865.697

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
53	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134112	Irigasi	3.542.044.426	36.992.940.225	33.450.895.799
54	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE	131111	Tanah	4.136.646.637.155	18.148.561.938.495	14.011.915.301.340
55	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE	133111	Gedung dan Bangunan	1.581.252.968.553	2.263.967.267.051	682.714.298.498
56	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE	134111	Jalan dan Jembatan	17.854.596.703	33.149.966.410	15.295.369.707
57	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE	134112	Irigasi	50.210.435.328	139.524.730.867	89.314.295.539
58	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131111	Tanah	65.317.591.521.473	299.375.287.114.701	234.057.695.593.228
59	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	133111	Gedung dan Bangunan	13.985.852.886.495	15.645.064.896.571	1.659.212.010.076
60	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134111	Jalan dan Jembatan	43.640.649.187.820	90.306.043.882.437	46.665.394.694.617
61	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134112	Irigasi	3.661.440.388.442	5.049.634.347.262	1.388.193.958.820
62	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	131111	Tanah	3.779.503.080.672	16.723.323.479.369	12.943.820.398.697
63	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	3.319.332.969.982	6.110.778.984.810	2.791.446.014.828
64	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	31.950.459.157	65.772.207.468	33.821.748.311
65	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	134112	Irigasi	27.750.933.418	184.580.087.037	156.829.153.619
66	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	131111	Tanah	15.562.732.556.862	64.345.859.548.002	48.783.126.991.140
67	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	133111	Gedung dan Bangunan	9.216.965.190.061	12.213.335.321.685	2.996.370.131.624
68	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134111	Jalan dan Jembatan	28.874.858.801	82.856.315.164	53.981.456.363
69	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134112	Irigasi	46.597.448.486	51.009.350.331	4.411.901.845
70	025	KEMENTERIAN AGAMA	131111	Tanah	15.875.691.355.278	59.803.628.403.868	43.927.937.048.590
71	025	KEMENTERIAN AGAMA	133111	Gedung dan Bangunan	16.943.686.149.528	23.405.616.807.892	6.461.930.658.364
72	025	KEMENTERIAN AGAMA	134111	Jalan dan Jembatan	81.906.410.656	118.706.536.480	36.800.125.824
73	025	KEMENTERIAN AGAMA	134112	Irigasi	112.515.576.131	98.441.840.722	(14.073.735.409)
74	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	131111	Tanah	1.625.314.695.584	7.599.735.077.026	5.974.420.381.442
75	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.051.854.428.944	1.662.601.755.780	610.747.326.836
76	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134111	Jalan dan Jembatan	7.941.484.563	15.896.782.005	7.955.297.442
77	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134112	Irigasi	3.067.091.918	5.208.339.035	2.141.247.117

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
78	027	KEMENTERIAN SOSIAL	131111	Tanah	3.549.930.651.797	18.296.772.009.000	14.746.841.357.203
79	027	KEMENTERIAN SOSIAL	133111	Gedung dan Bangunan	1.053.463.388.254	1.551.066.993.093	497.603.604.839
80	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134111	Jalan dan Jembatan	28.007.880.242	45.919.255.805	17.911.375.563
81	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134112	Irigasi	26.221.498.085	24.393.011.512	(1.828.486.573)
82	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTA	131111	Tanah	2.281.792.425.376	10.465.691.373.399	8.183.898.948.023
83	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTA	133111	Gedung dan Bangunan	1.644.157.168.954	2.682.555.327.185	1.038.398.158.231
84	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTA	134111	Jalan dan Jembatan	43.268.529.911	183.272.755.436	140.004.225.525
85	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTA	134112	Irigasi	37.530.223.745	48.713.660.429	11.183.436.684
86	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	131111	Tanah	2.198.015.984.967	13.259.733.497.421	11.061.717.512.454
87	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	2.438.742.658.841	3.377.767.414.068	939.024.755.227
88	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	571.876.843.800	919.646.254.398	347.769.410.598
89	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134112	Irigasi	448.121.663.919	926.616.379.121	478.494.715.202
90	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAI	131111	Tanah	425.917.910.136.766	1.185.324.067.746.120	759.406.157.609.351
91	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAI	132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
92	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAI	133111	Gedung dan Bangunan	8.004.949.231.685	14.759.077.821.874	6.754.128.590.189
93	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAI	134111	Jalan dan Jembatan	118.693.745.523.128	349.460.998.475.376	230.767.252.952.248
94	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAI	134112	Irigasi	93.271.668.618.509	197.837.563.266.216	104.565.894.647.707
95	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK H	133111	Gedung dan Bangunan	4.685.407.070	8.610.602.000	3.925.194.930
96	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONO	133111	Gedung dan Bangunan	18.232.282.347	28.345.959.000	10.113.676.653
97	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANG	133111	Gedung dan Bangunan	149.523.812.503	153.539.561.000	4.015.748.497
98	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	131111	Tanah	1.595.430.929.869	7.000.239.458.875	5.404.808.529.006
99	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	133111	Gedung dan Bangunan	514.621.835.787	773.525.758.399	258.903.922.612
100	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134111	Jalan dan Jembatan	3.303.630.186	6.587.086.000	3.283.455.814
101	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134112	Irigasi	3.998.725.617	4.350.287.961	351.562.344

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
102	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131111	Tanah	273.198.404.650	1.307.839.814.000	1.034.641.409.350
103	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	155.723.508.467	281.382.620.000	125.659.111.533
104	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	131111	Tanah	57.349.103.821.453	334.958.442.295.664	277.609.338.474.211
105	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
106	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	133111	Gedung dan Bangunan	16.725.878.933.756	24.911.951.550.450	8.186.072.616.694
107	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	134111	Jalan dan Jembatan	145.511.791.781	468.649.325.982	323.137.534.201
108	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	134112	Irigasi	97.617.550.496	141.414.583.681	43.797.033.185
109	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	131111	Tanah	876.321.187.609	2.861.633.061.000	1.985.311.873.391
110	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	133111	Gedung dan Bangunan	689.737.155.351	853.215.603.674	163.478.448.323
111	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	134111	Jalan dan Jembatan	11.837.228.920	8.879.264.321	(2.957.964.599)
112	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	134112	Irigasi	2.653.858.162	4.969.259.000	2.315.400.838
113	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAI	131111	Tanah	294.120.000	1.626.120.000	1.332.000.000
114	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAI	133111	Gedung dan Bangunan	98.220.800.494	114.657.287.000	16.436.486.506
115	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEG	133111	Gedung dan Bangunan	27.683.537.081	56.846.985.475	29.163.448.394
116	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	131111	Tanah	1.327.193.478.205	4.089.638.405.000	2.762.444.926.795
117	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	372.368.550.323	716.323.590.947	343.955.040.624
118	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	3.726.455.323	15.295.413.000	11.568.957.677
119	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134112	Irigasi	12.609.121.395	12.829.407.328	220.285.933
120	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	131111	Tanah	230.330.789.519	741.572.134.394	511.241.344.875
121	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	412.558.331.125	331.490.397.806	(81.067.933.319)
122	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	134112	Irigasi	2.629.460.550	423.510.000	(2.205.950.550)
123	054	BADAN PUSAT STATISTIK	131111	Tanah	752.203.225.466	2.933.561.554.606	2.181.358.329.140
124	054	BADAN PUSAT STATISTIK	133111	Gedung dan Bangunan	1.474.084.223.804	1.604.128.397.407	130.044.173.603
125	054	BADAN PUSAT STATISTIK	134112	Irigasi	0	0	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
126	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	131111	Tanah	179.478.885.500	1.357.777.745.000	1.178.298.859.500
127	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	133111	Gedung dan Bangunan	108.120.792.906	147.622.414.000	39.501.621.094
128	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	134111	Jalan dan Jembatan	370.929.648	51.605.000	(319.324.648)
129	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	134112	Irigasi	310.934.780	2.450.323.000	2.139.388.220
130	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	131111	Tanah	1.965.854.219.814	8.617.521.411.767	6.651.667.191.953
131	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	133111	Gedung dan Bangunan	1.043.171.306.057	1.727.634.108.153	684.462.802.096
132	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134111	Jalan dan Jembatan	527.305.656	2.899.617.924	2.372.312.268
133	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134112	Irigasi	368.753.614	916.207.601	547.453.987
134	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	326.366.052.000	1.842.591.607.000	1.516.225.555.000
135	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	143.517.156.168	244.930.678.185	101.413.522.017
136	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	131111	Tanah	996.757.053.210	5.030.125.452.685	4.033.368.399.475
137	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	133111	Gedung dan Bangunan	516.746.856.214	707.276.543.012	190.529.686.798
138	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134111	Jalan dan Jembatan	5.380.568.359	8.822.920.000	3.442.351.641
139	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134112	Irigasi	2.047.968.022	2.993.683.522	945.715.500
140	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	43.736.485.617.407	177.981.337.304.528	134.244.851.687.121
141	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	10.253.845.613.566	19.864.615.224.052	9.610.769.610.486
142	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	68.183.261.160	326.731.878.204	258.548.617.044
143	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	44.365.365.531	100.398.587.708	56.033.222.177
144	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	131111	Tanah	519.866.034.658	1.296.263.408.100	776.397.373.442
145	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	404.582.643.428	567.624.652.187	163.042.008.759
146	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	704.015.060	1.872.755.520	1.168.740.460
147	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134112	Irigasi	3.477.766.254	4.598.218.966	1.120.452.712
148	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	131111	Tanah	101.438.100.000	1.418.300.300.000	1.316.862.200.000
149	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	198.975.570.760	294.920.669.475	95.945.098.715
150	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	1.238.440.520	2.743.866.000	1.505.425.480
151	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134112	Irigasi	380.613.000	(450.748.276)	(831.361.276)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
152	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	131111	Tanah	333.830.014.000	1.992.281.774.000	1.658.451.760.000
153	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	133111	Gedung dan Bangunan	196.970.014.589	279.368.332.388	82.398.317.799
154	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	131111	Tanah	67.931.369.276	219.749.425.000	151.818.055.724
155	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	575.748.738.822	401.190.797.686	(174.557.941.136)
156	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	212.256.636	4.812.541.099	4.600.284.463
157	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134112	Irigasi	2.607.116.767	2.709.185.000	102.068.233
158	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	131111	Tanah	123.510.085.888	642.616.544.191	519.106.458.303
159	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	133111	Gedung dan Bangunan	168.022.062.241	398.247.882.995	230.225.820.754
160	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	134111	Jalan dan Jembatan	106.156.485.726	113.076.958.945	6.920.473.219
161	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	134112	Irigasi	18.331.500.238	12.641.733.312	(5.689.766.926)
162	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	131111	Tanah	371.913.603.454	2.034.749.364.958	1.662.835.761.504
163	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	133111	Gedung dan Bangunan	205.432.684.900	473.073.560.150	267.640.875.250
164	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	134111	Jalan dan Jembatan	1.201.527.239	3.097.466.882	1.895.939.643
165	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	134112	Irigasi	1.806.173.017	2.342.554.000	536.380.983
166	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	12.145.847.261	15.518.594.000	3.372.746.739
167	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	131111	Tanah	840.096.145.812	3.369.020.054.288	2.528.923.908.476
168	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	133111	Gedung dan Bangunan	857.978.605.785	1.070.806.349.448	212.827.743.663
169	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	134111	Jalan dan Jembatan	12.419.358.627	28.361.979.243	15.942.620.616
170	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	134112	Irigasi	18.168.138.438	25.521.756.425	7.353.617.987
171	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	561.364.640.301	933.221.789.200	371.857.148.899
172	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	386.960.183.513	551.520.313.730	164.560.130.217
173	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134111	Jalan dan Jembatan	106.197.666	145.702.854	39.505.188
174	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134112	Irigasi	61.201.243	444.706.877	383.505.634
175	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	131111	Tanah	89.075.216.326	382.975.758.000	293.900.541.674

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
176	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	133111	Gedung dan Bangunan	206.745.640.723	241.890.332.591	35.144.691.868
177	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	134111	Jalan dan Jembatan	963.605.649	1.944.445.000	980.839.351
178	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KI	131111	Tanah	80.978.000.000	325.328.697.000	244.350.697.000
179	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KI	133111	Gedung dan Bangunan	64.378.179.376	145.048.765.000	80.670.585.624
180	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KI	134111	Jalan dan Jembatan	271.323.100	105.538.000	(165.785.100)
181	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131111	Tanah	6.315.989.762.206	28.953.383.959.160	22.637.394.196.954
182	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	874.654.226.449	1.050.541.652.143	175.887.425.694
183	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	13.105.490.489	43.113.987.504	30.008.497.015
184	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134112	Irigasi	8.430.486.600	48.848.335.139	40.417.848.539
185	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	131111	Tanah	1.788.972.615.313	13.752.630.052.088	11.963.657.436.775
186	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	349.902.451.263	655.189.208.855	305.286.757.592
187	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	430.235.452	1.576.632.000	1.146.396.548
188	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134112	Irigasi	805.876.717	6.389.163.284	5.583.286.567
189	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLO(	131111	Tanah	840.070.594.665	4.226.181.592.399	3.386.110.997.734
190	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLO(	133111	Gedung dan Bangunan	616.415.077.982	1.184.076.464.572	567.661.386.590
191	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLO(	134111	Jalan dan Jembatan	4.525.332.733	960.588.460	(3.564.744.273)
192	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLO(	134112	Irigasi	1.395.964.308	2.018.258.441	622.294.133
193	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI(	131111	Tanah	277.041.192.102	1.719.731.549.050	1.442.690.356.948
194	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI(	133111	Gedung dan Bangunan	178.649.349.585	285.993.655.485	107.344.305.900
195	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI(	134111	Jalan dan Jembatan	4.948.465.624	80.776.729.862	75.828.264.238
196	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI(	134112	Irigasi	1.866.296.205	9.031.938.504	7.165.642.299
197	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131111	Tanah	27.226.540.000	184.060.499.000	156.833.959.000
198	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	133111	Gedung dan Bangunan	78.837.489.880	85.746.541.902	6.909.052.022
199	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134111	Jalan dan Jembatan	0	330.598.000	330.598.000
200	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134112	Irigasi	891.945.721	1.152.643.336	260.697.615

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
201	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131111	Tanah	11.250.883.554	117.417.760.000	106.166.876.446
202	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133111	Gedung dan Bangunan	15.251.924.936	12.276.559.000	(2.975.365.936)
203	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134111	Jalan dan Jembatan	64.240.704	1.785.327.375	1.721.086.671
204	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134112	Irigasi	172.906.562	69.425.000	(103.481.562)
205	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	131111	Tanah	511.094.866.313	3.843.818.261.578	3.332.723.395.265
206	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	371.369.675.481	637.952.793.869	266.583.118.388
207	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	0	1.030.559.855	1.030.559.855
208	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134112	Irigasi	678.261.480	1.429.756.000	751.494.520
209	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	215.715.732.396	851.899.807.600	636.184.075.204
210	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	151.594.804.778	232.358.159.478	80.763.354.700
211	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	27.363.083	345.580.000	318.216.917
212	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	484.068.434	38.417.000	(445.651.434)
213	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	131111	Tanah	410.917.619.119	2.497.383.834.883	2.086.466.215.764
214	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	538.262.661.694	783.849.869.950	245.587.208.256
215	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	4.168.687.575	5.848.581.063	1.679.893.488
216	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134112	Irigasi	4.024.239.491	1.897.122.540	(2.127.116.951)
217	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN	131111	Tanah	1.036.506.333.558	4.163.558.623.060	3.127.052.289.502
218	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN	133111	Gedung dan Bangunan	661.158.588.941	847.210.614.507	186.052.025.566
219	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN	134111	Jalan dan Jembatan	963.553.051	4.619.316.000	3.655.762.949
220	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAN	134112	Irigasi	466.713.747	1.493.538.000	1.026.824.253
221	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	633.535.700.530	2.272.940.570.000	1.639.404.869.470
222	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	689.579.967.617	758.589.045.665	69.009.078.048
223	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	0	1.538.255.000	1.538.255.000
224	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	218.249.393	492.838.000	274.588.607
225	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	131111	Tanah	323.999.844.320	726.213.007.000	402.213.162.680
226	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	133111	Gedung dan Bangunan	288.609.240.683	442.281.186.208	153.671.945.525

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
227	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134111	Jalan dan Jembatan	495.832.400	1.925.143.000	1.429.310.600
228	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134112	Irigasi	462.486.770	117.026.048	(345.460.722)
229	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	131111	Tanah	453.822.133.060	1.675.136.125.000	1.221.313.991.940
230	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	133111	Gedung dan Bangunan	55.621.420.649	116.711.404.000	61.089.983.351
231	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131111	Tanah	43.062.623.473	159.548.294.240	116.485.670.767
232	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	133111	Gedung dan Bangunan	62.826.697.107	32.230.960.000	(30.595.737.107)
233	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	134111	Jalan dan Jembatan	0	0	0
234	100	KOMISI YUDISIAL RI	131111	Tanah	47.188.389.400	226.330.350.000	179.141.960.600
235	100	KOMISI YUDISIAL RI	133111	Gedung dan Bangunan	60.054.484.279	92.661.850.000	32.607.365.721
236	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	131111	Tanah	113.143.589.776	182.973.800.000	69.830.210.224
237	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	133111	Gedung dan Bangunan	473.459.968.867	460.029.978.384	(13.429.990.483)
238	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	131111	Tanah	52.430.088.081	246.024.658.000	193.594.569.919
239	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	133111	Gedung dan Bangunan	63.999.258.500	79.403.633.885	15.404.375.385
240	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	134111	Jalan dan Jembatan	807.966.517	2.909.568.000	2.101.601.483
241	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	134112	Irigasi	510.587.130	481.135.500	(29.451.630)
242	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (I	131111	Tanah	3.520.341.767.980	3.742.852.311.479	222.510.543.499
243	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (I	133111	Gedung dan Bangunan	1.660.810.665	2.919.793.000	1.258.982.335
244	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (I	134111	Jalan dan Jembatan	764.820.281	548.106.000	(216.714.281)
245	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (I	134112	Irigasi	301.364.763.624	294.277.229.000	(7.087.534.624)
246	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JAS	131111	Tanah	116.490.960.000	349.428.991.000	232.938.031.000
247	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JAS	133111	Gedung dan Bangunan	149.053.959.869	142.071.926.692	(6.982.033.177)
248	107	BADAN SAR NASIONAL	131111	Tanah	286.800.624.150	889.771.723.070	602.971.098.920
249	107	BADAN SAR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	584.687.968.683	686.733.752.496	102.045.783.813
250	107	BADAN SAR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	14.527.090.096	16.998.807.326	2.471.717.230

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
251	107	BADAN SAR NASIONAL	134112	Irigasi	4.485.367.883	55.719.985	(4.429.647.898)
252	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	131111	Tanah	279.884.701.713	420.463.767.000	140.579.065.287
253	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	133111	Gedung dan Bangunan	14.073.715.015	11.115.606.700	(2.958.108.315)
254	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134111	Jalan dan Jembatan	7.817.903.471	11.486.751.560	3.668.848.089
255	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134112	Irigasi	4.387.676.062	9.946.811.000	5.559.134.938
256	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	7.315.400.000	25.847.516.000	18.532.116.000
257	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	133111	Gedung dan Bangunan	26.376.688.774	24.796.788.988	(1.579.899.786)
258	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134111	Jalan dan Jembatan	12.445.391.323	48.058.780.983	35.613.389.660
259	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134112	Irigasi	5.075.125.783	10.612.438.000	5.537.312.217
260	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	131111	Tanah	21.633.142.599.667	43.003.077.624.800	21.369.935.025.133
261	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	133111	Gedung dan Bangunan	725.778.421.702	5.557.820.976.949	4.832.042.555.247
262	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	134111	Jalan dan Jembatan	2.826.686.384.296	2.747.139.740.827	(79.546.643.469)
263	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	134112	Irigasi	575.270.377.239	1.506.371.674.536	931.101.297.297
264	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	133111	Gedung dan Bangunan	102.077.219.984	68.810.456.000	(33.266.763.984)
265	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	134111	Jalan dan Jembatan	19.152.757.691	3.443.482.953	(15.709.274.738)
266	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	134112	Irigasi	5.075.264.576	6.451.330.650	1.376.066.074
267	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	33.770.762	2.380.363.000	2.346.592.238
268	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK I	131111	Tanah	2.608.304.448.150	12.247.939.481.625	9.639.635.033.475
269	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK I	133111	Gedung dan Bangunan	291.696.947.415	714.726.036.267	423.029.088.852
270	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK I	134111	Jalan dan Jembatan	1.602.452.486	6.272.931.800	4.670.479.314
271	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK I	134112	Irigasi	1.198.116.255	2.922.785.050	1.724.668.795
272	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	131111	Tanah	3.218.023.161.997	11.475.468.175.126	8.257.445.013.129
273	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	133111	Gedung dan Bangunan	284.339.595.394	1.103.252.155.449	818.912.560.055
274	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	134111	Jalan dan Jembatan	803.346.542	19.114.653.350	18.311.306.808

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
275	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	134112	Irigasi	441.720.286	5.012.994.348	4.571.274.062
276	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGA	131111	Tanah	565.836.540.454	1.733.205.752.740	1.167.369.212.286
277	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGA	133111	Gedung dan Bangunan	1.401.642.014.095	1.167.793.341.587	(233.848.672.508)
278	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGA	134111	Jalan dan Jembatan	261.503.604.172	269.738.291.210	8.234.687.038
279	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGA	134112	Irigasi	6.834.499.603	13.601.084.710	6.766.585.107
280	119	BADAN KEAMANAN LAUT	131111	Tanah	5.300.180.600	17.117.003.000	11.816.822.400
281	119	BADAN KEAMANAN LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	41.742.413.903	27.095.537.933	(14.646.875.970)
282	119	BADAN KEAMANAN LAUT	134111	Jalan dan Jembatan	23.955.189.401	26.950.086.000	2.994.896.599
283	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	131111	Tanah	4.016.775.779	24.738.816.000	20.722.040.221
284	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	81.002.315.725	109.260.965.000	28.258.649.275
T O T A L					**1.587.484.548.294.830**	**5.669.450.660.565.540**	**4.081.966.112.270.710**

Lampiran 30

Rincian Transfer Keluar & Transfer Masuk Per 31 Desember 2018

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	50.135.279.963	(50.092.679.963)	42.600.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	193.518.080.170	(117.703.852.634)	75.814.227.536
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	872.889.397.606	(869.573.277.719)	3.316.119.887
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.941.651.542.183	(2.396.588.408.863)	2.545.063.133.320
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	108.013.871.047	(108.013.871.047)	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	184.619.586.714	(87.448.064.635)	97.171.522.079
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	82.374.986.663.427	(82.480.188.410.439)	(105.201.747.012)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.603.177.212.936	(1.640.530.373.151)	(37.353.160.215)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	6.979.801.983.378	(7.010.187.583.298)	(30.385.599.920)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	115.263.799.193	(112.611.349.311)	2.652.449.882
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	34.354.284.869	(141.363.900.965)	(107.009.616.096)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	224.355.766.401	(281.402.826.389)	(57.047.059.988)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	19.665.458.385.093	(19.225.756.089.663)	439.702.295.430
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37.419.248.552	(37.380.066.526)	39.182.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.006.637.949.688	(1.023.072.029.762)	(16.434.080.074)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.529.374.169.991	(1.157.911.277.676)	371.462.892.315
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	67.883.925.193	(67.883.925.193)	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.006.075.155.871	(1.006.407.534.481)	(332.378.610)
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	237.682.126.019	(218.540.577.516)	19.141.548.503
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	680.936.906.608	(697.325.661.910)	(16.388.755.302)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.293.662.132.855	(87.108.218.846.937)	42.185.443.285.918
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	56.720.230	-	56.720.230
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	48.765.896.898	(48.765.896.898)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	417.404.767.104	(437.581.285.498)	(20.176.518.394)
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	(1.196.255.687)	3.610.886.000	2.414.630.313
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	(2.414.630.313)	(2.414.630.313)
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	19.430.410	(19.430.410)	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	138.384.772.105	(143.171.234.877)	(4.786.462.772)
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.984.540.573	(2.057.723.042)	(73.182.469)
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	268.804.159.079	(252.646.364.393)	16.157.794.686
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	(1.755.225.000)	(1.755.225.000)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.130.046.922	(743.774.384.502)	(701.644.337.580)
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40.519.146.472.019	(40.502.029.092.225)	17.117.379.794
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	63.466.268.776	(46.105.236.362)	17.361.032.414
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	469.269.797.130	(310.561.855.471)	158.707.941.659
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	469.840.806.273	(476.566.205.095)	(6.725.398.822)
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137.947.715.407	(137.939.671.907)	8.043.500
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	150.779.299.400	(140.953.240.525)	9.826.058.875
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	763.882.661.415	(763.882.661.415)	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	(556.344.547)	(556.344.547)
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.463.048.054	(113.455.523.084)	7.524.970
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	157.251.440.478	(102.707.000.224)	54.544.440.254
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	135.057.237.127	(134.904.313.044)	152.924.083

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	25.517.988.319	(25.307.238.319)	210.750.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	56.067.077.929	(55.715.342.822)	351.735.107
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	118.993.150	(407.133.720)	(288.140.570)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	(1.693.809.600)	(1.693.809.600)
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	(682.659.450)	(682.659.450)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	135.200.000	(135.200.000)	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	25.589.907.494	(971.833.494)	24.618.074.000
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	28.859.538.069	(28.863.543.513)	(4.005.444)
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	21.631.808.124	(21.631.808.124)	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	38.611.025.260	(38.611.025.260)	-
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	605.847.422	(10.532.347.422)	(9.926.500.000)
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	459.278.900	(58.484.502.900)	(58.025.224.000)
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	1.174.124.296	(2.069.184.196)	(895.059.900)
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	(4.058.755.289.527)	(4.058.755.289.527)
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	558.124.699.240	(559.437.083.717)	(1.312.384.477)
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	2.118.143.077	-	2.118.143.077
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	30.195.000	-	30.195.000
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	(834.097.489)	(834.097.489)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	39.188.990.112	(13.336.908.514)	25.852.081.598
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	(32.987.680)	(32.987.680)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	2.629.175.480	(2.629.175.480)	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	32.808.996.762	(65.451.585.512)	(32.642.588.750)
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.474.524.462.879	(779.605.137.675)	694.919.325.204
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	8.080.417.367	-	8.080.417.367
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-
Jumlah Pada KL			**297.420.632.160.350**	**(255.921.624.935.324)**	**41.499.007.225.026**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	196.917.881.391	(41.152.763.503.447)	(41.349.681.384.838)
		Penyesuaian Konsolidasian LKPP			-
TOTAL KONSOLIDASIAN TK TM LKPP			**297.617.550.041.741**	**(297.074.388.438.771)**	**543.161.602.970**

Lampiran 31

Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2018

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN 4
II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018 7
III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN 8
A. Bunga Utang Surat Berharga Negara 9
B. Surat Berharga Negara Neto 9
IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018 11
A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah 11
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing 14
D. Pelaksanaan Debt Switching/Buyback 14
V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018 15
VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018 21
I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah 21
II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas) 38
III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018 40
VII. PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sbn Neto Tahun 2018 10
Tabel 2. Seri SPN Yang Diterbitkan Tahun 2018 12
Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018 13
Tabel 4. Realisasi Penerbitan SUN Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 14
Tabel 5. Realisasi Pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018 15
Tabel 6. Rincian Realisasi Pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018 15
Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018 17
Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018 18
Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018 18
Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Tahun 2018 20
Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018 21
Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018 21
Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018 21
Tabel 14. *Outstanding* SBN Seri Fixed Rate (FR) Per 31 Desember 2018 22
Tabel 15. Data *Outstanding* ORI Per 31 Desember 2018 24
Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) Per 31 Desember 2018 26
Tabel 17. Struktur *Outstanding* SPN Per 31 Desember 2018 27
Tabel 18. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah 29
Tabel 19. Struktur *Outstanding* SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018 30
Tabel 20. Struktur *Outstanding* SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018 31
Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN Seri SR dan ST Per 31 Desember 2018 33
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN Seri SPNS Per 31 Desember 2018 35
Tabel 23. Struktur *Outstanding* SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018 36
Tabel 24. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas Per 31 Desember 2018 39
Tabel 25. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2018 41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah Seri FR Tgl 31 Desember 2018 23
Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR 23
Grafik 3. Struktur Outstanding ORI Per 31 Desember 2018 25
Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI Per 31 Desember 2018 25
Grafik 5. Struktur Outstanding VR Per 31 Desember 2018 26
Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR Per 31 Desember 2018 27
Grafik 7. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2018 28
Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN Per 31 Desember 2018 28
Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018 29
Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018 .. 29
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018 30
Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018 31
Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018 32
Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018 32
Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018 34
Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018 34
Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018 35
Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018 36
Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018 37
Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018 37

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2018. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal

   Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar

sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan *(registry)* dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter*/ OTC). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

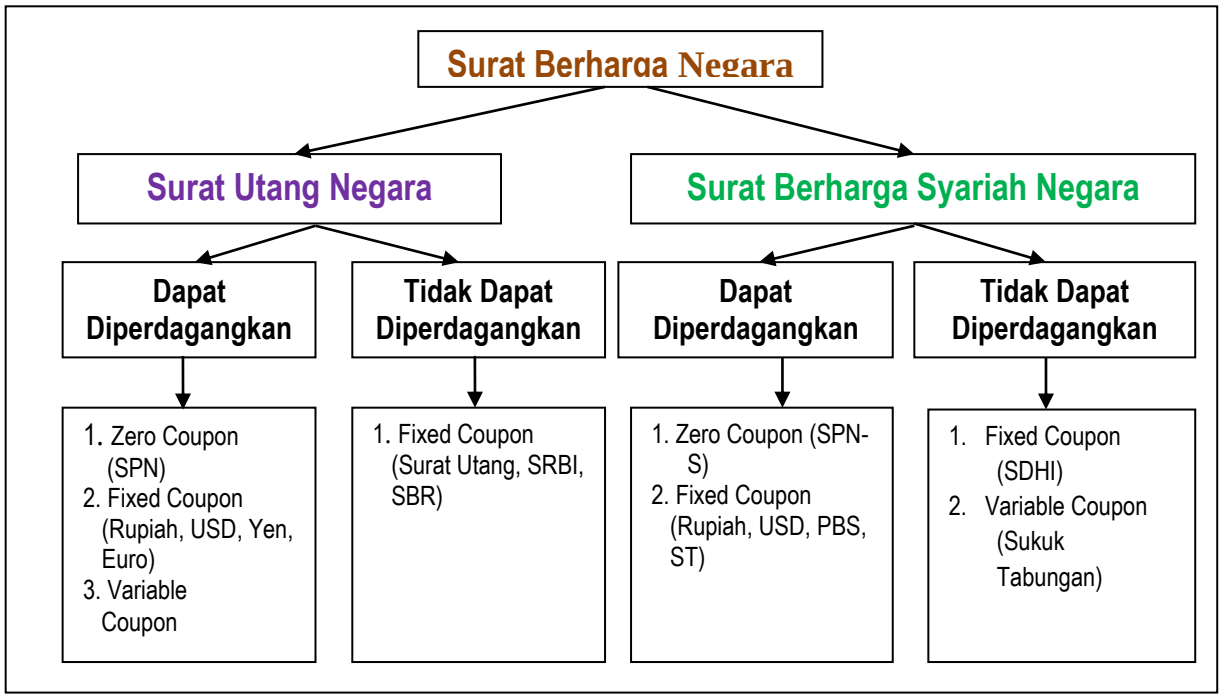
SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2018 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara



II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut[1]:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestk Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai, peningkatan kinerja kegiatan – kegiatan yang dibiayai dengan utang dan *shortening duration* portofolio utang;
3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan

[1] Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 52/PR/2018 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2018

kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;

5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liabilitiy Management* (ALM);
7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
8. Mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
9. Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di SBN melalui pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2018 sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2018, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp399.219,4 miliar terdiri atas SBN neto sebesar Rp383.184,8 miliar dan Pinjaman neto sebesar Rp16.034,6 miliar. Dengan memperhatikan utang jatuh tempo sebesar Rp400.467,4 miliar yang terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp323.963,0 miliar dan Pinjaman sebesar Rp76.504,3 miliar maka kebutuhan pembiayaan melalui utang sebesar Rp799.686,7 miliar. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui (a) penerbitan SBN sebesar Rp707.147,8 miliar, pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 sebesar Rp91.830,0 miliar sehingga penerbitan SBN Bruto sebesar Rp798.977,8 miliar (b) pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp92.538,9 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui

lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral.

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2018, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp245.099.773.630.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp238.043.106.503.289,-, atau sebesar 97,12%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk Tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, target SBN neto adalah sebesar Rp414.520.685.000.000,- Realisasi SBN neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabel 1.

Realisasi SBN neto Tahun 2018 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar minus Rp5.456.769.040,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp7.180.920.271.401,- dan pembayaran sebesar Rp7.186.377.040.441,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN Tahun 2018 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp782.313.242.271.401,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp641.581.192.271.401,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar

USD2.850.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp140.732.050.000.000,-.

Atas penerbitan SBN Tahun 2018, terdapat penerbitan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2019 *(prefunding)* sebesar USD3.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di Tahun 2018. Adapun selama Tahun 2018 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp515.000.000.000,-.

Pelunasan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp423.914.750.726.618,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp381.055.706.226.618,- dan pelunasan SBN valas Rp42.859.044.500.000,-.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2018

NO	AKUN	URAIAN	TOTAL
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143,050,000,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	320,274,306,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,446,859,375,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	96,869,377,647,000
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,734,060,896,401
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	51,680,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	22,526,588,353,000
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	97,877,550,000,000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	42,854,500,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			**782,313,242,271,401**
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	170,257,290,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	83,438,091,186,177
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	515,000,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,546,137,909,040
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	73,588,948,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,640,239,131,401
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	46,070,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	28,241,044,500,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	14,618,000,000,000
Total Pengeluaran			**423,914,750,726,618**
SBN Netto			**358,398,491,544,783**

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018

Target SBN Netto 2018 adalah sebesar Rp383.184,8 miliar disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo *(buyback)*.

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 dilelang sebanyak 23 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2018.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di Tahun 2018, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp319.759.306.000.000,- dengan rincian:

a. ON dalam negeri sebesar Rp287.130.000.000.000,-; dan
b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bond Retail* (SBR) adalah sebesar Rp32.629.306.000.000,-.

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 3 kali penerbitan, yaitu seri ORI014, SBR003 dan SBR004, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp83.438.091.186.177,- yang terdiri dari:

a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp 34.281.933.186.177,-;
b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI dan SBR sebesar Rp31.237.880.000.000,-; dan
c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp 17.918.278.000.000,-.

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada Tahun 2018, Pemerintah menerbitkan 33 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp 143.050.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan Tahun 2018

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Nominal
1	1/5/2018	4/4/2018	SPN03180404	IDR	5,000,000,000,000.00
2	1/5/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5,000,000,000,000.00
3	1/18/2018	4/17/2018	SPN03180417	IDR	5,000,000,000,000.00
4	1/18/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5,000,000,000,000.00
5	2/1/2018	4/30/2018	SPN03180430	IDR	5,000,000,000,000.00
6	2/1/2018	1/31/2019	SPN12190131	IDR	5,000,000,000,000.00
7	2/15/2018	5/14/2018	SPN03180514	IDR	5,000,000,000,000.00
8	2/15/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5,000,000,000,000.00
9	3/1/2018	5/28/2018	SPN03180528	IDR	5,000,000,000,000.00
10	3/1/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5,000,000,000,000.00
11	3/15/2018	6/14/2018	SPN03180614	IDR	5,000,000,000,000.00
12	3/15/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	5,000,000,000,000.00
13	3/29/2018	6/28/2018	SPN03180628	IDR	5,000,000,000,000.00
14	3/29/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	4,050,000,000,000.00
15	4/12/2018	7/12/2018	SPN12180712	IDR	4,200,000,000,000.00
16	4/12/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	4,450,000,000,000.00
17	5/24/2018	8/23/2018	SPN03180823	IDR	2,200,000,000,000.00
18	5/24/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	3,300,000,000,000.00
19	6/7/2018	9/6/2018	SPN12180906	IDR	3,000,000,000,000.00
20	6/7/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	700,000,000,000.00
21	7/5/2018	10/4/2018	SPN12181004	IDR	3,000,000,000,000.00
22	7/5/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3,500,000,000,000.00
23	7/19/2018	10/18/2018	SPN03181018	IDR	3,000,000,000,000.00
24	7/19/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	3,000,000,000,000.00
25	8/2/2018	11/1/2018	SPN03181101	IDR	3,000,000,000,000.00
26	8/2/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	3,000,000,000,000.00
27	8/16/2018	11/15/2018	SPN12181115	IDR	3,000,000,000,000.00
28	8/16/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	3,000,000,000,000.00
29	8/30/2018	11/29/2018	SPN03181129	IDR	3,000,000,000,000.00
30	8/30/2018	8/29/2019	SPN12190829	IDR	1,100,000,000,000.00
31	9/14/2018	12/13/2018	SPN03181213	IDR	3,000,000,000,000.00
32	9/14/2018	9/13/2019	SPN12190913	IDR	4,500,000,000,000.00
33	9/27/2018	12/26/2018	SPN03181226	IDR	3,000,000,000,000.00
34	9/27/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	1,500,000,000,000.00
35	10/11/2018	1/10/2019	SPN03190110	IDR	3,000,000,000,000.00
36	10/11/2018	10/10/2019	SPN12191010	IDR	3,000,000,000,000.00
37	10/25/2018	1/24/2019	SPN03190124	IDR	2,600,000,000,000.00
38	10/25/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3,000,000,000,000.00
39	11/8/2018	2/7/2019	SPN03190207	IDR	1,000,000,000,000.00
40	11/8/2018	11/7/2019	SPN12191107	IDR	1,000,000,000,000.00
41	11/23/2018	2/22/2019	SPN03190222	IDR	1,000,000,000,000.00
42	11/23/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	950,000,000,000.00
Total SPN (IDR)					143,050,000,000,000.00

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp170.257.290.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN12180104	03/01/2018	5,300,000,000,000.00
2	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
3	SPN12180104	03/01/2018	500,000,000,000.00
4	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
5	SPN03180118	17/01/2018	3,650,000,000,000.00
6	SPN12180201	31/01/2018	4,900,000,000,000.00
7	SPN12180201	31/01/2018	9,450,000,000,000.00
8	SPN12180201	31/01/2018	5,000,000,000,000.00
9	SPN12180201	31/01/2018	1,600,000,000,000.00
10	SPN03180215	2/14/2018	2,600,000,000,000.00
11	SPN12180301	2/28/2018	1,800,000,000,000.00
12	SPN12180301	2/28/2018	900,000,000,000.00
13	SPN12180301	2/28/2018	3,000,000,000,000.00
14	SPN12180301	2/28/2018	4,050,000,000,000.00
15	SPNNT20180328	3/27/2018	10,107,290,000,000.00
16	SPN03180404	4/3/2018	5,000,000,000,000.00
17	SPN12180412	4/11/2018	3,050,000,000,000.00
18	SPN12180412	4/11/2018	5,000,000,000,000.00
19	SPN03180417	4/16/2018	5,000,000,000,000.00
20	SPN03180430	4/27/2018	5,000,000,000,000.00
21	SPN12180511	5/11/2018	3,000,000,000,000.00
22	SPN12180511	5/11/2018	2,300,000,000,000.00
23	SPN03180514	5/14/2018	5,000,000,000,000.00
24	SPN03180528	5/28/2018	5,000,000,000,000.00
25	SPN12180607	6/7/2018	3,000,000,000,000.00
26	SPN12180607	6/7/2018	2,550,000,000,000.00
27	SPN03180614	6/8/2018	5,000,000,000,000.00
28	SPN03180628	6/28/2018	5,000,000,000,000.00
29	SPN12180712	7/12/2018	4,200,000,000,000.00
30	SPN12180712	7/12/2018	3,100,000,000,000.00
31	SPN12180809	8/9/2018	3,000,000,000,000.00
32	SPN12180809	8/9/2018	5,000,000,000,000.00
33	SPN03180823	8/23/2018	2,200,000,000,000.00
34	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
35	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
36	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
37	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
38	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
39	SPN03181018	10/18/2018	3,000,000,000,000.00
40	SPN03181101	11/1/2018	3,000,000,000,000.00
41	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
42	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
43	SPN03181129	11/29/2018	3,000,000,000,000.00
44	SPN03181213	12/13/2018	3,000,000,000,000.00
45	SPN03181226	12/26/2018	3,000,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			170,257,290,000,000.00

C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Total penerbitan Obligasi Negara (ON) Valas adalah sebesar USD5.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp97.877.550.000.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD1.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada Tahun 2018, disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Nominal
1	12/11/2017	1/11/2023	RI0123	USD	1,000,000,000.00
2	12/11/2017	1/11/2028	RI0128	USD	1,250,000,000.00
3	12/11/2017	1/11/2048	RI0148	USD	1,750,000,000.00
4	4/24/2018	4/24/2028	RI0428	USD	1,000,000,000.00
5	4/24/2018	4/24/2025	RIEUR0425	EUR	1,000,000,000.00
6	5/31/2018	5/31/2021	RIJPY0521	JPY	49,000,000,000.00
7	5/31/2018	5/31/2023	RIJPY0523	JPY	39,000,000,000.00
8	5/31/2018	5/30/2025	RIJPY0525	JPY	3,500,000,000.00
9	5/31/2018	5/31/2028	RIJPY0528	JPY	8,500,000,000.00

Catatan: Seri RI0123, RI0128 dan RI0148 diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2018

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 adalah sebanyak 1 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp515.000.000.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018

No.	Tanggal *Debtswitch*	Penawaran	Dimenangkan
1	18-Okt-18	Rp1.050.000.000.000,-	Rp515.000.000.000,-

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018
(dalam juta rupiah)

Date		Source					Destination			
Debt Switch	Settlement	Series	Maturity	Coupon	Offer	Alloted	Series	Maturity	Coupon	Alloted
18-Oct-18	23-Oct-18	FR0069	15-04-2019	7.87500%	647,000	515,000	FR0077	15-05-2024	8.12500%	445,000
		FR0036	15-09-2019	11.50000%	110,000	-	FR0078	15-05-2029	8.25000%	70,000
		FR0031	15-11-2020	11.00000%	293,000	-				
Total Debt Switch 2018					1,050,000	515,000				515,000

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Namun demikian, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi *buyback*.

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya

kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur,

mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2018 terdiri atas 6 jenis instrumen yakni Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), *Project Based Sukuk* (PBS), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI), dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 7, 9, 10 dan 11 berikut.

Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPNS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	7/10/2018	SPNS10072018	IDR	2,000,000,000,000.00
2	1/25/2018	7/10/2018	SPNS10072018	IDR	2,000,000,000,000.00
3	2/8/2018	8/7/2018	SPNS07082018	IDR	3,000,000,000,000.00
4	2/22/2018	8/7/2018	SPNS07082018	IDR	3,000,000,000,000.00
5	3/8/2018	9/7/2018	SPNS07092018	IDR	1,230,000,000,000.00
6	3/22/2018	9/7/2018	SPNS07092018	IDR	3,000,000,000,000.00
7	4/5/2018	10/4/2018	SPNS04102018	IDR	2,400,000,000,000.00
8	4/19/2018	10/4/2018	SPNS04102018	IDR	2,100,000,000,000.00
9	5/4/2018	11/3/2018	SPNS03112018	IDR	650,000,000,000.00
10	5/17/2018	11/3/2018	SPNS03112018	IDR	500,000,000,000.00
11	6/4/2018	12/1/2018	SPNS01122018	IDR	2,550,000,000,000.00
12	6/28/2018	12/1/2018	SPNS01122018	IDR	4,000,000,000,000.00
13	7/12/2018	1/11/2019	SPNS11012019	IDR	2,900,000,000,000.00
14	7/12/2018	4/11/2019	SPNS11042019	IDR	1,000,000,000,000.00
15	7/26/2018	1/11/2019	SPNS11012019	IDR	900,000,000,000.00
16	7/26/2018	4/11/2019	SPNS11042019	IDR	1,100,000,000,000.00
17	8/9/2018	2/8/2019	SPNS08022019	IDR	850,000,000,000.00
18	8/9/2018	5/8/2019	SPNS08052019	IDR	1,200,000,000,000.00
19	8/24/2018	2/8/2019	SPNS08022019	IDR	3,000,000,000,000.00
20	8/24/2018	5/8/2019	SPNS08052019	IDR	1,000,000,000,000.00
21	9/6/2018	3/5/2019	SPNS05032019	IDR	1,100,000,000,000.00
22	9/6/2018	6/5/2019	SPNS05062019	IDR	1,200,000,000,000.00
23	9/20/2018	3/5/2019	SPNS05032019	IDR	1,300,000,000,000.00
24	10/4/2018	4/3/2019	SPNS03042019	IDR	1,400,000,000,000.00
25	10/4/2018	7/3/2019	SPNS03072019	IDR	1,000,000,000,000.00
26	10/18/2018	4/3/2019	SPNS03042019	IDR	1,000,000,000,000.00
27	10/18/2018	7/3/2019	SPNS03072019	IDR	1,000,000,000,000.00
28	11/1/2018	5/1/2019	SPNS01052019	IDR	950,000,000,000.00
29	11/1/2018	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1,700,000,000,000.00
30	11/15/2018	5/1/2019	SPNS01052019	IDR	1,050,000,000,000.00
31	11/15/2018	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1,600,000,000,000.00
Total SPNS (IDR)					51,680,000,000,000.00

Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPNS05012018	1/4/2018	2,000,000,000,000.00
2	SPNS05012018	1/4/2018	870,000,000,000.00
3	SPNS02022018	2/1/2018	2,000,000,000,000.00
4	SPNS02022018	2/1/2018	2,000,000,000,000.00
5	SPNS02022018	2/1/2018	3,000,000,000,000.00
6	SPNS13032018	3/12/2018	2,000,000,000,000.00
7	SPNS13032018	3/12/2018	1,450,000,000,000.00
8	SPNS11042018	4/10/2018	1,600,000,000,000.00
9	SPNS11042018	4/10/2018	2,000,000,000,000.00
10	SPNS08052018	5/8/2018	1,750,000,000,000.00
11	SPNS08052018	5/8/2018	970,000,000,000.00
12	SPNS10072018	7/10/2018	2,000,000,000,000.00
13	SPNS10072018	7/10/2018	2,000,000,000,000.00
14	SPNS07082018	8/7/2018	3,000,000,000,000.00
15	SPNS07082018	8/7/2018	3,000,000,000,000.00
16	SPNS07092018	9/7/2018	1,230,000,000,000.00
17	SPNS07092018	9/7/2018	3,000,000,000,000.00
18	SPNS04102018	10/4/2018	2,100,000,000,000.00
19	SPNS04102018	10/4/2018	2,400,000,000,000.00
20	SPNS03112018	11/5/2018	650,000,000,000.00
21	SPNS03112018	11/5/2018	500,000,000,000.00
22	SPNS01122018	12/3/2018	2,550,000,000,000.00
23	SPNS01122018	12/3/2018	4,000,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			46,070,000,000,000.00

Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,550,000,000,000.00
2	1/11/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	1,640,000,000,000.00
3	1/11/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	870,000,000,000.00
4	1/11/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,370,000,000,000.00
5	1/11/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	2,570,000,000,000.00
6	1/25/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,040,000,000,000.00
7	1/25/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	2,060,000,000,000.00
8	1/25/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2,970,000,000,000.00
9	1/25/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	560,000,000,000.00
10	2/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	390,000,000,000.00
11	2/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	970,000,000,000.00
12	2/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,910,000,000,000.00
13	2/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	805,000,000,000.00
14	2/15/2018	8/15/2023	PBS011	IDR	500,000,000,000.00
15	2/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	250,000,000,000.00
16	2/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	680,000,000,000.00
17	2/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	200,000,000,000.00
18	2/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,400,000,000,000.00
19	2/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	195,000,000,000.00
20	2/26/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	500,000,000,000.00
21	2/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,000,000,000,000.00
22	2/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,000,000,000,000.00
23	3/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	510,000,000,000.00
24	3/8/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	440,000,000,000.00

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
25	3/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	810,000,000,000.00
26	3/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,920,000,000,000.00
27	3/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	185,000,000,000.00
28	3/13/2018	5/15/2019	PBS013	IDR	250,000,000,000.00
29	3/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	502,857,000,000.00
30	3/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	150,000,000,000.00
31	3/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,630,000,000,000.00
32	3/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	620,000,000,000.00
33	4/5/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	600,000,000,000.00
34	4/5/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	316,857,000,000.00
35	4/5/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	690,000,000,000.00
36	4/5/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,220,000,000,000.00
37	4/5/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,560,000,000,000.00
38	4/19/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	605,000,000,000.00
39	4/19/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	527,000,000,000.00
40	4/19/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	410,000,000,000.00
41	4/19/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2,710,000,000,000.00
42	5/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	380,000,000,000.00
43	5/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	250,000,000,000.00
44	5/4/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	100,000,000,000.00
45	5/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
46	5/17/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,190,000,000,000.00
47	5/17/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	665,000,000,000.00
48	5/17/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	860,000,000,000.00
49	5/17/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	840,000,000,000.00
50	5/30/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	300,000,000,000.00
51	6/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	315,000,000,000.00
52	6/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,080,000,000,000.00
53	6/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	415,000,000,000.00
54	6/4/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	2,000,000,000,000.00
55	6/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	325,000,000,000.00
56	6/28/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	294,000,000,000.00
57	6/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	540,000,000,000.00
58	7/3/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
59	7/12/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	3,050,000,000,000.00
60	7/12/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	35,000,000,000.00
61	7/12/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	105,000,000,000.00
62	7/12/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	910,000,000,000.00
63	7/26/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	565,000,000,000.00
64	7/26/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,000,000,000,000.00
65	7/26/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,150,000,000,000.00
66	7/26/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	95,000,000,000.00
67	7/27/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	350,000,000,000.00
68	7/27/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
69	8/9/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	900,000,000,000.00
70	8/9/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	420,000,000,000.00
71	8/9/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	340,000,000,000.00
72	8/9/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,460,000,000,000.00
73	8/10/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
74	8/13/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	500,000,000,000.00
75	8/24/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	500,000,000,000.00
76	8/24/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	510,000,000,000.00
77	8/24/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,120,000,000,000.00
78	8/24/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	135,000,000,000.00
79	8/27/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	500,000,000,000.00
80	8/29/2018	8/29/2023	PBSNT001	IDR	1,500,000,000,000.00

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
81	8/30/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	250,000,000,000.00
82	8/30/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
83	9/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	330,000,000,000.00
84	9/6/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	900,000,000,000.00
85	9/6/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	175,000,000,000.00
86	9/6/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,100,000,000,000.00
87	9/12/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
88	9/20/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	60,000,000,000.00
89	9/20/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,060,000,000,000.00
90	9/20/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,153,000,000,000.00
91	9/20/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,260,000,000,000.00
92	9/20/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	70,000,000,000.00
93	9/24/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
94	10/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	100,000,000,000.00
95	10/4/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,030,000,000,000.00
96	10/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,510,000,000,000.00
97	10/4/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	65,000,000,000.00
98	10/8/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	250,000,000,000.00
99	10/18/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	605,000,000,000.00
100	10/18/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,350,000,000,000.00
101	10/18/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	505,000,000,000.00
102	10/18/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	765,000,000,000.00
103	10/22/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
104	11/1/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	270,000,000,000.00
105	11/1/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	2,160,000,000,000.00
106	11/1/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	35,000,000,000.00
107	11/1/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	510,000,000,000.00
108	11/5/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
109	11/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,000,000,000,000.00
110	11/6/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	2,000,000,000,000.00
111	11/15/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	155,000,000,000.00
112	11/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	230,000,000,000.00
113	11/15/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	470,000,000,000.00
114	11/15/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	610,000,000,000.00
115	11/19/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	250,000,000,000.00
116	12/5/2018	11/15/2026	PBS021	IDR	1,500,000,000,000.00
Total (IDR)					**23,073,000,000,000.00**

Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2018

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/21/2018	3/10/2021	SR-010	IDR	8,436,570,000,000.00
2	11/29/2018	11/10/2020	ST002	IDR	4,945,682,000,000.00
Total (IDR)					**13,382,252,000,000.00**

Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/1/2018	3/1/2023	SNI0323	USD	1,250,000,000.00
2	3/1/2018	3/1/2028	SNI0328	USD	1,750,000,000.00
3	11/15/2018	11/15/2021	USDPBS001	USD	100,000,000.00
Total (USD)					**3,100,000,000.00**

Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	PBS009	1/24/2018	37,890,000,000,000.00
2	PBS001	2/14/2018	6,725,000,000,000.00
3	SR-007	3/9/2018	21,965,035,000,000.00
4	SDHI-2018A	5/30/2018	2,500,000,000,000.00
5	IFR0002	8/15/2018	1,985,000,000,000.00
6	ST001	9/7/2018	2,523,913,000,000.00
TOTAL (IDR)			**73,588,948,000,000.00**

Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	SNI18	11/21/2018	1,000,000,000.00	14,618,000,000,000.00

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* - FR)

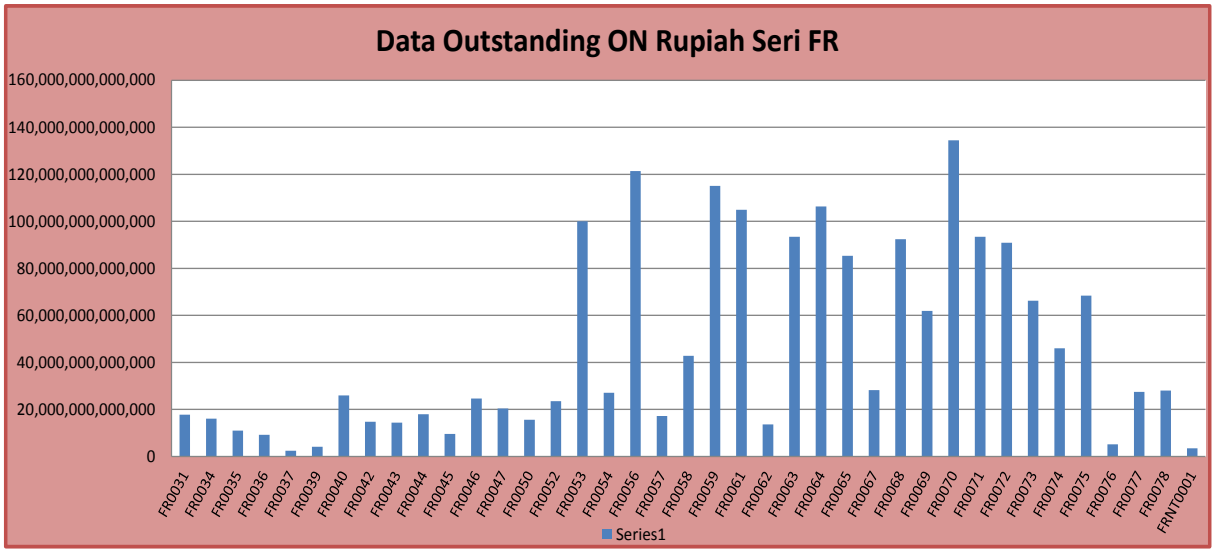
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2018, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,625% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 14 berikut.

Tabel 14. *Outstanding* SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2018

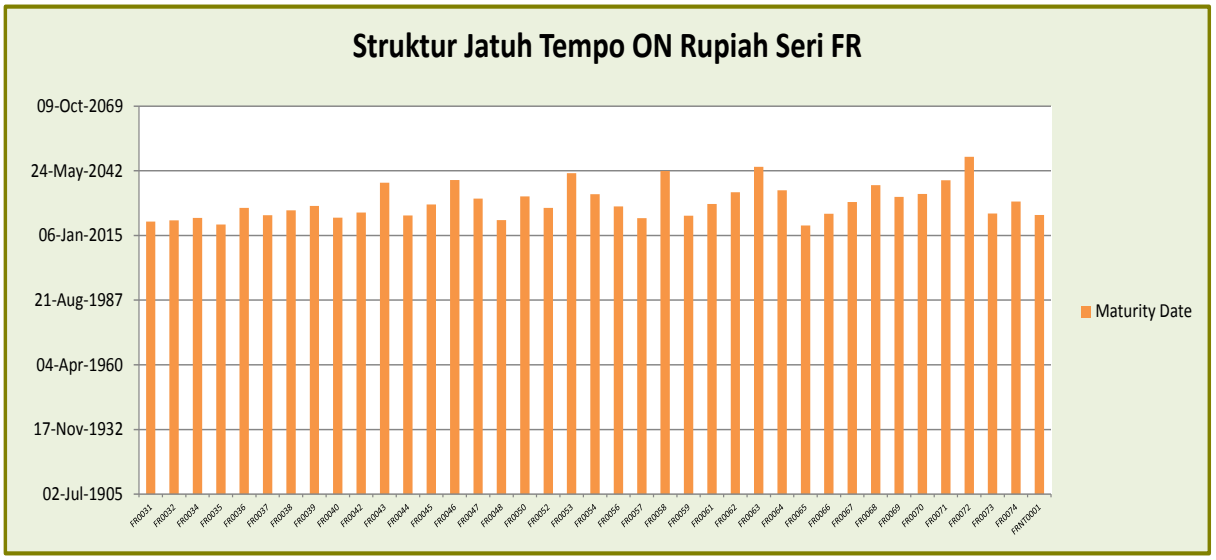
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	FR0031	16-Jun-2005	15-Nov-2020	11.00000%	IDR	17,792,000,000,000
2	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000%	IDR	16,097,400,000,000
3	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000%	IDR	11,023,750,000,000
4	FR0036	20-Apr-2006	15-Sep-2019	11.50000%	IDR	9,184,500,000,000
5	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000%	IDR	2,450,000,000,000
6	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000%	IDR	4,175,000,000,000
7	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000%	IDR	26,002,090,000,000
8	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000%	IDR	14,774,100,000,000
9	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000%	IDR	14,417,000,000,000
10	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000%	IDR	18,014,000,000,000
11	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000%	IDR	9,624,304,000,000
12	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000%	IDR	24,680,000,000,000
13	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000%	IDR	20,385,000,000,000
14	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000%	IDR	15,661,000,000,000
15	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000%	IDR	23,500,000,000,000
16	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000%	IDR	100,027,793,000,000
17	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000%	IDR	27,096,000,000,000
18	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500%	IDR	121,414,000,000,000
19	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000%	IDR	17,236,573,000,000
20	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000%	IDR	42,798,000,000,000
21	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000%	IDR	115,080,000,000,000
22	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000%	IDR	104,878,000,000,000
23	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500%	IDR	13,692,000,000,000
24	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500%	IDR	93,466,000,000,000
25	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500%	IDR	106,295,000,000,000
26	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500%	IDR	85,343,000,000,000
27	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000%	IDR	28,188,284,000,000
28	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500%	IDR	92,400,000,000,000
29	FR0069	29-Aug-2013	15-Apr-2019	7.87500%	IDR	61,881,000,000,000
30	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500%	IDR	134,439,421,000,000
31	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000%	IDR	93,390,682,000,000
32	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000%	IDR	90,910,000,000,000
33	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000%	IDR	66,217,000,000,000
34	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000%	IDR	46,031,140,000,000
35	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000%	IDR	68,420,860,000,000
36	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500%	IDR	5,210,000,000,000
37	FR0077	27-Sep-2018	15-May-2024	8.12500%	IDR	27,495,000,000,000
38	FR0078	27-Sep-2018	15-May-2029	8.25000%	IDR	28,070,000,000,000
39	FRNT0001	29-Aug-2018	29-Aug-2023	8.00000%	IDR	3,500,000,000,000
Jumlah					IDR	1,801,259,897,000,000

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2018 – 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.08/2017. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

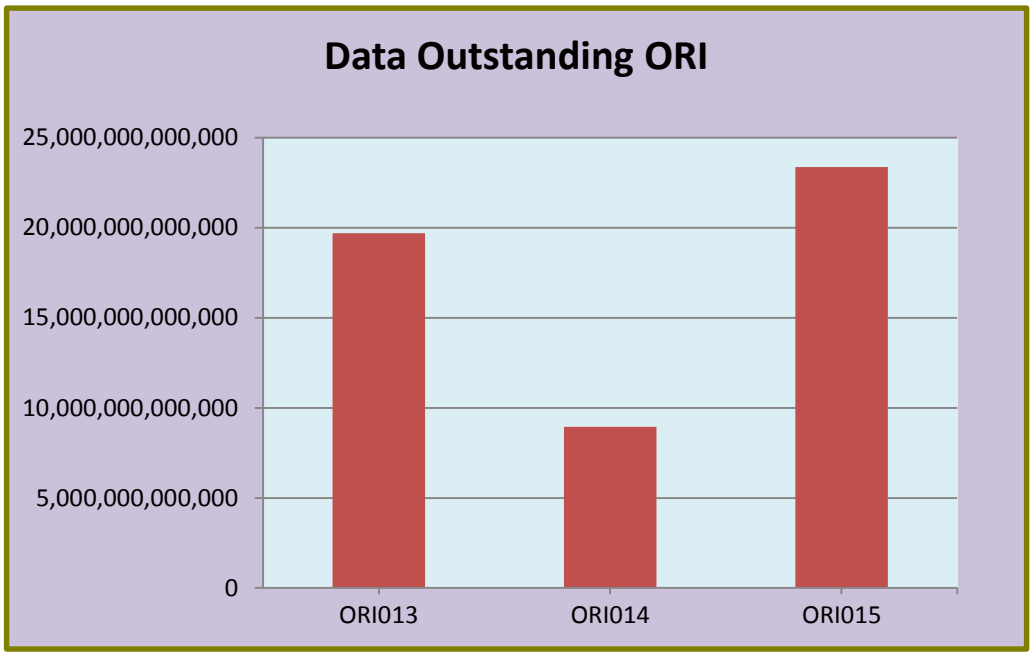
Selain itu. penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu. serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2018 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI015 dengan tingkat kupon 8.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp23.378.269.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 15 berikut.

Tabel 15. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2018

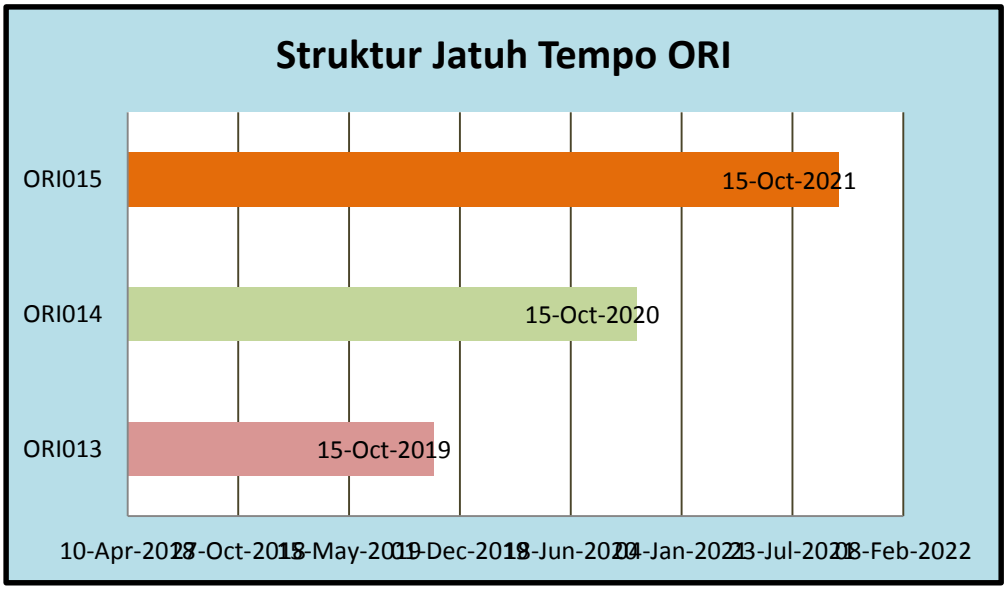
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	ORI013	26-Oct-2016	15-Oct-2019	6.60000%	IDR	19,691,455,000,000
2	ORI014	25-Oct-2017	15-Oct-2020	5.85000%	IDR	8,948,660,000,000
3	ORI015	31-Oct-2018	15-Oct-2021	8.25000%	IDR	23,378,269,000,000
Jumlah					IDR	52,018,384,000,000

Grafik 3. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2018



c. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon* - ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di

pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi berbunga mengambang *(Variable Rate Bonds – VR)*

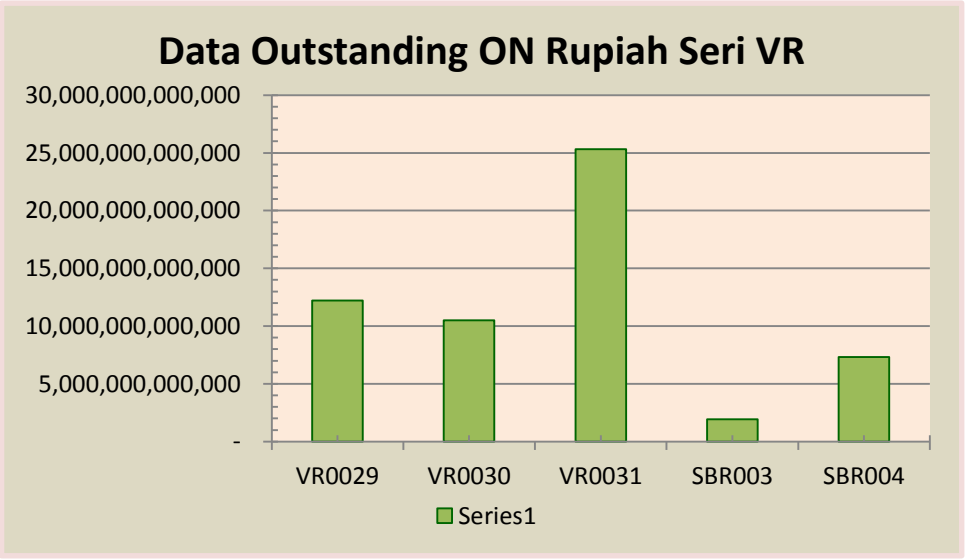
Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 3 seri VR dan 2 seri SBR dengan *outstanding* berkisar dari 1.9 triliun sampai dengan 25,3 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2019 sampai dengan 2020

Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR)
per 31 Desember 2018

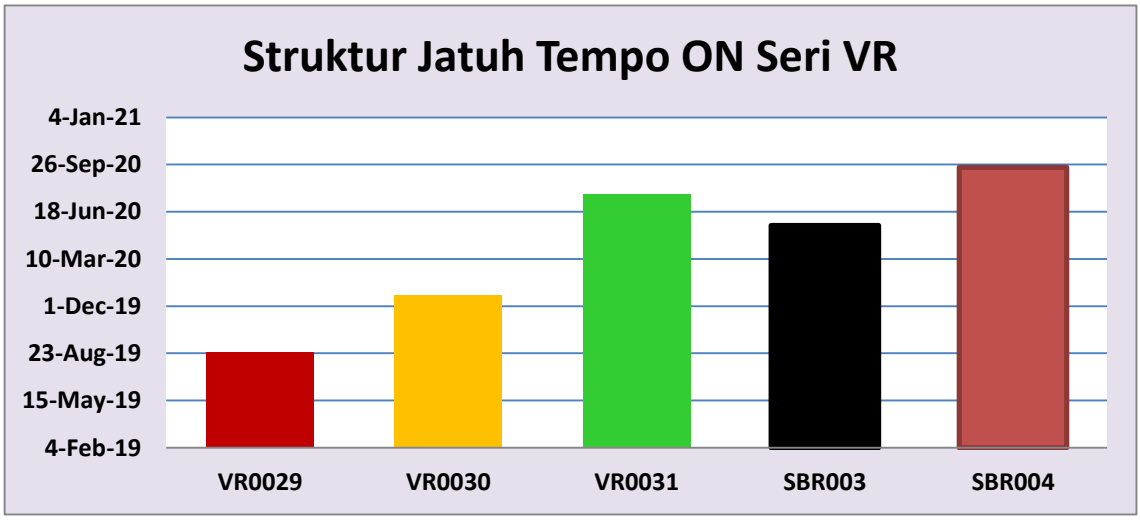
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	VR0029	20-Nov-2002	25-Aug-2019	5.76000%	IDR	12,212,320,000,000
2	VR0030	20-Nov-2002	25-Dec-2019	5.57533%	IDR	10,503,015,000,000
3	VR0031	20-Nov-2002	25-Jul-2020	5.21833%	IDR	25,322,354,000,000
4	SBR003	31-May-2018	20-May-2020	8.55000%	IDR	1,928,066,000,000
5	SBR004	19-Sep-2018	20-Sep-2020	8.55000%	IDR	7,322,971,000,000
Jumlah					IDR	57,288,726,000,000

Grafik 5. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2018



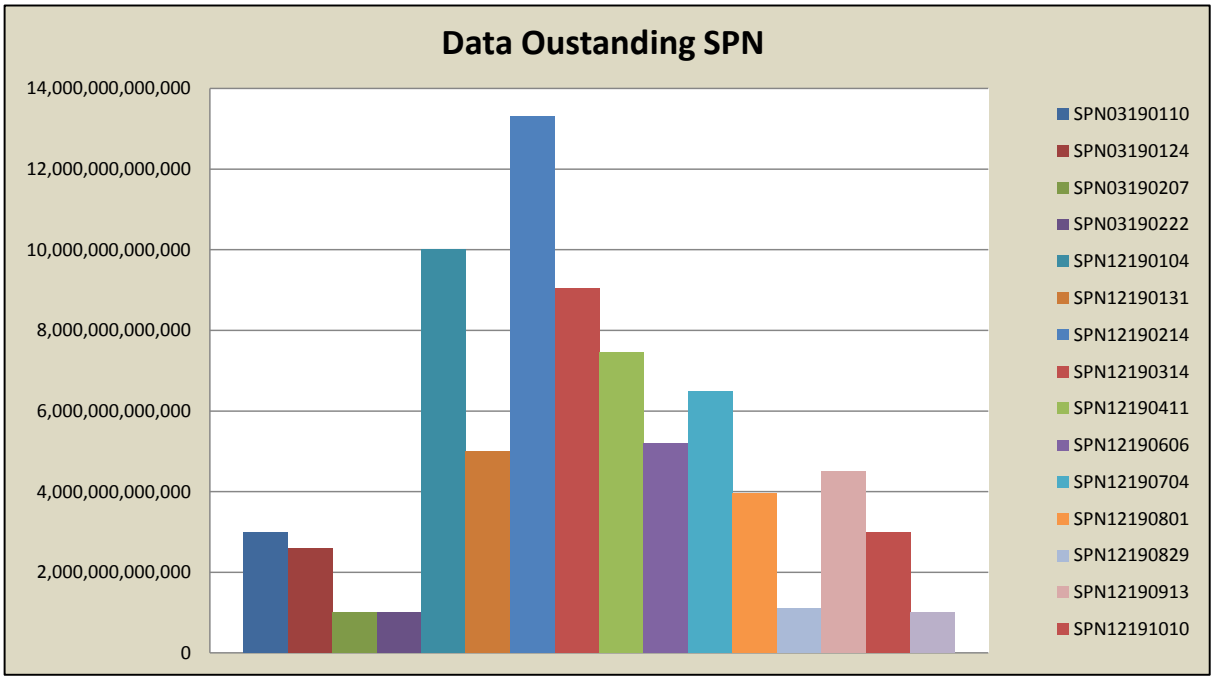
e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 16 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 1 triliun dan 13,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Tabel 17. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2018

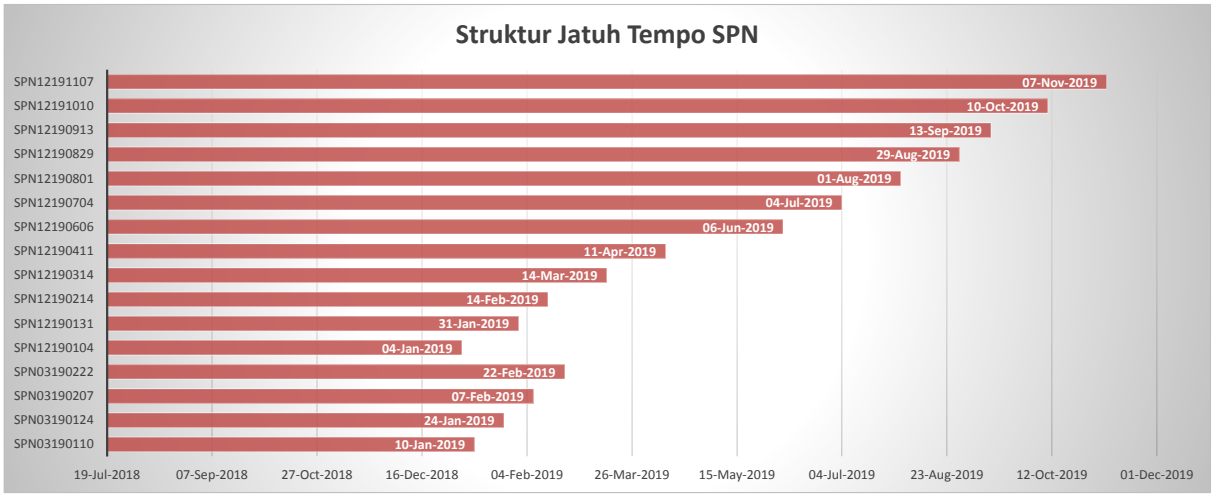
No	Series	Maturity Date	Outstanding	
1	SPN03190110	10-Jan-2019	IDR	3,000,000,000,000
2	SPN03190124	24-Jan-2019	IDR	2,600,000,000,000
3	SPN03190207	07-Feb-2019	IDR	1,000,000,000,000
4	SPN03190222	22-Feb-2019	IDR	1,000,000,000,000
5	SPN12190104	04-Jan-2019	IDR	10,000,000,000,000
6	SPN12190131	31-Jan-2019	IDR	5,000,000,000,000
7	SPN12190214	14-Feb-2019	IDR	13,300,000,000,000
8	SPN12190314	14-Mar-2019	IDR	9,050,000,000,000
9	SPN12190411	11-Apr-2019	IDR	7,450,000,000,000
10	SPN12190606	06-Jun-2019	IDR	5,200,000,000,000
11	SPN12190704	04-Jul-2019	IDR	6,500,000,000,000
12	SPN12190801	01-Aug-2019	IDR	3,950,000,000,000
13	SPN12190829	29-Aug-2019	IDR	1,100,000,000,000
14	SPN12190913	13-Sep-2019	IDR	4,500,000,000,000
15	SPN12191010	10-Oct-2019	IDR	3,000,000,000,000
16	SPN12191107	07-Nov-2019	IDR	1,000,000,000,000
Jumlah			IDR	77,650,000,000,000

Grafik 7. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2018



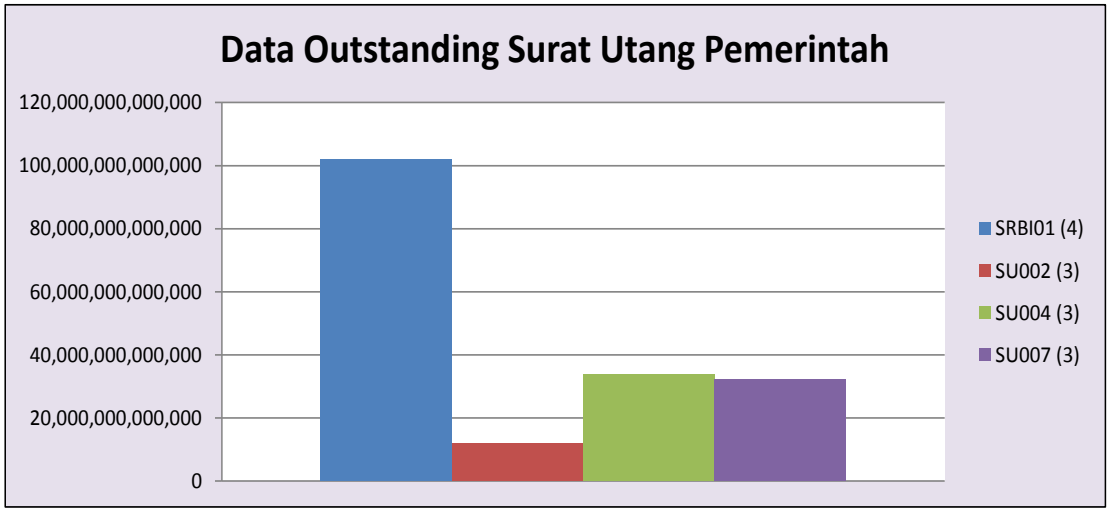
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2018

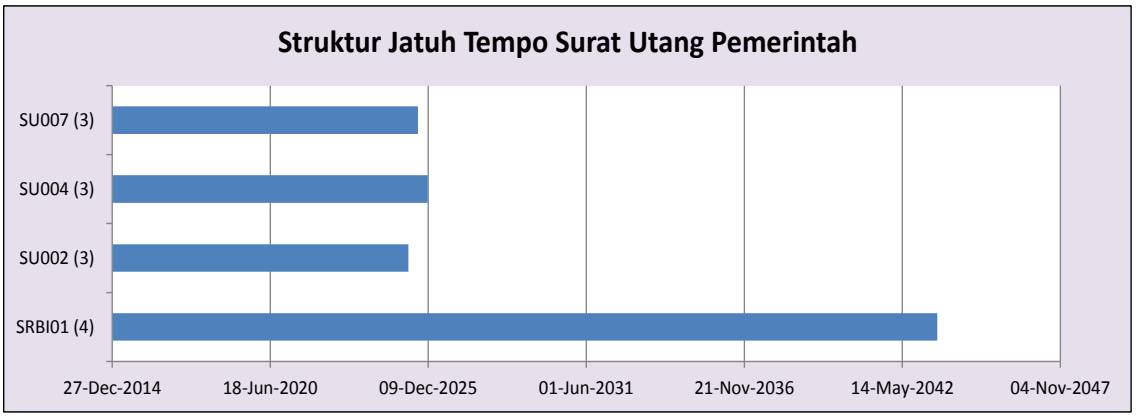
No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SRBI01 (4)	01-Aug-2043	0.10000%	IDR	101,859,120,794,279
2	SU002 (3)	01-Apr-2025	0.10000%	IDR	12,048,595,070,162
3	SU004 (3)	01-Dec-2025	0.10000%	IDR	33,686,948,838,416
4	SU007 (3)	01-Aug-2025	0.10000%	IDR	32,194,936,059,459
Jumlah				IDR	179,789,600,762,316

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.

Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2018



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

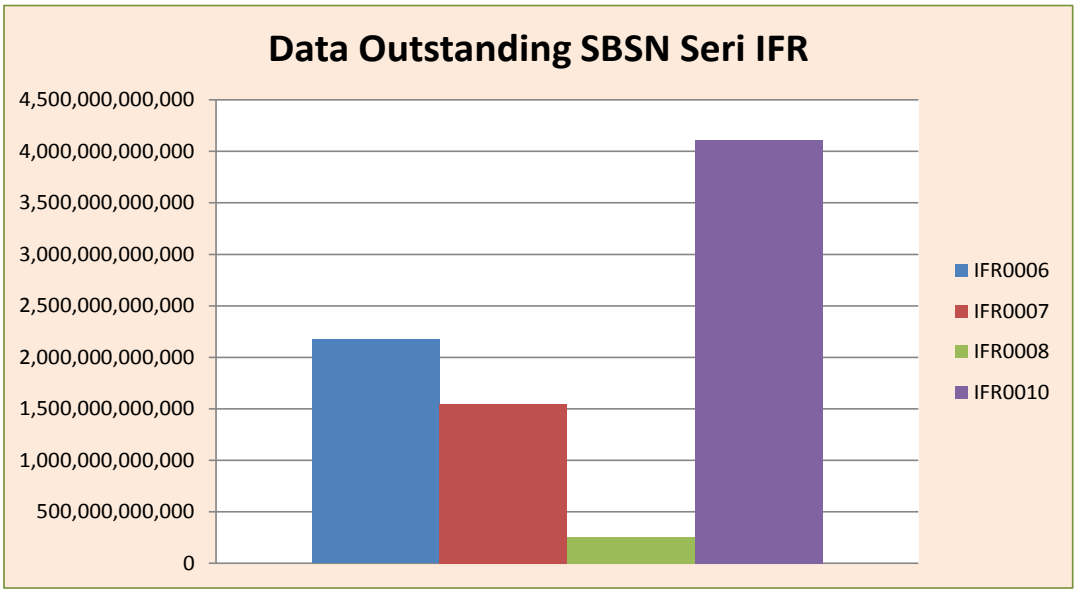
Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR *(Fixed Rate)* dibayarkan setiap enam bulan sekali *(semi-annually)*. SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir Tahun 2018 terdapat 4 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8.80% sampai dengan 10,25% yang disajikan dalam tabel 19 berikut.

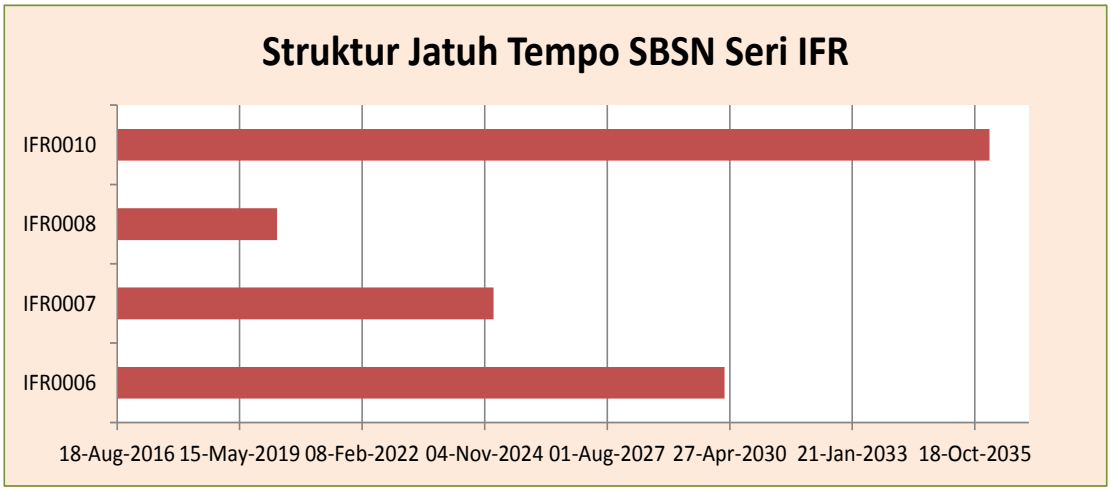
Tabel 19. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR	2,175,000,000,000
2	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR	1,547,000,000,000
3	IFR0008	15-Mar-2020	8.80000%	IDR	252,000,000,000
4	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR	4,110,000,000,000
Jumlah				IDR	8,084,000,000,000

Grafik 11. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



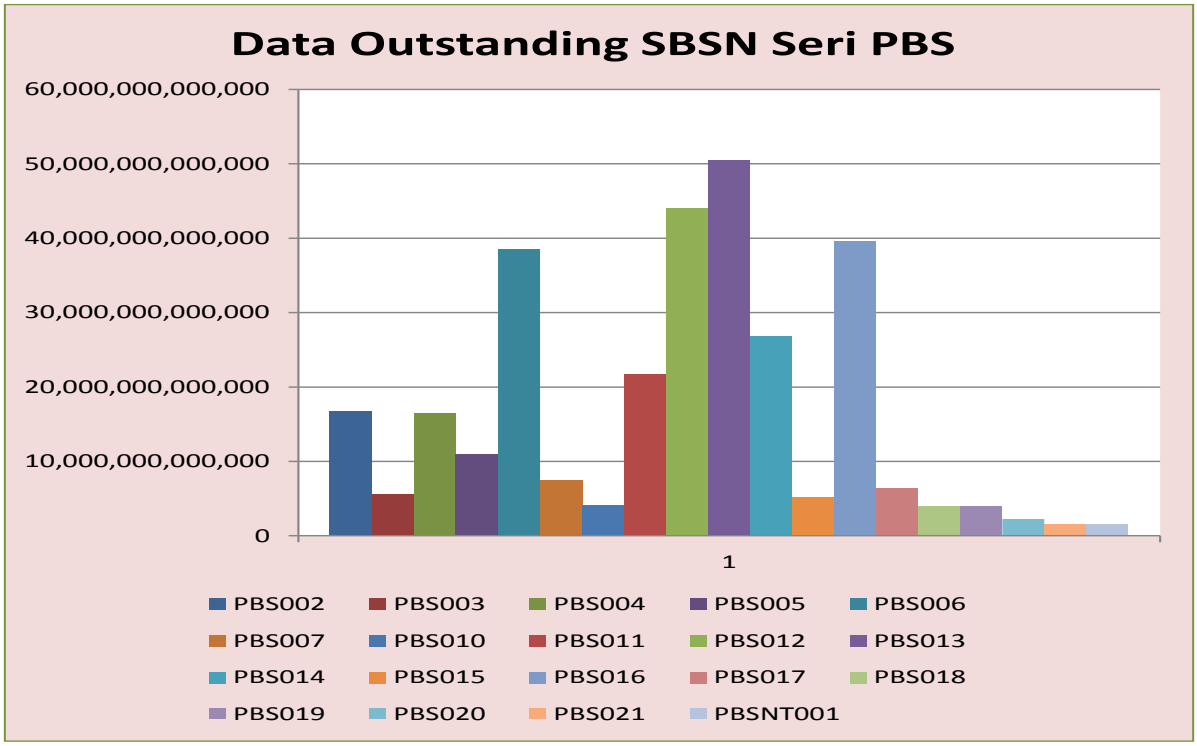
h. *Project Based Sukuk (PBS)*

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir Tahun 2018 terdapat 19 seri PBS yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 20 berikut.

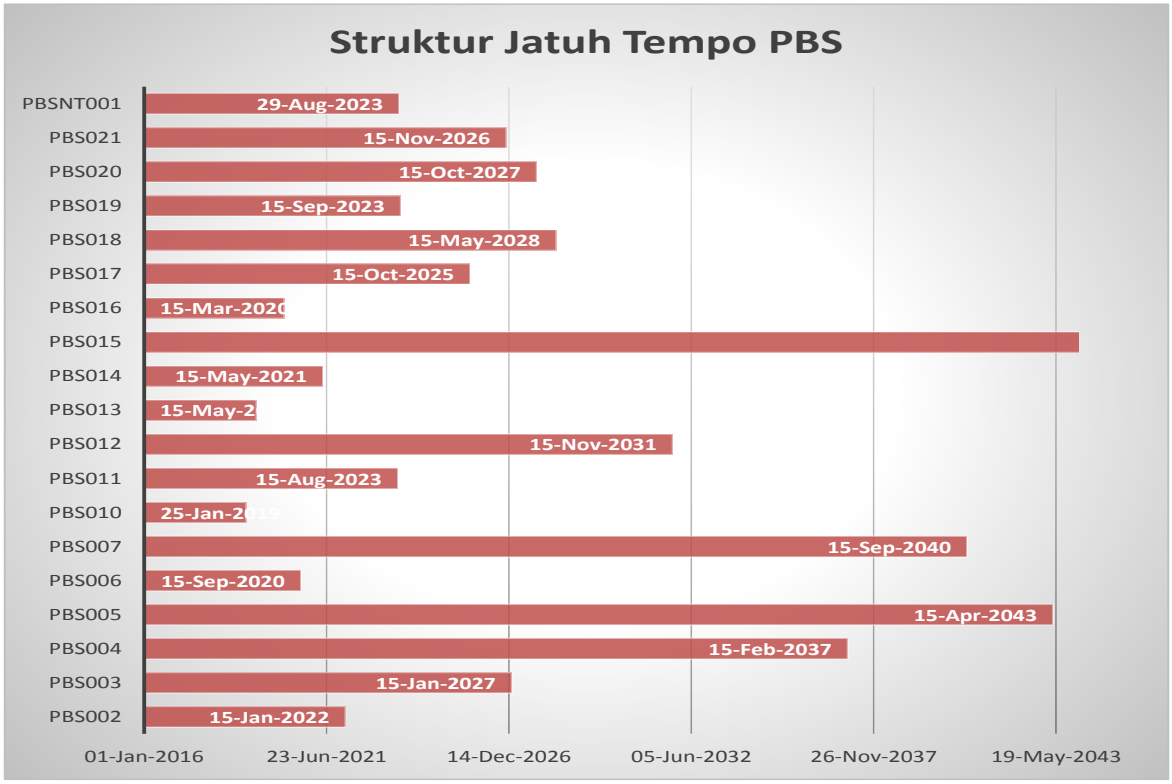
Tabel 20. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR	16,710,857,000,000
2	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR	5,536,000,000,000
3	PBS004	15-Feb-2037	6.10000%	IDR	16,497,857,000,000
4	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR	10,984,000,000,000
5	PBS006	15-Sep-2020	8.25000%	IDR	38,508,000,000,000
6	PBS007	15-Sep-2040	9.00000%	IDR	7,525,000,000,000
7	PBS010	25-Jan-2019	8.62500%	IDR	4,050,000,000,000
8	PBS011	15-Aug-2023	8.75000%	IDR	21,750,000,000,000
9	PBS012	15-Nov-2031	8.87500%	IDR	44,039,100,000,000
10	PBS013	15-May-2019	6.25000%	IDR	50,425,000,000,000
11	PBS014	15-May-2021	6.50000%	IDR	26,807,857,000,000
12	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR	5,243,000,000,000
13	PBS016	15-Mar-2020	6.25000%	IDR	39,525,000,000,000
14	PBS017	15-Oct-2025	6.12500%	IDR	6,375,000,000,000
15	PBS018	15-May-2028	7.62500%	IDR	4,000,000,000,000
16	PBS019	15-Sep-2023	8.25000%	IDR	3,950,000,000,000
17	PBS020	15-Oct-2027	9.00000%	IDR	2,250,000,000,000
18	PBS021	15-Nov-2026	8.50000%	IDR	1,500,000,000,000
19	PBSNT001	29-Aug-2023	8.00000%	IDR	1,500,000,000,000
				IDR	307,176,671,000,000

Grafik 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2018



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2018



i. *Sukuk* Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN. diversifikasi investor dan instrumen. memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah. dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu. Keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

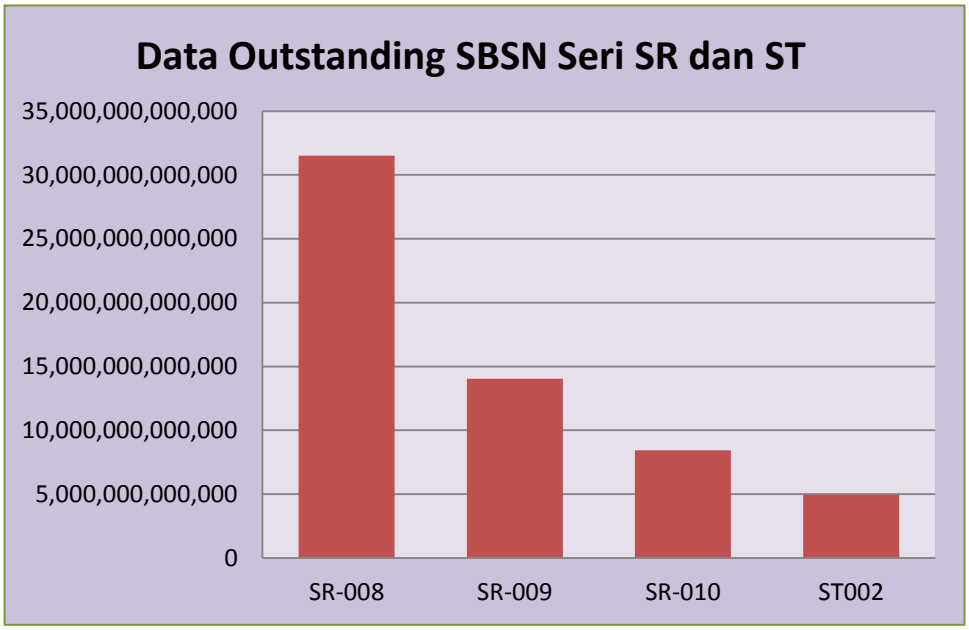
Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2018, pemerintah menerbitkan SR010 dan ST002 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 seri SR dan 1 seri ST dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel 16.

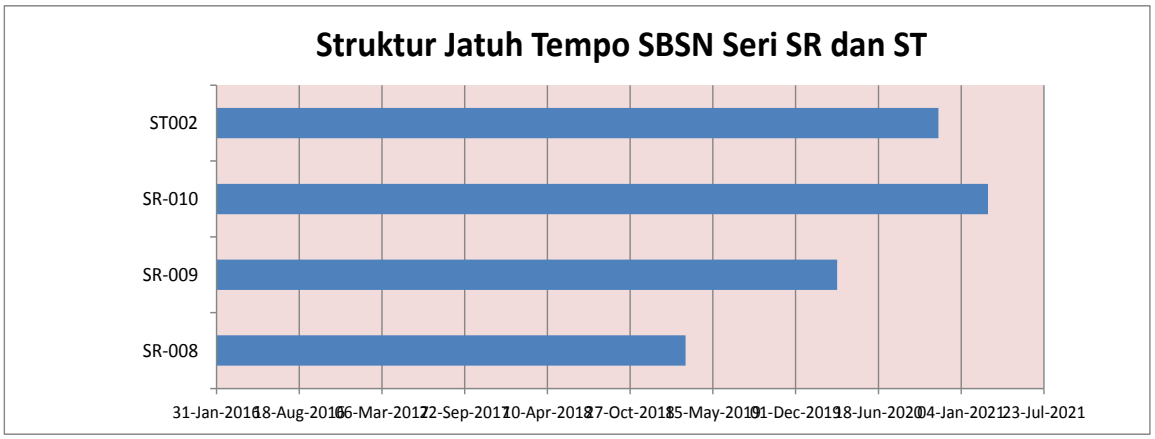
Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SR-008	10-Mar-2019	8.30000%	IDR	31,500,000,000,000
2	SR-009	10-Mar-2020	6.90000%	IDR	14,037,310,000,000
3	SR-010	10-Mar-2021	5.90000%	IDR	8,436,570,000,000
4	ST002	10-Nov-2020	8.30000%	IDR	4,945,682,000,000
Jumlah				IDR	58,919,562,000,000

Grafik 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018



Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018



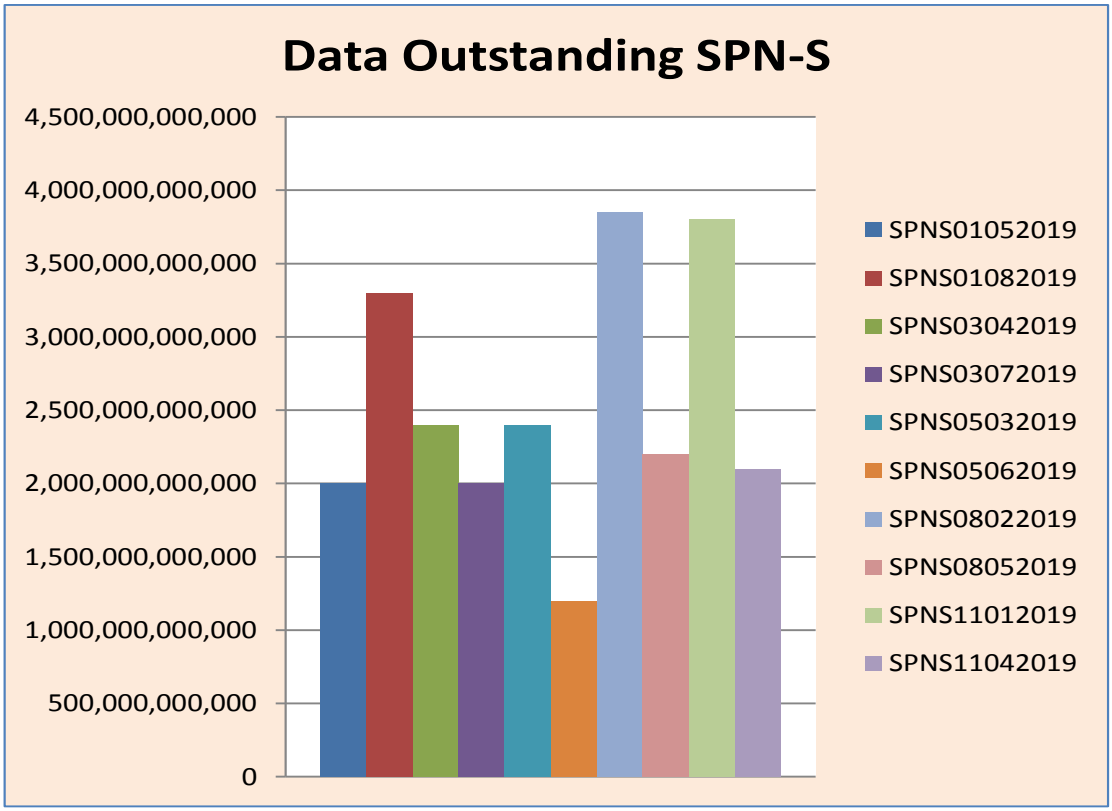
j. *Surat* Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 10 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp25.250.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

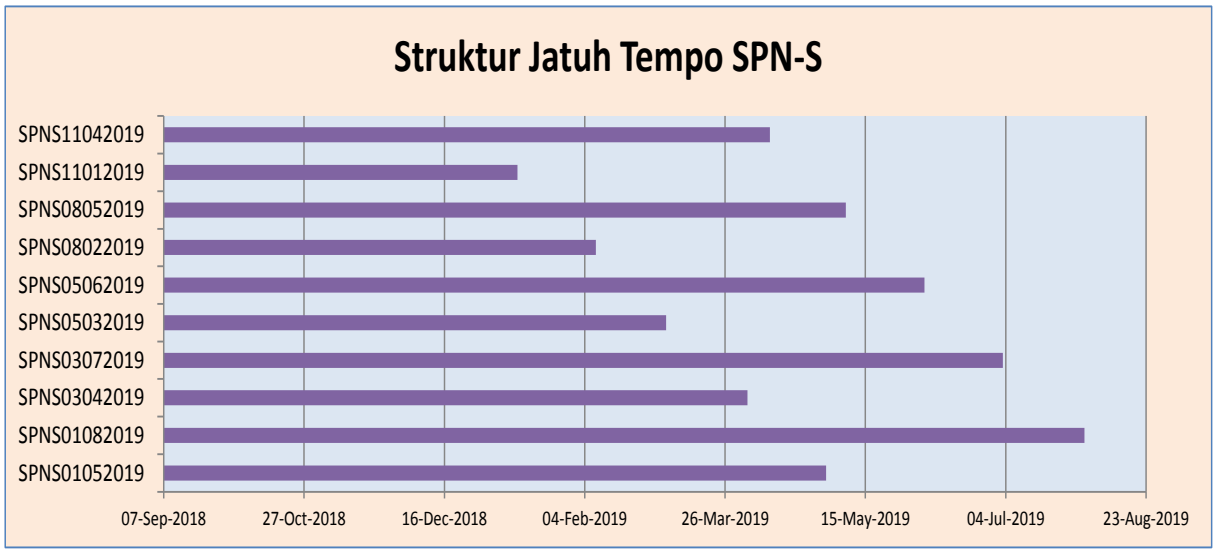
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SPNS01052019	01-May-2019	-	IDR	2,000,000,000,000
2	SPNS01082019	01-Aug-2019	-	IDR	3,300,000,000,000
3	SPNS03042019	03-Apr-2019	-	IDR	2,400,000,000,000
4	SPNS03072019	03-Jul-2019	-	IDR	2,000,000,000,000
5	SPNS05032019	05-Mar-2019	-	IDR	2,400,000,000,000
6	SPNS05062019	05-Jun-2019	-	IDR	1,200,000,000,000
7	SPNS08022019	08-Feb-2019	-	IDR	3,850,000,000,000
8	SPNS08052019	08-May-2019	-	IDR	2,200,000,000,000
9	SPNS11012019	11-Jan-2019	-	IDR	3,800,000,000,000
10	SPNS11042019	11-Apr-2019	-	IDR	2,100,000,000,000
Jumlah				IDR	25,250,000,000,000

Grafik 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018



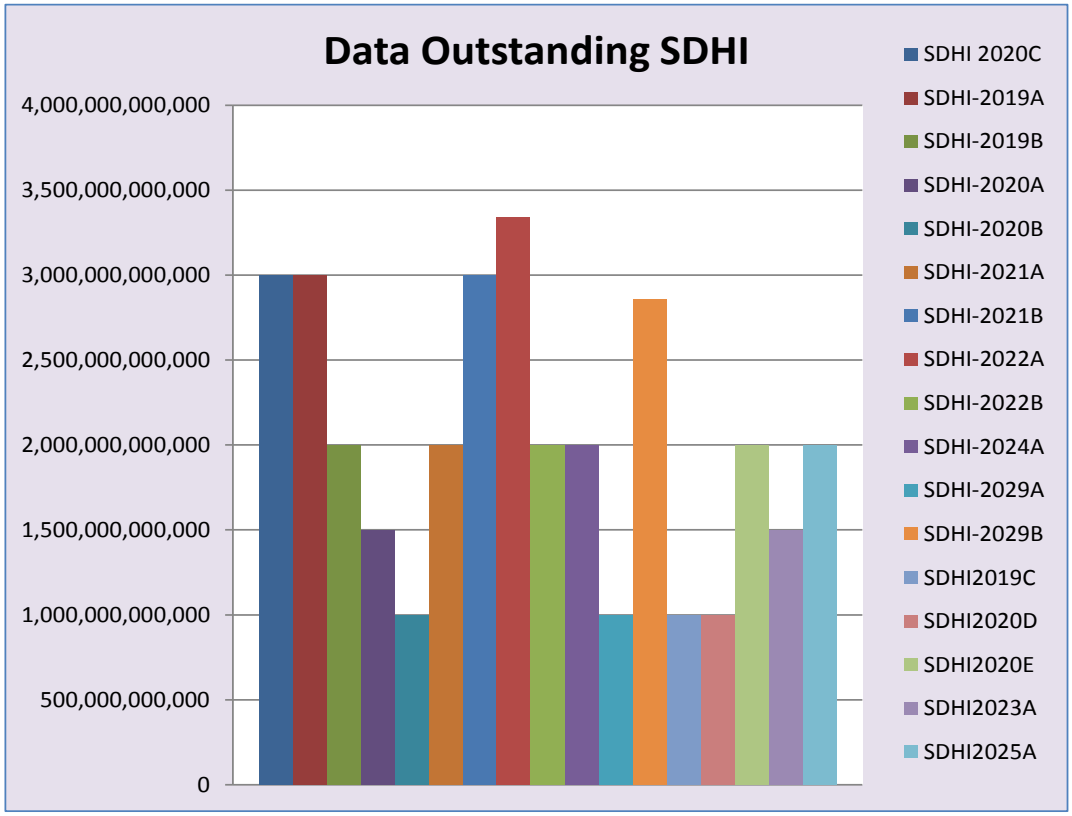
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada akhir Tahun 2018, terdapat 17 seri SDHI dengan nilai *outstanding* Rp34.197.000.000.000,-.

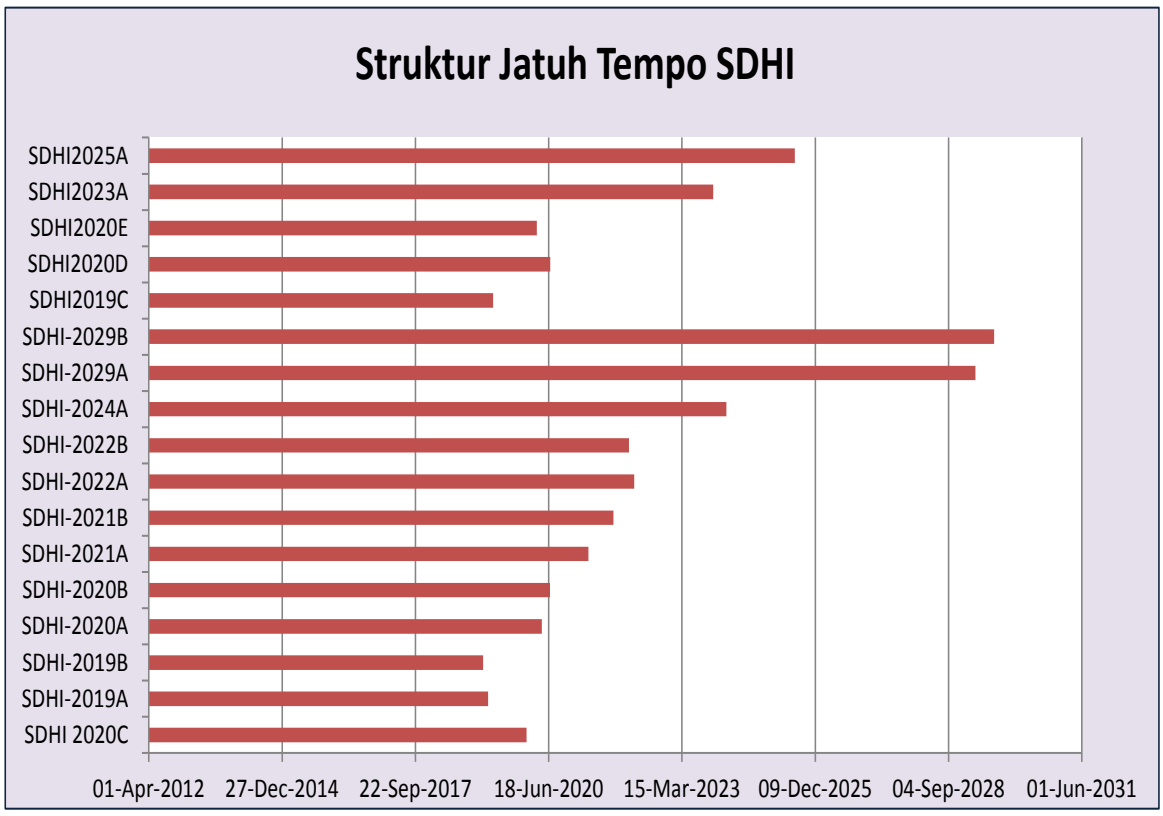
Tabel 23. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SDHI 2020C	03-Jan-2020	8.30000%	IDR	3,000,000,000,000
2	SDHI-2019A	21-Mar-2019	5.46000%	IDR	3,000,000,000,000
3	SDHI-2019B	11-Feb-2019	8.05000%	IDR	2,000,000,000,000
4	SDHI-2020A	27-Apr-2020	5.79000%	IDR	1,500,000,000,000
5	SDHI-2020B	28-Jun-2020	6.20000%	IDR	1,000,000,000,000
6	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000
7	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000
8	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000
9	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000
10	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000
11	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000
12	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000
13	SDHI2019C	27-Apr-2019	7.20000%	IDR	1,000,000,000,000
14	SDHI2020D	29-Jun-2020	8.20000%	IDR	1,000,000,000,000
15	SDHI2020E	21-Mar-2020	7.14000%	IDR	2,000,000,000,000
16	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000
17	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000
Jumlah				IDR	34,197,000,000,000

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018



Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 59 seri SBN valas dengan 38 seri memiliki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi valas), 14 seri dengan denominasi JP¥ dan 7 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 24 berikut.

Tabel 24. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
1	RI00190304	04-Mar-2019	11.62500%	USD	2,000,000,000
2	RI0035	12-Oct-2035	8.50000%	USD	1,600,000,000
3	RI0037	17-Feb-2037	6.62500%	USD	1,500,000,000
4	RI0038	17-Jan-2038	7.75000%	USD	2,000,000,000
5	RI0122	08-Jan-2022	3.70000%	USD	750,000,000
6	RI0123	11-Jan-2023	2.95000%	USD	1,000,000,000
7	RI0124	15-Jan-2024	5.87500%	USD	2,000,000,000
8	RI0125	15-Jan-2025	4.12500%	USD	2,000,000,000
9	RI0126	08-Jan-2026	4.75000%	USD	2,250,000,000
10	RI0127	08-Jan-2027	4.35000%	USD	1,250,000,000
11	RI0128	11-Jan-2028	3.50000%	USD	1,250,000,000
12	RI0142	17-Jan-2042	5.25000%	USD	2,250,000,000
13	RI0144	15-Jan-2044	6.75000%	USD	2,000,000,000
14	RI0145	15-Jan-2045	5.12500%	USD	2,000,000,000
15	RI0146	08-Jan-2046	5.95000%	USD	1,250,000,000
16	RI0147	08-Jan-2047	5.25000%	USD	1,500,000,000
17	RI0148	11-Jan-2048	4.35000%	USD	1,750,000,000
18	RI0320	13-Mar-2020	5.87500%	USD	2,000,000,000
19	RI0422	25-Apr-2022	3.75000%	USD	2,000,000,000
20	RI0423	15-Apr-2023	3.37500%	USD	1,500,000,000
21	RI0428	24-Apr-2028	4.10000%	USD	1,000,000,000
22	RI0443	15-Apr-2043	4.62500%	USD	1,500,000,000
23	RI0521	05-May-2021	4.87500%	USD	2,500,000,000
24	RI0727	18-Jul-2027	3.85000%	USD	1,000,000,000
25	RI0747	18-Jul-2047	4.75000%	USD	1,000,000,000
26	RI1023	17-Oct-2023	5.37500%	USD	1,000,000,000
27	USDFR0002	24-Jun-2026	4.05000%	USD	200,000,000
	Total Fixed Coupon			**USD**	**42,050,000,000**
	Total US Dollar Denominated *)			**IDR**	**608,926,050,000,000**
Japan Yen Denominated					
Fixed Coupon					
28	RIJPY0521	31-May-2021	0.67000%	JPY	49,000,000,000
29	RIJPY0523	31-May-2023	0.92000%	JPY	39,000,000,000
30	RIJPY0525	30-May-2025	1.07000%	JPY	3,500,000,000
31	RIJPY0528	31-May-2028	1.27000%	JPY	8,500,000,000
32	RIJPY0619	21-Jun-2019	0.83000%	JPY	62,000,000,000
33	RIJPY0620	08-Jun-2020	0.65000%	JPY	40,000,000,000
34	RIJPY0621	21-Jun-2021	1.16000%	JPY	38,000,000,000
35	RIJPY0622	08-Jun-2022	0.89000%	JPY	50,000,000,000
36	RIJPY0624	07-Jun-2024	1.04000%	JPY	10,000,000,000
37	RIJPY0719	29-Jul-2019	2.73000%	JPY	35,000,000,000
38	RIJPY0820	13-Aug-2020	1.38000%	JPY	22,500,000,000
39	RIJPY0825	13-Aug-2025	0.91000%	JPY	55,000,000,000
40	RIJPY1120	12-Nov-2020	1.60000%	JPY	60,000,000,000
41	RIJPY1122	22-Nov-2022	1.13000%	JPY	60,000,000,000
	Total Fixed Coupon			**JPY**	**532,500,000,000**
	Total Japan Yen Denominated *)			**IDR**	**69,818,790,750,000**
Euro Denominated					
Fixed Coupon					
42	RIEUR0425	24-Apr-2025	1.75000%	EUR	1,000,000,000
43	RIEUR0623	14-Jun-2023	2.62500%	EUR	1,500,000,000
44	RIEUR0628	14-Jun-2028	3.75000%	EUR	1,500,000,000
45	RIEUR0721	08-Jul-2021	2.87500%	EUR	1,000,000,000
46	RIEUR0724	18-Jul-2024	2.15000%	EUR	1,000,000,000
47	RIEUR0725	30-Jul-2025	3.37500%	EUR	1,250,000,000
48	EURFRNT0001	26-Apr-2020	0.90000%	EUR	50,000,000
	Total Fixed Coupon			**EUR**	**7,300,000,000**
	Total Euro Denominated *)			**IDR**	**120,886,175,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)			**IDR**	**799,631,015,750,000**
B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
49	SNI0322	29-Mar-2022	3.40000%	USD	1,000,000,000
50	SNI0323	01-Mar-2023	3.75000%	USD	1,250,000,000
51	SNI0327	29-Mar-2027	4.15000%	USD	2,000,000,000
52	SNI0328	01-Mar-2028	4.40000%	USD	1,750,000,000
53	SNI19	15-Mar-2019	6.12500%	USD	1,500,000,000
54	SNI21	29-Mar-2021	3.40000%	USD	750,000,000
55	SNI22	21-Nov-2022	3.30000%	USD	1,000,000,000
56	SNI24	10-Sep-2024	4.35000%	USD	1,500,000,000
57	SNI25	28-May-2025	4.32500%	USD	2,000,000,000
58	SNI26	29-Mar-2026	4.55000%	USD	1,750,000,000
59	USDPBS001	15-Nov-2021	4.05000%	USD	100,000,000
	Total Fixed Coupon			**USD**	**14,600,000,000**
	Total US Dollar Denominated *)			**IDR**	**211,422,600,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES (B)			**IDR**	**211,422,600,000,000**
GRAND TOTAL (A + B)				**IDR**	**1,011,053,615,750,000**

Notes:

*) Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is **14,481.00**
Assumed exchange rate for conversion (IDR/JPY) is **131.1151**
Assumed exchange rate for conversion (IDR/EUR) is **16,559.75**

III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 25.

Tabel 25. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2018

Saldo awal Th 2018 *(Original Currency)*	Mutasi 2018		Saldo Akhir tahun 2018 *(Original Currency)*	Saldo Akhir 2018 (Rupiah)
	Penerimaan	Pembayaran		
a	b	c	d	e
IDR 2,341,102,897,948,500.00	IDR 634,400,272,000,000.00	IDR 373,869,329,186,177.00	IDR 2,601,633,840,762,320.00	2,601,633,840,762,320.00
USD 51,450,000,000.00	USD 8,100,000,000.00	USD 2,900,000,000.00	USD 56,650,000,000.00	820,348,650,000,000.00
JPY 455,000,000,000.00	JPY 100,000,000,000.00	JPY 22,500,000,000.00	JPY 532,500,000,000.00	69,818,790,750,000.00
EUR 6,300,000,000.00	EUR 1,000,000,000.00	0.00	EUR 7,300,000,000.00	120,886,175,000,000.00
Jumlah				**3,612,687,456,512,320.00**

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2017 USD = 13.548,00 JPY = 120,22 EUR = 16.173,62
Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2018 USD = 14.481,00 JPY = 131,12 EUR = 16,559.75

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

Lampiran 14

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15-Nov-20	(168.270.917.000,00)	88.385.985.000,00
2	FR0034	15-Jun-21	(941.746.000,00)	51.737.802.000,00
3	FR0035	15-Jun-22	(7.358.964.000,00)	-
4	FR0037	15-Sep-26	(60.748.763.000,00)	-
5	FR0039	15-Aug-23	(16.454.792.000,00)	-
6	FR0040	15-Sep-25	(11.705.210.000,00)	609.333.102.000,00
7	FR0042	15-Jul-27	(108.291.531.000,00)	48.919.032.000,00
8	FR0043	15-Jul-22	(71.244.181.000,00)	36.970.671.000,00
9	FR0044	15-Sep-24	(617.843.580.000,00)	11.881.409.000,00
10	FR0045	15-May-37	(39.287.747.000,00)	655.998.320.000,00
11	FR0046	15-Jul-23	(797.798.701.000,00)	268.709.145.000,00
12	FR0047	15-Feb-28	(853.077.807.000,00)	32.433.952.000,00
13	FR0050	15-Jul-38	(470.080.715.000,00)	142.485.235.000,00
14	FR0052	15-Aug-30	(297.693.698.000,00)	111.928.972.000,00
15	FR0053	15-Jul-21	(197.914.460.000,00)	991.536.857.000,00
16	FR0054	15-Jul-31	(383.552.731.000,00)	394.520.901.000,00
17	FR0056	15-Sep-26	(797.582.111.000,00)	2.120.925.199.000,00
18	FR0057	15-May-41	(28.582.168.000,00)	1.169.714.224.000,00
19	FR0058	15-Jun-32	(43.632.332.000,00)	3.957.668.048.000,00
20	FR0059	15-May-27	(998.745.865.000,00)	1.209.077.539.000,00
21	FR0061	15-May-22	(254.289.063.000,00)	1.336.468.032.000,00
22	FR0062	15-Apr-42	(374.707.396.000,00)	110.170.285.000,00
23	FR0063	15-May-23	(3.484.225.388.000,00)	140.673.566.000,00
24	FR0064	15-May-28	(4.830.751.605.000,00)	139.172.980.000,00
25	FR0065	15-May-33	(4.137.516.218.000,00)	641.639.105.000,00
26	FR0067	15-Feb-44	(392.405.823.000,00)	1.027.689.567.000,00
27	FR0068	15-Mar-34	(2.129.894.069.000,00)	872.315.946.000,00
28	FR0070	15-Mar-24	(457.614.633.000,00)	1.745.793.795.000,00
29	FR0071	15-Mar-29	(193.930.573.000,00)	3.010.165.206.000,00
30	FR0072	15-May-36	(664.594.048.000,00)	2.797.394.782.000,00
31	FR0073	15-May-31	(196.631.835.000,00)	3.694.440.223.000,00
32	FR0074	15-Aug-32	(343.581.741.000,00)	513.011.016.000,00
33	FR0075	15-May-38	(1.966.671.363.000,00)	1.268.614.589.000,00
34	FR0076	15-May-48	(134.626.823.000,00)	11.286.314.000,00
35	FR0077	15-May-24	(228.594.616.000,00)	40.276.821.000,00
36	FR0078	15-May-29	(273.154.182.000,00)	74.709.344.000,00
Grand Total			**(26.033.997.395.000,00)**	**29.326.047.964.000,00**

Lampiran 15

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-35	-	638.241.056.000,00
2	RI0037	17-Feb-37	(131.245.719.000,00)	-
3	RI0038	17-Jan-38	(268.220.543.000,00)	-
4	RI0122	8-Jan-22	(14.009.586.000,00)	-
5	RI0123	11-Jan-23	(25.333.239.000,00)	-
6	RI0124	15-Jan-24	(68.065.006.000,00)	-
7	RI0125	15-Jan-25	(92.539.564.000,00)	-
8	RI0126	8-Jan-26	(87.306.574.000,00)	-
9	RI0127	8-Jan-27	(54.712.559.000,00)	-
10	RI0128	11-Jan-28	(64.269.898.000,00)	-
11	RI0142	17-Jan-42	(228.085.213.000,00)	165.138.384.000,00
12	RI0144	15-Jan-44	(255.247.974.000,00)	-
13	RI0145	15-Jan-45	(248.174.156.000,00)	-
14	RI0146	8-Jan-46	(109.380.352.000,00)	-
15	RI0147	8-Jan-47	(142.063.579.000,00)	-
16	RI0148	11-Jan-48	(190.720.343.000,00)	-
17	RI0320	13-Mar-20	(20.958.997.000,00)	-
18	RI0422	25-Apr-22	(50.221.085.000,00)	-
19	RI0423	15-Apr-23	(65.391.027.000,00)	-
20	RI0428	24-Apr-28	(31.585.610.000,00)	-
21	RI0443	15-Apr-43	(234.427.085.000,00)	-
22	RI0521	5-May-21	(87.616.603.000,00)	-
23	RI0727	18-Jul-27	(46.764.185.000,00)	-
24	RI0747	18-Jul-47	(100.210.008.000,00)	-
25	RI1023	17-Oct-23	(28.649.854.000,00)	-
26	RIEUR0425	24-Apr-25	(29.995.899.000,00)	-
27	RIEUR0623	14-Jun-23	(132.183.951.000,00)	-
28	RIEUR0628	14-Jun-28	(260.783.425.000,00)	-
29	RIEUR0721	8-Jul-21	(36.065.876.000,00)	-
30	RIEUR0724	18-Jul-24	(21.895.618.000,00)	-
31	RIEUR0725	30-Jul-25	(181.427.248.000,00)	-
Grand Total			**(3.307.550.776.000,00)**	**803.379.440.000,00**

Lampiran 16

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(5.411.444.000,00)	14.624.904.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(8.932.948.000,00)	10.964.453.000,00
3	IFR0008	15-Mar-20	(513.200.000,00)	473.762.000,00
4	IFR0010	15-Feb-36	(15.932.545.000,00)	267.534.760.000,00
5	PBS002	15-Jan-22	(575.544.125.000,00)	-
6	PBS003	15-Jan-27	(426.800.270.000,00)	2.244.233.000,00
7	PBS004	15-Feb-37	(1.329.182.458.000,00)	-
8	PBS005	15-Apr-43	(1.775.928.688.000,00)	-
9	PBS006	15-Sep-20	(53.334.762.000,00)	361.598.179.000,00
10	PBS007	15-Sep-40	(14.387.962.000,00)	351.937.481.000,00
11	PBS011	15-Aug-23	(4.546.572.000,00)	1.056.141.009.000,00
12	PBS012	15-Nov-31	(63.574.887.000,00)	2.842.526.304.000,00
13	PBS014	15-May-21	(334.686.140.000,00)	48.200.014.000,00
14	PBS015	15-Jul-47	(431.518.786.000,00)	47.672.458.000,00
15	PBS016	15-Mar-20	(145.244.502.000,00)	138.467.859.000,00
16	PBS017	15-Oct-25	(252.777.095.000,00)	-
17	PBS018	15-May-28	(66.034.006.000,00)	-
18	PBS019	15-Sep-23	(55.487.558.000,00)	-
19	PBS020	15-Oct-27	(23.697.662.000,00)	4.486.301.000,00
20	PBS021	15-Nov-26	(4.352.651.000,00)	-
Grand Total			**(5.587.888.261.000,00)**	**5.146.871.717.000,00**

Lampiran 17

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0036	15-Sep-19	(9.816.838.000,00)	11.082.684.000,00
2	FR0069	15-Apr-19	(7.264.240.000,00)	46.952.537.000,00
Grand Total			(17.081.078.000,00)	58.035.221.000,00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	PBS010	25-Jan-19	(48.694.000,00)	1.613.473.000,00
2	PBS013	15-May-19	(80.294.517.000,00)	18.617.782.000,00
Grand Total			(80.343.211.000,00)	20.231.255.000,00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas
31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI001903	4-Mar-19	(3.827.505.000,00)	-
Grand Total			(3.827.505.000,00)	-

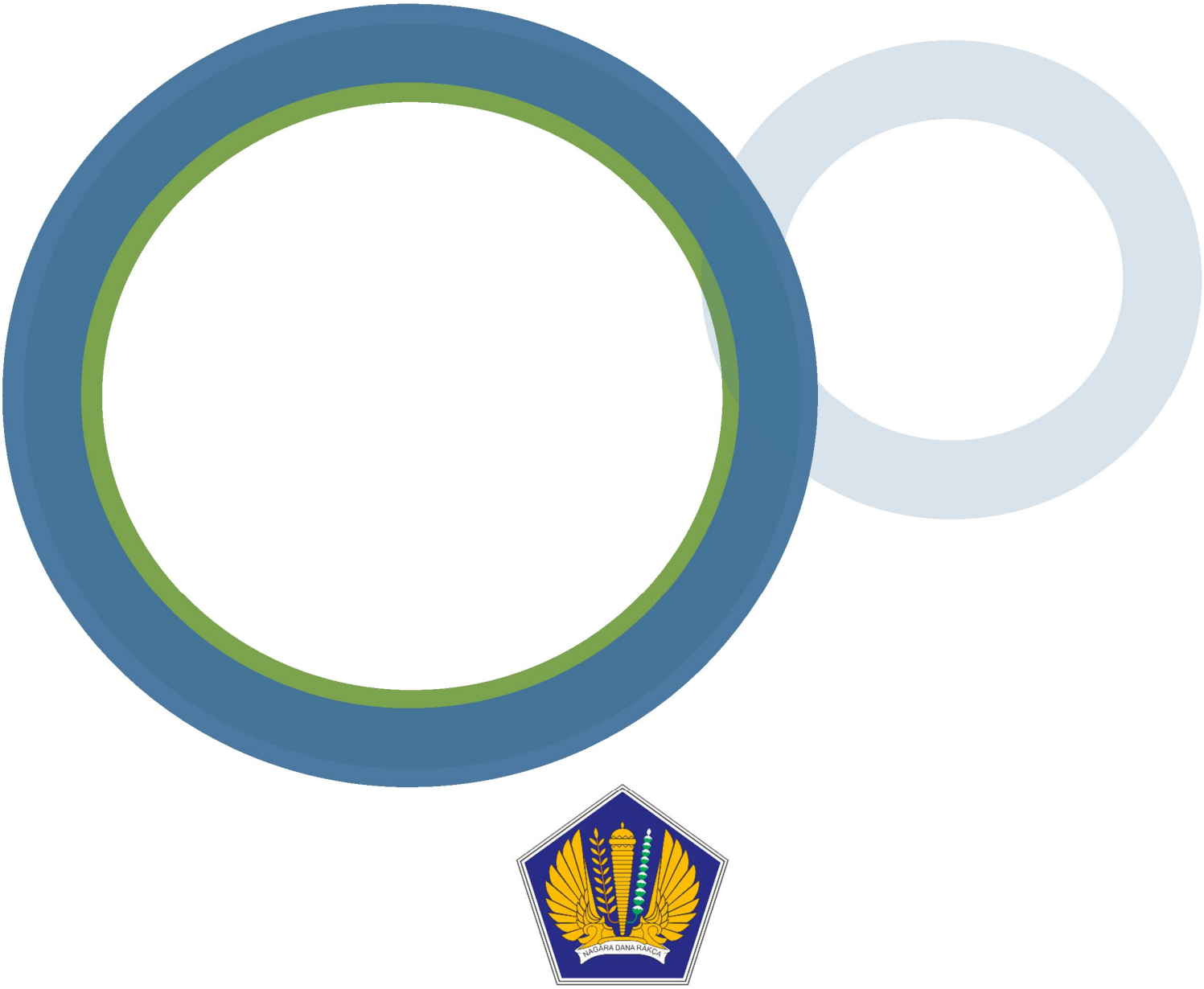
Lampiran 18

Unamortized Discount / Premium SPN
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPN03190110	10-Jan-19	(4.692.522.000,00)	-
2	SPN03190124	24-Jan-19	(9.794.703.000,00)	-
3	SPN03190207	7-Feb-19	(5.911.714.000,00)	-
4	SPN03190222	22-Feb-19	(8.296.073.000,00)	-
5	SPN12190104	4-Jan-19	(5.191.189.000,00)	-
6	SPN12190131	31-Jan-19	(19.942.151.000,00)	-
7	SPN12190214	14-Feb-19	(81.340.688.000,00)	-
8	SPN12190314	14-Mar-19	(86.925.025.000,00)	-
9	SPN12190411	11-Apr-19	(108.345.425.000,00)	-
10	SPN12190606	6-Jun-19	(128.431.687.000,00)	-
11	SPN12190704	4-Jul-19	(198.937.353.000,00)	-
12	SPN12190801	1-Aug-19	(133.636.545.000,00)	-
13	SPN12190829	29-Aug-19	(42.343.899.000,00)	-
14	SPN12190913	13-Sep-19	(188.411.147.000,00)	-
15	SPN12191010	10-Oct-19	(139.543.529.000,00)	-
16	SPN12191107	7-Nov-19	(48.236.613.000,00)	-
Grand Total			(1.209.980.263.000,00)	

Unamortized Discount / Premium SPN Syariah
Per 31 Desember 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPNS01052019	1-May-19	(42.824.421.000,00)	-
2	SPNS01082019	1-Aug-19	(127.338.370.000,00)	-
3	SPNS03042019	3-Apr-19	(39.899.830.000,00)	-
4	SPNS03072019	3-Jul-19	(67.658.393.000,00)	-
5	SPNS05032019	5-Mar-19	(26.798.529.000,00)	-
6	SPNS05062019	5-Jun-19	(33.759.260.000,00)	-
7	SPNS08022019	8-Feb-19	(25.131.488.000,00)	-
8	SPNS08052019	8-May-19	(47.884.153.000,00)	-
9	SPNS11012019	11-Jan-19	(6.724.466.000,00)	-
10	SPNS11042019	11-Apr-19	(36.041.021.000,00)	-
Grand Total			(454.059.931.000,00)	-



Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

2018

Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat